PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD DIY 2026





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2022 - 2027.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    b. prioritas pembangunan Daerah; dan
    c. rencana kerja dan pendanaannya.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
    BAB 1 : PENDAHULUAN
    BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
    BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 8 : PENUTUP

(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
b. pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyelaraskan prioritas pembangunan provinsi; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hary Setiawan, S.H., M.H.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen 1-9
1.4 Maksud dan Tujuan 1-10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 1-11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1
2.1 Kondisi Umum Daerah 2-2
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-42
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD DIY Sampai Dengan Tahun Berkenaan (TRIWULAN I Tahun Anggaran 2025) 2-319
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-764
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-14
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4-1
4.2 Perumusan Tema Pembangunan 4-4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.3 Prioritas Pembangunan tahun 2026 4-15
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4-131
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5-1
5.1 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Se-DIY 5-1
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan 5-4
BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 6-1
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7-1
7.1 Indikator Kinerja Utama 7-2
7.2 Indikator Kinerja Daerah 7-3
BAB 8 PENUTUP 8-1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	2-6
Tabel 2- 2	Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	2-6
Tabel 2- 3	Potensi Ketersediaan Air pada 4 (Empat) DAS yang ada di wilayah DIY Tahun 2020-2024 (juta m^3)	2-19
Tabel 2- 4	Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2020-2024(m3/detik)	2-20
Tabel 2- 5	Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS	2-20
Tabel 2- 6	Penggunaan lahan di DIY Tahun 2016 dan Tahun 2021	2-24
Tabel 2- 7	Penggunaan lahan di DIY Tahun 2021	2-25
Tabel 2- 8	Luas Tambak Garam di Daerah Istimewa Yogyakarta	2-28
Tabel 2- 9	Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022-2026	2-36
Tabel 2- 10	Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2019-2024	2-36
Tabel 2- 11	Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 – 2024	2-37
Tabel 2- 12	Korban Bencana DIY Tahun 2018-2024	2-37
Tabel 2- 13	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2019 – 2024	2-38
Tabel 2- 14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019- 2024	2-40
Tabel 2- 15	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024	2-41
Tabel 2- 16	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019 - 2024 (%)	2-43
Tabel 2- 17	Daftar 15 Kapanewonan dan 3 Kemantren Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2025	2-47
Tabel 2- 18	Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2019 – 2024 (Maret 2019 – Maret 2024)	2-49
Tabel 2- 19	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, Maret 2024 (%)	2-49
Tabel 2- 20	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Juta Rp)	2-52
Tabel 2- 21	PDRB dan PDRB Per Kapita DIY Tahun 2020 – 2024	2-53
Tabel 2- 22	Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2020-2024	2-54
Tabel 2- 23	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2020-2024 (juta Rupiah)	2-56

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 24 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2020-2024 2-57
Tabel 2- 25 Laju Inflasi DIY Tahun 2019-2024 2-57
Tabel 2- 26 Perkembangan Balita *Stunting* Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024 (Persen) 2-71
Tabel 2- 27 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023 2-81
Tabel 2- 28 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2018-2023 2-82
Tabel 2- 29 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2023 2-83
Tabel 2- 30 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2018-2023 2-84
Tabel 2- 31 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 2-86
Tabel 2- 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2020-2024 di tiap kabupaten/kota DIY Tahun 2020-2024 2-89
Tabel 2- 33 Distribusi Jumlah Penduduk Yang Bersekolah menurut Jenjang Usia dan Kelompok Pendidikan Formal Tahun 2024 2-91
Tabel 2- 34 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK, Tahun 2023-2024 2-92
Tabel 2- 35 Jumlah Puskesmas di DIY, Tahun 2020 - 2024 2-95
Tabel 2- 36 Jumlah Rumah Sakit di DIY berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021-2024 2-96
Tabel 2- 37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR di DIY Tahun 2022-2024 2-97
Tabel 2- 38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2020-2024 2-97
Tabel 2- 39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, Tahun 2020-2024 2-99
Tabel 2- 40 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024 2-99
Tabel 2- 41 Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY dan Nasional Tahun berdasarkan Riskesdas 2013, Riskesdas 2023, dan SKI 2023 2-101
Tabel 2- 42 Prasarana Irigasi DIY Tahun 2020-2024 2-105
Tabel 2- 43 Ketersediaan Air pada tiap DAS di DIY (juta m^3) 2-105
Tabel 2- 44 Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2024 2-106
Tabel 2- 45 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2024 2-108
Tabel 2- 46 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga 2-108
Tabel 2- 47 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2024 2-109

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 48 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah DIY Tahun 2019-2023 2-109
Tabel 2- 49 Data Timbulan Sampah untuk Wilayah Kartamantul Tahun 2020 sampai 2024 2-111
Tabel 2- 50 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2020-2024 2-113
Tabel 2- 51 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2022-2024 2-116
Tabel 2- 52 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2024 2-117
Tabel 2- 53 Perwujudan Struktur dan Pola Ruang pada 18 SRS Tahun 2024 2-120
Tabel 2- 54 Penanganan PSU Tahun 2024 2-122
Tabel 2- 55 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha) 2-123
Tabel 2- 56 Jumlah Kelompok Jaga Warga DIY 2020-2024 2-126
Tabel 2- 57 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2019-2024 2-127
Tabel 2- 58 Rekapitulasi Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama DIY dan Nasional 2-130
Tabel 2- 59 Tingkat perkembangannya IDI berdasarkan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. 2-131
Tabel 2- 60 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2-132
Tabel 2- 61 Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY 2-133
Tabel 2- 62 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun 2-134
Tabel 2- 63 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2020-2024 2-135
Tabel 2- 64 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2020-2024 2-137
Tabel 2- 65 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2020-2024 2-138
Tabel 2- 66 Perkembangan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2020−2024 (ribu orang) 2-139
Tabel 2- 67 Capaian Komponen IPM Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022-2023 2-149
Tabel 2- 68 Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya 2-151
Tabel 2- 69 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2020-2024 Menurut Jenis Kelamin 2-153
Tabel 2- 70 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY,Tahun 2019-2024 2-153
Tabel 2- 71 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2024 2-159
Tabel 2- 72 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2020-2024 2-160
Tabel 2- 73 Capaian Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2019-2024 2-163

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 74 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (RPJMD 2017-2022) dan Capaian Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang melalui indikator Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (RPJMD 2022 -2027) 2-164
Tabel 2- 75 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY 2-165
Tabel 2- 76 Inventarisasi Tanah *Enclave* di DIY 2-166
Tabel 2- 77 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan 2-171
Tabel 2- 78 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2024 2-172
Tabel 2- 79 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2017 - 2024 (Orang) 2-173
Tabel 2- 80 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2023 2-174
Tabel 2- 81 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2023 2-174
Tabel 2- 82 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2020-2024 2-175
Tabel 2- 83 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2-177
Tabel 2- 84 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2019-2023 2-177
Tabel 2- 85 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2019-2024 2-178
Tabel 2- 86 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa 2-179
Tabel 2- 87 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2024 2-179
Tabel 2- 88 Jumlah Bangkitan dan Tarikan Perjalanan di DIY 2-187
Tabel 2- 89 Tabel Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2021 dan 2024 2-191
Tabel 2- 90 Tabel Rincian Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2024 2-191
Tabel 2- 91 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2024 2-197
Tabel 2- 92 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2024 2-198
Tabel 2- 93 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2019-2024 2-199
Tabel 2- 94 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Tahun 2024 2-200
Tabel 2- 95 Jumlah Kejadian Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 2-200
Tabel 2- 96 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan 2-201
Tabel 2- 97 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2024 2-202
Tabel 2- 98 Rekapitulasi Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 – 2022 2-203
Tabel 2- 99 Panjang Kabel Fiber Optik di DIY Tahun 2013-2024 2-205

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 100 Keterhubungan Kalurahan/Kelurahan Dalam Jaringan Intra Pemerintah....2-206
Tabel 2- 101 Jaringan Telekomunikasi di DIY Tahun 2020-2024....2-207
Tabel 2- 102 Perbandingan Nilai Indeks SPBE Pemda DIY Hasil Pemantauan Tahun 2022 Dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023....2-207
Tabel 2- 103 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020....2-208
Tabel 2- 104 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021....2-209
Tabel 2- 105 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022....2-209
Tabel 2- 106 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2023....2-210
Tabel 2- 107 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2020-2024....2-212
Tabel 2- 108 Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024....2-214
Tabel 2- 109 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2020-2024....2-215
Tabel 2- 110 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY....2-219
Tabel 2- 111 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data....2-221
Tabel 2- 112 Penyediaan Data Statistik Tahun 2024....2-223
Tabel 2- 113 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY....2-226
Tabel 2- 114 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2020-2024....2-228
Tabel 2- 115 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2020-2024....2-230
Tabel 2- 116 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2023....2-233
Tabel 2- 117 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024....2-233
Tabel 2- 118 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2020-2024....2-234
Tabel 2- 119 Jumlah Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 454/Kep/2023 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya Tahun 2019 - 2023....2-235
Tabel 2- 120 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)....2-236
Tabel 2- 121 Data Jumlah Perpustakaan Tahun 2020 - 2024....2-237
Tabel 2- 122 Jumlah Pustakawan Tahun 2020 - 2024....2-238
Tabel 2- 123 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah DIY Tahun 2021–2025....2-238
Tabel 2- 124 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DIY Tahun 2022-2024....2-240
Tabel 2- 125 Tabel Data Kearsipan DIY Tahun 2020-2024....2-241

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 126 Tabel Perkembangan Perjalanan Wisnus Berdasarkan Asal dan Tujuan, Januari-Oktober 2024 (ribu perjalanan) Tujuan, Januari-Oktober 2024 (ribu perjalanan) 2-244
Tabel 2- 127 Tabel Indikator Kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif dalam RPJMN 2025-2029 2-247
Tabel 2- 128 Tabel Rekapitulasi Daftar Potensi Industri Kecil Menengah (Industri Kreatif) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 2-249
Tabel 2- 129 Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif BISMA di DIY tahun 2019 2-250
Tabel 2- 130 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Jawa-Bali pada Tahun 2018-2022 2-250
Tabel 2- 131 Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2024 (ton) 2-252
Tabel 2- 132 Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2020-2024 2-252
Tabel 2- 133 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2020-2024 2-253
Tabel 2- 134 Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2024 (ekor) 2-254
Tabel 2- 135 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha) 2-255
Tabel 2- 136 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur Tahun 2024 2-257
Tabel 2- 137 Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN 2-258
Tabel 2- 138 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2023 2-260
Tabel 2- 139 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2020-2024 2-260
Tabel 2- 140 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2020 – 2024 2-262
Tabel 2- 141 Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan 2-264
Tabel 2- 142 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2020-2024 (dalam juta dolar AS) 2-265
Tabel 2- 143 Tabel pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY Tahun 2020-2024 2-272
Tabel 2- 144 Tabel Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Dan Gender Tahun 2019-2023 2-273
Tabel 2- 145 Produksi Perikanan DIY Tahun 2020-2024 (Ton) 2-275
Tabel 2- 146 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2020-2024 2-276
Tabel 2- 147 Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024 2-276
Tabel 2- 148 Jumlah Bantuan dan Layanan Hukum Tahun 2020-2024 2-277
Tabel 2- 149 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY 2-280
Tabel 2- 150 Survei Kepuasan Masyarakat 2018-2024 2-281
Tabel 2- 151 Perkembangan Produk Hukum DPRD DIY yang Dihasilkan, 2020-2024 2-282

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 152 Jumlah Fasilitasi Fungsi DPRD DIY Tahun 2019-2023 2-283
Tabel 2- 153 Kinerja Keuangan DIY, 2020-2024 2-286
Tabel 2- 154 Perkembangan PAD DIY dan Komponen Pembentuknya, 2019-2023 2-286
Tabel 2- 155 Perkembangan ROA menurut BUMD DIY Tahun 2019-2023 2-288
Tabel 2- 156 Proporsi PAD dan Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah2018-2023 (%) 2-290
Tabel 2- 157 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2024 2-290
Tabel 2- 158 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2019-2024 2-293
Tabel 2- 159 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2023 2-294
Tabel 2- 160 Tata Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024 2-294
Tabel 2- 161 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 2-295
Tabel 2- 162 Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019-2023 2-299
Tabel 2- 163 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022 2-307
Tabel 2- 164 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2019-2023 2-311
Tabel 2- 165 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2019-2023 (dalam persen) 2-312
Tabel 2- 166 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS) 2-312
Tabel 2- 167 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023 2-313
Tabel 2- 168 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023 2-313
Tabel 2- 169 Data Kasus Kejahatan Jalanandi DIY Tahun 2018-2023 2-314
Tabel 2- 170 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2020-2024 2-315
Tabel 2- 171 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024 2-315
Tabel 2- 172 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2020-2024 2-316
Tabel 2- 173 Indeks Daya Saing Daerah DIY Menurut 12 Pilar tahun 2022-2024 2-316
Tabel 2- 174 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2020-2024 2-317
Tabel 2- 175 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah DIY Tahun 2025 2-320
Tabel 2- 176 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2024 serta Capaian 2025, Triwulan I 2-323

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 177 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 serta Capaian 2025, Triwulan I 2-324
Tabel 2- 178 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024 serta Capaian 2025 Triwulan I 2-326
Tabel 2- 179 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 serta Capaian Tahun 2024 2-327
Tabel 2- 180 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY 2-328
Tabel 2- 181 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2-331
Tabel 2- 182 Kategori Nilai IKLH secara Nasional 2-333
Tabel 2- 183 Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2024 2-333
Tabel 2- 184 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2023 2-334
Tabel 2- 185 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024 2-334
Tabel 2- 186 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah DIY sd. Triwulan I Tahun 2025 2-336
Tabel 2- 187 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020 – 2024 (%) 2-339
Tabel 2- 188 Target dan Capaian Indikator Sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-339
Tabel 2- 189 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-340
Tabel 2- 190 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (y-o-y) Triwulan III 2-341
Tabel 2- 191 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-342
Tabel 2- 192 Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-343
Tabel 2- 193 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025 2-346
Tabel 2- 194 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-347
Tabel 2- 195 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024 2-350
Tabel 2- 196 IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024 2-351
Tabel 2- 197 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-352
Tabel 2- 198 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2023 2-353
Tabel 2- 199 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-354
Tabel 2- 200 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2023 dan 2024 2-355
Tabel 2- 201 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Opini BPK Tahun 2024 serta Tahun 2023 2-356

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 202 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 serta Tahun 2023 2-357
Tabel 2- 203 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2023-2024 2-358
Tabel 2- 204 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 serta Tahun 2023 2-359
Tabel 2- 205 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY 2-360
Tabel 2- 206 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 serta Tahun 2024 2-362
Tabel 2- 207 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2024 serta Tahun 2023 2-364
Tabel 2- 208 Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025 2-365
Tabel 2- 209 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 s.d. Triwulan I 2-370
Tabel 2- 210 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan s.d. Triwulan I Tahun 2025 2-383
Tabel 2- 211 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2024 (%) 2-765
Tabel 2- 212 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2019 – 2023. 2-804
Tabel 2- 213 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 – 2023 2-807
Tabel 2- 214 Status IDM Tahun 2023 Menurut Kalurahan di DIY 2-833
Tabel 2- 215 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2023 2-836
Tabel 2- 216 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2023 2-837
Tabel 2- 217 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 2-841
Tabel 2- 218 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2025-2035 2-842
Tabel 2- 219 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bantul 2-843
Tabel 2- 220 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2-846
Tabel 2- 221 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Sleman 2-848
Tabel 2- 222 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2-850
Tabel 2- 223 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta 2-853
Tabel 2- 224 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja Tahun 2024 2-855
Tabel 2- 225 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2024 2-857
Tabel 2- 226 Indeks Fatalitas Kecelakaan di DIY tahun 2017 - 2022 2-860
Tabel 2- 227 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2022 2-861

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 228 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Wates Tahun 2022 - 2024 2-863
Tabel 2- 229 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Jombor Tahun 2022 – 2024 2-865

Tabel 3- 1 PDRB ADHK DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020 – 2024 3-5
Tabel 3- 2 Struktur PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (%), 2020 – 2024 3-5
Tabel 3- 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 – 2024 3-7
Tabel 3- 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2019 - 2024 (Maret) 3-7
Tabel 3- 5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026 3-10
Tabel 3- 6 Target Ekonomi Makro antara Dokumen KEMPPKF dengan Proyeksi Makro Ekonomi DIY Tahun 2026 3-14
Tabel 3- 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027 (Rupiah) 3-19
Tabel 3- 8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2027 (Rupiah) 3-27
Tabel 3- 9 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027 (Rupiah) 3-29
Tabel 3- 10 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Rupiah) 3-31

Tabel 4- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 4-4
Tabel 4- 2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 4-8
Tabel 4- 3 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 4-16
Tabel 4- 4 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah (RPJMN dan RKP) 4-17
Tabel 4- 5 Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) 4-25
Tabel 4- 6 Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah dengan Highlight Intervensi 4-41
Tabel 4- 7 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2026 4-71
Tabel 4- 8 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Presiden dalam RKPD Tahun 2026 4-75
Tabel 4- 9 Keselarasan Target RKPD DIY Tahun 2026 terhadap Target Sasaran Makro RKP Tahun 2026 dan Penyelarasan Target Dokumen Jangka Menengah DIY 4-87

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 10 Penyelarasan Target Dokumen Jangka Menengah DIY di Tahun 2026 terhadap Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMN 4-88
Tabel 4- 11 Target Indikator Makro Daerah Hasil Rakortekrenbang 4-90
Tabel 4- 12 Target Indikator *Outcome* Hasil Pembahasam Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2025 4-91

Tabel 5- 1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta Tahun 2026 5-1
Tabel 5- 2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul Tahun 2026 5-2
Tabel 5- 3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 5-3
Tabel 5- 4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 5-3
Tabel 5- 5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman Tahun 2026 5-4
Tabel 5- 6 Capaian Kinerja Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022 5-11
Tabel 5- 7 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 5-12
Tabel 5- 8 Capaian Kinerja Program Pemda Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2023 berdasarkan RPD 5-14
Tabel 5- 9 Capaian Kinerja Program Pemda Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2023-2024 berdasarkan RPJMD 2022-2027 5-14

Tabel 6-1 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Daerah DIY Tahun 2026 6-1
Tabel 6-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Bidang Urusan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 6-7
Tabel 6-3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2026 6-11
Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY Tahun 2026 7-2
Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2026 7-3

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY 1-5
Gambar 1- 2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah 1-10

Gambar 2- 1 Peta Administrasi DIY 2-5
Gambar 2- 2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY 2-7
Gambar 2- 3 Peta Topografi DIY 2-8
Gambar 2- 4 Peta Kemiringan Lereng DIY 2-10
Gambar 2- 5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY 2-11
Gambar 2- 6 Peta Curah Hujan DIY 2-12
Gambar 2- 7 Peta Geologi DIY 2-15
Gambar 2- 8 Peta Jenis Tanah DIY 2-17
Gambar 2- 9 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY 2-18
Gambar 2- 10 Peta Ketersediaan Air Tanah DIY 2-22
Gambar 2- 11 Peta Cekungan Air Tanah DIY 2-22
Gambar 2- 12 Peta Penggunaan Lahan DIY 2-23
Gambar 2- 13 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573: Samudera Hindia (Selatan Jawa S.D. Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu Dan Laut Timur Bag.Barat) 2-27
Gambar 2- 14 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2023 – 2043 2-31
Gambar 2- 15 Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2023 – 2043 2-32
Gambar 2- 16 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta 2-35
Gambar 2- 17 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota 2-38
Gambar 2- 18 Komposisi Penduduk DIY semester 1 Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 2-39
Gambar 2- 19 Peta Kepadatan Penduduk DIY 2-41
Gambar 2- 20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2019–Maret 2024 2-43
Gambar 2- 21 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2019 – Maret 2024 2-44
Gambar 2- 22 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024 2-45

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2- 23 Peta Sebaran Kecamatan dan Kemantren Prioritas Kemiskinan di DIY Tahun 2025 2-48
Gambar 2- 24 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2019 – Maret 2024) 2-51
Gambar 2- 25 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2020-2024 2-55
Gambar 2- 26 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2019 – Maret 2024 2-55
Gambar 2- 27 Indeks Williamson DIY Tahun 2020 – 2024 2-56
Gambar 2- 28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2020-2024 2-59
Gambar 2- 29 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2024 2-60
Gambar 2- 30 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024 2-61
Gambar 2- 31 Perkembangan AMH DIY Tahun 2019 – 2024 2-63
Gambar 2- 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2019-2024 2-64
Gambar 2- 33 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2019-2024 2-65
Gambar 2- 34 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2019-2024 2-66
Gambar 2- 35 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024 2-67
Gambar 2- 36 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2019 s.d 2024 2-68
Gambar 2- 37 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2019-2024 (Balita) 2-69
Gambar 2- 38 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY Tahun 2019-2024 2-70
Gambar 2- 39 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di DIY Tahun 2019-2024 2-72
Gambar 2- 40 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi di DIY Tahun 2020-2024 (Anak) 2-73
Gambar 2- 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2012-2024 (Persen) 2-75
Gambar 2- 42 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2019-2024 (Persen) 2-76
Gambar 2- 43 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Tahun 2022-2024 (Persen) 2-77
Gambar 2- 44 Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal, Tahun 2022 – 2024 (Persen) 2-78
Gambar 2- 45 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019 – 2024 (Persen) 2-79
Gambar 2- 46 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 2-87
Gambar 2- 47 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 2-88

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2- 48 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2019-2023 2-90
Gambar 2- 49 Persentase SMA/SMK dengan Minimal Terakreditasi Bdi DIY Tahun 2020-2024 2-93
Gambar 2- 50 Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2020– 2024 2-95
Gambar 2- 51 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY, Tahun 2020-2024 2-98
Gambar 2- 52 Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang di DIY Tahun 2020-2024 2-100
Gambar 2- 53 Perkembangan Jumlah kasus dan CFR DBD DIY Tahun 2013-2023 2-103
Gambar 2- 54 Neraca Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2020-2024 2-110
Gambar 2- 55 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi 2-112
Gambar 2- 56 Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate) di DIY Tahun 2018-2023 2-128
Gambar 2- 57 Proporsi Penduduk Yang Mempunyai Rasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Tahun 2014, 2017 dan 2020 2-129
Gambar 2- 58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Tahun 2020-2024 2-140
Gambar 2- 59 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY, Tahun 2024 2-141
Gambar 2- 60 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di DIY, Tahun 2022-2024 2-142
Gambar 2- 61 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Tahun 2022-2024 2-143
Gambar 2- 62 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal DIY, Tahun 2020-2024 2-145
Gambar 2- 63 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan DIY, Tahun 2020-2024 2-146
Gambar 2- 64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2024 2-147
Gambar 2- 65 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2019-2023 2-149
Gambar 2- 66 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2020-2024 2-150
Gambar 2- 67 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi, Tahun 2020-2024 2-152
Gambar 2- 68 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2020-2024 2-155
Gambar 2- 69 Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2019-2023 2-156

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2- 70 Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba di DIY Tahun 2021-2024 (Ton) 2-157
Gambar 2- 71 Produksi Telur Unggas Tahun 2021-2024 (dalam ton) 2-157
Gambar 2- 72 Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2024 (dalam ton) 2-158
Gambar 2- 73 Indeks Kualitas Air DIY Tahun 2020-2024 2-167
Gambar 2- 74 Kondisi Indeks Kualitas Udara DIY Tahun 2018-2024 2-170
Gambar 2- 75 Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY Tahun 1971 – 2020 (10 tahunan) 2-180
Gambar 2- 76 Perkembangan (*Total Fertility Rate*) TFR di DIY Tahun 2021-2024 2-181
Gambar 2- 77 *Dependency Ratio* Menurut Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2025, 2030 dan 2035 2-182
Gambar 2- 78 *Modern Contraceptive Prevalence Rate* DIY Tahun 2020-2024 2-183
Gambar 2- 79 *Unmet Need* DIY Tahun 2019-2023 2-185
Gambar 2- 80 Peta Daerah Rawan Kecelakaan di DIY 2-202
Gambar 2- 81 Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY, 2012-2023 2-205
Gambar 2- 82 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2024 2-213
Gambar 2- 83 Akumulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2020 s.d 2024 2-216
Gambar 2- 84 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan III 2024 2-216
Gambar 2- 85 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda DIY dan Nasional tahun 2015-2023 2-218
Gambar 2- 86 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2023 2-227
Gambar 2- 87 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2019-2024 (Orang) 2-243
Gambar 2- 88 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY Tahun 2020-2024 (Orang) 2-245
Gambar 2- 89 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY Tahun 2010 - 2022 2-251
Gambar 2- 90 Nilai Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY Tahun 2020 -2023 2-266
Gambar 2- 91 Jumlah Omset Usaha yang Dibina Tahun 2020 - 2023 2-267
Gambar 2- 92 Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2010-2024 (%) 2-267
Gambar 2- 93 Perbandingan antara Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB DIY Tahun 2010-2024 (%) 2-268
Gambar 2- 94 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2019-2023 2-268
Gambar 2- 95 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023 2-269
Gambar 2- 96 Jumlah Industri Mikro dan Kecil di DIY 2019-2023 2-269
Gambar 2- 97 Perkembangan Jumlah IMK menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023 2-270

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2- 98 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2020-2024 2-273
Gambar 2- 99 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2020-2024 2-274
Gambar 2- 100 Pencapaian Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2023 (%) 2-278
Gambar 2- 101 Grafik Indeks Pelayanan Publik Pemda DIY Tahun 2019 - 2023 2-279
Gambar 2- 102 Perkembangan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB DIY, 2019-2023 2-287
Gambar 2- 103 Grafik Status Indeks Integritas di Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021-2023 2-299
Gambar 2- 104 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2019-2023 (dalam ribu) 2-309
Gambar 2- 105 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan) Tahun 2023 2-309
Gambar 2- 106 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2020-2024 2-310
Gambar 2- 107 NTP Per Subsektor Tahun 2020-2024 2-310
Gambar 2- 108 Akumulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2020 s.d 2024 2-318
Gambar 2- 109 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan III 2024 2-318
Gambar 2- 110 Capaian kinerja indikator Sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah DIY Tahun 2020-2025 (s.d. TW I) 2-320
Gambar 2- 111 Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2020-2024 2-322
Gambar 2- 112 Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2021 2-324
Gambar 2- 113 Indeks Williamson DIY Tahun 2020-2025 2-326
Gambar 2- 114 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019 s.d. September 2024 2-338
Gambar 2- 115 Grafik Persentase Kemiskinan 2013 dan 2024 DIY beserta Nasional 2-339
Gambar 2- 116 Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 2-342
Gambar 2- 117 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 – 2024 (%) 2-344
Gambar 2- 118 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2020-2024 2-347
Gambar 2- 119 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2020-2024 2-348
Gambar 2- 120 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2020-2024 2-349
Gambar 2- 121 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2020–2024 2-349
Gambar 2- 122 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024 2-357

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2- 123 Kinerja Fisik APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025 2-382
Gambar 2- 124 Serapan Keuangan APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025 2-382
Gambar 2- 125 Serapan Kinerja Keuangan dan Kinerja Fisik APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025 (bulan Maret) 2-382
Gambar 2- 126 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia 2018 – 2024 dalam Persen (Maret) 2-765
Gambar 2- 127 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2019-2024 (Maret) 2-770
Gambar 2- 128 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2019-2024 2-772
Gambar 2- 129 Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2019-2023 2-809
Gambar 2- 130 Data Jumlah Dispensasi Kawin Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2024 2-815
Gambar 2- 131 Jumlah Kasus per Kabupaten/Kota tahun 2024 2-816
Gambar 2- 132 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY 2018-2023 2-823
Gambar 2- 133 Data capaian IKTL DIY 2018-2023 2-824
Gambar 2- 134 Angka Kebutuhan *Unmeet Need* di DIY Tahun 2019-2024 2-840
Gambar 2- 135 Capaian *Total Fertility Rate* DIY Tahun 2019-2024 2-841
Gambar 2- 136 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Bantul 2-845
Gambar 2- 137 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Kulon Progo 2-847
Gambar 2- 138 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Sleman 2-849
Gambar 2- 139 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Gunungkidul 2-852
Gambar 2- 140 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kota Yogyakarta 2-854
Gambar 2- 141 Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir 2-858
Gambar 2- 142 Grafik Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 – 2022 2-861
Gambar 2- 143 Hasil Giat Penegakan Hukum Angkutan Orang dan Angkutan Barang 2020 – 2022 2-862
Gambar 2- 144 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 4-13

Gambar 3- 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2020 - 2024 3-1
Gambar 3- 2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2020 - 2024 3-2
Gambar 3- 3 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2020 - 2024 (%) 3-3
Gambar 3- 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2020 - 2024 3-3
Gambar 3- 5 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2024 3-4
Gambar 3- 6 PDRB ADHB per Kapita DIY (Rupiah), 2020 - 2024 3-6
Gambar 3- 7 Tingkat Inflasi IHK DIY (%), 2020 - 2024 3-6
Gambar 3- 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2020-2024 3-8
Gambar 3- 9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2020 - 2024 3-9

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya dilakukan untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat, dan terukur dengan mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan beberapa aspek pembangunan yang berkembang di masyarakat baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, konservasi lingkungan, hak asasi manusia, teknologi informasi, dan semangat untuk mendorong pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis dari pembangunan nasional hingga pembangunan daerah. Implikasinya adalah pembangunan yang dilakukan oleh daerah harus diselaraskan dengan skema pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan oleh daerah maupun nasional tersebut muaranya adalah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan Pancasila. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan secara bertahap, secara jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu daerah otonomi khusus, pembangunan juga memperhatikan semangat filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai sebuah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dengan berdasarkan nilai Budaya. Panca Mulia sebagai suatu konsep utama dan semangat yang mendasari pembangunan masyarakat jogja. Semangat tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang dijabarkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Proses penyusunan RKPD DIY Tahun 2026 ini juga merupakan pelaksanaan tahun kedua dari tahapan lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam RKPD yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan strategis RKPD memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

   Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

   1) Pengolahan data dan informasi.
   2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
   3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
   4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
   5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
   6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
   7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
   8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
   9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
   10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
   11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
   12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

   Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

   1) Pendahuluan.
   2) Gambaran umum kondisi Daerah.
   3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.
   4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5) Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
6) Rencana kerja dan pendanaan Daerah.
7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pemerintah pusat serta masukan/usulan dari Perangkat Daerah di DIY ataupun Pemda kabupaten/kota. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
e. Sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

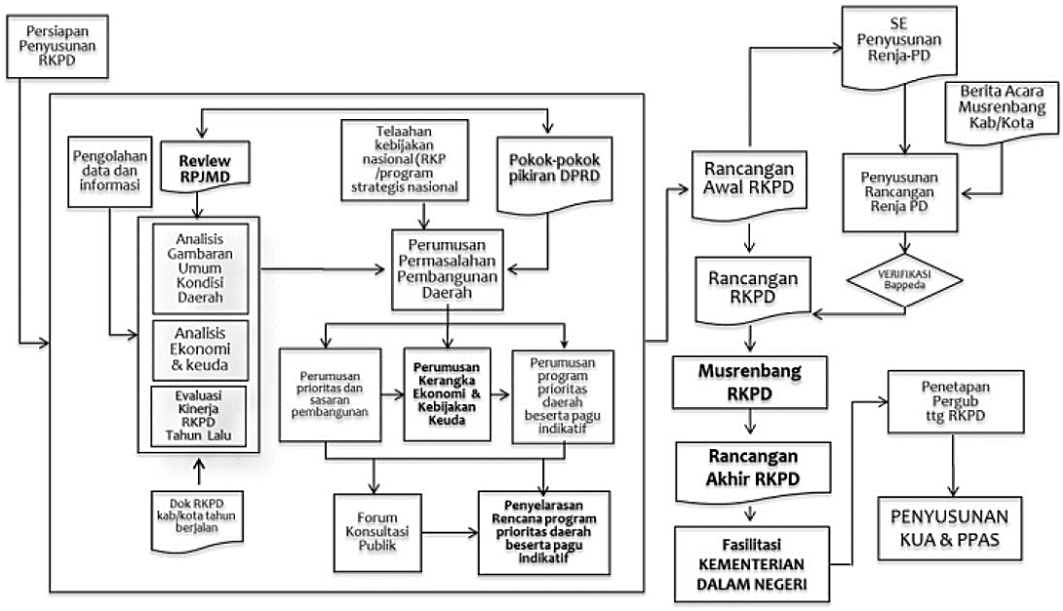
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

RKPD DIY Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, RKP Tahun 2026, Evaluasi Capaian RKPD periode sebelumnya serta perkembangan/arah kebijakan strategis daerah maupun nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan juga sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1- 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia than 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 435);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12)
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

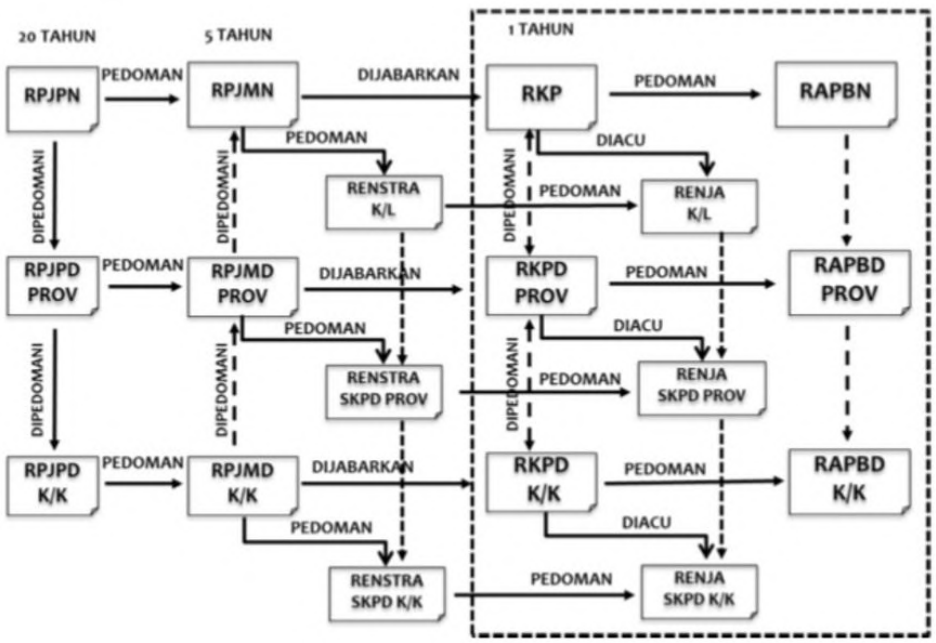
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. RKPD DIY Tahun 2026 mengacu pada RKP Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagai penjabaran atau operasionalisasi tahapan keempat dalam RPJMD DIY Tahu 2022-2027. Selanjutnya, RKPD DIY Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kabupaten/Kota di wilayah DIY, Renja Perangkat Daerah, serta KUA-PPAS dan APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1- 2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat kondisi geografi daerah, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

daerah, rancangan kerangka keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Badan/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2026.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab 1 Pendahuluan**

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

2. **Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. **Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

   Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. **Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

   Mengemukakan secara eksplisit perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan tahunan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan nasional.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. **Bab 5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

   Memuat mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan DIY.

6. **Bab 6 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

   Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

7. **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

   Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.

8. **Bab 8 Penutup**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012, DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan *nagari* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan sekaligus berproses menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan penyesuaian *(continuity and adaptivity)* secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Penetapan substansi Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an. Penetapan substansi Keistimewaan DIY juga bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Penetapan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Substansi kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, wilayah DIY terletak di zona selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan bentuk wilayah yang menyerupai geometri segitiga. Puncak segitiga wilayah DIY merupakan titik batas paling utara yang terletak pada Puncak Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2.911 m diatas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga wilayah DIY merupakan batas di sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 113 km. Wilayah DIY umumnya tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian dengan karakteristik potensi sumberdaya alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan fisiografi solusional Pegunungan Selatan, Satuan fisiografi vulkanik Gunung Berapi Merapi, Satuan fisiografi Pegunungan denudasional Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Satuan fisiografis Pegunungan Selatan merujuk pada kawasan geomorfologi karst yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kawasan geomorfologi karst merupakan fenomena bentanglahan *iconic* khas Gunungkidul. Kawasan karst *limestone* kurang potensial untuk pertanian semusim, karena menghilangnya air permukaan disebabkan proses pelarutan batuan dasar.

Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul bagian utara merupakan satuan fisiografi vulkanik Gunung Merapi. Bentuk lahan ini tersusun dari material vulkan muda yang kaya unsur hara dan sangat subur. Komposisi tekstur tanah yang seimbang, keberlimpahan air, serta kemiringan lahan yang tepat menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk berbagai jenis tanaman budidaya, baik jenis tanaman semusim maupun tanaman budidaya tahunan.

Kabupaten Bantul bagian selatan adalah dataran aluvial pantai yang terletak antara Pegunungan karst Selatan dan Pegunungan denudasional Kulon Progo. Ciri khas dataran aluvial adalah dominannya proses aluvial (aliran air permukaan) yang mendistribusikan material hara tanah secara luas dan masif. Kawasan ini juga memiliki potensi untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim.

Bagian barat DIY merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan fisiografi perbukitan denudasional di sisi utara dan dataran aluvial pantai pada sisi selatan. Karakteristik kawasan fisiografi denudasional meliputi tingkat erosi lanjut, solum tanah yang relatif tebal dengan tekstur cenderung halus dominan lempung. Satu hal yang membedakannya dengan fisiografi solusional adalah keberadaan air permukaan yang menjadi penunjang potensi tanah sebagai zona perakaran. Meskipun kondisi kesuburan tanahnya tidak terlalu baik secara umum, namun kecukupan air telah memperbaiki kondisi nya sebagai habitat budidaya tanaman tahunan.

Sungai-sungai yang melintas di DIY merupakan salah satu pembentuk karakteristik lahan yang berpotensi memberi pengaruh (baik itu faktor pendukung ataupun sebagai faktor pembatas) pengembangan wilayah, serta arah perkembangan penggunaan lahan di DIY. Sebagai faktor pendukung, sungai berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya air untuk mendukung berbagai tujuan pemanfaatan. Sebagai faktor pembatas, sungai berhubungan dengan zona perlindungan setempat dan mungkin juga zona rawan bencana banjir.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Beberapa sungai besar yang melintas dan bermuara di wilayah pesisir DIY antara lain Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Beberapa sungai lainnya yang kawasan daerah aliran sungai (DAS) nya lebih kecil antara lain; Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Serang. Semua sungai tersebut bermuara di kawasan pesisir Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Karakteristik batuan yang bersifat larut air pada kawasan karst di Gunungkidul menyebabkan sungai sungai yang melintas disana menghilang dari permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sungai bawah tanah). Beberapa subsistem aliran bawah tanah yang dominan antara lain subsistem Ngobaran, subsistem Baron, dan subsistem Bribin.

Pada aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur. Dinamika tersebut akan berpengaruh pada karakteristik sumberdaya manusia yang ada. Karakteristik sumberdaya manusia menjadi dasar yang penting dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dalam berbagai sektor; pelayanan kesehatan dan pendidikan, perencanaan ruang dan pemanfaatan lahan, penyediaan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan perumahan, energi, dan air bersih, penanganan permasalahan sanitasi, limbah, dan persampahan, dan banyak hal lainnya.

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 3.170,645 km^2, maka secara general kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.157,08 orang per km^2. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

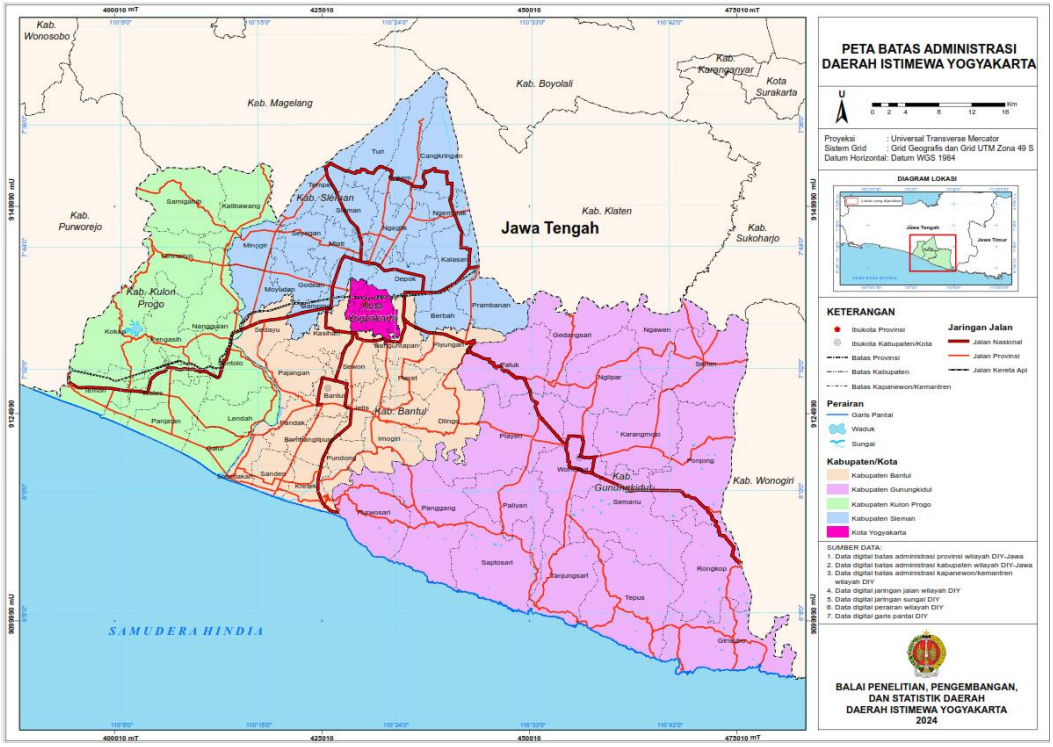
2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7.33'- 8.12' Lintang Selatan dan 110.00'-110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tepatnya di zona bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.



Sumber: BPPSD DIY, 2024

Gambar 2- 1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan dilakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Kapanewon dipimpin

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk sebutan Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk sebutan desa di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 Rukun Warga dan 26.896 Rukun Tetangga.

Tabel 2- 1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
DIY		78	438	4.508	7.102	26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Luas daratan seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 3.170,645 Km^2 atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.410,091 Km^2). DIY merupakan provinsi dengan luasan terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,52% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

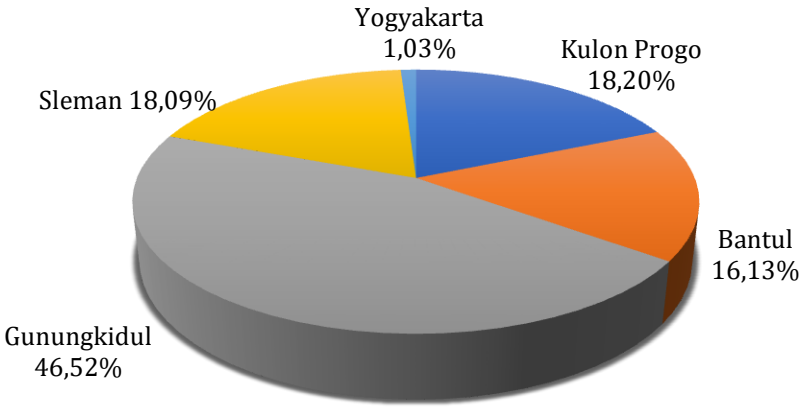
Tabel 2- 2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km2	%	Keterangan
1	34.01	Kab. Kulon Progo	577,22	18,20	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022
2	34.02	Kab. Bantul	511,70	16,13	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km2	%	Keterangan
3	34.03	Kab. Gunungkidul	1.475,15	46,52	Luas Wilayah Definitif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022
4	34.04	Kab. Sleman	573,75	18,09	Luas Wilayah Definitif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober2022
5	34.71	Kota Yogyakarta	32,82	1,03	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022
		DIY	3.170,64	100	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022



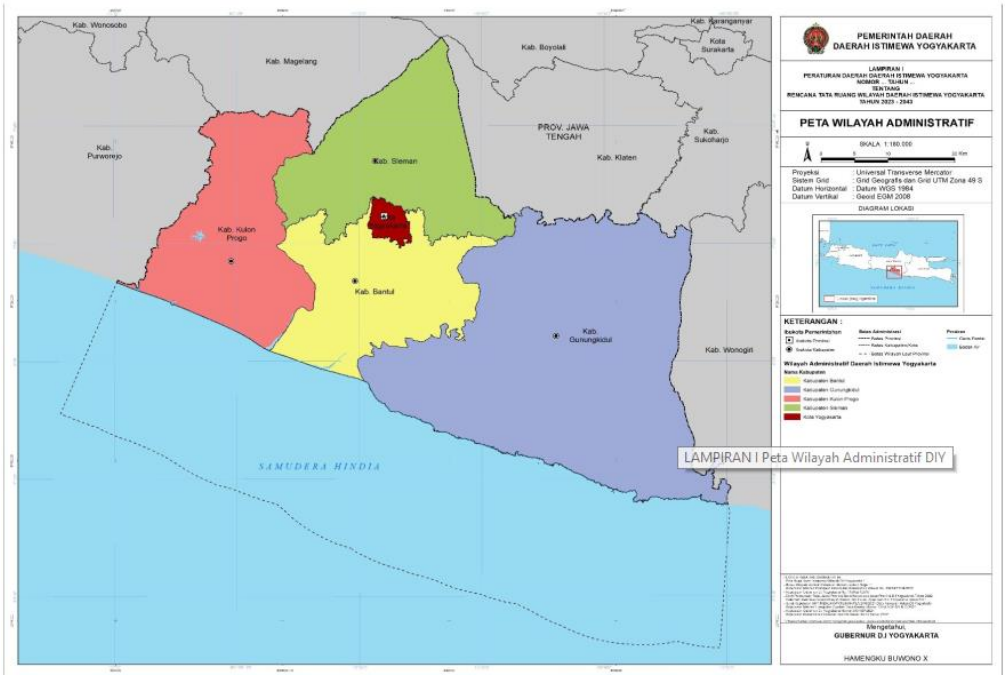
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2- 2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

Selain luas daratan, DIY juga memiliki luas kewenangan wilayah di laut yaitu meliputi 12 mil laut diukur dari garis pantai. Luas total wilayah kewenangan laut tersebut 2.329,52 km2. Luas kewenangan wilayah laut ini menjadi penting karena menyimpan potensi sumberdaya alam meliputi produksi perikanan tangkap, produksi garam, potensi budidaya perikanan jenis tertentu, juga potensi destinasi pariwisata di wilayah pesisir yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat DIY. Gambaran tentang luasan kewenangan wilayah laut DIY seperti pada Gambar 2.1. Peta Administrasi DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.1.2 Topografi



Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 3 Peta Topografi DIY

Topografi dideskripsikan secara kualitatif sebagai bentuk permukaan lahan, dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng, bentuk lereng dan posisi ketinggian suatu tempat diatas permukaan laut. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan lahan

   Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km^2, lahan dengan kemiringan 2-8% seluas 522,73 Km^2, lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km^2, lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km^2, lahan dengan kemiringan 25-40% seluas 332,83 Km^2, lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 367,03 Km^2.

2) Ketinggian lahan

   Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

3) Unit Fisiografis

Di Wilayah DIY terdapat empat satuan fisiografi utama yaitu; fisiografi pegunungan selatan karst, fisiografi vulkanik Gunung Merapi, fisiografi dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul dan dataran aluvial pantai), dan fisiografi perbukitan denudasional Kulon Progo. Di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan potensi sumber daya alam laut dan terdapat wilayah kewenangan DIY di dalamnya sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km^2, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul bagian selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul bagian timur. Kawasan ini merupakan kawasan geomorfologi karst perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air permukaan. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Gunungkidul terdapat cekungan basin Wonosari. Wilayah karst merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

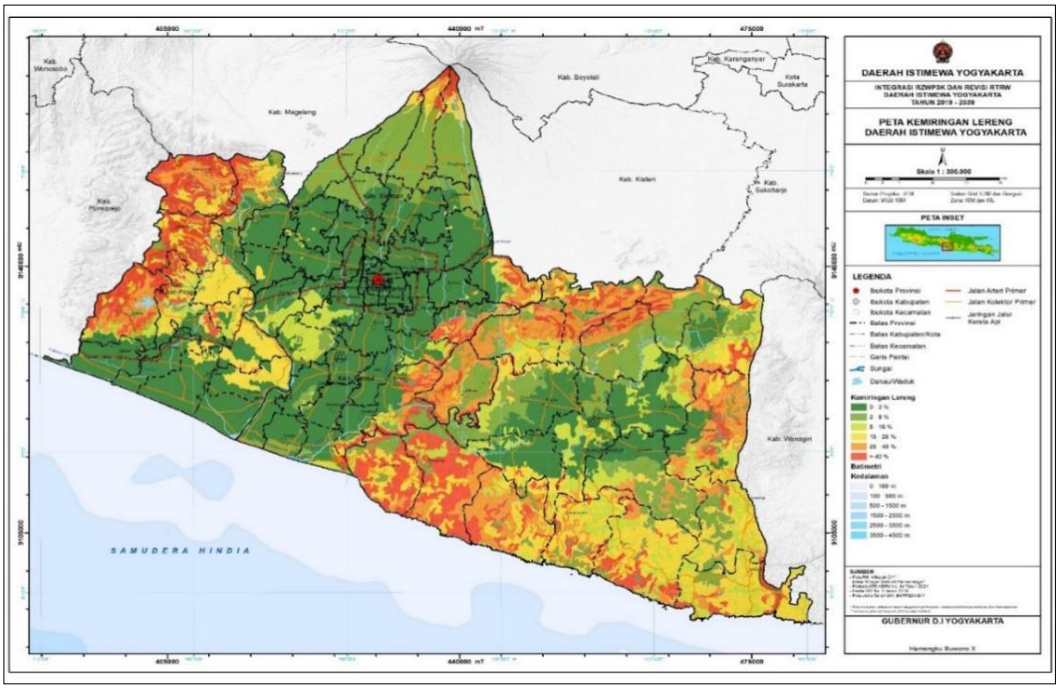
b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km^2, ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.

c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km^2, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Aluvial. Membentang di bagian selatan DIY di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur.

d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km^2, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

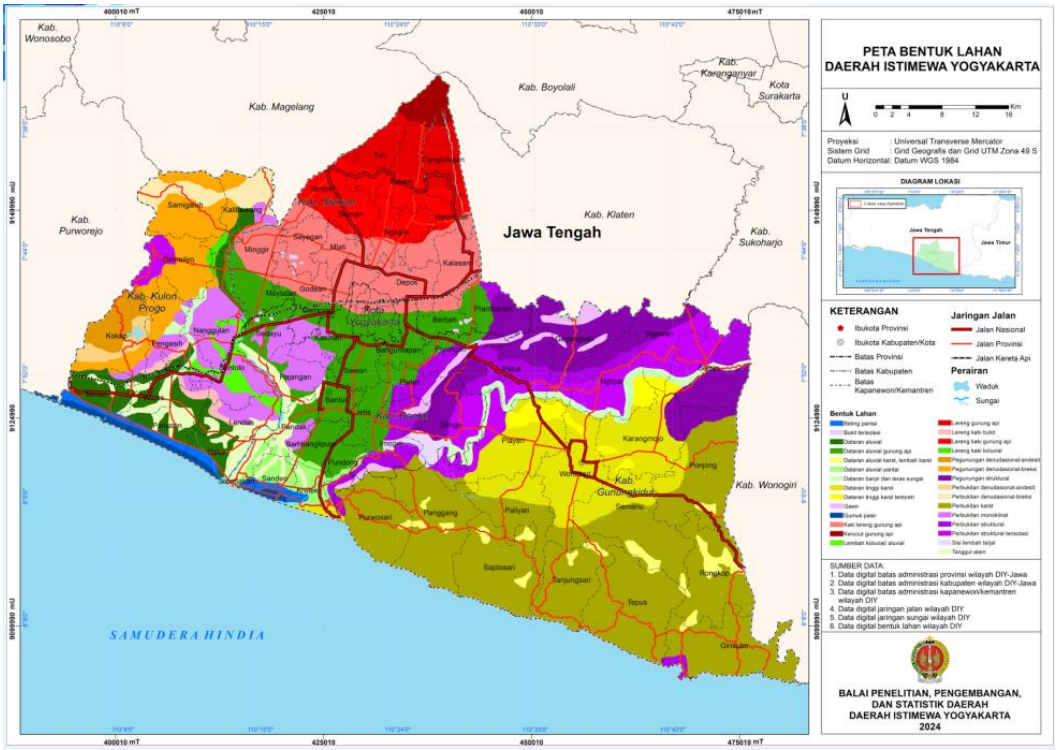


Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

Gambar 2- 4 Peta Kemiringan Lereng DIY

Di wilayah DIY juga terdapat Bentang alam minor yang pemanfaatannya belum optimal yaitu bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan fisiografis kawasan pantai. Kawasan ini terbentang sejajar garis pantai dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir tipe *barchan* yang merupakan fenomena langka di dunia;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2024

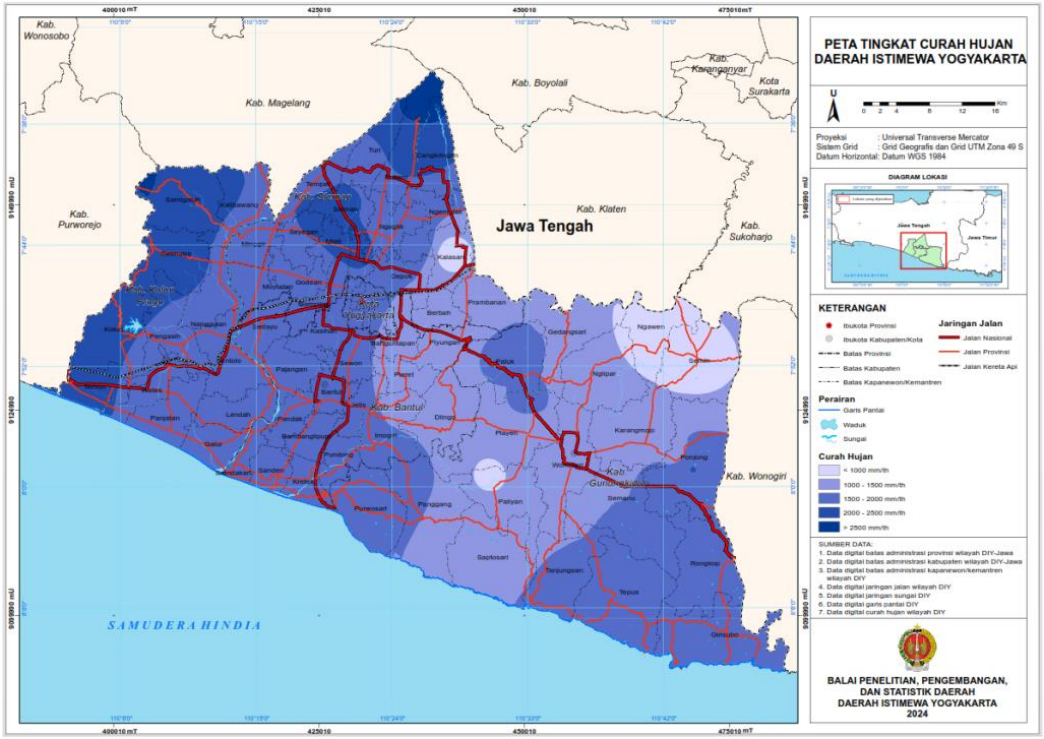
Gambar 2- 5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

2.1.1.1.3 Klimatologi

Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah baik dari segi potensi sumber daya alam maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6 bulan. Ada dua jenis iklim musiman: monsun barat daya (*monsoon* barat) dan monsun timur laut (*monsoon* timur). Dari Oktober hingga April, angin monsun barat daya bertiup dan dominan membawa hujan. Monsun timur laut bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan karakter kering sehingga menjadi musim kemarau.

Sebagai bagian dari daerah beriklim tropis, kondisi iklim DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Posisinya yang dekat dengan Samudera Hindia, memberi pengaruh akibat adanya banyak penguapan air laut, yaitu kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi pula.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPPSD, 2024

Gambar 2- 6 Peta Curah Hujan DIY

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan DIY untuk tahun 2024:

1) Suhu minimum 20,70 °C dan suhu maksimum 33,00 °C.
2) Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Februari terjadi di Kabupaten Sleman sebesar 657 mm3 dan terendah sebesar 0 mm3 pada bulan Agustus di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
3) Kelembaban rata-rata bulanan Minimum 77,00 dan Maksimum 86,00
4) Tekanan 989,00 mb hingga 993,0 mb;
5) Kecepatan angin rata-rata bulanan minimum 3 knot dan maksimum 4 knot.

2.1.1.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari *antiklin* dan *sinklin* terdapat pada singkapan Formasi Semilir (Tms), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
d. Formasi Kepek (Tmpk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batulanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik hidrogeologi dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memilki karakteristik soluble dan mudah meloloskan air.

f. Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.

g. Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.

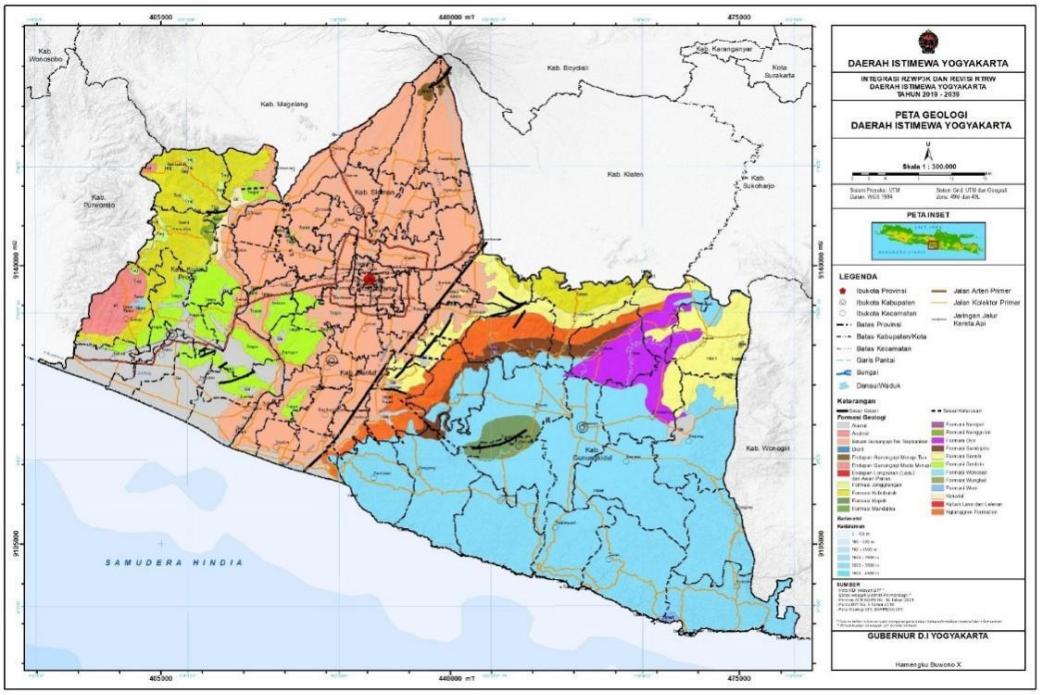
i. Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.

j. Formasi Kebo Butak (Tomk), Formasi Kebo Butak berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu lempung andesit. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batulanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.

k. Formasi Andesit Tua, Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi volkanik dengan fragmen andesit, tuf, lapilli tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batu pasir volkanik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.



Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 7 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Jenis tanah yang ada di wilayah DIY dapat digolongkan dalam beberapa kategori besar sebagai berikut:

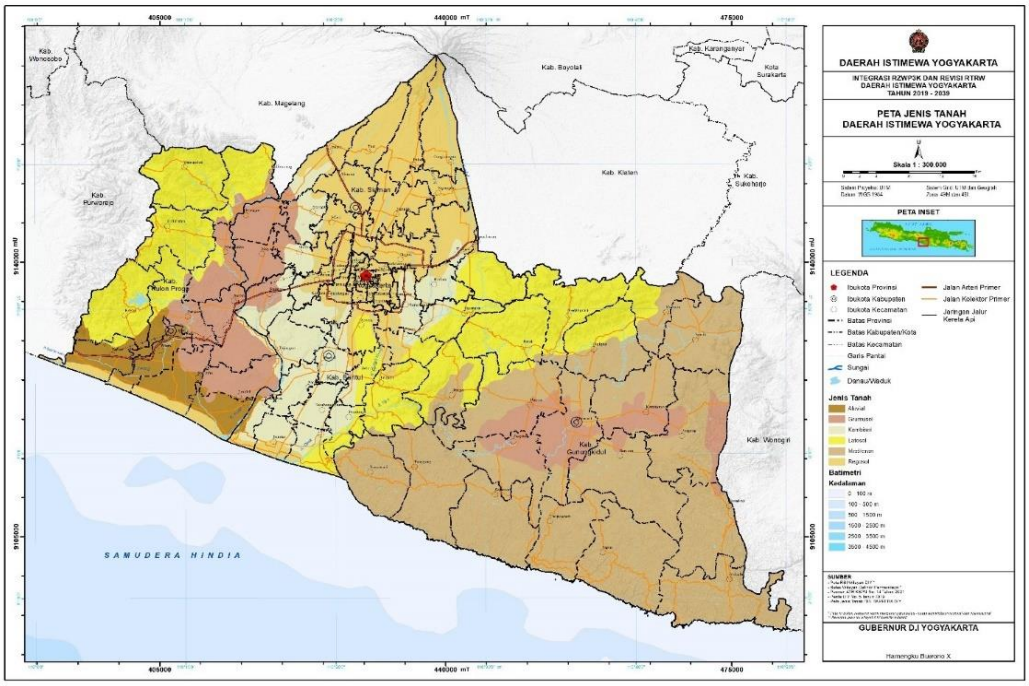
1. Unit fisiografi vulkanik muda Gunungapi Merapi, mengandung tanah regosol seluas 521,44 Km^2 atau sekitar 16,43%. Tanah Regosol merupakan salah satu sub jenis tanah Entisol. Yaitu tanah yang berasal dari pelapukan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Jenis tanah ini belum mengalami perkembangan sempurna dalam hal struktur maupun teksturnya. Regosol termasuk jenis tanah mineral yang kaya unsur hara sehingga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun tidak bisa mengikat air. Regosol tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul bagian utara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Jenis tanah berikutnya adalah Kambisol yang tersebar seluas 304,45 Km^2 atau sekitar 9,59%. Tanah Kambisol (menurut sistem FAO) merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala hidromorfik. Secara simpel kambisol bisa dikatakan sebagai tahap awal dari jenis tanah latosol. Dengan origin yang hampir sama maka kambisol pun memiliki tingkat kesuburan yang setara dengan latosol. Persebaran kambisol berada pada wilayah Kabupaten Sleman bagian barat dan timur serta hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan.
3. Jenis tanah aluvial di wilayah DIY tersebar seluas 120,95 Km^2 atau sekitar 3,81%. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir, dan berasosiasi dengan keberadaan sungai sebagai transport agent nya dari hulu. Tanah ini biasanya bewarna coklat hingga kelabu. Di wilayah DIY tanah aluvial tersebar dikawasan selatan Kabupaten Kulon Progo.
4. Di DIY juga ada tanah jenis grumusol seluas 407,31 Km^2 atau 12,83%. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan kurang cocok untuk ditanami komoditas pertanian. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau. Grumusol berwarna hitam dan persebarannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah. Sifat kembang kerutnya yang tinggi memerlukan *treatment* khusus dalam bidang konstruksi karena sangat berisiko mempercepat kerusakan struktur bangunan atau badan jalan.
5. Jenis tanah mediteran adalah yang paling dominan di wilayah DIY yaitu seluas 1139,24 Km^2 atau 35,90%. Tanah jenis mediteran ini tersebar bagian timur, selatan, dan barat wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Yang menjadi masalah utama dari jenis tanah mediteran adalah ketersediaan air yang rendah dan tingginya pH tanah (>7). Tanah yang bersifat alkalis ini akan mengikat fosfat sehingga akan menjadi kendala bagi tanaman untuk tumbuh.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Kategori Jenis tanah yang terakhir distribusi penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan Gunungkidul bagian utara. Jenis tanah ini adalah latosol, dengan luas penyebaran sekitar 680,11 Km^2 atau 21,43%. Tanah ini memiliki lapisan solum yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 30 cm sampai 5 meter bahkan lebih. Memiliki batas horizon yang tidak jelas. Latosol meliputi tanah hasil pelapukan yang intensif dan perkembangan tanah yang lebih lanjut. Keadaan ini meyebabkan pelindian unsur basa, bahan organic, dan silica dengan menyisakan sesquoksida berwarna merah. Umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai sedang. Tekstur tanah liat, struktur remah dan konsisitensi gembur.



Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 8 Peta Jenis Tanah DIY

2.1.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS menerima dan menyimpan air hujan yang jatuh kemudian mengalirkannya menuju ke muara (laut/ danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat *sub surface* DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Peta kawasan DAS di DIY dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2024

Gambar 2- 9 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada. Aquifer di DIY diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu :

1. *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor *aquifer* adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
2. *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
3. *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesit tua.
4. *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Ketersediaan air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 3 Potensi Ketersediaan Air pada 4 (Empat) DAS yang ada di wilayah DIY Tahun 2020-2024 (juta m^3)

NAMA DAS	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
DAS Serang	207,00	234,00	240,00	309,73	320,65	Juta m3
DAS Progo	6.178,00	5.652,00	4.770,00	3.240,00	2.925,60	Juta m3
DAS Opak	1.446,00	858,00	1565,00	770,87	820,40	Juta m3
DAS Oyo	1.090,00	529,00	681,00	483,68	525,36	Juta m3

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2020-2024(m3/detik)

Sub Elemen	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sungai Progo (Duwet)	0,30	561,0	0,20	345,4	18,60	310,00	1,40	340,28	0,30	428,00
Sungai Bedog (Guwosari)	0,05	30,9	1,84	28,9	0,01	23,20	0,01	40,11	0,95	32,30
Sungai Code (Kaloran)	0,01	12,7	0,18	8,55	0,01	9,45	0,01	8,88	0,20	12,40
Sungai Winongo (Padokan)	0,09	25,4	0,01	16,3	0,16	13,60	0,16	12,37	0,19	11,46
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,27	6,7	0,49	5,68	0,49	4,74	0,49	4,74	0,48	2,10
Sungai Opak (Pulo)	0,06	3,5	0,12	4,91	0,08	8,02	0,08	8,02	0,08	8,02

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km^2. Debit rerata SBT Bribin 0,95 m^3/detik, SBT Ngobaran 0,70 m^3/detik dan SBT Baron debit rerata 0,10 m^3/detik.

Tabel 2- 5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. Sedangkan dari hasil identifikasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY, sebaran CAT di Wilayah DIY meliputi:

1) CAT Yogyakarta - Sleman;
2) CAT Wates;
3) CAT Wonosari;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

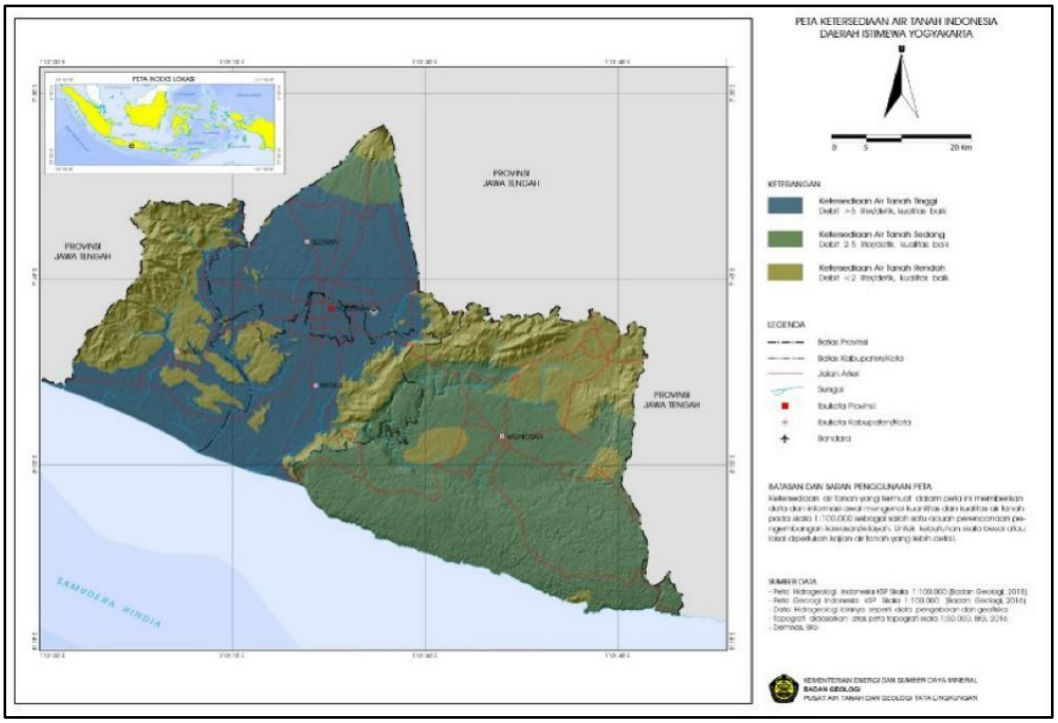
4) CAT Menoreh (belum ditetapkan);
5) CAT Oyo (belum ditetapkan).

CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas total cekungan kurang lebih 911,2 Km^2, dengan rincian luas daerah imbuhan 45,20 km^2 atau 5% dari luas total cekungan, dan luas daerah transisi sekitar 198,80 km^2 atau sekitar 22% dari luas total cekungan dan luas daerah lepasan air tanah sebesar 667,20 km^2 atau 73% luas total cekungan. meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

CAT Wates terletak di sisi selatan Kabupaten Kulon Progo. Pola aliran air tanah yang berkembang pada CAT Wates relatif berarah utara ke selatan menuju ke arah Samudera Hindia. Namun pada bagian gumuk pasir, pola aliran yang berkembang pada daerah tersebut cenderung berlawanan yaitu mengikuti morfologi dari gumuk pasir. CAT Wates memiliki luasan total 174,55 km^2 dengan rincian daerah imbuhan seluas 71,71 km^2 dan daerah lepasan seluas 103,84 km^2. CAT Wates berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo.

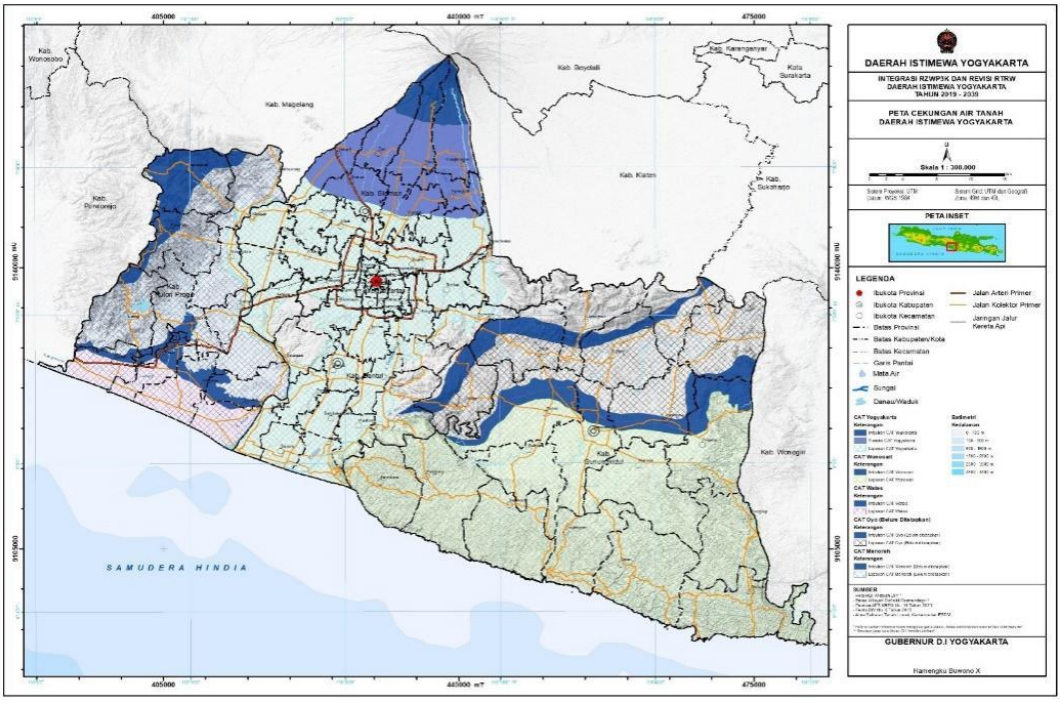
CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul. Luas total CAT Wonosari yang berada di Kabupaten Gunungkidul adalah 975,7 Km^2, dengan rincian luas daerah imbuhan 933,1 km^2 atau 95,7% dari luas total wilayah yang terbagi menjadi dua daerah imbuhan, yaitu daerah imbuhan primer seluas 280,6 km^2 (28,8%) dan daerah imbuhan sekunder seluas 653,2 km^2 (66,9%) dan luas daerah lepasan air tanah sekitar 41,9 km^2 atau 4,3% luas total. CAT Wonosari berada di Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul. Pada CAT Wonosari daerah imbuhan air tanah primer terletak pada perkotaan Wonosari. Daerah air tanah sekunder sebagian besar merupakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang ditetapkan sebagai kawasan dengan pemanfaatan terbatas. Kawasan ini telah ditetapkan oleh Badan Geologi sebagai kawasan lindung karst. Ketersediaan air tanah dan sebaran CAT di DIY seperti gambar di bawah ini

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 10 Peta Ketersediaan Air Tanah DIY



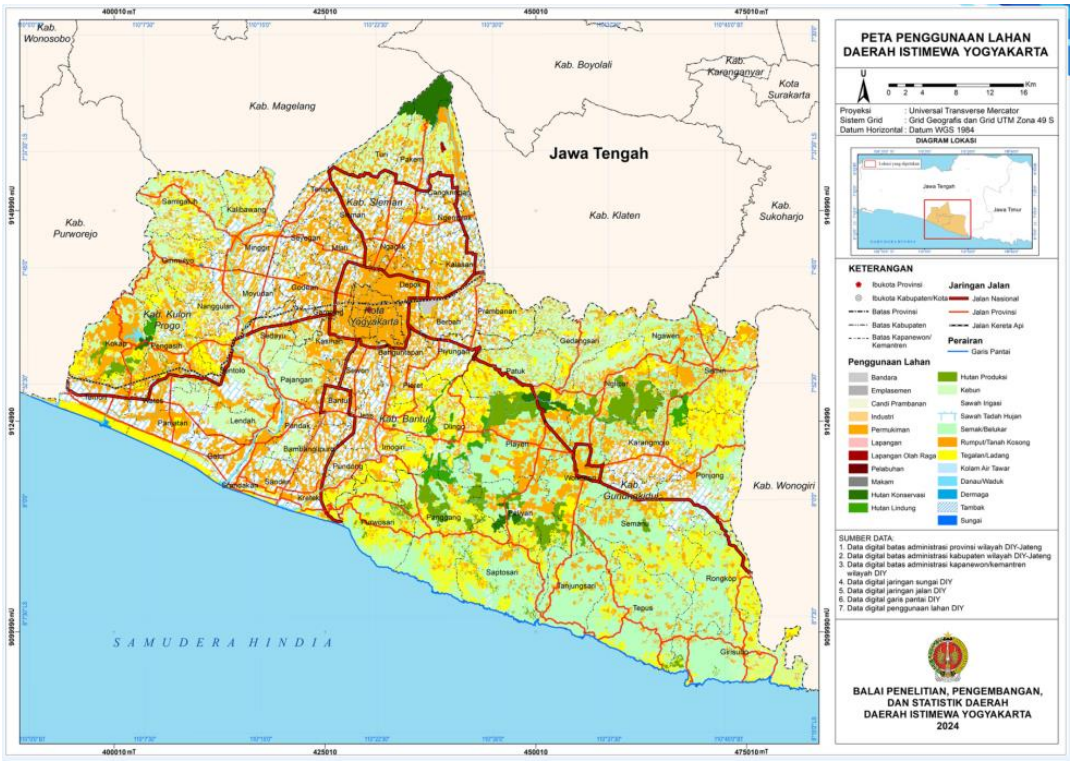
Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 11 Peta Cekungan Air Tanah DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.1.6 Sumber Daya Wilayah Pesisir

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya mengacu pada pemanfaatan lahan eksisting. Pola dominasi jenis dan sebaran penggunaan lahan pada suatu wilayah menggambarkan karakteristik sumberdaya alam setempat dan karakteristik sumberdaya manusianya. Suatu wilayah dengan dominasi jenis penggunaan lahan pertambangan memberikan gambaran karakteristik sumberdaya yang berbeda dengan wilayah yang memiliki dominasi jenis penggunaan lahan pertanian. Pemahaman karakteristik pola dominasi tersebut diharapkan menjadi guiding penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, Data 2022 layout 2024

Gambar 2- 12 Peta Penggunaan Lahan DIY

Penggunaan lahan di DIY didominasi Permukiman, Semak/Belukar, Sawah Irigasi, Kebun Tanaman Campuran, dan Tegalan/Ladang. Pola dominasi ini menggambarkan kehidupan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

masyarakat yang bersifat agraris. Menyandingkan data penggunaan lahan dari dua posisi waktu yang berbeda bisa memberikan gambaran tentang perubahan penggunaan lahan. Trend perubahan penggunaan lahan memberi gambaran tingkat kebutuhan manusia terhadap masing masing jenis penggunaan lahan. Jenis penggunaan lahan yang luasannya bertambah menunjukkan tingkat kebutuhan yang tinggi, sementara yang luasannya menyusut menunjukkan tingkat kebutuhan yang rendah. Trend perubahan penggunaan lahan bisa digunakan sebagai salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang lahan agar terjaga sustainabilitas sumberdayanya. Gambaran jenis jenis Penggunaan lahan DIY dan arah perubahannya seperti tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2- 6 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2016 dan Tahun 2021

Penggunaan Lahan	Tahun 2016		Tahun 2021		Perbedaan Luas PL 2016 dan 2021 (ha)
	Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	
Bandara	295,08	0,09%	813,28	0,26%	518,20
Candi Prambanan	32,51	0,01%	34,57	0,01%	2,06
Danau/Waduk	253,91	0,08%	252,76	0,08%	-1,14
Dermaga	70,16	0,02%	16,19	0,01%	-53,98
Emplasemen	137,70	0,04%	42,17	0,01%	-95,53
Hutan Konservasi	3.072,71	0,97%	3.072,71	0,97%	0,00
Hutan Lindung	2.201,22	0,69%	2.201,22	0,69%	0,00
Hutan Produksi	9.307,23	2,93%	8.722,53	2,75%	-584,70
Industri	35,82	0,01%	48,99	0,02%	13,16
Kebun	46.639,25	14,70%	47.110,71	14,85%	471,46
Kolam Air Tawar	39,61	0,01%	39,61	0,01%	0,00
Lapangan	113,13	0,04%	113,13	0,04%	0,00
Makam	40,46	0,01%	40,86	0,01%	0,40
Pelabuhan	2,04	0,00%	2,04	0,00%	0,00
Permukiman	87.383,84	27,54%	89.881,51	28,32%	2.497,68
Rumput/Tanah Kosong	993,37	0,31%	1.030,03	0,32%	36,66
Sawah Irigasi	55.057,47	17,35%	52.503,22	16,54%	-2.554,25
Sawah Tadah Hujan	2.980,14	0,94%	3.781,93	1,19%	801,79
Semak/Belukar	63.189,68	19,91%	63.826,80	20,11%	637,12
Sungai	2.574,73	0,81%	2.458,43	0,77%	-116,30
Tambak	102,41	0,03%	332,39	0,10%	229,98
Tegalan/Ladang	42.827,39	13,50%	41.024,79	12,93%	-1.802,60
Total	317.349,87	100,00%	317.349,87	100,00%	

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sesuai klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan pada PERDA DIY no 10 tahun 2023 tentang RTRW DIY maka terdapat beberapa perubahan :

1) Mengikutsertakan kawasan perairan laut sejauh 12 mil dari pantai
2) Perubahan skala klasifikasi dari peta 1:100.000 menjadi 1:250.000 sehingga jumlah kelas penggunaan lahan pun berbeda, sebagai berikut:

Tabel 2- 7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2021

Penggunaan Lahan	Luas (ha)
Perairan Laut	232.927,63
Danau	145,71
Sungai	364,01
Lahan Terbuka Alami Lain	289,69
Waduk dan Danau Buatan	145,71
Kolam Air Asin / Payau (Tambak)	377,18
Lahan Terbuka Diusahakan	243,96
Bangunan Permukiman / Campuran	100.606,26
Bangunan Bukan Permukiman	1.686,73
Semak dan Belukar	2.724,71
Hutan	12.788,76
Perkebunan dengan Tanaman Berkayu Keras	51.948,47
Tanaman Semusim Lahan Kering (Tegalan/Ladang)	96.225,94
Tanaman Semusim Lahan Basah (Sawah)	49.390,77
Total Luas (termasuk laut 12 mil dari pantai)	**550.008,65**

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

2.1.1.1.7 Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir seperti diatur dalam Undang Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir DIY meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terdiri dari 13 Kapanewon Pesisir yaitu; Temon, Wates, Panjatan, Galur, di Kabupaten Kulon Progo,Srandakan, Sanden, dan Kretek di Kabupaten Bantul, Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul. Luas wilayah pesisir DIY pada matra darat adalah identik dengan luas wilayah kapanewon pesisir yaitu 736,2 Km^2 atau sekitar 23,1% dari total luas wilayah darat DIY. Ditambah matra lautnya 2.329,52 km^2, maka luas total wilayah pesisir DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

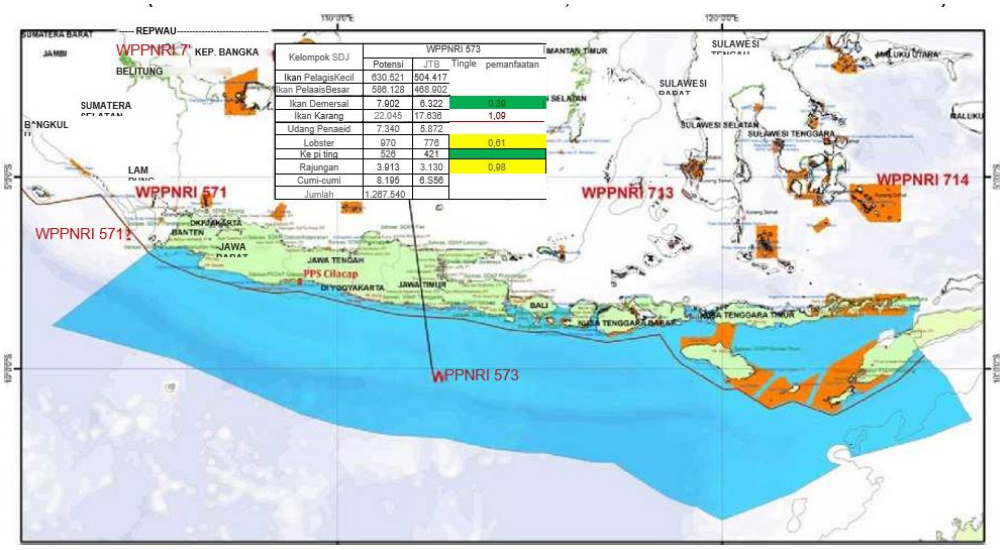
adalah 3.065,72 Km^2 . Wilayah pesisir DIY berupa matra darat dan matra laut tersebutmemiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Perikanan tangkap laut (matra laut)

   Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) adalah pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Melimpahnya sumberdaya ikan (SDI) yang berada di Samudra Hindia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI 573) merupakan alasan yang sangat mendasar untuk DIY dalam mengelola wilayah lautnya. DIY termasuk pengelola WPP-RI 573 dimana kode angka 573 adalah penomoran menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO). Luas perairan WPP-RI 573 adalah 96.448.792,251 Ha dengan luas kawasan konservasi pada tahun 2017 seluas 4.070.626,33 Ha dan bertambah seluas 341.686 Ha pada tahun 2020 sehingga menjadi seluas 4.412.312,33 Ha

   Jenis ikan dominan yang tertangkap di WPP-RI 573 menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 573 adalah lemuru, cakalang, tongkol, layang, dan madidihang. Jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisang-pisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis komoditi lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 perkiraan potensi WPP 573 adalah 929.330 ton/tahun dan yang diizinkan ditangkap 743.464 ton/tahun. Potensi WPP RI 573 dapat dilihat pada gambar Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 Samudera Hindia (Selatan Jawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur Bagian Barat) di bawah ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2022

Gambar 2- 13 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573: Samudera Hindia (Selatan Jawa S.D. Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu Dan Laut Timur Bag.Barat)

Potensi masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut yang besar tersebut baru sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi *underfishing* karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumber daya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan. Dengan sifat laut yang *open access*, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang lebih luas pula.

2. Penggaraman

Menurut Supriyono dan Broto (2021), produktivitas tambak garam adalah 60 ton/Ha atau setara dengan 6 kg/m2. Luas tambak garam DIY adalah 1.910 m2 dengan jumlah produksi garam pada tahun 2020 sebesar 7.238 kg dan pada tahun 2021 sebesar 13.750 kg, pada tahun 2022 sebesar 7.340 kg, pada tahun 2023 sebesar 3.020 kg dan pada tahun 2024 sebesar 4.860 kg (dataku 2025). Produksi garam di DIY masih sangat potensial untuk dikembangkan. DIY yang memiliki garis pantai sepanjang 113 km, yang terbentang pada 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul (71 km), Kabupaten Bantul (17 km) dan Kabupaten Kulon Progo (25 km). Selain itu, lahan pesisir DIY memiliki luas kurang lebih 8.250 Ha dengan 650 Ha di antaranya dapat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dikembangkan untuk budi daya perikanan darat dan tambak garam, serta enam belas titik zona penggaraman.

Tabel 2- 8 Luas Tambak Garam di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Kelompok/Nama Pemilik	Alamat	Luas Tambak (m2)
1	Tirta Bahari	Sepanjang, Kemadang, dan Tanjungsari, Kab. Gunungkidul	620
2	Dadap Makmur	Dadap Ayam, Kanigoro, dan Saptosari, Kab. Gunungkidul	1.050
3	Bumdes Sempulur Jaya Barokah	Pantai Pandansari, Wonoroto, Gading Sari, dan Sanden, Kab. Bantul	240
Total			**1.910**

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis RTRW DIY Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

3. Ekosistem terumbu karang

   Ekosistem terumbu karang di DIY tersebar di tujuh lokasi, yaitu Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Namun hanya Pantai Wediombo yang termasuk dalam kategori dengan kondisi sedang yaitu 47.16%. Sedangkan enam lokasi lainnya termasuk dalam kategori dengan kondisi terumbu karang yang buruk dimana kondisi terumbu karang terburuk berada di Pantai Drini dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan lokasi pendataan pada Pantai Drini merupakan lokasi ekosistem lamun.

4. Ekosistem terumbu karang

   Ekosistem terumbu karang di DIY tersebar di tujuh lokasi, yaitu Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Namun hanya Pantai Wediombo yang termasuk dalam kategori dengan kondisi sedang yaitu 47.16%. Sedangkan enam lokasi lainnya termasuk dalam kategori dengan kondisi terumbu karang yang buruk dimana kondisi terumbu karang terburuk berada di Pantai Drini dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan lokasi pendataan pada Pantai Drini merupakan lokasi ekosistem lamun.

5. Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (*spot*) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris* dan *Nypa*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

fruticans) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius, Hibiscus tiliaceus, Ipomoea pes–caprae, Pandanus tectorius, Sesuvium postulacastrumdan Terminalia cattapa*).

6. Ekosistem Gumuk Pasir

   Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

   Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lengas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

   Berbagai macam jejak aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

7. Pariwisata

   Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 destinasi wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan macanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

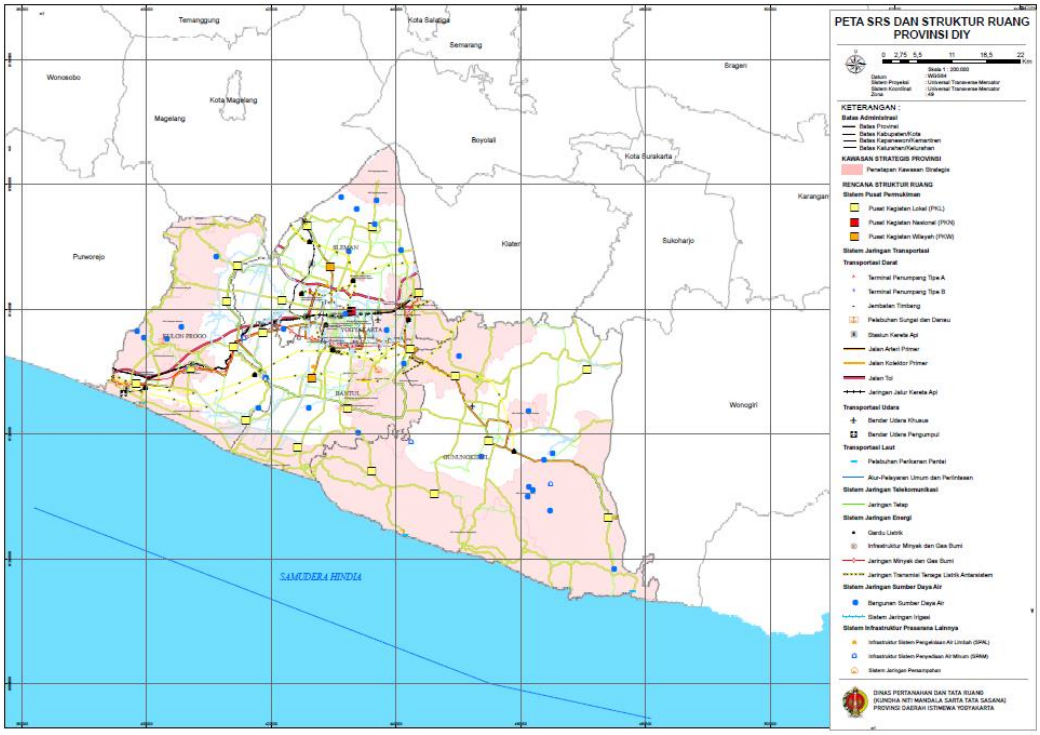
8. Energi Baru Terbarukan

   Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada pukul 10.00 WIB - 14.30 WIB hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s. Bahkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah digambarkan sebagai upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan keruangan atau spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan. Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2023-2043 bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang berada pada Kawasan budidaya dan Kawasan strategis di wilayah DIY . Berdasarkan Perda DIY No 10 Tahun 2023 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana struktur ruang memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah yang meliputi sistem pusat permukiman yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaraingan prasarana lainnya. Peta rencana struktur ruang Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

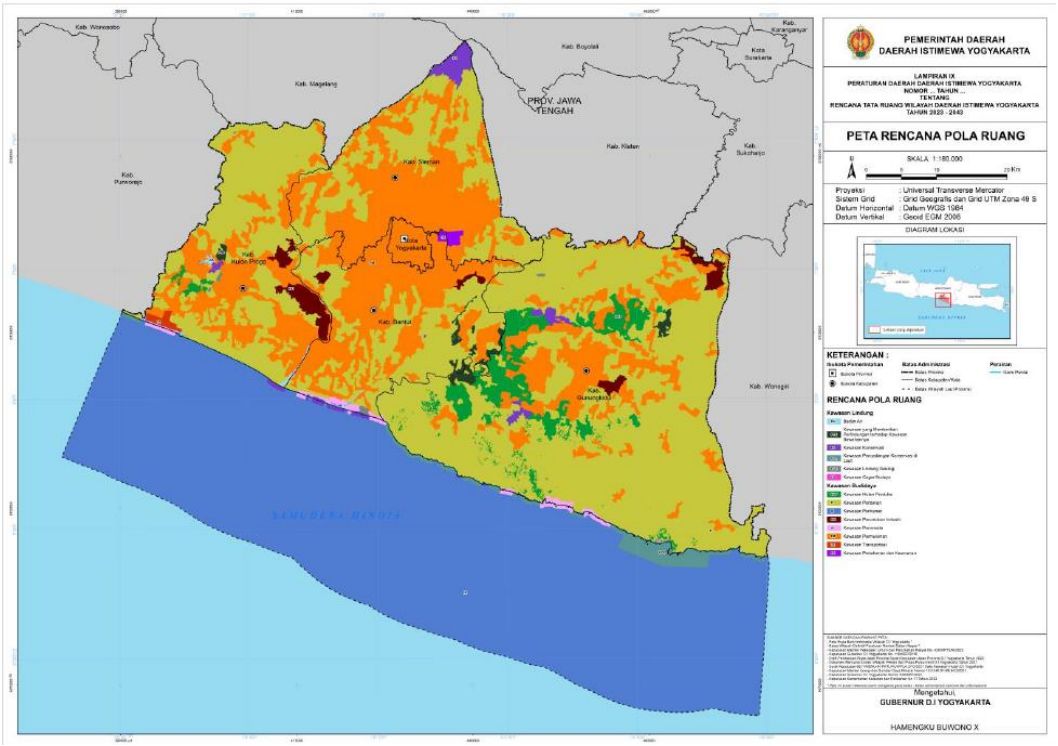


Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Gambar 2- 14 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2023 – 2043

Sedangkan potensi pengembangan wilayah DIY sesuai rencana pola ruang pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamananan. Peta rencana pola ruang DIY berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Gambar 2- 15 Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2023 – 2043

Potensi pengembangan yang berada pada kawasan strategis di wilayah DIY terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdiri atas Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten.

Kawasan strategis kasultanan terdiri atas Kawasan Keraton; Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; Kawasan sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; Kawasan Masjid Pathok Nagoro; Kawasan Gunung Merapi; Kawasan Pantai Samas-Parangtritis; Kawasan Kerto-Pleret; Kawasan Kotabaru; Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo; Kawasan Sokoliman; Kawasan Perbukitan Menoreh; Kawasan Karst Gunungsewu; Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul. Sedangkan Kawasan Strategis Kadipaten terdiri atas Kawasan Puro Pakualaman; Kawasan Makam Girigondo; Kawasan Pusat Kota Wates; dan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043, meliputi:

a. Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) ha.
b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Prambanan, dan Kapanewon Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.
c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Tepus.
d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

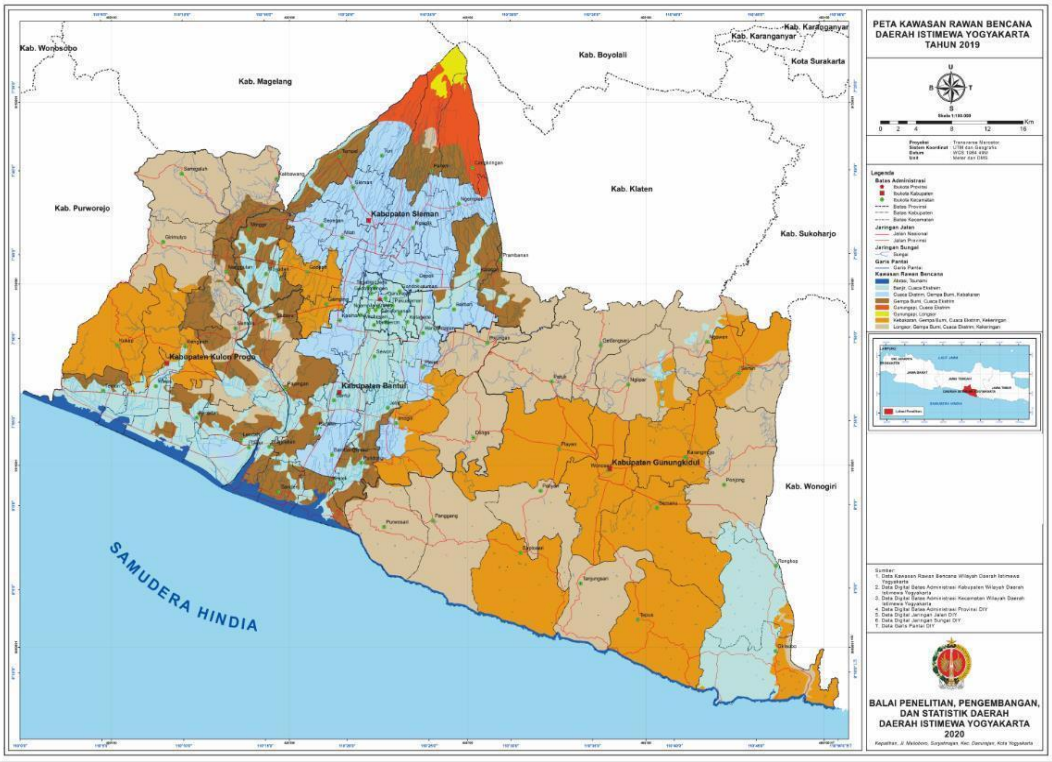
e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari.

f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman, di Kabupaten Sleman.

g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kapanewon Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

Gambar 2- 16 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana dianalisis melibatkan variabel Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, dan Tingkat Kapasitas yang ada pada suatu daerah. Tingkat Bahaya (*hazard*) diperoleh diantaranya dengan menghitung parameter fisik suatu kawasan seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, ketebalan tanah, jenis batuan dasar, penutup lahan, dan parameter lain yang terkait dengan suatu jenis bahaya tertentu. Penilaian Tingkat bahaya juga memperhatikan catatan sejarah kejadian bencana masa lalu pada daerah tersebut. Rincian Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, Tingkat Kapasitas, dan Tingkat Risiko Bencana di DIY, seperti tercantum pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 9 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022-2026

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3.	Covid-19	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5.	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
7.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8..	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9.	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
10.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
11.	Letusan Gunungapi Merapi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
12.	Likuifaksi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
13.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
14.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana DIY Tahun 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di DIY didominasi oleh bencana dengan tingkat bahaya tinggi yakni 11 dari 14 jenis bencana. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu Epidemi Wabah Penyakit dan kegagalan teknologi serta likuifaksi dengan tingkat bahaya sedang. Penentuan tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY. Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

Tabel 2- 10 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	140,92	125,15	124,15	119,56	108,15	102,83

Sumber: Dataku Bapperida DIY , 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negative yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai IRBI, diartikan semakin baik. Berdasarkan IRBI tahun 2024 yang dirilis BNPB pada awal 2025, DIY memiliki indeks risiko bencana 102,83 (kategori sedang). Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2023, dengan indeks risiko bencana 108,15. Capaian 2023 dan 2024 tersebut mencerminkan konsistensi keberhasilan capaian penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY, dengan kondisi awal pada tahun 2019 indeks risiko bencana DIY sebesar 148,00 (kategori tinggi).

Tabel 2- 11 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 – 2024

No	Jenis Bencana Alam	Tahun							Satuan	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*		
1	Longsor	216	506	475	351	677	438	39	kali/tahun	BPBD
2	Banjir	12	12	15	16	78	14	8	kali/tahun	BPBD
3	Angin Ribut	147	168	167	156	165	149	381	kali/tahun	BPBD
4	Kebakaran Rumah dan Pemukiman	270	542	255	187	106	459	17	kali/tahun	BPBD
5	Gempa Bumi	124	122	135	245	756	1.756	1.565	kali/tahun	BPBD
6	Gunung Meletus	12	4	9	2	2	1	0	kali/tahun	BPBD
7	Tsunami	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
8	Badai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
9	Kebakaran Hutan	0	0	0	0	1	250	12	kali/tahun	BPBD
10	Kekeringan	1	1	1	0	0	2	1	kali/tahun	BPBD

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Selama tahun 2018 -2024, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, angin ribut, kebakaran, dan gempa bumi. Pada tahun 2024, bencana alam paling tinggi adalah gempa bumi yang terjadi sebanyak 1.565 kali.

Tabel 2- 12 Korban Bencana DIY Tahun 2018-2024

Jumlah Korban Bencana	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Meninggal	36	13	334	13	60	27	3
Luka-Luka	109	50	65	37	51	176	14
Hilang	n/a	0	0	0	11	13	3
Menderita	n/a	0	0	0	310	16.409	n/a
Mengungsi	n/a	29	235	118	593	389	n/a

Sumber: Dataku Bappeda DIY, BPBD DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.2 Aspek Demografi

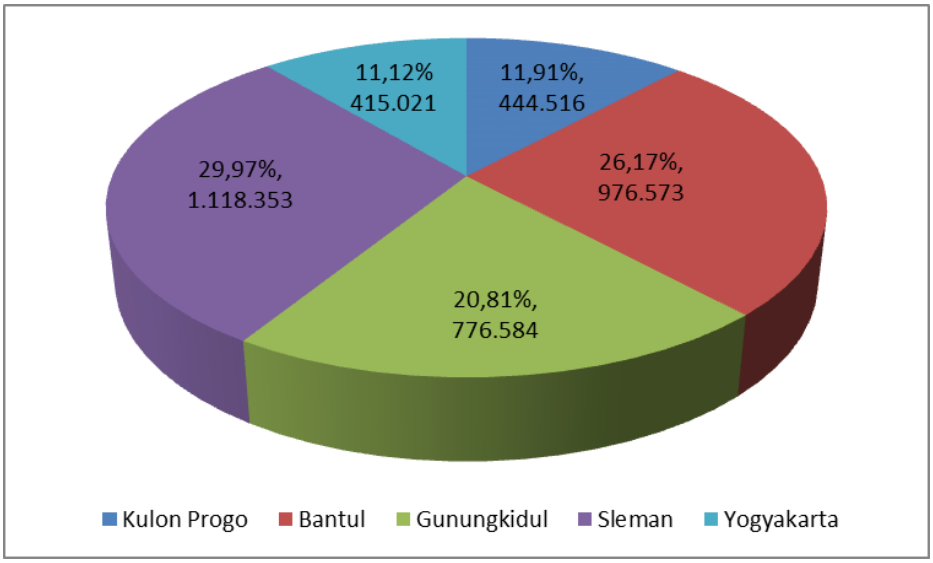
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2019 sebanyak 3.842.932 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu pada kisaran 97 – 98, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka *sex ratio* penduduk DIY tahun 2019 hingga tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 13 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2019 – 2024

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	3.842.932,00	3.668.719,00	3.712.896,00*	4.021.816,00*	3,722,296	3,731,041
Laki-Laki	1.901.735,00	1.817.927,00	1.838.821,00	1.984.154,00	1,842,667	1,847,223
Perempuan	1.941.197,00	1.850.792,00	1.874.075,00	2.037.662,00	1,879,629	1,883,824
Sex Ratio	97,97	98,22	98,12	97,37	98.03	98.06

Sumber: BPS, 2022 Biro Tapem DIY 2024 data diolah

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.118.353 jiwa atau 29,97% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling banyak kedua yaitu sebanyak 976.573 jiwa atau sekitar 26,17%. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Kota Yogyakarta sebanyak 415.021 jiwa (11,12%).



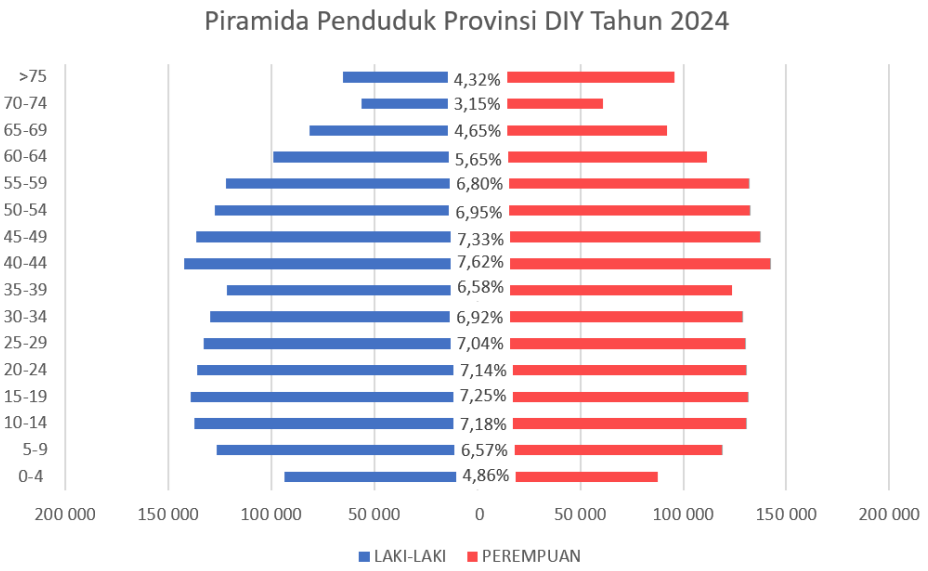
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (Data Diolah)

Gambar 2- 17 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 7,04% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 6,92%. Meskipun dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar, namun tampaknya sebagian usia produktif sudah bergeser ke kelompok paruh baya. Tampak bahwa proporsi kelompok umur tertinggi berada pada kelompok usia 40-44 tahun 7,62% dan kelompok usia 44-49 tahun 7,33 %. Tampaknya bonus demografi bagi DIY sudah mulai berakhir sehingga patut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam strategi pemanfaatan sumberdaya manusia usia produktif yang optimal.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Gambar 2- 18 Komposisi Penduduk DIY semester 1 Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data Biro Tapem DIY tahun 2024, tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2024 0,235%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,005% dan tertinggi di Kabupaten Sleman 0,516%.

Tabel 2- 14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024

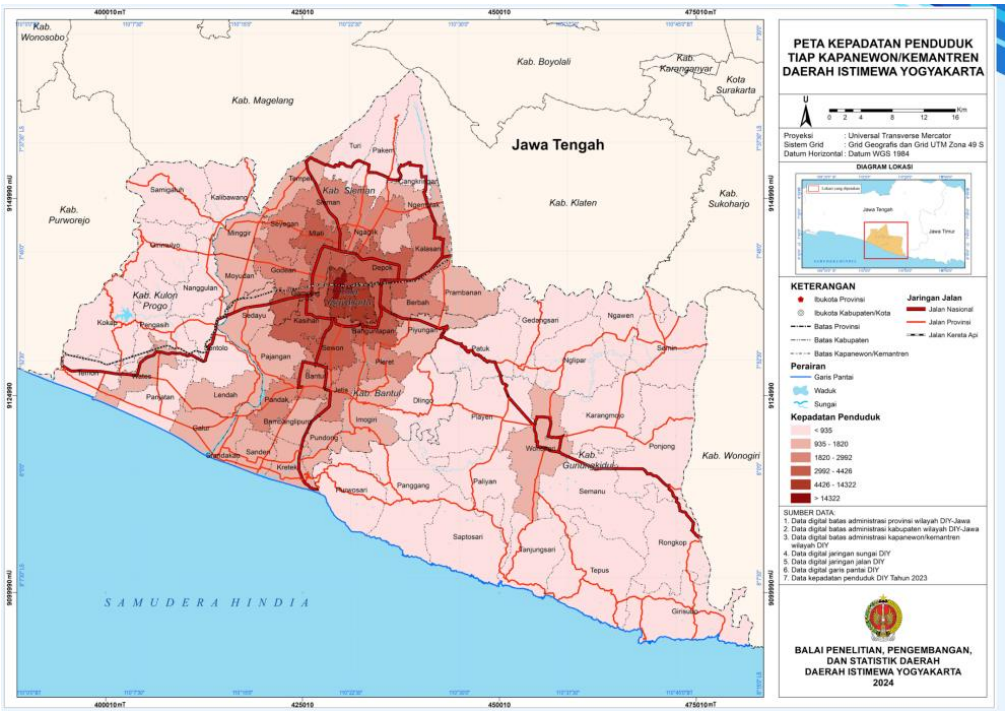
Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kulon Progo	1,05%	0,99%	2,11%	0,16%	0.59%	0.376%*
Kabupaten Bantul	1,16%	1,14%	1,75%	0,81%	0.82%	0.454%*
Kabupaten Gunungkidul	0,89%	0,88%	1,97%	0,10%	0.18%	0.005%*
Kabupaten Sleman	1,07%	1,06%	1,27%	0,90%	1.34%	0.516%*
Kota Yogyakarta	1,04%	0,93%	0,98%	-0,65%	0.46%	0.076%*
DI Yogyakarta	1,15%	1,02%	1,61%	0,45%	0.77%	0.235%*

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020 Biro Tapem DIY 2024 (data diolah)
*Keterangan: *) Angka smester 1 2024*

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2024 dengan posisi data jumlah penduduk per semester 1 tahun 2024 dari Biro Tapem DIY mencapai 1.176,75 jiwa per Km^2. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.645,37 jiwa per Km^2,
2. Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.949,20 jiwa per Km^2,
3. Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.908,49 jiwa per Km^2,
4. Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 770,10 jiwa per Km^2, dan
5. Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 526,44 jiwa per Km^2 .

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2024

Gambar 2- 19 Peta Kepadatan Penduduk DIY

Tabel 2- 15 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	1.151,58	1.165,00*	1.262,42	1,173.99	1176.75
Kulon Progo	744,00	756,00 *	764,36	773.00	770,10
Bantul	1.940,00	1.970,00*	2.099,80	1,899.84	1.908,49
Gunungkidul	522,00	510,00 *	522,91	526.47	526,44
Sleman	1.959,00	1.977,00	2.231,66	1,939.20	1.949,20
Yogyakarta	11.495,00	11.579,00	13.842,77	12,636.13	12.645,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

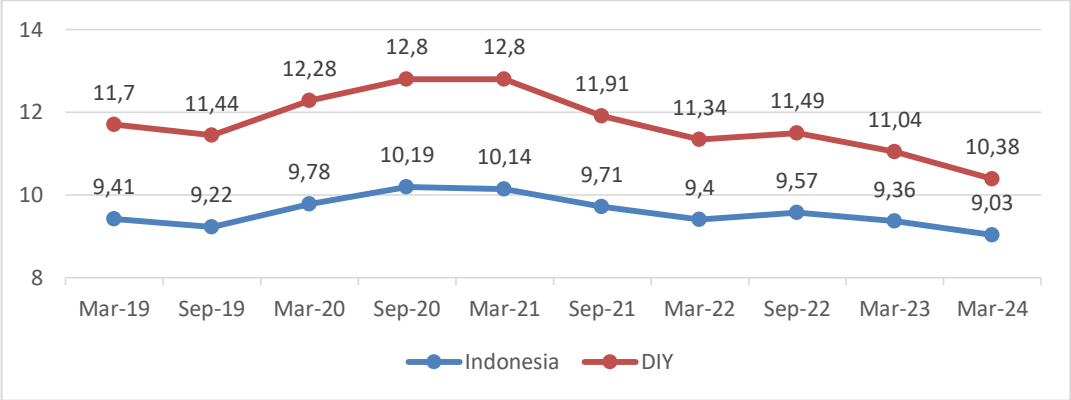
Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Data tingkat kemiskinan diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara, indikator pendapatan per kapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukan besarnya rata- rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.2.1.1.1 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan DIY pada periode Maret 2019 – Maret 2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tetapi, pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022, tren tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 dan Maret 2024 kemiskinan kembali mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,83 persen turun 0,66 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 1,11 poin persen dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 445,55 ribu orang dan turun 2,9 ribu orang terhadap Maret 2023. Apabila dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2024 turun 18,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin di DIY masih berada di atas angka kemiskinan nasional per Maret 2024 yang sebesar 9,03%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2019–Maret 2024

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 2- 16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019 - 2024 (%)

Nama Wilayah	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)	2022 (Maret)	2023 (Maret)	2024 (Maret)
DIY	11,7	12,8	12,8	11,34	11,04	10,38
Kulon Progo	17,39	18,01	18,39	18	15,64	15,62
Bantul	12,92	13,5	13,5	10,56	11,95	11,66
Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	17,69	15,60	15,18
Sleman	7,41	8,12	8,12	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	6,84	7,27	7,27	6,62	6,49	6,26

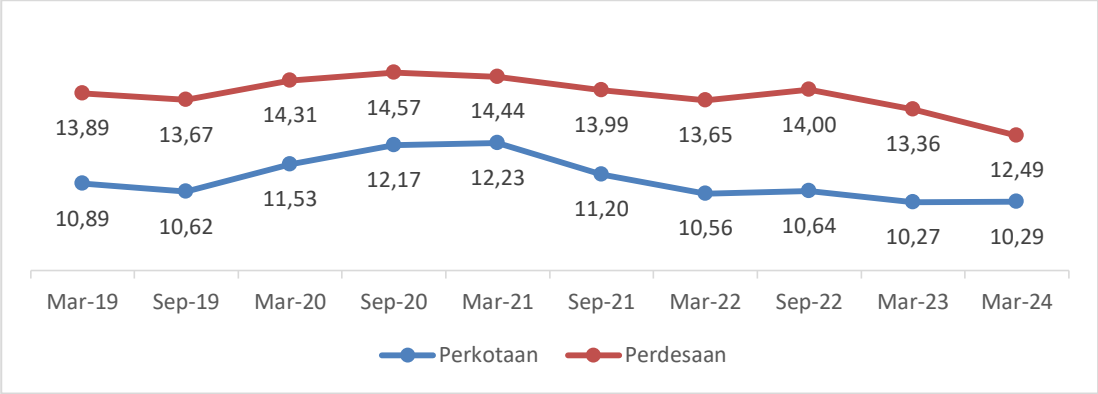
Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Jumlah penduduk miskin di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan DIY sebanyak 319,40 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 126,15 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 12,49 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 12 hingga 13 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,29 persen. Pada periode September

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2022 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 1,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 16,4 ribu orang. Pada kurun waktu 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 18,1 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,35 poin persen. Sementara itu persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 1,51 persen poin. Dalam 18 bulan terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 0,66 poin persen.

Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*, keempat memberikan ruang partisipasi masyarakat serta memberikan semangat. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dari pengambilan keputusan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan potensi, sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Selain hal tersebut, Pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

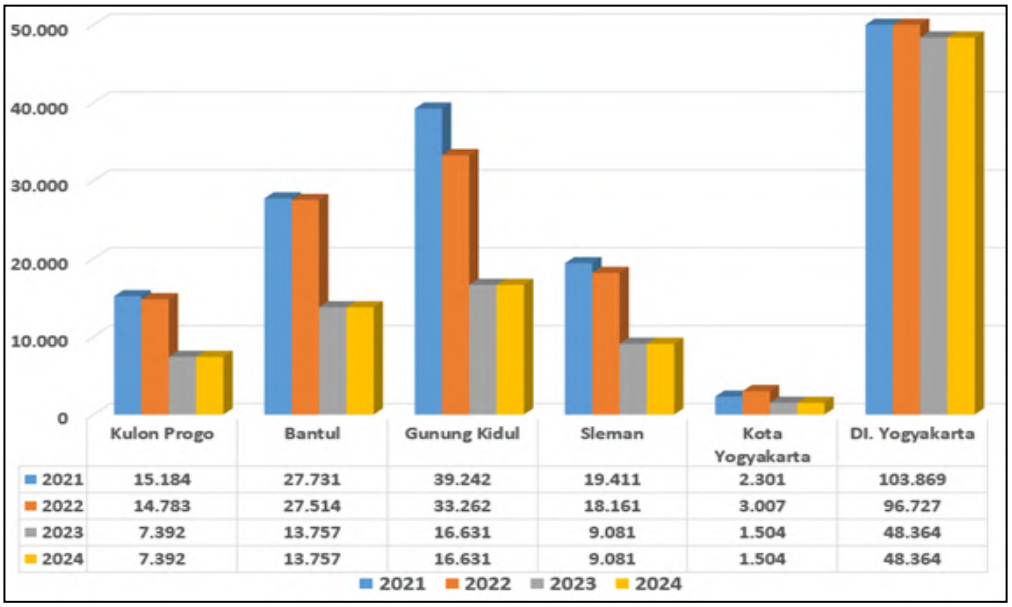


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 21 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2019 – Maret 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 2,2 persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2023 – Maret 2024 di perdesaan turun sebanyak 0,87 persen poin dan di perkotaan naik sebanyak 0,02 persen poin.



	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DI. Yogyakarta
2021	15.184	27.731	39.242	19.411	2.301	103.869
2022	14.783	27.514	33.262	18.161	3.007	96.727
2023	7.392	13.757	16.631	9.081	1.504	48.364
2024	7.392	13.757	16.631	9.081	1.504	48.364

Sumber: Sebermas Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 22 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh otoritas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang *exclusion error*, demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sosial. DTKS diperoleh dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Pendaftaran fakir miskin kedalam DTKS tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Upaya sinergi lintas sektor diwujudkan di lingkup Pemda DIY maupun dengan pihak-pihak di luar Pemda DIY untuk mengarah kepada lokus kapanewon/kemantren prioritas penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 400.9.14/6076 tanggal 12 September 2024 tentang Penyampaian Lokus Kapanewon dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan bahwa terdapat 15 kapanewon dan 3 kemantren yang menjadi lokus penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin adalah memprioritaskan lokasi/wilayah penanggulangan kemiskinan dengan mengangkat potensi sumber daya alam dan manusia serta kelembagaan yang ada dilokasi tersebut. Upaya penentuan lokus ini juga digunakan dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga terwujud pemertaan pembangunan dan keadilan sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan kelanjutan dari penentuan atau pemetaan 15 Kecamatan prioritas kemiskinan yang sudah dirintis oleh Tim Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2017. Dan merupakan bagian dari monitoring evaluasi terhadap 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan di Tahun 2021. Rentang waktu 3 tahun yang sudah berjalan tentunya sudah banyak perubahan indikator dan sudah banyak lokasi yang ter intervensi sehingga memiliki sajian data yang berubah cukup jauh. Oleh karena itu, Tim Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan bagian dari TKPKD DI. Yogyakarta melakukan kajian ulang atau monitoring dan evaluasi terkait dengan penentuan lokus kecamatan/kapanewon dengan menggunakan data terbaru.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2024 telah dilakukan kajian monitoring dan evaluasi atas 15 (lima belas) lokus tahun 2021 dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu : (1). Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 + 2 tahun 2024, (2), Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, (3). Food *Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Tahun 2023, (4). Rumah Tidak Layak Huni (Atap, Lantai, Dinding) Tahun 2024, (5). Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak Tahun 2024, (6). Rumah Tangga Tanpa Sumber Air Layak Tahun 2024, dan (7). Rumah Tangga Tanpa Sambungan Listrik Tahun 2024. Terdapat 5 (lima) Kapanewon baru yang bergeser yang menjadi lokus prioritas penanggulangan kemiskinan, yaitu : Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Dlingo dan Pandak Kabupaten Bantul, Kapanewon Semin dan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Berkaitan dengan penyelarasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, diharapkan OPD DIY dan Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya untuk menjadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan program kegiatan terutama penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2- 17 Daftar 15 Kapanewonan dan 3 Kemantren Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2025

Gunungkidul	Kulon Progo	Bantul	Sleman	Kota Yk
Gedangsari	Kokap	Imogiri	Tempel	Umbulharjo
Saptosari	Pengasih	Pandak		Gondomanan
Playen	Sentolo	Dlingo		Danurejan
Ponjong	Girimulyo			
Tepus				
Semin				
Rongkop				

Sumber: Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 400.9.14/6076 tentang Penyampaian Lokus Kapanewon dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: TKPKD DIY, 2024

Gambar 2- 23 Peta Sebaran Kecamatan dan Kemantren Prioritas Kemiskinan di DIY Tahun 2025

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan DIY sebesar Rp602.437,00 per kapita per bulan. Apabila nilai tersebut dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,13 persen. Sementara itu, jika dibandingkan September 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,27 persen. Pada Maret 2024, garis kemiskinan di daerah perkotaan tercatat sebesar Rp628.626,00 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan di perdesaan sebesar Rp524.188,00 per kapita per bulan. Laju peningkatan garis kemiskinan di perkotaan lebih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tinggi daripada di perdesaan selama periode September 2022 - Maret 2024. Garis kemiskinan perkotaan meningkat sebesar 9,53 persen, dari Rp573.915,00 per kapita per bulan menjadi Rp628.626,00 per kapita per bulan. Pada periode yang sama, garis kemiskinan perdesaan meningkat sebesar 9,03 persen, dari Rp480.767,00 per kapita per bulan menjadi Rp524.188,00 per kapita per bulan. Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, besaran laju peningkatan garis kemiskinan di perkotaan sebesar 4,96 persen dan di perdesaan sebesar 4,85 persen. Apabila memperhatikan Garis Kemiskinan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih tinggi dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 sebesar 72,69 persen.

Tabel 2- 18 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2019 – 2024 (Maret 2019 – Maret 2024)

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507.007	414.240
September 2021	358.285	438.412
Maret 2022	543.821	455.583
September 2022	573,915	480,767
Maret 2023	598.925	499.942
Maret 2024	628.626	524.188

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2- 19 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, Maret 2024 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	19,23	Beras	21,64
Rokok kretek filter	7,93	Rokok kretek filter	5,93

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Daging ayam ras	6,17	Daging ayam ras	4,57
Telur ayam ras	4,90	Telur Ayam Ras	4,30
Kue Basah	3,29	Tempe	2,54
Non Makanan			
Perumahan	8,83	Perumahan	9,41
Bensin	5,77	Bensin	5,35
Listrik	2,52	Listrik	1,41
Pendidikan	2,01	Pendidikan	1,04
Perlengkapan mandi	1,08	Perlengkapan mandi	1,04

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Permasalahan kemiskinan bukan hanya pada berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada kurun waktu 18 bulan terakhir nilai indeks P1 DIY mengalami kenaikan. Pada September 2022, indeks P1 tercatat sebesar 1,526. Kemudian, pada Maret 2023, indeks P1 mengalami kenaikan menjadi 1,717. Pada Maret 2024, indeks P1 naik kembali menjadi sebesar 1,867. Kenaikan indeks P1 selama 18 bulan terakhir ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.

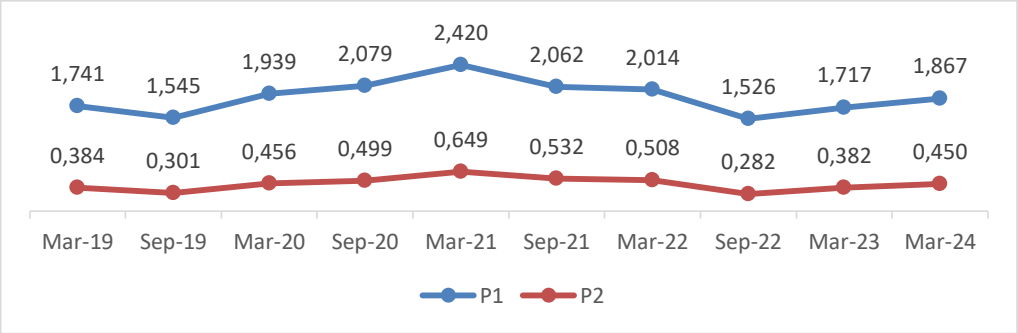
Apabila dibandingkan antara daerah perdesaan dan perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mengalami peningkatan, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat pada rentang waktu yang sama. Pada September 2022 indeks P2 tercatat sebesar 0,282. Pada Maret 2023, indeks P2 mengalami kenaikan menjadi 0,382. Selanjutnya pada Maret 2024, nilai indeks P2 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,450. Kenaikan indeks P2 selama 18 bulan terakhir memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah.

Pada daerah perkotaan DIY, nilai indeks P2 perkotaan selama 18 bulan terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada September 2022 indeks P2 perkotaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebesar 0,249. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami peningkatan menjadi 0,373. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,421. Secara umum, peningkatan P2 ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Di perdesaan DIY, indeks P2 menunjukkan juga kecenderungan yang meningkat. Pada September 2022, indeks P2 perdesaan sebesar 0,382. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 naik menjadi 0,411. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,450. Secara umum, peningkatan P2 di perdesaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin bertambah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 24 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2019 – Maret 2024)

2.2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. PDRB ADHK DIY selama kurun waktu 2020-2024 menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK sebesar Rp101.698.520 juta rupiah dan pada tahun 2024 mencapai Rp124.590.449 juta rupiah atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,21% per tahun. Kinerja perekonomian DIY tahun 2024 yang diukur dari laju

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 5,03% dengan didukung oleh semua lapangan usaha tumbuh positif pada periode ini, bahkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh dua digit, mencapai 10,67%.

Tabel 2- 20 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.534.640	8.638.195	9.077.782	9.169.836	9.177.045
Pertambangan dan Penggalian	508.376	492.583	501.032	517.326	556.398
Industri Pengolahan	12.632.114	12.670.457	12.890.390	13.442.254	13.929.576
Pengadaan Listrik dan Gas	162.930	166.847	178.220	191.259	211.674
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103.901	110.988	114.639	118.570	119.622
Konstruksi	9.636.836	10.679.271	11.193.381	11.732.073	12.722.048
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.254.025	8.379.070	8.779.726	9.159.474	9.519.981
Transportasi dan Pergudangan	4.383.207	4.471.410	5.287.738	5.830.822	6.188.170
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.494.206	9.130.595	10.259.812	11.158.458	12.102.323
Informasi dan Komunikasi	13.994.336	16.329.803	16.907.386	17.698.501	18.436.586
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.763.916	3.818.583	4.018.731	4.432.251	4.721.387
Real Estate	7.594.530	7.634.201	7.864.688	8.155.532	8.487.824
Jasa Perusahaan	1.041.994	1.126.301	1.206.945	1.306.867	1.376.821
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.310.590	7.282.365	7.497.262	7.680.429	8.189.852
Jasa Pendidikan	9.555.495	10.033.094	10.131.245	10.575.419	11.071.373
Jasa Kesehatan & KegiatanSosial	3.294.799	3.442.202	3.579.580	3.805.736	4.008.276
Jasa Lainnya	2.432.625	2.966.595	3.412.765	3.650.736	3.771.494

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB	101.698.520	107.372.560	112.901.323	118.625.543	124.590.449

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi factor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian penduduk.

Tabel 2- 21 PDRB dan PDRB Per Kapita DIY Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (juta rupiah)					
- ADHB	138.117.838	149.413.650	165.724.525	180.696.042	193.514.560
- ADHK 2010	101.698.520	107.372.560	112.901.323	118.625.543	124.590.449
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
- ADHB	37.694	40.516	44.637	48.358	51.473
- ADHK 2010	27.754	29.116	30.411	31.748	33.140
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (%)	2,75	4,91	4,45	4,40	4,39

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Pada tahun 2024, secara nominal PDRB per kapita DIY sebesar 51.473 ribu rupiah, meningkat sekitar 3.115 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Secara riil, sepanjang tahun 2020-2024, PDRB per kapita DIY tumbuh dikisaran 4,18%. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDRB per kapita DIY sebesar 4,39% sedikit melambat apabila dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita DIY tahun 2023 sebesar 4,40%. PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

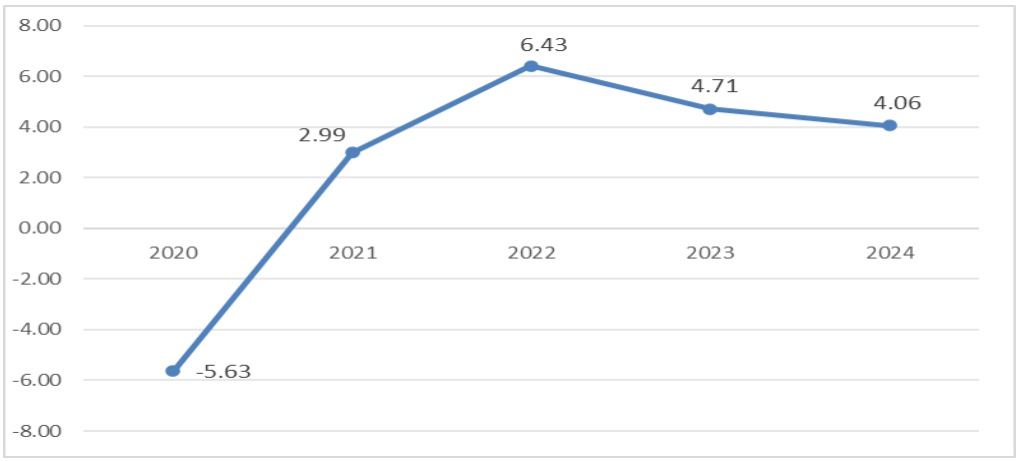
Tabel 2- 22 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2020-2024

Sektor Dominan di DIY	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Juta Rp)					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.534.640	8.638.195	9.077.782	9.169.836	9.177.045
Industri Pengolahan	12.632.114	12.670.457	12.890.390	13.442.254	13.929.576
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.494.206	9.130.595	10.259.812	11.158.458	12.102.323
Laju Pertumbuhan per Sektor (%)					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,28	1,17	5,12	1,14	0,08
Industri Pengolahan	-4,31	0,3	1,76	4,26	3,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,86	7,49	12,4	8,72	8,46
Kontribusi per Sektor (%)					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,18	9,77	9,97	10,23	9,92
Industri Pengolahan	12,77	12,35	11,93	11,82	11,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	9,13	9,88	10,18	10,59
Kontribusi Tiga Sektor Dominan (%)	31,81	31,25	31,79	32,23	32,24
Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan (%)	-5,63	2,99	6,43	4,71	4,06

Sumber: BPS, 2025 diolah

Dari sisi Lapangan Usaha dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan tiga sektor utama terhadap perekonomian DIY. Kegiatan sektor tersebut selama 2020-2024 berkontribusi rata-rata sebesar 31,86% terhadap keseluruhan PDRB DIY. Sementara itu pada tahun 2024, kontribusi ketiga sektor tersebut sebesar 32,24% terhadap PDRB. Pertumbuhan ketiga sektor tersebut relatif cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan ketiga sektor tersebut mulai membaik, dan mencapai 6,43% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ketiga sektor tersebut menurun menjadi 4,71% dan pada tahun 2024 pertumbuhan tiga sektor dominan sebesar 4,06% cenderung melambat apabila dibandingkan tahun 2023.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

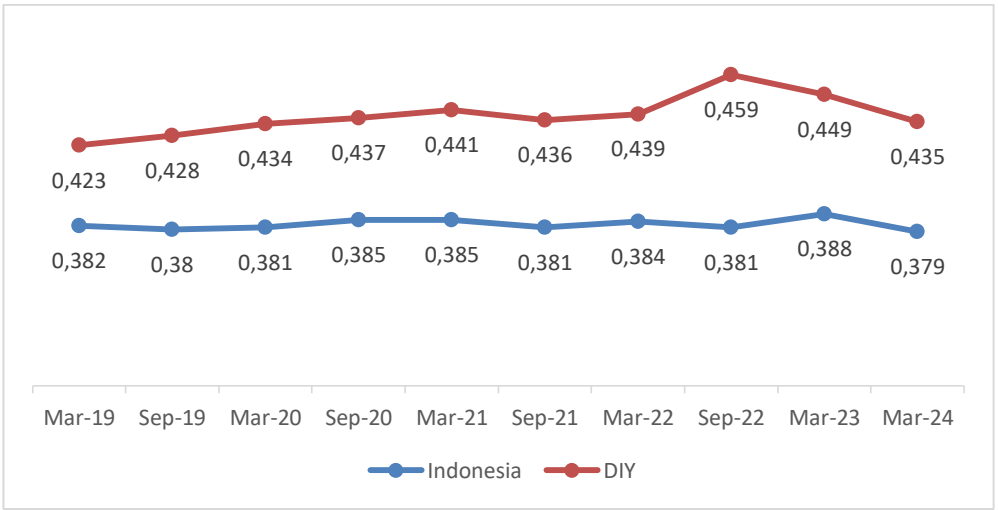


Sumber: BPS, 2025 diolah

Gambar 2- 25 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2020-2024

2.2.1.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Gambar di bawah menunjukkan perkembangan Rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2019 – Maret 2024 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY diukur dengan menggunakan indikator gini rasio sebesar 0,435. Angka ini turun 0,014 poin jika dibandingkan Maret 2023 yang besarnya 0,449. Angka gini rasio Maret 2024 turun sebesar 0,024 poin dibandingkan September 2022 (0,459).

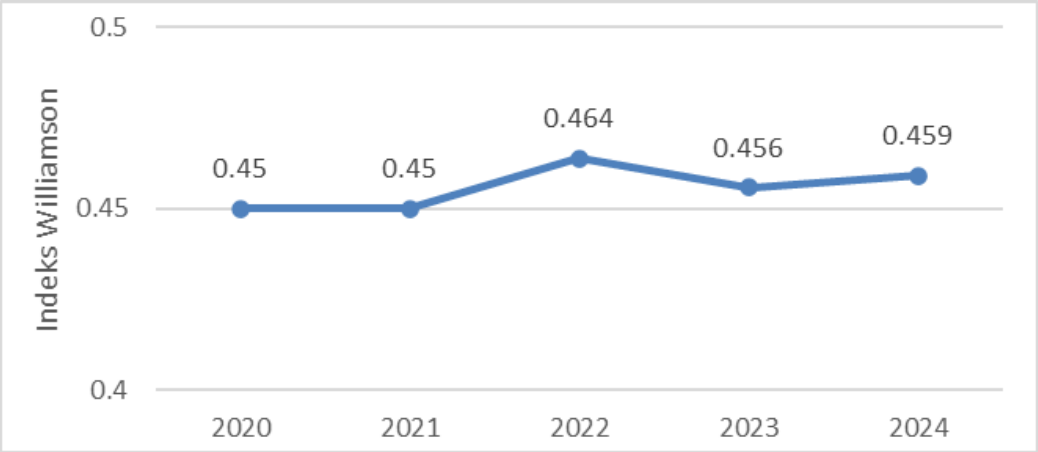


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 26 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2019 – Maret 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Williamson pada periode 2020-2024, pada gambar di bawah, menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 0,456 di tahun 2023 menjadi 0,459 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin meningkat atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin melebar.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 27 Indeks Williamson DIY Tahun 2020 – 2024

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2024 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2- 23 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2020-2024 (juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	11.654.320	12.443.064	14.315.380	15.847.210	16.911.590
Bantul	26.161.313	28.090.839	31.182.590	34.011.590	36.478.720
Gunungkidul	18.972.196	20.418.147	22.748.830	24.976.310	26.705.330
Sleman	45.833.487	49.500.004	54.702.460	59.431.540	63.683.200
Kota Yogyakarta	35.757.539	38.416.518	42.623.750	46.192.500	49.389.880
D I Y	138.306.83	149.369.16	165.725.52	180.696.04	193.514.56

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Ketimpangan pembangunan antara wilayah di DIY disebabkan oleh terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY, sementara kontribusi tiga daerah lainnya secara rata-rata sebesar 39,94% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,5% dari keseluruhan output DIY selama periode 2020-2024.

Tabel 2- 24 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2020-2024

Kabupaten dan Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	8,49	8,48	8,65	8,78	8,75
Bantul	18,91	18,86	18,83	18,85	18,71
Gunungkidul	13,70	13,70	13,74	13,84	13,99
Sleman	33,04	33,12	33,04	32,93	32,87
Yogyakarta	25,85	25,84	25,74	25,60	25,67
Total 3 Wilayah (Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul)	41,10	41,04	41,22	41,47	41,45

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 diolah

2.2.1.1.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2- 25 Laju Inflasi DIY Tahun 2019-2024

Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,42	0,27	0,54	0,59	0,17	0,07
Februari	-0,08	0,40	0,14	0,05	0,27	0,33

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

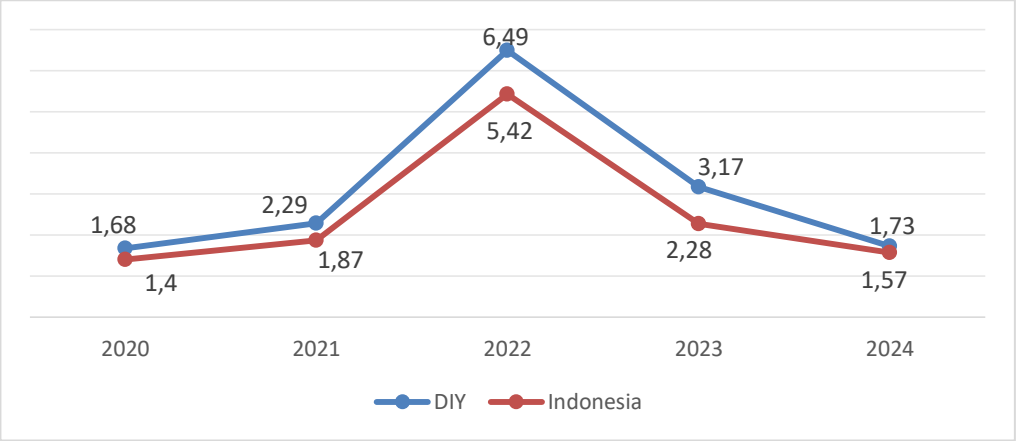
Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maret	0,26	0,07	0,08	0,77	0,60	0,57
April	0,46	-0,24	0,01	1,14	0,22	0,36
Mei	0,42	0,22	0,07	0,75	0,35	-0,04
Juni	0,25	0,08	0,05	0,52	0,02	-0,19
Juli	0,05	-0,08	0,11	0,47	0,28	-0,01
Agustus	0,07	-0,04	0,05	-0.12	-0,04	0,04
September	-0,07	0,03	-0,17	1,05	0,29	-0,16
Oktober	0,18	0,08	0,24	0.11	0.25	0,07
November	0,31	0,13	0,45	6,54	0,35	0,21
Desember	0,46	0,48	0,71	6,57	0,35	n/a
Inflasi Tahunan	2,77	1,40	2,29	6, 49	3,17	n/a

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2022 sebesar 6,49% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,85%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,92%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,11%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,10%; kelompok Kesehatan sebesar 3,89%. Pada tahun 2024 laju inflasi DIY sebesar 1,73%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,49 persen dan tahun 2023 sebesar 3,17 persen.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2020-2024

Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2023 berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2023. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2023 antara lain cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit, dan gula pasir. Pada tahun 2022, inflasi baik di DIY maupun nasional mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Pada tahun 2023 laju inflasi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022.

2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteran sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan

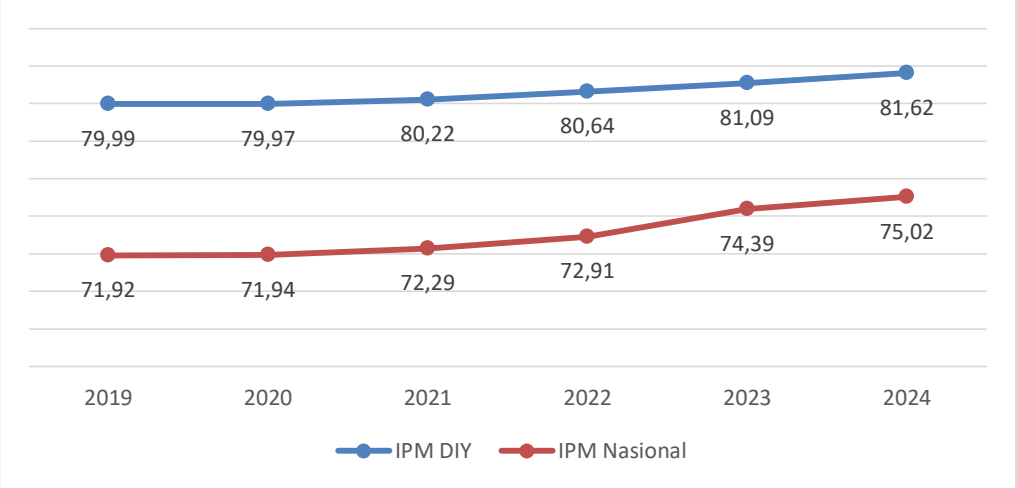
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sosial. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambarankondisisaatinidan menemukan permasalahan yang ada.

2.2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi 79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Namun angka IPM meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2024 mencapai 81,62 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,53 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM.

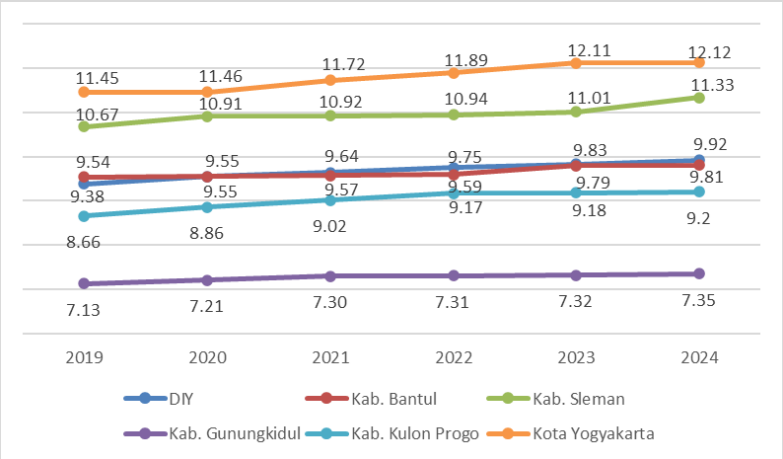


Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 29 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 – 2024 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2019, menunjukkan IPM nasional 71,92 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,99. Sedangkan pada tahun 2024, IPM Nasional menunjukkan angka 75,02 dan untuk DIY mencapai 81.62. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 30 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori "sangat tinggi" (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori "tinggi" (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori "sedang", namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori "tinggi".

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2024 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 85,71 dan 82,05. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (IPM≥80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,18 dan 72,14. Masih adanya perbedaan nilai (*gap*) antara IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar yakni 16,96 poin turun dari *gap* pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,15 poin. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia di DIY.

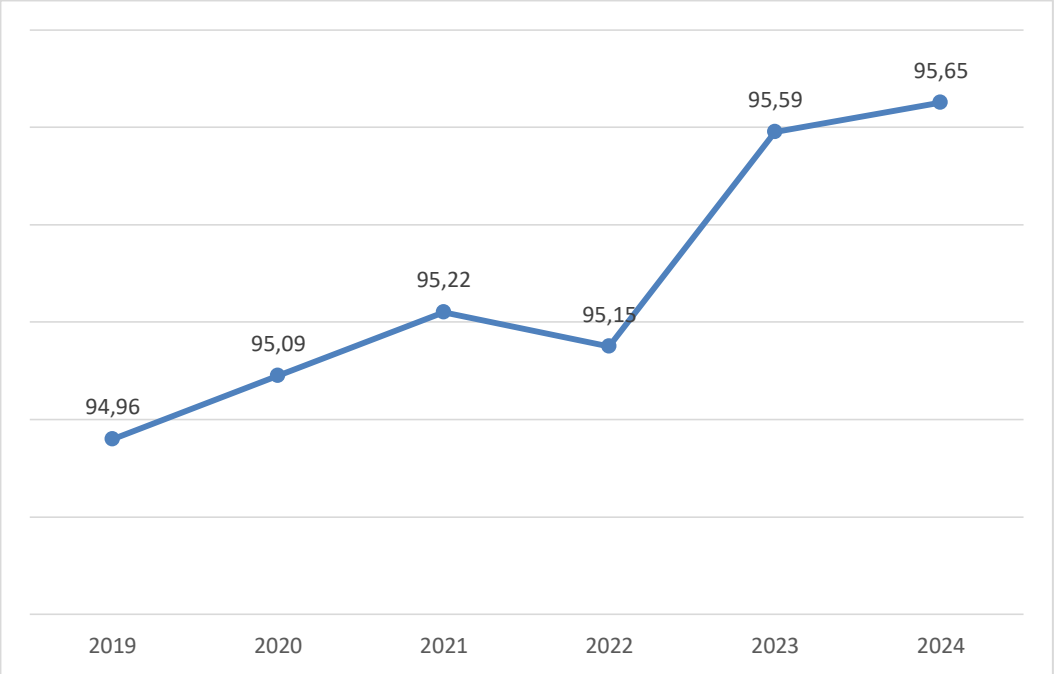
2.2.1.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2019 hingga 2021 sebesar 0,26%. Pada tahun 2019 AMH tercatat sebesar 94,96% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 95,22%. Namun pada tahun 2022 AMH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2021, dari angka 95,22% menjadi 95,15%. Pada tahun 2023 AMH DIY kembali mengalami peningkatan sebesar 0,44% di bandingkan tahun 2022 menjadi 95,59%. Demikian juga pada tahun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2024, AMH DIY kembali meningkat 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 95,65.



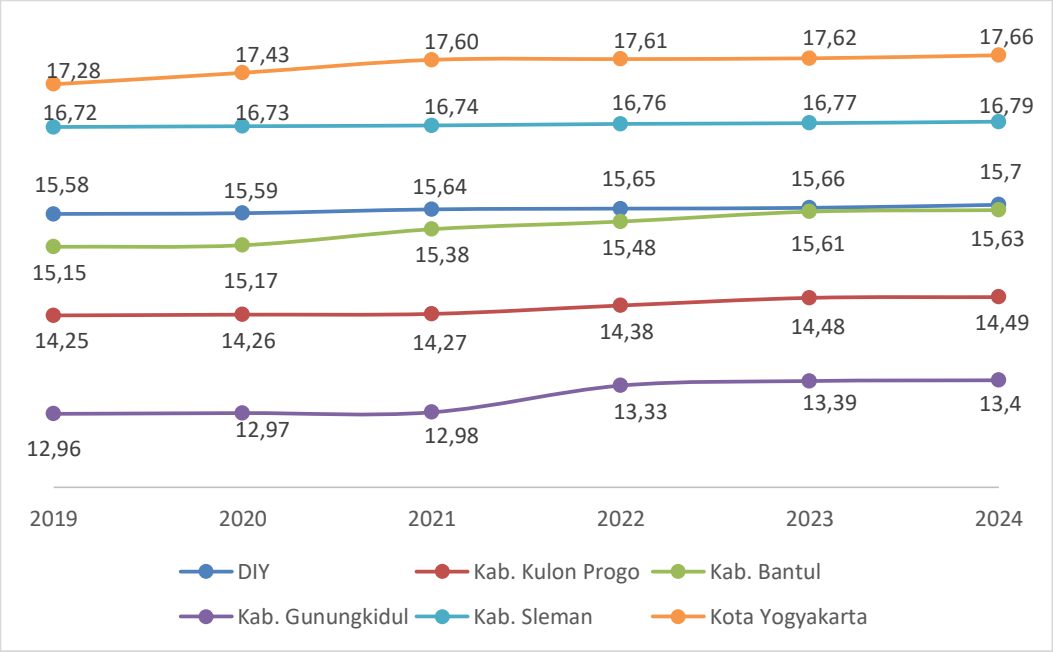
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 31 Perkembangan AMH DIY Tahun 2019 – 2024

2.2.1.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2024, HLS DIY meningkat 0,04 tahun menjadi 15,7 tahun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

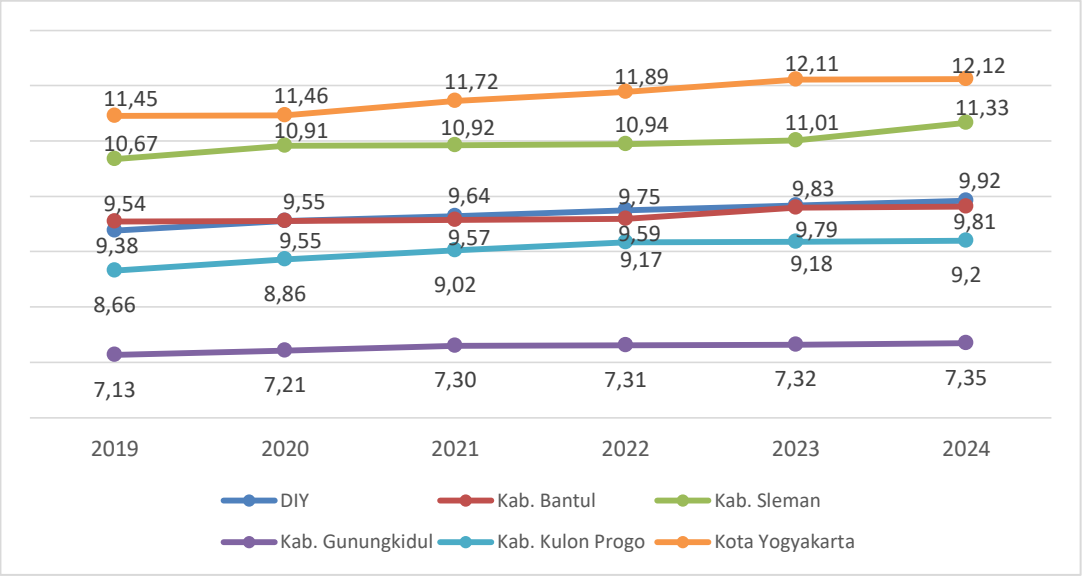
Gambar 2- 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2019-2024

Pada indikator Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul pada tahun 2024 sebesar 13,4 tahun, Kulon progo sebesar 14,49 tahun, dan Bantul sebesar 15,63 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,79 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,66 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa HLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas HLS DIY sedangkan HLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah HLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan HLS kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian HLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan HLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya belum signifikan. Selain itu capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan *gap* yang signifikan dibandingkan dengan capaian HLS di kabupaten/ kota di DIY. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu digali dan prioritas untuk diselesaikan di Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS, diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2019-2024.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 33 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2019-2024

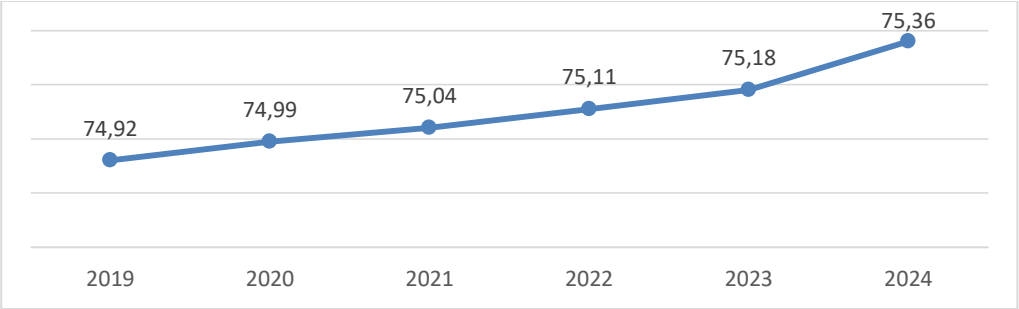
Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu 2019-2023 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,38 di tahun 2019 menjadi 9,92 tahun di tahun 2024. RLS DIY tahun 2024 mengalami percepatan dengan bertambah 0,09 tahun menjadi 9,92 tahun. Capaian RLS kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu tersebut tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2024, RLS tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai 12,12 tahun. Sedangkan RLS terendah sebesar 7,35 tahun berada di Gunungkidul begitu juga Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya ketimpangan (disapritas) capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

2.2.1.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024

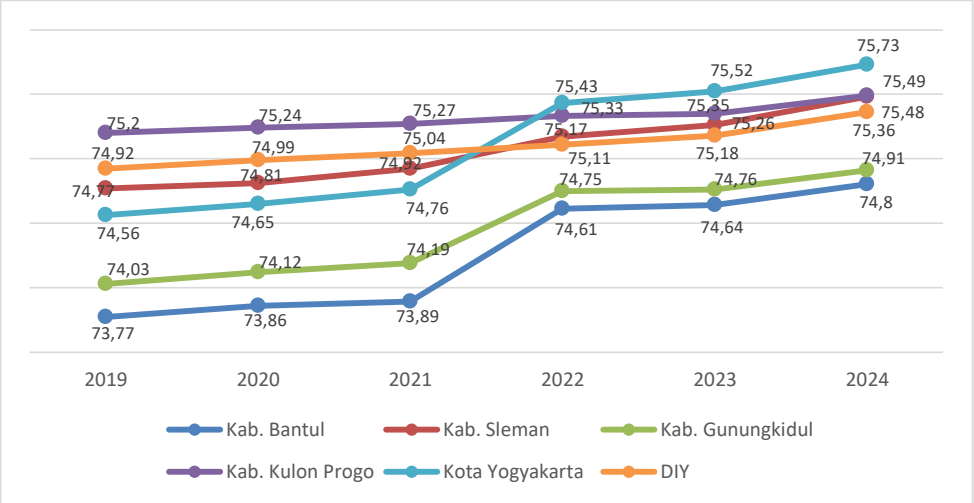
Gambar 2- 34 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2019-2024

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 2019 – 2024 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,92 tahun pada tahun 2018

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

meningkat menjadi 75,36 tahun pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 tahun dari tahun 2023 . AHH saat lahir di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu enam tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, AHH di Kota Yogyakartamencapai 75,73 tahun, lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH pada tahun 2024 terendah di Kabupaten Bantul yang mencapai 74,8. AHH Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya lebih tinggi dari AHH DIY. Mulai tahun 2022 AHH Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman juga lebih tinggi dari AHH DIY . Sedangkan duakabupaten/ kota lainnya berada di bawah AHH DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 35 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024

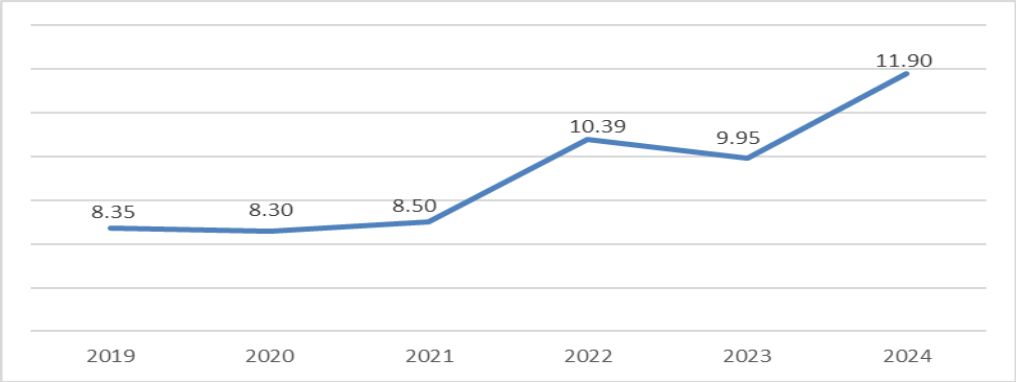
AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.2.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2019 prevalensi balita gizi kurang di DIY yaitu 8,35%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019, dari 8,35% menjadi 8,30%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 10,39%. Pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022, dari 10,39% menjadi 9,95%. Angka sementara pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan prevalensi gizi kurang di DIY yaitu 10,73%. Pada tahun 2022, jumlah balita penderita gizi kurang sebanyak 8.290 balita dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebanyak 6.991 balita. Sedangkan tahun 2024 menunjukkan peningkatan yaitu menjadi sebanyak 8.806 balita. (Dataku Bappeda DIY, 2024).



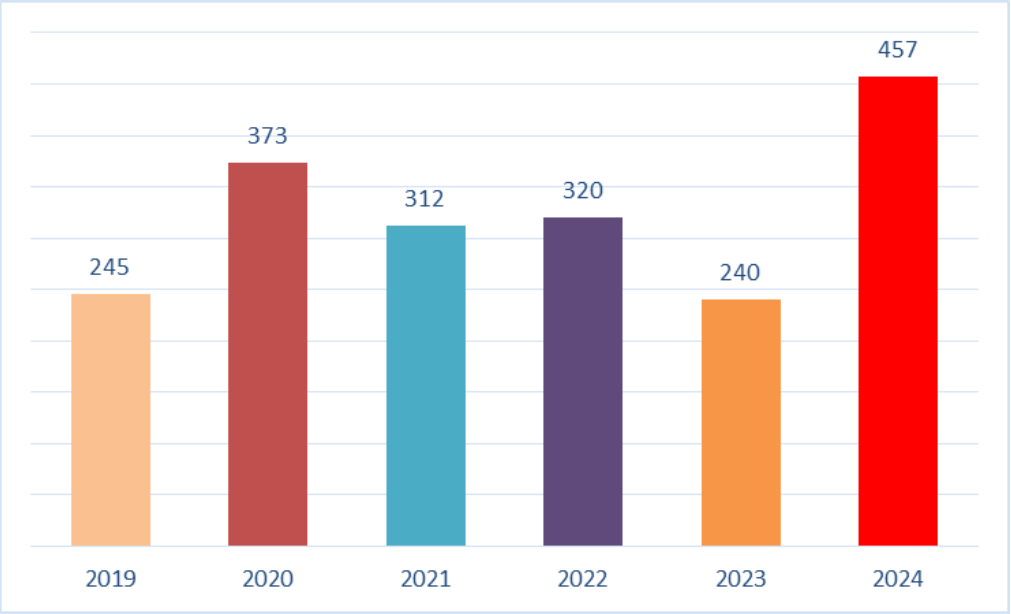
Sumber: Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2024

Gambar 2- 36 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2019 s.d 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.2.7 Balita Gizi Buruk

Pada saat ini, DIY mengalami permasalahan ganda terkait gizi pada balita. Di satu sisi, masih banyak ditemukan balita menderita gizi kurang dan gizi buruk tetapi di sisi lain, balita dengan kasus gizi lebih juga ditemukan. Jumlah balita gizi buruk di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah balita gizi buruk sebanyak 245 balita. Hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 373 balita. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 312 balita. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 320 balita. Tahun 2023 jumlah balita gizi buruk kembali menurun menjadi 240 balita. Sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan jumlah balita gizi buruk sebanyak 457 balita.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 37 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2019-2024 (Balita)

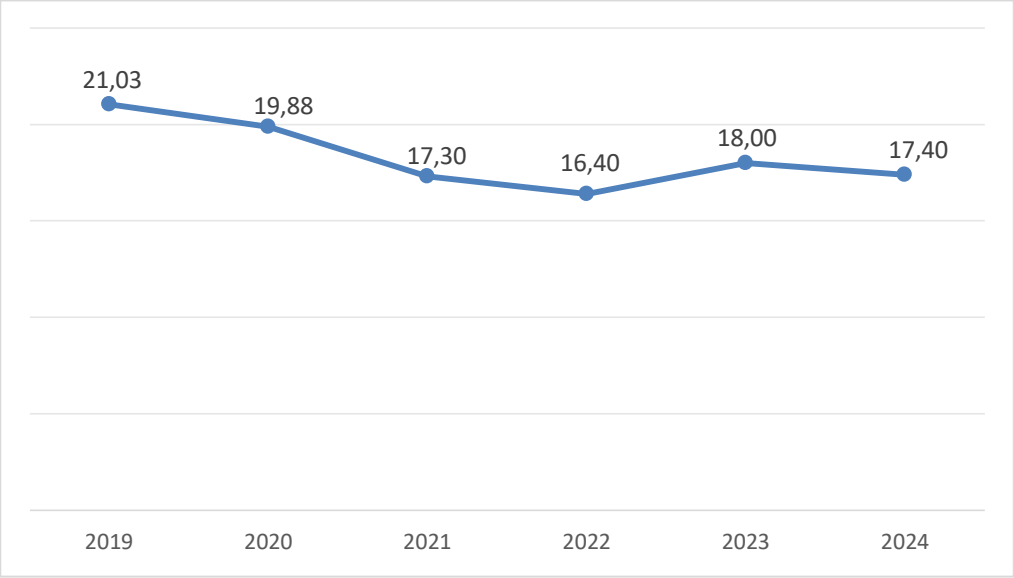
2.2.1.2.8 Persentase Balita *Stunting*

Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). *Stunting* terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi Kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. *Stunting* sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak *stunting* menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit menular.

Prevalensi balita *stunting* berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan capaian prevalensi *stunting* DIY sebesar 21,4% dan menurun di tahun 2019 mencapai 21,03% berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran sehubungan terjadinya pandemi covid 19, tetapi di tingkat pusat menerbitkan buku prediksi *stunting* sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja program *stunting*. Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* DIY sebesar 19,88% dan berturut-turut menurun di tahun 2021 sebesar 17,3% dan tahun 2022 sebesar 16,4% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* DIY kembali meningkat menjadi 18%. Peningkatan angka prevalensi *stunting* juga diikuti oleh kabupaten/kota di DIY kecuali Kabupaten Sleman. Sedangkan pada tahun 2024, prevalensi *stunting* DIY menurun menjadi 17,40%.



Sumber: Riskesdas(2018), SKI (2023 , SSGI (2019-2022, 2024), Buku Data Kesehatan Tahun 2024 Dinas Keshatan DIY (2025)

Gambar 2- 38 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY Tahun 2019-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 26 Perkembangan Balita *Stunting* Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2024 (Persen)

Kabupaten/Kota	2019 (Prediksi)	2021 (SSGBI)	2022 (SSGI)	2023 (SKI)	2024
Kota Yoyakarta	25,42	17,10	13,80	16,80	14,90
Kabupaten Bantul	18,32	19,10	14,90	20,50	16,50
Kabupaten Kulon Progo	27,13	14,90	15,80	21,20	18,00
Kabupaten Gunungkidul	23,84	20,60	23,50	22,20	19,70
Kabupaten Sleman	18,52	16	14,90	12,40	17,30
DIY	21,03	17,30	16,40	18	17,40

Sumber : Riskesdas 2018, Laporan Integrasi Susenas SSGBI 2019, Prediksi Angka Stunting 2020, SSGBI 2021, SSGI 2022, SKI 2023, SSGI 2024, diolah

2.2.1.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

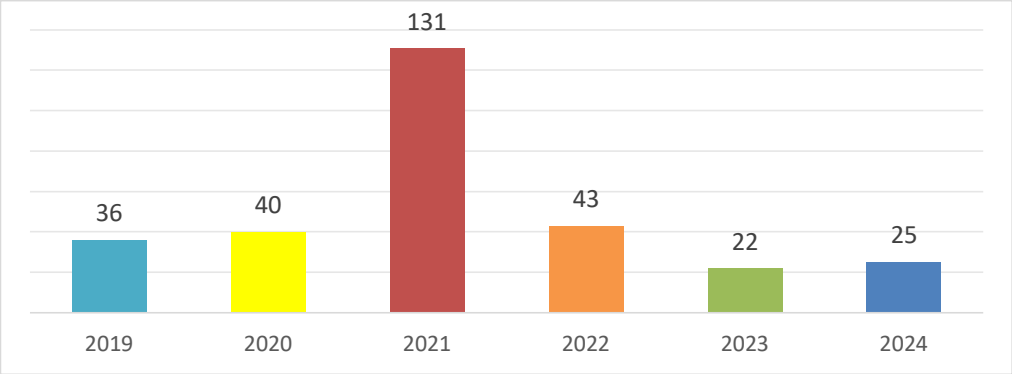
Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau *maternal death* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu.

Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2019 kasus kematian ibu sebanyak 36 kasus, kemudian pada tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus. Dari 131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Pada tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 43 kasus, menurun dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 22 (per 35.078

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kelahiran hidup). Jumlah tersebut tersebar di beberapa kabupaten, yaitu paling banyak di Kabupaten Bantul sebanyak 9 kasus, kemudian Kabupaten Sleman 7 kasus, Kabupaten Gunungkidul 5 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1 kasus. Di Kota Yogyakarta tidak terjadi kasus kematian ibu pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu di DIY meningkat menjadi 25 kasus . Kasus kematian ibu di DIY pada tahun 2024 paling dominan disebabkan karena gangguan hipertensi (10 kasus). Selain itu penyebab kematian ibu disebabkan karena kelainan jantung dan pembuluh darah (6 kasus), perdarahan (2 kasus), gangguan cerebrovaskular (2 kasus), infeksi (1 kasus), serta penyebab lainnya (4 kausus). Jumlah kematian ibu paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul (8 kasus) dan Kabupaten Sleman (8 kasus). Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul ditemukan ada 5 kasus, Kabupaten Kulon Progo 2 kasus, serta Kota Yogyakarta ada 2 kasus. (Sumber: Buku Data Kesehatan Tahun 2024 Dinas Kehehatan DIY, 2025)



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Gambar 2- 39 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di DIY Tahun 2019-2024

Kasus persalinan remaja dan kasus ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di DIY juga menjadi hal yang perlu diperhatikan di DIY. Kondisi tersebut tentu saja akan meningkatkan resiko pada saat proses persalinan. Jumlah persalinan remaja (⩽ 18 tahun) di DIY mencapai 302 kasus di tahun 2023 dengan kasus tertinggi di Kabupaten Sleman dengan 88 kasus.

Sedangkan untuk kasus ibu hamil Kurang Energi Kronis di DIY pada tahun 2023 mencapai 12,8%. Kondisi-kondisi ini perlu upaya-upaya kolaboratif dengan multi stakeholder dalam mengurangi resiko persalinan dan menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan

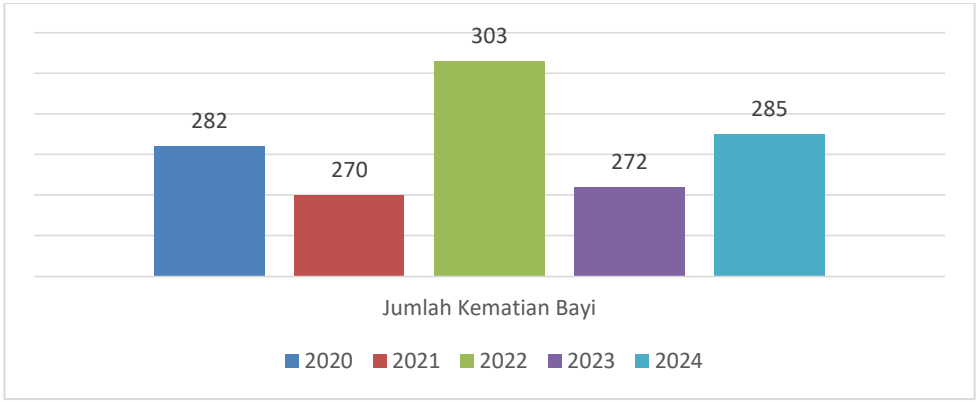
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi, KIE terkait pencegahan pernikahan dini, perluasan cakupan layanan kesehatan, dan sebagainya.

2.2.1.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Hal ini juga disebabkan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Menurut BPS, angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Menurut SDKI tahun 2012, angka kematian bayi di DIY mencapai 25 per 1000 kelahiran hidup. Target SDG's pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup). Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2020-2024 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut:



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 40 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi di DIY Tahun 2020-2024 (Anak)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami angka yang fluktuatif. Pada rentang tahun 2020 – 2021, angka kematian bayi mengalami penurunan dari angka 282 pada tahun 2020 menjadi 270 pada tahun 2021 atau turun 84 kasus dibandingkan tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 kasus kematian bayi di DIY kembali meningkat menjadi 303 kasus. Pada tahun 2023 menurun menjadi 272 kasus, namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 285 kasus. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan. Kasus kematian bayi pada tahun 2024 paing banyak di Kabupaten Bantul 85 kasus kemudian diikuti Kabupaten Slema 76 kasus. Di kabupaten Gunungkidul ada 68 kasus kematian bayi, di Kabupaten Kulon Progo 35 kasus dan Kota Yogyakarta 21 kasus.

2.2.1.2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

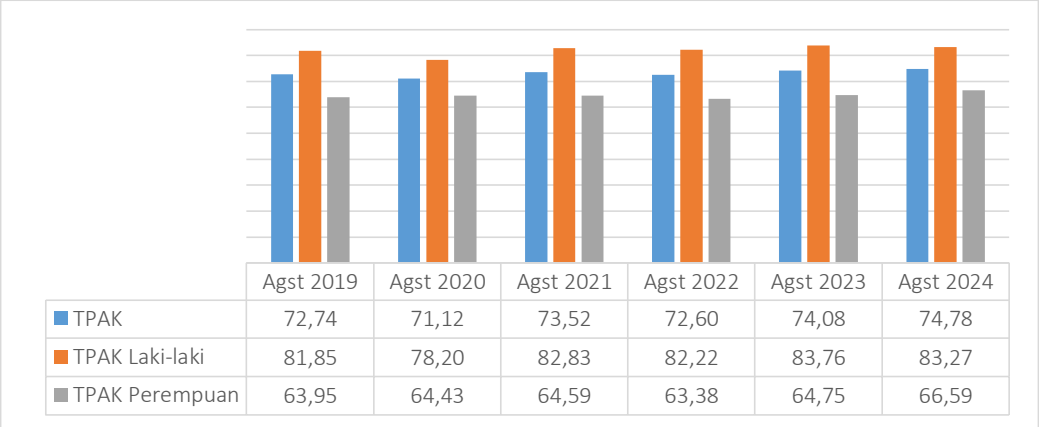
Desa siaga merupakan wujud masyarakat yang telah memiliki kesiapan potensi untuk mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan terjadi di wilayahnya secara mandiri. Desa siaga adalah salah satu strategi dalam akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat antara lain: masih tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya masalah gizi buruk dan angka *stunting*, belum teratasi masalah penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular serta penyakit yang resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB), bencana alam dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk ditanggulangi. Melalui penggerakan pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang tepat untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan secara dini oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu suatu penggerakan pemberdayaan masyarakat melalui kader dan tokoh masyarakat sebagai penggeraknya. Desa siaga sudah menjadi indikator dalam standart pelayanan minimal Kabupaten/Kota. Data di DIY 100% (438 desa/ kelurahan) telah terbentuk Desa Siaga Aktif.

2.2.1.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/ pasokan tenaga kerja *(labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK DIY dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, namun secara trend mengalami peningkatan. TPAK DIY pada Bulan Februari 2020 tercatat sebesar 71,02%, kemudian pada Februari 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,68%. Namun TPAK DIY mengalami penurunan pada Februari 2023 sebesar 73,43%, dan pada Februari 2024 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 73,18% jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada penurunan persediaan/ pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di wilayah DIY. Penurunan TPAK disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 dibandingkan periode tahun sebelumnya.



	Agst 2019	Agst 2020	Agst 2021	Agst 2022	Agst 2023	Agst 2024
TPAK	72,74	71,12	73,52	72,60	74,08	74,78
TPAK Laki-laki	81,85	78,20	82,83	82,22	83,76	83,27
TPAK Perempuan	63,95	64,43	64,59	63,38	64,75	66,59

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2012-2024 (Persen)

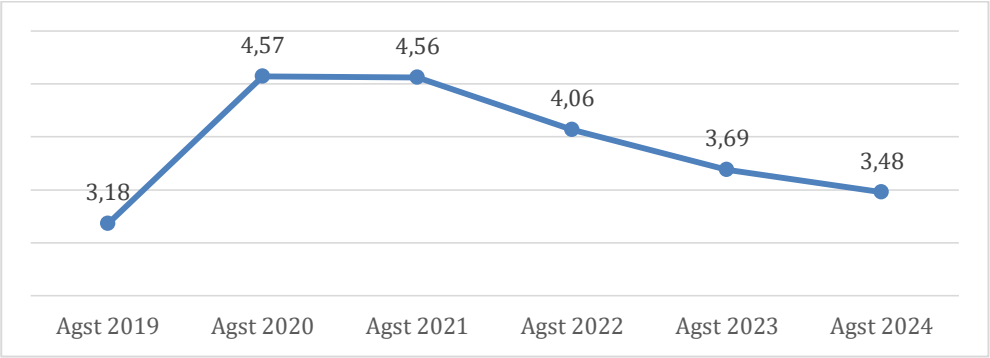
Sementara perkembangan TPAK DIY selama tahun 2020-2024 menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki di DIY pada Februari 2024 sebesar 83,19% sedangkan TPAK perempuan sebesar 63,53%. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat faktor budaya bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tanggung jawab laki-laki, sementara aktivitas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

2.2.1.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di DIY periode Februari tahun 2020 – 2024.

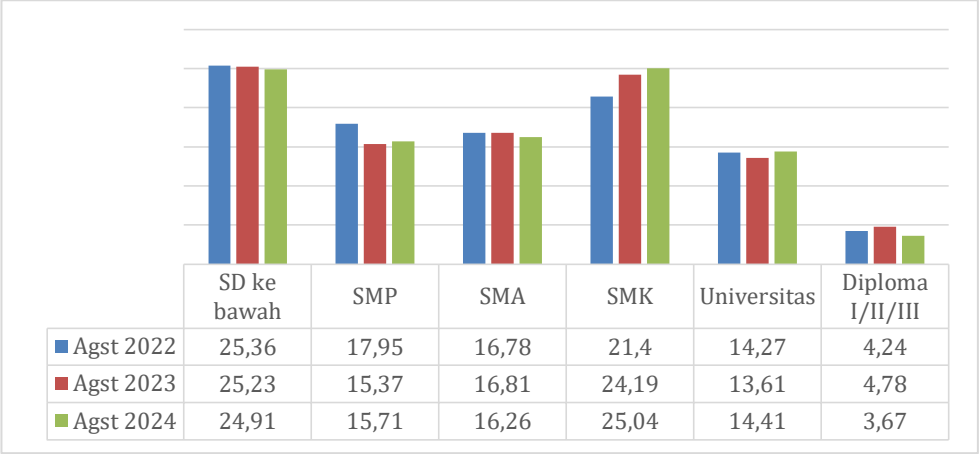


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 42 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2019-2024 (Persen)

Selama lima tahun terakhir, TPT DIY mengalami kecenderungan tren menurun. TPT DIY pada Agustus 2019 sebesar 3,18% mengalami peningkatan pada Agustus 2020 dengan TPT sebesar 4,57%. Psca tahun 2020 TPT DIY perlahan kembali menurun. Pada Agustus 2021 berada pada angka 4,56%, Agustus 2022 turun menjadi sebesar 4,06% dan terus mengalami penurunan hingga sebesar 3,48% pada Agustus 2024. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, TPT DIY pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dari semula 3,69% menjadi 3,48%. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian di DIY sudah normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT Agustus 2024 jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi Agustus 2020 (sebelum pandemi).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



	SD ke bawah	SMP	SMA	SMK	Universitas	Diploma I/II/III
Agst 2022	25,36	17,95	16,78	21,4	14,27	4,24
Agst 2023	25,23	15,37	16,81	24,19	13,61	4,78
Agst 2024	24,91	15,71	16,26	25,04	14,41	3,67

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 43 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Tahun 2022-2024 (Persen)

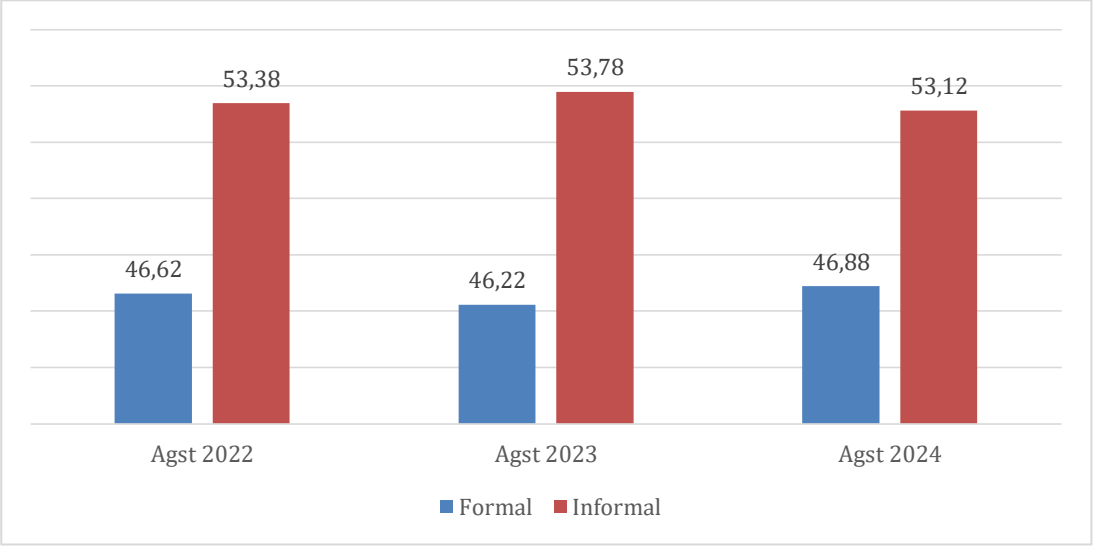
Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2024 didominasi oleh penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 546,58 ribu orang (25,04 persen), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 543,64 ribu orang (24,91 persen). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,08 persen, yang mencakup 314,58 ribu orang (14,41 persen) dengan tingkat pendidikan Universitas dan 80,11 ribu orang (3,67 persen) dengan tingkat pendidikan Diploma. Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan menunjukkan adanya pergeseran pola terutama pada pendidikan SD ke bawah dan pendidikan SMK.

Jika dibandingkan Agustus 2023, peningkatan terbesar terjadi pada tenaga kerja dengan pendidikan SMK yaitu sebesar 0,85 persen poin diikuti tenaga kerja dengan pendidikan universitas sebesar 0,80 persen poin. Sementara itu, penurunan terbesar terjadi pada pendidikan Diploma I/II/III yang turun sebesar 1,11 persen poin. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung memiliki keahlian dan produktivitas yang tinggi dalam bekerja sehingga lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja, terlebih dalam era digitalisasi saat ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.2.14 Rasio Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan dibayar, serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya yaitu status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar masuk dalam kategori kegiatan informal. Kualitas pekerjaan di DIY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir semakin baik diindikasikan dengan peningkatan trend persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Pada periode Agustus 2022 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal sebesar 46,62%, mengalami penurunan menjadi sebesar 46,22% pada periode Agustus 2023. Sementara untuk periode Agustus 2024, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal kembali mengalami kenaikan menjadi 46,88% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

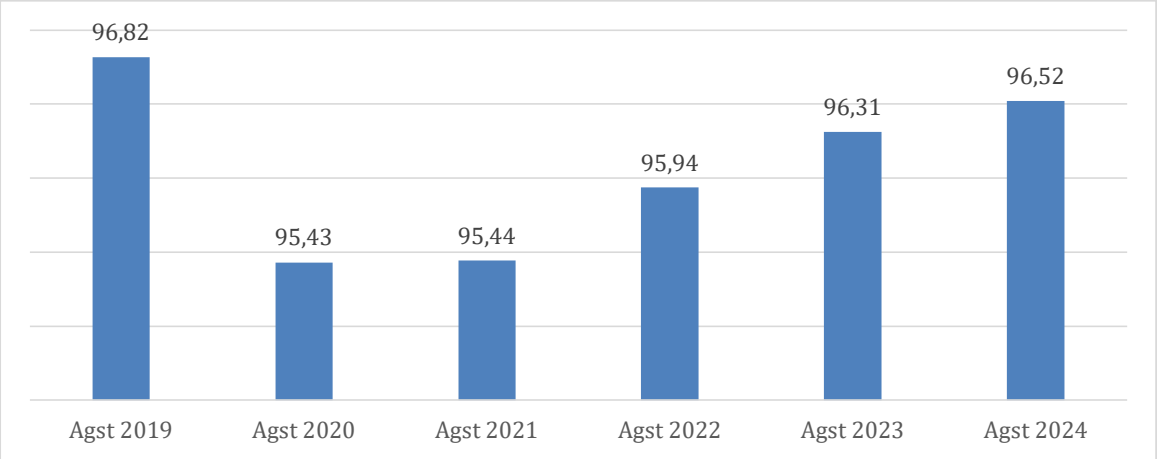
Gambar 2- 44 Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal, Tahun 2022 – 2024 (Persen)

2.2.1.2.15 Rasio Penduduk Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio atau persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada Agustus tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,82%, kemudian mengalami penurunan pada Agustus tahun 2020 menjadi 95,43%. Pada Agustus tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi 95,44% dan kembali meningkat pada Agustus tahun 2022 menjadi 95,94%. Pada Agustus tahun 2023 rasio penduduk bekerja juga meningkat dibandingkan Agustus 2022 menjadi 96,31%. Pada Agustus tahun 2024 kembali meningkat dibandingkan Agustus 2023 menjadi 96,52%.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 45 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019 – 2024 (Persen)

2.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.1.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya *(golong gilig)* secara terpadu *(sawiji)* dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak *(sengguh)*, dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun *(ora mingkuh)*. Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi *religio-spiritual*; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya *pranata mangsa*, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, *pawukon*, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian),

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keselarasan alam (*merti kali*, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (*Nyadran, Ruwahan, Suran* dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di DIY tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *art shop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel 2- 27 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023

Organisasi Budaya	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisasi Seni Rupa	15	25	25	29	29	29
Organisasi Sinematografi	42	44	44	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	6.420	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	507	504	968	968	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	276	276	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38	38

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak mengalami perubahan dalam enam tahun terakhir. Perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2018 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2023. Perkembangan jumlah tokoh seniman/budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Produksi film-film pendek produksi Pemerintah Daerah tumbuh berkembang sangat pesat dan beberapa film menjadi viral seperti Film berjudul *Tilik*, *Pemean*, ke Jogja dan lainnya. Sedangkan perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tahun terakhir. Namun secara keseluruhan perkembangan jumlah organisasi kesenian dan budaya di DIY mengalami stagnan mulai tahun 2021-2023.

Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2- 28 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2018-2023

Organisasi Budaya	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Budaya	78	186	186	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	66	66	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	63	70	70	70	70	70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama enam tahun terakhir. Sedangkan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2018 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2023.

Sampai tahun 2023 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni, tetakan, pitung dinanan, slametan, nyatus, nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain *merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi* dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020, DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021-2022 menjadi 76 desa budaya. Pada tahun 2023 berkembang menjadi 100 desa budaya. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya.

Tabel 2- 29 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2023

Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Upacara adat	478	482	717	717	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	208	223	276	276	276	276
Jenis permainan tradisional	58	58	69	69	69	69
Jenis busana tradisional	38	38	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	406	536	536	536	536
Cerita rakyat	37	80	63	63	63	63
Naskah kuno	509	509	714	714	714	714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 30 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2018-2023

Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangunan cagar budaya	1.041	1.077	1.599	1.599	252	252
Kawasan cagar budaya	20	17	17	17	11	11
Benda cagar budaya	808	834	1.685	1.687	342	342
Situs	343	343	343	343	72	74
Museum	44	47	48	48	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinaga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017, ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk *tentative list* Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.2.1.3.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu, olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktivitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerja sama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Pada aspek sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prasarasana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 31 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023

Jenis Data	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	4	4
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	56	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	3	3
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah klub olahraga, jumlah lapangan/gedung olahraga dan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) tidak ada perubahan pada enam tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda mengalami penurunan dari 74 pada tahun 2020 menjadi 56 pada tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan kepemudaan mengalami tren menurun dalam enam tahun terakhir.

2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.2.1.1 Urusan Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam "*Hamemayu Hayuning Bawana*". Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Basis

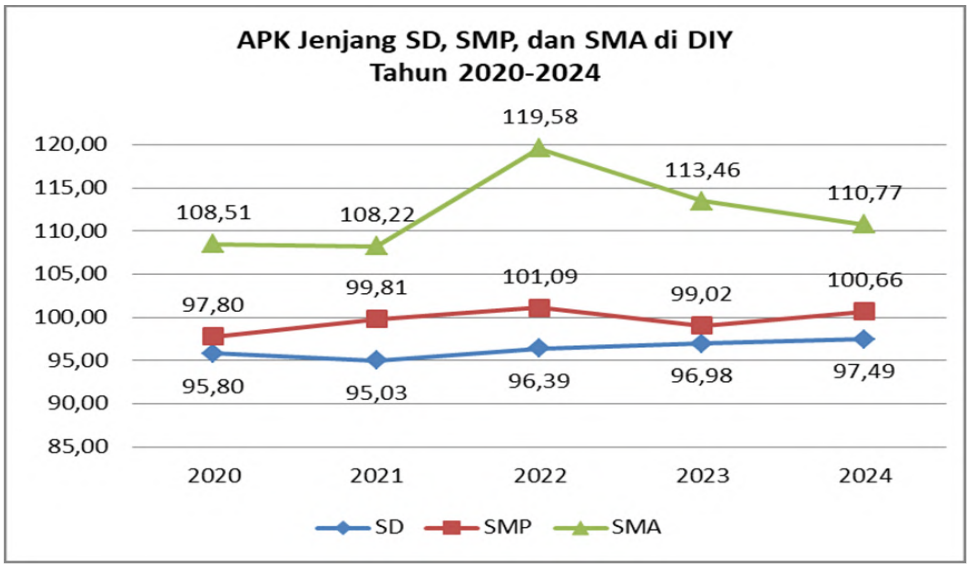
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaisance* di DIY.

1.) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: Dataku Bappeda Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 46 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

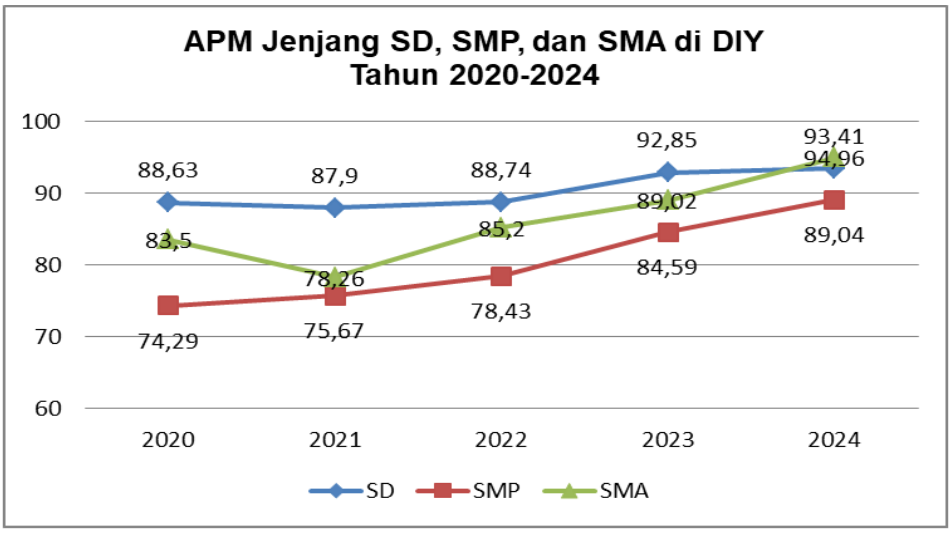
Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat sebesar 110,77 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan APK untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD/sederajat terus mengalami kenaikan dari tahun 2021.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Secara keseluruhan, APK di semua jenjang pendidikan di DIY menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan fluktuasi yang wajar. Capaian tinggi pada jenjang SMA menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap akses pendidikan menengah atas, meskipun upaya untuk mempertahankan konsistensi tetap diperlukan.

2.) Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 47 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat. Capaian APM DIY tahun 2023 untuk jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 4,11. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 namun capaiannya senderung mengalami peningkatan yang relatif tinggi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD pada tahun 2023 tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 105,24% sedangkan yang terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 86,71%. Capaian APM SD Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia di bawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.

Tabel 2- 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2020-2024 di tiap kabupaten/kota DIY Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	93,76	93,73	88,17	89,09	n/a
Bantul	92,96	63,92*	85,41	89,13	0,00**
Gunungkidul	86,14	86,08	89,95	86,71	86,71*
Sleman	95,85	92,96	95,59	95,34	95,34*
Kota Yogyakarta	130,13	105,83	105,24	105,95	0,00**

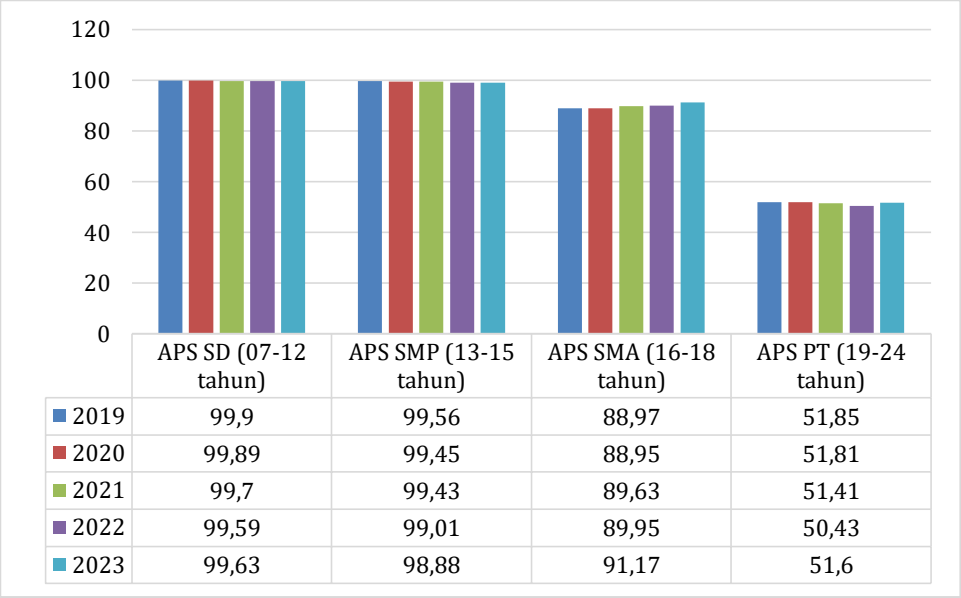
*** data sangat sementara*

** data sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari hal tersebut Capaian APM DIY menunjukkan tren yang positif, tetapi masih ada tantangan, terutama di daerah seperti Gunungkidul. Upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan dan kualitas fasilitas pendidikan perlu ditingkatkan untuk mendukung target pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh wilayah DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



	APS SD (07-12 tahun)	APS SMP (13-15 tahun)	APS SMA (16-18 tahun)	APS PT (19-24 tahun)
2019	99,9	99,56	88,97	51,85
2020	99,89	99,45	88,95	51,81
2021	99,7	99,43	89,63	51,41
2022	99,59	99,01	89,95	50,43
2023	99,63	98,88	91,17	51,6

Sumber: BPS, 2024 diolah.

Gambar 2- 48 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di kisaran 51%. dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

APS di DIY menunjukkan tren yang positif pada jenjang SD dan SMP, tetapi masih ada tantangan pada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Upaya kolaboratif yang terintegrasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong peningkatan APS di semua jenjang.

3.) Partisipasi Pendidikan Berdasar Kelompok Umur

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi aktual partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur. Data ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi aksesibilitas layanan pendidikan serta efektivitas program yang telah dijalankan. Salah satu sumber informasi yang relevan adalah distribusi jumlah penduduk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yang bersekolah menurut jenjang usia dan kelompok pendidikan formal, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2- 33 Distribusi Jumlah Penduduk Yang Bersekolah menurut Jenjang Usia dan Kelompok Pendidikan Formal Tahun 2024

INDIKATOR	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bersekolah (seluruh Jenjang)	Jumlah Penduduk Bersekolah (Jenjang sesuai Usia)	Satuan	Persentase kesesuaian usia dengan jenjang pendidikan
Usia 4-18 tahun penyandang Disabilitas	5.849	5.554	5.554	orang	95%
Usia 5-6 tahun (jenjang TK/sederajat)	97.393	94.493	90.736	orang	93,2%
Usia 7-12 tahun (jenjang SD/sederajat)	305.491	294.952	285.680	orang	93,5%
Usia 13-15 tahun (jenjang SMP/Sederajat)	166.337	166.707	146.113	orang	87,8%
Usia 16-18 tahun (jenjang SMA/sederajat)	162.734	162.456	154.309	orang	94,8%
Usia 19-24 tahun (jenjang pendidikan tinggi)	317.648	n/a	n/a	orang	n/a

Sumber : Dikpora DIY 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan kondisi yang positif, dengan tingkat partisipasi di atas 90% pada kelompok usia 5–6 tahun, 7–12 tahun, dan 16–18 tahun. Namun demikian, partisipasi pada kelompok usia 13–15 tahun (jenjang SMP/sederajat) sebesar 87,8%. Fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus, karena menunjukkan potensi risiko putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Di sisi lain, meningkatnya kembali partisipasi pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16–18 tahun) menunjukkan keberhasilan kebijakan afirmatif dan program pembiayaan pendidikan yang inklusif. Untuk menjamin keberlanjutan peningkatan akses pendidikan, diperlukan penguatan intervensi pada kelompok usia rentan putus sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, termasuk penguatan jalur vokasional.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Implikasi dari kondisi ini menuntut peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS), penyediaan bantuan pendidikan berbasis data keluarga miskin, serta optimalisasi program kejar paket dan pendidikan inklusif.

4.) Rapor Sekolah

Hasil Rapor Pendidikan DIY secara ringkas meliputi kemampuan Literasi, Numerasi, serta Penyerapan Lulusan SMK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2- 34 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK, Tahun 2023-2024

Sub Elemen	Tahun	
	2023	2024
Jenjang SMA	n/a	69,63
Kemampuan Literasi	85,73	76,36
Kemampuan Numerasi	76,14	62,89
Jenjang SMK	n/a	60,41
Kemampuan Literasi	66,41	66,03
Kemampuan Numerasi	54,83	54,79
Penyerapan lulusan SMK	93,34	77,59
Lulusan SMK yang Kuliah	n/a	18,47
Lulusan SMK yang Bekerja	n/a	46,22
Lulusan SMK yang Wirausaha	n/a	12,87

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

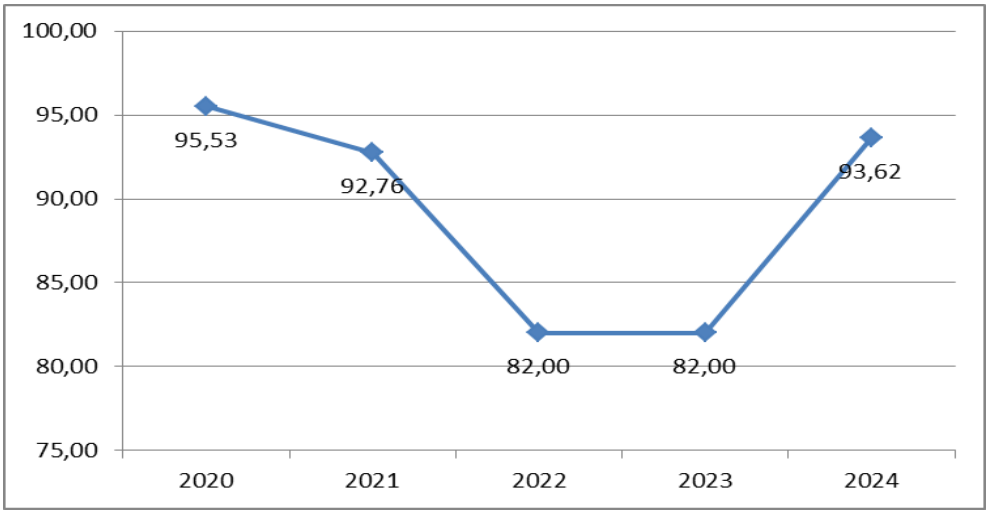
Hasil rapor pendidikan DIY menunjukkan adanya penurunan pada beberapa indikator, terutama kemampuan literasi, numerasi, dan penyerapan lulusan SMK. Upaya terintegrasi melalui penguatan kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan dunia usaha sangat diperlukan untuk memperbaiki capaian dan mempersiapkan siswa DIY untuk menghadapi tantangan masa depan.

5.) Akreditasi sekolah

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tingkatan akreditasi terdiri dari A (Amat Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Untuk mengetahui gambaran mutu pendidikan sekolah SMA/SMK di DIY bisa dilihat dari sekolah minimal terakreditasi B. Persentase SMA/SMK Persentase SMA/SMK dengan minimal terakreditasi B di DIY tahun 2020-2024 disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 49 Persentase SMA/SMK dengan Minimal Terakreditasi Bdi DIY Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas capaian sekolah SMA/SMK dengan minimal terakreditasi B di DIY sudah mencapai 93,62% di tahun 2024. Namun dilihat secara trend selama 5 tahun terakhir capaiannya cukup fluktuatif dimana pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan sebesar 10,76.

Dari data akreditasi disimpulkan Tren akreditasi SMA/SMK di DIY menunjukkan capaian yang cukup tinggi pada tahun 2024, dengan 93,62% sekolah mencapai akreditasi minimal B. Namun, fluktuasi dalam lima tahun terakhir mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap konsistensi mutu pendidikan. Dengan strategi yang tepat, termasuk peningkatan sarana, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan dunia industri, DIY dapat meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi dengan standar tinggi dan menjaga kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

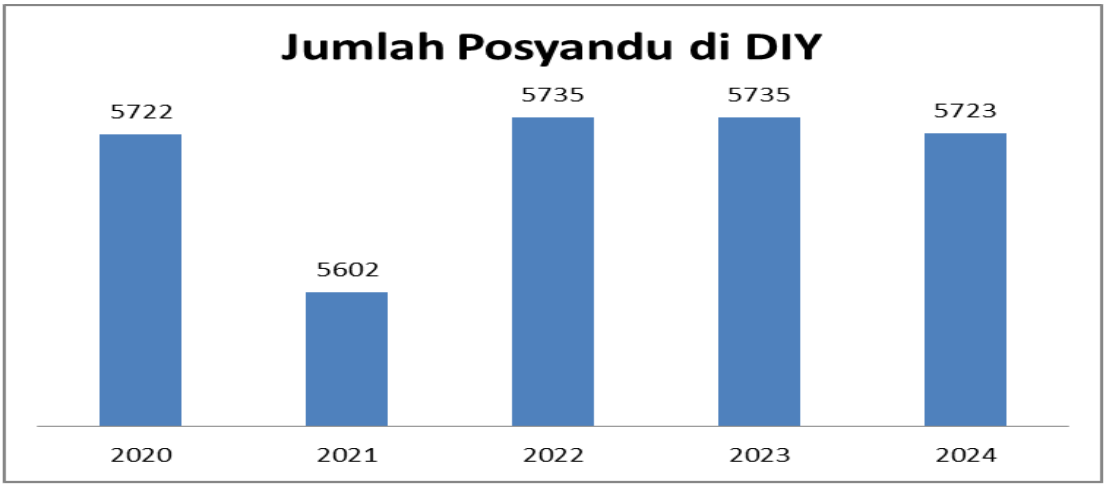
1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Menurut Kategori

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomer 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi Masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan SPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tramtibumlinmas, dan sosial.

Tugas posyandu dalam bidang kesehatan meliputi dukungan : penggerakan kunjungan posyandu, penyuluhan kesehatan dan gizi, deteksi risiko dini masalah kesehatan, rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau Puskesmas, pemantauan perilaku kepatuhan keluarga dalam pelayanan kesehatan minimal, dan penjangkauan akses imunisasi, vitamin, dan tablet tambah darah.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021, namun secara umum mengalami kenaikan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 50 Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2020– 2024

Pada tahun 2024 jumlah balita di DIY sebanyak 150.682 orang, sehingga rasio posyandu per 1.000 balita di DIY tahun 2024 adalah 37,97 atau dengan kata lain 1 posyandu melayani 26 balita.

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Tabel 2- 35 Jumlah Puskesmas di DIY, Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Puskemas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas Induk	121	121	121	121	121
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	311	305	300	214	282
3	Jumlah Puskesmas Keliling	191	81	130	106	95
4	Jumlah Poliklinik	225	301	254	n/a	n/a
	Jumlah Puskesmas	848	808	805	441	498

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Berdasarkan jumlah penduduk menurut BPS yang termuat di Dataku Bapperida DIY diketahui bahwa jumlah penduduk DIY tahun 2024 sebesar 3.759.500 jiwa, maka rasio

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

puskesmas di DIY tahun 2024 sebesar 13,25 per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat dibanding tahun 2023 dimana rasio jumlah Puskesmas di DIY sebesar 11,73.

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di DIY mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, jumlah rumah sakit di DIY sebanyak 80 unit. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2023 yang berjumlah 79 unit tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 83 unit. Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2023 ke 2024 yaitu dari sebanyak 79 rumah sakit pada tahun 2023, menjadi 80 rumah sakit pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk DIY berdasarkan proyeksi sensus penduduk sebanyak 3.759.500 jiwa di tahun 2024, rasio rumah sakit di DIY tahun 2023 adalah sebesar 2,13 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 46.993 jiwa.

Tabel 2- 36 Jumlah Rumah Sakit di DIY berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021-2024

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Kota Yogyakarta	20	21	18	18
Kab. Bantul	16	17	15	16
Kab. Kulon Progo	9	9	9	9
Kab. Gunungkidul	8	8	9	9
Kab. Sleman	27	28	28	28
DIY	80	83	79	80

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, Dataku DIY, 2024

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data dari aplikasi Jogja Dataku, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 49,70 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 7.889 TT (berdasarkan laporan 65 rumah sakit dari total 80 rumah sakit di DIY).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR di DIY Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit	79	83	80
Jumlah RS yang Melaporkan	79	62	65*
Jumlah Tempat Tidur	7.503	7.505	7.889
BOR	39,6	42,8	49,7*

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, Dataku DIY, 2024

4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2023, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 5.111 orang yang terdiri dari 2.786 dokter umum, 1.024 dokter gigi, dan 1.301 dokter spesialis. Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun tersebut tercatat 1,37. Pada tahun 2024, jumlah tenaga medis di DIY menurun menjadi 6.427 orang yang terdiri dari 2.731 dokter umum, 1.436 dokter gigi, dan 2.260 dokter spesialis dengan rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,70.

Tabel 2- 38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter umum	1.937	2.350	3.354	2.786	2.731
Dokter spesialis	1.397	1.277	1.246	1.301	2.260
Dokter gigi	693	710	987	1.024	1.436
Rasio dokter per penduduk	1,27	1,37	1,50	1,37	1,70
Perawat	9.507	10.757	10.360	10.654	11.061
Bidan	2.356	2.281	2.850	2.828	2.901

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

5. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

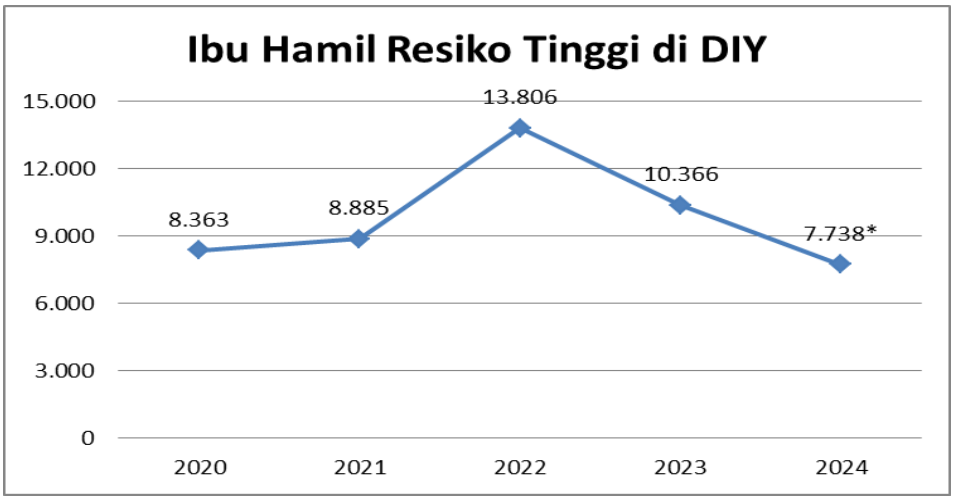
Pada tahun 2024 jumlah perawat di DIY tercatat sebanyak 11.061 sedangkan jumlah bidan sebanyak 2.901. Jumlah penduduk menurut BPS yang termuat di Dataku Bapperida DIY diketahui bahwa jumlah penduduk DIY tahun 2024 sebesar 3.759.500 jiwa. Dengan demikian rasio perawat di DIY tahun 2024 sebesar 294,21 per 100.000 penduduk, angka

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2024 sebesar 77,16 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan tren penurunan, dari 13.807 orang di tahun 2022 menurun menjadi 7.738 orang di tahun 2024. Penurunan bisa disebabkan jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil resiko tinggi yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil resiko tinggi sehingga tidak terjadi komplikasi.



**) angka sementara*
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 51 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY, Tahun 2020-2024

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan DIY 2024, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2024 mencapai 75,78% di bawah rata–rata nasional yang mencapai 82,2%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan mengalami penurunan di tahun 2024 dibawah tahun 2020-2023 yang angkanya mendekati 100%. Selain itu, penurunan jumlah ibu yang di tolong oleh tenaga kesehatan juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, Tahun 2020-2024

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Ibu yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	41.033	38.543	36.011	35.093	27.452 *	Orang
2	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	41.161	38.567	36.019	35.102	36.224 *	Orang
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	99,69	99,94	99,98	99,90	75,78 *	%

**) angka sementara*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

8. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasarmeliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100% ditahun 2020-2023.Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.

Tabel 2- 40 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024

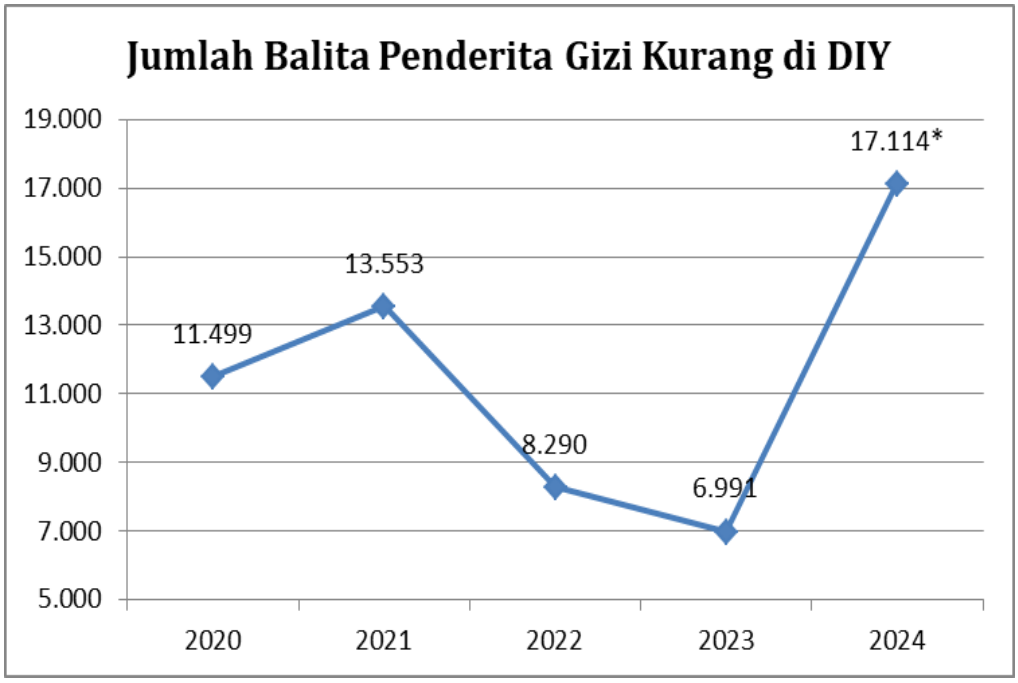
Wilayah	2020			2021			2022			2023			2024*)		
	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%
Kulon Progo	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	88	100
Bantul	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	-	-
Gunungkidul	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	144	100
Sleman	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	0	0
Yogyakarta	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	0	0
DIY	438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	81	18,49

*Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024. *) angka sementara*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Berdasarkan Dinas Kesehatan DIY tahun 2020-2024, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan medis di DIY telah mencapai 100%.Walaupun cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sudah 100 %, namun balita penderita gizi kurang masih dapat ditemui di DIY bahkan terjadi peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah 17.114 balita.



**) angka sementara*
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 52 Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang di DIY Tahun 2020-2024

10. Pola Penyakit

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan prevalensi yang tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional seperti kanker, Diabetes Melitus (DM), ginjal kronis, stroke, hipertensi, jantung, asma, dan gangguan jiwa. Apabila disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan Riskesdas Tahun 2018, capaian prevalensi beberapa penyakit tersebut cenderung menurun kecuali prevalensi Diabetes Melitus.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 41 Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY dan Nasional Tahun berdasarkan Riskesdas 2013, Riskesdas 2023, dan SKI 2023

PTM		Riskesdas 2013	Riskesdas 2018	SKI 2023	Satuan
Asma	DIY	6,9	4,5	3,5	Persen
	Nasional	4,5	2,4	1,6	
Kanker	DIY	4,1	4,86	3,6	Permil
	Nasional	1,4	1,79	1,2	
Stroke	DIY	10,3	14,6	11,4	Permil
	Nasional	7	10,9	8,3	
Ginjal Kronis	DIY	0,3	0,43	0,23	Persen
	Nasional	0,2	0,38	0,18	
Diabetes Melitus	DIY	2,6	3,1	3,6	Persen
	Nasional	1,5	2	2,2	
Jantung	DIY	0,6	2	1,67	Persen
	Nasional	0,5	1,5	0,85	
Hipertensi	DIY	25,7	32,86	30,4	Persen
	Nasional	25,8	34,11	29,2	
RT dengan ART Gangguan Jiwa Skizofrenia/Psikosis	DIY	2,7	10,4	9,3	Permil
	Nasional	1,7	6,7	4	

Sumber : Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, SKI 2023, Kementerian Kesehatan RI, diolah

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2022 baru mencapai 46,02%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

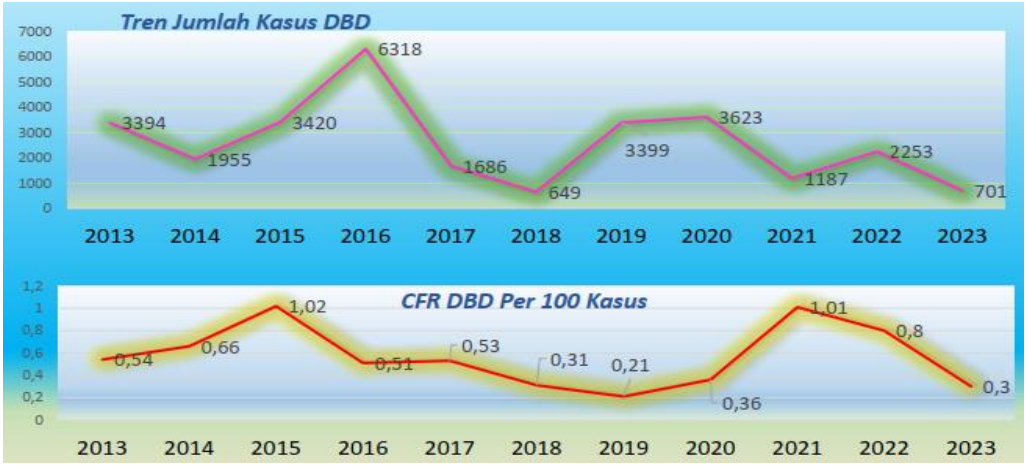
Pada tahun 2023, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 7.741 kasus dengan penemuan kasus baru HIV sebanyak 957 kasus. Penemuan tertinggi di Kabupaten Sleman sebanyak 237 kasus dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 54 kasus. Jumlah kasus seluruhnya sebanyak 7.665 kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 71,08%. Kelompok usia dengan kasus tertinggi adalah pada rentang usia 30-49 tahun sebanyak 43,99%.

Untuk penyakit TB, success rate penyakit TB pada tahun 2023 sebesar 86,9% meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 85,90. Permasalahan penanganan TB di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (*case detection rate*) yaitu 6.280 kasus dari target penemuan sebesar 9.301 (47%). Capaian tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 52,30%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pencegahan dan pengendalian TB antara lain memperkuat kapasitas fasyankes, selain itu juga melalui pelibatan kemitraan *pentahelix* yang terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penangananya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menorah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2023 kasus DBD di DIY sebanyak 701 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 2 orang menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.253 kasus dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,3 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,8.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2024

Gambar 2- 53 Perkembangan Jumlah kasus dan CFR DBD DIY Tahun 2013-2023

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

2.2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Sub Urusan Sumber Daya Air

Daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi dalam tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi terdiri dari:

a. Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, di DIY meliputi DI Kalibawang (7.152 Ha), DI Karangtalun (5.159 Ha), dan DI lintas yaitu DI Tuk Kuning (Kabupaten Klaten 115 Ha, Kabupaten Sleman 149 Ha).
b. Daerah Irigasi yang luasnya 1000 - 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Pemda DIY, mempunyai kewenangan seluas 13.987 Ha meliputi 6 DI (9.078 Ha) dan 35 DI lintas kabupaten/Kota (4.909 Ha).
c. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi 100 DI kewenangan Kabupaten Bantul (8.633 Ha), 182 DI kewenangan Kabupaten Gunungkidul (5.818 Ha), 90 DI kewenangan Kabupaten Kulon Progo (1.533 Ha), 853 DI kewenangan Kabupaten Sleman (21.953 Ha), dan 10 DI kewenangan Kota Yogyakarta (49 Ha).

Pada tahun2024 berdasarkan Sinkronisasi data ePAKSI dan data P3A, total luas fungsional dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah 10.259,24 ha yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 73,35%. Luas layanan irigasi di DIY sebesar 13.987 ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik 7.737,81 hadan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik 194.458,16 meter. Luas lahan pertanian terlihat menurun karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 42 Prasarana Irigasi DIY Tahun 2020-2024

No	Elemen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Layanan Irigasi (Ha)	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00
2	Panjang Jaringan Sarana Irigasi Dalam Kondisi Baik (m)	133.068,78	100.480,21	132.401,39	132.401,39	194.458,16
3	Luas Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha)	6.040,97	4.387,94	5.789,45	5.789,45	7.737,81

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m^3, DAS Progo sebesar 622,64 juta m^3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m^3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m^3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m^3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Potensi ketersediaan air di wilayah DIY yaitu pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) di tahun 2024 (data per Oktober 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 43 Ketersediaan Air pada tiap DAS di DIY (juta m^3)

No	DAS	Volume (juta m^3)
1.	Serang	309,73
2.	Progo	3.240,00
3.	opak	770,87
4.	Oyo	483,68

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024) angka sementara*

Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun 2024pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air pemenuhan air baku melalui sumur air tanah dalam. Sesuai dengan capaian akhir tahun 2024 , layanan penyediaan air dari sumur bor sejumlah 55 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, dan terlayani sumber air lain (PDAM, SPAMDES, dan lainnya) sebanyak 21 titik, sehingga masih ada 75 titik yang belum terlayani.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu poin penting dalam pengelolaan sungai adalah penanganan drainase. Berdasarkan data,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terdapat total genangan sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, dan sudah ditangani seluas 5,44 ha setara 34 titik sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik. Pada tahun 2023 dilakukan penanganan genangan di dua titik setara dengan 1,96 Ha dan pada tahun 2024 penanganan di 3 titik setara 0,524 Ha. Penanganan luas genangan sampai dengan tahun 2024 adalah 7,92 Ha.

2. Sub Urusan Keciptakaryaan

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan totalpenduduk DIY.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 mencapai 96,41% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.609.025 jiwa dari jumlah penduduk total sebesar 3.743.365 jiwa. Penyediaan air minum di DIY didukung melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD Provinsi), pembangunan infrastruktur air minum dari dana APBN (Ditjend Cipta Karya, Kementerian PU), dan APBD Kabupaten/Kota. Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut:

Tabel 2- 44 Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Perpipaan	Non Perpipaan	Non akses
1	Kulon Progo	444.994	200.342	234.662	9.91
2	Bantul	980.269	214.407	674.011	91.851
3	Gunungkidul	776.926	381.099	379.701	16.126
4	Sleman	1.125.571	266.929	842.775	15.867
5	Yogyakarta	415.605	89.039	326.566	-
Total DIY		**3.743.365**	**1.149.213**	**2.459.812**	**134.340**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Perpipaan	Non Perpipaan	Non akses
			30,70%	65,71%	3,59%
			3.609.025		
			96,41%		

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Penyelenggaraan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Kapasitas terpasang pengolahan air limbah sampai dengan saat ini sebesar 75.000 SR. Pada tahun 2024, sudah tersambungkan 28.393 SR dengan penambahan SR di tahun 2024 sejumlah 412 SR dari Kabupaten Bantul, 426 SR dari Kabupaten Sleman, dan 350 SR dari Kota Yogyakarta. Penanganan air limbah berbasis masyarakat dilakukan melalui IPAL Komunal sebanyak 557 unit. Sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah3.672.591 jiwa atau setara dengan 98,11% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.743.365 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 45 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2024

No	Kabupaten	BABS	Akses Belum Layak	Akses Layak	Akses Aman	Jumlah Jiwa
1	Kulon Progo	-	5.045	393.868	46.081	444.994
2	Bantul	-	46.936	691.920	241.413	980.269
3	Gunungkidul	-	12.777	695.500	68.649	776.926
4	Sleman	-	5.833	826.310	293.428	1.125.571
5	Yogyakarta	-	157	272.910	142.538	415.605
	Total DIY	**-**	**70.774**	**2.878.313**	**794.278**	**3.743.365**
		0,00 %	1,89%	76,89%	21,22%	**100,00%**
		1,89%		3.672.591		
				98,11%		

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Peningkatan pelayanan rumah tangga berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan di Kabupaten dan Pusat, berupa Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat sistem jaringan perpipaan SPALD-Terpusat Sewon Kabupaten Bantul, berupa peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 25.000 SR bertambah menjadi 75.000 SR. Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat diprioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/Ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan. Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2024 adalah 28.393 SR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2- 46 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	
		s.d. 2023	s.d. 2024
1	Kota Yogyakarta	19.831	20.181
2	Kabupaten Bantul	3.506	4.294
3	Kabupaten Sleman	3.868	3.918
Jumlah Total		**26.188**	**28.393**

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Selain sambungan rumah tangga dengan sistem IPAL Terpusat, telah dilaksanakan juga program peningkatan akses sanitasi berbasis masyarakat, yaitu dengan pembangunan IPAL Komunal. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai tahun 2024 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 47 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	100
2	Kabupaten Bantul	154
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	49
Jumlah Total		**557**

Sumber: Data Kabupaten/Kota, 2024

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan yang mulai tanggal 30 April 2024 sudah tidak melayani pembuangan sampah dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta,Sleman dan Bantul), TPA Kulon Progo, dan TPA Gunungkidul.

Tabel 2- 48 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah DIY Tahun 2019-2023

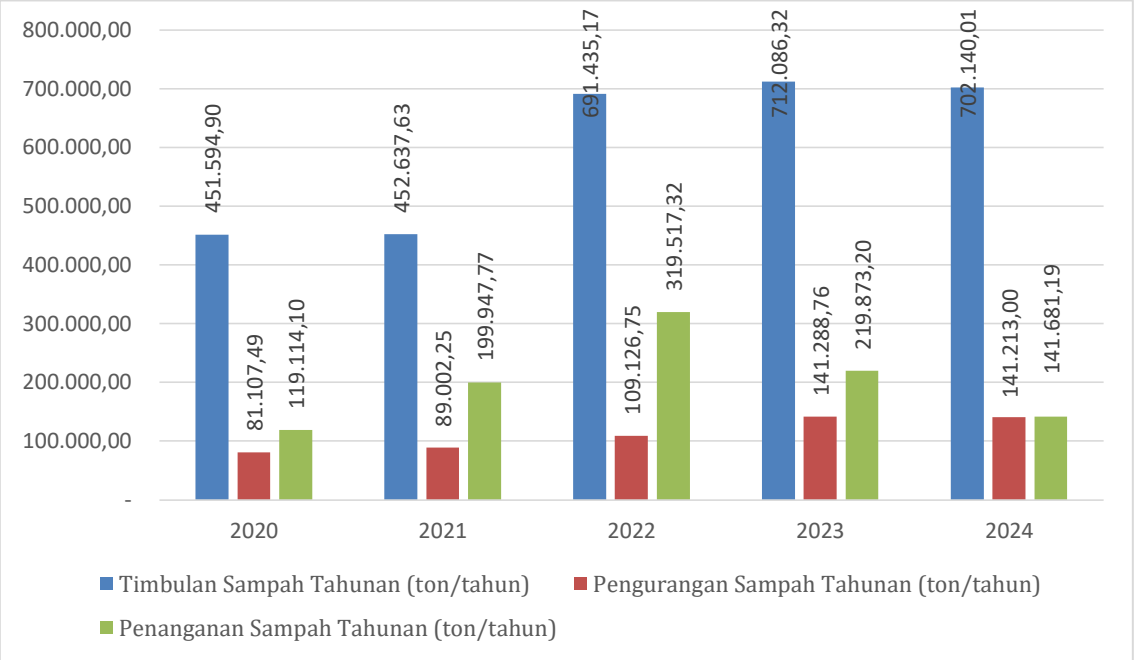
Elemen	2019	2020	2021	2022	2023	satuan
Jumlah TPS	287	565	565	647	n/a	Unit
Daya Tampung TPS	600	660	720	780	450	Ton
Jumlah Depo Sampah	103	101	92	92	91	Unit
Jumlah TPA	3	3	3	3	3	Unit
Jumlah TPST	61	57	69	69	81	Unit

*Sumber : Dataku Bappeda DIY2024, *) Sementara*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Berikut neraca pengelolaan sampah di DIY tahun 2020-2024:



Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2025 (data diolah)

Gambar 2- 54 Neraca Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2020-2024

Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan timbunan sampah pada Wilayah Kartmantul sejak tahun 2019 hingga 2023 dimana puncak peningkatan mencapai 493495,21 Ton kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 489811,79 ton. Penurunan tersebut disebabkan adanya penutupan layanan pada tanggal 23 Juli 2023 – 5 September 2023 berdasarkan Surat Sekda DIY Nomor 658/8312 dan per tanggal 28 Juli 2023 TPA Regional Piyungan dibuka secara terbatas. Selanjutnya pada Bulan Agustus hingga Mei 2024 TPA Regional Piyungan dibuka kembali untuk layanan pembuangan sampah dengan pembatasan kuota. Pada Akhir Mei 2024 Zona Transisi 1 dan 2 di TPA Regional Piyungan ditutup untuk layanan sampahnya. Hal ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur DIY tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentraslisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dan kesepakatan final pengakhiran pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan mulai 1 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota pada tanggal 4 April 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 49 Data Timbulan Sampah untuk Wilayah Kartamantul Tahun 2020 sampai 2024

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	256.210,07	268.481,59	217.807,27	219.653,64	219.653,64
Kab. Bantul	-	-	160.382,71	162.114,46	158.430,04
Kota Yogyakarta	-	119.501,69	110.642,60	109.704,11	109.704,11
Total	258.230,07	390.004,28	490.854,58	493.495,21	489.811,79

Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2025 (data diolah)

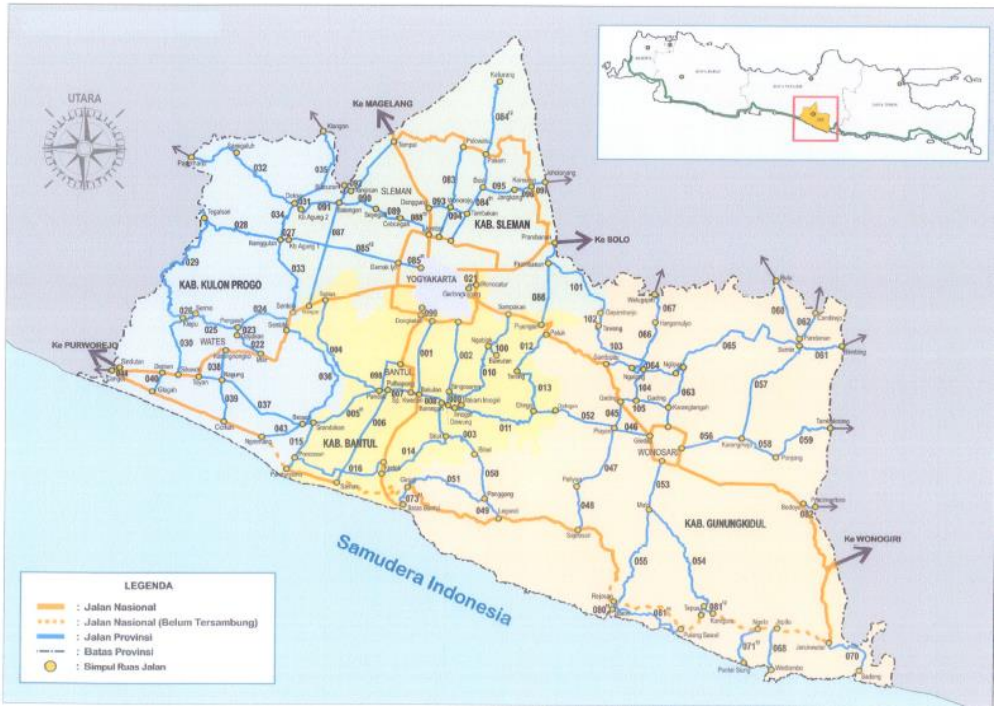
Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan timbunan sampah pada Wilayah Kartmantul sejak tahun 2019 hingga 2023 dimana puncak peningkatan mencapai 493495,21 Ton kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 489811,79 ton. Penurunan tersebut disebabkan adanya penutupan layanan pada tanggal 23 Juli 2023 – 5 September 2023 berdasarkan Surat Sekda DIY Nomor 658/8312 dan per tanggal 28 Juli 2023 TPA Regional Piyungan dibuka secara terbatas. Selanjutnya pada Bulan Agustus hingga Mei 2024 TPA Regional Piyungan dibuka kembali untuk layanan pembuangan sampah dengan pembatasan kuota. Pada Akhir Mei 2024 Zona Transisi 1 dan 2 di TPA Regional Piyungan ditutup untuk layanan sampahnya. Hal ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur DIY tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentraslisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dan kesepakatan final pengakhiran pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan mulai 1 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota pada tanggal 4 April 2024.

3. Sub Urusan Jalan

Pemerintah pusat telah menetapkan fungsi dan status jalan Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1. Pemda DIY menindaklanjuti Kepmen PUPR tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022 tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 328/KEP/2022 panjang ruas jalan Kolektor 2 adalah 104,143 Km dan jalan kolektor 3 adalah 307,587 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2022 panjang jalan strategis Provinsi adalah 262,655 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023 terdapat perbedaan Panjang ruas jalan Provinsi dari yang sebelumnya sepanjang 760,450 KM menjadi sepanjang 674,585 KM. Perubahan tersebut didasari dengan adanya ruas jalan yang upgrade (semula berstatus jalan Kabupaten menjadi berstatus jalan Provinsi dan atau semula berstatus jalan Provinsi menjadi berstatus jalan Nasional)dan downgrade (semula berstatus jalan Nasional menjadi berstatus jalan Provinsi dan atau semula berstatus jalan Provinsi menjadi berstatus jalan Kabupaten). Penanganan jalan perlu dilakukan baik dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kemantapan namun juga perlu dilakukan peningkatan jalan baik berupa peningkatan kapasitas, rekonstruksi jalan, maupun rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi DIY.



Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023

Gambar 2- 55 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi mengalami penurunan yaitu dari 70,58% di tahun 2023 menjadi 68,042% di tahun 2024. Penurunan kemantapan jalan provinsi disebabkan karena laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan. Kerusakan jalan diantaranya karena peningkatan beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi dan kendaraan pengangkut material tambang yang melintas sehingga meningkatkan laju kerusakan jalan, serta kondisi tanah pada beberapa ruas jalan provinsi yang tidak stabil terutama saat musim hujan. Berikut data kondisi jalan provinsi di DIY dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2- 50 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2020-2024

No	Sub Elemen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan Baik (Km)	366,52	341,84	301,205	311,526	313,545
2	Jalan Sedang (Km)	177,66	194,45	232,480	164,609	147,459
3	Jalan Rusak Ringan (Km)	155,05	156,94	171,615	170,450	190,497
4	Jalan Rusak Berat (Km)	61,23	67,22	55,150	28,00	25,084

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah di DIY sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat pembangunan jalan baru sepanjang 1,2 kilometer yang terdiri dari pembangunan jalan ruas Prambanan - Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 kilometer terbangun sepanjang 0,4 kilometer dan pembangunan trase pengganti ruas jalan Hargomulyo - Watugajah dengan total pembangunan 2,5 kilometer yaitu jalan eksisting 1,7 kilometer dan 0,8 kilometer jalan baru. Penambahan panjang jalan provinsi yang diperoleh dari pengembangan ruas jalan Prambanan - Gading sampai dengan tahun 2024 telah terbangun 20,175 kilometer atau 73,15%, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan-Gayamharjo sepanjang 7,405kilometer.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2024 antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 116,07 Km (100%);
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 79,38 km (68,39%);
3. Konstruksi jalan yang telah terbangununtuk 2 lajur sepanjang 109,07 Km (93,97%) dan untuk 4 lajur sepanjang 5,10 Km (4,39%).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan jaringan jalan JJLS sampai dengan akhir tahun 2024 masih berproses pada pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Srandakan 3 (Jembatan Pandansimo) dan ruas Parangtritis–Girijati.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Jalan Tol di wilayah DIY terdiri dari 2 ruas yaitu Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Panjang total trase jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo adalah 96,58 km yang dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 35,65 km (Kartasura sampai dengan Batas Provinsi Jateng – DIY), seksi 2 sepanjang 22,36 km (Batas Provinsi Jateng – DIY sampai dengan Junction Sleman) dan seksi 3 sepanjang 38,57 km (*Junction* Sleman sampai dengan Kulon Progo, Batas Provinsi Jateng – DIY). Target operasional keseluruhan jalan tol ini direncanakan dapat digunakan pada tahun 2026. Jalan tol Yogyakarta – Bawen direncanakan memiliki panjang 75,82 km, segmen yang berada di wilayah Yogyakarta yaitu pada seksi 1 sepanjang 8,8 km dari *interchange* Banyurejo sampai *junction* Sleman berupa konstruksi *elevated* 4,9 km dan sisanya konstruksi *at grade*).

4. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi dilakukan pada objek pembinaan jasa konstruksi yaitu pelaku, produk, dan proses antara lain:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Pembinaan pada pelaku jasa konstruksi dilakukan melalui upaya Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi;
2. Pembinaan pada produk konstruksi dilakukan melalui upaya penjaminan mutu material dan komponen struktur konstruksi yaitu dengan cara pengujian oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi; dan
3. Pembinaan pada proses penyelenggaraan konstruksi dilakukan melalui penyusunan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara.

Pada tahun 2024 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.384 dokumen LHU (terdiri dari 1.399 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 45 LHU uji Aspiratif). Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Pada tahun 2024 terdapat jumlah permintaan Tenaga Ahli sebanyak 12.098 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.168 orang.

Fenomena di atas tersebut, memberikan gambaran bahwa adanya gap kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Upaya peningkatan kinerja tenaga konstruksi dilakukan Pemda DIY melalui kegiatan pelatihan untuk mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli. Pada tahun 2024 terdapat sejumlah 200 orang tenaga kerja konstruksi yang terlatih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pada tahun 2024 terdapat 80 orang. Berikut data jumlah tenaga kerja konstruksi (tersertifikasi) tahun 2021-2024.

Tabel 2- 51 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2022-2024

Data	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih	orang	100	150	200
Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang Tersertifikasi Ahli	orang	100	0	80

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Kegiatan penyusunan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara merupakan penerapan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi. Pemda DIY melakukan dukungan melalui survey lapangan untuk rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara dan hasil permohonan rekomendasi analisis perkiraan biaya untuk bangunan gedung negara, serta pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara. Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan layanan permohonan rekomendasi analisis perkiraan biaya yaitu sebanyak 188 permohonan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara yaitu sebanyak 7 instansi dengan total 12 kegiatan sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD DIY
2. Rumah Sakit Jiwa Grhasia
3. BKD DIY
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
6. Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY
7. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA DIY

5. Sub Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang di DIY dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang tentunya telah mendasar pada kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan perwujudan kesesuaian pola ruang dan perwujudan kesesuaian struktur ruang. Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budidaya dibanding keseluruhan luas kwasan, sedangkan perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui: (1) evaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama; (2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,39%. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,09%. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan lebih pesat sebesar 2,25% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di bawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2- 52 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2024

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target Kesesuaian (%)	76,50	78,50	79,50	81,00	82,5	81,50	82,62
	Realisasi Kesesuaian (%)	77,05	78,85	78,95	81,04	82,62	84,87	82,83
	Belum Terwujud (%)	13,57	15,34	15,24	13,26	12,18	10,97	16,03
	Tidak Sesuai (%)	09,38	05,81	05,81	05,72	5,21	4,39	1,15

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2023 pengukuran kesesuaian pemanfaatan ruang didasarkan pada struktur ruang dan pola ruang dengan capaian sebesar 84,87% dari target sebesar 81,50% atau tercapai sebesar 104,13%. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang belum terwujud sebesar 10,73% dan yang tidak sesuai mencapai 4,39% dengan peruntukan terbesar pada kawasan lindung berupa kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dan kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99%. Capaian pada tahun 2024 sebesar 82,83% dari target sebesar 82,62% atau tercapai sebesar 100,25%.Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena merupakan pelaksanaan tahun pertama setelah berlakunya Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY 2023-2043.Terdapat perbedaan pada indikasi program utama dengan Perda DIY No 5 Tahun 2019 sebelumnya, sehingga mengakibatkan banyaknya program yang belum terwujud. meskipun target pada tahun 2024 tercapai, masih terdapat perwujudan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya pada kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi kawasan lindung geologi sebesar 8,60% dan kawasan konservasi sebesar 1,65%.. Sedangkan pada kawasan budidaya perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi kawasan pertanian sebesar 16,63%, kawasan transportasi sebesar 2,72% dan kawasan hutan produksi sebesar 0,97%. Sedangkan perwujudan struktur ruang pada tahun 2024 sebesar 75,88% dan masih terdapat struktur ruang yang belum terwujud sebesar 24,12%. Struktur ruang yang belum terwujud paling rendah yaitu pada perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebesar 57,61% dan perwujudan sistem jaringan tranportasi sebesar 57,61%.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota yang merupakan turunan dari Rencanan Tata Ruang (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat 22 RDTR yang direncanakan dilakukan penetapan di DIY berdasar PP 21 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kabupaten Kulon Progo terdapat 6 RDTR, dengan rincian 1 RDTR telah ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Perbup Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023), dan telah terintegrasi dengan OSS, 3 RDTR sedang pemenuhan kelengkapan persub serta 2 RDTR sedang proses penyusunan di tahun 2024;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Kabupaten Sleman terdapat 4 RDTR, 3 diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sleman Barat (Perbup Sleman Nomor 57 Tahun 2021), RDTR Kawasan Sleman Timur(Perbup Sleman Nomor 3 Tahun 2021) dan RDTR Kawasan Sleman Tengah (Perbup Sleman Nomor 80 Tahun 2023) dan sisanya 1 RDTR proses pemenuhan kelengakapan persub yaitu RDTR Kawasan Sleman Utara. Terdapat 2RDTR yang telah terintegrsi dengan OSS yaitu RDTR Sleman Timur dan RDTR Sleman Barat;
c. Kota Yogyakarta terdapat 1 RDTR yaitu RDTR Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan yaitu Perwal Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 dan telah terintegrasi dengan OSS;
d. Kabupaten Bantul terdapat 4 RDTR, 1diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR WP Pantai Selatan Bantul dan 3 RDTR lainnya proses pemenuhan kelengkapan persub.
e. Kabupaten Gunungkidul terdapat 7 RDTR, 1 diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR Siung Wediombo (Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021), 5 RDTR lainnya proses pemenuhan kelengkapan persub dan sisanya (1 RDTR) proses penyusunan di tahun 2024.

Sementara itu, untuk penataan ruang keistimewaan telah diatur dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. Capaian ketersediaan dokumen perencanaan ruang SRS sampai dengan tahun 2023 yaitu telah tersusun sebanyak 18 rencana rinci dari 18 SRS yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, telah tersusun 14 rencana induk dari 18 SRS dan telah tersusun 18 dari target 45 RTBL di 18 SRS. Dari sisi pemanfaatan telah tersusun sebanyak 20 DED di kawasan SRS telah dilaksanakan pengendalian 23 pembangunan konstruksi di kawasan SRS dan telah dilaksanakan pengendalian terhadap 14 SRS dari 18 SRS.

Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan Rencana Induk (RI) SRS di klasterisasi menjadi 9 klaster sebagai berikut

1. Tahun 2023 terdapat 4 klaster, yaitu :
    a. RI SRS Karst Gunungsewu dan RI SRS Sokoliman (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. RI SRS Pantai Selatan Gunungkidul, RI SRS Pantai Samas-Parangtritis, RI SRS Pantai Selatan Kulon Progo (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
c. RI SRS Merapi (Evaluasi Rapergub)
d. RI Prambanan-Candi Ijo (Evaluasi Rapergub)

2. Tahun 2024 terdapat 2 klaster,
   a. RI SRS Kerto Pleret dan RI SRS Makam Raja Raja Mataram di Imogiri dan RI SRS Masjid dan Makam Raja Raja Mataram di Kotagede (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub);
   b. 2. RI SRS Sumbu Filosofi, RI SRS Keraton, RI SRS Pura Pakualaman, dan RI SRS Kotabaru (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
3. Tahun 2025 terdapat 2 klaster
   a. RI SRS Masjid Pathok Negoro (Babadan, Dongkelan, Mlangi, Plosokuning) (Penyusunan, Evaluasi);
   b. RI SRS Makam Girigondo dan RI SRS Pusat Kota Wates (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
4. Tahun 2026 terdapat 1 klaster yaitu RI SRS Perbukitan Menoreh (Review dan Evaluasi)

Tabel 2- 53 Perwujudan Struktur dan Pola Ruang pada 18 SRS Tahun 2024

No	Satuan Ruang Strategis	Keterwujudan Struktur Ruang (%)	Keterwujudan Pola Ruang (%)	
			Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
1	SRS Kraton	31,55	84,78	83,79
2	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	57,11	80,43	90,79
3	SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	48,02	83,94	78,53
4	SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	18,46	71,02	91,89
5	SRS Masjid Pathok Negoro	21,99	95,93	79,36
6	SRS Gunung Merapi	41,86	89,13	89,02
7	SRS Pantai Samas-Parangtritis	28,33	84,80	79,25
8	SRS Kerto Pleret	23,78	93,87	88,54
9	SRS Kotabaru	27,50	89,02	82,13
10	SRS Candi Prambanan-Candi Ijo	37,05	87,41	81,92
11	SRS Sokoliman	39,46	99,60	87,63

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Ruang Strategis	Keterwujudan Struktur Ruang (%)	Keterwujudan Pola Ruang (%)	
			Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
12	SRS Perbukitan Menoreh	22,69	91,69	73,10
13	SRS Karst Gunungsewu	66,67	95,34	87,09
14	SRS Pantai Selatan Gunungkidul	50,79	91,24	90,42
15	SRS Puro Pakualaman	25,91	61,43	88,39
16	SRS Makam Girigondo	20,69	99,22	60,09
17	SRS Pusat Kota Wates	29,59	91,70	72,21
18	SRS Pantai Selatan Kulon Progo	26,76	68,09	92,39
	Rata-rata	34,34	86,59	83,14

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian perwujudan struktur ruang pada 18 SRS di DIY sebesar 34,34% masuk dalam kategori belum berwujud karena nilai perwujudan masih kurang dari 85%.SRS yang paling rendah keterwujudan struktur ruangnya adalah pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede. Struktur ruang yang paling banyak belum terwujud pada 18 SRS yaitu perwujudan sistem jaringan air limbah dan perwujudan sistem jaringan drainase. Capaian perwujudan pola ruang pada 18 SRS adalah 86,59% untuk kawasan lindung dan 83,14% untuk kawasan budidaya. Persentase keterwujudan pola ruang kawasan lindung tertingga pada SRS Sokoliman sebesar 99,60% dan terendah pada SRS Puro Pakualaman. Sedangkan persentase keterwujudan pola ruang kawasan budidaya tertinggi pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo sebesar 92,39% dan terendah pada SRS Makam Girigondo sebesar 60,09%.

2.2.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

Mulai tahun 2020, kewenangan penyediaan rumah bagi korban bencana semula menjadi kewenangan BPBD beralih menjadi kewenangan DPUPESDM.Menindaklanjuti data BPBD terdapat 5 rumah yang perlu direlokasi. Kemudian terdapat tambahan usulan dari kalurahan di Kapanewon Cangkringan sebanyak 5 rumah, sehingga total terdapat 10 rumah yang perlu direlokasi. Relokasi dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana baru mulai dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 3 unit rumah, kemudian di tahun 2024 dilakukan untuk 3 unit rumah.

Berdasarkan data *baseline* RTLH DIY yaitu sesuai dengan RPJMD DIY 2022 – 2027 pada tahun 2024 yaitu sejumlah 54.991 unit. Penanganan RTLH di DIY hingga tahun 2024 adalah sebesar 7.348 unit atau telah mencapai 13,36% terhadap jumlah RTLH sesuai data *baseline*. Penanganan RTLH pada tahun 2024 sejumlah 3.134 unit terdiri dari APBD DIY sejumlah 750 unit, Danais (BKK Kalurahan) sejumlah 352 unit, Program BSPS Kementerian PU sebanyak 452 unit, APBD Kabupaten/Kota sebanyak 1.294 unit, Kemensos sejumlah 61 unit, DAK Kabupaten/Kota sebanyak 60 unit, CSR dan BAZNAS sejumlah 165 unit.

Dalam rangka dukungan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman, pada tahun 2024 telah dilakukan penyediaan PSU (prasarana dan sarana utilitas) layak dan PJU (penerangan jalan umum) di kawasan permukiman DIY sebanyak 550 lokasi, sebagai berikut:

Tabel 2- 54 Penanganan PSU Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah PSU	Jumlah PJU
Kabupaten Bantul	65	145
Kabupaten Sleman	113	42
Kabupaten Gunungkidul	104	13
Kabupaten Kulon Progo	27	27
Kota Yogyakarta	14	-

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 Ha, dimana 110,39 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Tabel 2- 55 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab /Kota	**Kecamatan**	**Desa / Kelurahan**		
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016
		Prawirodirjan		
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	
		Patangpuluhan		
		Wirobrajan		
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	
		Notoprajan		
		Jumlah	**36.59**	
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016
		Jumlah	**11.71**	
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016
			12.93	
	Pengasih	Pengasih	11.93	
		Jumlah	**39.02**	
Jumlah Total			**110.39**	

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2025

Penanganan perumahan pada kawasan miskin seyogyanya dilakukan secara terintegrasi, sehingga akan tuntas per kawasan, selain penanganan dalam bentuk pembangunan baru rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan Prasarana dan Sarana Umum yang juga diintegrasikan dengan pembangunan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi. Selain itu, untuk memenuhi SPM, bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan kegiatan relokasi bagi korban bencana berupa penyediaan rumah yang layak huni.

2.2.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya :

a. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan cenderung meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih*/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, tahun 2021 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 84 kasus. Sementara itu, hingga november tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 54 kasus.
b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin.
c. Pelanggaran Perda dan Perkada yang masih marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke DIY, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta reklame.
d. Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia *silver* dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

e. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak Lingkungan.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi : Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdi di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Desa/Kelurahan. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kelompok Jaga Warga Dan Omah Jaga Warga. Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana, dan lain-lain. Berikut ini jumlah kelompok jaga warga di DIY.

Tabel 2- 56 Jumlah Kelompok Jaga Warga DIY 2020-2024

Tahun	Jumlah (Kelompok)
2020	1831
2021	1833
2022	2455
2023	3354
2024	4677

Sumber: Jogja Dataku, Bapperida DIY 2024

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerja sama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial, dan tindak kriminal di masyarakat.

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Kegiatan penegakan perda/perkada juga melibatkan kerjasama lintas sektor antar OPD di Pemerintah Daerah DIY dan instansi vertikal seperti Polda DIY, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi.

Tabel 2- 57 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2019-2024

Elemen	Tahun						Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	2.187	63	907	382	160	217	Unit/Kasus

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2024

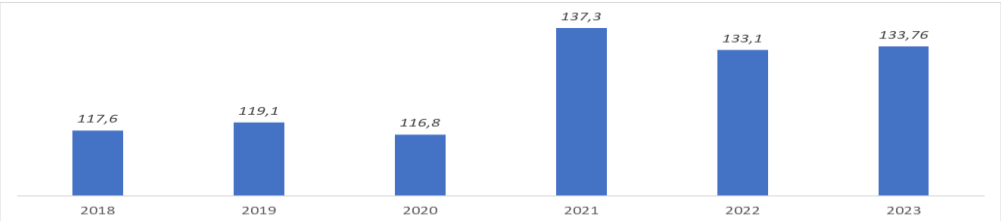
Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIYjuga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi di sekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas antara lain tergambar dari *crime rate* per 100.000 penduduk di wilayah DIY. Selama kurun 2021-2023, crime rate berkisar di angka 133-137. Pada tahun 2022-2023, crime rate mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Adapun secara total tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 5.331 pada 2021 dan sedikit turun menjadi 5.193 kasus pada tahun 2023. Kasus-kasus yang paling menonjol di antaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cyber crime, dan pencurian dengan kekerasan (curas). Beberapa tindak pidana terlihat mengalami kenaikan di tahun 2023, diantaranya kasus narkoba tahun 2023 sebanyak 631 kasus, meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 464 kasus. Kasus *cyber crime* meningkat drastis dari 41 kasus di tahun 2022, menjadi 105 kasus pada tahun 2023. Kasus KDRT dari 75 kasus tahun 2021 menjadi 123 kasus tahun 2023 serta penggelapan sebanyak 360 kasus pada tahun 2022 menjadi 572 kasus di 2023. (Dataku Bappeda DIY, 2023).



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2- 56 Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate) di DIY Tahun 2018-2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Persepsi warga terhadap rasa aman dapat menjadi tolok ukur kondisi trantibumlinmas suatu wilayah. Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal (kampung, komplek, dan lain sebagainya) pada siang dan malam hari. Potret persepsi warga terkait rasa aman ketika berjalan sendirian di DIY terlihat dalam data berikut, yang bersumber dari Susenas Hansos yang dilakukan BPS setiap tiga tahun sekali. Namun demikian, Susenas tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena efisiensi anggaran sehingga persepsi warga terkait rasa aman tidak dapat dipotret.



Sumber:Susenas Modul Hansos, BPS, 2020

Gambar 2- 57 Proporsi Penduduk Yang Mempunyai Rasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Tahun 2014, 2017 dan 2020

Kerukunan umat beragama menjadi salah satu faktor dalam mendorong ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif di DIY. Tingkat perkembangannya bisa diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Berdasarkan data yang ada, terjadi tren peningkatan dalam IKUB di DIY. Selain itu, capaian IKUB DIY setiap tahunnya lebih tinggi dari rerata nilai IKUB nasional. Pada tahun 2021 capaian IKUB DIY sebesar 76,03 lebih tinggi dari rerata capaian nasional sebesar 72,39 dan kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 78,90 yang juga lebih tinggi dari rerata capaian nasional sebesar 73,09. Sementara itu, hingga tahun 2023 capaian IKUB DIY sebesar 79,56 yang juga menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rerata nilai IKUB

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

nasional yaitu 76,02. Adapun rekapitulasi capaian IKUB DIY bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 58 Rekapitulasi Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama DIY dan Nasional

Tahun	DIY	Nasional
2017	72,90	72,20
2018	73,10	70,90
2019	74,20	73,80
2020	74,20	67,49
2021	76,03	72,39
2022	78,90	73,09
2023	79,56	76,02

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024

Tabel diatas telah menunjukkan capaian IKUB yang baik setiap tahunnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus intoleransi yang terjadi selama periode 2017-2023. Beberapa kasus tersebut yaitu:

a. Penolakan Camat Kecamatan Pajangan Bantul yang beragama non muslim tahun 2017
b. Penolakan Bakti Sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan oleh ormas keagamaan. bakti sosial ini dianggap sebagai kristenisasipada Januari 2018
c. Penyerangan Gereja Santa Lidwina Bedog Gamping pada saat misa pagi pada Februari 2018
d. Penolakan acara sedekah laut di Pantai Baru Srandakan Bantul pada 12 Oktober 2018 karena dianggap syirik
e. Pemotongan tanda salib pada makam Jambon, Purbayan Kotagede pada Desember 2018
f. Penolakan warga yang beragama kristen tinggal di padukuhan karet, Pleret, Bantul pada April 2019
g. Penutupan patung bunda maria pada 11 maret 2023 di Dusun Degolan Kulon Progo
h. Pemaksaan pemakaian jilbab siswa SMA N 7 Yogyakarta pada tanggal 19 September 2023

Kasus-kasus diatasperlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat tertangani dan upaya preventif yang optimal agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI, capaian nilai IDI DIY Tahun 2022 sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi) sekaligus menempati peringkat pertama secara nasional, turun menjadi 83,88 pada Tahun 2023 dengan menempati peringkat ketiga secara nasional. Meskipun terdapat penurunan, capaian nilai IDI DIY pada Tahun 2023 masih dalam kategori tinggi.

Tabel 2- 59 Tingkat perkembangannya IDI berdasarkan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

No	Indikator	2021	2022	2023
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56
	ASPEK KESETARAAN	**87,29**	**88,76**	**89,21**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,44	95,94	96,31
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	**80,74**	**80,17**	**83,51**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator	2021	2022	2023
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94
	NILAI IDI KOMPOSIT	81,21	85,62	83,88

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024 (diolah)

Selanjutnya berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY sesuai rilis terakhir pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat sebesar 2,30%.

Tabel 2- 60 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Peringkat	Provinsi	Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	**Daerah Istimewa Yogyakarta**	**2,3%**
Rata-Rata Nasional		**1,8%**

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Selain itu, jika melihat pada data yang diberikan oleh Ditres Narkoba Polda DIY kepada Badan Kesbangpol DIY, di tahun 2023 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba DIY cenderung meningkat dari jumlah kasus di tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukuptinggi dan perlu penanganan lebih lanjut. Adapun perkembangan jumlah kasus narkoba di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 61 Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY

No	Tahun	Perkara	Tersangka
1	2019	514	601
2	2020	619	699
3	2021	548	612
4	2022	631	708
5	2023	701	795
6	2024	663	782

Sumber: Ditres Narkoba Polda DIY, 2024

POLDA DIY telah mencatat 548 perkara penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 612 di tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan di 2022 menjadi 631 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 708 orang. Di tahun 2023, jumlah perkara kembali mengalami peningkatan menjadi 701 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 795 orang. Sementara itu, hingga Bulan November tahun 2024, telah tercatat sebanyak 663 kasus penyalahgunaan narkoba di DIY dengan jumlah tersangka sebanyak 782 orang. Terkait hal tersebut, perlu adanya upaya ekstra dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Dalam hal kondisi politik, stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salahsatu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, berbagai tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 62 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun

Wilayah	Pileg				Pilpres						Pilkada				
					2004										
	2004	2009	2014	2024	Putaran I	Putaran II	2009	2014	2019	2024	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020	2024
Kota Yogyakarta	75.04	66.64	75.88	83,61	79.08	75.61	69.21	77.76	84.81	86,80	53.32	64.46	70.8	-	65,00
Kabupaten Bantul	92.11	74.08	81.2	89,11	85.24	82.63	79.11	81.31	87.89	90,53	76.52	73.69	75.33	80.32	75,96
Kabupaten Kulon Progo	87.04	73.37	80.64	88,00	85.41	82.96	73.46	79.32	86.5	88,64	75.66	69.7	79.32	-	79,26
Kabupaten Sleman	81.3	72.68	81.4	87,78	78.81	76.04	77.61	81.72	87.82	90,43	77.69	70.67	72.26	75.99	76,57
Kabupaten Gunungkidul	82.41	75.14	78.53	85,04	79.12	75.26	75.36	76.89	82.96	85,06	75.27	71.87	70.12	80.18	74,51
DIY	**84.13**	**72.94**	**80.02**	**87,25**	**80.93**	**77.79**	**75.97**	**79.84**	**88.68**	**88,88**	**71.69**	**70.08**	**73.57**	**70.83**	**74,26**

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

Secara historis, DIY memiliki catatan biru dalam angka partisipasi pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80,02% di tahun 2014 dan meningkat menjadi 88% di tahun 2019. Capaian tersebut menempati urutan tertinggi kedua setelah Papua yang menggunakan sistem Noken (pemilihan dengan diwakilkan pada pemimpin adat). Angka tersebut mengalami kenaikan pada Pemilu 2024, dimana angka partisipasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebesar 88,88%, pemilihan DPR RI dan DPD RI sebesar 87,36%, serta DPRD Provinsi DIY sebesar 87,25% dengan total partisipasi pada pileg 2024 sebesar 87,25%. Selain itu, partisipasi pemilih pada gelaran pilkada 2024 secara keseluruhan meningkat yakni dari 70,83% pada pilkada tahun 2020 menjadi 74,25% pada pilkada tahun 2024. Namun demikian, partisipasi pemilih di DIY pada Pilkada 2024 masih berada di bawah partisipasi pemilih pada gelaran pilpres dan pileg. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kondisi geografis lokasi TPS, akses informasi yang terbatas, maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pasangan calon.

2.2.2.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan advokasi serta sinergi.

Berdasarkan Permensos No.9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial, kewenangan pelaksanaan SPM terbagi menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan Provinsi fokus pada pembinaan, standarisasi, dan pelayanan di panti serta pasca bencana, sedangkan Kabupaten/Kota bertugas menjalankan layanan langsung di masyarakat, khususnya rehabilitasi luar panti dan bantuan sosial lokal. Kolaborasi keduanya, dengan alur pembinaan dari provinsi dan eksekusi di lapangan oleh kabupaten/kota, memastikan pemenuhan hak sosial dasar warga dapat terjamin keberlanjutan layanan sosial mendasar seperti rehabilitasi, perlindungan bencana, dan dukungan untuk kelompok rentan. Kondisi SPM di DIY urusan sosial pada akhir tahun 2024 sudah mencapai 100% berdasarkan data aplikasi eSPM tahun 2025, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah DIY turut serta memperhatikan pemenuhan SPM urusan sosial di DIY.

Tabel 2- 63 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	N/A	72	122	175	242
2	Anak Balita Terlantar	N/A	441	431	255	123
3	Anak Dengan Kedisabilitasan	N/A	1.971	2.012	2.553	2.284
4	Anak Jalanan	N/A	47	132	66	15
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	N/A	10	165	77	68
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	N/A	29	25	98	69
7	Anak Terlantar	N/A	7.902	5.200	5.128	3.577
8	Bekas Warga Binaan	N/A	170	157	258	249

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Lembaga Pemasyarakatan					
9	Fakir Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Gelandangan	N/A	123	72	58	29
11	Korban Bencana Alam	N/A	7.687	21.908	16.178	3.945
12	Korban Bencana Sosial	N/A	80	59	77	42
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	N/A	4.515	4.165	3.815	3.008
14	Kelompok Minoritas	N/A	124	138	130	112
15	Korban Penyalahgunaan Napza	N/A	323	242	224	727
16	Korban Trafifcking	N/A	1	6	8	7
17	Korban Tindak Kekerasan	N/A	560	470	332	222
18	Lanjut Usia Terlantar	N/A	33.129	26.525	25.780	23.301
19	Orang dengan HIV/AIDS	N/A	5.127	5.617	6.393	7033
20	Penyandang Disabilitas	N/A	26.866	28.137	26.512	26.371
21	Pemulung	N/A	412	327	300	261
22	Pengemis	N/A	111	64	61	48
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	N/A	278	208	177	157
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	N/A	12.407	11.526	11.819	8.087
25	Tuna Susila	N/A	361	90	100	39

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

Data PPKS di DIY dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, terlihat pada Tabel Perkembangan PPKS DIY di atas, dari masing-masing jenisnya terdapat data yang menunjukkan arah peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2024 menunjukkan data jumlah terbesar ada pada Penyandang Disabilitas sebanyak 26.371 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 23.301 orang, dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 8.087 orang.

Pada tahun 2024, data yang mengalami peningkatan mayoritas terjadi pada beberapa jenis PPKS. Hal tersebut terlihat pada data Anak Berhadapan Dengan Hukum mengalami peningkatan dari 175 orang di tahun 2023 menjadi 242 orang pada tahun 2024 dan Korban Penyalahgunaan Napza pada tahun 2024 menjadi 727 orang. Pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan tanpa mengesampingkan intervensi untuk PPKS lainnya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perorangan atau Lembaga pemerintah maupun swasta yang sudah berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PPKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel 2- 64 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2020-2024

No	Jenis PSKS	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pekerja Sosial Profesional	N/A	3	3	8	63	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	N/A	36	41	45	45	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	N/A	5057	3073	3122	2725	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	N/A	1091	662	581	554	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	N/A	316	283	316	355	Lembaga
5	Karang Taruna	N/A	438	438	438	438	Lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	N/A	12	12	7	9	Lembaga
7	Keluarga Pioner	N/A	30	N/A	N/A	N/A	Keluarga
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	N/A	229	304	310	295	Lembaga
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	N/A	120	120	120	120	Orang
10	Penyuluh Sosial Fungsional	N/A	6	10	7	36	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	N/A	78	78	78	78	Orang
12	Dunia Usaha	N/A	238	237	238	237	Lembaga

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

Terdapat 12 jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di DIY yang membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PPKS melalui panti dan di luar panti/masyarakat. Pemda DIY memiliki UPT di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2- 65 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2020-2024

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	115
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	70	70	70	50
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	210
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	40
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	228	214	228	228	200
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	125	140	140	70

Sumber: Dinas Sosial DIY 2025

Data maksimal Kapasitas Daya Tampung Balai/Panti di DIY tersaji pada table diatas. Pada BRSBKL kapasitas sangat besar dikarenakan terdapat 2 gedung balai/panti yang tempatnya berbeda yaitu Bina Karya untuk warga balai/panti yang sudah di rehab dan mendapatkan pelatihan untuk dapat mandiri sehingga siap bekerja dan Bina Laras merupakan balai/panti untuk orang dengan gangguan jiwa yang sedang dalam proses rehabilitasi. BPSTW untuk lansia juga memiliki 2 gedung balai/panti yang terletak di daerah Sleman dan Bantul, BPSTW digunakan untuk menampung lansia terlantar rujukan dari daerah-daerah di DIY serta dapat digunakan secara regular oleh lansia yang menginginkan tinggal di balai/panti dengan berbayar. BRSPA untuk anak juga memiliki 2 balai/panti yang terletak di Sleman dan Gunungkidul.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.2.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ketenagakerjaan di daerah antara lain : penduduk usia kerja (PUK) dan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, karakteristik penduduk bekerja, tingkat pengangguran terbuka, serta kondisi ketenagakerjaan di kab/kota.

1. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Berdasarkan "*Labour Force Concept*", *International Labor Organization* (ILO) mengklasifikasikan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan status aktivitas utamanya kedalam beberapa kategori yakni : kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang merupakan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk yang aktivitas utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat, dan lain-lain).

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY sebanyak 3.024,06 ribu orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu 2.261,44 ribu orang (74,78%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 762,62 ribu orang.

Tabel 2- 66 Perkembangan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2020−2024 (ribu orang)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	3.132,75	3.175,79	3.217,87	2.998,93	3.024,06
Angkatan Kerja	2.228,16	2.334,96	2.336,08	2.221,69	2.261,44
- Bekerja	2.126,32	2.228,52	2.241,13	2.139,71	2.182,77
- Pengangguran	101,85	106,43	94,95	81,98	78,67
Bukan Angkatan Kerja	904,59	840,83	881,80	777,23	762,62
TPAK (Persen)	71,12	73,52	72,60	74,08	74,78
- Laki-laki	78,20	82,83	82,22	83,76	83,27

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

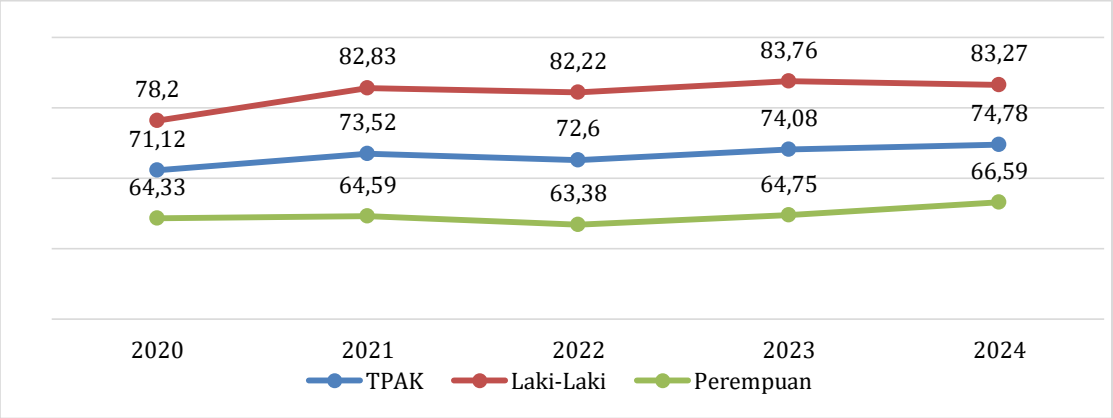
Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
- Perempuan	64,33	64,59	63,38	64,75	66,59

Sumber: Sakernas Agustus BPS Provinsi DIY, 2024

Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Komposisi angkatan kerja di DIY pada Agustus 2024 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2.182,77 ribu orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 78,67 ribu orang.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif sehari-hari secara ekonomi merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja terhadap pasar tenaga kerja. Perhitungan TPAK adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Tahun 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan trend. TPAK DIY pada Bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 71,12%, kemudian pada Agustus 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 73,52%. TPAK DIY sempat mengalami penurunan pada Agustus 2022 menjadi sebesar 72,60%, namun pada Agustus 2023 hingga Agustus 2024 kembali mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 74,08% dan 74,78%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 74,78% dari total populasi usia kerja di DIY aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi capaian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TPAK DIY dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena adanya pasokan tenaga kerja yang memadai, serta dapat mendorong permintaan berbagai barang dan jasa imbas dari meningkatnya aktivitas perekonomian.

Sementara itu apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di DIY pada Agustus 2024 sebesar 83,27% sedangkan TPAK perempuan sebesar 66,59%. TPAK laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya oleh laki-laki sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Namun apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan. TPAK laki-laki turun sebesar 0,49% poin, sedangkan TPAK perempuan naik sebesar 1,84% poin.

3. Karakteristik Penduduk Bekerja

Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

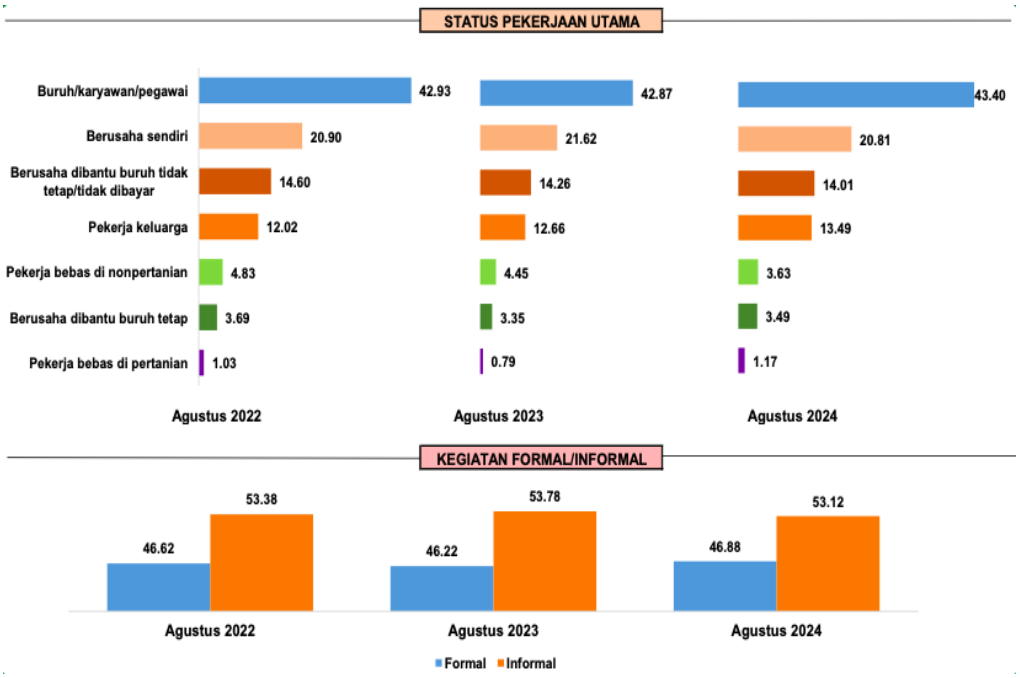
Gambar 2- 59 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY, Tahun 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama memberikan gambaran distribusi tenaga kerja/struktur ekonomi di suatu wilayah. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di DIY pada Agustus 2024 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu perdagangan sebesar 19,72%, pertanian sebesar 19,41%,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan industri pengolahan sebesar 17,11%. Dominasi sektor-sektor tersebut mencerminkan struktur ekonomi di DIY yang masih berbasis pada sumber daya alam dan konsumsi.

Pada periode Agustus 2023-Agustus 2024, tiga besar lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama pada Sektor Industri Pengolahan (3,37% poin); Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,34% poin), serta Sektor Pengangkutan dan Pergudangan (0,18% poin). Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Pengolahan disebabkan karena meningkatnya nilai ekspor Industri Pengolahan.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

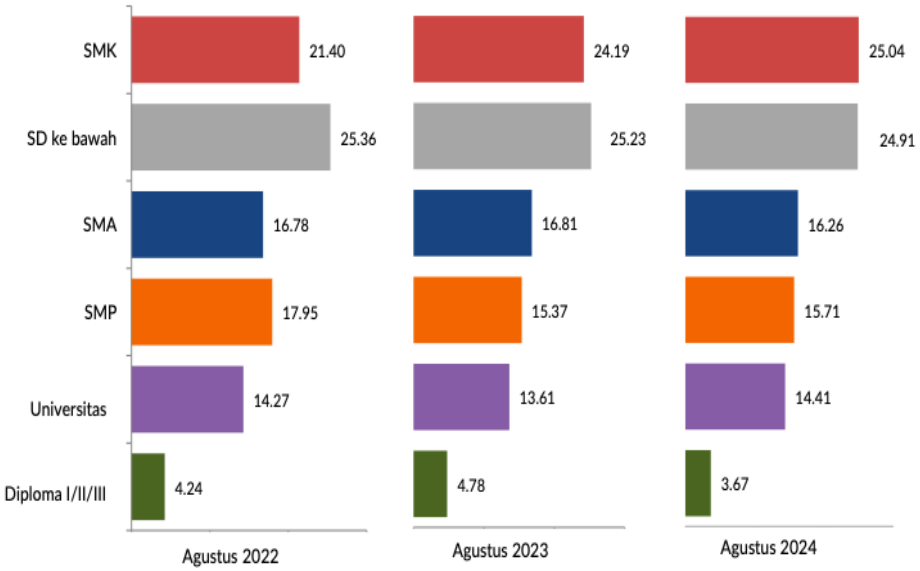
Gambar 2- 60 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di DIY, Tahun 2022-2024

Komposisi penduduk bekerja di DIY menurut status pekerjaan utama berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yakni sebesar 43,40%. Peringkat kedua yakni penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri (20,81%) diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (14,01%). Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian memiliki persentase terkecil yaitu 1,17%. Meskipun sektor pertanian masih menjadi penyumbang lapangan kerja yang signifikan di DIY namun dengan rendahnya persentase pekerja bebas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

di sektor pertanian mengindikasikan adanya pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa).

Penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya masuk dalam kategori kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Komposisi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal di DIY tahun 2024 sebanyak 1.023,33 ribu orang atau 46,88%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.159,44 ribu orang atau 53,12%. Apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2023, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,66% poin. Peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal di DIY menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi pada sektor formal yang cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Namun demikian, tercatat pula bahwa sektor informal masih menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas.



Sumber: BPS Provindi DIY, 2024

Gambar 2- 61 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Tahun 2022-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

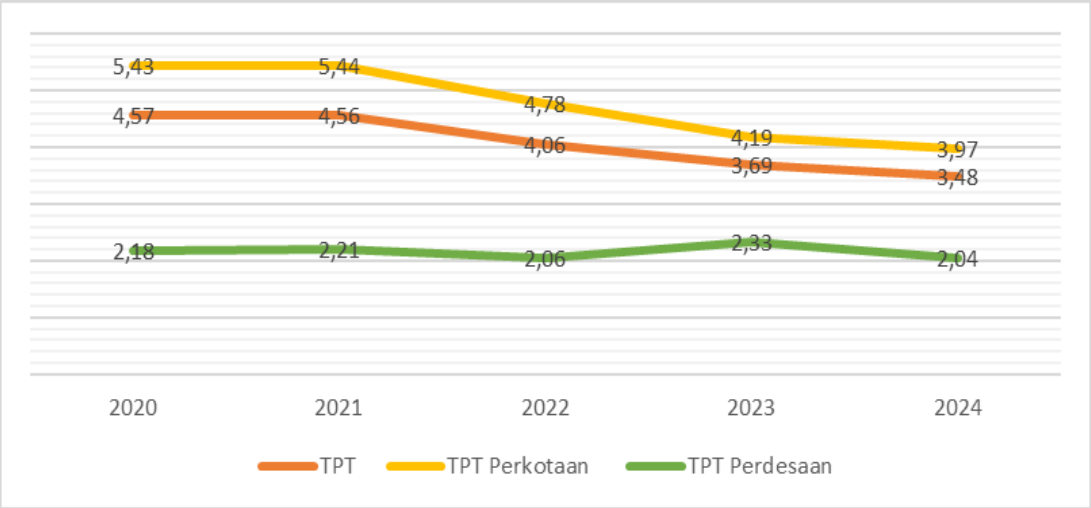
Komposisi penduduk bekerja di DIY menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh oleh penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 546,58 ribu orang (25,04%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 543,64 ribu orang (24,91%). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,08%, yang mencakup 314,58 ribu orang (14,41%) dengan tingkat pendidikan Universitas dan 80,11 ribu orang (3,67%) dengan tingkat pendidikan Diploma.

Dalam tiga tahun terakhir, distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan menunjukkan adanya pergeseran pola terutama pada pendidikan SD ke bawah dan pendidikan SMK. Apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2023, peningkatan terbesar terjadi pada tenaga kerja dengan pendidikan SMK yaitu sebesar 0,85% poin diikuti tenaga kerja dengan pendidikan universitas sebesar 0,80% poin. Peningkatan signifikan pada tenaga kerja dengan pendidikan SMK mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan industri yang semakin membutuhkan tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik. Namun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi terkait kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran sendiri didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja, sementara pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, putus asa (merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan), serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum bekerja.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

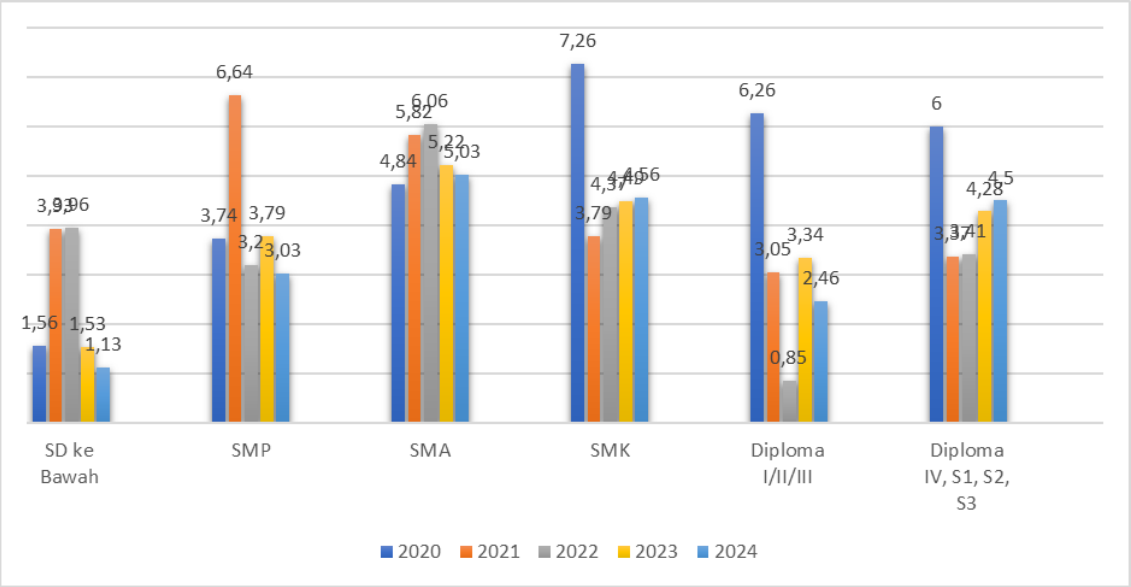


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 62 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal DIY, Tahun 2020-2024

Keadaan TPT di DIY selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 3,48-4,57%, dan selalu berada di bawah TPT nasional pada kisaran 4,91-7,07%, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di DIY. TPT DIY berdasarkan Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,48%, dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Sementara berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan pada Agustus 2024 sebesar 3,97%, sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 2,04%. Supply tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di pedesaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



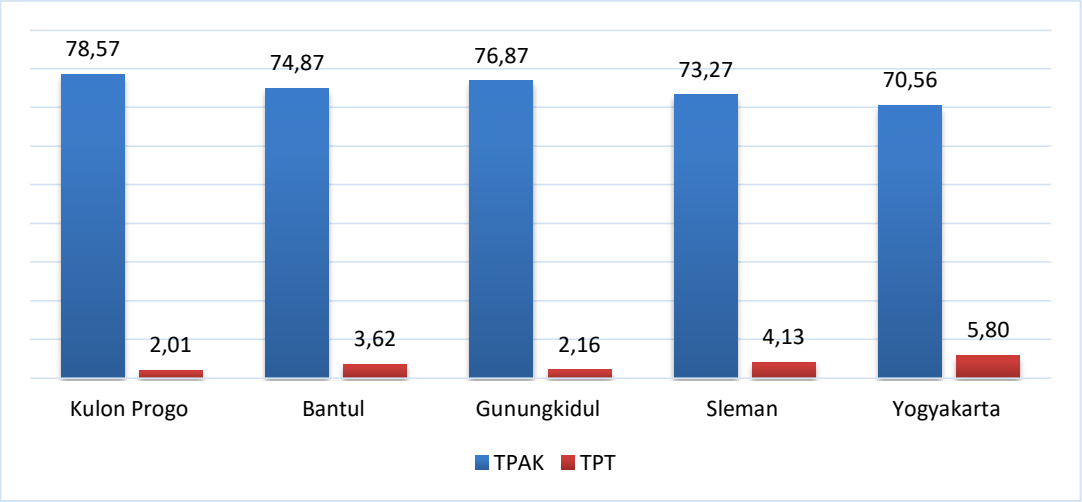
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 63 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan DIY, Tahun 2020-2024

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 5,03%, meskipun kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,56% diikuti perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) sebesar 4,50%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat persaingan yang ketat terutama sektor formal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti mismatch antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan yang sesuai.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Kondisi ketenagakerjaan di kab/kota



Sumber : BPS, 2024

Gambar 2- 64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2024

TPAK menurut kabupaten/kota berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 di DIY paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,57% diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,87%, Kabupaten Bantul sebesar 74,87%, dan Kabupaten Sleman sebesar 73,27%. Sedangkan TPAK terendah ada di Kota Yogyakarta sebesar 70,56%. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul utamanya bekerja di sektor pertanian dan informal sehingga tidak membutuhkan pendidikan khusus.

Sementara itu, TPT tertinggi di DIY adalah Kota Yogyakarta sebesar 5,80%, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,13% dan Kabupaten Bantul 3,62%. TPT terendah dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,01%. Tingginya tingkat pengangguran di kawasan perkotaan dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya migrasi, dominasi jenis pekerjaan sektor formal di kawasaan perkotaan yang seringkali membutuhkan tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan spesifik sehingga membuat semakin ketatnya kompetisi untuk memasuki pasar kerja.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas 6 sub urusan pemerintahan, yaitu: kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan sejak tahun 1978, yang dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita. Pada awal kehadiran kementerian tersebut, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita menekankan pada integritas perempuan dalam pembangunan. Perempuan didorong agar mampu berperan dalam rumah tangga dan sebagai sumber daya pembangunan.

Sementara itu, program pemerintah dalam perlindungan anak dimulai dengan diratifikasikannya Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Berdasarkan konvensi ini,anak memiliki empat hak antara lain: 1) Hak kelangsungan hidup; 2) Hak perlindungan; 3) Hak tumbuh kembang; dan 4) Hak berpartisipasi. Selain hak-hak anak, Konvensi Hak Anak juga berisi lima klaster substantif yaitu: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta 5) Perlindungan khusus.

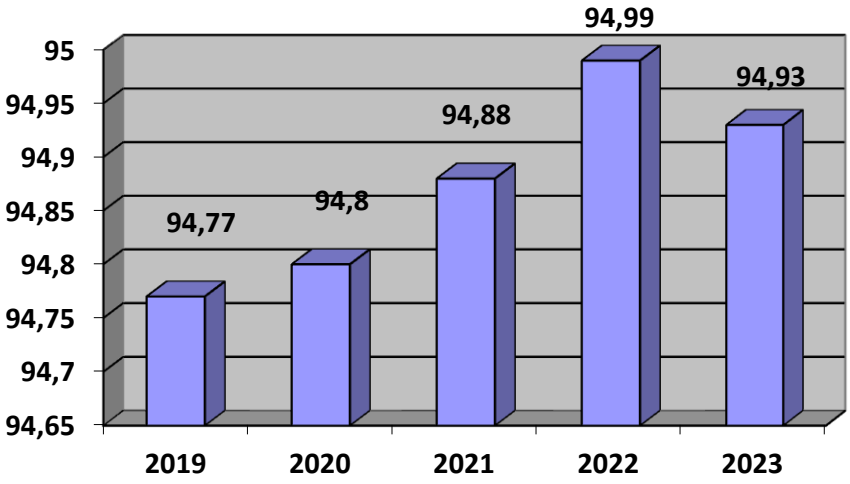
Dalam perkembangannya, Pemerintah kemudian menyusun beberapa indikator utama dalam mengukur kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Diantaranya yaitu: Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Perempuan, dan Indeks Perlindungan Anak. Capaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuandan laki-laki dalam pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh IPG sebesar 94,93. Angka ini menunjukkan adanya penurunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

IPG sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2022 yang memiliki IPG sebesar 94,99. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan metode penghitungan IPG yaitu menggunakan data Usia Harapan Hidup sesuai hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Hal ini dilakukan agar menyesuaikan dengan perubahan metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI) tahun 2010.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 65 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2019-2023

Jika kita menilik pada data komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sebagai dasar penghitungan IPG, sebenernya capaian laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan. Namun, peningkatan capaian laki-laki yang lebih besar dari pada perempuandi setiap komponen menyebabkan kesenjangan IPM laki-laki dan perempuan menjadi lebih besar.

Tabel 2- 67 Capaian Komponen IPM Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2023	73,4	77,03	15,71	15,66	10,16	9,51	18.141	13.747
2022	73,28	76,93	15,68	15,65	10,06	9,45	17.699	13.404
Kenaikan Capaian	0,16%	0,13%	0,19%	0,06%	0,99%	0,63%	2,50%	2,56%

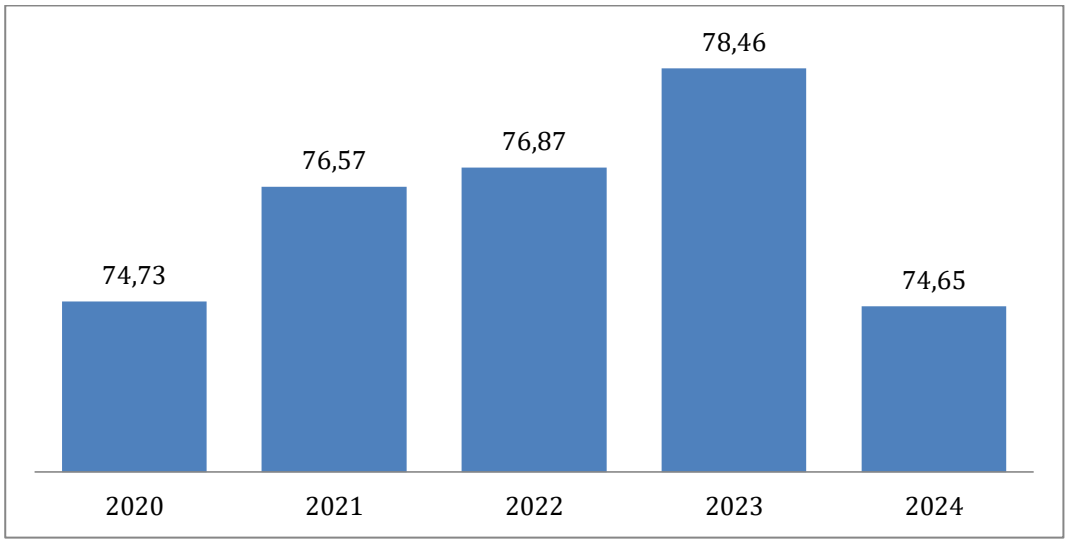
Sumber:BPS Provinsi DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengadopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP. Indeks ini menjadi indikator pengukuran tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator- indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kembali menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD DIY periode 2022-2027, setelah pada periode RPJMD 2017-2022 sebelumnya Pemda DIY selalu berhasil memenuhi target IDG. Pada tahun 2023, IDG DIY kembali mengalami menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian angka sebesar 78,46 atau naik 1,59 poin dari capaian tahun 2022.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 66 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2020-2024

Peningkatan capaian keterlibatan perempuan di parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional mendukung kenaikan IDG.Pada tahun 2023, terjadi kenaikan 1,82% pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen dibandingkan capaian tahun 2022. Pada tahun 2022, keterlibatan perempuan di parlemen ada pada angka 20%. Sedangkan pada tahun 2023, persentase keterlibatan perempuan di parlemen berada pada angka 21,82%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Meskipun terus terjadi peningkatan capaian IDG selama 5 tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih diperlukan. Utamanya dalam upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen sehingga mencapai kuota *affirmative action* 30% perempuan sebagai anggota parlemen.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks ini mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Anak dan terdiri dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster hak anak, yaitu: Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang, dan Klaster V: Perlindungan Khusus.

Tabel 2- 68 Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya

Tahun	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA DIY	IPA Indonesia
2019	Indeks	77,18	89,94	84,02	75,92	80,44	81,71	66,26
2020	Indeks	80,99	90,75	85,16	79,12	71,82	81,53	66,89
2021	Indeks	53,31	88,18	84,29	32,53	78,46	68,35	61,38
2022	Indeks	58,29	89,36	84,75	35,35	82,49	71,08	63,30
2023	Indeks	49,82	92,46	85,66	39,89	84,44	71,48	63,83

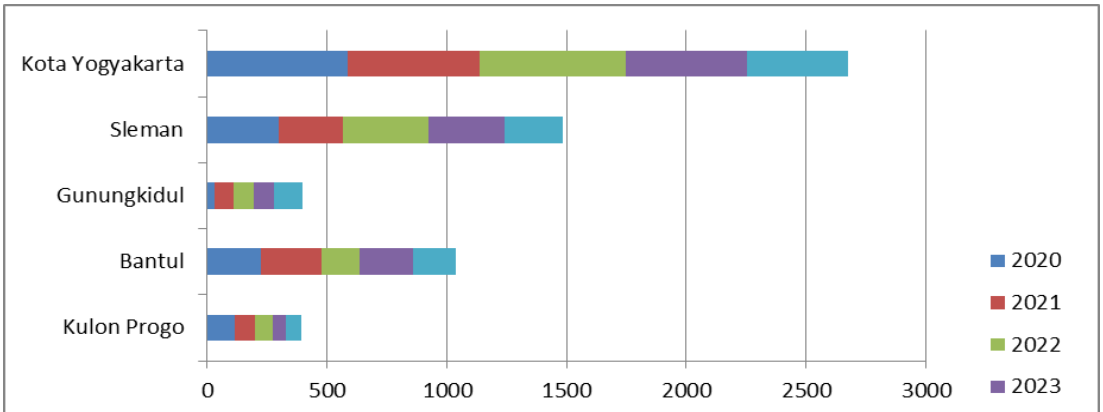
Sumber: SIAJI DP3AP2 DIY, 2024

Sejak awal rilis di 2018, IPA DI Yogyakarta selalu lebih tinggi dari IPA Indonesia.Bahkan IPA DIY menjadi yang tertinggi secara nasional di tahun 2020 dan tahun 2022. Namun, capaian IPA DIY masih fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika lingkungan DIY semasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bisa berjalan optimal di tahun 2020 dan 2021. IPA DI Yogyakarta kembali mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin menjadi 71,48 pada tahun 2023 sehingga DI Yogyakarta menjadi daerah setingkat provinsi dengan capaian IPA tertinggi se-Indonesia. Kenaikan ini terjadi pada semua dimensi kecuali dimensi “Hak Sipil dan Kebebasan” yang mengalami penurunan sebesar 8,47 poin menjadi 49,82.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan total 2.672 kasus dari tahun 2020 - 2024, sedangkan kasus terendah ada di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 401 kasus dari tahun 2020-2024. Meskipun demikian, jika dilihat tahun 2023-2024 terjadi penurunan jumlah kasus di setiap wilayah, kecuali di Kabupaten Gunungkidul yang meningkat menjadi 118 kasus pada tahun 2024.



	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2020	119	224	32	302	589
2021	81	256	82	268	548
2022	75	159	83	356	609
2023	55	220	86	317	509
2024*	64	180	118	244	417

*)Angka Sementara
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 67 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi, Tahun 2020-2024

5. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Pada tahun 2020, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 angka dispensasi kawin kembali menurun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 69 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2020-2024 Menurut Jenis Kelamin

Wilayah	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kulon Progo	48	71	119	0	0	0	10	20	30	14	45	59	0	0	0
Bantul	56	113	169	56	91	147	24	41	65	16	95	111	25	67	92
Gunungkidul	49	188	237	169	49	218	19	50	69	38	111	149	0	0	0
Sleman	169	189	358	94	139	233	54	85	139	32	128	160	0	0	0
Yogyakarta	20	56	76	8	23	31	8	17	25	2	38	40	0	0	0
DIY	342	617	959	327	302	629	115	213	328	102	417	519	25	67	92

Sumber: SIGA DP3AP2, 2025

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan pada tahun 2019 hingga 2022 mengenai perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi dengan jumlah 984 disusul Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 632. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah dengan jumlah 218.

6. Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2019-2024 fluktuatif naik turun setiap tahunnya. Data memperlihatkan bahwa angka kasus ABH yang ditangani pada tahun 2019-2024 sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 91 orang dan tahun 2021 menjadi 62 orang. Mulai tahun 2022 terjadi peningkatan ABH di DIY yang cukup signifikan. Selanjutnya, jika dilihat dari jenis kelamin, data masih menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbanyak berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2- 70 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY,Tahun 2019-2024

Wilayah	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kulon Progo	8	1	9	7	0	7	3	0	3	3	0	3	2	1	30	33	1	34
Bantul	18	0	18	23	0	23	22	1	23	40	0	40	29	3	32	90	20	110
Gunungkidul	4	0	4	5	0	5	3	0	3	4	1	5	7	0	7	13	8	21
Sleman	40	0	40	38	1	39	19	2	21	39	2	41	62	0	62	51	0	51
Yogyakarta	20	0	20	24	1	25	12	0	12	12	0	12	44	0	44	26	0	26
DIY	90	1	91	98	2	100	59	3	62	98	3	101	171	4	175	213	29	242

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

2.2.2.2.3 Urusan Pangan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selaras dengan hal tersebut, maka peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

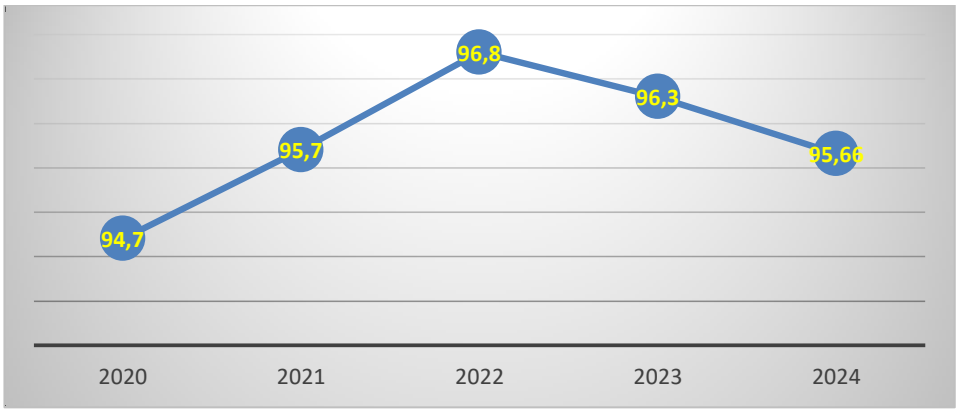
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil Susenas BPS, skor PPH di DIY dari tahun 2019 hingga 2022 terus meningkat. Berdasarkan hasil Susenas BPS, skor PPH di DIY dari tahun 2019 hingga 2022 terus meningkat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 0,5 dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 95,66. Meskipun demikian, skor PPH di DIY tetap lebih tinggi dibandingkan dengan skor nasional yang mencapai 94,1. Skor PPH mencerminkan tingkat dan kualitas konsumsi pangan. Capaian skor PPH di atas 90 merupakan kategori cukup ideal yang mendekati angka ideal 100, sehingga kualitas konsumsi pangan di DIY masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat konsumsi pangan di DIY masih didominasi oleh kelompok padi-padian, khususnya beras serta kelompok sayur dan buah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Hal ini menjadi tantangan yang harus menjadi fokus

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penanganan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/ kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

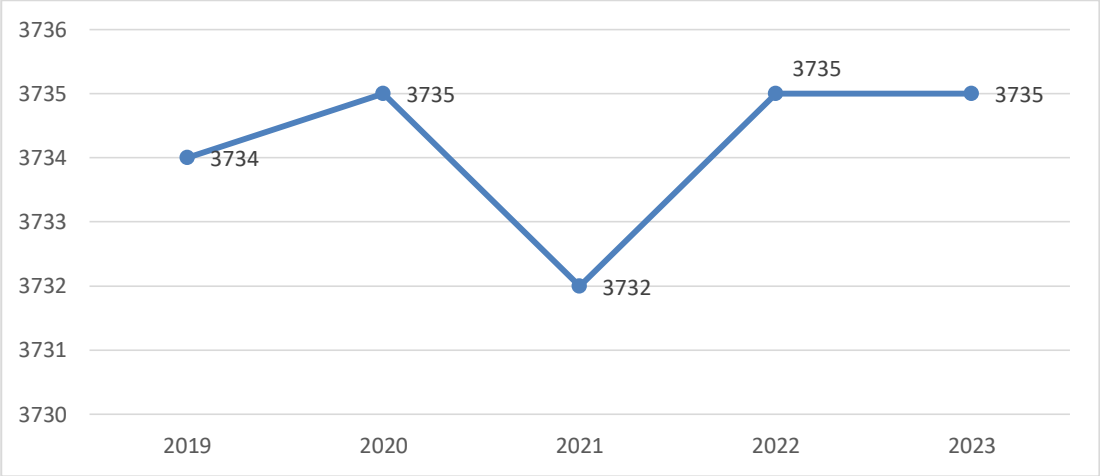
Gambar 2- 68 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2020-2024

Pencapaian tersebut merupakan buah kerja keras serta sinergi berbagai stakeholder dalam upaya mengubah pola konsumsi masyarakat menuju konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai.

2. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik, didukung oleh peningkatan produksi pertanian dan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Tingkat ketersediaan energi tahun 2023 tercapai 3.735 kkal/kapita/hari dengan tingkat konsumsi energi sebesar 2.053 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi selama tahun 2019-2023 cenderung stabil walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



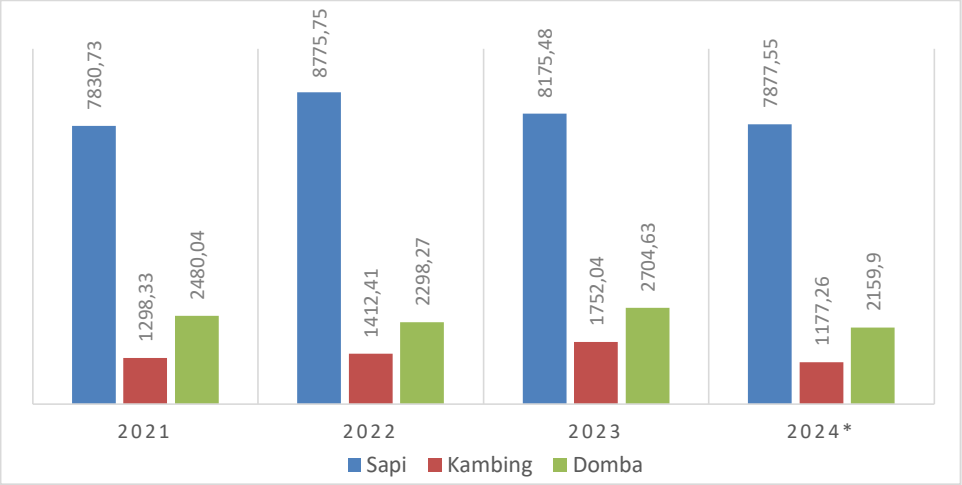
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 69 Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2019-2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemda, jenis pangan pokok untuk cadangan pangan berupa beras ditetapkan sebanyak 322 ton. Pada tahun 2022, terjadi pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bantuan bencana sebesar 11,658 ton, sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah cadangan pangan sebesar 280,884 ton. CPPD tersebut dititipkan di BULOG sebesar 31,875 ton dan di Taru Martani sebesar 249,009 ton. Pada tahun 2023 dialokasikan anggaran pengadaan CPPD sebesar 24,865 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 305,749 ton dan seluruhnya dikelola di PT Taru Martani. Pada tahun 2024, terdapat penyaluran cadangan pangan pemerintah sebanyak 450 kg untuk bencana tanah longsong, sehingga sisa cadangan pangan pemerintah DIY menjadi 305,30 ton di akhir tahun 2024.

Produksi daging sapi pada periode 2021-2024 mengalami kecenderungan peningkatan dengan produksi terbesar pada tahun 2022 sebesar 8.775,75 ton, namun setelahnya produksi menurun hingga tahun 2024 sebesar 7.877,55 ton. Sementara itu, produksi daging domba dan daging kambing pada periode sama cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan produksi daging kambing dan domba sejalan dengan kecenderungan penurunan populasi kambing dan domba di DIY.

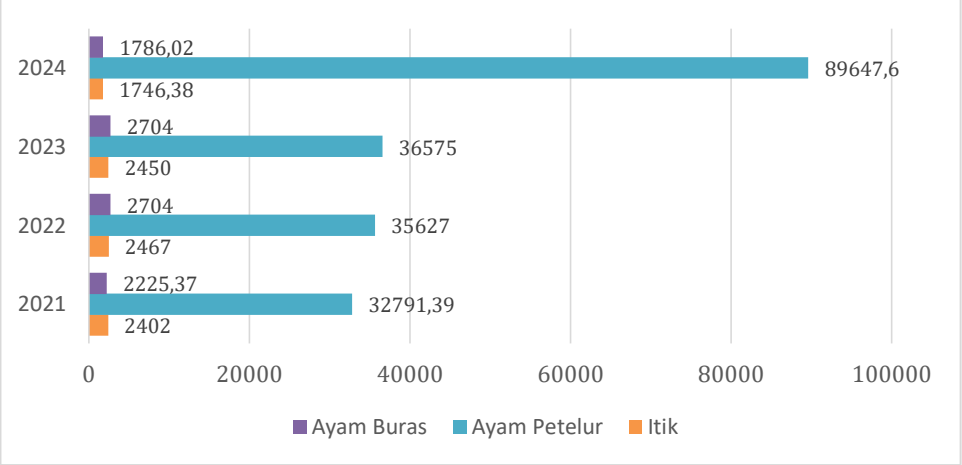
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025
**) angka sementara*

Gambar 2- 70 Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba di DIY Tahun 2021-2024 (Ton)

Selama kurun waktu 2021-2023 produksi telur unggas baik dari itik, ayam petelur maupun ayam buras cenderung meningkat. Namun pada tahun 2024, produksi telur itik dan ayam buras mengalami penurunan masing-masing menjadi 1.746,38 ton dan 1.786,02 ton. Sedangkan produksi ayam petelur pada tahun 2024, meningkat cukup banyak menjadi 89.647,60 ton. Minat peternak ke budidaya ternak ayam petelur menyebabkan populasi ayam petelur meningkat sehingga produksi telur dari ayam petelur pun juga meningkat di tahun 2024. Secara lebih rinci, produksi telur unggas di DIY disajikan pada gambar di bawah ini:

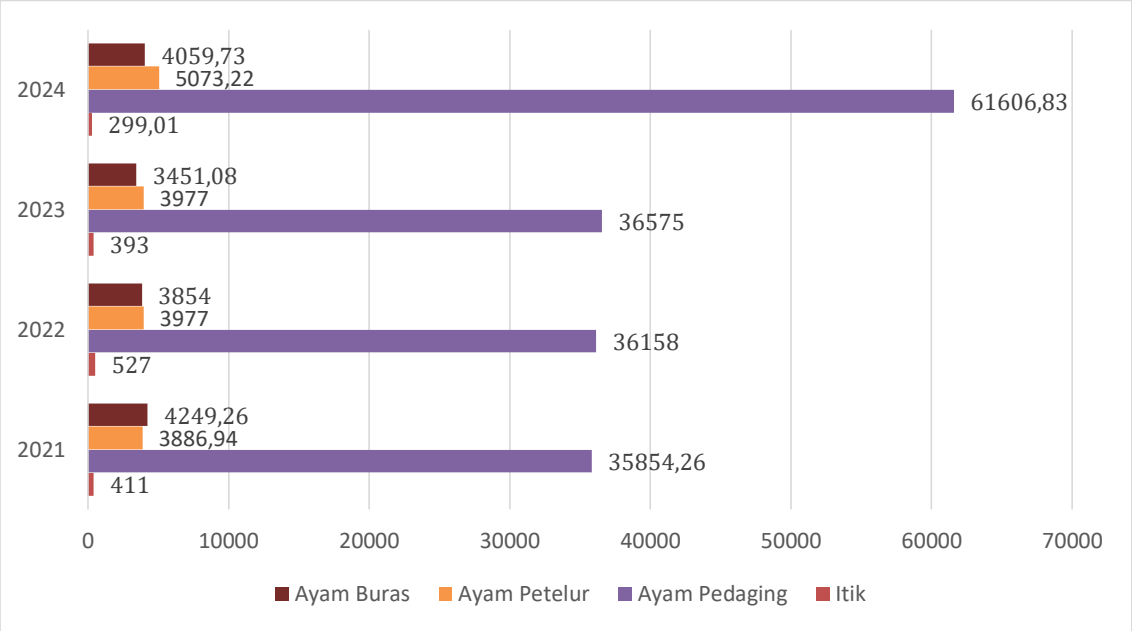


Sumber : BPS DIY, 2024

Gambar 2- 71 Produksi Telur Unggas Tahun 2021-2024 (dalam ton)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kecenderungan peningkatan produksi daging dari ayam pedaging meningkat sangat signifikan dalam periode tahun 2021-2024. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap makanan berbasis ayam seiring dengan pulihnya pariwisata DIY pasca pandemi. Data produksi daging unggas secara rinci dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 72 Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2024 (dalam ton)

3. Distribusi Pangan

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI)/Pasar Mitra Tani (PMT) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di DIY dilakukan melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan gelar pangan murah. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 164 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

Terkait dengan aspek kerawanan pangan, peta komposit *Food Security and Vulnerability* Atlas (FSVA) tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan jumlah kapanewon yang masuk ke dalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3) Dimana pada tahun 2024 sudah tidak ada kapanewon yang masuk prioritas 3. Di sisi lain, terdapat penurunan kapanewon yang masuk dalam kategori aman (Prioritas 6) yang semula 41 di tahun 2023 menjadi 31 di tahun 2024. Perkembangan hasil komposit FSVA tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2- 71 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2024

Prioritas	Jumlah Kapanewon					Persentase				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Prioritas 1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritas 2	0	1	1	0	0	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
Prioritas 3	1	4	3	3	0	1,28	5,13	3,85	3,85	0,00
Prioritas 4	17	16	5	12	11	21,79	20,51	6,41	15,38	14,10
Prioritas 5	35	40	30	22	36	44,87	51,28	38,46	28,21	46,16
Prioritas 6	25	17	39	41	31	32,05	21,79	50,00	52,56	39,74

Sumber: DPKP DIY, 2025

4. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Konsumsi energi kelompok padi–padian tahun 2024 sebesar 97,45 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 101 kg/kap/tahun. Konsumsi kelompok energi pangan hewani pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Pada kelompok ini, konsumsi daging ruminasia dan telur mengalami penurunan dibanding tahun 2023 namun pada konsumsi daging unggas yang mengalami kenaikan yaitu 13,33 kg/kap/tahun pada tahun 2024 yang sebelumnya di tahun 2023 hanya mencapai 11,20 kg/kap/tahun. Sedangkan pada keolompok susu dan ikan sedikit mengalami kenaikan konsumsi energi di tahun 2024 yaitu masing-masing 3,48 kg/kap/tahun dan 11,70 kg/kap/tahun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 72 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2020-2024

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Padi-padian	102,40	100,90	98,40	101	97,45
a. Beras	82,20	81,40	80,60	81	79
b. Jagung	1,40	0,70	0,70	0,70	0,84
c. Terigu	18,80	18,80	17,10	19,30	17,61
II. Umbi-umbian	12,90	16,70	15,49	15,10	13,54
a. Singkong	8,30	11,40	10,90	10,70	9,83
b. Ubi jalar	1,90	2,40	2,20	2,10	1,66
c. Kentang	2,70	2,90	3,20	2,30	2,05
III. Pangan Hewani	42,00	39,98	40,68	40	39,95
a. Daging ruminansia	6,90	5,50	5,48	5,8	3,13
b. Daging unggas	11,00	10,80	10,81	11,20	13,33
c. Telur	7,90	8,50	8,51	8,40	8,31
d. Susu	3,70	3,50	3,48	3,40	3,48
e. Ikan	12,50	12,40	12,40	11,20	11,70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu mengandung bahan berbahaya (cemaran kimia), cemaran mikroba (cemaran biologis) serta benda-benda yang tidak diperbolehkan dalam pangan (cemaran fisik). Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif berdasarkan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi.

Adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendukung terjaganya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat DIY melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pada tahun 2023 telah dilakukan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 58 produk PSAT berupa sayur dan beras curah yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% PSAT yang menjadi sampel, aman untuk dikonsumsi.

Khusus untuk pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKP-D DIY telah menerbitkan 28 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT dan 4 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *Surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/*register* dengan hasil semuanya dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

2.2.2.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, denganberlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti *magersari, ngindung, anganggo turun-temurun*, dan *hanggayuh* (atau *anggadhuh*) melalui *serat kekancingan*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang- undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan:

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU Nomor 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY Nomor 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Dalam rangka menjalankan urusan pertanahan Pemda DIY telah melakukan penerbitan IPL sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah. Izin penggunaan lokasi (IPL) yang telah diterbitkan dari tahun 2015-2024 sebanyak 28 SK IPL.

Pada tahun 2022 telah terbit Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta acuan dalam penyesuaian sertifikat pada tanah kalurahan.

Capaian sasaran pemda bidang pertanahan diukur berdasarkan indikator bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Pada tahun 2024 capaian sebesar 27.050 bidang didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.837 bidang Tanah SG/ PAG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 8.405 bidang. Pada tahun 2023 realisasi pendaftaran mengalami kenaikan dari 22.242 bidang menjadi 25.993 bidang tanah terdiri dari pendaftaran tanah SG/PAG sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang. Sampai dengan tahun 2024, realisasi pendaftaran sertifikasi tanah SG/PAG sebanyak 14.100 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.950 terdiri dari pendaftaran Tanah Desa untuk pertama kali sebanyak 3.232 bidang dan pendaftaran perubahan pencatatan sertifikat tanah kalurahan sebanyak 9.718 bidang, sehingga jumlah keseluruhan pendaftaran adalah 27.050 bidang. Capaian indikator tersebut dari tahun 2019 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 73 Capaian Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2019-2024

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa							
	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	*Bidang*	*10.279*	*12.437*	*15.335*	*22.242*	*25.993*	*27.050*

Sumber: DPTR DIY, 2024

Capaian program pemda fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa dari tahun 2019-2024 mengalami peningkatan. Capaian ini diukur melalui indikator persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Pada tahun 2022 capaian sebesar 98,12% dari target tahun 2022 sebesar 88,67%. Capaian ini didukung melalui realisasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten (bobot 60%) yaitu sebesar 50,05% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah, pemeliharaan dokumen dan pengawasan ditambah realisasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (bobot 40%) sebesar 24,06% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah desa, penetapan peraturan desa dan pengajuan kekancingan. Pada tahun 2023 program pemda terkait urusan pertanahan menjadi program keterpaduan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perwujudan pola ruang dengan indikator capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa. Capaian pada tahun 2023 sebesar 21,89% dari target di tahun 2023 sebesar 20,94%. Capaian ini diperoleh melalui perhitungan rerata dari persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa ditambah dengan persentase kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Capaian pendaftaran sertifikat bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa tahun 2023 sebesar 25.993 bidang tanah terdiri dari pendaftaran tanah SG/PAG sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang. Sementara itu kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa sampai dengan akhir tahun 2023 dicapai berdasarkan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan yaitu rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa sebanyak 2.007 rekomendasi dan kesesuaian pemanfaaan tanah desa sebanyak 165 rekomendasi.

Pada tahun 2024, capaian terhadap program keterpaduan perwujudan polar ruang dengan indikator capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Desa telah melampui dari target yang ditetapkan sebesar 24,22% telah tercapai sebesar 29,60% dengan prosentase 122,23%. Realisasi ini didapatkan dari hasil rerata perhitungan persentase pendaftaran sertipikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (42,59%) dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tanah SG/PAG dan Tanah Desa (16,62%). Sehingga dari kedua indikator perhitungan tersebut didapatkan hasil rerata sejumlah 29,60% sampai denga akhir tahun 2024.

Tabel 2- 74 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (RPJMD 2017-2022) dan Capaian Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang melalui indikator Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (RPJMD 2022 -2027)

No	Program/ Indikator	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa								
	Persentase tertib administrasi	%	31,57	46,51	61,25	74,11	98,12	n/a	n/a

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program/ Indikator	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa								
2	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang								
	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21,98	29,60

Sumber: DPTR DIY, 2025

Pemenuhan alas hak terkait tanah/sertifikasi juga dilakukan pada tanah dengan status tertentu untuk dukungan penanganan reforma agraria, seperti adanya tanah tutupan, tanah *enclave* dan tanah yang diperoleh dari proses tukar menukar dengan tanah kas desa. Tanah dengan status tertentu sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan legalisasi atau diberikan alas hak yang mengakibatkan pemanfaatan tanah belum dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun 2024 objek reforma agraria yang ditangani di DIY yaitu penanganan tanah tutupan dan penanganan tanah *enclave*. Progress penanganan tanah tutupan sudah dalam tahap konsolidasi lahan dan telah dilakukan pemasangan patok oleh BPN. Proses konsolidasi tanah dilakukan terhadap 960 bidang tanah milik warga (berdasarkan hasil perincian terbaru), sedangkan untuk tanah dengan status tanah kasultanan tidak diikutkan dalam proses ini. Dari total 960 bidang tanah baru sebanyak 800 bidang tanah yang telah dilakukan proses sertifikasi. Berikut adalah rincian Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY seluas 1.265.162 m2 dan terletak di wilayah Kabupaten Bantul danKulon Progo.

Tabel 2- 75 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon/ Kalurahan	Persil	Luas	Keterangan
1	Bantul	Kap. Kretek Kal. Parangtritis	258 Persil	1.080.840,00	Terletak di eks Padukuhan Son dan Grogol
		Kap. Sanden Kal. Gadingharjo	21 Persil	80.207,00	Terletak di Padukuhan Karanganyar
2	Kulon Progo	Kap. Kokap Kal. Hargomulyo	1 Persil	104.115,00	Terletak di Padukuhan Tapen, Grindang dan Tlogolelo
		Total		**1.265.162,00**	

Sumber : DPTR, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Terkait penanganan tanah *enclave* telah dilakukan penyepakatan yang tertuang melalui Berita Acara Kesephaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada bulan September 2024, dengan hasil bahwa terhadap bidang tanah yang tidak memiliki bukti alas hak yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, Badan Hukum dan institusi pemerintah (Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah DIY, maupun Pemerintah Pusat) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan turunannya. Tanah *enclave* berada di 20 kalurahan, dimana terhadap tanah *enclave* harus dilakukan proses IP4T terlebih dahulu dan perlu disusun masterplan perencanaan kawasan pada 20 kalurahan tersebut sebelum terbitnya sertifikat hak pengelolaan lahan pemda. Berikut adalah Inventarisasi Tanah *Enclave* di DIY yang terdiri atas Tanah *Enclave* Kasunan di Kabupaten Bantul dengan luas 87.091.776 m2 dan Tanah *Enclave* Mangkunegaran di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 58.983.659 m2.

Tabel 2- 76 Inventarisasi Tanah *Enclave* di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (m2)
Tanah *Enclave* Kasunanan				
1	Bantul	Imogiri	Karangtengah, Kebonagung, Girirejo, Karangtalun, Mangunan, Imogiri	21.909.603
		Dlingo	Temuwuh, Jatimulyo, Muntuk, Dlingo, Terong	48.308.074
		Pleret	Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran	14.890.068
		Banguntapan	Singosaren, Jagalan	1.007.301
		Total		87.091.776
Tanah *Enclave* Mangkunegaran				
2	Gunungkidul	Gedang Sari	Tegalrejo	10.086.716
		Ngawen	Beli, Jurangjero, Kampung, Sambirejo, Tancep. Watu Sigar	48.896.943
		Total		58.983.659
Tanah *enclave* Kasunanan + Tanah *enclave* Mangkunegaran				94.725.707

Sumber : DPTR, 2023

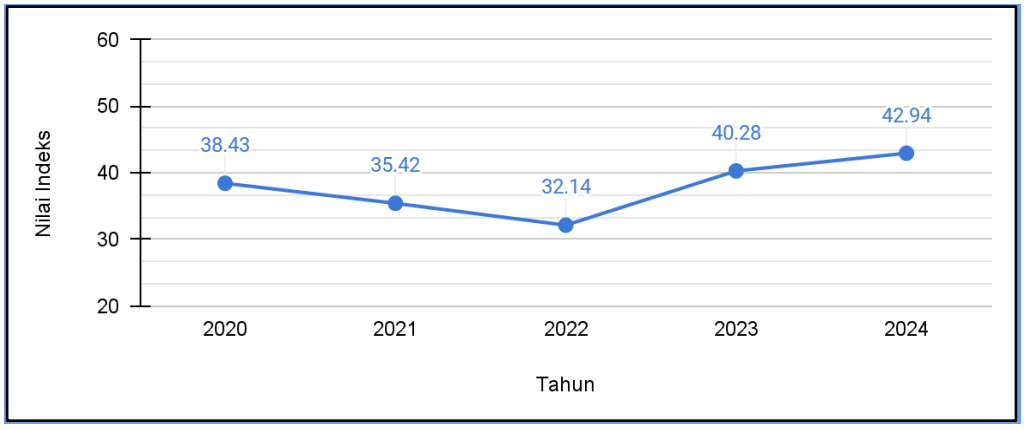
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Kualitas Air Sungai

Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup di bumi. Air yang bersih, sehat dan aman penting untuk kelangsungan hidup manusia yang lebih baik. Kondisi kualitas air direpresentasikan dengan perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA). IKA merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air berupa nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA DIY dihasilkan dari pemantauan kondisi kualitas air sungai yang telah mengalami pencemaran atau belum dan menjadi salah satu upaya didalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pengendalian pencemaran air sungai.

Sampai dengan tahun 2024, IKA dihasilkan berdasarkan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik setiap tahun, yaitu pada Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum yang menjadi salah satu langkah dalam upaya penentuan kebijakan program dan kegiatan dalam pengendalian pencemaran air sungai. Sedangkan mulai tahun 2024, terdapat perubahan metode perhitungan indeks dimana IKA merupakan agregasi IKA hasil pemantauan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan periode 2018-2024. Berikut Gambaran kondisi IKA DIY tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: Sumber : Dataku Bapperida DIY, 2025

Gambar 2- 73 Indeks Kualitas Air DIY Tahun 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan grafik IKA sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tren IKA mengalami kenaikan sebesar 4,51 poin dari semula 38,43 di tahun 2020 menjadi 40,94 di tahun 2024.

Kondisi IKA sangat dipengaruhi oleh kondisi tingkat pencemaran sungai yang dinilai melalui indeks pencemar. Identifikasi yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi IKA DIY antara lain :

a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tanggamaupun peternakan dan UMKM.
b. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar.
c. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
e. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
f. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan kualitas air, Pemerintah DIY melaksanakan program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pecinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

2. Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota dengan total 472 sampel. Lokasi- lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY. Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit.

Salah satu dampak pencemaran air tanah terhadap manusia adalah penyakit diare. Berdasarkan data IKPLHD tahun 2024 tercatat ada 19.668 penderita penyakit diare di DIY. Berdasarkan urutan 10 penyakit yang paling banyak di DIY, diare menjadi penyakit di urutan keempat sehingga dampak dari pencemaran air tanah serta penurunan kualitas air tanah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian.

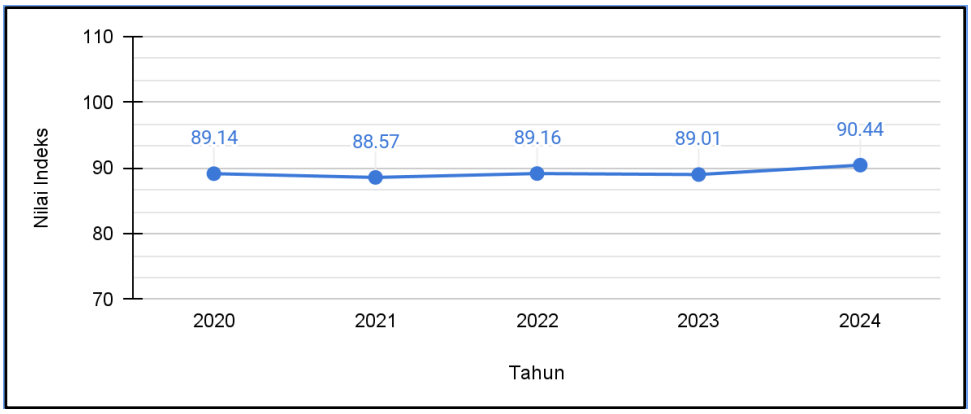
Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah antara lain:

- Perubahan penggunaan lahan yang belum sesuai tata ruang, sehingga resapan air tanah berkurang karena semakin banyaknya lahan terbangun yang menghalangi infiltrasi air bukan ke dalam tanah.
- Pengelolaan jamban terpadu yang belum optimal, khususnya bagi keluarga yang memiliki jarak jamban dengan sumur yang masih di bawah 10 meter. Selain itu beberapa IPAL komunal yang dibangun pemerintah, kurang dalam pemeliharaannya, sehingga menjadi jenuh dan justru IPAL komunal ini menjadi sumber pencemaran air yang baru.
- Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa di DIY yang masih menggunakan air tanah untuk keperluan operasional sehari-hari tanpa didukung penggunaan teknologi hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air tanah secara berlebih.
- Kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan masih melakukan pembuangan limbah domestik sembarangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kualitas Udara

Sebagaimana halnya indeks kualitas air, kualitas udara dinyatakan dalam bentuk nilai indeks kualitas udara (IKU). Pemantauan udara di DIY pada tahun 2021 tidak lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melainkan oleh Pemerintah Pusat dengan metode Manual Passive. Lokasi pemantauan udara meliputi perwakilan daerah padat transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berdasarkan kondisinya, indeks kualitas udara DIY periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana grafik berikut :



Sumber: DLHK DIY, 2024

Gambar 2- 74 Kondisi Indeks Kualitas Udara DIY Tahun 2018-2024

Berdasarkan grafik IKU sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tren IKU mengalami peningkatan sebesar 1,30 poin dari semua 89,14 di tahun 2020 menjadi 90,44 di tahun 2024. Grafik tersebut juga menunjukan bahwa meskipun di tahun 2023 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi di tahun 2024 realisasinya sebesar 90,44 atau sebesar 100,78% dari target sebesar 89,74 yang tercantum dallam RPJMD DIY 2022-2027.

Pemda DIY tetap melakukan upaya seperti pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja. Operasional bus Trans Jogja juga sebagai upaya agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti *car free day* setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara di DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan status hutan, luas hutan DIY mencapai 84.921,65 ha yang terdiri atas hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah seluas 19.036,42 ha dan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) dengan luasan mencapai 65.886,56 ha. Data luasan hutan DIY berdasarkan status dan fungsi hutan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 77 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan

No	Status/Fungsi	Luas (ha)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Berdasarkan status hutan						
1	Hutan Negara	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.035,09	19.035,09	19.036,42
2	Hutan rakyat	78.400,27	79.262,58	79.262,58	65.886,56	65.886,56	65.886,56
	Total	97.436,69	98.299,00	98.299,00	84.921,65	84.921,65	84.922,98
B	Berdasarkan fungsi hutan						
1	Hutan konservasi	3.455,42	3.455,42	3.455,42	3.454,09	3.454,09	3.455,42
2	Hutan lindung	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.159,70
3	Hutan produksi	13.421	13.421	13.421	13.421	13.421	13.421,30

Sumber : Dataku Bapperida DIY, 2025

Berdasarkan kondisinya, masih terdapat lahan kritis baik diluar maupun didalam kawasan hutan yang memerlukan penanganan. Luas lahan kritis secara nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana surat keputusan tentang penetapan lahan kritis nasional terakhir ditetapkan tahun 2018 dengan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Berdasarkan surat keputusan tersebut, luas lahan kritis di DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha. Sampai dengan tahun 2023, DIY telah melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik melalui sumber dana APBD/APBN maupun swasta yang dilakukan oleh DIY periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 78 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2024

No	Tahun Pelaksanaan RHL	Luas (ha)	% rehabilitasi lahan kritis
1	2018	311,04	0,39
2	2019	1.099,00	1,39
3	2020	985,42	1,25
4	2021	922,22	1,17
5	2022	1.162,50	1,47
6	2023	683,00	0,86
7	2024	1.257,42	3,50

Sumber : DLHK DIY, 2024

Berdasarkan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai IKTL, kondisi tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap nilai IKTL sebagai komponen nilai IKLH. Kualitas lahan dinilai melalui perhitungan IKTL dimana nilai IKTL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Untuk menghitung IKTL, diperlukan data luas tutupan lahan (LTL) yang dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen),
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati,
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

2.2.2.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektorlain seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan satu kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Implementasi sistem administrasi kependudukan secara terpadu dimulai dari pembangunan*, updating data* dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kepemilikian KTP di DIY secara lebih luas untuk mendukung kontestasi Pemilu tahun 2024. Salah satunya adalah kegiatan jemput bola perekaman KTP-el yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas di DIY baik negeri, swasta, maupun kejuruan yang bekerja sama sengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Tabel 2- 79 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2017 - 2024 (Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50%
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21%
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31%
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69%
2021	3.677.446	2.827.301	2.812.568	99,48%
2022	3.693.834	2.841.337	2.833.136	99,71%
2023	3.722.296	2.891.488	2.874.185	99,40%
2024	3.731.047	2.914.157	2.900.053	99,51%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY, 2024 dan Dataku Bapperida DIY, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebanyak 3.731.047 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.914.157 penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP. Hingga tahun 2024, sebanyak 2.900.053 penduduk wajib KTP telah melakukan perekaman data, sehingga persentase angka perekaman KTP-el mencapai 99,51%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih ada dinamika kependudukan yang mempengaruhi proses perekaman. Di sisi lain, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY juga telah mencapai angka 99,41%. Dari total 875.730 anak (penduduk berusia di bawah 18 tahun), sebanyak 870.537 anak sudah memiliki akta kelahiran, sementara sekitar 0,59% anak belum terdata memiliki akta tersebut.

Tabel 2- 80 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%
2022	895.931	880.552	98,28%
2023	882.780	875.780	99,21%
2024*	875.730	870.537	99,41%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2024

Selanjutnya, tiap anak usia 0-17 tahun kurang satu hari juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah 818.731. Sampai dengan Desember 2023 terdapat 697.070 anak atau 85,14% yang telah memiliki KIA. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Selain itu, dengan memiliki KIA, anak mendapatkan keuntungan berupa insentif maupun potongan harga pada beberapa instansi/lembaga/badan usaha yang bekerja sama dengan Pemda DIY.

Tabel 2- 81 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2017	136.885	851.071	16,08%
2018	319.279	852.858	37,44%
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2022	671.513	848.773	79,12%
2023	697.070	818.731	85,14%
2024*	712.429	814.640	87,45%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 814.640. Tercatat hingga September 2024, terdapat 712.429 anak atau 87,45% yang telah memiliki KIA dari total wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

2.2.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel 2- 82 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2020-2024

Tahun	Status IDM				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109
IDM 2022	0	0	11	197	184
IDM 2023	0	0	0	136	256
IDM 2024	0	0	0	37	355

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

Berdasarkan penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, seluruh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Desa/Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai status maju dan mandiri. Dari total 392 Desa/Kalurahan yang ada, tidak satu pun yang masuk dalam kategori berkembang maupun tertinggal. Capaian ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai lembaga pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Namun demikian, mulai tahun 2025 Indeks Desa akan menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa di Indonesia menggantikan IDM. Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam dimensi tersebut menjadi mata rantai yang saling memperkuat keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa, 6 dimensi dibentuk oleh 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengukuran Indeks Desa akan menghasilkan penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa. Indeks Desa diharapkan menjadi acuan utama penetapan target pembangunan desa dalam dokumen perencanaan nasional, daerah, hingga desa mulai dari RPJPN 2025-2045, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD hingga RKPDes; pengalokasian Dana Desa; maupun penyusunan kebijakan pembangunan desa lainnya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel 2- 83 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	Jumlah
1	Kab. Bantul	75	-	75
2	Kota Yogyakarta	-	46	46
3	Kab. Kulon Progo	87	-	87
4	Kab. Gunungkidul	144	-	144
5	Kab. Sleman	86	-	86
	Total	**392**	**46**	**438**

Sumber : Dataku Bapperida DIY, 2025

2. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel 2- 84 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	2020			2021			2022			2023			2024		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	827	86,14	959	698	72,8	959	951	99,17	957	957	100	957	957	100
Bantul	1.139	912	80,07	1.016	754	74,2	1.148	1.125	98	1.144	1.138	99,47	1.143	1.143	100
Gunungkidul	1.469	1.345	91,55	1.470	1.374	93,5	1.470	1.469	99,93	1.469	1.469	100	1.466	1.466	100
Sleman	418	158	37.79	1.534	1.035	67,5	1.535	1.443	94,01	1.468	1.401	95,43	1.534	1.531	99,8
Kota Yogyakarta	623	393	63,08	623	445	71,4	623	594	95,35	622	622	100	622	622	100
DIY	4.609	3.635	78,86	5.602	4.306	76,9	5.735	5.582	97,33	5.733	5.660	98,73	5.722	5.719	99,94

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Jumlah Posyandu yang aktif tercatat meningkat dari 5.660 di tahun 2023, menjadi 5.660 di tahun 2023. Hampir seluruh wilayah di DIY berhasil mendorong Posyandu untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 100% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2024. Pada tahun 2024 diketahui masih terdapat 3 posyandu tidak aktif di Kabupaten Sleman. Meski demikian, angka ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 85 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2019-2024

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantul	75	50	68	68	72	75	75
2	Kulon Progo	87	87	87	87	87	87	87
3	Gunungkidul	144	119	133	133	144	144	144
4	Sleman	86	50	55	61	63	72	72
	Jumlah	**392**	**306**	**343**	**349**	**366**	**378**	**378**

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

4. Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan entry profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian lomba kalurahan sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar. Hingga tahun 2024, diketahui seluruh Kalurahan/Kelurahan di DIY sejumlah 438 telah memiliki profil desa. Jumlah tersebut secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2- 86 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa

No	Kabupaten/Kota	Kalurahan/ Kelurahan	Kalurahan/Kelurahan yang Telah Mempunyai Profil					%
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	45	100,00
Jumlah		438	438	438	438	438	438	100,00

Sumber:Dataku Bappeda DIY, 2024

5. Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2- 87 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2024

No	Kab/Kota	Sumber Dana				
		Pemda DIY	Kab/Kota	APBDes/Kal	Swadaya Masyarakat	Lain-lain
1	Kulon Progo	300.000.000	730.000.000	44.142.000	383.168.000	-
2	Bantul	325.000.000	1.600.000.000	230.450.000	100.000.000	-
3	Gunungkidul	300.000.000	900.000.000	-	67.000.000	-
4	Sleman	300.000.000	1.500.000.000	-	110.000.000	-
5	Yogyakarta	325.000.000	1.799.649.450	-	-	750.000.000
Total	**9.764.409.450**	**1.550.000.000**	**6.529.649.450**	**274.592.000**	**660.168.000**	**750.000.000**

Sumber: TMMD, 2025

Berdasarkan data tersebut, kegiatan yang sumber dana berasal dari swadaya masyarakat mencapai 6,76%. Dana swadaya masyarakat terbesar diketahui ada di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp383.168.000,00, sedangkan yang terkecil ada di Kabupaten Gunungkidul yakni Rp67.000.000,00. Sementara itu, di Kota Yogyakarta diketahui tidak terdapat kegiatan yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

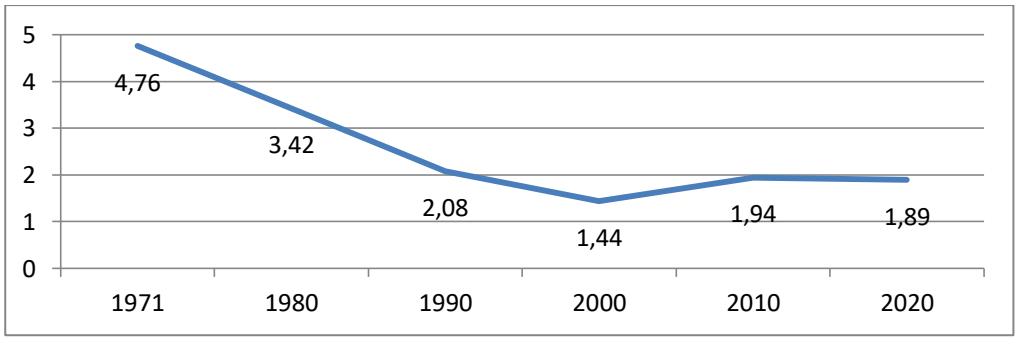
2.2.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pembahasan mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang perlu ditinjau dalam rangka memastikan penduduk tumbuh seimbang, yaitu Angka Fertilitas dan Angka Ketergantungan Penduduk. Sementara itu, pembahasaan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni Penggunaan Kontrasepsi Modern, Median Usia Kawin Pertama Perempuan, dan *Unmet Need.*

1. Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate (TFR)*

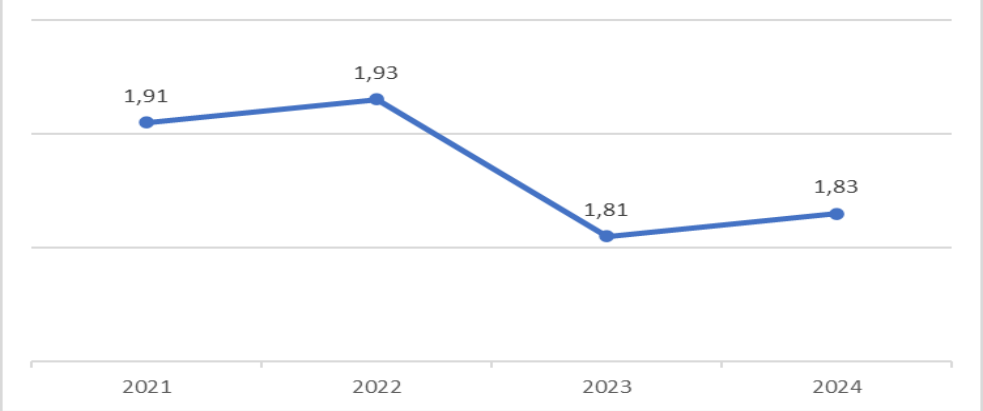
Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.Hasil Sensus Penduduk dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa TFR DIY menurun secara konsisten sejak tahun 1971 hingga tahun 2020 yaitu dari TFR 4,76 di tahun 1971 menjadi TFR 1,89 di tahun 2020. Kondisi seperti ini merupakan salah satu tanda bahwa pembangunan kependudukan di DIY sudah sejak lama memperhatikan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).



Sumber : Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

Gambar 2- 75 Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY Tahun 1971 – 2020 (10 tahunan)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber : BKKBN Provinsi DIY, Dataku BAPPERIDA DIY, 2025

Gambar 2- 76 Perkembangan (*Total Fertility Rate*) TFR di DIY Tahun 2021-2024

Selanjutnya, setelah tahun 2020 angka TFR DIY terdata stabil di angka 1,81-1,93. DataBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terakhir yakni tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai TFR DIY ada pada angka 1,81 atau lebih rendah 0,12 poin dari tahun sebelumnya.

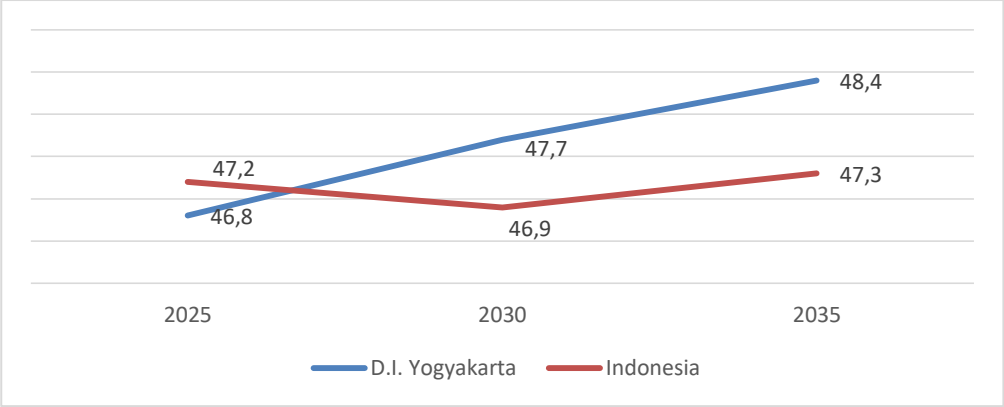
Kondisi TFR yang sudah di bawah poin 2,1 dan terus turunnya angka fertilitas ini berimplikasi pada komposisi penduduk DIY. Berdasarkan data proyeksi penduduk periode 2010-2035, penduduk yang belum produktif di DIY semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan proporsi usia penduduk ini akan berdampak peningkatan *Dependency Ratio* (beban ketergantungan) di tahun-tahun mendatang.

2. Angka Ketergantungan Penduduk atau *Dependency Ratio*

Angka Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Saat ini, DIY merupakan provinsi di Indonesia yang paling tinggi nilai ketergantungannya. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, nilai *Dependency Ratio* DIY tahun 2022 adalah 44,42%. Angka ini turun dari capaian tahun 2021 yang ada pada angka 45,52 dan capaian tahun 2020 yang ada pada angka 45,40. Namun, hasil Proyeksi Penduduk memperlihatkan bahwa *Dependency Ratio* DIY diperkirakan akan merambat naik di angka 46,8 pada tahun 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

hingga menyentuh angka 48,4 di tahun 2035. Pada angka tersebut, diestimasikan *Dependency Ratio* DIY lebih tinggi dari rata-rata nasional mulai tahun 2030 sampai tahun 2035.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2- 77 *Dependency Ratio* Menurut Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2025, 2030 dan 2035

Semakin tinggi *Dependency Ratio* maka semakin besar kondisi kependudukan akan menghambat pembangunan karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif. Tanggungan penduduk yang tinggi akan mempersulit mobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi lebih produktif. *Dependency Ratio* yang tinggi juga akan membawa tantangan pada penyediaan bahan makanan dan bahan baku lainnya yang berpotensi menurunkan Usia Harapan Hidup penduduk.

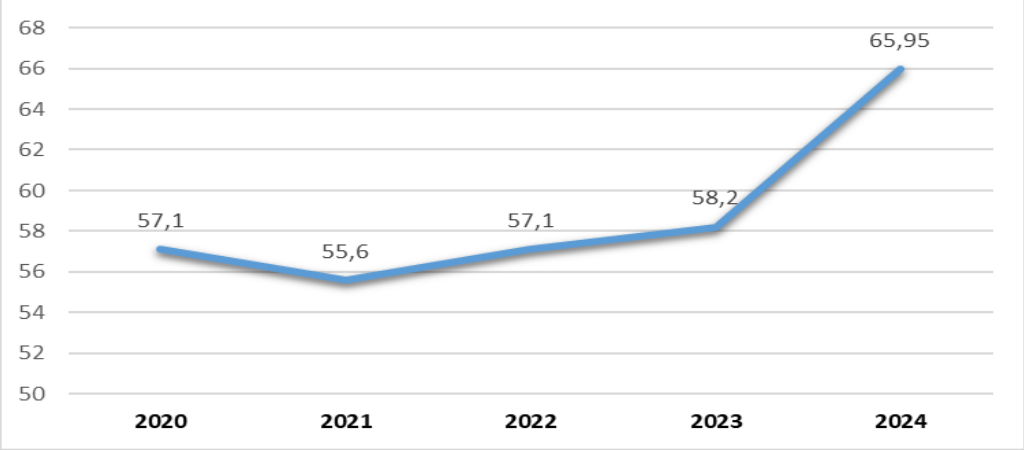
3. Modern Contraceptive Prevalence Rate

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per Km2 atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduktersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY menggencarkan berbagai upaya yang dapat menekan Laju Pertumbuhan Penduduk secara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

efektif. Salah satunya adalah dengan menggencarkan penggunaan alat kontrasepsi modern.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Dengan demikian kontrasepsi adalah pencegahan terjadinya konsepsi yang merupakan sebuah proses pertemuan sel telur dengan sperma sehingga terjadi kehamilan. Berdasarkan caranya, kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi sederhana dan kontrasepsi modern. Kontrasepsi sederhana terdiri dari kontrasepsi tanpa alat dan dengan alat/obat sederhana. Sedangkan kontrasepsi modern terdiri atas kontrasepsi hormonal, IUD, dan kontrasepsi mantap dengan tubektomi dan vasektomi.



Sumber: BKKBN Perwakilan DIY , 2024

Gambar 2- 78 *Modern Contraceptive Prevalence Rate* DIY Tahun 2020-2024

Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase dari populasi reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada suatu titik waktu tertentu. Penentuan MCPR penting untuk memahami seberapa efektif program kontrasepsi dalam mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk. Berdasarkan data di atas, masih terjadi fluktuasi pada kepesertaan kontrasepsi modern oleh masyarakat DIY. Angka terendah ada pada tahun 2021 yakni pada poin 55,6, dan kondisi terbaik ada pada tahun 2024 yaitu pada angka 65,95. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan MCPR di DIY adalah karena sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi saat ini lebih memilih untuk ber-KB dengan cara tradisional dengan pertimbangan untuk menghindari efek negatif dari obat atau alat KB terhadap tubuh.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, penggunaan kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kehamilan jika dibandingkan kontrasepsi sederhana. Oleh karena itu, menggalakan penggunaan kontrasepsi modern menjadi penting bagi pemerintah sebagaiupaya mencegah kondisi melambungnya angka kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat dan menjaga *Total Fertility Rate* ada pada angka ideal 2,1 sebagai upaya menjaga penduduk tumbuh seimbang.

4. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan Usia 25-49 Tahun

Usia kawin pertama (UKP) adalah usia pada saat seorang perempuan menikah pertama kali atau pada saat perempuan memulai kehidupan dengan pasangan yang pertama. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan mempengaruhi tingkat fertilitas dan fekunditas (potensi fisik untuk melahirkan anak). Semakin muda usia kawin pertama berarti masa reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan lebih panjang dibandingkan perempuan yang kawin di atas usia 20 tahun dan memberikan peluang lebih besar bagi wanita untuk memiliki anak lebih banyak. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

BKKBN menetapkan usia perkawinan yang ideal adalah usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki, karena diusia tersebut baik wanita dan laki-laki sama-sama sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup dalam hal kesehatan reproduksi dan emosional. Dalam masa reproduksi, usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Hal ini dikarenakan dalam usia 20 tahun atau kurang seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang dan rentan terhadap berbagai resiko kesehatan yang mungkin terjadi selama proses kehamilan dan kelahiran.

Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PPK-23) menunjukkan bahwa MUKP Perempuan di Indonesia adalah 22,3 tahun. Sementara, MUKP di DIY satu tahun lebih tinggi yaitu berada pada angka 23,50 tahun.

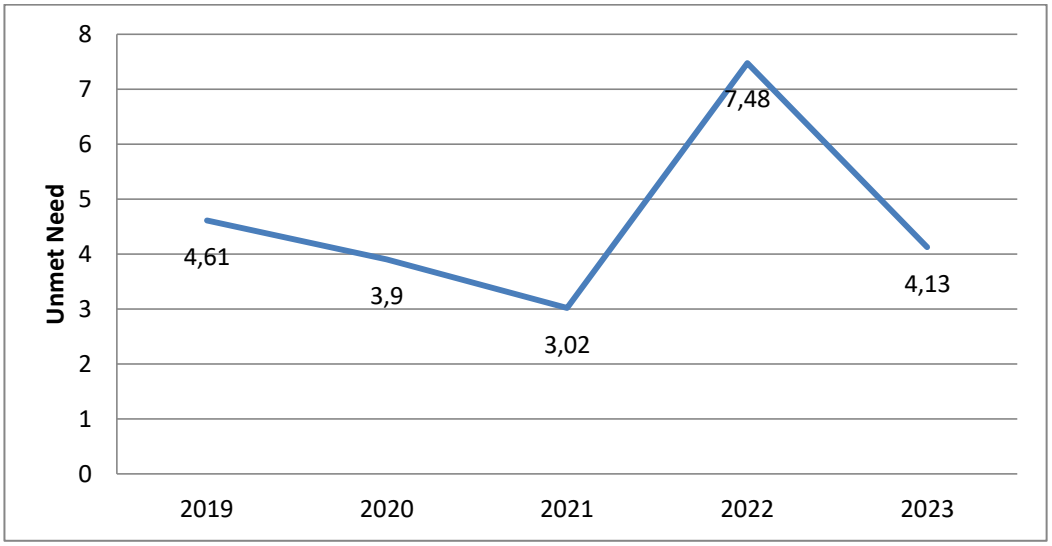
5. Unmet Need

Salah satu masalah dalam pengelolaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah masih tingginya angka *Unmet Need* KB. *Unmet need* ialah suatu kondisi ketika perempuan usia subur (PUS) membutuhkan program KB, namun tidak dapat melaksanakan KB karena beberapa alasan, mulai dari alasan kesehatan, ketidakcocokan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

hingga tidak didukung oleh suami dan keluarga. Angka *Unmet Need* memberikan gambaran seberapa baik sistem kesehatan dan kondisi sosial suatu daerah mendukung kemampuan perempuan untuk mewujudkan pilihan mereka untuk menunda atau membatasi kelahiran. *Unmet Need* ini merupakan ukuran yang bersifat inverse, dimana semakin rendah angka *Unmet Need* maka semakin baik kondisinya.

Pada tahun 2024 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan kembali berupaya menekan angka *Unmet Need* mengingat secara nasional masih banyak akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB selama pandemi Covid-19 belum terlayani hingga akhir 2023.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2- 79 *Unmet Need* DIY Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, kebutuhan ber-KB masyarakat DIY selama awal dan pertengahan pandemi Covid 19 cenderung masih dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada akhir masa pandemi yaitu tahun 2022, *Unmet Need* DIY mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mencapai angka 7,48.Meskipun demikian, *Unmet Need* DIY Kembali mengalami penurunan dengan memperoleh poin sebesar 4,13 pada tahun 2023.

Unmet need menjadi tantangan bagi program keluarga berencana (KB) karena ketikakondisi initerjadi, perempuan usia subur kemudian cenderung menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang sifatnya alami dan harus dilakukan berulang kali. Karena banyaknya factor yang mempengaruhi pelaknaan kontrasepsi alami, terdapat potensi perempuan tersebut berhenti berKB. Dengan demikian, kejadian *Unmet Need*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menyebabkan munculnya kehamilan yang tidak diinginkan yang pada gilirannya berimplikasi pada kondisi kesehatan bayi, serta meningkatkan *Total Fertility Rate* yang pada gilirannya akan berefek pada *Dependency Rate* (beban ketergantungan).

2.2.2.2.9 Urusan Perhubungan

Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor perhubungan yang berkelanjutan. Baik melalui investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta fasilitator utama bagi mobilitas masyarakat. Sektor perhubungan sebagai suatu sistem interkoneksi yang kompleks berperan vital dalam memfasilitasi mobilitas manusia dan barang baik dalam skala intra-regional maupun inter-regional. Efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi sangat bergantung pada penyelenggaraan layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga terintegrasi, responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022 – 2027, guna mendukung Visi Gubernur DIY Tahun 2022 – 2027 yakni Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dinas Perhubungan DIY telah menetapkan tujuan organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY Tahun 2022 – 2027 yakni Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Guna mewujudkan tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Sasaran Dinas Perhubungan DIYyang berkaitan langsung dengan Urusan Perhubungan meliputi:

1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum;
2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kedua indikator sasaran tersebut mencerminkan hal-hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di wilayah DIY, yakni Peningkatan Pelayanan Angkutan, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peningkatan Keselamatan Transportasi, Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor, Penggunaan Angkutan Ramah Lingkungan serta Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, mobilitas berkelanjutan direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan mobilitas berkelanjutan tidak dapat terlepas dari bagaimana pola perjalanan yang meliputi bangkitan dan tarikan perjalanan dapat terpotret secara holistik. Pola perjalanan ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana suplly dan demand transportasi dapat dipenuhi secara optimal. Baik pola perjalanan yang berbasis orang maupun barang.

Tabel 2- 88 Jumlah Bangkitan dan Tarikan Perjalanan di DIY

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
Kabupaten Kulon Progo			
1	Wates	33.961	49.676
2	Sentolo	37.562	30.779
3	Pengasih	33.620	29.157
4	Lendah	32.960	26.222
5	Panjatan	25.815	21.408
Kabupaten Bantul			
1	Kasihan	68.628	54.245
2	Banguntapan	68.121	51.843
3	Sewon	57.835	52.628
4	Bantul	39.131	60.472
5	Imogiri	37.676	30.763

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
Kabupaten Gunungkidul			
1	Wonosari	53.440	64.766
2	Playen	40.816	35.718
3	Ponjong	32.615	28.381
4	Semanu	32.092	27.382
5	Karangmojo	30.780	27.430
Kabupaten Sleman			
1	Depok	114.371	168.411
2	Mlati	77.381	78.533
3	Ngaglik	76.346	70.734
4	Gamping	76.057	63.162
5	Sleman	55.035	68.497
Kota Yogyakarta			
1	Umbulharjo	48.808	76.739
2	Gondokusuman	28.668	52.851
3	Jetis	17.677	40.186
4	Mergangsan	22.157	31.110
5	Mantrijeron	26.155	25.455

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah pergerakan terbesar berada di Kabupaten Sleman dengan zona berasal dari Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Sleman dan diikuti oleh Kota Yogyakarta.

Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan aksesibilitas terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya (angkutan pribadi maupun angkutan umum).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penyediaan prasarana/simpul transportasi di DIY terutama di wilayah perkotaan yogyakarta meliputi Terminal, *Park and Ride*, Stasiun Kereta Api, dan Bandar Udara.

a. Terminal

Di DIY terdapat 2 (dua) titik Terminal Tipe B, yaitu: Terminal Jombor yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dan Terminal Wates yang berlokasi di Wates, Kulon Progo.

b. *Park and Ride*

Sistem *Park and Ride* di DIY sebenarnya sudah diakomodasi di dalam titik-titik simpul *eksisting*, seperti di Bandara, Stasiun KA, dan Terminal Bus (khususnya di Terminal Tipe A, B dan sebagian Tipe C, karena sesuai dengan regulasi yang ada maka setiap titik-titik simpul tersebut harus menyediakan lahan parkir. Namun perlu dicatat bahwa wilayah DIY hanya memiliki 2 (dua) terminal Tipe A (yaitu Terminal Giwangan dan Terminal Dhaksinarga) dan 2 (dua) terminal Tipe B (yaitu Terminal Jombor dan Terminal Wates). Selain itu adalah terminal Tipe Cyang berada di tiap-tiap Kabupaten.

Secara titik lokasi di dalam wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta atau Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) lokasi-lokasi *Park and Ride* sebenarnya telah terimplementasi dalam bentuk simpul-simpul terminal bus, seperti Terminal Giwangan (di sisi selatan), Terminal Jombor dan Terminal Condongcatur (di sisi utara, Tipe C di Kabupaten Sleman), Terminal Prambanan (di sisi timur, Tipe C di Kabupaten Sleman), dan pada TKP (Tempat Khusus Parkir) Ngabean milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada dekat dengan pusat kota. Dari sisi pelayanan angkutan perkotaan, masyarakat pada titik-titik simpul tersebut juga telah dilayani dengan angkutan Bus Trans Jogja sejak tahun 2008. Selain *Park and Ride* yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di DIY, Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 telah menyediakan 4 (empat) fasilitas *Park and Ride* yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu:

1. *Park and Ride* Prambanan
2. *Park and Ride* Bandara Adi Sucipto
3. *Park and Ride* Dongkelan
4. *Park and Ride* Gamping

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Tempat Khusus Parkir (TKP)

Pemerintah Daerah DIY hingga tahun 2023 telah menyediakan 3 (tiga) tempat khusus parkir yaitu:

1. Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali (saat ini dikelola oleh pihak swasta);
2. Tempat khusus parkir Ketandan; dan
3. Tempat khusus parkir Beskalan.

d. Bandara

DIY memiliki 2 Bandara yaitu Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandar udara baru di Yogyakarta yang menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Per tanggal 29 Maret 2020. Terdapat beberapa antarmoda pendukung pada Bandar Udara International Yogyakarta, yaitu Damri, Satelqu, dan Kereta Api Bandara YIA.

e. Stasiun Kereta Api

Terdapat 3 stasiun yang melayani perjalanan melalui moda berbasis rel di DIY yaitu Stasiun Yogyakarta (YK) yang dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A, Stasiun Lempuyangan (LPN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B dan Stasiun Maguwo (MGW) yang merupakan stasiun kereta api bandara kelas II. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2023

A. Kinerja Lalu Lintas (V/C) Ratio di Jalan Provinsi

Degree of Saturation (*DS*) atau biasa disebut derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja lalu lintas yang sangat penting dikaji untuk mengetahui kemampuan dari suatu ruas dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Nilai *Degree of Saturation* (*DS*) atau derajat kejenuhan diperoleh dari hasil volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan atau disebut dengan (V/C) Ratio. Nilai derajat kejenuhan atau (V/C) Ratio maksimum yang masih diperbolehkan ialah DS ≤ 0,75 yang diartikan ruas jalan tersebut masih dapat melayani kendaraan yang lewat dengan baik, sedangkan apabila lebih dari itu maka jalan tersebut sudah tidak mampu melayani

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kendaraan yang lewat dan memerlukan alternatif penanganan. Nilai derajat kejenuhan pada ruas-ruas jalan provinsi di DIY disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 89 Tabel Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2021 dan 2024

No	Rerata Derajat Kejenuhan / V/C Ratio	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Rerata pada Ruas Jalan Provinsi	0,35	0,38	0,42	0,47

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Tabel 2- 90 Tabel Rincian Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2024

Nama Kab/Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of service
Wilayah Kab, Bantul											
	1	Yogyakarta Bakulan (Parangtritis) depan ISI	8,350	4000	1,00	0,91	0,88	2619	3203	0,82	D
	2	Yogyakarta - Barongan (Pasar Jejeran)	9,800	4000	0,91	0,82	0,93	1420	2776	0,51	A
	3	Barongan - Bibal	9,800	4000	0,69	0,88	1,00	1864	2429	0,77	C
	4	Sedayu - Pandak	15,200	4000	1,00	0,94	0,95	1490	3572	0,42	A
	5	Palbapang - Srandakan	10,400	4000	1,00	0,94	0,95	2723	3572	0,76	C
	6	Palbapang - Samas	12,000	4000	1,00	0,91	0,93	1423	3385	0,42	A
	7	Palbapang - Simpang Kweden	2,650	4000	0,91	0,91	0,93	1574	3081	0,51	A
	8	Bakulan - Barongan	3,175	4000	0,91	0,97	0,97	2195	3425	0,64	B
	9	Dawung - Makam Imogiri	1,600	4000	0,91	0,91	0,88	1718	2915	0,59	A
	10	Sampakan - Singosaren (Timur Sp, Kids Fun)	15,000	4000	0,69	0,97	0,93	2201	2490	0,88	D

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Kab/Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of service
	11	Imogiri - Dodokan	15,000	4000	0,91	0,88	0,97	1684	3107	0,54	A
	12	Patuk - terong	6,000	4000	0,91	0,88	0,93	1036	2979	0,35	A
	13	Terong - Dlingo	6,400	4000	0,69	0,88	0,97	1334	2356	0,57	A
	14	Siluk - Kretek	10,500	4000	0,69	0,97	0,97	430	2597	0,17	A
	15	Srandakan - Poncosari - Pandansimo	6,500	4000	0,69	0,88	0,99	1691	2405	0,70	B
	16	Poncosari - Kretek	12,880	4000	0,69	0,94	0,93	531	2413	0,22	A
	17	Gedongkuning - Wonocatur	1,200	3400	1,00	1,00	0,94	1085	3196	0,34	A
	18	Ngablak - Bawuran	1,030	4000	0,69	0,97	0,97	179	2597	0,07	A
	19	Yogyakarta - Dongkelan	0,200	2800	1,14	0,91	0,86	2436	2498	0,98	E
	20	Bantul - Pandak	5,000	4000	1,00	0,85	0,97	2857	3298	0,87	D
Wilayah Kab, Kulon Progo											
	1	Milir - Dayakan	3,600	4000	0,91	0,97	0,95	1812	3354	0,54	A
	2	Dayakan - Pengasih	0,860	4000	0,69	0,97	0,95	1732	2543	0,68	B
	3	Sentolo - Pengasih	8,210	4000	0,91	0,91	0,93	2013	3081	0,65	B
	4	Pengasih - Sermo	5,600	4000	0,91	0,91	0,97	1101	3213	0,34	A
	5	Sermo - Klepu	2,270	4000	0,69	0,88	0,93	537	2259	0,24	A
	6	Kebonagung 1 - Nanggulan	0,800	4000	0,91	0,91	0,93	1154	3081	0,37	A
	7	Nanggulan - Tegalsari	11,750	4000	0,69	0,91	0,93	1839	2336	0,79	C
	8	Tegalsari - Klepu	19,950	4000	0,69	0,91	0,93	265	2336	0,11	A
	9	Klepu - Siluwok	8,160	4000	0,69	0,94	0,88	1029	2283	0,45	A
	10	Kebonagung 2 - Dekso	0,850	4000	0,91	0,91	0,93	1225	3081	0,40	A
	11	Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	17,690	4000	0,91	0,97	0,93	1617	3284	0,49	A
	12	Sentolo - Nanggulan	9,750	4000	0,91	0,94	0,88	2055	3011	0,68	B

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Kab/Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of service
	13	Nanggulan - Dekso	5,370	4000	0,91	0,97	0,93	1580	3284	0,48	A
	14	Dekso - Klangon	11,380	4000	1,00	0,88	0,93	1858	3274	0,57	A
	15	Sentolo - Brosot	16,850	4000	0,69	0,97	0,93	1395	2490	0,56	A
	16	Brosot - Toyan	15,000	4000	0,91	0,91	0,93	1523	3081	0,49	A
	17	Karangnongko - Nagung	3,450	4000	0,91	0,97	0,93	1490	3284	0,45	A
	18	Nagung - Cicikan	4,800	4000	0,69	0,91	0,93	1655	2336	0,71	C
	19	Demen - Glagah	2,650	4000	0,91	0,94	0,97	336	3319	0,10	A
	20	Ngremang - Brosot	4,850	4000	0,91	0,91	0,93	840	3081	0,27	A
	21	Sindutan - Congot	0,600	4000	0,91	0,97	0,93	1414	3284	0,43	A
Wilayah Kab, Gunungkidul											
	1	Gading - Playen	2,830	4000	1,00	0,94	0,94	1398	3534	0,40	A
	2	Playen - Gledag	3,990	4000	0,91	0,97	0,97	1916	3425	0,56	A
	3	Playen - Paliyan	8,920	4000	0,91	0,91	1,00	1500	3312	0,45	A
	4	Paliyan - Saptosari	5,300	4000	0,91	0,91	1,00	1819	3312	0,55	A
	5	Legundi - Panggang	3,000	4000	0,69	0,85	0,99	1133	2323	0,49	A
	6	Bibal - Panggang	5,800	4000	0,69	0,85	0,97	1350	2276	0,59	A
	7	Panggang - Girijati	11,325	4000	0,91	0,85	0,97	764	3001	0,25	A
	8	Dodogan - Playen	7,510	4000	0,91	0,88	0,93	951	2979	0,32	A
	9	Wonosari - Mulo	5,900	4000	1,00	0,91	0,95	2650	3458	0,77	C
	10	Mulo – Tepus	15,520	4000	0,69	0,91	0,95	1121	2386	0,47	A
	11	Mulo - Baron	14,290	4000	0,69	0,94	0,97	1024	2517	0,41	A
	12	Wonosari - Karangmojo	7,000	4000	0,91	0,94	0,95	2027	3251	0,62	B
	13	Karangmojo - Semin	14,030	4000	1,00	0,88	0,95	1493	3344	0,45	A

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Kab/Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of service
	14	Karangmojo - Ponjong	5,000	4000	0,69	0,94	0,93	665	2413	0,28	A
	15	Ponjong - Tambakromo	9,500	4000	0,69	0,94	0,93	653	2413	0,27	A
	16	Semin - Bulu	8,410	4000	0,69	0,97	0,97	1503	2597	0,58	A
	17	Semin - Blimbing	5,680	4000	0,91	0,94	0,97	363	3319	0,11	A
	18	Pandaan - Candirejo	3,470	4000	0,91	0,97	0,97	644	3425	0,19	A
	19	Wonosari - Nglipar	7,690	4000	0,69	0,91	0,93	1264	2336	0,54	A
	20	Sambipitu - Nglipar	10,300	4000	0,69	0,88	1,00	956	2429	0,39	A
	21	Nglipar - Semin	19,400	4000	0,69	0,97	0,93	1298	2490	0,52	A
	22	Ngalang - Hargomulyo	7,700	4000	0,69	0,82	0,93	1133	2105	0,54	A
	23	Hargomulyo - Watugajah	3,700	4000	0,69	0,85	0,95	308	2229	0,14	A
	24	Jepitu - Wediombo	5,700	4000	0,69	0,94	0,91	414	2361	0,18	A
	25	Jerukwudel - Sadeng	7,900	4000	0,69	0,94	0,99	413	2568	0,16	A
	26	Ngelo - Pantai Siung	5,850	4000	0,69	0,94	0,99	407	2568	0,16	A
	27	Batas Bantul - Girijati	2,510	4000	0,69	0,94	0,97	398	2517	0,16	A
	28	Baron - Pulang Sawal	10,300	4000	0,69	0,97	0,99	456	2650	0,17	A
	29	Bedoyo - Pracimatoro	1,900	4000	0,69	0,97	0,97	574	2597	0,22	A
	30	Rejosari - Baron	0,790	4000	0,91	0,97	0,99	322	3495	0,09	A
	31	Tepus - Kanigoro	2,200	4000	0,69	0,97	0,97	532	2597	0,20	A
	32	Gayamharjo - Tawang	1,800	4000	0,91	0,91	0,99	309	3279	0,09	A
	33	Tawang - Ngalang	9,600	4000	0,91	0,85	0,99	739	3063	0,24	A
	34	Ngalang - Gading	4,090	4000	0,91	0,97	0,97	463	3425	0,14	A

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Kab/Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of service
	35	Gading - Karangtengah	6,000	4000	0,91	0,85	0,99	471	3063	0,15	A
Wilayah Kab, Sleman											
	1	Yogyakarta - Pulowatu	10,748	2800	0,87	0,97	0,78	1822	1843	0,99	E
	2	Yogyakarta - Pakem	11,250	2800	1,00	0,97	0,78	2221	2118	1,05	F
	3	Pakem - Kaliurang	9,300	4000	1,15	0,88	0,88	1249	3562	0,35	A
	4	Yogyakarta - Demakijo	2,200					-	-	-	
	5	Prambanan - Piyungan	10,300	4000	0.91	0.97	0.88	1883	3107	0,61	B
	6	Klangon - Tempel (mang engking)	21,749	4000	0.69	0.97	0.93	1636	2490	0,66	B
	7	Jombor - Cebongan	4,480	2800	0.87	0.91	0.78	1461	1729	0,84	D
	8	Cebongan - Seyegan	3,000	2800	0.87	0.94	0.86	1731	1969	0,88	D
	9	Seyegan - Balangan	5,000	4000	0.91	0.97	0.88	1366	3107	0,44	A
	10	Balangan - Kebonagung 2	6,303	4000	0.69	0.97	0.97	1730	2597	0,67	B
	11	Tangisan - Blaburan	0,900	4000	0.69	0.97	0.97	1027	2597	0,40	A
	12	Denggung - Wonorejo	2,500	2800	1.00	0.97	0.86	1369	2336	0,59	A
	13	Wonorejo - Tambakan	2,000	2800	1.00	0.97	0.86	1122	2336	0,48	A
	14	Besi - Jangkang	3,700	4000	0.91	0.88	0.88	2233	2819	0,79	C
	15	Jangkang - Koroulon	2,300	4000	0.69	0.97	0.88	1612	2356	0,68	B
	16	Koroulon - Joholanang	1,900	4000	0.91	0.88	0.88	2066	2819	0,73	C
	17	Demakijo - Kebonagung	15,175					-	-	-	
	18	Prambanan - Gayamharjo	9,750					-	-	-	
J u m l a h (Rerata)										**0,47**	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan data V/C Ratio sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2024 dapat diperoleh hasil bahwa rata – rata kinerja lalu lintas di ruas jalan provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0,42 meningkat pada tahun 2024 sebesar 0,427

B. Kinerja Angkutan Umum

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang mengusung Layanan Angkutan umum yang berada di wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa jenis yang meliputi Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Selain layanan angkutan berbasis jalan terdapat juga layanan angkutan berbasis rel.

Layanan angkutan dalam trayek meliputi :

Angkutan Perkotaan Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan *Sistem Buy The Service*. Dimana pelaksanaan operasional Trans Jogja ditugaskan kepada PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI). Salah satu yang termuat dalam Peraturan Gubernur tersebut adalah penyediaan layanan angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan.

Pada tahun 2024, Angkuta Perkotaan Trans Jogja melayani 19 rute dengan total 95 unit armada bus siap operasi, sedangkan untuk program *Buy The Service* (BTS) yang diselenggarakan oleh Kementrian Perhubungan melayani 3 rute dengan 44 unit armada bus siap operasi. Total cakupan wilayah yang dilayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja adalah sebanyak 25 kecamatan.

Jumlah sirkulai penumpang Trans Jogja meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.519.410 penumpang. Jumlah sirkulasi penumpang merupakan jumlah total penumpang yang menggunakan Trans Jogja dalam periode satu tahun (termasuk didalamnya penumpang transit).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan menyusun aplikasi perhitungan jumlah penumpang yang melakukan transaksi pembayaran pada mesin tiket dan total pendapatan dari tiket, inovasi ini bermanfaat untuk pemantauan jumlah transaksi dan pendapatan secara real time. Dari aplikasi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penumpang yang melakukan pembayaran/transaksi sebesar 4.523.238 penumpang. Capaian jumlah tersebut melebihi target yang disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) tahun 2024 yaitu sebesar 4.300.000 penumpang.

Tabel 2- 91 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2024

No.	Tahun	Penumpang TerangkutTrans Jogja	
		penumpang/ hari	penumpang/ tahun
1.	2017	7.321	5.317.484
2.	2018	8.056	5.880.610
3.	2019	7.150	5.282.737
4.	2020	7.607	2.776.667
5.	2021	4.132	1.508.450
6.	2022	8.345	3.045.957
7.	2023	14.974	5.465.574
8.	2024	24.616	8.984.984

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Hingga tahun 2024 kondisi Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, (AKDP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga perusahaan otobus tidak dapat mengoperasionalkan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil Kajian Rencana Umum jaringan Trayek Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) di DIY pada tahun 2021, dari 14 Trayek yang terdaftar dalam Keputusan Gubernur No 78/KEP/ 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Provinsi dan Angkutan Perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat 6 trayek yangterlayani.

Tabel 2- 92 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2024

No	Kode	Trayek	Keterangan	Status
1	A01	Terminal Giwangan - Wonosari - Terminal Semin	AKDP	Terlayani
2	A02	Terminal Giwangan - Bandara YIA	AKDP	Terlayani
3	A03	Terminal Pakem - Bandara YIA	AKDP	Belum Terlayani
4	A04	Terminal Jombor - Bandara YIA	AKDP	Terlayani
5	A05	Park And Ride Gamping - Terminal Wates	AKDP	Belum Terlayani
6	B01	Terminal Prambanan - Piyungan - Terminal Giwangan	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
7	B02	Teminal Palbapang - Brosot - Terminal Wates	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
8	B03	Terminal Giwangan - Terminal Imogiri	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
9	B04	Park And Ride Ngabean - Terminal Kenteng	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
10	B05	Terminal Imogiri - Palbapang - Bandara YIA	Angkutan Perdesaan	Terlayani
11	B06	Terminal Giwangan - Terminal Parangtritis	Angkutan Perdesaan	Terlayani
12	B07	Terminal Jombor - Pasar Dekso	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
13	B08	Park And Ride Ngabean - Eks Stasiun Tempel	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
14	B09	Stasiun Tugu - Park And Ride Baron	Angkutan Perdesaan	Terlayani

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek meliputi :

Angkutan Sewa Khusus, Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menggunakan aplikasi berbasi teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Taksi, Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer. Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2023 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi.

Tabel 2- 93 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2019-2024

No	Jenis Angkutan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkutan AKDP	482	98	54	26	26	26
2	Taksi	505	503	503	115	126	129
3	Angkutan Perkotaan	184	149	172	172	172	172
4	Angkutan Sewa Khusus	0	0	0	55	52	54

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Layanan Angkutan berbasis Rel :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana induk Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017 – 2036, strategi pengembangan perkeretaapian khususnya di DIY berada pada pengembangan Jalur Utara – Selatan dan Timur – Barat. Perngembangan jaringan perkeretaapian meliputi jaringan kereta api penumpang dan Jaringan kereta Api barang.

Salah satu layanan angkutan umum berbasis rel saat ini adalah layanan kereta api jarak jauh, perkotaan dan Bandara. Layanan tersebut masuk dalam koridor Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan. Pada koridor tersebut terdapat Layanan angkutan kereta api perkotaan dengan relasi perjalanan Yogyakarta – Solo dan sebaliknya, untuk kereta api bandara relasi Stasiun Yogyakarta – Wates – Bandara Internasional Yogyakarta.

Angkutan Tradisional

Transportasi tradisional merupakan kegiatan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan secara tradisional, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), yang sangat berperan dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pembangunan secara menyeluruh. Transportasi tradisional juga sangat berkaitan dengan penggunaan lahan, baik di desa maupun kota. Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2016, Transportasi tradisional adalah sarana angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau ditarik oleh hewan yang oleh masyarakat masih diakui keberadaannya meliputi Becak dan Andong yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan hasil Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Penetapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional tahun 2022 serta adanya penambahan becak kayuh bertenaga alternatif pada tahun 2023 dan 2024 maka diperoleh data jumlah dan jenis transportasi tradisional di DIY sebagai berikut.

Tabel 2- 94 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Tahun 2024

Jenis Kendaraan	Jumlah
Becak Wisata	153
Becak Non Wisata	52
Andong	32
Total	237

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Kinerja Keselamatan Jalan

Data kecelakaan yang dipergunakan dalam analisis evaluasi kinerja keselamatan jalan di DI Yogyakarta, diperoleh dari data yang tercatat dalam *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh Ditlantas Polda DIY. Data tersebut merekam seluruh kejadian kecelakaan di DIY untuk seluruh jenis ruas jalan dan status jalan dari Jalan Desa, Jalan Kota/Kabupaten, Jalan Provinsi hingga Jalan Nasional pada tahun 2017 hingga tahun 2024.

Tabel 2- 95 Jumlah Kejadian Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kecelakaan	4.559	5.350	7.830	6.868	6.515 *	Kejadian
Korban Meninggal Dunia	346	452	570	94	70 *	Jiwa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Korban Luka Ringan	5.715	6.390	10.170	3.893	3.858 *	Jiwa
Korban Luka Berat	1	6	0	58	74 *	Jiwa
Kerugian Materi	2.111.235.500	2.393.687.000	3.901.777.000	3.786.080.300	8.570.464.500 *	Rp

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

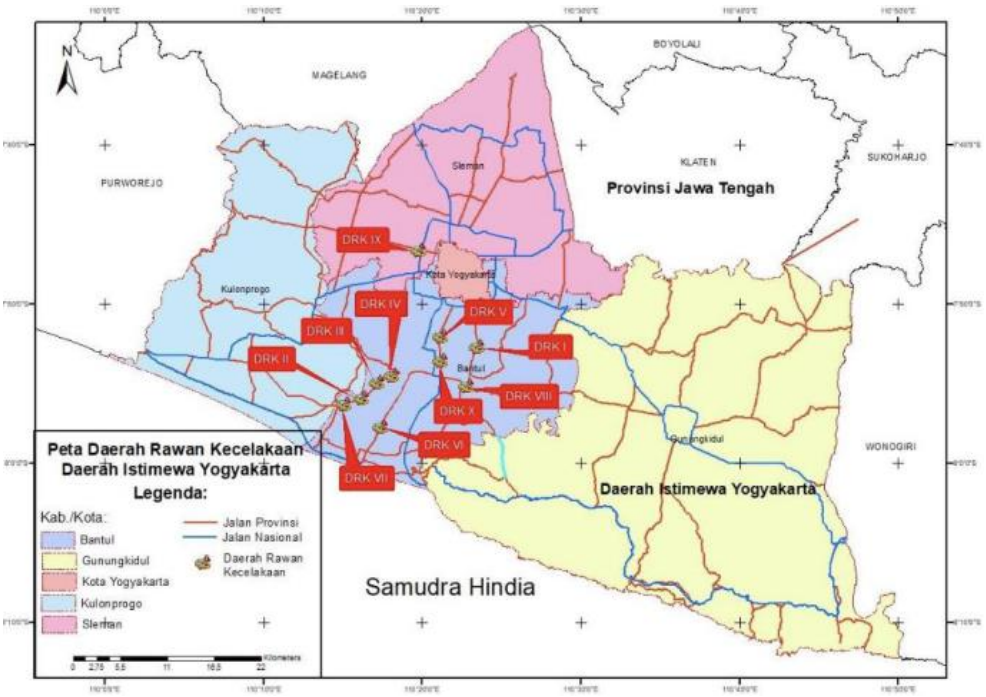
Tren kenaikan angka kejadian kecelakaan hampir terjadi di seluruh wilayah kecuali kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul masih berada pada posisi tertinggi, Angka kejadian kecelakaan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor dominan terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor manusia seperti tidak menaati peraturan lalu lintas, lengah, melebihi batas kecepatan maksimal dan beberapa faktor eksternal diluar kewenangan Dinas Perhubungan DIY seperti kondisi jalan yang belum ideal seperti lebar bahu, lebar lajur dan jarak pandang yang belum memadai dan genangan air hujan.

Tabel 2- 96 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan

Rank	No Ruas	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus /km
1	021	Gedongkuning - Wonocatur	Bantul	1,20	30	25,00
2	001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	Bantul	8,35	119	14,25
3	005	Bantul - Srandakan	Bantul	8,95	120	13,41
4	008	Bakulan - Barongan	Bantul	3,18	37	11,65
5	002	Yogyakarta - Barongan	Bantul	9,80	109	11,12

Sumber:: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Jalan DIY Pilar Ke 3, 2023

Gambar 2- 80 Peta Daerah Rawan Kecelakaan di DIY

Dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana prasaranan perlengkapan jalan sebagai fungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan pada jalan provinsi di DIY. Capaian penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan di DIY hingga tahun 2024 telah mencapai 43,57%.

Tabel 2- 97 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2024

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
1	APJ Tenaga listrik	Unit	3,694	12,164	30.37%	8,470
2	APJ Tenaga Surya	Unit	312	3,044	10.25%	2,732
3	*Warning Light*	Unit	126	376	33.51%	250
4	Rambu Lalu Lintas	Unit	3,258	4,255	76.57%	997
5	RPPJ	Unit	447	727	61.49%	280
6	Cermin Tikung	Unit	595	1,003	59.32%	408

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
7	*Guardrail* (Pagar Pengaman)	Meter	5,780	19,520	29.61%	13,740
8	Deliniator	Unit	4,630	9,760	47.44%	5,130
Rarata Terpasang					**43.57%**	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi

Dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi informasidi sektor transportasi diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yaitu dalam meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, maka perlu mengintegrasikan operasi transportasi, infrastruktur kendaraan, serta pengguna jalan melalui pengembangan sistem pengendalian lampu lalu lintas (ATCS), sistem manajeman dan pengawasan dalam mendukung lalu lintas angkutan barang di jalan yaitu *Intelligent Transport System* (ITS) dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan dan memperpanjang umur jalan dan pengembangan sarana transportasi berbasis listrik dengan harapan udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. Berikut disajikan data Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 – 2022.

Tabel 2- 98 Rekapitulasi Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 – 2022

No	Tahun Pemasangan	Nama Simpang		
1.	2012	1.Bandara Adisucipto 2. Maguwo	3. Janti 4. UIN	5. Demangan
2.	2013	1.Galeria 2. Gramedia 3. Monjali 4.Kentungan	5. Condongcatur 6. Seturan 7. Pelemgurih 8. Prambanan	9. Ketandan 10. Pasar Kembang 11. Patran
3.	2014	1. Blok o 2. Druwo 3. Dongkellan 4. Tempel 5. Giwangan 6. Tugu	7. MM UGM 8. Kleringan 9. Melia 10. Basen 11. Bantulan 12. Demak Ijo	13. Pogung 14. Jujur 15. Kronggahan 16. Ngasem 17. Pakem 18. Kotagede
4.	2015	1. Sedayu 2. Kasihan 3. Klodran	5. Madukismo 6. Proliman 7. Sampakan	9. Jati Kencana 10. Selokan Mataram 11. Damai Timur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Tahun Pemasangan	Nama Simpang		
		4. Gamping	8. Jejeran	12. Borobudur Plaza
5.	2016	1. Toyan 2. Pedes 3. Beran 4. Denggung	5. Wojo 6. Ngeplang 7. Kamdanen 8. Raden Ronggo	9. Piyungan 10. Wiyoro 11. Besi 12. Karangnongko
6.	2017	1.Manding	2. Kenteng	
7.	2018	1. Palbapang		
8.	2020	1.Siluwok	2. Glagah	3. Tambak
9.	2022	1. Brosot	2. Srandakan	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

2.2.2.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

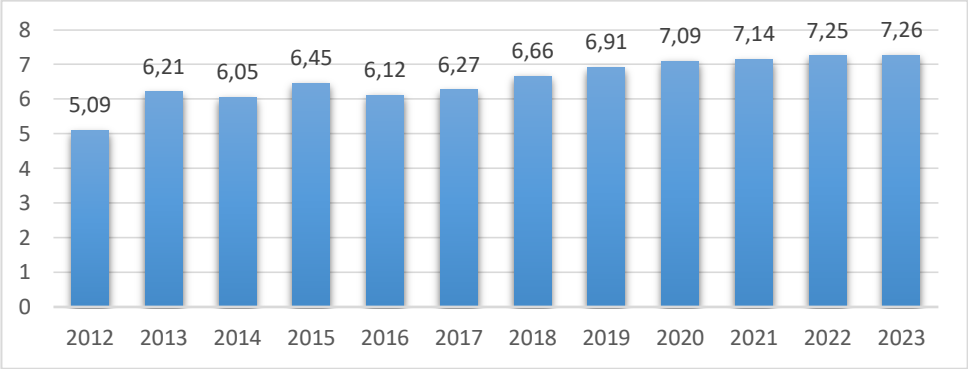
Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal http://jogjaprov.go.id. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai platform, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia tahun 2023 mencapai 5,90. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,85 pada skala 0−10. Adapun Indeks Pembangunan TIK DIY pada tahun 2023 mendapat skor 7,26, meningkat 0,01 poin dari tahun 2022 dengan skor 7,25.



Sumber data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Gambar 2- 81 Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY, 2012-2023

Meskipun cenderung terdapat peningkatan, sesuai dengan kategori terbaru capaian skor indeks pembangunan TIK DIY pada tahun 2012-2023 berada di kategori sedang pada range skor 5,01-7,50.

Pembangunan TIK di DIY salah satunya ditopang dengan pembangunan jaringan tetap dan bergerak. Untuk pembangunan jaringan tetap sejak tahun 2013 telah dibangun jaringan fiber optik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2- 99 Panjang Kabel Fiber Optik di DIY Tahun 2013-2024

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018	-	11.575	11.575
2019	-	4.450	4.450
2020	-	379.875	379.875
2021	-	5.350	5.350
2022	-	22.500	22.500

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2023		37.000	37.000
2024		53.650	53.650
Total	**37.243**	**541.263**	**578.506**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

Jaringan Intra pemerintah Daerah dikembangkan untuk menghubungkan semua unit kerja OPD Pemda DIY secara aman. Data jaringan internet Pemda DIY sampai 2024 mengampu 289 titik jaringan unit kerja dari 303 titik di seluruh DIY. Titik jaringan tersebut dengan rincian :

a. 260 titik menggunakan FO
b. 28 titik menggunakan *wireless*
c. 1 titik menggunakan VPN
d. 14 titik belum terfasilitasi (tahun 2023 ada 11 yang belum terkoneksi dan tahun 2024 tambah usulan 3 lokasi sehingga total menjadi 14 lokasi)

Sebagai tindak lanjut Pemda DIY atas amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pemda DIY terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Dengan keterhubungan tersebut, interkoneksi antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat berjalan lebih aman.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY juga sudah terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten/kota di DIY. Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah membangun jaringan intra pemerintah sampai dengan kantor kelurahan/kalurahan di DIY, baik menggunakan media *wireless* ataupun dengan kabel serat optik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2- 100 Keterhubungan Kalurahan/Kelurahan Dalam Jaringan Intra Pemerintah

Kabupaten/Kota	Terhubung *Wireless* (kalurahan)	Terhubung FO (kalurahan)	Total
Gunungkidul (144 kalurahan)	122	22	144
Kulon Progo (87 kalurahan dan 1 kelurahan)	88	0	88
Sleman (86 kalurahan)	31	55	86

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kabupaten/Kota	Terhubung *Wireless* (kalurahan)	Terhubung FO (kalurahan)	Total
Bantul (75 kalurahan)	48	27	75
Yogyakarta (45 kelurahan)	0	45	45

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

Jaringan telekomunikasi di DIY telah menjangkau hampir seluruh Kalurahan/Kelurahan di DIY. Hal ini dapat dilihat dari data yang menyatakan bahwa sebanyak 250 titik lokasi telah terjangkau jaringan *fiber optic*. Cakupan jaringan telekomunikasi di DIY secara lebih rinci dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2- 101 Jaringan Telekomunikasi di DIY Tahun 2020-2024

Jaringan Telekomunikasi	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jaringan *Fiber Optic* (FO)	165	172	194	196	250	Titik Lokasi
Jaringan *Wireless*	90	87	74	75	35	Titik Lokasi
Jaringan *Virtual Private Network (*VPN)	2	1	1	1	1	Titik Lokasi
CCTV	30	30	29	30	2	Titik Lokasi

Sumber : Dataku Bapperida DIY, 2025

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika juga mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tabel 2- 102 Perbandingan Nilai Indeks SPBE Pemda DIY Hasil Pemantauan Tahun 2022 Dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Indeks SPBE	2022	2023	Keterangan
SPBE Pemda DIY	3,02	4,22	Naik 1,20
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	2,50	4,80	Naik 2,30
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,50	4,80	Naik 2,30
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	2,30	4,20	Naik 1,90
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	2,00	4,25	Naik 2,25
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50	4,25	Naik 1,75

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks SPBE	2022	2023	Keterangan
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2,50	4,00	Naik 1,50
Domain 3 – Manajemen SPBE	1,82	3,36	Naik 1,54
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	2,00	3,38	Naik 1,38
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	1,33	3,33	Naik 2,00
Domain 4 – Layanan SPBE	3,99	4,38	Naik 0,39
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	4,10	4,20	Naik 0,10
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83	4,67	Naik 0,84

sumber: LHE SPBE Kementerian PANRB, 2022 dan 2023

Keunggulan penerapan SPBE di DIY adalah kebijakan internal tata kelola, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini juga didukung dengan terbitnya Pergub DIY nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik internal maupun antar perangkat daerah, dengan K/L/pemda lainnya yang di ikuti juga dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE yang memuat seluruh unsurnya secara lengkap.

Layanan TIK juga telah terdokumentasi dengan baik serta menunjukan layanan yang diberikan oleh teknologi tersebut mampu mendorong efektivitas SPBE di DIY. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan terkonfirmasi dengan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan penganggaran dan keuangan yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai SIPD. Layanan Pengadaan barang dan jasa juga terkonfirmasi dengan penggunaan aplikasi SPSE dari LKPP, dan layanan lainnya.

1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di DIY dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi DIY. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 103 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY	001/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KID DIY-PS/2020	Anggaran	Kesepakatan Mediasi Damai dan Putusan Ajudikasi
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
5.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul,	007/VIII/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, DIY	008/X/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, DIY	009/XI/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman, DIY	010/XI/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2- 104 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	001/I/KID DIY-PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2- 105 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul	001/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Depok, Panjatan, Kulon Progo	002/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman	003/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/IV/KIDDIY-PS/2022	LHKPN	Putusan Ajudikasi
5.	Pemkab Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	006/V/KIDDIY-PS/2022	Salinan eksekusi	Putusan Mediasi
7.	Pemkot Yogyakarta	007/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
8.	Pemkab.Kulon Progo	008/v/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
9.	Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Komisioner	Putusan Ajudikasi
10.	Perkumpulan Simponi	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Aggaran	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Tabel 2- 106 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2023

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul	001/IV/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Lurah Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman	003/VI/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
4.	Rektor Universitas Gadjah Mada Yogakarta	004/VII/KIDDIY-PS/2023	Dokumen administrasi kenaikan pangkat/jabatan	Putusan Ajudikasi
5.	Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
6.	Kepala Kantor Pertanahan	006/V/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
	Kabupaten Sleman			
7.	Lurah Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul	007/IX/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Pemerintah Daerah DIY	008/XI/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kelompok Tani Gerogol Parangtritis x Pemda DIY	009/XII/KIDDIYPS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2024

2. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi jogjaprov.go.id dan juga penggunaan
aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi.

2.2.2.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam memajukan daerah, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaatnya. Koperasi, khususnya, menjadi pilar utama perekonomian Indonesia berdasarkan sistem ekonomi Pancasila.

Meskipun demikian, koperasi saat ini harus berhadapan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat dengan perusahaan-perusahaan besar. Dari segi kuantitas, kinerja koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan peningkatan. Jumlah koperasi tumbuh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebanyak 114 koperasi dari tahun 2020 sebanyak 1.938 menjadi 2.052 koperasi pada tahun 2024.

Namun, di balik peningkatan jumlah tersebut, jumlah koperasi aktif justru menurun sebanyak 109 koperasi dari tahun 2020 sebanyak 1.758 koperasi menjadi 1.649 koperasi pada tahun 2024. Sedangkan jumlah koperasi pasif meningkat sebanyak 223 koperasi dalam kuruan waktu 2020 sampai dengan 2024. Artinya, meskipun jumlah koperasi bertambah, tidak semuanya beroperasi secara optimal.

Jika ditinjau dari volume usaha, terjadi peningkatan sebesar 32,55% pada tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2020. Volume usaha koperasi yang awalnya mencapai Rp 4,1 triliun di tahun 2020 naik menjadi Rp 5,5 triliun. Peningkatan volume usaha koperasi ini terus meningkat selama lima tahun terakhir, meskipun terjadi pandemi Covid 19, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi daerah, volume usaha koperasi kembali meningkat, bahkan melampaui kondisi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap situasi ekonomi yang dinamis.

Tabel 2- 107 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	1.938	1.988	2.008	2.086,00	2.052
1.1	Koperasi Aktif	1.758	1.717	1.698	1.734	1.649
1.2	Koperasi Pasif	180	271	310	352	403
4	Volume Usaha Koperasi (juta rupiah)	4.142.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928	5.491.277
5	Aset Koperasi (juta rupiah)	4.422.833	4.003.885	4.394.943	4.832.730	5.290.224

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

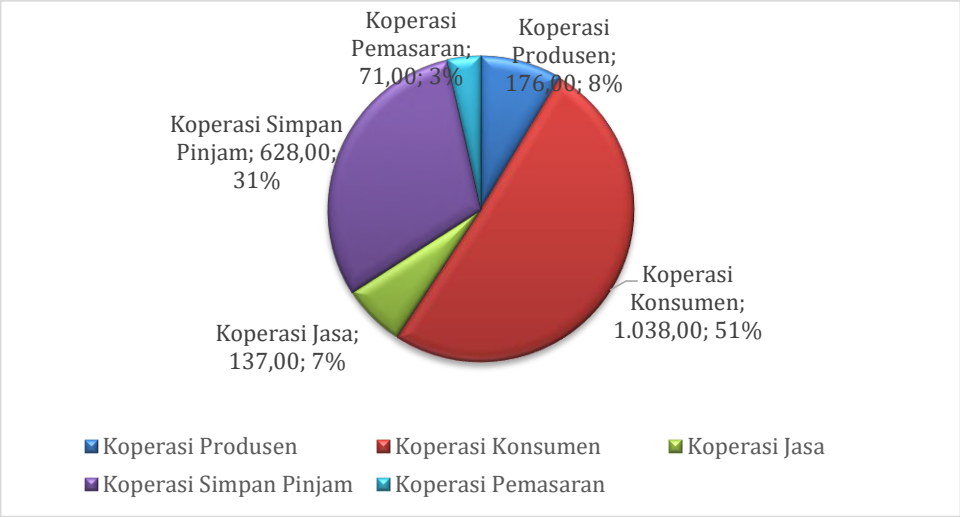
Pertumbuhan volume usaha koperasi juga relatif lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DIY secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu mengimbangi laju perkembangan ekonomi daerah.

Koperasi di DIY didominasi oleh jenis usaha Koperasi Konsumen yaitu sebanyak 51% dari total jumlah koperasi. Di sisi lain, koperasi produsen hanya berperan seitar 8% dari total jumlah koperasi di DIY. Hal tersebut sejalan dengan struktur PDRB DIY yang didominasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

konsumi rumah tangga. Konsumsi dan konsmen memiliki peran dalam menggeliatkan perputaran uang di daerah. Tantangan bagi DIY adalah sejauh mana kegiatan konsumsi tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu didorong keterkaitan antara barang/jasa yang dihasilkan oleh tiap jenis koperasi di DIY.

Untuk itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat keterkaitan antara barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai jenis koperasi di DIY. Dengan demikian, koperasi dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2- 82 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2024

Perekonomian DIY didominasi oleh kegiatan usaha mikro. Pada tahun 2024, terdapat 327.680 Usaha Mikro, 16.076 Usaha Kecil dan 2.130 Usaha Menengah. Dilihat dari sektor usahanya, UMKM di DIY didominasi oleh sektor Perdagangan sebesar 51,6% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 33,6%. Pendataan UMKM memang memiliki tantangan seiring dengan jumlah populasi yang besar, bentuk usaha yang sebagian besar belum formal hingga dinamisnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pala pelaku. Namun demikian, melakui SiBakul Jogja, Pemda DIY berupaya untuk melakukan tata kelola data UMKM dengan lebih baik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 108 Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024

	Mikro	Kecil	Menengah
Sektor Pertanian	3.749	336	26
Sektor Perdagangan	170.057	7.456	1.094
Sektor Kelautan dan Perikanan	1.383	24	5
Sektor Kehutanan	12	1	1
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	53	40	4
Sektor Transportasi	7.235	85	19
Sektor Komunikasi	100	19	6
Sektor Pariwisata	154	21	2
Sektor Jasa Kesehatan	141	48	22
Sektor Konstruksi	514	134	49
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	1.579	227	48
Sektor Jasa Pendidikan	393	30	3
Sektor Industri Pengolahan	111.141	4.526	432
Ekonomi Kreatif	12.605	1.002	120
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	18.564	2.127	299
Jumlah	327.680	16.076	2.130

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023 (diolah)

2.2.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan DIY, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Investasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi. Investasi berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Baik itu investasi dalam pengembangan industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi, penerapan teknologi hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, atau pembangunan infrastruktur yang modern, semuanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Guna mendukung tercapainya Misi 6 RPJPD DIY 2025-2045 yaitu Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang Berorientasi Pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah maka disisunlah arah kebijakan Tahap I (2025-2029) yakni memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka arah kebijakan tahap I difokuskan pada upaya memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan. Dengan demikian, investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya.

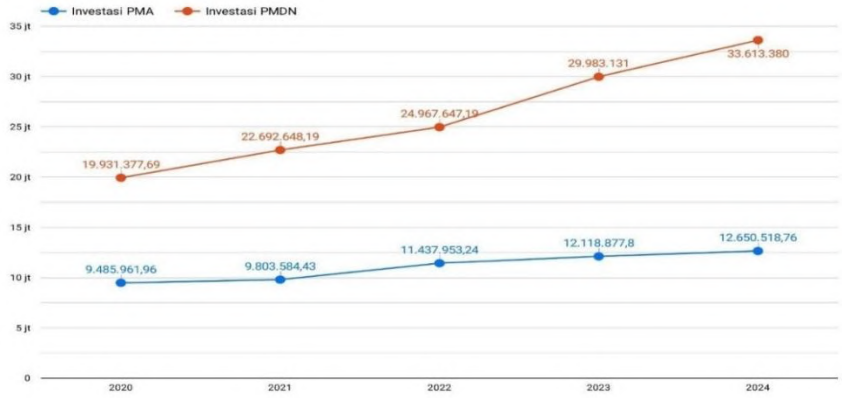
Meskipun terdapat sedikit perlambatan pada tahun 2024, perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2020 – 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Data dari DPMPTSP DIY menunjukkan pada Tahun 2024 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 9.89%. Realisasi Investasi di DIY sampai dengan Tahun 2024 (kumulatif) mencapai Rp 46,2 triliun dengan investasi PMDN mencapai Rp 33,6 triliun dan PMA mencapai Rp 12,65 triliun seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2- 109 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi PMDN	Investasi PMA	Total Investasi	*Growth*	*Growth%*
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.692.648,19	9.803.584,43	32.496.232,62	3.078.892,97	10,47%
2022	24.967.647,19	11.437.953,24	36.405.600,44	3,909,367.82	12,03%
2023	29.983.131,00	12.118.877,80	42.102.008,91	5.696.408,47	15,65%
2024	33.613.380.12	12.650.518,76	46.263.898,88	4.161.889.97	9,89%

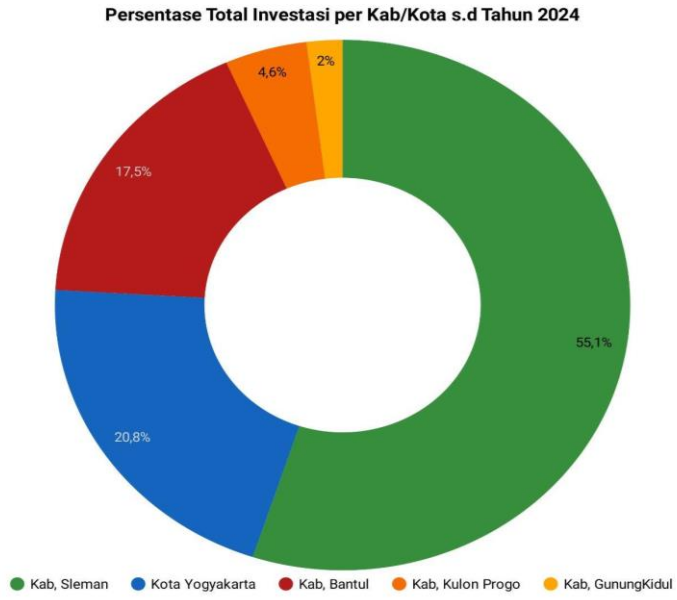
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 83 Akumulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: DPMPTSP DIY , 2024

Gambar 2- 84 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan III 2024

Pada tahun 2024, distribusi investasi di DIY masih didominasi oleh Kabupaten Sleman dengan persentase investasi sebesar 55,1% pada angka Rp. 2 Triliun, diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan 20.8%. Kemudian, Bantul mencatatkan 17,5% dari total investasi DIY, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul masing-masing menyumbang 4,6% dan 2%. Meskipun terdapat pertumbuhan investasi yang positif, beberapa permasalahan yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mungkin timbul antara lain kesenjangan investasi antara kabupaten/kota yang bisa mengakibatkan disparitas pembangunan ekonomi, serta perluasan infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan investasi secara merata di seluruh wilayah DIY. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam investasi yang dilakukan.

2.2.2.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu ukuran terhadap keberhasilan pembangunan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP DIY menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan peringkat tertinggi secara nasional selama periode 2015-2023 dan selalu berada di atas rata-rata IPP nasional. DIY masuk dalam kuadran I, yang berarti memiliki skor lebih tinggi dari rata-rata nasional dalam domain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pemuda. Keunggulan ini terutama ditopang oleh sektor pendidikan yang secara konsisten mencatat skor terbaik nasional, mencapai 90, serta skor 76,67 dalam kategori gender dan diskriminasi. Selain itu, DIY juga memperoleh skor tertinggi nasional dalam kategori lapangan dan kesempatan kerja dengan nilai 80. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian, terutama dalam domain kesehatan yang mencakup angka kesakitan pemuda, korban kejahatan, perokok pemuda, serta remaja yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mengalami kehamilan. Peningkatan di aspek ini diperlukan agar pembangunan kepemudaan DIY semakin inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Kemenpora, 2024

Gambar 2- 85 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda DIY dan Nasional tahun 2015-2023

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.

sedangkan pada kondisi pembangunan keolahragaan di DIY, dilihat dari Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) DIY sebesar 0, 328 (kategori rendah). IPO DIY sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 0,327. Secara keseluruhan, meskipun DIY memiliki beberapa indikator yang lebih baik dari rata-rata nasional, masih banyak aspek yang dapat ditingkatkan terutama dalam partisipasi olahraga, kebugaran jasmani, dan ekonomi olahraga.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah klub olahraga pada tahun 2024 terdapat 1.207 buah.

Tabel 2- 110 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY

Uraian	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemuda dan Olahraga						
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	2	4	4	4	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	56	56	56	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	4	6	3	3	3	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	Unit

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.2.2.2.14 Urusan Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Diamanatkan dalam kebijakan tata kelola data pemerintah tersebut bahwa untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan empat prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

1. Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
2. Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informaasi data.
3. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
4. Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dari keempat prinsip Satu Data Indonesia tersebut, saat ini prinsip satu data yang dapat dipenuhi adalah metadata, sehingga formulasi penghitungan indikator urusan statistik adalah perbandingan elemen data yang sudah memiliki metadata dengan seluruh elemen data. Penghitungan capaian per tahun adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 111 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data

Tahun	Jumlah elemen Data yang sudah memiliki Metadata	Jumlah keseluruhan elemen Data	Persentase
2024	8.294	10.885	76,2%

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Beberapa turunan dari Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2023 yang telah disusun diantaranya adalah Keputusan Gubernur Nomor 50/KEP/2024 tentang Pembentukan Forum Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial. Selanjutnya, telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tentang Penunjukan Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di DIY, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Selain itu, DIY telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 364/KEP/2024, yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2024-2026. Tahun 2024 DIY juga telah menetapkan Daftar Data Satu Data Indonesia yang akan dikumpulkan pada tahun 2025 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 432/KEP/2024. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 tahun 2022 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT BPPSD Bapperida DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bapperida DIY, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY, merupakan wujud upaya dalam memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara online oleh seluruh Perangkat Daerah (OPD DIY) dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota sebagai sumber data sekunder. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Tim Satu Data Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Tim Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam updating data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD, instansi, dan kabupaten/kota memiliki *user* dan *password* dan wajib melakukan input data secara online pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan periodesasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gambaran umum tentang penyediaan data statistik telah dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (*SOP) Aplikasi Dataku Nomor: 557/11996 tanggal 15 Juni 2021 dan telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16219 tanggal 12 September 2022 yang ruang lingkupnya meliputi: Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penyimpanan dan Penyebarluasan Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data

Tabel 2- 112 Penyediaan Data Statistik Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Sektor/Bidang Urusan	47
2	Cakupan Tahun/Series	2009-2024
3	Jumlah Elemen Data	10.885
4	Produsen Data/Sumber Data/Instansi yang Terlibat	50
5	Jumlah Pengakses Data di Aplikasi Dataku Tahun 2024	376.663
6	Jumlah Pengguna Data di Aplikasi Dataku Tahun 2024	281.183
7	Jumlah total hits Aplikasi Dataku	807.556

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat http://geoportal.jogjaprov.go.id/.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data geospasial dengan Nota Kesepakatan Nomor 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor 119/15301/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial di DIY. Di samping itu juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumian. Diantaranya menyusun Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (PPIDS) yang telah tetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, DIY telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu *Geonode*. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan *services* yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service* (WMS)*, Web Feature Service* (WFS) dan *Catalogue Sevices for Web* (CSW). WMS dan WFS berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana WMS data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada WFS data peta diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan CSW memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal DIY dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian effort menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh OPD Pemda DIY untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk OPD untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 tema data dengan konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal DIY saat ini berisi 55 tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD DIY juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD DIY melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh yang merupakan *event* rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN). Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak tahun 2019 JIGD DIY selalu mengajukan form kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu LANDSAT TM, MODIS, SPOT MS, PLEIADES, dan juga jenis sensor radar seperti TERRA SAR. Dewasa ini yang paling sering dicari pemanfaat adalah data citra resolusi sangat tinggi (CRST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2m untuk sensor multispektral dan 0.5 meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

2.2.2.2.15 Urusan Persandian

Berdasarkan Perturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, bahwa Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2023 meliputi penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dengan kegiatan meliputi:

1. Peyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi;
2. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
3. Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi NonElektronik;
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi; dan
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY dan anggota Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (FORKOMSANDA) dalam hal Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat.

Di samping itu, dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Pada Tahun 2023 Di Pemerintah Daerah DIY telah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 82/KEP/2022 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. JKS yang terbentuk meliputi:

1. JKS Pemerintah Pusat dengan Pemda DIY (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. JKS Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);
3. JKS Pemerintah Daerah DIY dengan Kabupaten/Kota se-DIY (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);
4. JKS Komunikasi Internal Pemerintah Daerah DIY;
5. JKS Internal Perangkat Daerah (OPD se-DIY);
6. JKS Pimpinan A (Gubernur/Wakil Gubernur dengan TAPD);
7. JKS Pimpinan B (Gubernur/Wakil Gubernur dengan Ka-OPD);
8. JKS Pimpinan C (antar Kepala OPD);
9. JKS Pengamanan VIP.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY). Khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) pada tahun 2021 sebanyak 13 insiden dan naik menjadi 26 insiden pada tahun 2022 dan 190 insiden pada tahun 2023. Jumlah kasus/insiden pada sistem informasi milik Pemda DIY naik drastis menjadi 347 insiden pada tahun 2024. Kenaikan jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY yang cukup drastis ini perlu perhatian lebih lanjut.

Tabel 2- 113 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY

Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden
2022	26 insiden
2023	190 insiden
2024	347 insiden

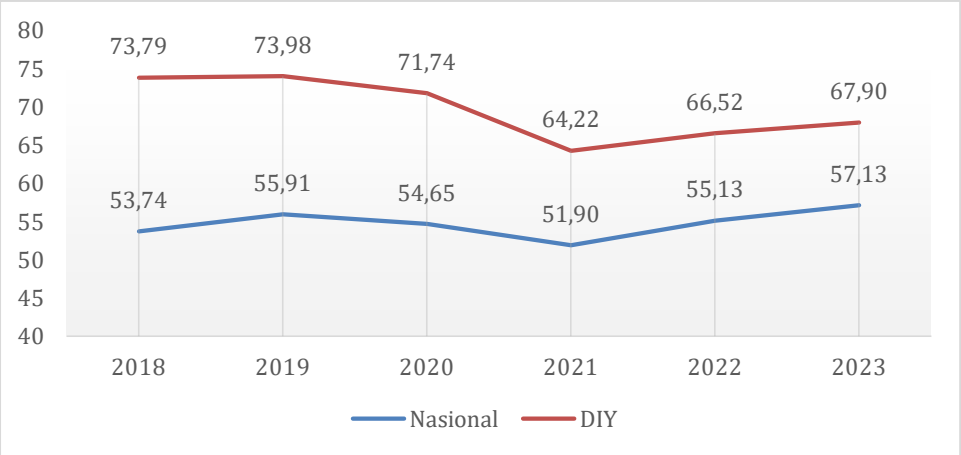
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.2.16 Urusan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Indeks ini merupakan yang pertama di Indonesia dan bahkan dunia yang secara khusus mengukur hal tersebut. Terdapat 7 dimensi dalam IPK yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Skor IPK tahun 2023 untuk tingkat nasional mencapai 57,13, sedangkan DIY memperoleh skor 67,90. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, skor IPK DIY selalu berada di atas skor nasional. Pada tahun 2023, dimensi dengan skor tertinggi untuk DIY ada pada dimensi pendidikan yanitu 80,09, sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya dengan skor 50,63.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gambar 2- 86 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2023

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 114 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2020-2024

Aspek	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Group kesenian	8.826	8.826	8.826	388	388	Grup
Jumlah Gedung kesenian	107	107	107	107	107*	Unit
Museum dan Pusat Kebudayaan	48	48	48	48	48	Unit
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	332	513	503*	269	247*	Kali
Benda cagar budaya yang dilestarikan	1.687	1.687	342	342	338*	Buah
Situs cagar budaya yang dilestarikan	343	343	72	74	79*	Buah
Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	17	17	11	11	11*	Kawasan
Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	2.045	2.045	425	427	427*	Buah
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,97	12,22	12,00	n/a	n/a	%
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	13,27	14,22	15,00	n/a	n/a	%
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	45,78	16,89	20	n/a	n/a	%
Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	10	18	25	32	40	Desa
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.599	1.599	530*	530*	530*	unit
Jenis Makanan Tradisional	276	276	276	276	276	jenis
Jenis Busana Tradisional	38	38	38	38	38	jenis
Lembaga Budaya	186	186	186*	186	186	lembaga
Motif Batik	235	235	235	235	235	motif
Motif Lurik	66	66	66	66	66	motif
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	206	206	262	262*	263*	arsip

*Keterangan: *) Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dilihat dari zamannya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang terkelola sampai tahun 2022, lebih dari 800 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. Yogyakarta yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa folklore, dongeng, karya sastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Menurut catatan, di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun belum pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo hingga akhir 2022 sebanyak 63.345 buah, telah dinventarisasi dan didokumentasi sejumlah 57.815 koleksi (91,27%) . Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Dari sekian banyak museum tersebut, baru 36 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama "Jali Roso" untuk *National Concert Hall Dublin*, misi kebudayaan ke *Denizli International Festival* di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canbera, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

Tabel 2- 115 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2020-2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.599	1.599	1.599	n/a	n/a	Unit
Benda Cagar Budaya	1.687	1.687	342	342	338*	Buah
Kawasan Cagar Budaya	17	17	11	11	11*	Kawasan
Situs	343	343	72	74	79*	Situs
Jumlah Monumen Sejarah	89	89	89	89	89*	Buah
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	206	262	262	263	263*	Arsip
Pelaku Sejarah	21	21	21	21	21*	Tokoh
Museum	48	48	48	48	48	Buah
Cerita Rakyat	63	63	63	63	63	Buah
Naskah Kuno	714	714	714	714	714	Naskah

*Keterangan: *) Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan Renaisans Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mempertahankan tanda- tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat golong gilig dan manunggaling kawula lan gusti telah mendasari pelaksanaan amanah- amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa. karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

DIY telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berlandaskan pada kebudayaan. Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi seni budaya yang telah dilakukan selama ini, terlihat bahwa jumlah potensi seni budaya di wilayah DI Yogyakarta terus mengalami perubahan maupun mengalami penambahan seiring dengan aktivitas di bidang seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki keunggulan potensi kesejarahan, kepurbakalaan, dan tokoh seniman dan budayawan yang relatif banyak dengan oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni.

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di DIY. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 116 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya
Kota Yogyakarta	193	8	14	4
Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	3
Kabupaten Gunungkidul	n/a	96	14	0
Kabupaten Kulon Progo	73	64	13	2
Kabupaten Sleman	n/a	646	18	2

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 15% museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi Museum Negeri Sonobudoyo dilakukan secara bertahap dan tahun jamak (*multiyears*). Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2024 tercatat museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Kabupaten Sleman (18 museum) dan Kota Yogyakarta (19 museum). Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia.Hingga tahun 2024, sejumlah 41 museum di DIY telah menjadi anggota BARAHMUS.

Tabel 2- 117 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2020	48	16	18	0	0	14
2021	48	18	15	0	0	18
2022	48	18	15	0	0	19
2023	48	18	15	0	0	19
2024	48	18	n/a	0	0	19

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Pengembangan museum memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikannya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, diantaranya adalah citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpan, museum disejajarkan objek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya *Grand Desain* Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

Nilai-nilai ketradisionalan telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Hingga tahun 2024, masyarakat DIY masih mempertahankan sejumlah 717 upacara adat, 35 tradisi, 69 permainan tradisional, 276 makanan tradisional, dan 63 cerita rakyat.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan.

Tabel 2- 118 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2020-2024

Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
Upacara Adat	717	717	717	717	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35
Permainan Tradisional	69	69	69	69	69
Jenis Makanan Tradisional	276	276	276	276	276
Cerita Rakyat	63	63	63	63	63

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Dari target 438 desa/kalurahan di 78 Kapanewon dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama- sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya setelah dinilai oleh tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa.

Tabel 2- 119 Jumlah Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 454/Kep/2023 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya Tahun 2019 - 2023

Tahun	DIY	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2019	56	12	12	15	15	2
2020	56	12	12	15	15	2
2021	76	19	19	19	16	3
2022	76	19	19	19	16	3
2023	100	24	24	24	21	7

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Selama periode periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik Eropa maupun Asia, DIY merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap. Objek Budaya Benda dan Tak Benda merupakan komponen dasar dalammengukur tingkat keberhasilan Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Budaya benda diartikan sebagai segala sesuatu wujud hasil karya budaya yang dapat dirasakan melalui indera penglihatan dan indera peraba yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu, langka, dan berumur lebih dari 50 tahun meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Sedangkan budaya tak benda diartikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat.

Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Upaya Pemda DIY dalam mendapatkan apresiasi budaya benda dan budaya tak benda DIY dilakukan melalui: pelindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan jumlah warisan budaya DIY yang diakui sebagai kekayaan budaya baik nasional maupun internasional pada periode 2017 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2022 sudah terdapat total 337 warisan budaya yang sudah diapresiasi baik pada skala nasional maupun internasional.

Tabel 2- 120 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	179	208	244	274	300	337

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

2.2.2.2.17 Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten mengembangkan sistem perpustakaan yang inklusif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai sarana edukasi yang memungkinkan masyarakat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mendorong inovasi, sehingga menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pengelolaan perpustakaan di DIY dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan publik. Perpustakaan Daerah DIY berfungsi sebagai pusat literasi dan informasi yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dari berbagai latar belakang. Selain itu, perpustakaan-perpustakaan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa terus didukung untuk memastikan layanan literasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Pada tahun 2024, total perpustakaan sebanyak 3.618 unit yang meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan instansi, perpustakaan tempat ibadah, perpustakaan pemda DIY, perpustakaan Kabupaten/Kota, dan perpustakaan desa.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 121 Data Jumlah Perpustakaan Tahun 2020 - 2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Perpustakaan	**3.462**	**3.462**	**3.463**	**3.618**	**3.618 ***	**Unit**
A. *Perpustakaan Sekolah*	*2.917*	*2.917*	*2.898*	*3.081*	3.081*	
A.1. SD	1.966	1.966	1.940	2.049	2.049 *	Unit
A.2. SMP	526	526	525	575	575 *	Unit
A.3. SMA	425	425	433	457	457 *	Unit
B.Perpustakaan Instansi	95	95	111	86	86 *	Unit
C. Perpustakaan Tempat Ibadah	6	6	6	6	6 *	Unit
D. perpustakaan umum tingkat Pemda DIY	1	1	1	1	1 *	Unit
E. perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota	5	5	5	5	5 *	Unit
F. perpustakaan desa kabupaten/kota	***438***	***438***	***442***	***439***	**439 ***	**Unit**
F.1. Kabupaten Kulon Progo	92	92	88	88	88 *	Unit
F.2. Kabupaten Bantul	75	75	75	72	72 *	Unit
F.3. Kabupaten Gunungkidul	140	140	148	146	146 *	Unit
F.4. Kabupaten Sleman	86	86	86	88	88 *	Unit
F.5. Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45 *	Unit

**) Data sementara sampai dengan Bulan Oktober 2024*

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2024

Ketersediaan perpustakaan di DIY belum selaras dengan ketersediaan pustakawan. Saat ini DIY masih kekurangan pustakawan baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berdasarkan *standar International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA), rasio ketercukupan pustakawan adalah 1:2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang. Sementara rasio ketercukupan pustakawandi DIY adalah 1: 44.370, dimana 1 orang pustakawan melayani 44.370 penduduk. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2-121, jumlah pustakawan di DIY tahun 2024 sebanyak 93 orang yang terdiri dari 15 orang pustakawan provinsi DIY, 12 orang pustakawan Kabupaten Kulon Progo, 16 orang pustakawan Kabupaten Bantul, 10 orang Pustakawan Kabupaten Gunungkidul, 15 orang pustakawan Kabupaten Sleman dan 26 Pustakawan Kota Yogyakarta.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 122 Jumlah Pustakawan Tahun 2020 - 2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Total Jumlah Pustakawan di DIY	**65,00**	**70,00**	**90,00**	**93,00**	**93,00 ***	**Orang**
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**79,00**	**79,00 ***	**Orang**
Kabupaten Kulon Progo	11,00	11,00	17,00	12,00	12,00 *	Orang
Kabupaten Bantul	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00 *	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00 *	Orang
Kabupaten Sleman	8,00	8,00	10,00	15,00	15,00 *	Orang
Kota Yogyakarta	15,00	15,00	17,00	26,00	26,00 *	Orang

**) Data sementara sampai dengan Bulan Oktober 2024*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Ketersediaan koleksi bahan pustaka merupakan komponen esensial dalam mendukung fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi, pembelajaran, dan pengembangan wawasan masyarakat. Meskipun mengalami tren peningkatan koleksi di perpustakaan daerah DIY hingga tahun 2025 belum sepenuhnya ideal. Data menunjukkan tren peningkatan jumlah koleksi dalam lima tahun terakhir. Jumlah judul buku meningkat dari 225.584 judul (2021) menjadi 265.966 judul (2025), sementara jumlah eksemplar buku bertambah dari 357.510 eksemplar (2021) menjadi 422.136 eksemplar (2025). Kendati demikian Peningkatan jumlah koleksi masih belum mampu mengimbangi kebutuhan informasi yang semakin kompleks, perkembangan kurikulum pendidikan, serta transformasi digital yang menuntut diversifikasi media pustaka. Data perkembangan koleksi buku selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2- 123 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah DIY Tahun 2021–2025

Tahun	Judul Buku (unit)	Eksemplar Buku (eksemplar)
2021	225.584	357.510
2022	246.856	400.720
2023	256.998	411.211
2024	265.966	422.136
2025*	265.966	422.136

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

**) Data sementara proyeksi (dengan asumsi data masih sama dengan tahun 2024)*

Dalam upaya meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap perpustakaan, fasilitas yang tersedia dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ruang baca yang representatif, koleksi bahan bacaan yang komprehensif, akses internet gratis, serta layanan digital seperti perpustakaan elektronik (*e-library*) menjadi bagian integral dari layanan yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

disediakan. Optimalisasi teknologi informasi juga menjadi prioritas, memungkinkan masyarakat mengakses koleksi perpustakaan secara daring, kapan saja dan di mana saja.

Layanan unggulan lainnya meliputi "*Jogja Library for All*" (JLA) yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan, dan permuseuman, serta "*Jogja Mobile Library*" yang mempermudah masyarakat mengakses informasi buku melalui aplikasi digital. Inovasi lainnya adalah "*iJogja*", sebuah perpustakaan digital yang memungkinkan peminjaman koleksi secara daring, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam layanan perpustakaan modern. Aplikasi iJogja juga diharapkan mampu mempopulerkan sistem perpustakaan digital di DIY. Dengan layanan ini, peminjaman buku dapat dilakukan tanpa perlu pelayanan manual oleh petugas. Layanan digital seperti ini juga memperluas jangkauan layanan perpustakaan, memungkinkan masyarakat mengakses koleksi kapan saja secara daring. Hingga akhir tahun 2024, koleksi digital yang dapat dipinjam mencapai 2.232 koleksi.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi untuk mencari buku, tetapi juga memberikan update informasi buku baru di perpustakaan favorit di DIY.

Gedung perpustakaan seperti Grhatama Pustaka di Bantul dan *Jogja Library Center* (JLC) di Malioboro juga menawarkan berbagai fasilitas, termasuk koleksi budaya lokal, ruang audiovisual, internet gratis, dan sudut baca yang nyaman. JLC, yang memiliki koleksi sejarah seperti Yogyasiana, berfungsi sebagai ikon literasi sekaligus warisan budaya yang mendukung atmosfer belajar di DIY. Kyoto Corner di JLC, hasil kerja sama dengan Prefektur Kyoto, menyediakan koleksi pustaka budaya Jepang dengan 481 judul dan 581 eksemplar.

Rumah Belajar Modern Sewon menjadi proyek percontohan yang menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari perpustakaan anak, ruang kreativitas, hingga arena permainan. Tempat ini juga menawarkan ruang untuk mengaplikasikan keterampilan seperti menyulam, membatik, dan memasak, menjadikannya pusat pembelajaran terpadu.

Selain itu, *Center of Excellence* Budaya Jawa menawarkan koleksi pustaka budaya Jawa yang meliputi buku dan audiovisual yang hanya dapat dinikmati di tempat. Layanan ini mendukung kegiatan seperti diskusi budaya, macapat, bedah pustaka langka, hingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengalihan huruf dan bahasa pada buku-buku berbahasa Jawa. Di sisi lain, layanan Pustaka Nusantara menyajikan koleksi buku, majalah, dan audiovisual terkait budaya dan wisata dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pemerintah DIY secara proaktif mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Program-program seperti "Gerakan Gemar Membaca", "Perpustakaan Keliling", dan "Buku Gratis untuk Semua" dirancang untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Selain itu, kegiatan literasi seperti pelatihan, lokakarya, diskusi buku, dan festival literasi rutin diselenggarakan sebagai bagian dari strategi membangun budaya literasi yang kokoh.

Peningkatan kualitas layanan perpustakaan di DIY tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, komunitas literasi, dan sektor swasta. Kemitraan strategis ini berkontribusi pada perluasan cakupan layanan perpustakaan serta memperkaya variasi kegiatan literasi yang dilaksanakan. Salah satu kolaborasi unik adalah "*Kyoto Corner*" yang bekerja sama dengan Prefektur Kyoto, menyediakan koleksi pustaka budaya Jepang.

Pemerintah DIY juga mengupayakan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi, serta sejauh mana masyarakat mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. IPLM melibatkan beberapa aspek, seperti kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, literasi informasi dan digital, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DIY Tahun 2024 mencapai 86,39 ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2023. Berikut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DIY Tahun 2022-2024.

Tabel 2- 124 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DIY Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	81,91	83,56	86,39

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

2.2.2.2.18 Urusan Kearsipan

Yogyakarta, sebagai daerah yang memiliki status istimewa, tidak hanya dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tetapi juga dengan pengelolaan arsip yang menjadi salah satu fondasi keistimewaannya. Arsip berperan penting sebagai bukti autentik perjalanan sejarah, kebijakan, dan nilai-nilai lokal yang membentuk identitas Yogyakarta.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kearsipan di Yogyakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga budaya. Arsip Keraton Yogyakarta, misalnya, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana tradisi dan sistem dokumentasi tradisional dipadukan dengan teknologi modern untuk menjaga warisan leluhur. Di sisi lain, keberadaan lembaga kearsipan daerah menjadi jembatan antara sejarah masa lalu dengan kebutuhan administrasi masa kini.

Dukungan terhadap kearsipan juga diwujudkan melalui pelatihan bagi para arsiparis, digitalisasi arsip untuk menjaga aksesibilitas, dan kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip. Dengan kolaborasi berbagai pihak, Yogyakarta memastikan bahwa nilai keistimewaannya tidak hanya terjaga dalam praktik sehari-hari tetapi juga tercatat dan diwariskan secara tertib dan sistematis.

Tabel 2- 125 Tabel Data Kearsipan DIY Tahun 2020-2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024*	
Pengelolaan arsip secara baku	48	48	48	86	86	Unit
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4	5	5	5	6	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	93	102	102	95	95	Orang
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	9.370	19.439	8.965	8.047	4.222	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	36.292	4.717	24.238	22.530	16.582	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

*) Data Sementara sampai Oktober 2024

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Selain itu, Pemerintah daerah juga membuat Diorama Arsip yang bertempat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.Diorama kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan pentingnya kearsipan kepada masyarakat. Dengan memadukan elemen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

visual, edukasi, dan teknologi, diorama ini menjadi media yang efektif untuk menghidupkan sejarah dan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan arsip.

2.2.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.2.3.1 Urusan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

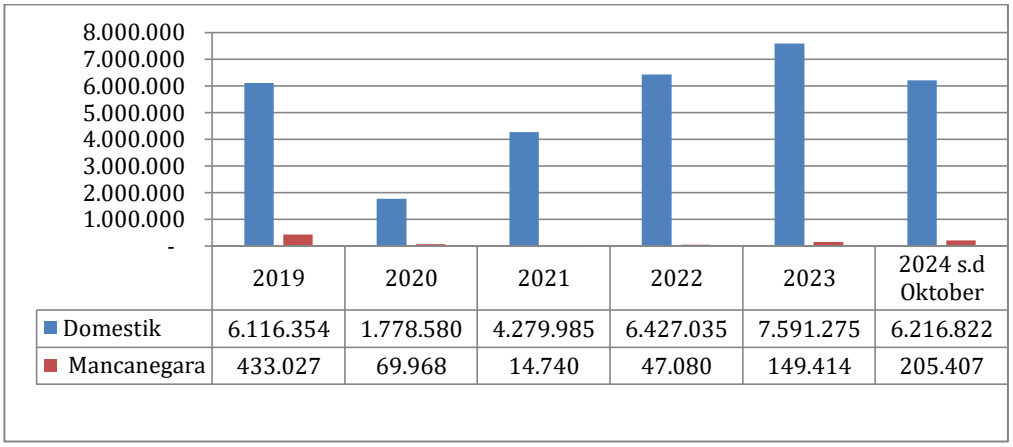
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Pariwisata RI menetapkan target ambisius untuk PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di kawasan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan yaitu sebesar Rp22.023.561,06 juta pada tahun 2025 dan Rp26.769.776,11 juta pada tahun 2029 yang mengindikasikan proyeksi pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Kontribusi sektor pariwisata DIY terhadap PDRB Harga Berlaku hingga tahun 2023 telah mencapai Rp11.148.036,00 juta rupiah. Target RPJMN tersebut menunjukkan harapan besar pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di kawasan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai salah satu destinasi prioritas nasional. Peningkatan PDRB di sektor akomodasi dan makan minum diharapkan dapat memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah dan nasional melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan sektor-sektor terkait lainnya.

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dangat dinamis, pada rentang tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pada tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat angka kunjungan wisatawan domestik yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 6.116.354 kunjungan. Namun, pada tahun 2020 saat awal mula pandemi COVID-19, terjadi penurunan yang sangat drastis dan signifikan. Pembatasan pergerakan masyarakat, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta penutupan sementara berbagai tempat wisata berdampak besar pada sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan domestik anjlok hingga mencapai 1.778.580 kunjungan, sebuah penurunan yang sangat tajam dan mencerminkan dampak langsung dari pandemi terhadap mobilitas dan aktivitas pariwisata.

Pada tahun 2021, meskipun pandemi masih berlangsung, mulai terlihat tanda-tanda pemulihan. Dengan adaptasi terhadap situasi dan penerapan protokol kesehatan yang lebih terstruktur, perlahan masyarakat mulai kembali beraktivitas, termasuk melakukan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perjalanan wisata dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik menjadi 4.279.985 kunjungan. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih belum mampu menyamai capaian sebelum pandemic. Memasuki tahun 2022, DIY menunjukkan pemulihan jumlah kunjungan wisatawan domestik yang baik bahkan melampaui angka sebelum pandemi, mencapai 6.427.035 kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa DIY tetap menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023. DIY mencatat angka kunjungan wisatawan domestik tertinggi dalam periode ini, yaitu sebanyak 7.591.275 kunjungan. Berbagai upaya promosi, pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan peningkatan kualitas layanan pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan ini. Hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 6.216.822 kunjungan wisatawan domestik yang mengunjungi DIY. Jika tren kunjungan ini tetap stabil atau bahkan meningkat hingga akhir tahun, sangat mungkin angka total kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2024 akan mendekati atau bahkan melampaui capaian tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata domestik di DIY terus menunjukkan performa yang positif dan menjadi salah satu penggerak penting perekonomian daerah.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s.d Oktober
Domestik	6.116.354	1.778.580	4.279.985	6.427.035	7.591.275	6.216.822
Mancanegara	433.027	69.968	14.740	47.080	149.414	205.407

Sumber: Dataku dan Dinas Pariwisata DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2- 87 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2019-2024 (Orang)

Untuk wisatawan mancanegara, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 433.027 kunjungan orang. Pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan mengakibatka penurunan tajam sekitar 83,85% pada tahun 2020 menjadi 69.968 kunjungan. Pada tahun 2021, jumlah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kunjungan mencapai titik terendah dengan 14.740 kunjungan akibat pembatasan perjalanan internasional yang masih ketat. Pemulihan mulai terlihat di 2022 dengan 47.080 kunjungan, dan berlanjut meningkat signifikan di tahun 2023 dengan 149.414 kunjungan. Pemulihan mulai terlihat di 2022 dengan 47.080 kunjungan, dan berlanjut lebih signifikan di 2023 dengan 149.414 kunjungan. Peningkatan pada tahun 2023 ini sangat signifikan dan menjadi momentum penting bagi pemulihan pariwisata mancanegara di DIY setelah terpuruk akibat pandemi. Kenaikan yang signifikan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dan pemulihan kepercayaan wisatawan mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, penting untuk terus memantau perkembangan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan yang mungkin muncul di tahun 2024 dan seterusnya, agar pemulihan ini dapat terus berlanjut dan bahkan melampaui capaian sebelum pandemi.

Kemenparekraf dan BPS melakukan inovasi dalam pencatatan wisatawan nusantara / domestik yakni berbasis pada *Mobile Phone/Handphone (HP)* yang disebut *Mobile Positioning Data* / MPD, Jenis MPD yang digunakan oleh Indonesia saat ini adalah MPD Pasif yang berasal dari tangkapan antena BTS (*Base Tranceiver Station*) yang dimiliki oleh provider seluler. Terkait MDP dan data kepariwisataan ini disampaikan dalam Pedoman Pemanfaatan Data Statistik Wisatawan yang di rilis Kemenparekraf pada tahun 2024.

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan pada periode Januari-Oktober 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Total kunjungan tercatat sebanyak 24.607.580 kunjungan pada Januari-Oktober 2024, meningkat sebesar 35,30% dibandingkan periode Januari-Oktober 2023 yang mencatat 18.187.320 kunjungan.

Tabel 2- 126 Tabel Perkembangan Perjalanan Wisnus Berdasarkan Asal dan Tujuan, Januari-Oktober 2024 (ribu perjalanan) Tujuan, Januari-Oktober 2024 (ribu perjalanan)

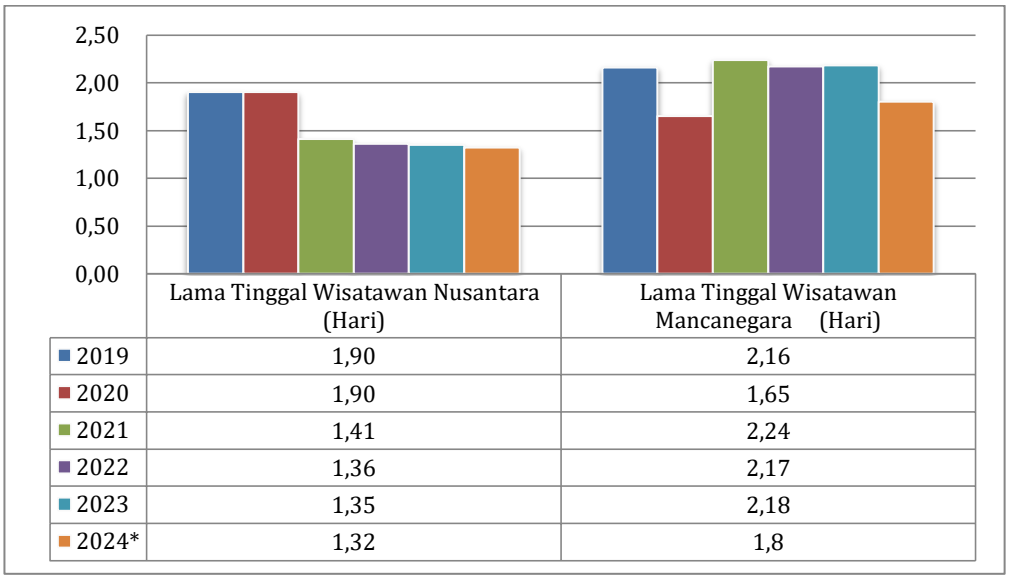
Asal Kabupaten/ Kota	Oktober 2023 (ribu)	September 2024 (ribu)	Oktober 2024 (ribu)	Januari-Oktober 2023 (ribu)	Januari-Oktober 2024 (ribu)
Kulon Progo	117,72	148,16	158,63	1.406,02	1.621,59
Bantul	341,91	609,02	712,11	4.441,20	6.645,85
Gunungkidul	154,07	183,65	184,22	1.510,51	1.908,64
Sleman	708,86	1.056,88	1.085,83	8.988,06	10.751,88

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Asal Kabupaten/ Kota	Oktober 2023 (ribu)	September 2024 (ribu)	Oktober 2024 (ribu)	Januari-Oktober 2023 (ribu)	Januari-Oktober 2024 (ribu)
Kota Yogyakarta	156,38	323,46	357,08	1.841,53	3.679,62
DIY (Total)	1.478,94	2.321,17	2.497,86	18.187,32	24.607,58

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Yogyakarta yang tetap menjadi destinasi favorit selain Bali, keberagaman objek wisata di DIY—mulai dari wisata alam, buatan, hingga minat khusus—berdampak positif pada durasi tinggal wisatawan. Berbagai acara dan festival, seperti di bidang musik, olahraga, kuliner, dan kebudayaan, telah diselenggarakan untuk menarik minat kunjung bagi wisatawan ke DIY selama satu tahun yang dapat dilihat dalam *Calendar of Events*. Selain itu, kajian-kajian pariwisata juga dirancang, salah satu contohnya terkait *Wellness Tourism*, sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadikan DIY sebagai salah satu prioritas pengembangan pariwisata unggulan dan alternatif tujuan wisata selain Bali dan Solo, khususnya dalam tema *Wellness Tourism*. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target durasi tinggal (*Length of Stay*) wisatawan di DIY.



	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)
2019	1,90	2,16
2020	1,90	1,65
2021	1,41	2,24
2022	1,36	2,17
2023	1,35	2,18
2024*	1,32	1,8

*Sumber: Dataku dan Dinas Pariwisata DIY, 2024, Keterangan *sementara / s.d bulan oktober*

Gambar 2- 88 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY Tahun 2020-2024 (Orang)

Secara umum, terlihat perbedaan pola antara wisatawan nusantara dan mancanegara. Wisatawan nusantara cenderung menunjukkan tren penurunan lama tinggal yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berkelanjutan, terutama setelah pandemi. Sementara itu, wisatawan mancanegara mengalami fluktuasi yang unik di masa pandemi, sebelum akhirnya kembali ke pola yang lebih stabil. Penurunan lama tinggal, terutama pada wisatawan nusantara, menjadi perhatian penting bagi industri pariwisata DIY. Hal ini mengindikasikan masih perlunya strategi untuk mendorong wisatawan agar menghabiskan waktu lebih lama di DIY, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan paket wisata yang lebih menarik, mengembangkan atraksi baru maupun yang sudah ada serta meningkatkan kualitas layanan, amenitas dan fasilitas pendukung lainnya.

Untuk wisatawan mancanegara mengalami fluktuasi yang terjadi di tahun 2021. setelah menurunnya LoS pada tahun 2020 saat pandemi pada angka 1,90 hari, lama tinggal wisatawan mancanegara kembali stabil di angka sekitar 2 hari pada tahun 2021 yaitu 2,24 hari. Pada tahun 2022, rata-rata lama tinggal tercatat 2,17 hari dan sedikit meningkat menjadi 2,18 hari pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setelah masa sulit pandemi, pola lama tinggal wisatawan mancanegara kembali ke kondisi yang relatif normal dan stabil. Sedangkan untuk lama tinggal wisatawan nusantara mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 1,41 hari dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 1,65 hari sampai dengan tahun 2023 sebesar 1,35 hari.

Ekonomi Kreatif

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Kekayaan warisan budaya, daya cipta masyarakatnya dan laju sektor pariwisata yang dinamis menjadi fondasi kuat bagi pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pun aktif mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif karena kontribusinya yang signifikan bagi perekonomian.

Sektor Ekonomi Kreatif saat ini telah memiliki kementerian sendiri yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif yang sebelumnya adalah Kemenparekraf, meskipun begitu kepariwisataan dan ekonomi kreatif merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan karena kegiatan pariwisata selalu terkait dengan produk/jasa yang bernilai yang dapat dinikmati atau dibelanjakan oleh wisatawan. Saat ini Pemda DIY sudah membuat *Roadmap* dan Rencana Aksi untuk membangun Potensi ekonomi kreatif DIY yang masih perlu dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dan menjadi sumber keunggulan DIY. Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY dilakukan melalui

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terintegrasinya hulu sampai ke hilir mencakup aspek kreasi (penciptaan), produksi, distribusi (pemasaran, promosi), konsumsi (pemanfaatan produk ekraf lokal) dan pelindungan (HKI).

Tabel 2- 127 Tabel Indikator Kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif dalam RPJMN 2025-2029

Nama Indikator	Target 2025	Target 2029
Meningkatkan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif		
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	8,37
Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,54	6,12
Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta orang)	25,55	27,66
Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif (%)	7,3	8,08
Nilai investasi ekonomi kreatif (Rp Triliun)	136,28	183,71
Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (%)	7,45	12,82
Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (%)	11,85	13
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (ribu orang)	203	225
Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya (%)	7,99	8,3
Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya (%)	3,46	6,41
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya (ribu orang)	9.836	10.9
Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim (%)	6,97	10,73
Pertumbuhan ekspor jasa terkait subsektor Aplikasi dan Gim (%)	10,01	14,93
Jumlah tenaga kerja subsektor Aplikasi dan Gim (ribu orang)	187	245
Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner (%)	8,82	9,1
Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner (%)	5,39	7,97
Jumlah tenaga kerja Subsektor Kuliner (ribu orang)	14.048	14.91

Sumber : Matriks Ranwal RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, Kemenekraf memiliki target-target seperti yang ada pada tabel diatas, sektor-sektor yang menjadi target kinerja seperti Film, Animasi, Video, Musik, Fesyen, Kriya, Aplikasi, Gim dan Kuliner perlu dukungan yang signifikan dari tiap daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih diantara 10 Daerah yang menjadi focus pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya telah menyusun kriteria untuk Potensi Ekonomi Kreatif di DIY yang dapat dilihat pada situs *https://katakreatif.kemenparekraf.go.id*). Sektor ekonomi kreatif di DIY tersebar di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kabupaten/kota dengan keunggulan dan potensi yang berbeda-beda, berikut ini adalah potensi ekonomi kreatif yang ada di kabupaten/kota di DIY :

a) Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi unggulan pada sektor Ekonomi Kreatif salah satunya adalah subsektor Seni Pertunjukkan yang telah mendapatkan pengharagaan 9 Kabupaten/Kota Kreatif Tahun 2022 dari Kemenparekraf sebagai Kabupaten Kreatif dengan subsektor unggulan Seni Pertunjukan. Namun tidak hanya Seni Pertunjukan saja, masih terdapat dua subsektor unggulan lain yakni kuliner dan kriya.

b) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi unggulan pada sub sektor kuliner, salah satu potensi andalannya adalah produk gula semut atau yang lebih dikenal dengan nama *coconut sugar*. Tidak hanya gula semut, salah satu produk unggulan kuliner lainnya adalah dawet sambel yang menjadi kreasi kuliner yang diunggulkan dari Kabupaten Kulon Progo.

c) Kabupaten Bantul yang memiliki potensi unggulan yaitu sub sektor Kriya yang mendapat penghargaan 9 Kabupaten/Kota Kreatif Tahun 2022 dari Kemenparekraf sebagai Kabupaten Kreatif dengan subsektor unggulan Kriya. Bantul memiliki beberapa sentra kriya yang tersebar di berbagai daerah seperti Sentra Industri Batik Kayu Krebet, Tembi dan Sentra Batik Wukirsari, Sentra Kerajinan Kulit Manding dan Sentra Kerajinan Gerabah Kasongan. Subsektor unggulan Kriya di bantul ini juga berkembang berdampingan dengan potensi lain seperti fesyen, kuliner, dan seni pertunjukan.

d) Kabupaten Sleman dalam sektor ekonomi kreatif memiliki potensi unggulan pada subsektor film, video dan animasi. Kabupaten Sleman telah melahirkan kreator yang sangat kompeten yang dibuktikan dengan adanya permintaan dari jaringan TV Internasional kepada studio animasi. Film animasi BATTLE OF SURABAYA (*There Is No Glory In War*) merupakan salah satu hasil karya para kreator Kabupaten Sleman bersama dengan Universitas Ilmu Teknologi AMIKOM Yogyakarta.

e) Kota Yogyakarta telah diakui sebagai Kota Kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan subsektor unggulan yang difokuskan pada **s**eni rupa. Penetapan ini didasari oleh kekayaan budaya Yogyakarta, keberadaan komunitas seni yang aktif, serta dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Meskipun seni rupa menjadi prioritas, subsektor ekonomi kreatif lainnya seperti kriya, desain, fesyen, kuliner, film, animasi, video, fotografi, musik, seni

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pertunjukan, penerbitan, aplikasi dan game, serta periklanan tetap mendapat perhatian dan terus dikembangkan karena saling berkaitan dan berkontribusi pada ekosistem kreatif secara keseluruhan. Kekuatan Yogyakarta di bidang seni rupa tidak hanya terletak pada warisan budaya yang dipertahankan, tetapi juga pada inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh para seniman dalam menciptakan karya-karya baru. Hal ini didukung oleh banyaknya galeri seni, ruang pameran, dan komunitas seni yang tumbuh subur di Yogyakarta. Pemerintah kota juga berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dengan penetapan sebagai Kota Kreatif, Yogyakarta diharapkan dapat semakin memantapkan posisinya sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif.

Tabel 2- 128 Tabel Rekapitulasi Daftar Potensi Industri Kecil Menengah (Industri Kreatif) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

No	Cabang Industri	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong (Rp. 000)
1	Kuliner	40.198	116.830	249.646.244	2.577.145.804	1.323.684.190
2	Mode/Fashion	10.519	46.345	468.333.190	1.612.253.545	879.017.076
3	Animasi	428	2.753	15.352.422	524.671.812	290.821.103
4	Fotografi	72	380	1.044.507	1.607.408	802.175
5	Teknologi Informasi	2.039	13.238	181.930.219	290.130.449	157.183.284
6	Video	36	281	1.191.913	39.538.233	19.472.199
7	Kerajinan	15.072	49.557	381.772.823	1.228.258.680	606.388.141
	Jumlah	68.364	229.384	1.299.271.318	6.273.605.932	3.277.368.169

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

Ekosistem IKM kreatif di DIY pada tahun 2019 didukung oleh 68.364 unit usaha yang tersebar di berbagai cabang. Keberadaan unit usaha ini memberikan lapangan pekerjaan bagi 229.384 tenaga kerja, menunjukkan peran penting sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja di DIY. Total nilai investasi yang tercatat mencapai Rp1.299.271.318.000, menggambarkan komitmen dan modal yang dialokasikan untuk pengembangan sektor ini. Dari investasi tersebut, IKM kreatif berhasil menghasilkan nilai produksi sebesar Rp6.273.605.932.000, dengan nilai bahan baku dan bahan penolong yang digunakan mencapai Rp3.277.368.169.000. Angka-angka ini mencerminkan dampak ekonomi yang signifikan dari IKM kreatif bagi perekonomian DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 129 Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif BISMA di DIY tahun 2019

No	Sub Sektor Ekraf	Jumlah (Presentase)
1	Kuliner	26,65
2	Kriya	10,68
3	Fesyen	14,30
4	TV dan Radio	1,46
5	Penerbitan	1,03
6	Musik	2,30
7	Arsitektur	1,08
8	App dan Games	6,63
9	Periklanan	0,85
10	Fotografi	1,98
11	DKV	3,95
12	Seni Pertunjukan	1,51
13	Desain dan Produk	4,14
14	Seni Rupa	0,99
15	Film, video dan animasi	4,28
16	Desain Interior	1,22
17	Aplikasi dan Pengembangan Konten	16,95

Sumber : Update Data BISMA per 30 Juni 2019

Berdasarkan data statistik pada BISMA (Bekraf *Information System on Mobile Application*) yaitu aplikasi informasi kreatif yang dikembangkan Badan Ekonomi Kreatif untuk memajukan Usaha Kreatif di Indonesiapada Tahun 2019 sebelum bergabung dengan Kemenpar, DIY memiliki 2.126 Pelaku Usaha pada 17 sub sektor Ekonomi Kreatif.

Tabel 2- 130 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Jawa-Bali pada Tahun 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	441.821	476.529	429.851	482.882	547.028
DKI Jakarta	1.006.508	945.921	998.923	1.089.729	1.167.869
Jawa Barat	4.168.861	4.153.055	4.413.407	5.091.580	5.572.995
Jawa Tengah	3.616.999	3.658.732	3.521.605	3.996.946	4.369.878
Jawa Timur	3.068.178	3.060.176	3.203.426	3.524.217	3.863.866
Bali	529.044	575.634	507.094	559.195	619.131

Sumber : Publikasi Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2018-2022

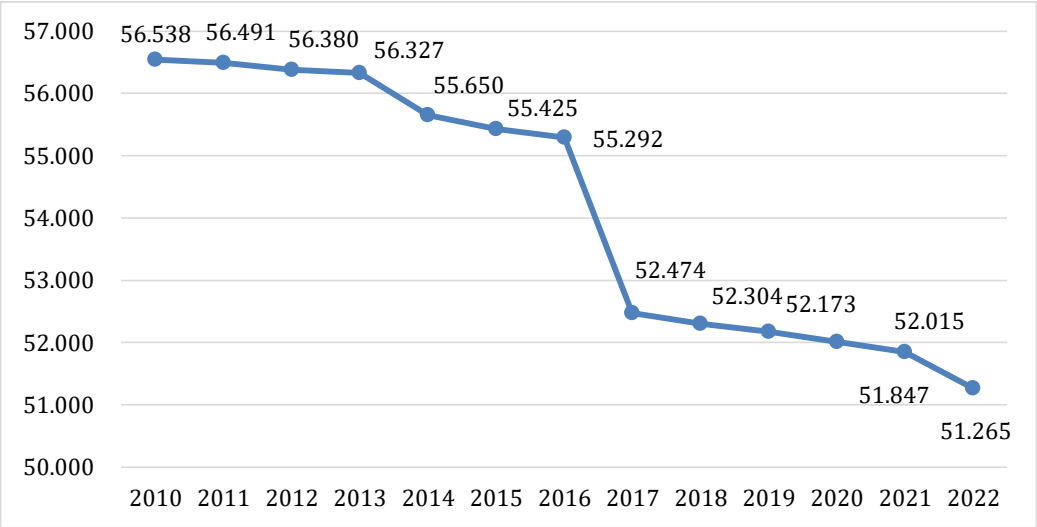
Menurut Statistik Tenaga Kerja pada sektor Ekonomi Kreatif, Jumlah Tenaga Kerja sektor Ekonomi Kreatif di DIY pada Tahun 2022 sebanyak 547.028 tenaga kerja. Jumlah tersebut terpaut jauh dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Namun, Provinsi Bali dengan keunggulan pariwisatanya pun hanya memiliki 619,131 tenaga kerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ekraf di Tahun 2022. Potensi Ekonomi Kreatif di DIY masih perlu dioptimalkan agar dapat menstimulus masyarakat DIY untuk memiliki minat bekerja pada sektor Ekonomi Kreatif.

2.2.2.3.2 Urusan Pertanian

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang terjadi di DIY meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, termasuk diantaranya lahan sawah. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2023

Gambar 2- 89 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY Tahun 2010 - 2022

Pada periode 2010 hingga 2022 terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 5.273,5 ha atau 9,33%. Bila dirata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 439,46 ha atau 0,8%. Khusus pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat besar seluas 2.818 ha dikarenakan beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun tersebut, diantaranya pengadaan tanah Bandara Internasional Yogyakarta dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Sektor pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari berbagai subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan merupakan subsektor yang dominan. Komoditas utama pada subsektor tanaman pangan adalah ubi kayu, padi, jagung, dan kacang tanah. Padi memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi tanaman pangan dengan proporsi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

43,68% pada tahun 2024. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada komoditas padi pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya cetak sawah baru dan program IP 400, begitupula untuk produksi jagung mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. namun data tahun 2024 adalah data sangat sementara dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Tabel 2- 131 Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2024 (ton)

Komoditas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi Sawah	653.128	670.059	678.142	656.140	404.513,92
Padi Ladang	195.013	204.982	206.212	208.766	50.647,56
Jagung	366.031	358.880	349.465	362.236	688.798,59
Kacang Kedelai	7.969	8.675	6.956	10.306	3.876,39
Kacang Hijau	531	508	614	467	260,96
Kacang Tanah	75.119	78.845	71.421	76.159	107.976,88
Ubi Kayu	1.073.314	882.073	1.054.322	976.115	873.799,73
Ubi Jalar	2.765	2.717	2.360	3.831	4.160,02

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Sub sektor hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman obat/biofarmaka, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit memiliki nilai ekonomi tinggi dan masuk dalam kelompok komoditas pangan utama karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi dan perekonomian. Produksi komoditas hortikultura unggulan di DIY tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 132 Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Cabai besar dan cabai rawit	59.573,3	54.311,1	50.582	68.005,77	70.985,83
2	Bawang merah	18.811	29.809	22.306	33.088	30.306,87
3	Mangga	29.833	33.456	27.066	10.845	47.894
4	Durian	6.771	9.258	8.849	13.601	12.094,6
5	Pisang	66.730	68.207	78.045	75.541	87.666,25
6	Salak	54.996	57.290	54.498	51.838	46.503,3
8	Melon	22.230	14.550	7.001	10.884	9.159,71

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Komoditas cabai besar dan cabai rawit, pisang dan mangga mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, namun secara umum komoditas hortikultura dalam lima tahun terakhir trend produksinya meningkat, meskipun pada komoditas melon mengalami penurunan.

Subsektor perkebunan menjadi salah satu sektor yang potensial di DIY, terutama karena nilai ekonomisnya yang signifikan. Kelapa, dengan jumlah populasi yang besar dan persyaratan perawatan yang tidak terlalu kompleks, menjadi komoditas andalan dalam produksi perkebunan DIY. Tabel di bawah ini menyajikan data rinci mengenai perkembangan produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY.:

Tabel 2- 133 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Kelapa	48.375,90	46.788,00	52.760,76	53,225,62	49.731,92
2	Tebu	11.035,49	8.336,28	6.410,79	4.399,26	3.244,33
3	Kakao	1.893,99	1.759,70	1.900,72	1.893,44	1.848,02
4	Tembakau Rakyat	744,47	834,56	253,55	253,61	535,32
5	Kopi	514,09	511,79	536,65	1.872,39	1.270,86
6	Mete	262,75	292,06	290,97	1.117,57	630,97
7	Teh	220,26	227,13	198,12	231,58	228,67
8	Vanili	1,80	1,98	3,86	2,07	2,13
9	Cengkeh	724,34	725,80	658,17	683,74	559,51
10	Pala	1,68	1,63	3,19	1,98	1,59

** Angka Sementara*

Sumber data: Dataku Bappeda DIY, 2024

Komoditas kelapa, kopi, dan kakao merupakan 3 komoditas unggulan perkebunan yang mengalami kecenderungan peningkatan produksi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan produksi didukung oleh kegiatan intensifikasi dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilakukan secara swadaya oleh petani. Pada tahun 2023 dilakukan peremajaan tanaman rusak untuk komoditas kelapa melalui hibah bibit kelapa genjah kopyor di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.500 bibit, Gunungkidul 500 bibit, dan Sleman 1.000 bibit sehingga produksi pada tahun 2024 mengalami penurunan produksi karena tanaman yang di tanam belum masuk usia panen. Sedangkan untuk komoditas kopi mengalami peningkatan produksi pada dua tahun terakhir, seiring dengan penambahan jumlah tanam tanaman kopi di lereng Gunung Merapi. Sedangkan untuk kakao jumlah produksi selama lima tahun cukup stabil. Namun komoditas dengan nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ekonomi yang cukup tinggi adalah pada komoditas vanili, produksi vanili DIY mengalami peningkatan selama lima tahun terkahir meskipun produksi tersebut belum optimal.

Peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil yang populasinya cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir. Sementara itu, populasi sapi perah dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa populasi Sapi Perah belum optimal untuk pemenuhan kebutuhan susu di DIY, meskipun DIY memiliki potensi yang besar untuk peternakan sapi perah dan industri susu sesuai dengan program nasional untuk pemenuhan program makan bergizi gratis. Produksi susu pada tahun 2024 sebanyak 4.936,88 liter per tahun, sedangkan kebutuhan konsumsi susu bila dibandingkan dengan kebutuhan PMBG sebanyak 468,46 liter/tahun. Kebutuhan daging ruminansia sebanyak 752,30 ton/tahun atau setara dengan 4.841 ekor sapi, sedangkan untuk kebutuhan telur sebanyak 1.117,93 ton/tahun dengan produksi telur pada tahun 2024 sebesar 101.109.133 ton.

Tabel 2- 134 Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2024 (ekor)

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi potong	309.259	317.425	323.308	227.037	285.060
Sapi perah	3.520	3.469	3.500	2.876	2.997
Kambing	416.400	440.748	417.386	435.713	426.973
Domba	148.191	149.231	144.617	92.311	154.636
Ayam ras petelur	4.618.205	3.614.663	4.712.467	6.924.954	7.810.316
Ayam ras pedaging	6.184.378	6.733.162	6.841.974	54.495.202	54.152.077
Itik	437.690	445.680	445.699	447.849	442.905

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.2.2.3.3 Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan pemerintahan urusan kehutanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan aneka manfaat dari fungsi hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari. Hutan yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain wilayah hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, DIY juga memiliki wilayah dengan status hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) seluas ± 65.886,56 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan DIY adalah sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 135 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha)

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)	%	Keterangan
1	Hutan konservasi	3.316,87	17,33	Dikelola oleh Kementerian LHK dan Balai TAHURA DLHK DIY
2	Hutan lindung	2.159,70	12,01	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
3	Hutan produksi	13.519,47	70,66	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
	Total	**19.133,95**	**100,00**	

Sumber : Diolah berdasarkan SK penetapan kawasan hutan di DIY.

Berdasarkan RPJMD DIY 2022-2027, fokus layanan utama pada urusan kehutanan adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dimana hal ini berarti bahwa hutan harus tetap dikelola dengan efektif dan efisien agar tetap lestari secara ekologis, ekonomis maupun sosial.Indikator keterwujudan pengelolaan hutan lestari diukur berdasarkan peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan yang diukur dengan kenaikan produksi pada tahun n dibandingkan dengan produksi tahun n-1 serta persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY yang diukur melalui Luas lahan kritis yang tertangani sampai dengan tahun n.

a. Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan

Produktivitas sektor kehutanan pada periode RPJMD DIY tahun 2017-2022 diukur berdasarkan angka PDRB subsektor kehutanan yang diterbitkan oleh BPS yang salah satu kelemahannya adalah setiap akhir tahun BPS belum menerbitkan data tersebut. Sedangkan pada RPJMD DIY tahun 2022-2027, indikator jumlah peningkatan produksi sektor kehutanan diukur berdasarkan perhitungan produksi yang berasal dari luar kawasan hutan pada kelompok tani hutan (KTH) melalui pendekatan nilai transaksi ekonomi yang dilaporkan melalui aplikasi web SIMLUH pada laman *https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/*, sedangkan produksi yang berasal dari kawasan hutan berasal dihitung berdasarkan data produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada Dinas LHK. pada tahun 2023. jumlah produksi sektor kehutanan tercatat sebesar Rp. 25.239.683.170,- sedangkan di tahun 2024, jumlah produksi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sektor kehutanan sebesar Rp. 28.342.896.02,- sehingga mengalami peningkatan sebesar 12,1% atau Rp.3.103.212.851,-.

b. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY

Penanganan lahan kritis di DIY menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan urusan kehutanan di Pemda DIY, dimana berdasarkan penetapan lahan kritis terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional tahun 2022. Berdasarkan keputusan tersebut lahan kritis DIY tercatat seluas 72.294 ha mengalami penurunan sebesar 8,6% atau seluas 6.829 ha dibandingkan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional tahun 2018 seluas 79.123ha.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi lahan kritis di DIY, sasaran lahan kritis yang menjadi fokus penanganan pada RPJMD DIY tahun 2022-2027 seluas 35.902,62 ha. Persentase penanganan lahan kritis diukur secara kumulatifdengan formulasi perhitungan jumlah penanganan lahan kritis yang ditangani sampai dengan tahun nterhadap luas sasaran lahan kritis. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, lahan kritis yang sudah ditangani oleh Pemda DIY sampai dengan tahun 2023 seluas 1.236,42 ha. Pada tahun 2024, Pemda DIY menargetkan peningkatan luas lahan kritis yang ditangani sebesar 3,15%.

Tahun 2024, luas lahan kritis yang ditangani seluas 231 ha berupa penanaman yang dilakukan di kawasan penyangga Gunung Merapi, kegiatan kebun bibit rakyat di Gunungkidul serta kegiatan pelestarian daerah sekitar mata air di Sleman. Secara kumulatif luas lahan kritis yang ditangani oleh Pemda DIY mengalami peningkatan sebesar 4,48% dibandingkan penanganan yang telah dilakukan secara kumulatif sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, total lahan kritis yang telah ditangani oleh Pemda DIY sampai dengan tahun 2024 seluas 1.467,42 ha.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Sub Urusan Ketenagalistrikan

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100%. Hal ini juga dilakukan oleh Pemda DIY untuk bisa melayani akses listrik sesuai standar keselamatan untuk rumah tangga di DIY. Pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2024 sebesar 99,99% dan rasio desa berlistrik sebesar 100% sesuai data SILM PT. PLN dan Rasio Elektrifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM RI. Berdasarkan data usulan bantuan listrik terbaru dari Kapanewon se-DIY pada tahun 2024 diperoleh data rumah tangga yang masih menyalur sebanyak 4.498 rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 2- 136 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	2024
1	Gunungkidul	1.990
2	Kulon Progo	485
3	Sleman	849
4	Bantul	1.157
5	Yogyakarta	17
	Total	**4.498**

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Data tersebut merupakan data terbaru, di mana belum dilakukan verifikasi apakah seluruh NIK yang masuk dalam daftar usulan adalah bersubsidi atau non subsidi. Berdasarkan data usulan perluasan jaringan listrik pedesaan ke PLN untuk menangani rumah tangga miskin yang jauh dari jaringan listrik (gerumbul), di 15 kapanewon miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 137 Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN

No.	Kabupaten	Jumlah Sasaran Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	3	60
2	Bantul	8	15
3	Kulon Progo	6	42
4	Sleman	5	15
Jumlah		**22**	**132**

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Penambahan jumlah sambungan listrik sesuai standar keselamatan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah tercapai 16.147 sambungan rumah (SR) yang ditambah dengan sambungan baru pelanggan PLN bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY, program CSR, program BPBL (APBN) dan secara mandiri sejumlah 2.464 sambungan rumah sehingga sampai dengan tahun 2024 tercapai 18.547 sambungan rumah (SR). Adapun rincian penambahan jumah rumah tangga miskin berakses listrik tahun 2024 yaitu:

a) Kegiatan LIT PPILN sejumlah 181 sambungan rumah tangga;
b) Kegiatan melalui APBN (program BPBL) telah terpasang sejumlah 2.200 sambungan rumah tangga;
c) Kegiatan melalui APBD sejumlah 25 sambungan rumah tangga;
d) Kegiatan melalui CSR sejumlah 53 sambungan rumah tangga;
e) Kegiatan penanganan RTLH terintegrasi sejumlah 5 sambungan rumah tangga.

Akses listrik yang aman, andal dan sesuai K2 bagi badan usaha swasta, industri, koperasi, swadaya masyarakat, pendidikan dan kegiatan lainnya juga menjadi fokus perhatian Pemda DIY. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa sektor-sektor tersebut dapat melakukan pengusahaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penyediaan tenaga listrik yang dilengkapi dengan izin dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemda DIY melaksanakan ketugasan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengusahaan ketenagalistrikan, baik pengusahaan/penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan inventarisiasi, pembinaan dan sosialisasi kepada pengusahaan/penyediaan listrik yang belum berizin. Selain itu juga telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan/penyediaan listrik yang telah berizin, agar mematuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin.

2. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY Tahun 2020-2050 merupakan kebijakan Pemda DIY mengenai rencana pengelolaan energi tingkat daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional. RUED memiliki visi yaitu terpenuhinya kebutuhan energi di DIY secara berkelanjutan, berkeadilan, dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di DIY. Sasaran energi DIY meliputi penyediaan dan pemanfaatan energi, pasokan energi dan cadangan energi, pemenuhan kebutuhan energi final, konservasi energi, diversifikasi pasokan energi, peningkatan akses energi masyarakat. Pasokan energi ke DIY adalah merupakan penyediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG) dari PERTAMINA serta energi listrik dari PLN yang dipasok melalui sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (JAMALI). Pasokan energi bahan bakar adalah berupa Minyak Bumi, Gas Bumi dan EBT BBN (yaitu biofuel yang terkandung dalam BBM) dari PERTAMINA. Pasokan energi listrik adalah terdiri atas pasokan listrik dari PLN melalui sistem kelistrikan JAMALI serta EBT listrik lokal. Pemakaian energi final adalah pemakaian BBM, BBN, gas (LPG), dan listrik. Kebutuhan energi sektoral adalah kebutuhan energi total untuk seluruh sektor pengguna (baik berupa bahan bakar maupun listrik) yaitu sektor-sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, serta sektor lainnya.

Kebijakan terkait dengan EBT dan konservasi energi sesuai dengan RUED DIY adalah meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat DIY, mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi di DIY, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi di DIY, serta mendorong

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan di DIY. Bauran energi daerah yang telah dicapai DIY pada tahun 2023 berdasarkan surat dari Dewan Energi Nasional pada bulan Desember tahun 2024 adalah 93,09% minyak bumi, 6,91% energi baru terbarukan (EBT), gas bumi 0%, dan batu bara 0%. Berikut capaian bauran energi di DIY tahun 2023.

Tabel 2- 138 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2023

No.	Jenis	MTOE	Persentase (%)
1.	Energi Baru Terbarukan	0,06	6,91
2.	Minyak Bumi	0,86	93,09
3.	Gas bumi	0	0
4.	Batu bara	0	0

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2024

Realisasi kontribusi EBT pada bauran energi daerah di DIY meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 6,47% (0,06 MTOE). Kenaikan tersebut didukung dari meningkatnya pemanfaatan biodiesel (0,04 MTOE) dan pembangunan PLTS Atap (0,03 MTOE). Selain itu, terdapat PLT Biomassa dari ampas tebu sebesar 3,84 MW. Potensi EBT di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil. EBT di DIY yaitu minyak bumi masih mendominasi, dan DIY tidak memiliki pembangkit gas bumi dan batubara. Berikut data potensi jenis energi baru terbarukan di DIY dan dengan kondisi yang sudah terpasang.

Tabel 2- 139 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2020-2024

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
PLTS						
Potensi						
Kapasitas	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	MWp
TOE	8.695,65	8.695,65	8.695,65	8.695,65	8.695,65	TOE
Terpasang						
Kapasitas	0,604	0,629	0,742	3,043	4,079	MWp
TOE	525,22	546,96	645,22	2.646,36	3.546,91	TOE
PLT Bayu						
Potensi						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kapasitas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	MW
TOE	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	TOE
Terpasang						
Kapasitas	0,063	0,063	0,063	0,063	0,060	MW
TOE	94,72	94,72	94,72	94,72	94,72	TOE
PLT Bagasse						
Potensi						
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	MWp
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	TOE
Terpasang						
kapasitas	2,50	2,50	3,84	3,84	3,84	MWp
TOE	873,00	873,00	9.237,91	9.237,91	9.237,91	TOE
PLT Sampah						
Potensi						
kapasitas	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	MWp
TOE	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	TOE
Terpasang						
Kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KW
TOE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	TOE
Biogas Ternak Sapi						
Potensi						
kapasitas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Unit
TOE	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	
Terpasang						
kapasitas	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	Unit
TOE	961,68	961,68	961,68	961,68	961,68	

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

3. Sub Urusan Kegeologian

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah telah memuat ketentuan-ketentuan pemberian izin (bagi pelaku usaha) untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha maka perizinan pengusahaan air Tanah beralih dari Pemda DIY ke Badan Geologi Kementerian ESDM.

Sampai saat ini kondisi penurunan muka air tanah di DIY masih dalam kategori aman yaitu <20%. Kondisi air tanah dalam kategori aman ini harus dijaga, apalagi di DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemanfaatan air tanah masih lebih tinggi dibandingkan air permukaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena harga air baku untuk air tanah lebih rendah daripada tarif air permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan air tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan air permukaan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah yang telah dilakukan Pemda DIY, kondisi rerata penurunan muka air tanah di DIY dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 140 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2020 – 2024

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2021	2022	2023	2024	
Kulon Progo					
Musim Kemarau	2,76	3,46	2,08	1,67	%
Musim Hujan	2,45	2,51	1,11	1,36	%
Bantul					
Musim Kemarau	4,53	4,59	4,14	4,32	%
Musim Hujan	3,32	3,69	3,43	3,24	%
Gunungkidul					
Musim Kemarau	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Musim Hujan	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Sleman					
Musim Kemarau	7,27	7,07	7,28	7,49	%
Musim Hujan	5,56	5,62	4,88	5,25	%
Kota Yogyakarta					
Musim Kemarau	9,92	9,54	10,81	11,04	%
Musim Hujan	8,07	8,24	7,87	9,51	%

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Rerata penurunan muka air tanah pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada saat musim hujan. Rerata penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya karena pengusahaan air tanah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya. Rerata penurunan muka air tanah baik pada musim hujan dan musim kemarau masih dalam kategori aman yaitu kurang dari 20%. Namun, pengusahaan air tanah harus mempertimbangkan perbandingan antara total volume pengusahaan air tanah dengan total volume cadangan dinamis air tanah yang dapat dimanfaatkan. Apabila volume pengusahaan air tanah lebih kecil dari volume ketersediaan air tanah, maka keberadaan air tanah pada akuifer tetap terjaga/tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Diperlukan upaya berkesinambungan antara *stakeholder*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan. Di Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat data rerata penurunan muka air tanah karena kondisi atau tipe cekungan air tanah Wonosari berbeda dengan cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman dan Wates. Kondisi cekungan air tanah Wonosari berupa akuifer celah atau sungai bawah tanah, sehingga sebarannya sangat tidak merata dan data muka air tanah tidak mudah untuk digeneralisir.

4. Sub Urusan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

a. pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
b. pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
c. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Wilayah pertambangan DIY sebagai dasar pengelolaan pengusahaaan pertambangan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana mengalami perubahan luasan wilayah pertambangan menjadi seluas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

42.944 hektar yang telah mempertimbangkan dan mengakomodir perubahan peruntukan dan kepentingan masing-masing Kabupaten di DIY. Ke depan perlu dilakukan review wilayah pertambangan untuk mengetahui kembali kelayakan potensi komoditas tambang, penyesuaian dengan Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah terbaru, kepentingan Kabupaten serta aspirasi dari masyarakat.

Luas pengusahaan pertambangan yang diperoleh dari luas izin yang diterbitkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kontrak Karya (KK) di DIY sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 3.966,68 hektar, atau sebesar 9,23% dari luasan kawasan peruntukan pertambangan. Berikut data luas pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2- 141 Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

No.	Jenis Izin	Luas (Ha)
1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus	2.977,09
2.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	902,77
3.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	29,77
4.	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	34,8
5.	Izin Usaha Pertambangan Penjualan	22,25
	Total	3.966,68

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan melalui penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang yg telah disetujui Gubernur, disusun oleh pemegang IUP sebelum IUP terbit. Pelaksanaan dilakukan oleh pemegang IUP dan penilaian dilakukan oleh Pemda bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Sedangkan pada lokasi pertambangan rakyat, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dilakukan oleh Pemda dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang IPR bersama Pemda. Rencana reklamasi dan pasca tambang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kesepakatan dengan pemilik lahan dan kesesuaian dengan tata ruang. Bentuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang telah dilakukan yaitu pengembalian alur sungai melalui penguatan tanggul, revegetasi dan pembuatan jenjang agar tidak terjadi longsor.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih banyak terjadi di DIY. Pemda DIY melalui BP3ESDM bertugas menginventarisasi lokasi dan data PETI seperti jumlah dan jenis alat serta jumlah pekerja. Dalam usaha penyelesaian permasalahan PETI telah dilakukan operasi gabungan antara pemda melalui OPD terkait dengan aparat penegak hukum. Namun, beberapa kali operasi gabungan yang telah dilakukan ini mengalami kegagalan, di mana saat di lapangan, semua kegiatan pertambangan tersebut dihentikan serta alat berat dan pekerja telah dimobilisasi.

2.2.2.3.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2024, nilai ekspor DIY mencapai 547 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 472,30 Juta US$ dengan negara tujuan terbesar Amerika Serikat disusul Jerman dan Jepang.

Sedangkan nilai ekspor DIY menurut golongan barang pada tahun 2024, didominasi tiga komoditas dengan kontribusi terbesar yaitu kain rajutan sebesr 20,51%, lokomotif dan peralatan kereta api 11,99% dan filamen buatan 9,50%. Sementara itu, sampai Desember 2024 nilai impor DIY mencapai 132,10 Juta US$. Impor DIY diantaranya berasal dari Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam. Negara pemasok barang impor terbesar adalah Tiongkok, Hongkong dan Amerika Serikat dengan masing-masing sebesar 39,62%, 19.12%, dan 16,12%.

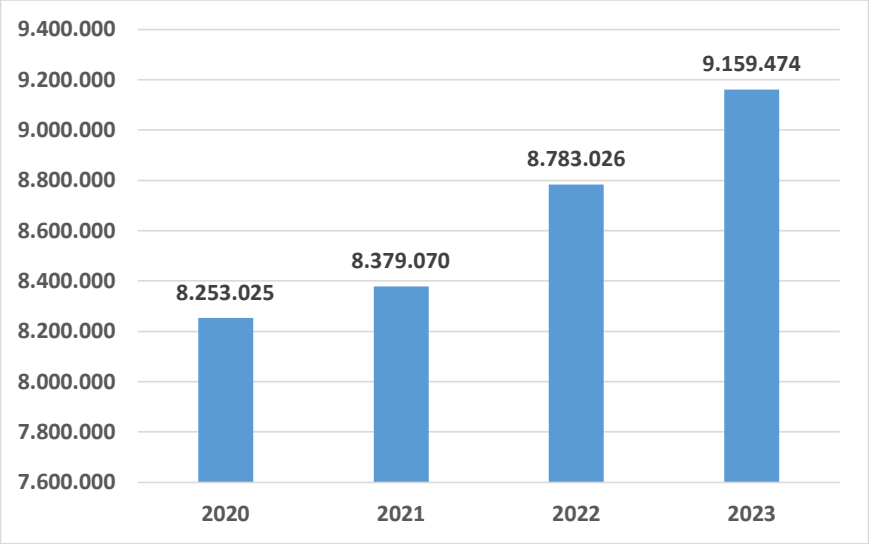
Tabel 2- 142 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2020-2024 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor (nilai FOB)	398,60	557,00	583,30	472,30	547
Impor (nilai CIF)	124,80	153,80	145,60	132,10	172,92
Rasio E/I	3,20	3,62	4,00	3,57	3,16

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan Subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang dengan tujuan untuk disalurkan/didistribusikan tanpa mengubah sifat barang. Dalam perhitungannya, subsektor perdagangan dikelompokkan kedalam dua jenis kegiatan, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Capaian Nilai Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY tahun 2023 sebesar 9.159.474 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang mencapai 8.783.026 juta rupiah

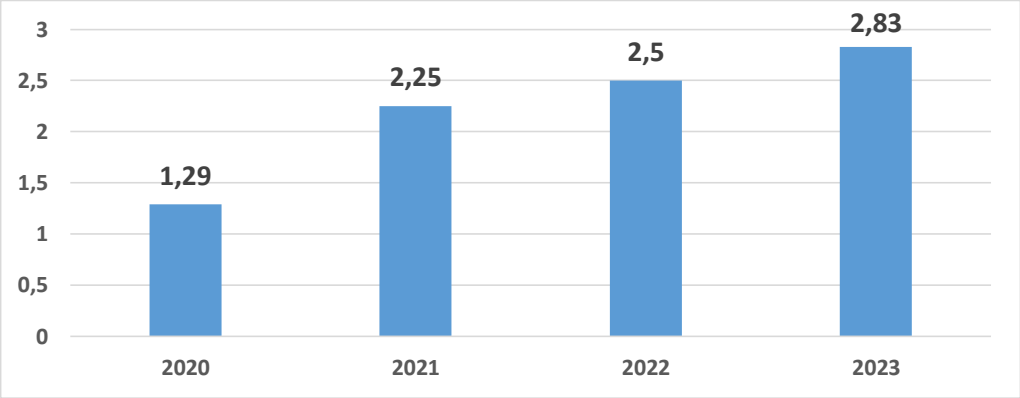


Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 90 Nilai Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY Tahun 2020 - 2023

Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina mengalami peningkatan setiap tahun ,pada tahun 2023 sebesar 2,83 milyar rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang mencapai 2,5 milyar rupiah.Tumbuhnya IKM/UMKM seiring dengan meningkatnya permintaan produk'-produk komoditi pangan dan sandang, serta kendaraan bermotor,banyak diselengarakan pameran atau bazaar, tersedianya sarana dan prasarana pendukung kemudahan transaksi (qris, e'-*money* dan lain-lain) sehingga mendukung permintaan produk'-produk DIY. Serta adanya program Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

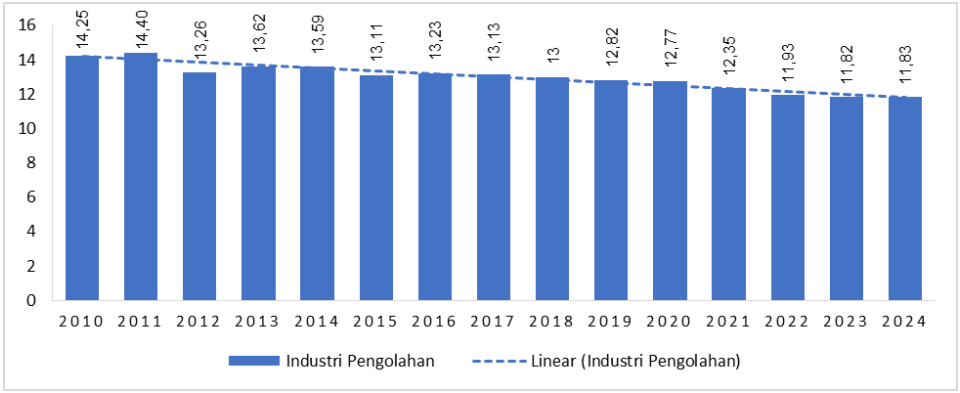


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2024

Gambar 2- 91 Jumlah Omset Usaha yang Dibina Tahun 2020 - 2023

2.2.2.3.6 Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan menempati urutan teratas dalam perekonomian di DIY. Namun demikian, dinamika sektor industri pengolahan di DIY menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun 2010 sampai 2024, meskipun pergerakan antar tahun menunjukkan perubahan kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2010 adalah 14,25%. Sektor ini sempat mencapai kontribusi tertinggi yaitu 14,40% di tahun 2011, sampai dengan tahun 2023 menurun menjadi 11,82%. Kontribusi sektor industry pengolahan pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2023 menjadi 11,83%, namun angka tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2010.

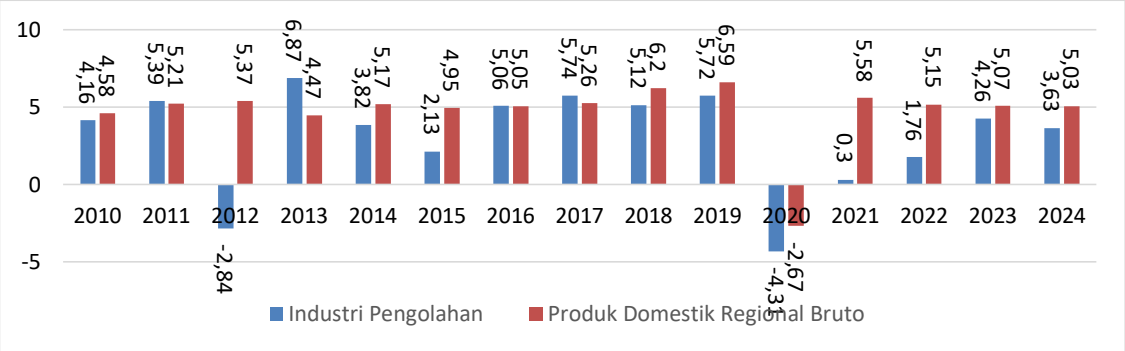


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 92 Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2010-2024 (%)

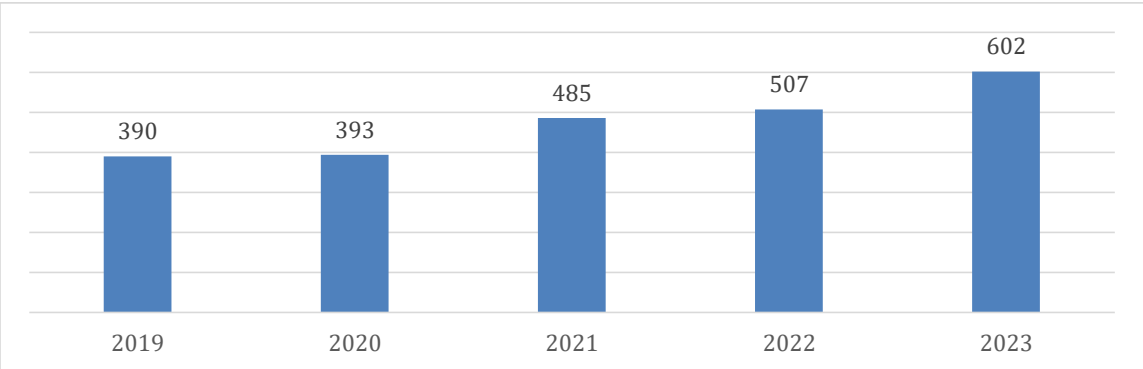
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan disebabkan karena laju pertumbuhan sektor ini mengalami pelambatan. Dalam kurun waktu dekade terakhir, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY. Pada saat pandemi Covid-19 misalnya, sektor industri pengolahan terkontraksi lebih dalam daripada rata-rata PRDB. Selanjutnya, empat tahun pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, kinerja pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan yang perlu dihadapi terkait perlunya peningkatan daya saing, perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta bagaimana mencari alternatif strategi karena perubahan permintaan pasar akibat dampak kondisi geopolitik global. Oleh karena itu, revitalisasi dan transformasi sektor industri pengolahan menjadi hal penting yang harus dilaksanakan dalam upaya menjaga dominasinya dalam pembangunan ekonomi daerah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 93 Perbandingan antara Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB DIY Tahun 2010-2024 (%)

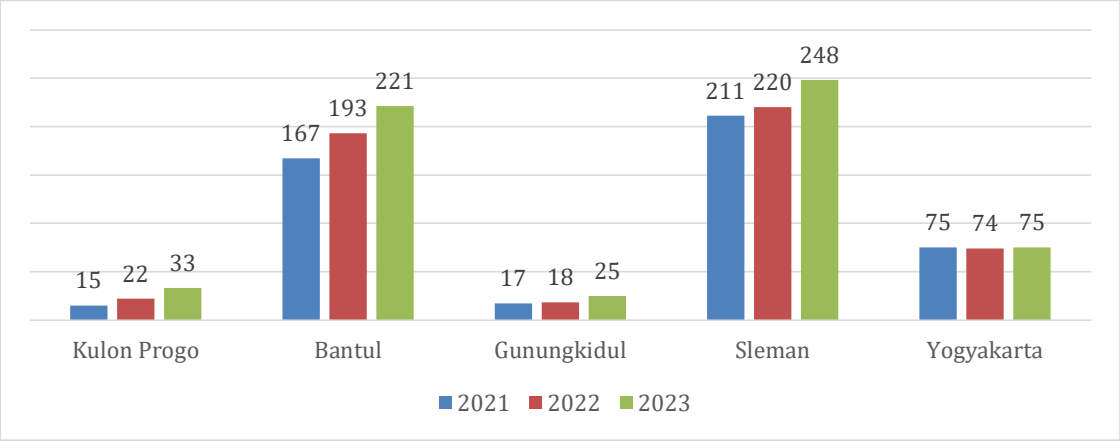


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2- 94 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2019-2023

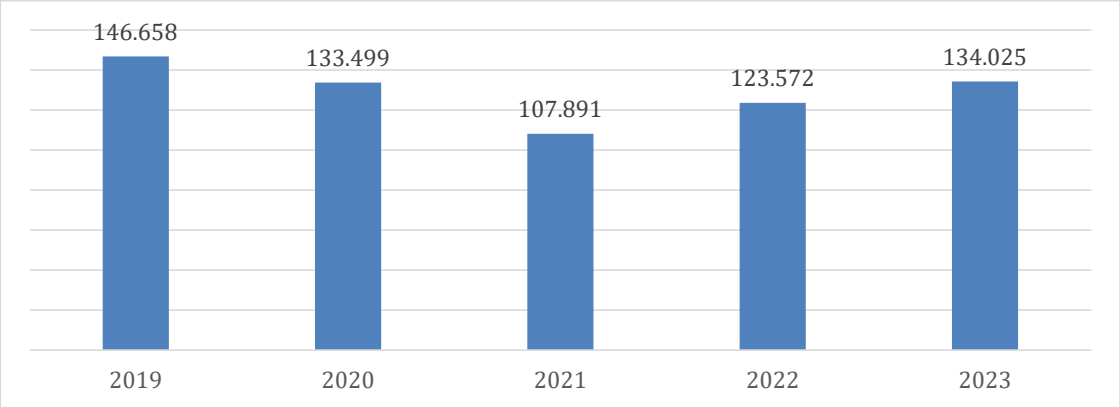
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang yang aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 602 perusahaan, terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang aktif terbanyak terjadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sama-sama mengalami kenaikan sebesar 28 perusahaan aktif dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sementara peningkatan jumlah Industri Besar/Sedang aktif relatif kecil di Kabupaten Kulon Progo dan di Kota Yogyakarta, yaitu hanya tambah 1 perusahaan aktif pada periode yang sama. Tantangan aksesibilitas terhadap sumber daya seperti infrastruktur dan kualitas tenaga kerja menjadi isu penting yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di seluruh daerah DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2- 95 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

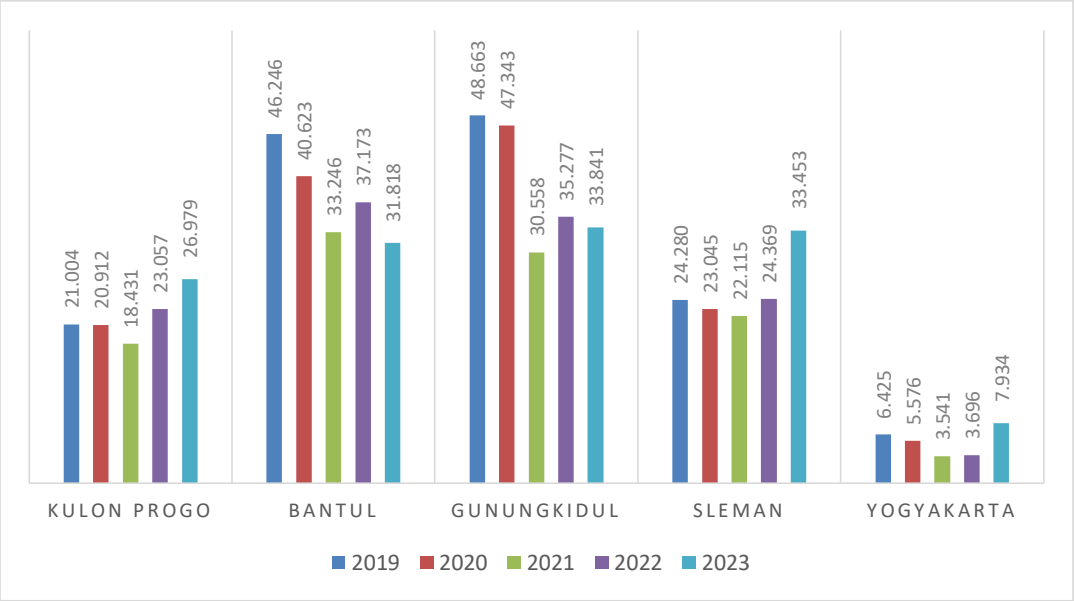


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 96 Jumlah Industri Mikro dan Kecil di DIY 2019-2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Industri Mikro dan Kecil merupakan sektor yang sangat berperan menjadi penopang perekonomian di wilayah DIY. Jumlah industri mikro dan kecil di DIY dalam periode tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Jumlah industri mikro kecil di DIY pada tahun 2019 sebesar 146.658 unit usaha. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya usaha industri mikro dan kecil yang gulung tikar, sehingga mengalami penurunan dan jumlah industri mikro kecil terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 107.891 unit usaha. Namun pada tahun 2022, geliat industri mikro kecil mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 123.572 unit usaha, dilanjutkan dengan peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 134.025 unit usaha



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 97 Perkembangan Jumlah IMK menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

Perkembangan jumlah usaha industri mikro kecil menurut kabupaten/kota di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah usaha industri mikro kecil tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 48.663 unit usaha atau sebesar 33,18% dari total usaha industri mikro kecil di DIY, diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan terrendah kota Yogyakarta sebesar 6.425 unit usaha atau sebesar 5,74%. Namun pada tahun 2021, jumlah industri mikro kecil di Kabupaten Gunungkidul mengalamu penurunan cukup drastis sehingga menyebabkan dominasi industri mikro kecil berpindah dari Kabupaten Gunungkidul ke Kabupaten Bantul sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

33.246 unit usaha atau sebesar 30,81%, baru kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 30.558 unit usaha atau sebesar 28,32%. Sementara itu ditinjau dari data tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul kembali mendominasi usaha industry mikro kecil di DIY dengan capaian sebesar 33.841 atau sebesar 25,25% dari total usaha industry mikro kecil di DIY, diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 33.453 unit usaha atau sebesar 24,96%, Kabupaten Bantul sebesar 31.818 unit usaha atau sebesar 23,74%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 26.979 unit usaha atau sebesar 20,13%, dan posisi terakhir ditempati Kota Yogyakarta dengan jumlah industry mikro kecil sebesar 7.934 unit usaha atau sebesar 5,92%. Dari data BPS tersebut, terlihat bahwa sebaran industry mikro kecil di DIY sudah cukup merata kecuali di Kota Yogyakarta. Industri mikro kecil dikategorikan sebagai usaha informal dengan produktivitas dan penggunaan teknologi yang masih rendah , meskipun sudah mulai menunjukkan kemampuan berinovasi dalam penggunaan teknologi. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh industri mikro kecil di DIY antara lain keterbatasan akses permodalan, pemsaran, bahan baku, pendampingan/pelatihan, serta kemitraan.

2.2.2.3.7 Urusan Transmigrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah asal pengirim calon transmigran, telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah provinsi yang menjadi daerah tujuan penempatan transmigran dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi. Kemitraan ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah dan mengefektifkan proses penyelenggaraan transmigrasi. Melalui kerja sama yang terjalin, diharapkan berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin timbul dalam proses transmigrasi dapat diantisipasi dan diminimalisir sedini mungkin, sehingga pelaksanaan program transmigrasi dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan transmigrasi, mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pembinaan dan pemberdayaan transmigran di lokasi tujuan. Dengan demikian, diharapkan transmigrasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama kurun 2020-2024, Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 106 KK. Jika dilihat dari

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2020 hingga 2024 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 28 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kulon Progo dengan jumlah 6 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2020-2024.

Tabel 2- 143 Tabel pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY Tahun 2020-2024

NO	Jumlah Transmigrasi (KK)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kulon Progo	0	0	2	2	2
2	Bantul	0	5	15	4	4
3	Gunungkidul	0	5	14	5	2
4	Sleman	0	0	12	5	6
5	Kota Yogyakarta	0	5	8	4	6
	Total	**0**	**15**	**51**	**20**	**20**

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Alokasi penempatan transmigrasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dilihat dari tabel alokasi transmigrasi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigran dikarenakan pemerintah pusat menghentikan sementara penempatan transmigrasi sebagai dampak pandemi COVID-19. Dibuka kembali pada tahun 2021 dengan alokasi 10 KK, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 30 KK dan tahun 2023 kembai turun menjadi 20 KK dan tahun 2024 alokasi tetap sebanyak 20 KK. Realisasi pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama tahun 2020 – 2024 sebanyak 80 KK. Pemda DIY dapat memenuhi alokasi kuota pengiriman transmigran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Bantul dan Gunungkidul cenderung memiliki jumlah transmigran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Terkait gender secara umum jumlah transmigran laki-laki dan perempuan relatif seimbang di setiap wilayah dan tahun.

Jumlah transmigran menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencatat angka tertinggi, diikuti penurunan drastis di tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat lagi di 2022, dan menurun kembali di 2023. Bantul dan Gunungkidul cenderung memiliki jumlah transmigran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, terutama pada tahun 2019 dan 2022. Terkait gender secara umum jumlah transmigran laki-laki dan perempuan relatif seimbang di setiap wilayah dan tahun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

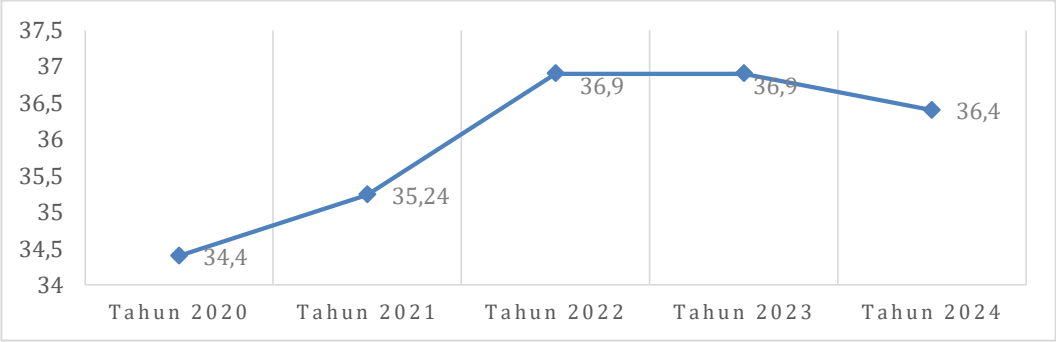
Tabel 2- 144 **Tabel Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Dan Gender Tahun 2019-2023**

No	Jumlah Transmigrasi (Jiwa)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kulon Progo	24,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2	Laki-laki	15,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3	Perempuan	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00
4	Bantul	54,00	0,00	16,00	47,00	12,00
5	Laki-laki	24,00	0,00	8,00	28,00	7,00
6	Perempuan	30,00	0,00	8,00	19,00	5,00
7	Gunungkidul	50,00	0,00	17,00	42,00	16,00
8	Laki-laki	28,00	0,00	10,00	22,00	7,00
9	Perempuan	22,00	0,00	7,00	20,00	9,00
10	Sleman	43,00	0,00	0,00	47,00	18,00
11	Laki-laki	24,00	0,00	0,00	27,00	10,00
12	Perempuan	19,00	0,00	0,00	20,00	8,00
13	Kota Yogyakarta	30,00	0,00	16,00	29,00	13,00
14	Laki-laki	15,00	0,00	9,00	16,00	6,00
15	Perempuan	15,00	0,00	7,00	13,00	7,00
Total		201,00	0,00	49,00	172,00	66,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.2.2.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan ikan per kapita DIY cenderung mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2024. Namun ketersediaan ikan di DIY mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,4 kg/kapita/tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan pasokan ikan dari luar daerah mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain produksi perikanan dari DIY terus meningkat. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:

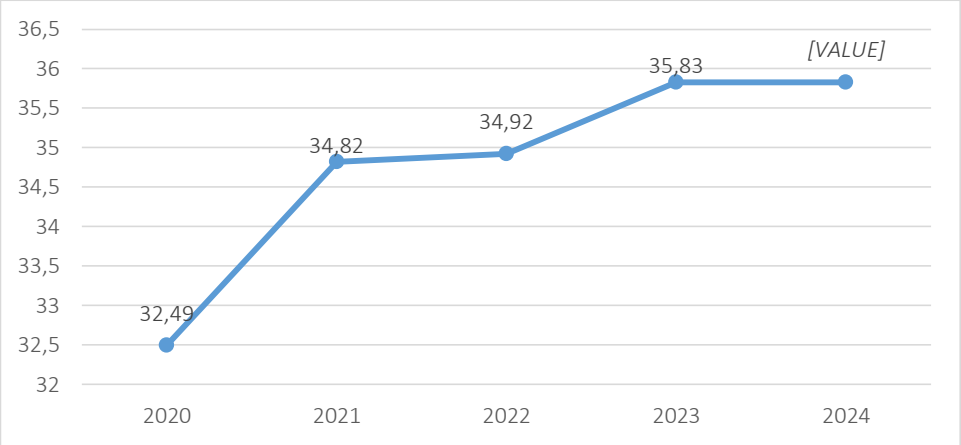


Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 98 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Konsumsi ikan di DIY pada kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren meningkat. Konsumsi ikan di DIY tahun 2022 mencapai 34,92 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 56,48 kg/kapita/tahun. Oleh karena itu, kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 99 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2020-2024

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY didukung peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Pada tahun 2024, produksi perikanan budidaya 97.495 ton, atau 92,98% dari total produksi perikanan DIY. Faktor pendukung capaian produksi perikanan budidaya diantaranya penggunaan benih yang unggul, keberhasilan pengendalian hama penyakit ikan, permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan hasil budidaya, dan penggunaan pakan mandiri.

Tahun 2024 produksi perikanan budaya dan tangkap mencapai 104.848 ton yang mana menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 100.439 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2024 mencapai 97.495 ton yang mana sumbangan terbesarnya yaitu sebesar 97% berasal dari kolam kemudian diikuti tambak 2,7% dan sisanya dari sawah dan karamba. Perikanan tangkap sendiri terdiri dari dua yaitu tangkap laut dengan produksi 5.363 ton dan tangkap perairan umum 1.989 ton.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun perkembangan produksi ikan tangkap tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 145 Produksi Perikanan DIY Tahun 2020-2024 (Ton)

No	Elemen	Tahun (dalam ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Produksi Tangkap laut	4.906	5.212	4.904	5.476,13	5.363,71
2	Produksi Tangkap Perairan Umum	1.686	1.910	2.168	2.022,53	1.989,06
3	Budidaya					
a	Kolam	90.161	92.190	92.552	93.912	94.754
b	Tambak	3.365	4.001	4.306	3.444	2.664
c	Sawah	304	194	226	144	69
d	Karamba	17	16	18	11	8
	Total	100.439	103.523	104.174	105.010	104.847,77

Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap laut didukung oleh 3.811 nelayan laut yang ada di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah terbanyaksebesar 2.205 orang kemudian Kabupaten Kulon Progo 957 orang dan Kabupaten Bantul 649 orang. Jumlah nelayan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2.963 orang. Selanjutnya untuk perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2024 terbanyak ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.208 orang diikuti Kabupaten Bantul 949 orang, Kabupaten Gunungkidul 441 orang, Kota Yogyakarta 230 orang dan Kabupaten Sleman 91 orang.

2.2.2.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.2.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

1. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Daerah DIY menyusun regulasi tingkat daerah yang meliputi produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah DIY melakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri RI untuk memenuhi ketentuan penyusunan produk hukum daerah yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tabel 2- 146 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2020-2024

No	Produk Hukum	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Produk Hukum yang Diunggah dalam Website JDIH	820	999	617	323	739

Sumber : Dataku Bapperida DIY, 2025

Atas berbagai produk hukum daerah tersebut telah dilakukan pendokumentasian dan penyebarluasan. Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pengunggahan melalui Jaringan Dokumentasi informasi hukum (JDIH), dan penyampaian Lembaran daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan ke pemangku kepentingan.

Di samping itu, Pemerintah Daerah DIY juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY melalui kegiatan konsultasi, fasiltasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota. Adapun data pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2- 147 Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

No.	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Nomor Register	72	72	30	30	n/a
2	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	27	29	5	15	24
3	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	45	43	40	65	54

*Ket: *) Data sementara*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Pemerintah Daerah DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak luput dari konsekuensi adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan timbulnya gugatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ataupun tuntutan yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Dengan kondisi demikian, Pemerintah Daerah DIY juga dapat melakukan upaya penyelesaian permasalahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Tabel 2- 148 Jumlah Bantuan dan Layanan Hukum Tahun 2020-2024

No.	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Putusan Pengadilan	8	6	1	4	4
2	Jumlah Telaah Penyelesaian Permasalahan Non Litigasi	n/a	n/a	8	46	2
3	Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus	100	100	100	105	187

*Ket: *) Data Sementara*

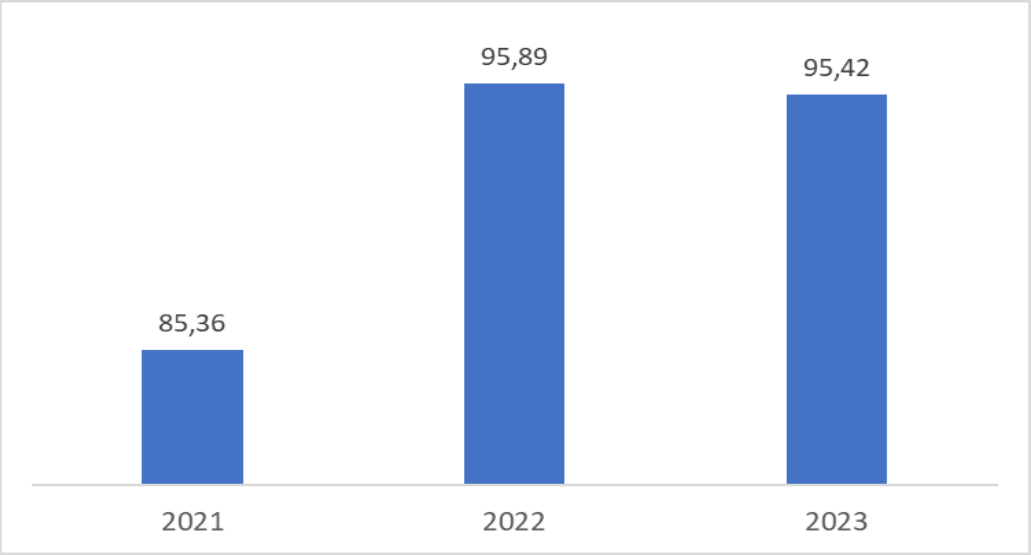
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi hukum pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2023 adalah 96,64 dengan kategori AA (Istimewa). Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum dan HAM RI, masih terdapat hal-hal yang perlu untuk dioptimalkan diantaranya: 1). Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah; 2). Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3). Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; dan 4). Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan *existing*/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota).

Supremasi hukum tidak terlepas dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAMyang harus dilakukan oleh Pemerintah. Kondisi P5 HAM di DIY dapat dilihat dari hasil pelaksanaan rencana aksi HAM oleh Pemda. Pada tahun 2023, seluruh Kabupaten/kota di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DIY sudah masuk dalam katagori Peduli HAM. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari seluruh Kabupaten/kota di DIY untuk memenuhi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat,hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak. Pencapaian rencana aksi HAM Pemda DIY selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan hasil yang optimal dan diharapkan terus dapat dipertahankan sebagai perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAM.



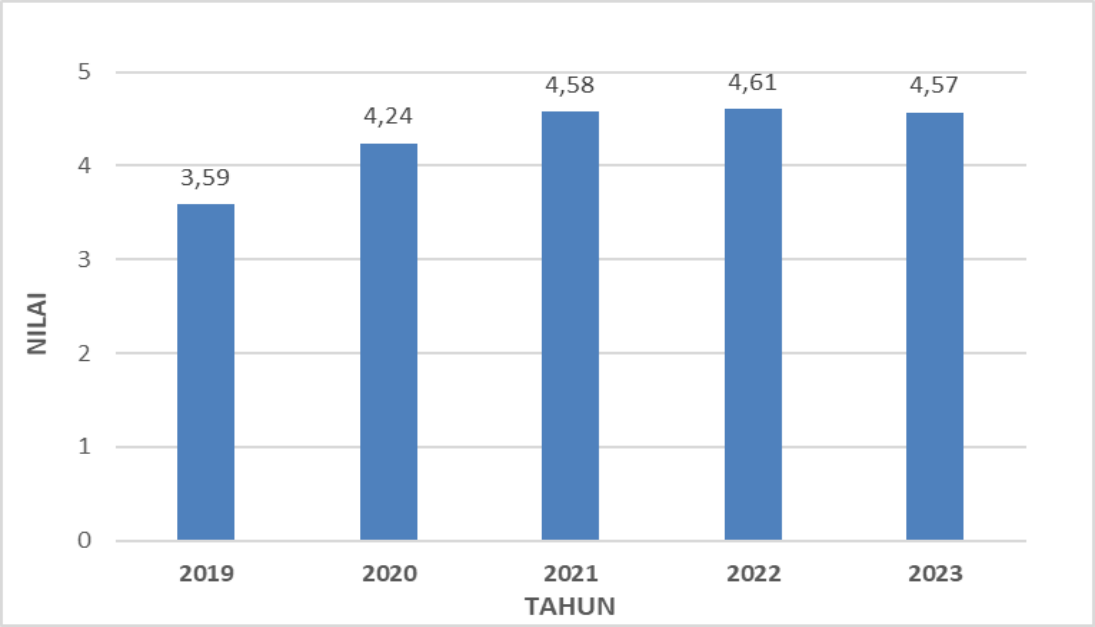
Sumber: Kanwil Kemenkumham DIY, 2024

Gambar 2- 100 Pencapaian Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2023 (%)

2. Pelayanan Publik

Pemerintah DIY terus melakukan berbagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, kualitas pelayanan publik di DIY mengalami peningkatan yang ditunjukkan salah satunya dengan meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Berdasar hasil evaluasi, nilai IPP yang cenderung meningkat, menunjukkan bahwa Pemda DIY telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Gambar 2- 101 Grafik Indeks Pelayanan Publik Pemda DIY Tahun 2019 - 2023

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu Standar Pelayanan Publik ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik ;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sarana dan Prasarana, Fasilitas ; Pelayanan Khusus ; Pengelolaan Pengaduan ; Penilaian Kinerja ; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan ; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah) ; 51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) ; dan 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selama 2016-2024, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, 2021, 2022, 2023, dan 2024 DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65; 97,05; 91,15;94,18; dan 97,22.

Tabel 2- 149 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)	91,15 (Tinggi)	94,18 (Tinggi)	97,22 (Tinggi)

Sumber : ORI, 2016-2024

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D ; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C ; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B ; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.Perkembangan selama 2018-2024 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 79,61 pada Tahun 2018 naik menjadi 87,03 pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tahun 2024, 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah menyampaikan laporan SKM.Berdasarkan hasil penyampaian laporan SKM Pemda DIY tahun 2024 dapat diketahui bahwa tiga unsur pelayanan dengan nilai terendah yaitu Waktu Pelayanan, Produk Layanan dan Prosedur Pelayanan.Seluruh SKPD yang telah menyampaikan laporan SKM diharapkan dapat melaksanakan tindak lanjut terhadap minimal 3 (tiga) unsur terendah hasil SKM dan hasil tindak lanjut tersebut disampaikan dalam bentuk laporan tindak lanjut SKM kepada Biro Organisasiuntuk di kompilasi dan hasilnya dilaporkan kepada Kemenpan RB.

Tabel 2- 150 Survei Kepuasan Masyarakat 2018-2024

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,61	82,69	83,64	84,73	85,36	86,67	87,03

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY, 2024

2.2.2.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kebutuhan sarana diantaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya.

Sekretariat DPRD memfasilitasi berbagai agenda DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam memfasilitasi fungsi DPRD DIY yang dilakukan pada periode 2024-2029 setidaknya sudah dapat mengakomodir pembentukan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah Istimewa).

Tabel 2- 151 Perkembangan Produk Hukum DPRD DIY yang Dihasilkan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Peraturan Daerah	11	8	13	12	7
Peraturan Daerah Istimewa	12	0	1	0	2
Peraturan DPRD	9	0	1	0	1
Keputusan DPRD	65	70	78	98	91
Keputusan Pimpinan DPRD	138	125	69	88	54
Program Pembentukan Perda (Propemperda)	5	5	7	9	7
Rancangan Perda yang Disetujui DPRD	6	6	9	7	7
Rancangan Perda yang Diusulkan DPRD	8	7	4	10	8

*Ket: *) Data sementara*

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan kebutuhan sarana di antaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. Sekretariat DPRD memfasilitasi berbagai agenda DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam memfasilitasi fungsi DPRD DIY yang dilakukan pada periode 2019-2023 setidaknya sudah dapat mengakomodir pembentukan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah Istimewa) sebagai berikut:

Tabel 2- 152 Jumlah Fasilitasi Fungsi DPRD DIY Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Produk Hukum				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Propemperda	14 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka	8 prioritas; 3 kumulatif terbuka	10 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka
2	Raperda yang disetujui DPRD dan disahkan menjadi Perda(termasuk kumulatif terbuka)	13	14	5	14	12
3	Raperda inisiatif DPRD	5	5	5	4	5

Sumber : Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024

Kemudian dalam memfasilitasi fungsi anggaran DPRD DIY pada periode 2019-2023 telah dilakukan beberapa fasilitasi diantaranya adalah rangkaian pembahasan APBD (termsuk perubahan APBD) bersama antara DPRD DIY dengan Pemerintah Daerah DIY dan pemangku kepentingan terkait secara rutin tiap tahun yang meliputi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD DIY, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY. Terakhir Sekretariat DPRD juga memfasilitasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa, dan Peraturan Gubernur; pelaksanaan peraturan perundangundangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.2.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sesuai amanat pemerintah, dalam menyusun dokumen perencanaan, Pemerintah DIY telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integtrasi dan pemantauan di lapangan.

Berdasarkan data capaian tahun 2024, persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi sebesar99,21%. sedangkan persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi sebesar 98,11%. Berdasarkan persentase capaian tersebut, perlunya mendorong peningkatan terwujudanya integrasi, sinkronisasi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.

2.2.2.5.2 Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Sementara keuangan daerah meliputi: a). hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b). kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c). penerimaan daerah; d). pengeluaran daerah; e). kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f). kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan Opini BPK yang diperoleh melalui pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, kinerja Pemda DIY dalam pengelolaan keuangan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama empat belas kali berturut-turut. Meskipun demikian, Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pada bagian yang dinilai masih memerlukan perhatian dalam rangka mempertahankan Opini WTP pada masa mendatang. Komitmen Pemda DIY untuk mempertahankan capaian indikator tersebut juga diwujudkan dengan menjadikan indikator tersebut sebagai tolak ukur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

capaian kinerja Sasaran Meningkatnya *Good Governance* yang dituangkan dalam RPJMD 2022-2027.

Selain Opini BPK, kinerja Pemda DIY dalam pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah yang meliputi: a). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; b). Optimalisasi BMD; dan c). Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2- 153 Kinerja Keuangan DIY, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	25%
Optimalisasi BMD	3.069.093.332	5.239.098.025	15.486.233.611	16.108.924.464	2.545.524.976
Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.	100%	100%	100%	100%	72%

*Ket: *) Data Sementara*

Sumber: Dataku, 2024

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diukur dari keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, capaian keberhasilan pengelolaan keuangan setiap periode dilihat dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD yang tepat waktu dan akurat, laporan keuangan daerah yang akuntabel, penatausahaan keuangan daerah yang akurat, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten.Dalam hal optimalisasi PAD, Pemda DIY berupaya untuk menggali potensi baik pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Tabel 2- 154 Perkembangan PAD DIY dan Komponen Pembentuknya, 2019-2023

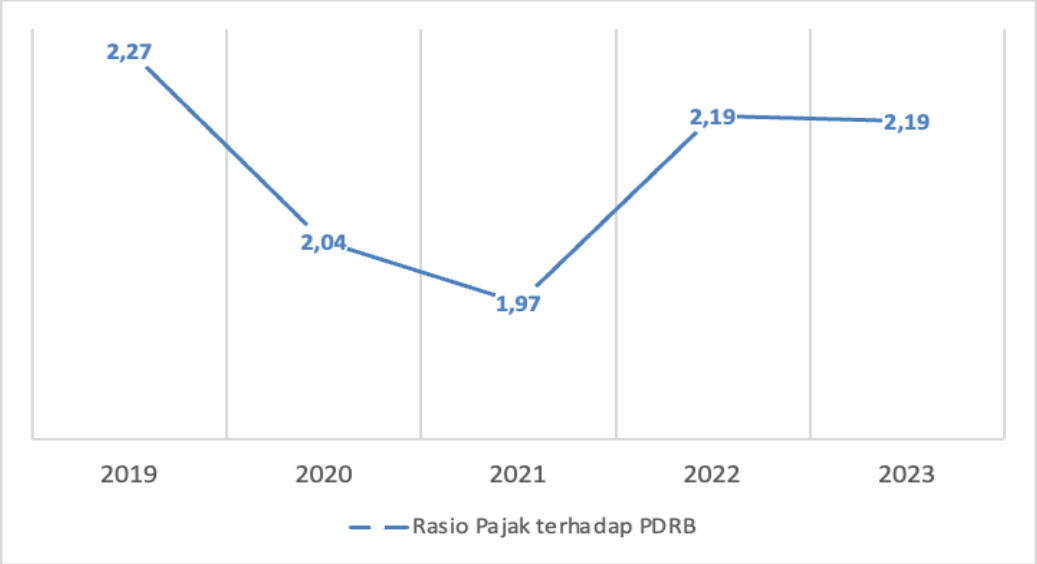
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	**2.082.795.334.434**	**1.876.706.829.353**	**1.900.923.074.880**	**2.263.431.316.667**	**2.368.679.166.251**
Pajak	1.773.940.604.572	1.646.559.198.863	1.688.443.843.923	1.951.267.446.232	2.069.612.267.000
Retribusi	42.420.048.683	36.546.077.142	38.512.949.895	38.249.563.473	33.213.267.052

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.960.824.196	101.460.382.151	96.338.516.913	108.239.513.315	109.790.680.460
Lain-lain PAD yang Sah	180.473.856.983	92.141.171.197	77.627.764.149	165.674.793.647	156.062.951.739

Sumber: BPKA DIY, 2024

Kontribusi terbesar pembentuk PAD DIY berasal dari komponen penerimaan pajak daerah. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan, penerimaan pajak memiliki tren yang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Apabila dilihat dari rasionya terhadap PDRB DIY, penerimaan pajak DIY masih relatif kecil.



Sumber: BPS Provinsi DIY, BPKA DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2- 102 Perkembangan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB DIY, 2019-2023

Untuk meningkatkan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemda DIY berupaya untuk mewujudkan tata kelola BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan berpedoman pada PP Nomor 54 tahun 2017. Penerapan tata kelola BUMD ini bertujuan untuk: a). mencapai tujuan BUMD; b). mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c). mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, elisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD; d). mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; e). meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan f). meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja BUMD, yaitu *Return on Assets* (ROA).

Tabel 2- 155 Perkembangan ROA menurut BUMD DIY Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PT Bank BPD DIY	1,99	1,64	1,71	1,66	1,62
PT Taru Martani	0,69	13,55	17,50	12,94	10,30
PT AMI	9,58	6,47	6,84	2,84	1,33
BUKP DIY	4,42	4,04	2,69	0,53	2,01

Sumber: BPKA DIY, 2024 (diolah)

Pembentuk PAD yang bersumber dari komponen lain-lain PAD yang sah diantaranya berasal dari pendapatan BLUD. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemda DIY membentuk 27 BLUD, yaitu: Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, RS Grhasia, RS Paru Respira, BLPT, serta 22 SMK BLUD. SMK BLUD yang dimaksud, yaitu: 1). SMK N 1 Sewon; 2). SMK N 5 Yogyakarta; 3). SMK N 2 Pengasih; 4). SMK N 2 Wonosari; 5). SMK N 2 Depok; 6). SMK N 1 Saptosari; 7). SMK N 2 Yogyakarta; 8). SMK N 1 Kalasan; 9). SMK N 1 Cangkringan; 10). SMK N 4 Yogyakarta; 11). SMK N 3 Yogyakarta; 12). SMK N 1 Pandak; 13). SMK N 1 Pundong; 14). SMK N 2 Kasihan; 15). SMK N 1 Seyegan; 16). SMK N 1 Nanggulan; 17). SMK N 1 Gedangsari; 18). SMK N 2 Godean; 19). SMK N 1 Wonosari; 20). SMK N 1 Godean; 21). SMK N 6 Yogyakarta; dan 22). SMK N 3 Wonosari.

Penyusunan APBD DIY didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara itu, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mengacuPeraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi. Sampai dengan Tahun 2023, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak tiga belas kali berturut-turut.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tentang transformasi digital, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemda DIY menyusun peraturan peta jalan ETPD. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama lima tahun terakhir pendapatan daerah DIY masih didominasi oleh pendapatan transfer. Pada Tahun 2023 kontribusi pendapatan transfer terhadap pembentukan pendapatan daerah sebesar 59,31% naik dibandingkan tahun sebelumnya 58,90%, dengan pos pendapatan transfer diantaranya berasal dari dana keistimewaan. Sementara itu, kontribusi terbesar kedua pembentuk pendapatan daerah berasal dari PAD. Selama 2018-2023, perkembangan PAD cenderung fluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2022 (40,92%) kemudian menurun di Tahun 2023 (40,56%). Peningkatan PAD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

masih menjadi perhatian serta upaya terus dilakukan di tengah tantangan implentasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2- 156 Proporsi PAD dan Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah2018-2023 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,49	36,54	33,44	33,33	40,92	40,56
Transfer terhadap Pendapatan Daerah	61,15	63,31	66,41	66,54	58,90	59,31

Sumber : BPKA DIY, 2024

2.2.2.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program, dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Tabel 2- 157 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2024

No.	Jenis Jabatan	*Bezetting*	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	38	47	9
2.	Jabatan Administrator	198	225	27

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Jabatan	*Bezetting*	ABK	Selisih
3.	Jabatan Pengawas	382	676	294
4.	Jabatan Pelaksana	2.856	7.165	4.309
5.	Jabatan Fungsional	5.726	8.091	2.365
6.	CPNS	9	0	9
	Jumlah	9.209	16.204	6.995

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas "merit" yang menekankan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini:

(1) Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memperhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat, dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekruitmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

(2) Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, izin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

(3) Promosi

Promosi yang dilakukan di sini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilakasanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

(4) Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggung jawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

(5) Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penilaian pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir. Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

(6) Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai ASN di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemenuhan kesejahteraan pegawai. Di sini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara.

Tabel 2- 158 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2019	10.707	15.543	-4.836	68.88
2020	11.379	15.543	-4.164	73.20
2021	9.502	16.210	-6.708	58.61
2022	9.550	16.210	-6.660	58.91
2023	9.846	16.210	-6.364	60.74
2024	10.649	16.210	-5.561	65.69

Sumber : Jogja Dataku Bappeda DIY, 2024

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan *service* kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif sehingga bisa mendapatkan pejabat yang kompeten di bidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan *merit system* melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, objektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori “III” dengan predikat “baik”. Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori III dengan predikat “baik”. Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi “342”, capaian ini termasuk dalam kategori “IV” dengan predikat “sangat baik”. Setelah mendapatkan predikat sangant baik di tahun 2020, penilaian merit dilakukan setiap dua (2) tahun sekali. Penilaian selanjutnya dilakukan di tahun 2022 dengan capaian skor 349 dengan predikat “sangat baik”. Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 159 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2023

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik
2021	Tidak Dilakukan Penilaian		
2022	349	IV	Sangat Baik
2023	Tidak Dilakukan Penilaian		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

(7) Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut:

Tabel 2- 160 Tata Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024

Eselon	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I	0	0	1	0	1
II	3	2	3	5	13
III	31	34	28	19	112
IV	79	55	47	32	213
Jumlah	113	91	79	56	339

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukenali, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

2.2.2.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Perumusan kebijakan pembangunan dinyatakan berkualitas apabila kebijakan bersifat aplikatif yangberdasarkan bukti-bukti (*evidence*) terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Proses pemilihan rekomendasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan adalah melalui beberapa tahapan yaitu:

a. pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
b. pemilahan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
c. penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2022-2027.

Adapun capaian hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 161 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Rekomendas Terpilih	Total Rekomendasi	Persentase
2020	121	168	72,02%
2021	63	67	94,03%
2022	73	73	100%
2023	197	241	81,74%
2024	249	306	81,37%

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangan di DIY untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerja sama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya kerja sama riset degan perguruan tinggi serta rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

Hasil penelitian dan pengembangan yang dihilirisasi akan melahirkan inovasi dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah ke depan. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi dianggap sebagai kunci untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan ekosistem yang mendukung riset dan pengembangan. Perluasan ruang lingkup inovasi pelayanan publik menjadi penting agar dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pemerintah Daerah DIY memiliki komitmen dalam pengembangan budaya inovasi sebagaimana tercantum dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027. Dalam rangka mensukseskan visi-misi tersebut, telah terbit Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah, yang mengatur penyelenggaraan inovasi daerah di DIY.

Perhitungan indikator persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional, berdasarkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional dibagi jumlah inovasi daerah yang terseleksi dikalikan 100%. Proses seleksi inovasi daerah dilakukan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

a. inovasi daerah sudah dalam tahap penerapan;
b. usia penerapan inovasi daerah maksimal 2 (dua) tahun;
c. semua indikator mandatory dalam kompetisi inovasi nasional terpenuhi; dan
d. nilai prediksi tingkat kematangan minimal 60.

Adapun capaian inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional tahun 2024 adalah 60,26%, yaitu 47 inovasi daerah yang memenuhi syarat kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional dibanding 78 inovasi daerah yang terseleksi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah.

Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai.

Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama daerah.

2.2.2.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung

Unsur Penghubung merupakan salah satu bagian dari Urusan Penunjang yang berfungsi untuk melaksanakan penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan

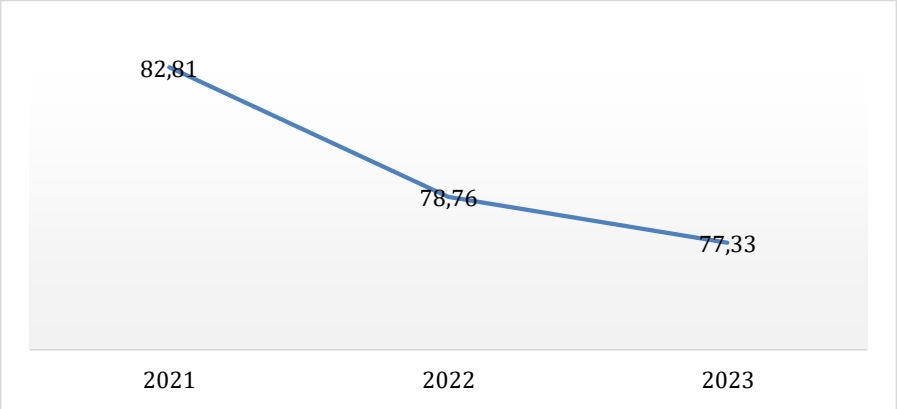
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan fungsi penghubung tersebut diwujudkan antara lain melalui pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah dan terhadap masyarakat DIY di Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah, penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, penyelenggaraan keprotokolan, serta penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia. Pelaksanaan tugas fungsi Unsur Penghubung tersebut untuk menciptakan kinerja yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat, peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung.

2.2.2.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal menjadi bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak lagi memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Korupsi merupakan salah satu faktor negatif yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah dan atas hal tersebut maka diperlukan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan integritas Pemerintah Daerah. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK, Indeks Integritas Pemerintah Daerah DIY mengalami kecenderungan menurun dimana hal ini juga terjadi di level nasional. Sehingga, perlu ada peningkatan tata kelola yang lebih berintegritas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: KPK RI, 2024

Gambar 2- 103 Grafik Status Indeks Integritas di Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021-2023

Pengawasan pemerintahan daerah dilakukan melalui rangkaian pengawasan yang umumnya terdapat temuan dan kemudian diberi rekomendasi atas upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan di wilayah DIY pada waktu berkenaan. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah di DIY dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait dengan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah DIY juga menerapkan sinergi kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap objek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal. Data temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2- 162 Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019-2023

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan						
1.1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Temuan	22	22	24	16	37
1.2	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Rekomendasi	43	53	60	49	74
1.3	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Temuan	518	725	499	490	321

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi	1.284	1.942	940	1221	757
2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan						
2.1	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	%	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00

Sumber : Data diolah, 2024

2.2.2.7 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.2.2.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur

Keistimewaan DIY ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

1) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2) Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
3) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Ruang Garuda Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, pada Rabu 10 Oktober 2012. Dasar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keppres Nomor 87/P/Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017.

Penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-undang Keistimewaan terkait Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tahun 2014. Penetapannya pada tahun 2015 dengan Perdais Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur dikarenakan KGPAA Paku Alam IX wafat pada tanggal 21 November 2015. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 55/P Tahun 2016 tentang Penetapan Wakil

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan 2012-2017. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2017 dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Istana Presiden Jakarta berdasarkan Keppres 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

2.2.2.7.2 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam Urusan kelembagaan DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, bahwa Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Selanjutnya implementasi bentuk kelembagaan yang mencirikan keistimewaan DIY dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diantaranya dengan adanya lembaga yang menangani kewenangan keistimewaan sebagai berikut:

a. Paniradya Kaistimewan;
b. Parampara Praja,
c. Kundha Kabudayan,
d. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Ciri lain penyelenggaraan urusan keistimewaan dari unsur lembaga Pemerintah Daerah DIY, adalah melaksanakan dan mengisi serta makin memperkuat keistimewaan DIY di bawah koordinator urusan keistimewaan di masing-masing lembaga di atas. Dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang–undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut:

a. Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY;
b. Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY;
c. Substansi keistimewaan DIY tidak hanya pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan;
d. Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan.

Dengan latar belakang tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya diselenggarakan oleh Pemda DIY, tetapi merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.7.3 Urusan Kebudayaan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu "Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan. Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
b. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik eropa maupun asia. Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga Indikator jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

2.2.2.7.4 Urusan Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY dilakukan dengan berbagai cara meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; penerbitan sertifikat Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa; penerbitan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta penerbitan izin

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengelolaan tanah kas desa. Hingga tahun 2023, telah dilakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.958 bidang. Jumlah pendaftaran Tanah Desa sampai dengan tahun 2023 mencapai 12.035 bidang. Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD sebesar 40,41% dari perhitungan jumlah pendaftaran sebesar 25.993 bidang terhadap 64.323 bidang yang terdiri dari :

a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 bidang
b. Pendaftaran penyesuaian sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 bidang
c. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang

Pada tahun 2024 telah diterbitkan regulasi sebagai regulasi operasional dari pemanfaatan tanah Desa/kalurahan yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu juga telah terbit 392 Peraturan Desa serta total sudah diterbitkan rekom izin pemanfaatan tanah sejumlah 2.172 rekomendasi (pada tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi tanah SG/PAG dan 24 rekomendasi Tanah desa). Program pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan juga diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi ini tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY yang lebih baik.

Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di DIY terjadi permasalahan pertanahan baik dalam bentuk tukar menukar maupun non-tukar menukar. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terjadi.

2.2.2.7.5 Urusan Tata Ruang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa.

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS merupakan salah satu solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungkit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY. Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS. Selain itu aksesibilitas juga dibangun untuk menghubungkan antar satuan ruang strategis saat ini diantaranya dibangun untuk menghubungkan Satuan Ruang Strategis Prambanan -candi ijo dengan Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu yang dibangun dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat diantaranya menangkap koneksi dengan aksesibilitas Tol Jogja – Solo serta alternatif akses jogja Gunungkidul.

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan symbol simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 163 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
	IKU KEISTIMEWAAN											
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04	12,67
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44	55,29
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30	96,3
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877	22.661

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

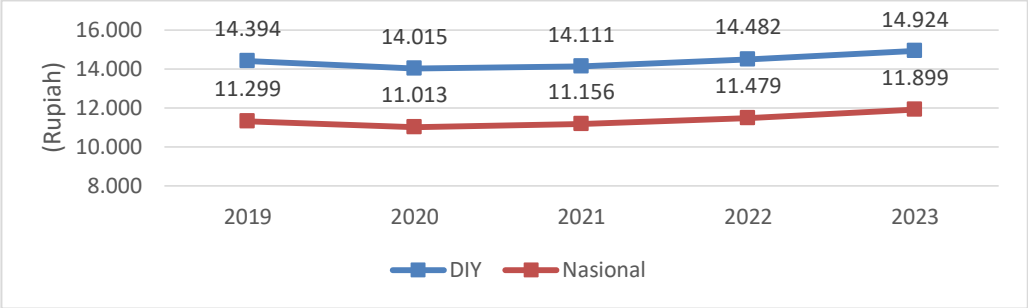
Daya saing adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek daya saing meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas. Selama lima tahun terakhir, capaian atas indikator-indikator tersebut menunjukan dinamika yang fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY selalu di atas rata rata nasional. Nilai tukar petani mengalami kecenderungan meningkat dan bahkan pada dua tahun terakhir berada di atas angka 100, yang berarti bahwa indeks yang diterima oleh petani lebih besar dibandingkan indeks yang dibayarkan oleh petani. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukan bahwa masyarakat DIY memiliki pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Indikator rasio ekspor impor yang selalu diatas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan fluktuasi resiko penduduk terkena kejahatan selama tiga tahun terakhir. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil pada angka 45-46.

2.2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Daya saing daerah dari sisi ekonomi dapat diukur dari daya beli masyarakat, yang menunjukan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur daya beli masyarakat. Masyarakat dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat, yaitu sebesar Rp14.394.000 pada tahun 2019 menjadi Rp14.924.000 pada tahun 2023. Pada nilai tersebut DIY berada diatas nilai rata rata nilai nasional yang sebesar Rp11.899.000 dan di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta sebesar Rp19.373.000 dan Kepulauan Riau sebesar Rp14.998.000 (Badan Pusat Statistik,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

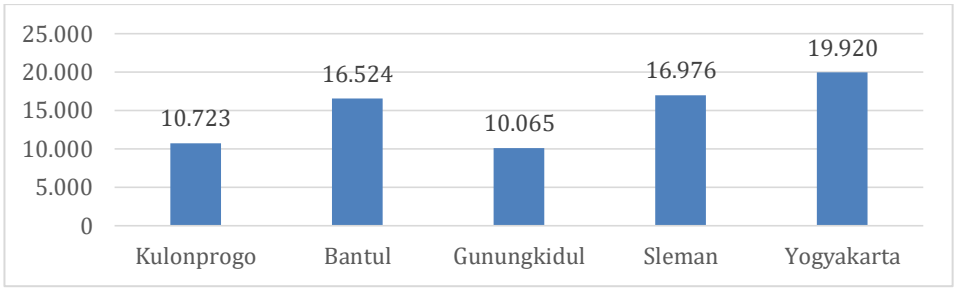
2024). Perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2019-2023) pengeluaran perkapita yang disesuaikan DIY dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 104 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2019-2023 (dalam ribu)

Dari sisi kewilayahan, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi dengan nilai Rp19.920.000,-, sedangkan Kabupaten Gunungkidul pada posisi terbawah dengan nilai Rp10.065.000,-. Nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 105 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan) Tahun 2023

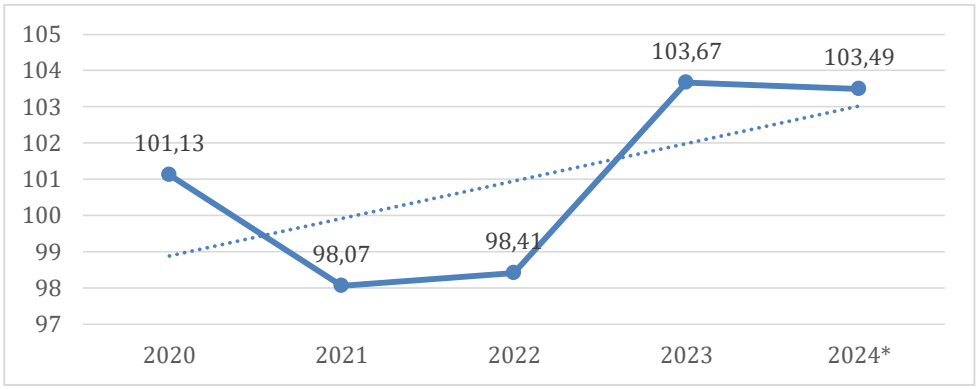
2.2.3.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Nilai NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus karena kenaikan harga barang/jasa yang diproduksi lebih besar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi, sedangkan NTP kurang dari 100 memberikan arti bahwa petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

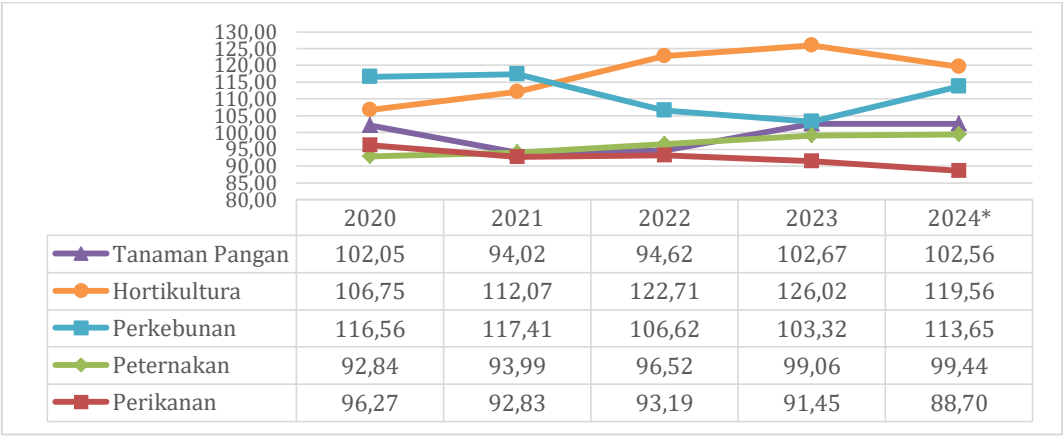
Nilai Tukar Petani DIY cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 101,13 pada tahun 2020 menjadi 103,49 pada tahun 2024. Perkembangan NTP DIY selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024,)Angka Sementara*

Gambar 2- 106 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2020-2024

Berdasarkan sub sektor, perkembangan NTP peternakan dan perikanan selama tahun 2020-2024 menunjukan defisit karena selalu dibawah angka 100. Di sisi lain, NTP subsektor yang konsisten di atas angka 100 adalah perkebunan dan hortikultura. NTP tanaman pangan merupakan subsektor yang tren-mya cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Data perkembangan NTP per subsektor DIY Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



	2020	2021	2022	2023	2024*
Tanaman Pangan	102,05	94,02	94,62	102,67	102,56
Hortikultura	106,75	112,07	122,71	126,02	119,56
Perkebunan	116,56	117,41	106,62	103,32	113,65
Peternakan	92,84	93,99	96,52	99,06	99,44
Perikanan	96,27	92,83	93,19	91,45	88,70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024,)Angka Sementara*

Gambar 2- 107 NTP Per Subsektor Tahun 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan) apabila memiliki nilai lebih dari 50%. Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2019-2023 cenderung menurun yaitu dari tahun2019 sebesar59,21% turun menjadi 58,30% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun2023 persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan DIY berada diatas rata rata nasional yaitu sebesar 51,01% sekaligus nomor dua tertinggi nasional setelah Provinsi DKI Jakarta sebesar 62,18%.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di DIY yang memiliki persentase dibawah 50% selama lima tahun terakhir. Sedangkan kabupaten/kota lainnya cenderung konsisten memiliki nilai lebih dari 50%. Pada tahun 2023, Kota Yogyakarta memiliki presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan tertinggi sebesar 63,31%, diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Sleman masing-masing sebesar 59,12% dan 59,01%.

Tabel 2- 164 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungkidul	46.61	48.14	45.96	46.43	49.47
Kulon Progo	53.12	54.78	51.99	53.86	56.34
Bantul	58.65	57.53	57.29	56.37	59.12
Yogyakarta	60.68	62.54	63.73	66.9	63.31
Sleman	63.82	62.61	61.23	58.45	59.01
D.I Yogyakarta	59.21	58.97	58.06	57.52	58.30

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2019- 2023 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 165 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2019-2023 (dalam persen)

Kelompok Bukan Makanan	2019	2020	2021	2022	2023
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	25,75	24,88	26.52	27.98	26.90
Aneka Barang dan Jasa	16,70	16,67	16.71	15.28	15.44
Barang tahan lama	7,95	8,76	6.82	5.92	6.43
Pajak, pungutan, asuransi	3,50	3,70	4.72	5.19	4.38
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,62	2,84	2.10	1.92	2.12
Keperluan pesta dan upacara	2,69	2,12	1.19	1.23	3.03
Total	59,21	58,97	58.06	57.52	58.30

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

2.2.3.4 Rasio Ekspor-Impor

Daya saing di sektor perdagangan luar negeri suatu daerah dapat ditelusuri melalui indikator rasio ekspor impor. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio ekspor-impor DIY selama tahun 2020-2024 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan internasional. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY selama periode Januari-Oktober 2024 adalah pakaian jadi bukan rajutan; perabot penerang rumah; barang-barang rajutan; barang-barang dari kulit; kertas/ karton, jerami atau bahan anyaman; kayu, barang dari kayu; minyak atsiri, kosmetik, wewangian; benda-benda dari batu, Gips dan semen; serta gula dan kembang gula. Sepuluh komoditas tersebut berkontribusi 92,00 persen dari keseluruhan ekspor DIY. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Perancis, Singapura, dan Malaysia.

Tabel 2- 166 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424.71	403.70	398.80	557.00	583.30
Impor (nilai CIF)	101.97	95.40	124.50	153.80	145.60
Rasio E/I	4.17	4.23	3.20	3.62	4.01

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3.5 Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. Daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Jumlah kejahatan di DIY cukup berfluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan 2023. Pada tahun 2018 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar5.317 turun sampai 4.599 kasus pada tahun 2019 kemudian naik kembali menjadi 5.331 kasus pada tahun 2021 sebelum akhirnya turun kembali menjadi 5.166 kasus pada tahun 2022dan 5.193 di tahun 2023. Pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan peningkatan dari 17 pelaku di tahun 2018 menjadi257 di tahun 2022. Perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 167 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungkidul	287	271	224	281	296	286
Yogyakarta	1,178	744	633	633	736	818
Kulon Progo	441	443	546	485	395	406
Bantul	796	937	953	1,322	1,330	1.016
Sleman	2,615	2,204	2,345	2,610	2,409	2.667
DIY	5,317	4,599	4,701	5,331	5,166	5.193

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Resiko penduduk terkena kejahatan di DIY juga tercatat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, dari setiap 100.000 penduduk terdapat sebanyak 146 penduduk memiliki resiko terkena kejahatan. Angka ini sempat turun pada tahun 2019 menjadi 120 penduduk, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 139 penduduk serta 138 di tahun 2023. Perkembangan resiko penduduk terkena kejatahan selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 168 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungkidul	38	36	30	38	39	37
Yogyakarta	285	172	145	145	196	216
Kulon Progo	98	103	126	112	89	90

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	85	92	93	128	133	100
Sleman	246	181	190	212	212	232
DIY	146	120	121	137	139	138

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2018-2023 kasus klitih cenderung meningkat, dari 32 kasus di tahun 2018 menjadi 70 kasus di tahun 2023. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 304 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2- 169 Data Kasus Kejahatan Jalanandi DIY Tahun 2018-2023

No	Kesatuan	Tahun						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	1	0	0	1
2	POLRESTA Yogyakarta	9	13	12	10	30	13	87
3	POLRES Sleman	10	6	21	16	32	31	116
4	POLRES Bantul	11	-	15	21	4	21	72
5	POLRES Kulon Progo	2	-	6	2	6	2	18
6	POLRES Gunungkidul	-	-	2	1	4	3	10
Jumlah		32	19	56	51	76	70	304

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024

2.2.3.6 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif (penduduk berusia dibawah 15 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2020-2024 relatif stabil di angka 45-46. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif di DIY mempunyai tanggungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebanyak 45-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 170 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2020-2024

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2020	20,41	68,78	10,81	100	45
2021	20,21	68,72	11,07	100	45,52
2022	20,2	69,24	10,55	100	45,69
2023	19,86	68,55	11,59	100	45,88
2024	19,68	68,44	11,88	100	46,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 diolah

2.2.3.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar berdasarkan data SAKERNAS. Data bulan Agustus 2024 berikut menunjukan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY sebesar 3,49%. Mayoritas penduduk DIY masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Perlu dilakukan upaya untuk mendorong wirausaha baru dengan melibatkan kolaborasi multisektor. Selain itu perlunya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing.

Tabel 2- 171 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Buruh/ karyawan	43,40
Berusaha sendiri	20,81
Berusaha dibantu buruh tak tetap/ pekerja keluarga	14,01
Pekerja keluarga/ tak dibayar	13,49
Pekerja bebas di non pertanian	3,63
Pekerja bebas di pertanian	1,17
Berusaha dibantu buruh tetap	3,49

Sumber: Sakernas BPS, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 172 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2020-2024

Status Pekerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha dibantu buruh tetap	3,81	3,53	3,69	3,35	3,49

Sumber: Sakernas BPS, 2024

2.2.3.8 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD dilakukan oleh BRIN dan dimulai pada tahun 2022. IDSD tersebut diukur dari empat komponen utama penunjang produktivitas yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Empat komponen tersebut kemudian dijabarkan dalam 12 pilar yaitu institusi , infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, kapabiltas inovasi. Selanjutnya indeks ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah mengambil kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan nilai IDSD sebesar 3,97 dan menduduki peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta yang mendapat nilai 4,09. Nilai IDSD tersebut juga meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,84. Namun demikian terdapat empat pilar yang nilainya menurun dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu pilar istitusi, pilar adopsi TIK, pilar sistem keuangan dan pilar dinamisme bisnis. Berikut, data IDSD DIY menurut 12 pilar pada periode tahun 2022-2024.

Tabel 2- 173 Indeks Daya Saing Daerah DIY Menurut 12 Pilar tahun 2022-2024

No	Pilar	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Institusi	4,53	4,81	4,53
2	Infrastruktur	2,45	2,48	3,17
3	Adopsi TIK	4,54	4,46	4,36
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,06	3,38	4,14

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Pilar	Tahun		
		2022	2023	2024
5	Kesehatan	4,17	4,18	4,18
6	Ketrampilan	4,28	4,42	4,43
7	Pasar Produk	3,15	3,04	3,1
8	Pasar Tenaga Kerja	3,89	4,02	4,58
9	Sistem Keuangan	3,39	2,61	2,78
10	Ukuran Pasar	0,44	4,25	4,28
11	Dinamisme Bisnis	5	4	3,37
12	Kapabilitas Inovasi	4,47	4,48	4,72

Sumber BRIN, 2025

2.2.3.9 Perkembangan Investasi

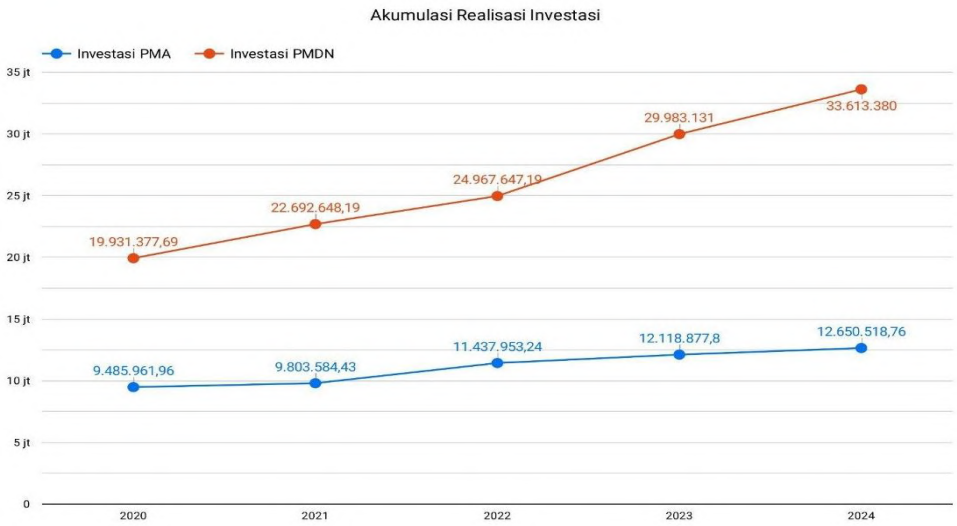
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2020 – 2024 menunjukan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Data dari DPMPTSP DIY menunjukan pada Tahun 2024 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 9.89%. Realisasi Investasi di DIY sampai dengan Tahun 2024 (kumulatif) mencapai Rp 46,2 triliun dengan investasi PMDN mencapai Rp 33,6 triliun dan PMA mencapai Rp 12,65 triliun seperti yang ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2- 174 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi PMDN	Investasi PMA	Total Investasi	*Growth*	*Growth%*
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.692.648,19	9.803.584,43	32.496.232,62	3.078.892,97	10,47%
2022	24.967.647,19	11.437.953,24	36.405.600,44	3,909,367.82	12,03%
2023	29.983.131,00	12.118.877,80	42.102.008,91	5.696.408,47	15,65%
2024	33.613.380.12	12.650.518,76	46.263.898,88	4.161.889.97	9,89%

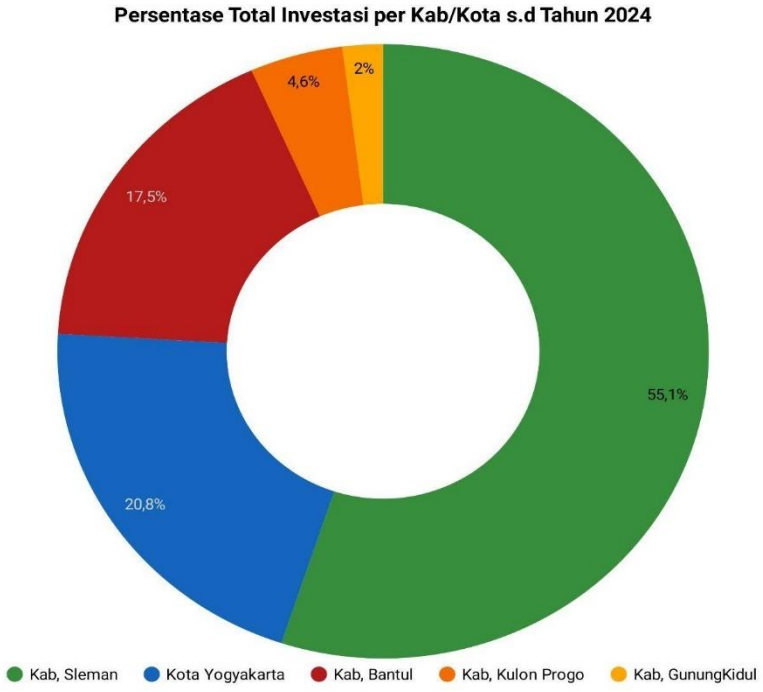
Sumber: Dataku Bapperida DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2- 108 Akumulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: DPMPTSP DIY , 2024

Gambar 2- 109 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan III 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2024, distribusi investasi di DIY masih didominasi oleh Kabupaten Sleman dengan persentase investasi sebesar 55,1% pada angka Rp. 2 Triliun, diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan 20.8%. Kemudian, Bantul mencatatkan 17,5% dari total investasi DIY, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul masing-masing menyumbang 4,6% dan 2%. Meskipun terdapat pertumbuhan investasi yang positif, beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain kesenjangan investasi antara kabupaten/kota yang bisa mengakibatkan disparitas pembangunan ekonomi, serta perluasan infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan investasi secara merata di seluruh wilayah DIY. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam investasi yang dilakukan.

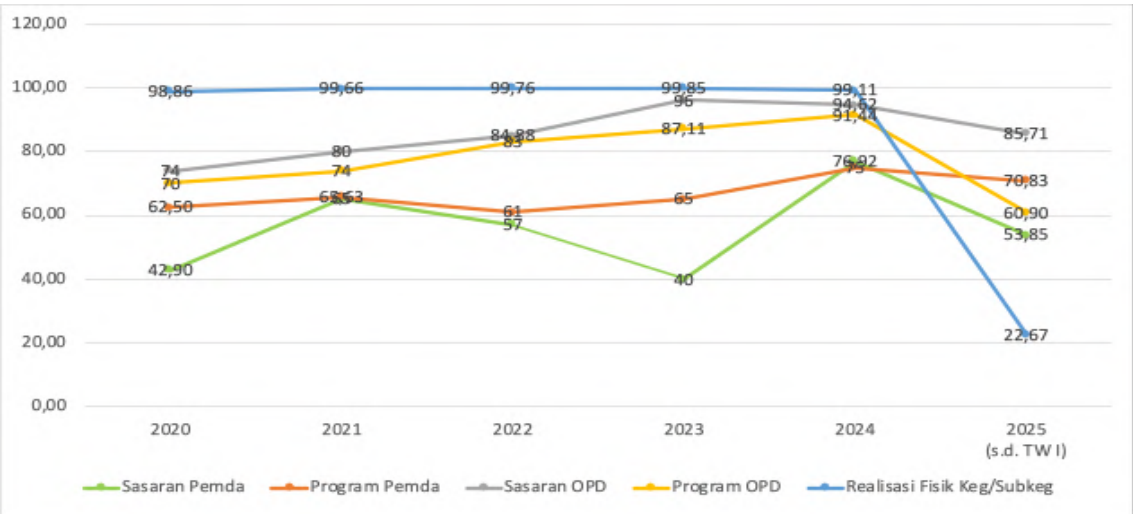
2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DIY SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN (TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025)

Evaluasi hasil RKPD DIY capaian sampai Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan meliputi; 1) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 2) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan 3) evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah. Pada tahun 2025, dasar dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah RKPD DIY 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Bagian ini merupakan evaluasi pelaksanaan hasil pembangunan di DIY sampai dengan tahun berkenaan.

2.3.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur s.d. Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja indikator Tujuan Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Program Perangkat Daerah dan Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah, sesuai dengan *cascading* RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Bapperida DIY, 2025

Gambar 2- 110 Capaian kinerja indikator Sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah DIY Tahun 2020-2025 (s.d. TW I)

2.3.1.1 Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2025

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2025, tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2025 diukur melalui 4 tujuan yang didukung 7 sasaran dengan 5 indikator tujuan. Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2- 175 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah DIY Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi	Keterangan
Tujuan 1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	**IGI (*Inclusive Growth Index*)/Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)**	**indeks**	**6,52**	**6,71**	**104,52**	**BPS**
	Indeks Kebahagiaan	**indeks**	**73,98**	**71,70**	**96,92**	**BPS**
1.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	9,66	10,40	97,69	BPS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi	Keterangan
1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,3 - 5,8	5,03	99,02	BPS
	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	31,51	33,14	105,17	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,26 - 3,56	3,48	100,86	BPS
	Inflasi	%	2,00 - 4,00	1,25	156,25	BPS
1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,68	81,62	99,93	BPS
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74,98	67,90	90,56	Dinas Kebudayaan
Tujuan 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	**Indeks Williamson**	**Indeks**	**0,438**	**0,4805**	**90,29**	**BPS**
2.1. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40,13	40,10	99,93	BPS
Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**A**	A- (88,15)	**100**	**Biro Organisasi**
3.1. Meningkatnya *Good Governance*.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100	BPKA
	SAKIP	Indeks	AA	AA (92,65)	100	Bapperida
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	74,33	83,88*	112,85	Bakesbangpol
Tujuan 4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**Sedang**	**Sedang**	**100**	**DLHK**
4.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	83,74	82,83	98,91	DPTR
4.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	108,70	102,83	105,40	BPBD

Sumber : Bapperida DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

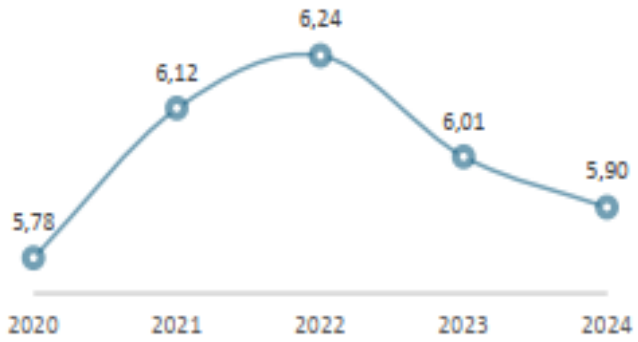
Capaian dari indikator-indikator tujuan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.

1. **Angka *Inclusive Growth Index*/IGI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif)**

   Inclusive Growth Index (IGI) digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. *Inclusive Growth Index* (IGI) tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara agregat namun juga memperhatikan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF) dan *United Nation Development Programme* (UNDP), *Inclusive Growth Index* (IGI) ditopang melalui tiga pilar utama, yaitu: (1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusi sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata.

   Nilai *Inclusive Growth Index* (IGI) berada pada rentang 1-10. Nilai indeks pada rentang 1-3 mengindikasikan kurang memuaskan, nilai indeks dengan rentang 4-7 memuaskan, dan nilai indeks pada rentang 8-10 sangat memuaskanCapaian angka IGI DIY selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Ket.: Angka tahun 2020-2022 (BPS); Angka tahun 2023-2024 adalah proyeksi
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Gambar 2- 111 Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai IGI pada rentang 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai IGI DIY sebesar 5,78, namun mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2021 dan 2022 sebesar 6,12 dan 6,24. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,01, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,90. Tren penurunan nilai IGI mulai tahun 2022-2024 diikuti dengan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan namun aspek-aspek seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi cenderung menurun/membaik, sedangkan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan di DIY melalui aspek tersebut sudah berjalan sesuai rencana dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2- 176 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2024 serta Capaian 2025, Triwulan I

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Inclusive Growth Index (IGI)	Angka indeks	5,90	6,52	5,90*	91,90

*Ket.: *) Realisasi tahun 2025 belum rilis sehingga menggunakan realisasi tahun 2024 yang merupakan angka proyeksi*

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Realisasi capaian IGI tahun 2025 triwulan I adalah sebesar 5,90 dari target sebesar 6,52 dengan tingkat capaian sebesar 91,90%. Realisasi tersebut masih merupakan angka proyeksi tahun 2024 karena data final belum tersedia. Ketercapaian nilai IGI dorong oleh kinerja pada aspek terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Nilai rasio gini DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 0,428 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rerata nasional sebesar 0,381. Selain itu tingkat kemiskinan DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 10,40% juga masih di atas rerata nasional sebesar 8,57%. Namun demikian, capaian nilai rasio gini dan kemiskinan tahun 2024 tersebut sudah menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,449 dan 11,04%. Tren penurunan rasio gini dan pengurangan kemiskinan di DIY didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY

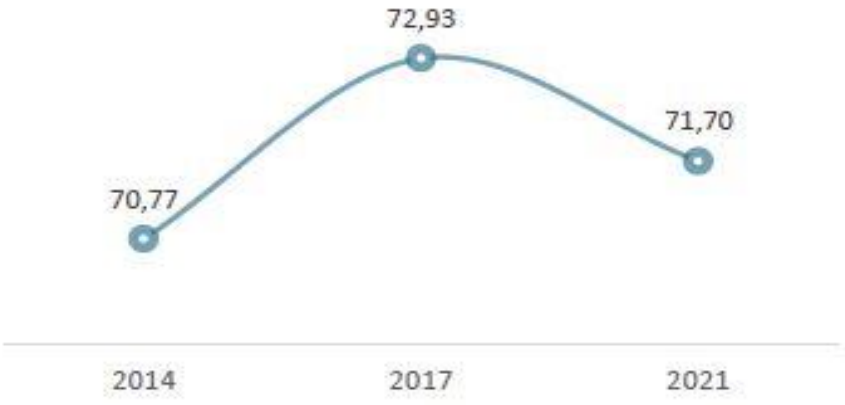
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

diantaranya kebijakan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik, serta berbagai kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

2. Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)

Indeks kebahagiaan adalah angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari. Indeks ini merupakan hasil survei komprehensif yang menilai kebahagiaan, kesejahteraan, dan aspek keberlanjutan.

Indeks kebahagiaan diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi lingkungan, dan tingkat kriminalitas atau keamanan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu tahun 2014, 2017, dan terakhir pada tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 112 Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2021

Tabel 2- 177 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 serta Capaian 2025, Triwulan I

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Kebahagiaan	Angka indeks	71,70*	73,98	71,70*	96,92

*Ket.: *) angka rilis terakhir BPS tahun 2021*

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

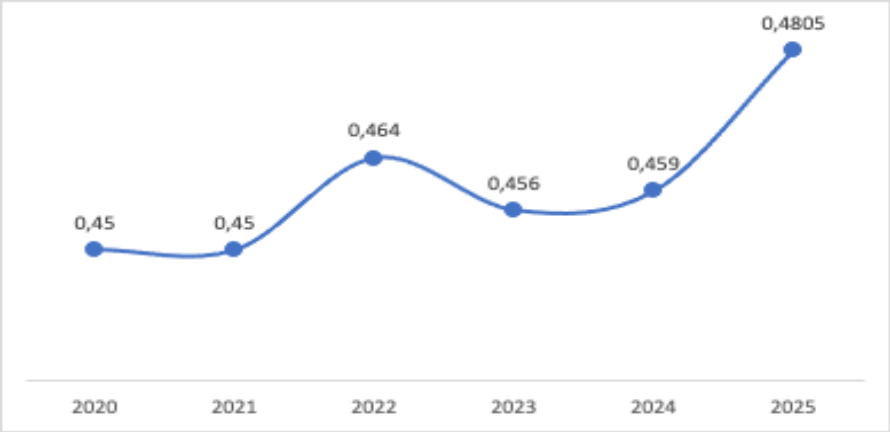
Dikarenakan Indeks Kebahagiaan tahun 2025 triwulan I tidak dirilis, maka angka realisasi menggunakan data terakhir Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi di bawah target sebesar 73,98 dengan persentase realisasi sebesar 96,92%. Meskipun belum mencapai target, angka ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY secara keseluruhan di mana DIY memiliki capaian Indeks Kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,49) berada di peringkat ke-23 dari 34 provinsi (BPS, 2021).

Indeks kebahagiaan DIY berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), ada tiga dimensi yang diukur yakni kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan makna hidup (*eudaimonia*). Jika dibandingkan antara Indeks Kebahagiaan tahun 2017 terhadap Indeks Kebahagiaan tahun 2021 terjadi penurunan dimensi Perasaan (*Affect*) akibat tekanan ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan sosial. Meskipun dimensi Kepuasan Hidup masih cukup baik, ketidakpuasan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal menunjukkan tantangan dalam kesejahteraan pribadi masyarakat. Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dalam aspek keamanan, peningkatan program kesejahteraan sosial, serta pembangunan infrastruktur secara merata sampai ke wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi pendidikan serta program-program untuk peningkatan pendapatan serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar Indeks Kebahagiaan DIY semakin baik pada masa mendatang.

3. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 113 Indeks Williamson DIY Tahun 2020-2025

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY masih berada di atas 0,400. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2020 sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,450 (2020) menjadi 0,464 (2022). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,459. Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2025 triwulan I sebesar 0,4805, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 – 2027 sebesar 0,438 akan diperoleh persentase capaian sebesar 90,29. Peningkatan kesenjangan pembangunan ekonomi disebabkan oleh penurunan tingkat pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya di tahun sebelumnya. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang menghasilkan PDRB ADHK terkecil.

Tabel 2- 178 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024 serta Capaian 2025 Triwulan I

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Williamson	Angka indeks	0,459	0,438	0,4805	90,29

Sumber: Bapperida DIY, 2025 (data diolah)

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi yang berbasis kinerja, bersih bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional dalam melayani publik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI tersaji dalam tabel di bawah:

Tabel 2- 179 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 serta Capaian Tahun 2024

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka indeks	A- (88,15)*	A	A- (88,15)*	100

*Ket.: *) Capaian tahun 2024 menggunakan capaian tahun 2023*
Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Sampai dengan bulan Februari 2025, Kementerian PAN dan RB RI belum merilis Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, sehingga data realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023 dengan kategori A (A- dengan catatan) dengan nilai 88,15 atau Capaian Tahun 2024 adalah sebesar 100% yang dipublikasi oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui surat Nomor B/99/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPJMD Tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Hasil Evaluasi tiap Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DIY Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2- 180 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor *Index*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,65
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	53	1,06
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1,2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,61	2,89
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1,5	1,29
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	92,1	3,68
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	89,17	2,23
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	88,91	2,22
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2		0

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor *Index*
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2	96,64	1,93
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	3	1,2
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	88,37	1,33
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	349	3,4
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,57	1,37
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	94,18	1,41
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	4,22	7,6
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	2	100	2
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	8	57,14	4,21
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	92	3,68
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	62,9	2,52
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	77,33	7,73
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86,67	6,93
Capaian RB General				**100**		**75,35**
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor *Index*
		Tematik				
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi	0,4	0,38	0,38
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting* (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	79,46	0,45
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	93,94	0,54
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting* (Capaian Output)	0,6	53,56	0,31
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	85,71	0,51
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Output)	0,6	85,71	0,49
37	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,39	1,39
38	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,76	1,76
39	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,97	2,97
40	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting* (Capaian Dampak)	3	0,46	0,46
42	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	2	2
Capaian RB Tematik				**20**		**12,80**
41	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
Indeks RB						**88,15**

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2023 dilaksanakan melalui *double track* berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, yaitu RB General dan RB Tematik berdampak pada metode Evaluasi dan Kategori/Klasifikasi Hasil Indeks Reformasi Birokrasi, yang dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2- 181 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	> 60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
5	CC	> 50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025

Adapun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY dalam Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi antara lain:

a. Perlu upaya pemetaan lebih teknis kontribusi Reformasi Birokrasi terhadap pencapaian target Pembangunan.
b. Perlu upaya internalisasi yang lebih masif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Unit Kerja sehingga lebih melembaga.
c. Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sedemikian rupa sehingga seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk membangun Zona Integritas.

Sehingga, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY dalam menghadapi permasalahan di atas, yaitu:

a. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (Tematik Pengentasan kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas Presiden) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait serta perlu dirumuskan langkah-langkah inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan unit layanan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Formulasi IKLH sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKLH = 0,428 IKU + 0,34 IKA + 0,133 IKL + 0,099 IKAL

Tabel 2- 182 Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat baik	90 ≤ IKLH ≤ 100
2	Baik	70 ≤ IKLH < 90
3	Sedang/Cukup Baik	50 ≤ IKLH < 70
4	Kurang	25 ≤ IKLH < 50
5	Sangat kurang	0 ≤ IKLH < 25

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Pada tahun 2024, IKLH DIY ditargetkan pada range Sedang/Cukup Baik. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 68,44 sehingga masuk ke dalam rentang angka 50 ≤ IKLH < 70 atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH tercapai.

Tabel 2- 183 Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2024

Indikator Sasaran Pemda DIY	Satuan	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	Angka Indeks	66,15	59,92	62,96	66,29	63,29	68,44

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Selama periode RPJMD DIY 2022–2027, terdapat tren peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di DIY. Pada tahun 2022, capaian IKLH tercatat sebesar 59,92 dan meningkat menjadi 66,29 pada tahun 2023. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian mencapai 68,44. Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 4,26% per tahun dari 2022 ke 2024, target IKLH sebesar 70,91 pada tahun 2027 diharapkan tercapai, meskipun membutuhkan upaya konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Proyeksi menunjukkan bahwa DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi program berkelanjutan. Capaian IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 184 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2023

Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi*
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	66,29	63,29	68,44	108,14

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Adapun target dan realisasi per komponen IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 185 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024

No	Komponen	Target	Realisasi	Kategori
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	37,75	42,94	Kurang
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,16	90,44	Sangat Baik
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,44	51,13	Sedang
4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	63,71	84,13	Baik
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		**63,29**	**68,44**	**Sedang**

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Sementara IKLH mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah, Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) memotret sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain dalam merespon tantangan lingkungan melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Dalam proses penentuan Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLH), berbagai upaya pengendalian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan di suatu daerah di kategorisasi dalam beberapa Indeks Respon Program.

Profil IKLH DIY yang tersedia dalam aplikasi IKLH untuk masing-masing sektor adalah: a) Indeks Respon Program Langit Biru: 86%; b) Indeks Respon Program Pantai Lestari: 75%; c) Indeks Respon Program Kali Bersih: 83%; d) Indeks Respon Program Indonesia Hijau: 90%; e) Indeks Respon Program Gambut Lestari: N/A (DIY tidak memiliki lahan gambut).

Berdasarkan rapor IRLH tersebut di atas, secara umum DIY menunjukkan respons yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada sektor Program Indonesia Hijau (90%) dan Program Pantai Lestari (86%).

1. Penguatan Program Pantai Lestari (75%)
    a. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran pesisir dan laju abrasi, seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Bantul
    b. Memperkuat regulasi zonasi wilayah pesisir untuk mengurangi eksploitasi, misalnya melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir DIY
    c. Mengedukasi wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai
2. Peningkatan Program Kali Bersih (83%)
    a. Memperketat pengelolaan limbah domestik dan industri kecil di sepanjang sungai melalui pengawasan izin berusaha
    b. Mendorong sistem pemantauan kualitas air berbasis komunitas
    c. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air limbah, misalnya dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL dan IPAL Komunal)
3. Optimalisasi Program Langit Biru (86%)
    a. Memasyarakatkan penggunaan transportasi umum (Bus Trans Jogja dan *Commuter Line* Yogyakarta) serta transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan sepeda.
    b. Mengembangkan kebijakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi rendah emisi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Keberlanjutan Program Indonesia Hijau (90%)
    a. Mengembangkan sistem pemantauan tutupan vegetasi berbasis teknologi (GIS, *remote sensing*)
    b. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman vegetasi

2.3.2 Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025

Berikut ini adalah gambaran umum kinerja capaian sasaran Pemerintah Daerah DIY sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY Triwulan I 2025.

Tabel 2- 186 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah DIY sd. Triwulan I Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi
Tujuan 1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat					
1.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	9,66	10,40	92,34
1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,3 - 5,8	5,03*	99,02
	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	31,51	33,14	105,17
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,26 - 3,56	3,48	100,86
	Inflasi	%	2,00 - 4,00	1,56	161,00
1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,68	81,62	99,93
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74,98	67,90	90,56
Tujuan 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah					
2.1. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40,13	40,10	99,93

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	% Realisasi
Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
3.1. Meningkatnya *Good Governance*.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
	SAKIP	Indeks	AA	AA (92,65)	100
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	74,33	83,88*	112,85
Tujuan 4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik					
4.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	83,74	82,83	98,91
4.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	108,70	102,83	105,40

Sumber: Bapperida DIY dan BPS Provinsi DIY, 2025
*Ket.: *) Angka capaian tahun 2023*

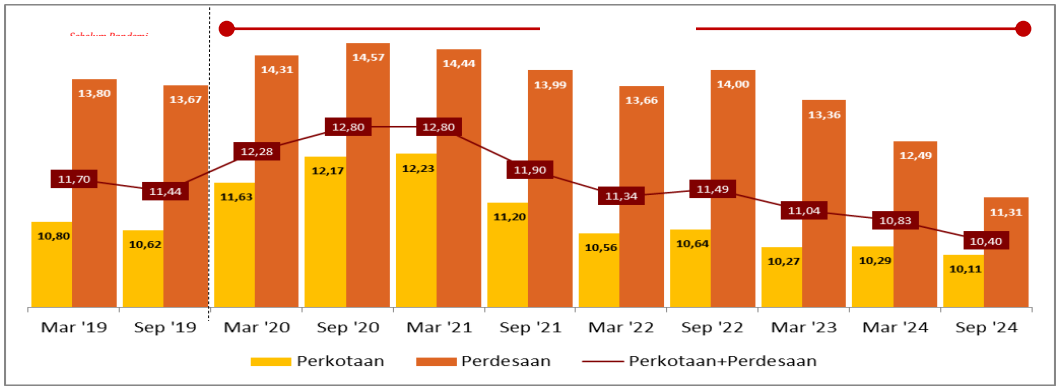
Berdasarkan tabel di atas, hingga triwulan I tahun 2025 dari 13 indikator kinerja sasaran Pemda terdapat 6 indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan atau capaian masih di bawah 100%, sementara 7 indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target diantaranya: Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Opini BPK, SAKIP, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY.

1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah di DIY. Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di DIY tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan data yang tersedia, tren kemiskinan di DIY pada periode Maret 2019 hingga September 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Namun, terdapat beberapa periode di mana tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Peningkatan angka kemiskinan terjadi pada September 2020 dan Maret 2021, diikuti oleh tren penurunan pada September 2021 dan Maret 2022. Namun, angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada September 2022 sebelum kembali menunjukkan penurunan secara bertahap sejak Maret 2023 hingga September 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



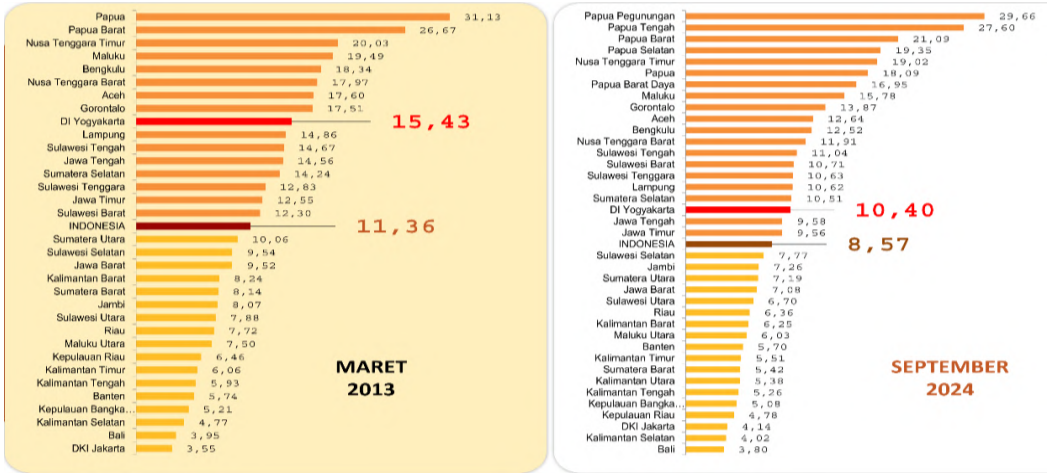
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 114 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019 s.d. September 2024

Tingkat kemiskinan di DIY apabila dilihat dari karakter wilayah perkotaan dan perdesaan hasil pendataan 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya ketimpangan. Data tahun 2019 menunjukkan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari penduduk perkotaan. Hal ini terus terjadi sampai dengan tahun 2024. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 11,31 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 11 hingga 12 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan lebih kecil dibanding perdesaan yaitu sebesar 10,11 persen.

Dalam upaya memahami dinamika kemiskinan di DIY, penting untuk melihat perkembangan capaian penurunannya dalam konteks nasional. Untuk melihat progres penurunan tingkat kemiskinan DIY dibandingkan dengan kemiskinan nasional dapat dilihat dari perbandingan antar waktu. Menurut data per September 2024 posisi DIY pada 10,40 persen masih berada di atas nasional (8,57%) akan tetapi jika dilihat dari trend 2013 sampai dengan 2024, selama 11 tahun terakhir persentase kemiskinan DIY sudah mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata penurunan 0,46 persen per tahun. Angka ini lebih baik dari rata-rata penurunan kemiskinan nasional sebesar 0,25 persen per tahun sehingga gap kemiskinan DIY dengan kemiskinan nasional semakin mengecil.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY tahun 2013 dan 2024, 2025 (data diolah)

Gambar 2- 115 Grafik Persentase Kemiskinan 2013 dan 2024 DIY beserta Nasional

Tabel 2- 187 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020 – 2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,5	14,04	12,27	11,95	11,66
Gunungkidul	17,07	17,69	15,86	15,60	15,18
Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Tabel 2- 188 Target dan Capaian Indikator Sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Kemiskinan	%	10,40	9,66	10,40*	92,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Target Penurunan Kemiskinan tahun 2025 belum tercapai terlihat dari target tahun 2025 sebesar 9,66% sedangkan capaiannya masih di angka 10,40% dengan persentase realisasi 92,34%. Angka capaian tersebut masih menggunakan capaian tahun 2024. Target penurunan kemiskinan DIY belum tercapai, beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup yang tinggi, ketimpangan distribusi kemiskinan di beberapa wilayah, dan kondisi geografis wilayah yang beragam dan rawan bencana terutama di beberapa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemda juga telah mendorong penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung terhadap aksesibiltas layanan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan sosial-ekonomi baik perorangan maupun kelompok, memperluas perlindungan sosial terutama dalam hal kebutuhan dasar masyarakat terbawah seperti program jaminan sosial lanjut usia, bantuan beasiswa, serta mempermudah akses modal bagi usaha kecil dan mikro guna mengurangi dampak fluktuasi ekonomi. Meskipun efektivitas program masih perlu ditingkatkan, Pemda DIY terus berkomitmen memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan sinergi dengan kabupaten/kota dan dunia usaha agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Penghidupan ekonomi yang layak.

A. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Perekonomian DIY pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,03% year-on-year (y-on-y) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2023. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan di hampir semua kategori lapangan usaha, kecuali Pengadaan Air. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 8,97%, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,96%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 5,05%.

Capaian indikator Sasaran Angka pertumbuhan ekonomi/PDRB tahun 2025 masih menggunakan capaian tahun 2024 menurut BPS Provinsi DIY sebesar 5,03 atau tercapai sebesar 99,02% dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,8.

Tabel 2- 189 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	%	5,03	5,3-5,8	5,03*	99,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

*Ket.: *) Angka capaian tahun 2024*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2024 berdasarkan kontribusi lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,72%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,21%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,00%. Berdasarkan estimasi, ekonomi DIY triwulan I tahun 2025 masih akan tumbuh positif karena sektor pertanian akan memasuki masa panen tanaman pangan. Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,99% pada triwulan IV-2024 dibandingkan triwulan II-2024, didukung oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2024 berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan andil sebesar 2,48%, diikuti oleh PMTB sebesar 2,45%.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, perekonomian DIY masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Namun, peningkatan penggunaan gas kota dan meningkatnya jumlah wisatawan ke DIY juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota bila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2023, pada tahun 2024 cukup bervariatif. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten Gunungkidul dengan capaian sebesar 5,61 dan Kabupaten Sleman sebesar 5,19.

Tabel 2- 190 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (y-o-y) Triwulan III

Kabupaten/Kota	2023	2024
Kulon Progo	6,57	4,67
Bantul	5,56	4,86
Gunungkidul	4,16	5,61
Sleman	4,63	5,19
Yogyakarta	4,96	4,82

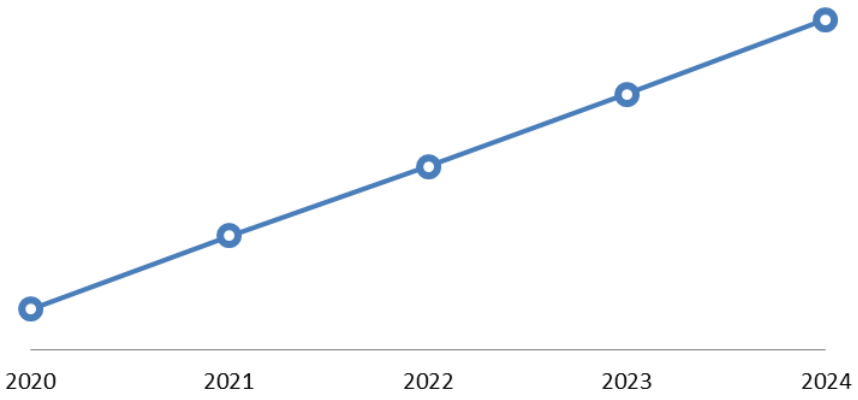
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

B. Pendapatan per Kapita

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan per

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kapita. Proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam penghitungannya, pendekatan ukuran pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto Regional per kapita. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita di DIY dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Gambar 2- 116 Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif sejak tahun 2020. Capaian indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 – 2027 sebesar Rp30,23 juta akan diperoleh persentase capaian sebesar 109,63%. Ketercapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2024 yang dibarengi dengan turunnya pertumbuhan penduduk di tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tahun 2025 realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp31,51 juta diperoleh persentase capaian 105,17%.

Tabel 2- 191 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	33,14	31,51	33,14*	105,17

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

*Ket.: *) Realisasi tahun 2025 menggunakan tahun 2024*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angkanya menunjukan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. TPT DIY hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,48 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, TPT DIY pada Agustus 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19.

TPT DIY pada Agustus 2024 sebesar 3,48 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2023 (3,69 persen). Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 3,26-3,56 telah tercapai melebihi target yaitu mencapai 100,86%.

Tabel 2- 192 Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,48	3,26 - 3,56	3,48*	100,86

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

*Ket.: *) Angka capaian masih menggunakan tahun 2024*

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan berdampak pada tingginya TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2024 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja 2.261.436 orang, jumlah kesempatan Kerja 2.139.710 Orang, sementara jumlah pengangguran 78,667 orang turun 3.317 orang dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 81.984 Orang. TPT DIY pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,57% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 tercatat sebesar 3,48%. Dibandingkan dengan TPT nasional TPT DIY selama lima tahun juga berada di bawah angka TPT nasional. Kondisi ini tentu berkaitan dengan tumbuhnya perekonomian DIY khususnya beberapa sektor yang penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 117 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 – 2024 (%)

Berdasarkan data Sakernas per Agustus 2024, penurunan TPT DIY disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan. TPT di perkotaan mengalami penurunan dari 4,19% pada Agustus 2023 menjadi 3,97% pada Agustus 2024. Senada dengan perkotaan, TPT di perdesaan pada Agustus 2024 sebesar 2,04%, menurun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 2,33%. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 5,03 persen. Walaupun demikian kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,56 persen diikuti perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) sebesar 4,50 persen. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,13 persen. Hal ini dipicu masih adanya permasalahan titik temu antara minat dan penawaran tenaga kerja terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung menerima berbagai pekerjaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penurunan angka TPT merupakan salah satu keberhasilan pembangunan namun tetap diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk meminimalisir angka TPT di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi, pemagangan, serta sertifikasi kompetensi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan/ kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Diperlukan pula upaya penciptaan kesempatan kerja melalui memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.

D. Inflasi

DIY menutup Tahun 2024 dengan inflasi kumulatif untuk keseluruhan tahun 2024 mencapai 1,28% (yoy). Perlu diketahui, inflasi DIY pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian inflasi pada tahun 2023 sebesar 3,17%. Capaian realisasi inflasi DIY di tahun 2024 tidak terlepas dari peran aktif seluruh pihak melalui sinergi dan kolaborasi berbagai program kegiatan, termasuk juga dukungan terhadap GNPIP. Beberapa hal yang mendorong terkendalinya inflasi pada tahun 2024, antara lain: pasokan komoditas pangan sepanjang 2024 yang relatif terjaga, permintaan yang relatif terkendali, pengelolaan ekspektasi inflasi yang lebih solid antar instansi, masifnya *social movement* dalam rangka pengendalian harga, relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024, serta *base year effect* dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023. Menurut komoditasnya, inflasi pada periode laporan terutama dipicu oleh tekanan harga cabai merah, dan telur ayam. Inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras, nangka muda, kentang, dan angkutan udara.

Inflasi rendah disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) penurunan daya beli: turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat dan adanya PHK di Kab Sleman; 2) diversifikasi alternatif moda transportasi seiring operasional tol Jogja-Solo menahan inflasi angkutan udara; 3) relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024; 4) *base year effect* dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023; serta 5) pasokan komoditas pangan yang relatif terjaga.

Selanjutnya, inflasi DIY sampai dengan bulan Mei tahun 2025 cenderung naik menjadi 1,56% dari target tahun 2025 sebesar 2% - 4%, sehingga diperoleh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

persentase capaian 161%. Naiknya inflasi tersebut dipengaruhi adanya kenaikan harga pada sebagian indeks kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap naiknya inflasi tahun 2025, yaitu emas perhiasan, kopi bubuk, kelapa, sigaret kretek mesin, beras, bahan bakar rumah tangga, kontrak rumah, minyak goreng, sigaret kretek tangan, dan sepeda motor.

Tabel 2- 193 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2024-2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Inflasi	Persen	1,28	2,00-4,00	1,56	161,00

Sumber: BPS, 2025, diolah

3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah sehingga berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup serta menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka IPM DIY pada tahun 2020 mencapai angka 79,95. Sejak tahun 2021,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level "sangat tinggi" dengan angka 80,22. Selama 2020–2024, IPM DIY rata-rata meningkat sebesar 0,52 persen per tahun, dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,62 pada tahun 2024. Peningkatan IPM DIY 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 118 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2020-2024

Perkembangan IPM di DIY menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi (70≤IPM<80), sedangkan mulai tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi (IPM>80).

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2020 – 2024 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2020 IPM nasional 72,81 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,95. Pada tahun 2024 IPM Nasional menunjukkan angka 75,02, sementara DIY telah mencapai 81,62. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Tabel 2- 194 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 serta Tahun 2024

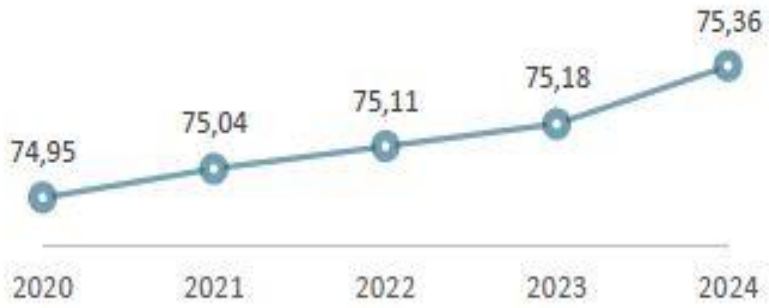
Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	81,62	81,68	81,62*	99,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

*Ket.: *) Angka capaian menggunakan tahun 2024*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Pertumbuhan IPM DIY 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM DIY didukung oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat DIY mengalami kenaikan sebanyak 437 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.



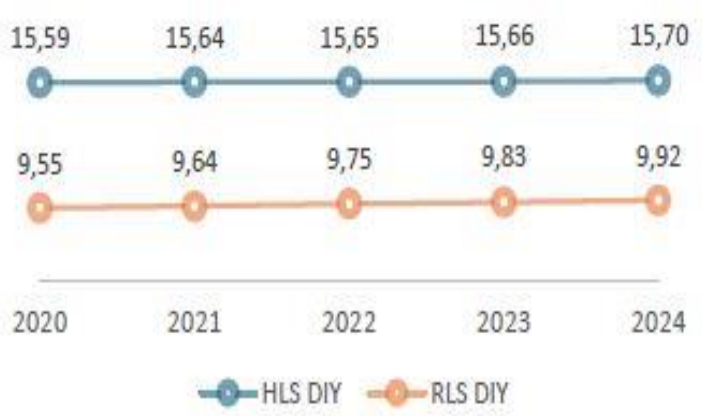
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 119 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2020-2024

Secara rinci pendekatan 3 dimensi dasar dalam pengukuran IPM sebagai berikut:

Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun meningkat 0,18 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH di DIY telah meningkat sebesar 0,41 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,14 persen per tahun.

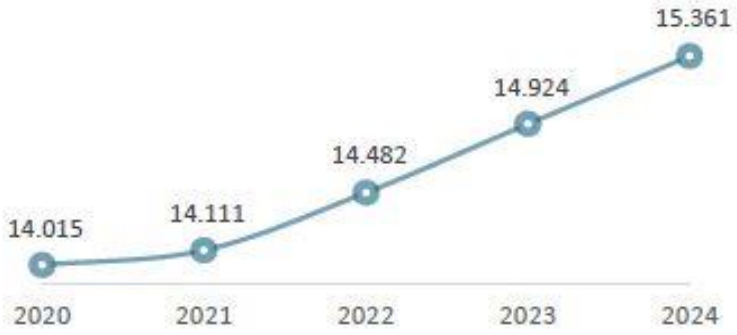
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 120 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2020-2024

Kedua, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS di DIY secara rata -rata meningkat sebesar 0,18 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. HLS 2024 meningkat 0,04 tahun (0,26 persen) dibandingkan tahun 2023, mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,15 persen). Sementara itu, RLS 2024 meningkat 0,09 tahun (0,92 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,97 persen).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar 2- 121 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2020–2024

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mencapai Rp15,36 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 437 ribu rupiah (2,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata- rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,12 persen per tahun.

Tabel 2- 195 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05
Kabupaten Sleman	83,92	84,08	84,40	84,86	85,71
Kabupaten Gunungkidul	70,18	70,37	71,18	71,46	72,14
Kabupaten Kulon Progo	74,48	74,73	75,48	75,82	76,18
Kota Yogyakarta	86,93	87,50	88,00	88,61	89,10
DIY	**79,95**	**80,22**	**80,66**	**81,09**	**81,62**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas DIY dan sudah berada pada kategori "sangat tinggi" (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori "tinggi" (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Mulai tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul telah meningkat pada kategori "Tinggi".

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2020–2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus "sangat tinggi" dan "tinggi", serta terus mengalami peningkatan Indeks. Pada tahun 2024, tiga kabupaten/ kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi". IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota lain di DIY. Capaian IPM tertinggi berikutnya dimiliki Kabupaten Sleman dan Bantul dengan Indeks masing-masing sebesar 85,71 dan 82,05. Sementara itu, IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,18 dan 72,14 dengan status capaian pembangunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

manusia yang “tinggi”. Adapun pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2024 terjadi di Kabupaten Sleman.

Tabel 2- 196 IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,49	14,49	9,20	10.990
Kabupaten Bantul	74,80	15,63	9,81	16.851
Kabupaten Gunungkidul	74,91	13,40	7,35	10.630
Kabupaten Sleman	75,48	16,79	11,33	17.586
Kota Yogyakarta	75,73	17,66	12,12	20.603
DIY	**75,36**	**15,70**	**9,92**	**15.361**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2024, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kota Yogyakarta (75,73 tahun) dan terendah di Bantul (74,80 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 13,40 tahun, Kulon Progo sebesar 14,49 tahun, dan Bantul sebesar 15,63 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS DIY yang sebesar 15,70 tahun. HLS Sleman (16,79 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,66 tahun) tercapai di atas rata-rata DIY sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,35 tahun berada di Gunungkidul. Capaian RLS Kabupaten Kulon Progo (9,20 tahun) dan Kabupaten Bantul (9,81 tahun) juga tergolong rendah di bawah rata-rata DIY yang sebesar 9,92 tahun. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12,12 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp10.630 ribu per tahun di Gunungkidul.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran Terpelihara dan Berkembangnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kebudayaan di DIY indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK adalah instrumen yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah, yang disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada 10 Oktober 2019 dalam rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan Indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.

Tabel 2- 197 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka Indeks	67,90*	74,98	67,90**	90,56

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2025

*Ket.: *) Angka capaian satu tahun sebelumnya (2023); **) Angka capaian dua tahun sebelumnya (2023*

Jika dilihat dari target tahun 2025, capaian kinerja IPK pada tahun 2025 (menggunakan capaian tahun 2023) adalah sebesar 90,56%, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan peringkat kedua tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisis komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2020 – 2021), dan Pasca Pandemi Covid (2022-2023) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.

Tabel 2- 198 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2023

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023	2023 terhadap Pra Pandemi (2019)	2023 terhadap Pasca Pandemi (2021)
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	59,1	-12,41	2,31
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	80,09	1,92	-0,59
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,9	78,78	-6,42	2,28
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	63,29	-5,32	6,72
5	Ekspresi Budaya	62,31	57,15	41,11	45,06	50,63	-11,68	9,52
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	60,51	-17,53	4,31
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	65,53	6,14	0,92
	IPK DIY	**73,98**	**71,74**	**64,22**	**66,52**	**67,9**	**-6,08**	**3,68**
	NASIONAL	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13	1,22	5,23

Sumber: Kemendikbudristek RI, 2025

Selama kurun 2018-2022, IPK DIY selalu mendapatkan peringkat pertama namun dengan kecenderungan nilai skor yang menurun sejak pandemi 2019 dan pada tahun 2023 peringkat nya diambil alih oleh Bali (71,36). Pada tahun 2023, skor IPK Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 1,38 poin yaitu dari 66,52 ke 67,90. Namun demikian, kenaikan ini belum bisa mengembalikan capaian nilai IPK DIY sebelum pandemi covid-19 dengan capaian IPK diatas 70 dan belum bisa memenuhi target RPJMD DIY Tahun 2023 yaitu sebesar 74,58. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu Ekspresi Budaya, Ekonomi Budaya dan Budaya literasi mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

4. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju –Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY

Salah satu permasalahan pembangunan adalah ketimpangan yang berakibat pada perbedaan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya penurunan ketimpangan menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di DIY, ketimpangan pendapatan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu strategis dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Ketimpangan antar wilayah di DIY terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas perekonomian di wilayah utara DIY yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah dilakukan dengan intervensi pemerataan pembangunan. Sebagaimana amanat RPJMD DIY 2022-2027, pemerataan pembangunan diarahkan dengan menempatkan kawasan selatan sebagai subjek prioritas didukung oleh reformasi kalurahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lain menjadi upaya pemerataan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2024 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024, PDRB ADHK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih dari 59% dari total PDRB DIY. Adapun PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju yaitu Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan luas wilayah 80% dari luas wilayah DIY menyumbang sekitar 40,10% dari keseluruhan *output* DIY pada tahun 2024.

Tabel 2- 199 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	41,10	40,13	41,10*	99,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

*Ket.: *) Angka capaian menggunakan tahun 2024*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun kontribusi PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 200 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2023 dan 2024

Kab/Kota	PDRB ADHK (miliar Rp) Tahun 2023	PDRB ADHK (miliar Rp) Tahun 2024	Pangsa PDRB ADHK terhadap DIY Tahun 2024 (%)
Kulon Progo	9.951,95	10.426,23	8,38
Bantul	21.867,77	22.964,66	18,46
Gunungkidul	15.749,22	16.506,42	13,27
Sleman	39.508,68	41.559,54	33,4
Yogyakarta	31.378,8	32.964,35	26,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (diolah)

5. Meningkatnya *Good Governance*.

A. Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan opini terbaik yang dapat diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 201 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Opini BPK Tahun 2024 serta Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100

Sumber: BPKA DIY, 2025 (data diolah)

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2024 berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Pencapaian opini WTP bukan sekedar prestasi, melainkan merupakan cerminan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Di dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027, opini BPK merupakan salah satu sasaran/ indikator kinerja dengan target yaitu tercapainya opini WTP.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertahankan opini WTP antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan *review* pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

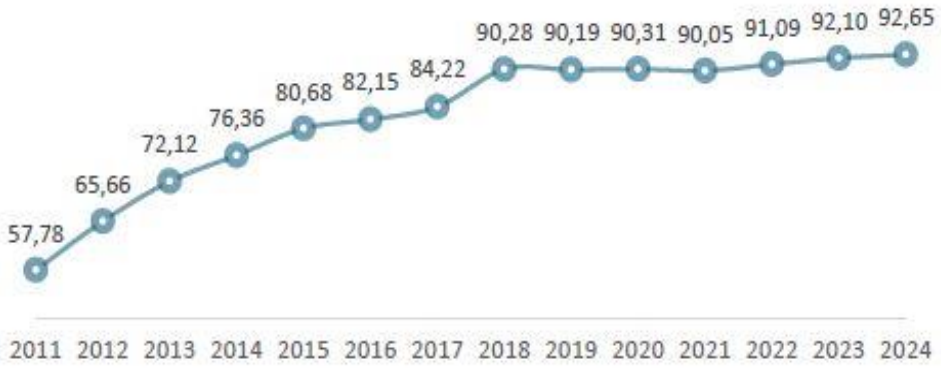
B. SAKIP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/272/AA.05/2024), dengan nilai sebesar 92,65 atau Predikat AA. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Memuaskan", yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.



Sumber: Bapperida DIY, 2025 diolah

Gambar 2- 122 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024

Tabel 2- 202 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 serta Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	AA (92,10)	AA	AA (92,65)	100

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024; KemenPAN RB RI, 2025 (data diolah)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian hasil evaluasi tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 2- 203 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2023-2024

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	28,17	28,32
b. Pengukuran Kinerja	30	26,75	26,91
c. Pelaporan Kinerja	15	14,04	14,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,14	23,28
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**92,10**	**92,65**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**AA**	**AA**

Sumber: KemenPAN RB RI, 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) kemudian periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target (AA). Selanjutnya pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2022-2027 (Tahun 2024), realisasi juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu pada predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2024, Pemda DIY memperoleh nilai 92,65 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2023, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 0,55 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,15 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,16 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,14 poin.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2024 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja pada tingkat Perangkat daerah dengan kualitas yang baik dan telah menjawab isu/permasalahan strategis daerah dan masing-masing urusan perangkat daerah yang sesuai mandatnya. Selain itu, perencanaan kinerja perangkat daerah telah menjadi acuan dalam perencanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pemda DIY dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja di Pemda DIY telah memanfaatkan aplikasi "Sengguh" yang mengintegrasikan perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pemantauan capaian kinerja fisik dan keuangan serta pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja, baik pada tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan informasi dan analisis sesuai ketentuan. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Inspektorat DIY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.

C. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Pada perhitungan IDI tahun 2023 digunakan metode baru dimana terdapat tiga aspek demokrasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Tabel 2- 204 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 serta Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka Indeks	83,88	74,33	83,88*	112,85

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

*Ket.: *) Angka capaian tahun 2023*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,88, dimana angka tersebut merupakan IDI DIY tahun 2023 yang dirilis BPS pada bulan Juni 2024. Angka tersebut menunjukan adanya penurunan 1,74 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2022 yakni 85,62. Pada tahun 2023, DIY berada pada peringkat 3 (empat) nasional, turun 2 peringkat dibanding tahun 2022. Tingkat Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum masuk pada kategori TINGGI. Adapun hasil capaian dari masing–masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 205 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

No	Indikator	2021	2022	2023	Kategori
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**SEDANG**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	
	ASPEK KESETARAAN	**87,29**	**88,76**	**89,21**	**TINGGI**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,44	95,94	96,31	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	**80,74**	**80,17**	**83,51**	**TINGGI**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	66,67	100	100	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator	2021	2022	2023	Kategori
	terkait kebijakan pejabat pemerintah				
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94	
	NILAI IDI KOMPOSIT	**81,21**	**85,62**	**83,88**	**TINGGI**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

6. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang –Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya dukungan terhadap tujuan pemerintah daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam upaya untuk merealisasikan terwujudnya sasaran tersebut, sesuai dengan RPJMD DIY 2022-2027 maka diambil langkah strategi yaitu meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Adapun arah kebijakan yang dilakukan melalui (a) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; (b) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (c) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Pada Tahun 2024 kinerja indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh aspek Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang yang dapat dirinci antara lain:

a. Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan peruntukan/ zona lindung dan kawasan peruntukan/ zona budi daya dibanding dengan keseluruhan luas kawasan;
b. Perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui (1) evaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan; (2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 206 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,83	83,74	82,83*	98,91

Sumber: Dinas PTR DIY, 2025

Sebagaimana data di atas bahwa target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 83,74 dan realisasi tahun 2025 sebesar 82,83 (98,91%). Angka capaian tersebut menggunakan tahun 2024. Perhitungan tersebut didapatkan dari dua indikator, yaitu (a) keterwujudan pola ruang; dan (b) Kesesuaian struktur ruang.

Tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW DIY di tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan kawasan budi daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.O1.O1/XI/2023 tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Dalam mencari tingkat perwujudan kawasan lindung perlu diketahui luas kawasan lindung pada rencana pola ruang dan luas kegiatan yang tidak mendukung fungsi lindung. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung tingkat perwujudan kawasan lindung. Dapat diidentifikasi bahwa tingkat perwujudan kawasan lindung sebesar 99,01%. Kawasan lindung yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah badan air, kawasan cagar budaya, dan kawasan pencadangan konservasi di laut sebesar 100%. Sedangkan kawasan lindung yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan lindung geologi sebesar 91,40%. Selanjutnya untuk tingkat perwujudan kawasan budi daya sebesar 84,65%. Kawasan budidaya yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah kawasan perikanan sebesar 100%. Sedangkan kawasan budi daya yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan peruntukkan industri sebesar 1,73%. Selanjutnya untuk penilaian keterwujudan pola ruang didapatkan dari kumulatif persentase kawasan lindung (bobot 60%) ditambah dengan persentase kawasan budidaya (bobot 40%), sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 93,26%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7. Menurunnya risiko bencana – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi pasca-bencana. Penanggulangan bencana melibatkan upaya yang sistematis mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas. Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko bencana yang dapat terjadi di suatu kawasan. Proses ini bertujuan untuk memahami kemungkinan terjadinya bencana, potensi dampaknya, serta bagaimana risiko tersebut dapat dikelola atau dikurangi. Pengkajian risiko bencana merupakan langkah penting dalam perencanaan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, yang membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 207 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2024 serta Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indeks	108,15	108,70	102,83	105,40

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2024 (Surat BNPB Nomor: B-06.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025)

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2024 adalah 102,83, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 159,65; 2) Kabupaten Bantul 129,50; 3) Kabupaten Gunungkidul 94,43; 4) Kabupaten Sleman 73,35; dan 5) Kota Yogyakarta 64,22.

2.3.3 Capaian Indikator Program Pembangunan Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025

Program Pembangunan Daerah merupakan kekhususan yang menjadi pembeda antara cascading kinerja Pemda DIY jika dibandingkan dengan cascading Pemerintah Daerah lain secara umum. Program Pembangunan Daerah merupakan program antara yang menjadi indikator kinerja yang menghubungkan antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator Eselon II. Program Pembangunan Daerah ini secara pertanggungjawaban kinerja menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah beserta para Asisten. Secara umum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tingkat ketercapaian target Program Pembangunan Daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2- 208 Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah DIY s.d. Triwulan I Tahun 2025

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Indeks	0,415	0,428	103,13	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Desa Mandiri	%	69,90	90,56	129,56	Data bersumber dari Biro Bermas, sesuai dengan LKPJ Gub DIY tahun 2024 karena TW I 2025 data capaian belum rilis
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum	%	3,4	4,06	119,41	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
3	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	%	3,8	4,18	110,00	Data bersumber dari Diskop UKM, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	*Crime Rate* (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	Indeks	120,50	72,86	139,54	Data bersumber dari POLDA, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas	Harapan Lama Sekolah	Indeks	15,76	15,70	99,62	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
	Pendidikan						Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	77,38	95,30	123,16	Data bersumber dari Disdikpora, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	60,52	94,78	156,61	Data bersumber dari Disdikpora, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks	75,21	75,36	100,20	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Prevalensi *Stunting*	%	12,90	14,30	110,85	Data bersumber dari Dinkes, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	98,802	96,83	98,00	Data bersumber dari DPUPESDM, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,37	78,46	101,02	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
							Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	1,8 - 2,2	1,83	100	Data bersumber dari BKKBN, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)	Jumlah	355	399	112,39	Data bersumber dari Disbud, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	76,70	74,04	96,53	Data bersumber dari DPUPESDM dan Bapperida, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	%	5,76	4,87	84,55	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	87,03	98,04	Data bersumber dari Biro Organisasi, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Indeks Kematangan SPBE	Indeks	3,17	4,53	142,90	Data bersumber dari Diskominfo, sesuai dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	% Realisasi	Keterangan
							Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	Indeks	74,91	77,76	103,80	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Indeks Kesetaraan	Indeks	87,89	89,21	101,50	Data bersumber dari BPS, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK	Ribu CO2eq	2.641	3.269,42	123,79	Data bersumber dari Bapperida, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
13	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang	%	94,48	93,26	98,71	Data bersumber dari DPTR, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
		Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	%	27,51	29,70	107,96	Data bersumber dari DPTR, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,75	0,70	93,33	Data bersumber dari BPBD, sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025

Sumber: Laporan Kinerja Pemda DIY TW I 2025, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator Program Pemda tahun 2025 (bulan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Maret) dari 24 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang tidak memenuhi target atau realisasi di bawah 100%. Sementara, 17 indikator kinerja capaiannya telah sesuai target atau bahkan kinerja capaiannya telah melebihi 100%. Namun, terdapat indikator kinerja yang hingga triwulan I 2025 belum rilis angka capaiannya, yaitu Persentase Desa Mandiri, sehingga angka capaian menggunakan tahun 2024 atau sesuai LKPJ Gub DIY Tahun 2024.

2.3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025: Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan APBD

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah tersampaikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Catatan Atas Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025). Berdasarkan hasil evaluasi tahun Catatan Atas Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah DIY memiliki 348 program dan 2.382 sub kegiatan dengan pagu Rp5.237.363.379.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp800.154.567.876,00 atau dengan persentase capaian 15,28%, dan realisasi kinerja fisik 22,67%. Berdasarkan uraian tersebut, terjadi deviasi kinerja fisik sebesar -0,27% dan deviasi kinerja keuangan sebesar 5,99%. Secara umum, deviasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan jadwal, serta kegiatan yang diusulkan untuk rasionalisasi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pada aspek kualitas kinerja kegiatan instansi yang diukur dengan nilai *self-assessment* Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) diperoleh rerata skor seluruh OPD sebesar 82,89 dengan kategori Baik. Sehingga secara umum kinerja perangkat daerah Pemda DIY dapat dikatakan baik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 209 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 s.d. Triwulan I

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26.345.086.750	3	45	5.811.307.081	22,06	23,8	4.177.286.509	15,86	23,8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.017.234.794	7	38	14.976.404.022	49,89	49,9	13.670.538.997	45,54	48,81
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.622.803.924	4	27	5.772.241.261	27,99	28,03	3.630.058.646	17,6	28,03
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26.429.477.000	3	32	5.278.934.818	19,97	20,67	4.017.396.968	15,2	20,67
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.000.042.377.438	4	60	153.926.858.645	15,39	15,8	46.393.310.043	4,64	15,8
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	12.412.792.702	3	25	3.097.520.292	24,95	24,97	2.144.088.526	17,27	24,97
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	22.566.502.674	5	41	6.146.467.622	27,24	31,41	3.294.246.288	14,6	31,41
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	6.363.946.725	2	20	1.068.763.892	16,79	21,73	998.138.837	15,68	21,73
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2.162.688.400	3	17	545.729.953	25,23	27,68	473.811.517	21,91	27,68

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	9.724.398.200	2	10	1.555.971.220	16	23,24	1.364.116.633	14,03	23,24
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	4.618.624.150	4	21	626.296.258	13,56	16,91	477.162.954	10,33	16,53
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	6.465.603.490	2	16	1.054.707.450	16,31	16,35	1.000.677.628	15,48	16,35
13	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	2.394.142.000	3	20	484.796.300	20,25	21,6	422.612.594	17,65	21,6
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	5.698.986.300	2	6	587.291.550	10,31	10,31	550.144.753	9,65	10,31
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	4.521.948.000	2	23	1.292.640.400	28,59	29,97	1.272.531.157	28,14	29,97
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	81.352.071.500	4	26	24.977.440.300	30,7	27,32	39.043.089.152	47,99	67,86
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	37.768.778.720	2	30	1.248.006.571	3,3	5,62	1.173.949.877	3,11	5,62
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	21.277.472.050	2	28	2.757.584.500	12,96	16,12	2.628.731.632	12,35	16,12

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	17.067.263.100	2	29	1.772.248.797	10,38	12,44	1.571.730.241	9,21	12,44
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	20.941.093.600	2	30	2.872.129.809	13,72	17,33	2.749.007.750	13,13	17,33
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	19.888.711.809	2	30	3.018.127.356	15,18	15,2	2.874.712.732	14,45	15,2
22	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	20.848.901.431	3	18	1.427.647.550	6,85	7,27	1.309.843.980	6,28	7,21
23	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	4.217.214.550	2	18	893.086.450	21,18	51,22	749.294.865	17,77	51,22
24	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	6.796.721.014	4	23	1.386.776.685	20,4	21,77	1.073.444.456	15,79	21,75

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
25	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	7.460.219.400	4	19	911.666.262	12,22	13,3	872.856.340	11,7	13,3
26	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	11.796.073.900	2	21	1.437.098.551	12,18	22,83	1.356.070.754	11,5	22,83
27	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2.178.717.200	3	16	592.182.400	27,18	28,87	456.876.522	20,97	28,87
28	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	51.031.414.000	2	15	8.331.044.380	16,33	20,49	8.122.766.437	15,92	20,49
29	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	3.280.243.500	2	21	1.080.399.500	32,94	35,21	1.037.692.927	31,63	35,53
30	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1.720.862.500	2	26	551.646.900	32,06	32,05	545.555.027	31,7	32,05

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
31	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	5.854.474.692	2	39	1.437.197.300	24,55	26,45	1.415.558.005	24,18	26,45
32	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2.858.814.100	2	27	860.059.600	30,08	30,08	836.983.041	29,28	30,08
33	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	3.574.288.450	2	26	920.872.500	25,76	26,33	905.376.485	25,33	26,33
34	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	7.599.243.100	2	21	1.301.383.150	17,13	17,3	1.284.431.605	16,9	17,3
35	BIRO HUKUM	4.455.238.072	4	34	775.891.430	17,42	34,52	728.294.667	16,35	34,52
36	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.657.539.300	3	26	2.852.707.800	32,95	32,97	2.509.820.402	28,99	32,97
37	BIRO ORGANISASI	1.783.272.350	2	23	324.800.450	18,21	20,47	171.763.145	9,63	20,47
38	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	2.317.714.000	3	22	362.509.950	15,64	25,18	328.767.369	14,19	24,72
39	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.851.885.900	3	22	323.523.450	11,34	14,94	253.079.500	8,87	14,94

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
40	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.650.491.750	3	24	129.854.750	7,87	14,53	125.852.601	7,63	14,53
41	BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.339.969.700	4	23	999.061.750	42,7	42,92	639.265.225	27,32	42,92
42	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	16.404.745.860	2	31	3.646.416.514	22,23	22,9	2.969.950.484	18,1	22,9
43	DINAS KEBUDAYAAN	320.898.658.689	2	45	52.159.804.210	16,25	16,29	44.954.298.892	14,01	16,02
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.144.922.870	8	44	7.240.415.715	21,21	22,67	5.153.056.007	15,09	22,67
45	DINAS KESEHATAN	53.226.943.222	6	57	11.431.444.196	21,48	21,95	7.888.523.067	14,82	21,95
46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46.964.769.549	5	28	9.484.073.657	20,19	22,53	6.859.358.101	14,61	22,53
47	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	48.363.098.139	10	39	8.895.130.269	18,39	19,95	3.260.516.785	6,74	19,16
48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	70.311.342.402	12	56	16.278.959.737	23,15	26,05	12.535.172.016	17,83	26,01
49	DINAS PARIWISATA	30.202.481.669	7	44	6.322.234.324	20,93	21,77	3.768.281.636	12,48	20,94
50	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	351.723.436.523	14	65	44.544.506.420	12,66	14,9	21.287.238.148	6,05	10,36

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
51	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.752.217.310	8	32	5.412.698.561	30,49	30,82	4.028.961.799	22,7	30,82
52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	21.675.976.304	11	66	5.276.109.434	24,34	24,54	3.403.953.873	15,7	24,54
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.165.059.615	7	36	3.687.758.466	28,01	31,25	2.375.115.026	18,04	31,25
54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.499.887.410.462	6	64	405.968.699.360	27,07	27,09	357.932.701.392	23,86	27,11
55	DINAS PERHUBUNGAN	135.733.649.689	3	43	23.270.362.630	17,14	25,1	18.772.534.357	13,83	25,1
56	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.542.311.331	11	40	8.713.057.367	24,51	25,03	6.960.375.195	19,58	25,03

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	24.180.680.143	5	44	6.605.400.894	27,32	27,39	5.095.088.117	21,07	27,37
58	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	28.326.785.874	6	37	4.390.256.364	15,5	18,85	3.480.374.905	12,29	18,85
59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	61.141.718.262	12	50	17.272.734.022	28,25	28,48	12.077.613.059	19,75	28,45
60	DINAS SOSIAL	95.201.015.100	9	73	25.849.142.292	27,15	27,18	20.894.715.152	21,95	27,18
61	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39.915.775.848	8	49	10.192.120.954	25,53	25,99	8.537.927.438	21,39	25,85
62	INSPEKTORAT	28.284.119.874	3	40	7.854.488.504	27,77	32,44	5.516.637.479	19,5	32,4
63	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	4.408.461.400	2	19	1.141.234.379	25,89	28,49	969.790.258	22	28,49
64	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2.289.888.700	2	20	529.869.300	23,14	23,32	480.442.152	20,98	23,32
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULON PROGO	2.547.806.450	2	21	837.064.416	32,85	33,53	747.238.245	29,33	33,5
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	4.477.452.800	2	19	940.386.174	21	21,36	889.298.212	19,86	21,36

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2.316.503.700	2	19	446.379.000	19,27	20,34	412.912.294	17,82	20,34
68	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	14.157.111.500	3	20	1.179.353.895	8,33	8,33	1.132.277.622	8	9,74
69	PANIRADYA KAISTIMEWAN	28.410.114.093	2	32	5.809.393.055	20,45	20,68	4.374.039.909	15,4	21,36
70	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2.682.413.100	2	20	621.494.800	23,17	24,01	610.426.577	22,76	24,01
71	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	118.425.970.841	3	29	26.706.047.652	22,55	29,91	15.919.380.030	13,44	28,81
72	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	45.546.304.584	2	7	10.903.102.440	23,94	25,71	8.491.749.819	18,64	25,71
73	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.665.888.036	4	28	7.215.161.513	23,53	24,86	5.564.107.813	18,14	24,47
74	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2.217.622.000	2	2	210.037.800	9,47	9,47	206.010.608	9,29	9,47
75	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	942.090.000	2	2	71.653.733	7,61	8,7	71.290.190	7,57	8,7
76	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	2.234.610.000	2	2	146.474.600	6,55	6,58	141.461.007	6,33	6,58

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
77	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2.468.699.000	2	2	399.832.200	16,2	17,22	375.584.610	15,21	17,22
78	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	1.811.360.000	2	2	205.601.766	11,35	11,34	191.157.632	10,55	11,34
79	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	2.433.374.900	2	2	150.358.000	6,18	9,26	154.257.806	6,34	9,26
80	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	1.748.285.000	2	2	210.496.000	12,04	12,03	148.697.609	8,51	12,03
81	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2.357.559.000	2	2	111.317.080	4,72	4,85	110.935.300	4,71	4,85
82	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	5.119.150.000	2	2	350.974.775	6,86	7,24	351.029.000	6,86	7,24
83	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	3.429.100.000	2	2	286.925.000	8,37	8,43	273.732.644	7,98	8,09
84	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	2.832.939.250	2	2	284.017.377	10,03	10,03	264.122.753	9,32	10,03

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
85	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	5.308.362.000	2	2	410.457.393	7,73	8,14	337.074.213	6,35	8,14
86	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	1.889.964.000	2	2	175.984.290	9,31	10,02	199.957.849	10,58	10,02
87	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	983.061.950	2	2	138.500.100	14,09	14,09	14.555.000	1,48	13,84
88	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	3.976.675.000	2	2	416.471.008	10,47	10,46	396.464.838	9,97	10,46
89	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	3.310.184.000	2	2	254.054.160	7,67	7,72	281.102.841	8,49	10,45
90	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	5.026.189.000	2	2	351.167.822	6,99	6,99	326.505.267	6,5	6,99
91	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2.609.665.000	2	2	128.713.500	4,93	4,93	149.228.929	5,72	5,72
92	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	4.089.941.000	2	2	486.854.200	11,9	15,1	406.913.753	9,95	14,65

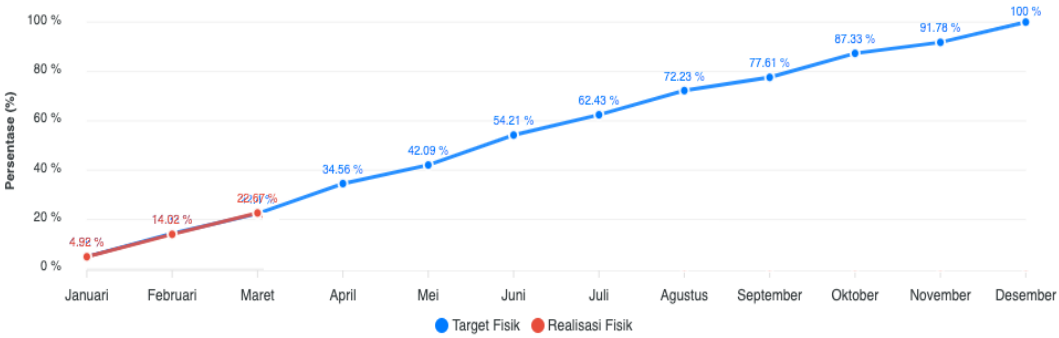
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	OPD	Pagu	Jumlah		Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
			Program	DPA	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
93	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	4.050.735.000	2	2	384.640.949	9,5	9,54	374.120.377	9,24	9,47
94	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2.840.549.263	2	2	373.780.673	13,16	13,16	343.064.597	12,08	13,16
95	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	3.906.700.000	2	2	643.996.600	16,48	16,53	580.674.002	14,86	16,53
96	SEKRETARIAT DAERAH	63.310.393.487	1	10	20.038.267.289	31,65	34,09	14.487.153.392	22,88	33,98
97	SEKRETARIAT DPRD	326.833.476.699	2	55	79.528.387.505	24,33	26,38	23.393.790.427	7,16	26,36
98	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	20.702.357.800	3	18	1.383.880.005	6,68	6,7	580.690.586	2,8	6,51
Jumlah		5.237.363.379.523	348	2382	1.113.739.023.244	21,27	22,4	800.154.567.876	15,28	22,67

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

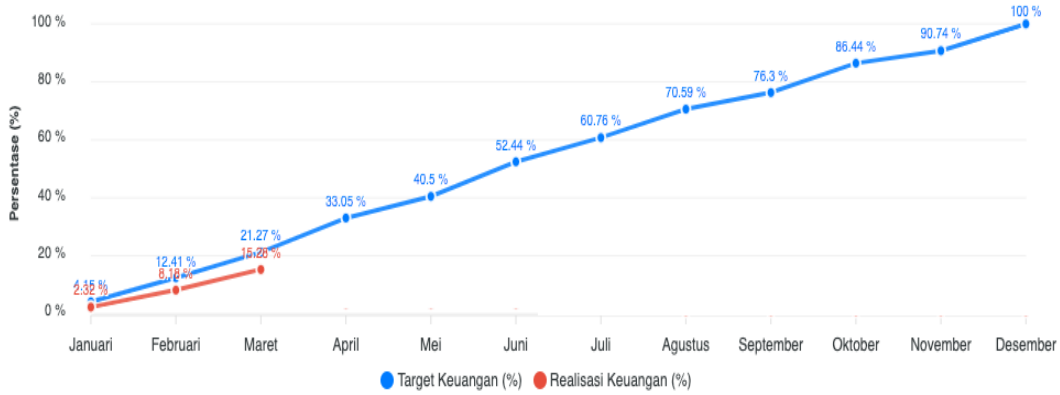
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian realisasi program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 divisualisasikan dalam grafik, sebagai berikut:



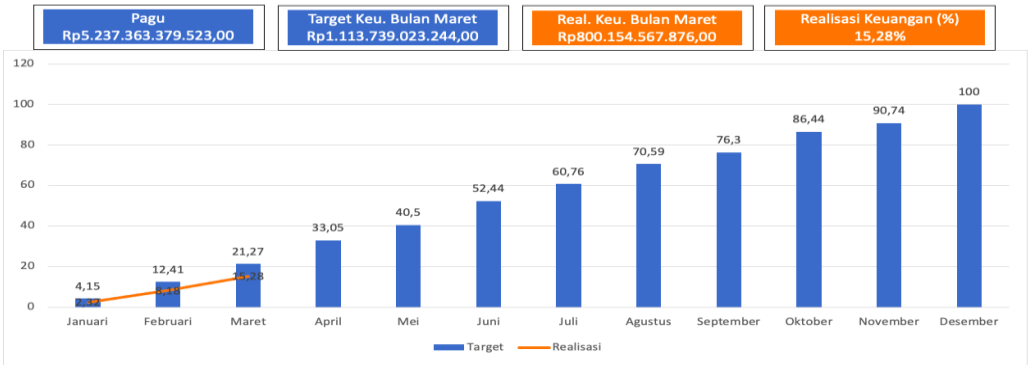
Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/, April 2025

Gambar 2- 123 Kinerja Fisik APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025



Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/, April 2025

Gambar 2- 124 Serapan Keuangan APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025



Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/, Mei 2025

Gambar 2- 125 Serapan Kinerja Keuangan dan Kinerja Fisik APBD s.d. Triwulan I Tahun 2025 (bulan Maret)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.5 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 18 Tahun 2017, kinerja urusan pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19 tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2- 210 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan s.d. Triwulan I Tahun 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:		Target	Realisasi
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	90	90.36
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50.73	94.31
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30.86	90.59
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51.96	82.73
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30.39	77.21
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.57	91.4
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51.35	75.34
8	Persentase pemuda bekerja	64.84	72.17
9	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	24	
10	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMA)	%	100	4.117.865.882.970	110,88	499.270.096.042		809.956.231.306	110,88	137.213.841.827							110,88	137.213.841.827	0,00	16,94	110,88	636.483.937.869	110,88	15,46	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	Orang	0		38																38		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				(Sekretariat)																								
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	%	100		110,88			110,88								110,88		0,00		110,88		110,88		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMA)	%	0		94,82			94,82								94,82		0,00		94,82		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Bidang Pembinaan SMK)	%	0					0,28								0,28		0,00		0,14		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMK)	%	100					110,88								110,88		0,00		55,44		55,44		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	%	0		87,79			87,79								87,79		0,00		87,79		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pembinaan SMK)	%	0		94,82				94,82							94,82		0,00		94,82		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	0		76,17				82,35							82,35		0,00		79,26		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase satuan	%	0		88,57				91,43							91,43		0,00		90		0,00		DINAS
No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7			8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	%	0		82,61				82,61							82,61		0,00		82,61		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	%	0		89,09				84,55							84,55		0,00		86,82		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*	*Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)*	*Medali*	*44*	*1.533.001.667.005*	*38*	*145.311.399.501*		*304.192.977.324*		*49.966.660.647*								*49.966.660.647*		*16,43*	*38*	*195.278.060.148*	*86,36*	*12,74*	*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	*Siswa*	*500*		*350*															*350*		*70,00*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	*%*	*74,76*		*74,31*															*37,155*		*49,70*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	*%*	*61,79*		*61,34*															*30,67*		*49,64*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Persentase SMA yang melaksanakan UKS	*%*	*36,1*		*30,1*															*15,05*		*41,69*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	*%*	*88,02*		*6,86*															*3,43*		*3,90*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Iklim keamanan SMA	*%*	*85,03*		*84,58*															*42,29*		*49,74*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Iklim kebinekaan SMA	*%*	*97,31*		*96,86*															*48,43*		*49,77*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Iklim Inklusivitas SMA	***%***	***83,58***		***30,1***														***15,05***		***18,01***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	74.900.625.000	0			17.250.000.000										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah	Ruang	5	1.690.587.247	4	935.464.815		324.387.400										0,00	4	935.464.815	80,00	55,33	DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Laboratorium Komputer	Komputer yang telah dibangun																									PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.690.587.247	4	637.932.814		324.387.400										0,00	4	637.932.814	80,00	37,73	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	5	20.776.335.905	17	3.337.117.665		3.986.532.845										0,00	17	3.337.117.665	340,00	16,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	90	21.627.007.383	41	10.525.516.960		4.149.758.440										0,00	41	10.525.516.960	45,56	48,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	25	10.058.813.716	3	526.763.357		1.930.070.415										0,00	3	526.763.357	12,00	5,24	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.835.585.580	1	327.217.822		544.088.000										0,00	1	327.217.822	20,00	11,54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.883.088.459	4	1.238.744.087		361.324.250										0,00	4	1.238.744.087	80,00	65,78	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.050.728.539	4	747.323.744		201.612.250										0,00	4	747.323.744	80,00	71,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.101.457.076	1	190.825.378		403.224.500										0,00	1	190.825.378	20,00	9,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	567.770.258	2	393.903.931		171.531.800										0,00	2	393.903.931	50,00	69,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	10	4.923.575.543	4	1.427.908.925		944.728.450										0,00	4	1.427.908.925	40,00	29,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	25	7.703.977.475				1.575.991.178										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	45	1.929.866.750	42	2.315.660.500		370.300.000										0,00	42	2.315.660.500	93,33	119,99	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	680.055.232	970	910.212.700		156.620.225		17.455.000						17.455.000		11,14	970	927.667.700	80,83	136,41	DINAS PENDIDIKAN,
No	**Sasaran**	**Kode**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**		**Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)**		**Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi**	**Realisasi Kinerja Pada Triwulan**								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
											I		**II**		**III**		**IV**										
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**	**9**		**10**		**11**		**12**		**13**		**14 = 13/8x100**		**15 = 7 + 13**		**16 = 15 / 6 x 100%**		**17**
						K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K** **Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
			Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Pendidikan																						PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	47.040	65.328.950.429	3.840	8.901.340.551		14.091.548.230		116.213.377						116.213.377		0,82	3.840	9.017.553.928	8,16	13,80	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1.480	23.869.065.563	308	1.460.618.500		5.458.626.800		308.478.650						308.478.650		5,65	308	1.769.097.150	20,81	7,41	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25.510	816.071.779	69	41.476.400		53.138.050										0,00	69	41.476.400	0,27	5,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	169	10.387.662.397	241	520.432.390		2.182.501.050		485.954.863						485.954.863		22,27	241	1.006.387.253	142,60	9,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	170	594.911.752.165	170	97.868.100.944		114.150.794.000		48.572.976.915						48.572.976.915		42,55	170	146.441.077.859	100,00	24,62	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	170	361.679.313	170	1.100.000		73.025.000										0,00	170	1.100.000	100,00	0,30	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	16.642.313.179		369.202.100		3.832.810.505	65	61.254.150						65	61.254.150	0,00	1,60	65	430.456.250	16,25	2,59	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	44	9.889.603.390	17	3.428.010.333		2.277.626.635		396.398.522						396.398.522		17,40	17	3.824.408.855	38,64	38,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	1.527.463.925	26	839.493.585		351.782.815		7.929.170						7.929.170		2,25	26	847.422.755	92,86	55,48	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas	Orang	400	4.563.703.071				1.051.044.340										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN,
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165						0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Bidang Pendidikan	bidang pendidikan yang dilaksanakan																										PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan*	*Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha*	%	*62*	*2.168.677.932.405*	*56*	*250.670.292.241*		*424.551.722.880*		*75.658.643.980*							*75.658.643.980*		*17,82*	*28*	*326.328.936.221*	*45,16*	*15,05*	*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Iklim kebinekaan SMK	%	*93,32*		*92,87*															*46,435*		*49,76*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	*Sekolah*	*7*		*5*																*5*		*71,43*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	*Sekolah*	*46*		*38*																*38*		*82,61*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	*66,35*																		*0*				*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	*55,31*		*54,86*																*27,43*		*49,59*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Persentase SMK yang melaksanakan UKS	%	*36,1*		*30,1*																*15,05*		*41,69*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
				Iklim keamanan SMK	%	*81,88*		*81,43*																*40,715*		*49,73*		*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	3.477.104.453				667.181.700											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun	Ruang	60	105.749.409.956	3	4.233.503.792		20.291.041.600											0,00	3	4.233.503.792	5,00	4,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	Ruang	55	31.139.430.872	9	5.919.782.448		5.974.988.300											0,00	9	5.919.782.448	16,36	19,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.051.399.797		637.932.814		201.741.050											0,00	0	637.932.814		60,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	3.477.104.453	1	904.290.268		667.181.700											0,00	1	904.290.268	20,00	26,01	DINAS PENDIDIKAN,
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

																												PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	60	11.014.109.145		3.337.117.665		2.113.371.100										0,00	0	3.337.117.665		30,30	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	25	6.880.879.964				1.320.293.150										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	10	8.589.118.189				1.954.880.400										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	95	11.527.855.257		2.315.660.500		2.211.947.950										0,00	0	2.315.660.500		20,09	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	914.954.077		910.212.700		210.718.640		17.455.000							17.455.000	8,28	0	927.667.700		101,39	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	115	185.423.456.541	43	48.364.431.100		33.505.445.500										0,00	43	48.364.431.100	37,39	26,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37.416	97.697.484.324	36.814	18.114.935.000		21.882.056.940										0,00	36.814	18.114.935.000	98,39	18,54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	219	737.042.722.114				146.390.841.715										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	219	3.146.722.381				694.707.525										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	4.875	48.754.992.351	1.230	8.901.340.551		10.157.607.070		116.213.377							116.213.377	1,14	1.230	9.017.553.928	25,23	18,50	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.130	15.809.258.622	501	2.455.769.300		3.610.631.770		539.594.500							539.594.500	14,94	501	2.995.363.800	44,34	18,95	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	645	1.793.903.291	67	237.184.650		376.732.755										0,00	67	237.184.650	10,39	13,22	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165						0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	219	11.634.539.631	166	728.494.636		2.459.015.675		17.979.261						17.979.261		0,73	166	746.473.897	75,80	6,42	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	210	860.998.723.034	204	147.905.656.503		165.207.171.500		74.501.820.000						74.501.820.000		45,10	204	222.407.476.503	97,14	25,83	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam	Orang	210	449.979.938	204	1.100.000		90.275.000										0,00	204	1.100.000	97,14	0,24	DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	985.432.070	4	839.493.585		226.950.085		7.929.170								7.929.170		3,49	4	847.422.755	14,29	86,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	4.284.311.256				986.698.965										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03	***Pengelolaan Pendidikan Khusus***	***Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)***	***Medali***	***16***	***416.186.283.560***	***13***	***103.288.404.300***		***81.211.531.102***		***11.588.537.200***						***11.588.537.200***		***14,27***	***13***	***114.876.941.500***	***81,25***	***27,60***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	***siswa***	***5.000***		***4.000***														***4.000***		***80,00***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	***%***	***59,52***		***59,07***														***29,535***		***49,62***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	***%***	***59,61***		***59,16***														***29,58***		***49,62***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Persentase SLB yang melaksanakan UKS	***%***	***30,1***		***24,1***														***12,05***		***40,03***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Iklim keamanan SMALB	***%***	***83,35***		***82,9***														***41,45***		***49,73***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Iklim kebinekaan SMALB	***%***	***81,02***		***80,57***														***40,285***		***49,72***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
				Iklim inklusivitas SMALB	***%***	***85,08***		***84,63***														***42,315***		***49,74***		***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	2.227.243.633				427.360.240										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	18	11.480.751.524	1	3.337.117.665		2.202.909.755										0,00	1	3.337.117.665	5,56	29,07	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	5.445.278.459	1	284.656.511		1.044.832.040										0,00	1	284.656.511	10,00	5,23	DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kesehatan Sekolah	Sekolah yang telah direhabilitasi																							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.087.797.563			208.725.000											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	5	800.990.595	0		153.692.900											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	4.688.746.719			899.669.840											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	70	1.947.846.875	10	2.315.660.500	373.750.000											0,00	10	2.315.660.500	14,29	118,88	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	543.863.732	500	910.212.700	156.620.225		17.455.000								17.455.000	11,14	500	927.667.700	41,67	170,57	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	30	2.851.914.530	4	48.364.431.100	547.221.175											0,00	4	48.364.431.100	13,33	1.695,86	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	52.180	73.773.866.359	5.093	10.468.841.500	14.676.541.500		24.953.000								24.953.000	0,17	5.093	10.493.794.500	9,76	14,22	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	9	80.046.981.344			16.287.932.077											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	79	1.326.460.109			305.490.600											0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2.300	27.189.782.109	470	8.901.340.551	5.505.052.760		116.213.377								116.213.377	2,11	470	9.017.553.928	20,43	33,17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	9.257	26.483.391.206	411	2.579.605.800		4.070.564.955		408.541.200						408.541.200		10,04	411	2.988.147.000	4,44	11,28	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.235	462.839.675	9	5.600.000		14.394.550										0,00	9	5.600.000	0,73	1,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	1.458.794.533		369.202.100		335.967.900		61.254.150								61.254.150		18,23	0	430.456.250		29,51	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	16	2.743.477.070		839.493.585		631.836.910		7.929.170								7.929.170		1,25	0	847.422.755		30,89	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	6.079.516.453				1.400.143.975										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten**	**%**	**0**	**2.552.808.591**	**96,62**	**453.351.894**		**530.581.250**	**96,62**	**225.000**							**96,62**	**225.000**	**0,00**	**0,04**	**96,62**	**453.576.894**	**0,00**	**17,77**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		1.01.04.1.01	***Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi***	***Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus***	***Tahun***	***1***	***2.552.808.591***	***1***	***453.351.894***		***530.581.250***		***225.000***								***225.000***		***0,04***	***1***	***453.576.894***	***100,00***	***17,77***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	2.552.808.591	1	453.351.894		530.581.250		225.000								225.000		0,04	1	453.576.894	20,00	17,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan**	**Dokumen**	**0**	**494.325.492**	**21**	**34.490.000**		**100.593.950**	**23**	**32.639.000**							**23**	**32.639.000**	**0,00**	**32,45**	**44**	**67.129.000**	**0,00**	**13,58**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		1.01.05.1.01	***Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	***Jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY***	***Dokumen***	***10***	***494.325.492***	***10***	***34.490.000***		***100.593.950***	***22***	***32.639.000***							***22***	***32.639.000***	***0,00***	***32,45***	***32***	***67.129.000***	***320,00***	***13,58***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	50	494.325.492	1	34.490.000		100.593.950		32.639.000								32.639.000		32,45	1	67.129.000	2,00	13,58	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)**	**%**	**0**	**201.008.088.900**	**75,02**	**32.254.043.875**		**40.062.000.000**	**75,02**	**447.199.931**					**75,02**	**447.199.931**	**0,00**	**1,12**	**75,02**	**32.701.243.806**	**0,00**	**16,27**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri	**%**	**0**		**75,02**				**75,02**						**75,02**		**0,00**		**75,02**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Khusus)																						
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Sekretariat)	**%**	**0**		**75,02**			**75,02**								**75,02**		**0,00**		**75,02**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		2.22.08.5.10	***Pendidikan Berbasis Budaya***	***Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya***	***%***	***53,69***	***201.008.088.900***	***50,17***	***32.254.043.875***	***40.062.000.000***		***447.199.931***								***447.199.931***		***1,12***	***25,085***	***32.701.243.806***	***46,72***	***16,27***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	71	172.050.588.900	14	29.119.885.972	34.232.000.000		107.372.400								107.372.400		0,31	14	29.227.258.372	19,72	16,99	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	17	9.089.700.000	2	304.084.100	1.870.000.000												0,00	2	304.084.100	11,76	3,35	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	450	19.867.800.000	89	2.830.073.803	3.960.000.000		339.827.531								339.827.531		8,58	89	3.169.901.334	19,78	15,95	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan**	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha**	**%**	**0**	**107.379.321.658**	**15**	**1.759.969.300**	**23.036.564.250**		**11.677.600**								**11.677.600**		**0,05**	**7,5**	**1.771.646.900**	**0,00**	**1,65**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		2.19.02.1.01	***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi***	***Jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan***	***Kelompok***	***30***	***106.779.652.908***	***20***	***1.759.969.300***	***22.979.064.250***		***11.677.600***								***11.677.600***		***0,05***	***20***	***1.771.646.900***	***66,67***	***1,66***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	52	4.968.119.008	25		1.144.183.415												0,00	25		48,08	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh	Orang	13.551	83.299.066.137			17.974.398.110												0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN,
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686	2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya																					PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10.500	12.859.246.892	900	1.759.969.300		2.961.550.840		11.677.600						11.677.600		0,39	900	1.771.646.900	8,57	13,78	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan	Orang	160	1.750.000.000				0										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota																							PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.02	***Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan***	***Lembaga***	***1***	***599.668.750***	***1***			***57.500.000***										***0,00***	***1***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	6	599.668.750				57.500.000										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan**	**%**	**0**	**8.990.062.500**	**100**	**1.500.000.000**		**1.725.000.000**	**100**	**1.500.000.000**						**100**	**1.500.000.000**	**0,00**	**86,96**	**100**	**3.000.000.000**	**0,00**	**33,37**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		2.19.04.1.01	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	***Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan***	***Lembaga***	***1***	***8.990.062.500***	***1***	***1.500.000.000***		***1.725.000.000***	***1***	***1.500.000.000***						***1***	***1.500.000.000***	***0,00***	***86,96***	***2***	***3.000.000.000***	***200,00***	***33,37***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	8.990.062.500	1	1.500.000.000		1.725.000.000		1.500.000.000							1.500.000.000		86,96	1	3.000.000.000	100,00	33,37	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	**Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional**	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS**	**Atlet**	**0**	**334.407.737.296**	**175**	**150.000**		**68.425.035.535**										**0,00**	**175**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		2.19.03.1.02	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga***	***Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti***	***Event***	***2***	***48.170.976.696***	***2***			***8.825.612.900***										***0,00***	***2***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	15	14.465.199.379				2.796.387.150										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	4	1.088.040.933				250.581.435										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165						0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1.215	32.617.736.384				5.778.644.315										0,00	0				0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.03	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional***	***Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga***	***Atlet***	***400***	***16.836.539.485***	***350***			***3.438.216.180***										***0,00***	***350***			***87,50***	***0,00***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	6.375	16.226.877.859				3.297.807.965										0,00	0				0,00	DINAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				olahraga prestasi di tingkat nasional																								
		2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	15	267.723.287.500				55.775.000.000										0,00	0				0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	1.676.933.615	1	150.000		386.206.455										0,00	1	150.000	25,00	0,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)**	**nilai**	**0**	**6.093.986.512.194**	**88,05**	**957.772.410.127**		**1.178.066.653.307**	**84,18**	**225.630.696.807**							**84,18**	**225.630.696.807**	**0,00**	**19,15**	**172,23**	**1.183.403.106.934**	**0,00**	**19,42**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLPT)	**nilai**	**0**		**91**				**86,65**								**86,65**		**0,00**		**177,65**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BTKP)	**nilai**	**0**		**90,65**				**88,29**								**88,29**		**0,00**		**178,94**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kota Yogyakarta)	**nilai**	**0**		**92,48**				**88,4**								**88,4**		**0,00**		**180,88**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Bantul)	**nilai**	**0**		**90,69**				**85,48**								**85,48**		**0,00**		**176,17**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Gunungkidul)	**nilai**	**0**		**92,43**				**83,86**								**83,86**		**0,00**		**176,29**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Kulon Progo)	**nilai**	**0**		**91,13**				**84,45**								**84,45**		**0,00**		**175,58**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kab. Sleman)	**nilai**	**0**		**91,98**				**89,87**							**89,87**		**0,00**		**181,85**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	**nilai**	**0**		**88,05**				**84,18**							**84,18**		**0,00**		**172,23**		**0,00**		**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
No	**Sasaran**	**Kode**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**		**Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)**		**Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi**		**Realisasi Kinerja Pada Triwulan**							**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
												I		**II**		**III**		**IV**										
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		**13**		**14 = 13/8x100**		**15 = 7 + 13**		**16 = 15 / 6 x 100%**		**17**
						K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																								PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	70	1.390.250.500	14	30.000.000		69.000.000												0,00	14	30.000.000	20,00	2,16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran***	***%***	***100***	***5.806.641.471.905***	***100***	***926.948.200.500***		***1.124.307.456.352***		***219.305.438.555***								***219.305.438.555***		***19,51***	***50***	***1.146.253.639.055***	***50,00***	***19,74***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	6.733	5.797.938.909.570	8.124	926.778.787.000		1.122.601.886.407		219.247.885.555								219.247.885.555		19,53	8.124	1.146.026.672.555	120,66	19,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	853.718.112	0			170.770.745												0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	120	3.969.876.420	7	89.413.500		756.410.200	2	52.007.000							2	52.007.000	0,00	6,88	9	141.420.500	7,50	3,56	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	1.001.152.304	2	50.000.000		196.618.950		633.000								633.000		0,32	2	50.633.000	20,00	5,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	55	2.877.815.499	18	30.000.000		581.770.050		4.913.000								4.913.000		0,84	18	34.913.000	32,73	1,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran***	***%***	***100***	***5.137.650.161***	***100***	***769.906.300***		***992.530.500***		***47.855.000***								***47.855.000***		***4,82***	***50***	***817.761.300***	***50,00***	***15,92***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	150	5.137.650.161	1	769.906.300		992.530.500	2	47.855.000							2	47.855.000	0,00	4,82	3	817.761.300	2,00	15,92	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***%***	***100***	***854.529.232***	***100***	***7.835.000***		***164.431.600***		***2.550.000***						***2.550.000***		***1,55***	***50***	***10.385.000***	***50,00***	***1,22***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		0.00.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	325.300.771				63.398.350										0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	175	464.034.957	1	7.835.000		86.018.850		2.550.000						2.550.000		2,96	1	10.385.000	0,57	2,24	DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																								PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	190	3.173.993.600	23	93.616.534		627.483.470		86.601.332								86.601.332		13,80	23	180.217.866	12,11	5,68	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	115	2.028.001.281	16	66.199.996		400.515.675	3	27.076.372							3	27.076.372	0,00	6,76	19	93.276.368	16,52	4,60	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	2.623.179.833	7	49.255.136		511.792.090	1	8.238.900							1	8.238.900	0,00	1,61	8	57.494.036	17,78	2,19	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	45	380.839.258	7	12.970.000		73.937.180	1	4.711.000							1	4.711.000	0,00	6,37	8	17.681.000	17,78	4,64	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	8.110.379.170	16	604.778.494		1.608.061.100		79.439.620								79.439.620		4,94	16	684.218.114	14,55	8,44	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	374.503.125				86.250.000												0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***	***58.113.812.390***		***3.000.000***		***9.502.509.500***		***40.670.000***						***40.670.000***		***0,43***	***0***	***43.670.000***		***0,08***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	80	7.451.418.270				1.593.202.180												0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.120	19.041.408.234	1	3.000.000		3.736.634.970		40.670.000						40.670.000		1,09	1	43.670.000	0,02	0,23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	15	153.140.005				36.296.920												0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165						0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	29.231.662.263				3.744.389.190									0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	385	2.236.183.618				391.986.240									0,00	0			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan***	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan***	***%***	***100***	***135.391.440.639***	***100***	***21.137.124.809***		***26.252.113.575***		***4.578.643.593***						***4.578.643.593***		***17,44***	***50***	***25.715.768.402***	***50,00***	***18,99***	***DINAS PENDIDIKAN,***
No	**Sasaran**	**Kode**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan**	**Kegiatan/**	**Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)**		**Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)**			**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi**		**Realisasi Kinerja Pada Triwulan**						**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)**	**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
													I		**II**		**III**		**IV**								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**			**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		**13**		**14 = 13/8x100**	**15 = 7 + 13**		**16 = 15 / 6 x 100%**		**17**
						K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
			Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																								PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat***	***%***	***100***	***42.611.329.465***	***100***	***2.523.873.855***		***8.238.481.136***		***272.373.600***						***272.373.600***		***3,31***	***50***	***2.796.247.455***	***50,00***	***6,56***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.105	3.631.828.054	106	108.478.800		669.583.935		46.642.000						46.642.000		6,97	106	155.120.800	5,04	4,27	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	260	5.030.023.363	50	388.691.426		1.021.005.006	1	148.140.900					1	148.140.900	0,00	14,51	51	536.832.326	19,62	10,67	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.880	391.122.612	0			71.376.130										0,00	0		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	104	3.607.764.805	0			726.191.535		27.649.700						27.649.700		3,81	0	27.649.700		0,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	195.516.400				41.400.000										0,00	0		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	424.436.875				97.750.000										0,00	0		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	140	29.330.637.356	15	2.026.703.629		5.611.174.530		49.941.000						49.941.000		0,89	15	2.076.644.629	10,71	7,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	***Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian***	***siswa***	***5.925***	***23.296.187.974***	***5.675***	***5.449.566.903***		***4.413.848.534***		***1.124.341.902***						***1.124.341.902***		***25,47***	***5.675***	***6.573.908.805***	***95,78***	***28,22***	***DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165					0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																		SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		0.00.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	23.296.187.974	2.712.010	5.449.566.903		4.413.848.534	3	1.124.341.902							3	1.124.341.902	0,00	25,47	2.712.013	6.573.908.805	45.200.216,67	28,22	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)**	**nilai**	**0**		**91,22**				**86,11**								**86,11**		**0,00**	**nan**	**177,33**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase capaian implementasi inovasi**	**%**	**0**	**400.000.000**	**25**	**287.034.448**		**100.000.000**											**0,00**	**12,5**	**287.034.448**	**0,00**	**71,76**	**DINAS PENDIDIKAN,**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.867.084.739.601		1.493.331.545.686		2.122.002.659.598		364.836.280.165							0,00	364.836.280.165	0,00	17,19		1.858.167.825.851	202.721,64	17,10	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	92.8	194.94
2 Indeks Keluarga Sehat	0.39	0.792

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretaris Dinkes)	%	0		92,03				92,03								92,03		0,00	nan	92,03		0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bapel Jamkessos)	%	0		93				86,51								86,51		0,00		89,755		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLKK)	%	0		93,2				93,2								93,2		0,00		93,2		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BAPELKES)	%	0		93,46				93,46								93,46		0,00		93,46		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Respira)	%	0		91,5				91,5								91,5		0,00		91,5		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya)	%	0		91,9				91,9								91,9		0,00		91,9		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Wakil Direktur Pelayanan)	%	0		91,9				91,9								91,9		0,00		91,9		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi)	%	0		91,9				91,9								91,9		0,00		91,9		0,00		DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya)	%	0		91,9				91,9								91,9		0,00		91,9		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan)	%	0		91,9				91,9								91,9		0,00		91,9		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan)	%	0						91,9								91,9		0,00		45,95		0,00		DINAS KESEHATAN
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Grhasia Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana)	%	0						91,9								91,9		0,00		45,95		0,00		DINAS KESEHATAN
				Jumlah Layanan Pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan, dan kebutuhan masyarakat	layanan	0		100				12								12		0,00		112		0,00		DINAS KESEHATAN
2	Terwujudnya Keluarga Sehat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas (Kesmas)	%	0	1.214.020.696.783	36,61	78.413.004.856		109.402.523.044	20								20		0,00	0,00	28,305	78.413.004.856	0,00	6,46	DINAS KESEHATAN
				Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)(Kesmas)	%	0		6,4				6,82								6,82		0,00		6,61		0,00		DINAS KESEHATAN
				Presentase Remaja putri anemia (Kesmas)	%	0		20,74				26,45								26,45		0,00		23,595		0,00		DINAS KESEHATAN
				Presentase ODGJ yang mendapatkan	%	0		91,1				93,4								93,4		0,00		92,25		0,00		DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				pelayanan secara standar (RSJ Ghrasia)																								
				Presentase Fasyankes Terakreditasi (Yankes)	%	0		71,64				73,01								73,01		0,00		72,325		0,00		DINAS KESEHATAN
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar (Kesmas)	%	0		94,46				25,77								25,77		0,00		60,115		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC (P2P)	%	0		85,13				85,52								85,52		0,00		85,325		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)(P2P)	%	0		62,91				51								51		0,00		56,955		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria(P2P)	%	0		100				100								100		0,00		100		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		78,13				5,01								5,01		0,00		41,57		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		84,2				5,17								5,17		0,00		44,685		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara (P2P)	%	0		15,93				15,43								15,43		0,00		15,68		0,00		DINAS KESEHATAN
				Presentase Masyarakat miskin mendapat layanan Jaminan Kesehatan (Jamkessos)	%	0		100				100								100		0,00		100		0,00		DINAS KESEHATAN
				Persentase Keberhasilan	%	0		85,8				94,44								94,44		0,00		90,12		0,00		DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pengobatan TBC (RS Paru Respira)																								
				Persentase ODGJ berat ditangani dan tidak diterlantarkan (RS Grhasia)	**%**	**0**		**0**			**7,27**							**7,27**		**0,00**		**3,635**		**0,00**		**DINAS KESEHATAN**
				Persentase Angka keberhasilan pasien ODGJ yang menyelesaikan tahapan rehabilitasi (RSJ Grhasia)	**%**	**0**		**0**			**92,04**							**92,04**		**0,00**		**46,02**		**0,00**		**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.1.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi***	***Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan***	***%***	***100***	***776.746.613.851***	***100***	***27.826.119.906***	***26.742.174.400***										***0,00***	***50***	***27.826.119.906***	***50,00***	***3,58***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	390.667.498.584			0										0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	2	182.065.629.800	1	25.036.245.500	3.500.000.000										0,00	1	25.036.245.500	50,00	13,75	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1.480	90.613.367.332	12	2.761.364.506	1.306.520.000										0,00	12	2.761.364.506	0,81	3,05	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	139	4.283.150.000			950.000.000										0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298	382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	250.000.000				250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	76	19.072.464.000				3.046.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	26	1.246.712.400	5			236.169.500												0,00	5		19,23	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	24	88.274.511.135	1			17.388.712.500												0,00	1		4,17	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	814.450	273.280.600	814.300	28.509.900		64.772.400												0,00	814.300	28.509.900	99,98	10,43	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi***	***Persentase RS memenuhi standar kredentialing***	***%***	***88,61***	***436.842.213.932***	***84,81***	***50.539.633.650***		***82.581.727.644***												***0,00***	***42,405***	***50.539.633.650***	***47,86***	***11,57***	***DINAS KESEHATAN***
				Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya	***%***	***100***		***60***															***30***		***30,00***		***DINAS KESEHATAN***
				Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	***%***	***80***		***60***															***30***		***37,50***		***DINAS KESEHATAN***
				Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ	***%***	***100***		***100***															***50***		***50,00***		***DINAS KESEHATAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM	*undefined*	*252*		*247*																*247*		*98,02*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	*%*	*98*		*97,42*																*48,71*		*49,70*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella	*%*	*93,5*		*92,7*																*46,35*		*49,57*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	*%*	*80*		*77*																*38,5*		*48,13*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase K6	*%*	*90*		*60*																*30*		*33,33*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase KN Lengkap	*%*	*100*		*70*																*35*		*35,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	*%*	*88*		*85*																*42,5*		*48,30*		*DINAS KESEHATAN*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	*%*	*100*		*100*																*50*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah	*%*	*18*		*12*																*6*		*33,33*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase lansia mendapat layanan kesehatan	*%*	*60*		*54*																*27*		*45,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam	*%*	*90*		*90*																*45*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta	*%*	*100*		*95*																*47,5*		*47,50*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase pembayaran klaim	*%*	*100*		*100*																*50*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan																								
				Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan	*%*	*100*																	*0*				*DINAS KESEHATAN*
				Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus	*%*	*95*		*70*															*35*		*36,84*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	*%*	*100*		*100*															*50*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT	*%*	*100*		*100*															*50*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC	*%*	*51*		*48*															*24*		*47,06*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART	*%*	*72*		*69*															*34,5*		*47,92*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria	*%*	*100*		*100*															*50*		*50,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen	*%*	*100*		*60*															*30*		*30,00*		*DINAS KESEHATAN*
				Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM	*%*	*100*		*60*															*30*		*30,00*		*DINAS KESEHATAN*
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen																								
		1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	2.280	19.619.431.031	438	664.251.675		798.425.000												0,00	438	664.251.675	19,21	3,39	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28.500	1.802.108.100	28.215	272.965.600		270.000.000												0,00	28.215	272.965.600	99,00	15,15	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	42	2.677.703.700	6	933.513.600		544.410.000												0,00	6	933.513.600	14,29	34,86	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5	1.796.300.000	1	4.494.000		310.000.000												0,00	1	4.494.000	20,00	0,25	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	3	169.901.000	1	4.700.000		35.000.000												0,00	1	4.700.000	33,33	2,77	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8	16.200.963.200	3	476.098.000		3.700.000.000												0,00	3	476.098.000	37,50	2,94	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	38	662.432.950	1	4.987.500		180.576.500												0,00	1	4.987.500	2,63	0,75	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	16	1.099.283.473	4	1.003.939.210		198.220.100												0,00	4	1.003.939.210	25,00	91,33	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	27	10.168.103.050	1	1.441.865.825		1.457.711.200												0,00	1	1.441.865.825	3,70	14,18	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Dokumen	42	10.985.317.777	8	1.207.050.961		1.788.273.931												0,00	8	1.207.050.961	19,05	10,99	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Menular dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular																							
		1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dokumen	1	920.000.000	1	4.995.200		220.000.000												0,00	1	4.995.200	100,00	0,54	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	32	346.619.521.437	7	44.208.676.279		66.674.925.028												0,00	7	44.208.676.279	21,88	12,75	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1.370.647.537	4	80.170.950		277.832.940												0,00	4	80.170.950	400,00	5,85	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10	2.281.698.500	1	5.000.000		498.516.000												0,00	1	5.000.000	10,00	0,22	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	32	17.770.353.877	1	975.000		5.056.776.945												0,00	1	975.000	3,13	0,01	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6	2.698.448.300	1	225.949.850		571.060.000												0,00	1	225.949.850	16,67	8,37	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***	***Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan***	***%***	***100***	***36.400.000***	***100***			***7.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	12	36.400.000	3			7.000.000												0,00	3		25,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi***	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan***	***%***	***100***	***395.469.000***	***100***	***47.251.300***		***71.621.000***												***0,00***	***50***	***47.251.300***	***50,00***	***11,95***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	50	124.582.000	32	4.980.600		25.000.000												0,00	32	4.980.600	64,00	4,00	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya																							
		1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	405	270.887.000	311	42.270.700		46.621.000												0,00	311	42.270.700	76,79	15,60	DINAS KESEHATAN
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Presentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (SDK)**	**%**	**0**	**4.395.557.000**	**62,97**	**466.327.457**		**885.979.000**	**61,82**								**61,82**		**0,00**	**0,00**	**62,395**	**466.327.457**	**0,00**	**10,61**	**DINAS KESEHATAN**
				Persentase SDM yang Meningkat Kompetensinya Pasca Pelatihan (Bapelkes)	**%**	**0**		**90,52**				**87**								**87**		**0,00**		**88,76**		**0,00**		**DINAS KESEHATAN**
				Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan (P2P)	**%**	**0**		**90,52**														**45,26**		**0,00**		**DINAS KESEHATAN**
		1.02.03.1.01	***Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi***	***Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)***	***%***	***88,51***	***245.000.000***	***87,53***	***28.728.395***		***60.000.000***												***0,00***	***43,765***	***28.728.395***	***49,45***	***11,73***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	28.528	120.000.000	30.010	23.728.395		30.000.000												0,00	30.010	23.728.395	105,19	19,77	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	54	125.000.000	5	5.000.000		30.000.000												0,00	5	5.000.000	9,26	4,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan***	***Persentase SDM yang meningkat kompetensinya***	***%***	***90***	***4.150.557.000***	***8.799,48***	***437.599.062***		***825.979.000***												***0,00***	***4.399,74***	***437.599.062***	***4.888,60***	***10,54***	***DINAS KESEHATAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Tingkat Daerah Provinsi																									
				Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan	***%***	***99,74***		***99,48***																***49,74***		***49,87***		***DINAS KESEHATAN***
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8.306	2.123.396.200	2.503	159.724.400		415.979.000												0,00	2.503	159.724.400	30,13	7,52	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia KesehatanJumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehata	Dokumen	18	2.027.160.800	2	277.874.662		410.000.000												0,00	2	277.874.662	11,11	13,71	DINAS KESEHATAN
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Presentase Peningkatan Keamanan Pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan (SDK)**	**%**	**0**	**641.536.600**	**89,66**	**23.621.552**		**149.987.000**	**17,61**								**17,61**		**0,00**	**0,00**	**53,635**	**23.621.552**	**0,00**	**3,68**	**DINAS KESEHATAN**
				Presentase Peningkatan Penerapan Standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi (SDK)	**%**	**0**		**92,59**				**17,25**								**17,25**		**0,00**		**54,92**		**0,00**		**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.1.01	***Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)***	***Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan***	***%***	***100***	***312.880.600***	***100***	***18.860.184***		***70.223.000***												***0,00***	***50***	***18.860.184***	***50,00***	***6,03***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	49	230.716.600	52	18.860.184		50.282.000												0,00	52	18.860.184	106,12	8,17	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi	Dokumen	4	82.164.000	0			19.941.000												0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik																							
		1.02.04.1.02	***Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)***	***Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan***	***%***	***100***	***328.656.000***	***100***	***4.761.368***		***79.764.000***											***0,00***	***50***	***4.761.368***	***50,00***	***1,45***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	37	273.880.000	27	4.761.368		66.470.000											0,00	27	4.761.368	72,97	1,74	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.02.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	4	54.776.000				13.294.000											0,00	0			0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Kesmas)**	**%**	**0**	**2.433.485.000**	**100**	**52.598.500**		**576.779.500**	**2,49**								**2,49**		**0,00**	**0,00**	**51,245**	**52.598.500**	**0,00**	**2,16**	**DINAS KESEHATAN**
		1.02.05.1.01	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi***	***Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi***	***%***	***100***	***2.433.485.000***	***100***	***52.598.500***		***576.779.500***											***0,00***	***50***	***52.598.500***	***50,00***	***2,16***	***DINAS KESEHATAN***
		1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	25	2.433.485.000	3	52.598.500		576.779.500											0,00	3	52.598.500	12,00	2,16	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	%	0		0,701				0,95								0,95		0,00	nan	0,8255		0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase Kab/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelyanan kesehatan tradisional (Kesmas)	%	0		20															nan	10		0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							2.355.474.047.196		228.304.847.298		382.777.292.515									0,00		0,00	0,00		228.304.847.298	72,89	9,69	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:		Target	Realisasi
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.32	96.41
2	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.98	95.97
3	Persentase rumah tangga berakses listrik	99.99	99.99
4	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.28	9.24
5	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	20	20
6	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	97.41	98.11
7	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	90.63	101.56
8	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	98.77	99.292
9	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	90.72	93.78
10	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	95.89	95.88

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Penduduk Berakses Air Minum**	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional**	**%**	**23,85**	**155.044.288.230**	**40,45**		**58.471.399.424**	**48,74**								**48,74**		**0,00**	**0,00**	**44,595**		**186,98**	**0,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.03.1.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota***	***Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional***	***%***	***23,85***	***155.044.288.230***	***22,42***		***58.471.399.424***												***0,00***	***11,21***		***47,00***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	***%***	***100***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	unit	1	109.039.288.230	1		26.771.399.424	1								1		0,00	0,00	2		200,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	0	0			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	dokumen	1	200.000.000	0		0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	l/det	475	27.200.000.000			25.300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR	24.972	18.475.000.000			6.400.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																												SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota	3	100.000.000				0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	30.000.000	1			0											0,00	1		100,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha	2,54	0				0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	%	98,05																	0					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan**	**%**	**100**	**289.002.000.000**	**64,6**			**66.050.000.000**											**0,00**	**32,3**		**32,30**	**0,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.04.1.01	***Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional***	***Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional***	***%***	***100***	***289.002.000.000***	***100***			***66.050.000.000***											***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga	183.795	247.960.000.000				60.000.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	unit	1	39.825.000.000				5.000.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit	1	1.217.000.000				1.050.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2	**Rumah Tangga yang menempati hunian layak**	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**	**%**	**100**	**187.210.500.000**	**100**	**334.844.388**		**61.402.500.000**											**0,00**	**50**	**334.844.388**	**50,00**	**0,18**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I				II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	**%**	**100**		**100**																**50**		**50,00**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.04.02.1.01	***Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi***	***Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni***	***%***	***100***	***7.800.000.000***	***100***			***2.150.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	***dokumen***	***8***																	***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	dokumen	13	3.000.000.000	1			600.000.000												0,00	1		7,69	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	3	950.000.000				350.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen	5	750.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	dokumen	5	1.900.000.000	1			900.000.000												0,00	1		20,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	4	1.200.000.000				300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.03	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi***	***Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi***	***unit***	***51***	***179.410.500.000***	***6***	***334.844.388***		***59.252.500.000***												***0,00***	***6***	***334.844.388***	***11,76***	***0,19***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	***unit***	***20***		***3***															***3***		***15,00***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit	20	1.000.000.000			250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	unit	25	3.660.500.000	3	334.844.388	752.500.000												0,00	3	334.844.388	12,00	9,15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	unit	6	174.750.000.000			58.250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan RTLH**	**%**	**0**	**140.135.000.000**	**13,36**	**16.187.193.467**	**26.600.000.000**	**13,36**								**13,36**		**0,00**	**0,00**	**13,36**	**16.187.193.467**	**0,00**	**11,55**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Cakupan penanganan kawasan kumuh	**Ha**	**0**																	**0**				**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.04.03.1.01	***Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha***	***Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan***	***dokumen***	***2***	***1.415.000.000***			***100.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	***laporan***	***5***		***0***														***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	***dokumen***	***1***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	dokumen	2	700.000.000			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	5	715.000.000	1		100.000.000												0,00	1		20,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.04.03.1.02	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha***	***Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha***	***Dokumen***	***2***	***138.720.000.000***	***1***	***16.187.193.467***	***26.500.000.000***												***0,00***	***1***	***16.187.193.467***	***50,00***	***11,67***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	***unit***	***4.794***		***747***														***747***		***15,58***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Luasan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY yang tertangani	***Ha***	***0***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	***%***	***58,28***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	2	500.000.000			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit	5.243	127.720.000.000	747	16.187.193.467	23.000.000.000												0,00	747	16.187.193.467	14,25	12,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	15	10.500.000.000			3.500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Penanganan PSU layak di permukiman**	**lokasi**	**178**	**428.732.050.000**	**550**	**69.512.670.598**	**55.605.000.000**												**0,00**	**550**	**69.512.670.598**	**308,99**	**16,21**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.04.05.1.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman***	***Penyediaan PSU layak di permukiman***	***lokasi***	***2.346***	***428.732.050.000***	***1.179***	***69.512.670.598***	***55.605.000.000***												***0,00***	***1.179***	***69.512.670.598***	***50,26***	***16,21***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman	***lokasi***	***160***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											DAYA MINERAL
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	dokumen	6	3.302.050.000	2	181.185.604	605.000.000												0,00	2	181.185.604	33,33	5,49	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	lokasi	2.346	425.430.000.000	1.178	69.331.484.994	55.000.000.000												0,00	1.178	69.331.484.994	50,21	16,30	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP**	**unit**	**300**	**249.454.110.000**	**377**	**18.926.386.019**	**45.705.000.000**		**114.404.749**								**114.404.749**		**0,25**	**377**	**19.040.790.768**	**125,67**	**7,63**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	**%**	**90,8**		**87,69**			**87,69**								**87,69**		**0,00**		**87,69**		**96,57**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun***	***unit***	***2.193***	***179.912.560.000***	***326***	***8.945.719.410***	***31.570.000.000***		***114.404.749***								***114.404.749***		***0,36***	***326***	***9.060.124.159***	***14,87***	***5,04***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	2.193	179.912.560.000	326	8.945.719.410	31.570.000.000		114.404.749								114.404.749		0,36	326	9.060.124.159	14,87	5,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027***	***%***	***100***	***69.541.550.000***	***59,15***	***9.980.666.609***	***14.135.000.000***												***0,00***	***29,575***	***9.980.666.609***	***29,58***	***14,35***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***laporan***	***1***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	24	66.757.250.000	3	9.980.666.609	13.475.000.000	0								0		0,00	0,00	3	9.980.666.609	12,50	14,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	6	2.784.300.000	3			660.000.000										5.467.883		0,00	3		50,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3	**Rumah Tangga Berakses Listrik**	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan**	**TOE**	**58.030**	**9.745.785.000**	**65.253,42**	**238.000.715**		**2.139.500.000**		**5.467.883**								**5.467.883**		**0,26**	**65.253,42**	**243.468.598**	**112,45**	**2,50**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		3.29.05.1.07	***Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi***	***Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan***	***unit***	***5***	***9.745.785.000***	***1***	***238.000.715***		***2.139.500.000***		***5.467.883***								***5.467.883***		***0,26***	***1***	***243.468.598***	***20,00***	***2,50***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsisi	***laporan***	***1***		***1***															***1***		***100,00***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan	***TOE***	***1.000***																	***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik	***%***	***21,8***																	***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	6	884.805.000	1			181.500.000												0,00	1		16,67	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Pengembangan potensi Energi Terbarukan dan konservasi energi	Unit	2.434	8.860.980.000	1	238.000.715		1.958.000.000		5.467.883								5.467.883		0,28	1	243.468.598	0,04	2,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan**	**izin**	**150**	**11.544.055.950**	**105**	**571.240.397**		**2.537.896.450**	**25**	**9.963.836**							**25**	**9.963.836**	**0,00**	**0,39**	**130**	**581.204.233**	**86,67**	**5,03**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	**Rumah Tangga**	**16.423**		**18.611**				**18.615**								**18.615**		**0,00**		**37.226**		**226,67**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.29.06.1.02	***Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi***	***Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan***	***dokumen***	***15***	***3.640.618.450***	***6***	***338.988.113***	***742.896.450***		***9.963.836***								***9.963.836***		***1,34***		***6***	***348.951.949***	***40,00***	***9,58***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	***izin***	***150***		***255***			***25***								***25***		***0,00***		***280***		***186,67***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	***%***	***37,73***																	***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen	15	673.811.700	3	250.605.234	65.000.000	0	7.035.065							0	7.035.065	0,00	10,82	3	257.640.299	20,00	38,24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	2.966.806.750	1	88.382.879	677.896.450	0	2.928.771							0	2.928.771	0,00	0,43	1	91.311.650	6,25	3,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06	***Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan***	***Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan***	***unit***	***600***	***7.903.437.500***	***143***	***232.252.284***	***1.795.000.000***												***0,00***	***143***	***232.252.284***	***23,83***	***2,94***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	***unit***	***600***																	***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	2.689	7.903.437.500	25	232.252.284	1.795.000.000												0,00	25	232.252.284	0,93	2,94	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4	**Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang**	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan**	**Ha**	**4.031**	**11.964.096.804**	**3.966,68**	**831.419.282**	**3.650.969.820**	**3.966,68**	**31.876.906**							**3.966,68**	**31.876.906**	**0,00**	**0,87**	**7.933,36**	**863.296.188**	**196,81**	**7,22**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		3.29.03.1.01	***Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil***	***Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil***	***Laporan***	***12***	***3.901.182.524***	***2***	***162.156.237***	***911.420.400***		***5.705.099***								***5.705.099***		***0,63***	***2***	***167.861.336***	***16,67***	***4,30***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	***%***	***40***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	14	3.901.182.524	1	162.156.237		911.420.400	0	5.705.099							0	5.705.099	0,00	0,63	1	167.861.336	7,14	4,30	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.03	***Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut***	***Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut***	***dokumen***	***34***	***4.962.914.280***	***3***	***614.651.255***		***1.229.549.420***		***18.109.793***								***18.109.793***		***1,47***	***3***	***632.761.048***	***8,82***	***12,75***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	***%***	***100***		***100***														***50***		***50,00***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	dokumen	13	1.846.400.000	3	362.124.673		550.000.000		7.387.127								7.387.127		1,34	3	369.511.800	23,08	20,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	20	3.116.514.280	1	252.526.582		679.549.420	0	10.722.666							0	10.722.666	0,00	1,58	1	263.249.248	5,00	8,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.04	***Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat***	***Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat***	***dokumen***	***3***	***3.100.000.000***	***5***	***33.437.123***		***1.510.000.000***		***6.713.240***								***6.713.240***		***0,44***	***5***	***40.150.363***	***166,67***	***1,30***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan	***dokumen***	***1***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	dokumen	16	2.500.000.000	5	33.437.123	910.000.000		6.713.240								6.713.240		0,74	5	40.150.363	31,25	1,61	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	laporan	1	600.000.000			600.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.07	***Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan***	***Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan***	***Laporan***	***9***		***1***	***21.174.667***			***1.348.774***							***1.348.774***		***inf***	***1***	***22.523.441***	***11,11***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	***%***	***40***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	11	0	1	21.174.667	0	0	1.348.774							0	1.348.774	0,00	0,00	1	22.523.441	9,09	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	undefined	0																0				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5	**Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman**	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Pengendalian Pengusahaan Air Tanah**	**%**	**10**	**10.812.136.418**	**10**	**532.435.354**	**2.443.850.595**	**10**	**10.610.629**							**10**	**10.610.629**	**0,00**	**0,43**	**10**	**543.045.983**	**100,00**	**5,02**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		3.29.02.1.01	***Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi***	***Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi***	***dokumen***	***6***	***5.357.250.000***	***4***	***280.018.385***	***1.163.000.000***		***4.438.005***								***4.438.005***		***0,38***	***4***	***284.456.390***	***66,67***	***5,31***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi	***dokumen***	***3***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	***laporan***	***21***		***4***														***4***		***19,05***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAYA MINERAL
				Review Neraca Air Tanah	***dokumen***	***3***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	***dokumen***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	***laporan***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam	***laporan***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah	***laporan***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan air tanah	***laporan***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dokumen	7	2.940.000.000	1	233.328.620		0											0,00		1	233.328.620	14,29	7,94	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	dokumen	3	850.000.000				850.000.000											0,00		0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	21	1.567.250.000	3	46.689.765		313.000.000		4.438.005								4.438.005		1,42	3	51.127.770	14,29	3,26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.03	***Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi***	***Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul***	***dokumen***	***6***	***5.454.886.418***	***1***	***252.416.969***		***1.280.850.595***		***6.172.624***								***6.172.624***		***0,48***	***1***	***258.589.593***	***16,67***	***4,74***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784						0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAYA MINERAL
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	***Laporan***	***7***		***1***																***1***		***14,29***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	***Laporan***	***18***		***3***																***3***		***16,67***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	***laporan***	***1***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	***%***	***40,49***																		***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	6	805.184.270	1	103.160.241		167.388.375												0,00		1	103.160.241	16,67	12,81	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	6	800.000.000	1	19.994.913		50.000.000		1.456.203								1.456.203		2,91	1	21.451.116	16,67	2,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	3.849.702.148	1	129.261.815		1.063.462.220	0	4.716.421							0	4.716.421	0,00	0,44	1	133.978.236	6,25	3,48	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6	**Penduduk Berakses Sanitasi**	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional**	**%**	**38,05**	**241.239.379.549**	**37,86**			**54.601.443.294**	**37,86**								**37,86**		**0,00**	**0,00**	**37,86**		**99,50**	**0,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.05.1.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional***	***Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat***	***Rumah Tangga***	***28.535***	***241.239.379.549***	***27.035***			***54.601.443.294***												***0,00***		***27.035***		***94,74***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi	***unit***	***2***		***2***																***2***		***100,00***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											DAYA MINERAL
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	***%***	***100***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	Unit	0	0			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	28.535	174.577.199.250	28.393		22.950.000.000	28.393								28.393		0,00	0,00	56.786		199,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2	66.662.180.299	2		31.651.443.294												0,00	2			100,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Pengurangan luasan genangan**	**ha**	**6,86**	**79.400.000.000**	**7,92**		**20.535.600.000**	**7,92**								**7,92**		**0,00**	**0,00**	**15,84**		**230,90**	**0,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.06.1.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi***	***Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani***	***ha***	***6,86***	***79.400.000.000***	***30,12***		***20.535.600.000***	***7,92***								***7,92***		***0,00***	***0,00***	***38,04***		***554,52***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	4	1.200.000.000			300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	unit	8	78.200.000.000			20.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	11	0	8		235.600.000	2								2		0,00	0,00	10		90,91	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7	**Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air**	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari**	**liter/detik**	**25.403,58**	**297.385.380.000**	**25.417,85**	**21.674.502.807**	**48.802.355.700**	**25.423,3**	**2.344.138.918**							**25.423,3**	**2.344.138.918**	**0,00**	**4,80**	**50.841,15**	**24.018.641.725**	**200,13**	**8,08**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	**%**	**58,05**		**36,59**			**36,59**								**36,59**		**0,00**		**36,59**		**63,03**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.02.1.01	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)***	***liter/detik***	***25.403,58***	***115.631.300.000***	***101.622,59***	***3.458.842.918***	***29.988.725.700***	***25.423,3***	***434.258.918***							***25.423,3***	***434.258.918***	***0,00***	***1,45***	***127.045,89***	***3.893.101.836***	***500,11***	***3,37***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	***liter/detik***	***576,01***		***25.391,58***															***25.391,58***		***4.408,18***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	dokumen	5	199.000.000	1		28.541.000												0,00	1		20,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	lembaga	2	7.600.000.000	2		250.000.000												0,00	2		100,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dokumen	10	2.150.000.000			450.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	laporan	10	9.521.500.000	2		1.124.558.200												0,00	2		20,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	27	23.835.800.000	25	3.000.740.976	2.685.626.500	6	434.258.918							6	434.258.918	0,00	16,17	31	3.434.999.894	114,81	14,41	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	dokumen	11	4.150.000.000	4	458.101.942	950.000.000												0,00	4	458.101.942	36,36	11,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	3	20.800.000.000			6.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	titik	36	19.875.000.000	1		5.500.000.000												0,00	1		2,78	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	unit	16	27.500.000.000			13.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY***	***%***	***58,05***	***181.754.080.000***	***21,86***	***18.215.659.889***	***18.813.630.000***		***1.909.880.000***								***1.909.880.000***		***10,15***	***10,93***	***20.125.539.889***	***18,83***	***11,07***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	***%***	***12,51***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	17,8	46.386.500.000	1,08	796.706.037	0												0,00	1,08	796.706.037	6,07	1,72	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	12,08	37.325.001.000	4,518	5.354.457.498	1.840.000.000	0								0		0,00	0,00	4,518	5.354.457.498	37,40	14,35	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	511,77	72.088.759.800	511,77	10.636.165.588	14.710.500.000	96,675173506185	1.552.180.000							96,675173506185	1.552.180.000	0,00	10,55	608,44517350619	12.188.345.588	118,89	16,91	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	41	10.353.819.200	41	1.428.330.766	1.263.130.000	8	338.400.000							8	338.400.000	0,00	26,79	49	1.766.730.766	119,51	17,06	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	10	5.100.000.000			1.000.000.000		19.300.000								19.300.000		1,93	0	19.300.000		0,38	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	41	0	41		0												0,00	41		100,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	%	100																	0				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.02.1.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	bendung	1	5.000.000.000			0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	bendung	2	5.500.000.000			0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8	**Peningkatan Aksesibilitas Jalan**	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kemantapan jalan**	**%**	**62,4**	**707.997.448.119**	**68,04**	**84.190.203.060**	**157.978.762.796**	**68,04**	**6.824.205.257**							**68,04**	**6.824.205.257**	**0,00**	**4,32**	**68,04**	**91.014.408.317**	**109,04**	**12,86**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.10.1.01	***Penyelenggaraan Jalan Provinsi***	***Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan***	***%***	***62,4***	***707.997.448.119***	***68,04***	***84.190.203.060***	***157.978.762.796***	***68,04***	***6.824.205.257***							***68,04***	***6.824.205.257***	***0,00***	***4,32***	***68,04***	***91.014.408.317***	***109,04***	***12,86***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan	***%***	***68,61***																***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	312	2.183.153.000	57		536.300.000											0,00	57			18,27	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	3.042,83	15.964.150.000			11.576.650.000											0,00	0				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dokumen	10	5.969.200.000		679.430.139	1.292.300.000											0,00	0	679.430.139			11,38	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	km	14	150.101.250.000			28.875.000.000											0,00	0				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	km	13	91.050.937.000	0,3	1.894.945.588	24.516.979.000											0,00	0,3	1.894.945.588		2,31	2,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	0	232.267.863.000	9,225	53.237.474.874	48.400.000.000		1.220.099.007								1.220.099.007	2,52	9,225	54.457.573.881		0,00	23,45	DINAS PEKERJAAN UMUM,
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	674,585	144.922.613.235	674,58	24.809.516.180	29.683.538.500		4.789.387.371								4.789.387.371		16,13	674,58	29.598.903.551	100,00	20,42	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	83,3	41.650.000.000			10.500.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	m	30,8	10.780.000.000			0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	6.597,8	13.108.281.884		3.568.836.279	2.597.995.296		814.718.879								814.718.879		31,36	0	4.383.555.158		33,44	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
9	**Peningkatan kinerja jasa konstruksi**	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara**	**%**	**100**	**4.414.713.400**	**100**		**1.000.000.000**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**100**		**100,00**	**0,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.08.1.01	***Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi***	***Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi***	***dokumen***	***216***	***4.414.713.400***	***4***		***1.000.000.000***											***0,00***	***4***		***1,85***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	***dokumen***	***1***															***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	***dokumen***	***1***															***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Dokumen	0	0			0											0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0	0			0												0,00	0		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	4	2.250.000.000			550.000.000												0,00	0		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	dokumen	212	2.164.713.400			450.000.000												0,00	0		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi**	**%**	**100**	**26.278.833.900**	**102,35**	**432.984.880**	**5.993.437.000**	**87,58**	**83.854.303**							**87,58**	**83.854.303**	**0,00**	**1,40**	**94,965**	**516.839.183**	**94,97**	**1,97**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	**%**	**100**		**82,65**			**83,92**							**83,92**		**0,00**		**83,285**		**83,29**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.11.1.01	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi***	***Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih***	***orang***	***2.725***	***20.929.833.900***	***200***	***432.984.880***	***4.718.437.000***		***83.854.303***								***83.854.303***		***1,78***	***200***	***516.839.183***	***7,34***	***2,47***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	***LHU***	***10.384***		***1.384***			***132***							***132***		***0,00***		***1.516***		***14,60***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	orang	2.725	0	200		0												0,00	200		7,34	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang	610	1.500.000.000	80		350.000.000												0,00	80		13,11	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang/LHU	10.384	19.429.833.900	1.384	432.984.880	4.368.437.000	132	83.854.303							132	83.854.303	0,00	1,92	1.516	516.839.183	14,60	2,66	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi***	***Terselenggaranya Dukungan Manajemen***	***laporan***	***5***	***5.349.000.000***	***1***		***1.275.000.000***												***0,00***	***1***		***20,00***	***0,00***	***DINAS PEKERJAAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	***Sistem Informasi Jasa Konstruksi***																							***UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	***orang***	***824.220***		***95.118***			***9.000***								***9.000***		***0,00***		***104.118***		***12,63***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	laporan	4	400.000.000	1		100.000.000												0,00	1		25,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	dokumen	5	4.949.000.000	1		1.175.000.000												0,00	1		20,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS**	**%**	**100**	**1.578.671.890.017**	**71,78**	**119.031.872.363**	**403.349.531.071**	**72**	**205.014.927**							**72**	**205.014.927**	**0,00**	**0,05**	**71,89**	**119.236.887.290**	**71,89**	**7,55**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi	**%**	**100**		**100**															**50**		**50,00**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Meningkatnya ketersediaan air baku	**liter/detik**	**39,51**		**43,22**			**48,67**								**48,67**		**0,00**		**91,89**		**232,57**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi	**%**	**100**		**8,92**			**11,84**								**11,84**		**0,00**		**10,38**		**10,38**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***dokumen***	***103***	***1.578.671.890.017***	***0***	***119.031.872.363***	***403.349.531.071***		***205.014.927***								***205.014.927***		***0,05***	***0***	***119.236.887.290***		***7,55***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	***titik***	***30***		***1***															***1***		***3,33***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I				II				III				IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9				10				11				12				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penambahan jaringan jalan baru	***km***	***6,23***		***0,4***																							***0,4***		***6,42***		***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan	***m2***	***124.284,34***		***0***																						***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Peningkatan jalan	***km***	***10,52***		***0***																						***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pembangunan jembatan	***meter***	***12***		***0***																						***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Pemasangan patok aset tanah JJLS	***buah***	***1.060***		***0***																						***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
				Proses tahapan pengadaan tanah	***dokumen***	***1***		***0***																						***0***				***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	dokumen	25	240.185.000.000	3	1.410.644.294		26.900.000.000		156.682.427														156.682.427		0,58	3	1.567.326.721	12,00	0,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	dokumen	23	593.997.447.217	4	13.853.009.988		160.054.783.071																	0,00	4	13.853.009.988	17,39	2,33	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	29	320.520.449.800	8	82.898.128.985		29.900.000.000		45.934.100														45.934.100		0,15	8	82.944.063.085	27,59	25,88	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	5	43.369.600.000	2	1.060.989.667		1.249.855.000		2.398.400														2.398.400		0,19	2	1.063.388.067	40,00	2,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784												0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																									SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																																	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen	2	3.950.000.000			1.200.000.000												0,00	0		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	dokumen	5	273.749.393.000	1	19.809.099.429	148.244.893.000												0,00	1	19.809.099.429	20,00	7,24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	dokumen	1	350.000.000			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	dokumen	6	63.050.000.000			100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	3	1.300.000.000			600.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	38.200.000.000			35.100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.04	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang***	***dokumen***	***7***															***nan***	***0***		***0,00***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	Dokumen	7	0			0												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	100																	0				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
10	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**90**	**319.778.918.461**	**91,76**	**48.590.283.416**	**64.663.029.508**	**91,76**	**12.205.034.376**							**91,76**	**12.205.034.376**	**0,00**	**18,87**	**91,76**	**60.795.317.792**	**101,96**	**19,01**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
				Nilai PKKI Program Penunjang (Balai PAL PJK)	**nilai**	**0**					**80**								**80**		**0,00**		**80**		**0,00**		**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***2.809.506.300***	***100***	***322.286.021***	***554.600.000***	***8,17***	***21.405.850***							***8,17***	***21.405.850***	***0,00***	***3,86***	***54,085***	***343.691.871***	***54,09***	***12,23***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	610.925.800	8	37.992.542	121.000.000	1	7.360.221							1	7.360.221	0,00	6,08	9	45.352.763	45,00	7,42	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	431.225.000	6	40.840.509	83.600.000		3.059.599								3.059.599		3,66	6	43.900.108	30,00	10,18	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	1.767.355.500	10	243.452.970	350.000.000	2	10.986.030							2	10.986.030	0,00	3,14	12	254.439.000	60,00	14,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***216.818.465.331***	***100***	***39.558.818.043***	***43.716.471.933***		***9.980.329.106***								***9.980.329.106***		***22,83***	***50***	***49.539.147.149***	***50,00***	***22,85***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	433	215.202.227.571	421	39.364.923.837	43.395.404.483	413	9.953.891.916							413	9.953.891.916	0,00	22,94	834	49.318.815.753	192,61	22,92	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	70	899.224.290	12	100.332.019	178.959.000	2	5.780.507							2	5.780.507	0,00	3,23	14	106.112.526	20,00	11,80	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	258.825.715	3	20.339.288	51.297.950		8.493.654								8.493.654		16,56	3	28.832.942	20,00	11,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	25	458.187.755	24	73.222.899	90.810.500		12.163.029								12.163.029		13,39	24	85.385.928	96,00	18,64	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah***	***%***	***0***	***718.140.904***	***100***	***98.105.830***		***141.618.400***		***17.582.508***								***17.582.508***		***12,42***	***50***	***115.688.338***	***0,00***	***16,11***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	4.273.570	1	440.828		847.000											0,00	1	440.828	20,00	10,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70	713.867.334	12	97.665.002		140.771.400	0	17.582.508							0	17.582.508	0,00	12,49	12	115.247.510	17,14	16,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***0***	***7.113.716.600***	***100***	***780.220.306***		***1.410.497.363***		***110.576.631***								***110.576.631***		***7,84***	***50***	***890.796.937***	***0,00***	***12,52***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	650.051.922	2	54.163.662		128.837.049		5.793.413								5.793.413		4,50	2	59.957.075	13,33	9,22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	65	1.048.164.472	3	82.531.613		207.740.907		49.995.269								49.995.269		24,07	3	132.526.882	4,62	12,64	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	338.884.232	4	21.770.310		67.165.164		6.505.800								6.505.800		9,69	4	28.276.110	8,00	8,34	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	652.232.253	4	85.109.447		129.269.140		17.759.500								17.759.500		13,74	4	102.868.947	11,43	15,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	250	138.251.821	2	2.822.000		27.400.813	1	696.000							1	696.000	0,00	2,54	3	3.518.000	1,20	2,54	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2.005	4.286.131.900	286	533.823.274		850.084.290	16	29.826.649							16	29.826.649	0,00	3,51	302	563.649.923	15,06	13,15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***0***	***3.521.352.414***	***100***	***8.406.199***		***801.423.705***												***0,00***	***50***	***8.406.199***	***0,00***	***0,24***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9			10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K		
																													DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	2.035.000.000	0			500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	234.198.900				47.190.000												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	1.252.153.514	2	8.406.199		254.233.705												0,00	2	8.406.199	1,67	0,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**%**	***100***	***61.884.375.957***	***100***	***5.460.969.979***		***12.469.330.524***		***1.777.531.681***									***1.777.531.681***		***14,26***	***50***	***7.238.501.660***	***50,00***	***11,70***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	15	61.051.000	1	7.850.000		12.100.000		405.000									405.000		3,35	1	8.255.000	6,67	13,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	34.809.433.123	1	1.856.684.260		7.118.843.578		606.091.454									606.091.454		8,51	1	2.462.775.714	6,67	7,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	27.013.891.834	10	3.596.435.719		5.338.386.946		1.171.035.227									1.171.035.227		21,94	10	4.767.470.946	13,33	17,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**%**	***100***	***26.913.360.955***	***100***	***2.361.477.038***		***5.569.087.583***		***297.608.600***									***297.608.600***		***5,34***	***50***	***2.659.085.638***	***50,00***	***9,88***	***DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	103	8.006.888.870				1.897.775.858												0,00	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	1.200.000.000	2			200.000.000												0,00	2		40,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746		1.081.530.275.658		21.834.571.784								0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																					SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	119	6.913.146.200	88	1.373.664.418	1.300.000.000	13	244.489.600							13	244.489.600	0,00	18,81	101	1.618.154.018	84,87	23,41	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	119	2.140.930.885	276	292.339.000	416.811.725	1	53.119.000							1	53.119.000	0,00	12,74	277	345.458.000	232,77	16,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	8.652.395.000	3	695.473.620	1.754.500.000											0,00	3	695.473.620	50,00	8,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							4.748.810.585.848		381.054.036.746	1.081.530.275.658		21.834.571.784							0,00	21.834.571.784	0,00	2,02		402.888.608.530	55,27	8,48	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	81.92	29.04
2 Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	54.74	42.42
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.14	90.64

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik**	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan**	**%**	**81,25**	**14.925.825.000**	**82,05**	**27.709.400**		**4.637.500.000**	**5,89**	**2.042.250**							**5,89**	**2.042.250**	**0,00**	**0,04**	**43,97**	**29.751.650**	**54,12**	**0,20**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	**%**	**100**		**92,06**				**8,15**							**8,15**		**0,00**		**50,105**		**50,11**		**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		1.03.12.1.01	***Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi***	***Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi***	***undefined***	***5***	***1.911.525.000***	***0***			***577.500.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	dokumen	0	0	0			0												0,00	0			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	dokumen	5	1.911.525.000				577.500.000	5								5		0,00	0,00	5		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02	***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang***	***Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanan tata ruang***	***dokumen***	***1***	***1.918.770.000***				***880.000.000***	***3***								***3***		***0,00***	***0,00***	***3***		***300,00***	***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	550.000.000				550.000.000	2								2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	laporan	1	1.368.770.000				330.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.03	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi***	***Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi***	***dokumen***	***4***	***3.327.530.000***	***2***	***27.709.400***		***880.000.000***	***4***	***2.042.250***							***4***	***2.042.250***	***0,00***	***0,23***	***6***	***29.751.650***	***150,00***	***0,89***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	0	0	2	27.709.400		0	1	2.042.250							1	2.042.250	0,00	0,00	3	29.751.650	0,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	3	2.599.330.000				660.000.000	3								3		0,00	0,00	3		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan Pembangunan Daerah																									
		1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	1	728.200.000				220.000.000	1							1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.04	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi***	***Terlaksananya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis***	***dokumen***	***16***	***7.768.000.000***				***2.300.000.000***	***12***							***12***		***0,00***	***0,00***	***12***		***75,00***	***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	6	1.500.000.000				400.000.000	4							4		0,00	0,00	4		66,67	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	4	2.648.000.000				800.000.000	3							3		0,00	0,00	3		75,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	kasus	0	0				0											0,00	0			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	6	3.620.000.000				1.100.000.000	5							5		0,00	0,00	5		83,33	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**%**	**89,63**	**177.288.062.500**	**70,37**	**3.524.691.455**		**40.435.061.000**	**5,95**							**5,95**		**0,00**	**0,00**	**38,16**	**3.524.691.455**	**42,58**	**1,99**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
				Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	**%**	**85,31**		**89,08**				**7,88**							**7,88**		**0,00**		**48,48**		**56,83**		**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		1.03.13.5.01	***Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten***	***dokumen***	***8***	***35.861.924.500***	***25***	***2.580.368.713***		***7.379.764.000***	***14***							***14***		***0,00***	***0,00***	***39***	***2.580.368.713***	***487,50***	***7,20***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	0	2.615.850.500	5	520.551.667		675.998.000											0,00	5	520.551.667	0,00	19,90	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Materi Teknis Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Review Materi Teknis Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1																1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1																1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten	dokumen	0	24.205.224.500	4	1.154.694.816		4.668.766.000												0,00	4	1.154.694.816	0,00	4,77	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III	dokumen	0		3																3		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	dokumen	0		1																1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2024, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026 Urusan Tata Ruang	dokumen	0		4																4		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Perencanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2025	kalurahan	0		5																5		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Monev BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2024	kalurahan	0		7																7		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	dokumen	7		13																13		185,71		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Kajian identifikasi citra kawasan SRS	SRS	0	9.040.849.500	5	905.122.230		2.035.000.000												0,00	5	905.122.230	0,00	10,01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Lomba desain visual signage	kali	0		1																1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penyebarluasan informasi dokumen perencanaan penataan ruang	konten	0		10																10		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Sosialisasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang	kali	0		40																40		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang	paket	0		1																1		0,00		DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN TATA RUANG
				Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	laporan	1		3				1								1		0,00		4		400,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 4 Kabupaten***	***undefined***	***4***	***114.706.161.000***	***4***		***27.260.781.000***		***4***								***4***		***0,00***	***0,00***	***8***		***200,00***	***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	dokumen	1	600.000.000			150.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	0	100.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	2	68.148.050.500			15.668.219.500		2								2		0,00	0,00	2		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen	2	10.828.929.000			2.448.141.000		2								2		0,00	0,00	2		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	dokumen	2	4.461.152.000			1.057.373.000		2								2		0,00	0,00	2		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	dokumen	1	100.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi	dokumen	1	300.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	dokumen	1	100.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	dokumen	1	5.716.179.000			1.473.346.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	dokumen	1	300.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	dokumen	2	6.714.203.500			1.591.386.500		2								2		0,00	0,00	2		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	1	300.000.000			100.000.000		1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pantai Selatan Kulon Progo																									DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Karaton	dokumen	1	100.000.000				100.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	dokumen	1	300.000.000				100.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Puro Pakualaman	dokumen	1	100.000.000				100.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Girigondo	dokumen	1	100.000.000				100.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	dokumen	2	16.337.647.000				3.872.315.000	2								2		0,00	0,00	2		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Pathok Negoro	dokumen	1	100.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.03	***Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis***	***Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang***	***dokumen***	***13***	***25.726.977.000***	***17***	***944.322.742***		***5.494.516.000***	***13***								***13***		***0,00***	***0,00***	***30***	***944.322.742***	***230,77***	***3,67***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dokumen	0	25.726.977.000	1	944.322.742		5.494.516.000												0,00	1	944.322.742	0,00	3,67	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penilaian Perwujudan SPW 18 SRS	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Audit Tata Ruang	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan	dokumen	0		1															1		0,00		DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Ruang																								DAN TATA RUANG
				Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di DIY dan Pemenuhan Standar Bidang Penataan Ruang	dokumen	0		2																2		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen	18		9				18								18		0,00		27		150,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.04	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang***	***Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang***	***undefined***	***1***	***993.000.000***				***300.000.000***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***1***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	1	993.000.000				300.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2	**Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan**	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan**	**%**	**100**	**348.109.000**	**100**	**9.120.700**		**100.000.000**	**25,2**								**25,2**		**0,00**	**0,00**	**62,6**	**9.120.700**	**62,60**	**2,62**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		2.10.03.1.01	***Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi***	***Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi***	***dokumen***	***1***	***348.109.000***	***1***	***9.120.700***		***100.000.000***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***2***	***9.120.700***	***200,00***	***2,62***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	348.109.000	1	9.120.700		100.000.000	1								1		0,00	0,00	2	9.120.700	200,00	2,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Jumlah obyek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti**	**obyek**	**2**	**362.315.000**	**2**	**228.823.000**		**100.000.000**	**3**								**3**		**0,00**	**0,00**	**5**	**228.823.000**	**250,00**	**63,16**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		2.10.06.1.01	***Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti***	***dokumen***	***0***	***362.315.000***	***1***	***228.823.000***		***100.000.000***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***2***	***228.823.000***	***0,00***	***63,16***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	362.315.000	1	228.823.000		100.000.000	1								1		0,00	0,00	2	228.823.000	0,00	63,16	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa**	**%**	**66,14**	**190.698.243.768**	**42,61**	**9.198.783.249**		**42.053.779.640**	**54,26**								**54,26**		**0,00**	**0,00**	**48,435**	**9.198.783.249**	**73,23**	**4,82**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
				Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	**%**	**18,43**		**16,62**				**2,32**								**2,32**		**0,00**		**9,47**		**51,38**		**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		2.10.11.5.01	***Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan***	***dokumen***	***24***	***177.166.781.768***	***29***	***7.339.534.777***		***39.391.513.640***	***23***								***23***		***0,00***	***0,00***	***52***	***7.339.534.777***	***216,67***	***4,14***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
				Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten	***Kabupaten***	***4***		***4***				***4***								***4***		***0,00***		***8***		***200,00***		***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	11	8.486.889.000	7	1.358.608.934		1.694.000.000	11								11		0,00	0,00	18	1.358.608.934	163,64	16,01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	dokumen	1	4.976.900.000	1	593.645.641		990.000.000	1								1		0,00	0,00	2	593.645.641	200,00	11,93	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	2	44.246.429.468	2	191.593.000		9.709.033.340	2								2		0,00	0,00	4	191.593.000	200,00	0,43	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	dokumen	5	94.201.095.300	4	169.762.710		21.265.280.300	4								4		0,00	0,00	8	169.762.710	160,00	0,18	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	laporan	3	957.187.000	3	250.117.541		165.000.000	3								3		0,00	0,00	6	250.117.541	200,00	26,13	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	dokumen	2	24.298.281.000	3	4.775.806.951		5.568.200.000	2								2		0,00	0,00	5	4.775.806.951	250,00	19,65	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.02	***Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi***	***undefined***	***9***	***13.531.462.000***	***7***	***1.859.248.472***		***2.662.266.000***	***9***								***9***		***0,00***	***0,00***	***16***	***1.859.248.472***	***177,78***	***13,74***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	***unit***	***1***						***1***								***1***		***0,00***		***1***		***100,00***		***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	4	7.940.252.000	3	1.554.310.910		1.471.266.000	4								4		0,00	0,00	7	1.554.310.910	175,00	19,58	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	persen	0		100														50		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				a. Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2. Film/Video Pendek, 3. Leaflet)	paket	0		3														3		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Fasilitasi Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan pada BKK Kalurahan	kalurahan	0		10														10		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Kalurahan	lokasi	0		60														60		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Rekomendasi Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan	persen	0		100														50		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Publikasi Urusan Keistimewaan Pertanahan	paket	0		1														1		0,00		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	berita acara	3	4.598.210.000	4	304.937.562		891.000.000	3								3		0,00	0,00	7	304.937.562	233,33	6,63	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	unit	1	993.000.000	0			300.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kategori**	**96,39**	**57.912.479.287**	**97,46**	**10.552.733.328**		**11.630.661.000**	**82,96**	**2.195.663.446**							**82,96**	**2.195.663.446**	**0,00**	**18,88**	**180,42**	**12.748.396.774**	**187,18**	**22,01**	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***dokumen***	***9***	***218.143.500***	***27***	***15.343.900***		***43.234.000***	***9***	***5.941.029***							***9***	***5.941.029***	***0,00***	***13,74***	***36***	***21.284.929***	***400,00***	***9,76***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	121.804.500	3	6.808.300		24.140.000	3	4.299.139							3	4.299.139	0,00	17,81	6	11.107.439	200,00	9,12	DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Daerah																										DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	6.715.000	4	639.600		1.331.000	4								4		0,00	0,00	8	639.600	200,00	9,52	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	89.624.000	2	7.896.000		17.763.000	2	1.641.890							2	1.641.890	0,00	9,24	4	9.537.890	200,00	10,64	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD***	***undefined***	***21***	***48.496.685.137***	***21***	***9.471.206.363***		***9.696.143.000***	***21***	***1.957.591.258***							***21***	***1.957.591.258***	***0,00***	***20,19***	***42***	***11.428.797.621***	***200,00***	***23,57***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	71	48.138.462.337	71	9.418.304.363		9.625.144.000		1.951.552.458								1.951.552.458		20,28	71	11.369.856.821	100,00	23,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	279.297.800	1	46.264.000		55.356.000		3.089.000								3.089.000		5,58	1	49.353.000	100,00	17,67	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	16.875.500	1	3.042.000		3.345.000	1	2.057.500							1	2.057.500	0,00	61,51	2	5.099.500	200,00	30,22	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	62.049.500	18	3.596.000		12.298.000	18	892.300							18	892.300	0,00	7,26	36	4.488.300	200,00	7,23	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD***	***Laporan***	***3***	***124.543.000***	***2***	***17.850.000***		***24.684.000***	***2***	***5.340.000***							***2***	***5.340.000***	***0,00***	***21,63***	***4***	***23.190.000***	***133,33***	***18,62***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3	124.543.000	2	17.850.000		24.684.000	2	5.340.000							2	5.340.000	0,00	21,63	4	23.190.000	133,33	18,62	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi penatausahaan kepagawaian daerah***	***laporan***	***2***	***33.694.000***	***1***	***2.642.000***		***6.679.000***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***2***	***2.642.000***	***100,00***	***7,84***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	33.694.000	1	2.642.000		6.679.000	1								1		0,00	0,00	2	2.642.000	100,00	7,84	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-***	***Laporan***	***20***	***1.319.019.200***	***20***	***126.886.251***		***280.395.000***	***20***	***10.483.792***							***20***	***10.483.792***	***0,00***	***3,74***	***40***	***137.370.043***	***200,00***	***10,41***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																								
		0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	96.301.000	1	8.988.000		19.087.000		2.177.444								2.177.444		11,41	1	11.165.444	100,00	11,59	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	261.686.200	3	9.385.350		51.865.000		1.447.908								1.447.908		2,79	3	10.833.258	100,00	4,14	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	55.152.300	1	2.545.000		10.931.000	1	1.193.000							1	1.193.000	0,00	10,91	2	3.738.000	200,00	6,78	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	209.838.500	2	11.150.500		41.589.000	2	1.550.115							2	1.550.115	0,00	3,73	4	12.700.615	200,00	6,05	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	57.211.200	3	1.908.000		11.382.000	3	441.000							3	441.000	0,00	3,87	6	2.349.000	200,00	4,11	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	456.780.000	12	92.909.401		90.541.000	12	3.674.325							12	3.674.325	0,00	4,06	24	96.583.726	200,00	21,14	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	182.050.000				55.000.000	1								1		0,00	0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya***	***undefined***	***17***	***682.754.000***				***179.080.000***	***16***								***16***		***0,00***	***0,00***	***16***		***94,12***	***0,00***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	17	682.754.000				179.080.000	16								16		0,00	0,00	16		94,12	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***laporan***	***3***	***3.747.100.200***	***3***	***606.540.014***		***742.657.000***	***3***	***140.885.967***							***3***	***140.885.967***	***0,00***	***18,97***	***6***	***747.425.981***	***200,00***	***19,95***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	74.481.000	1	4.878.000		14.762.000	1	450.000							1	450.000	0,00	3,05	2	5.328.000	200,00	7,15	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1.314.594.000	1	168.581.750		260.546.000	1	39.117.387							1	39.117.387	0,00	15,01	2	207.699.137	200,00	15,80	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	2.358.025.200	1	433.080.264		467.349.000	1	101.318.580							1	101.318.580	0,00	21,68	2	534.398.844	200,00	22,66	DINAS PERTANAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya***	***Laporan***	***3***	***3.290.540.250***	***3***	***312.264.800***		***657.789.000***	***3***	***75.421.400***							***3***	***75.421.400***	***0,00***	***11,47***	***6***	***387.686.200***	***200,00***	***11,78***	***DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG***
		0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	15	1.591.788.000	15	201.596.800		320.738.000	15	56.807.400							15	56.807.400	0,00	17,71	30	258.404.200	200,00	16,23	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	646.550.500	10	64.932.000		128.510.000	10	1.914.000							10	1.914.000	0,00	1,49	20	66.846.000	200,00	10,34	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.052.201.750	1	45.736.000		208.541.000	1	16.700.000							1	16.700.000	0,00	8,01	2	62.436.000	200,00	5,93	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)							441.535.034.555		23.541.861.132		98.957.001.640		2.197.705.696							0,00	2.197.705.696	0,00	2,22		25.739.566.828	104,33	5,83	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Kategori RB Perangkat Daerah	85.5	85.07
2 Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	75	87.13

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**87,67**	**86.291.496.710**	**91,81**	**14.932.452.105**		**18.141.941.092**	**85,16**								**85,16**		**0,00**	**0,00**	**88,485**	**14.932.452.105**	**100,93**	**17,30**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***780.865.000***	***100***	***31.595.200***		***181.000.000***											***0,00***	***50***	***31.595.200***	***50,00***	***4,05***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	294.060.000	9	15.040.000		66.000.000											0,00	9	15.040.000	36,00	5,11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8	371.280.000				88.000.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	115.525.000	3	16.555.200		27.000.000											0,00	3	16.555.200	75,00	14,33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***70.794.971.460***	***100***	***11.673.787.288***		***14.161.141.092***											***0,00***	***50***	***11.673.787.288***	***50,00***	***16,49***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	97	70.410.275.460	89	11.604.407.288		14.082.055.092											0,00	89	11.604.407.288	91,75	16,48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	226.800.000	12	45.860.000		45.360.000											0,00	12	45.860.000	20,00	20,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	62.655.000	1	9.350.000		14.850.000											0,00	1	9.350.000	25,00	14,92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	95.241.000	18	14.170.000		18.876.000											0,00	18	14.170.000	20,00	14,88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***66.000.000***	***100***	***13.700.000***		***13.200.000***											***0,00***	***50***	***13.700.000***	***50,00***	***20,76***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	66.000.000	2	13.700.000	13.200.000												0,00	2	13.700.000	40,00	20,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***749.345.000***			***184.500.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	388	540.000.000			135.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	8	46.910.000			11.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	140	162.435.000			38.500.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***2.138.236.200***	***100***	***215.150.360***	***458.700.000***												***0,00***	***50***	***215.150.360***	***50,00***	***10,06***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	40	46.410.000			11.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	114	150.676.200	6	11.969.200	29.700.000												0,00	6	11.969.200	5,26	7,94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	69.615.000			16.500.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	52	69.615.000	13	4.029.800	16.500.000												0,00	13	4.029.800	25,00	5,79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	80	46.410.000			11.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	1.361.025.000	12	199.151.360	280.500.000												0,00	12	199.151.360	20,00	14,63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	394.485.000			93.500.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***3.840.000.000***			***1.530.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	650.000.000				650.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	1.250.000.000				0												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	12	290.000.000				80.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	180	575.000.000				150.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	500.000.000				500.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	575.000.000				150.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***2.920.428.550***	***100***	***2.488.331.904***		***573.100.000***												***0,00***	***50***	***2.488.331.904***	***50,00***	***85,20***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	51.051.000				12.100.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	16	870.522.550	12	125.363.904		170.500.000												0,00	12	125.363.904	75,00	14,40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	10	1.998.855.000	12	2.362.968.000		390.500.000												0,00	12	2.362.968.000	120,00	118,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***5.001.650.500***	***100***	***509.887.353***		***1.040.300.000***												***0,00***	***50***	***509.887.353***	***50,00***	***10,19***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	267.215.000	1	64.207.500		55.000.000												0,00	1	64.207.500	100,00	24,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	50	3.221.692.500	57	365.428.700		660.000.000												0,00	57	365.428.700	114,00	11,34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	24	13.923.000			3.300.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	99	98.820.000	16	6.000.000	22.000.000											0,00	16	6.000.000	16,16	6,07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13	1.400.000.000	1	74.251.153	300.000.000											0,00	1	74.251.153	7,69	5,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas**	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang tertangani**	**%**	**100**	**41.683.747.500**	**100**	**565.394.200**	**8.740.732.000**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**100**	**565.394.200**	**100,00**	**1,36**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
				Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	**%**	**100**		**100**			**100**							**100**		**0,00**		**100**		**100,00**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
				Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif	**%**	**70**		**55,47**			**61,41**							**61,41**		**0,00**		**58,44**		**83,49**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.02.1.01	***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***36.938.074.600***	***100***	***27.154.500***	***7.805.732.000***											***0,00***	***50***	***27.154.500***	***50,00***	***0,07***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	kasus	1.655	26.629.090.000			5.836.732.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	672	1.160.250.000			275.000.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	dokumen	16	46.000.000			11.000.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	18.195	8.235.515.600			1.485.000.000											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bernuansa Hak Asasi Manusia																									
		1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen	37	604.515.000	5	27.154.500		137.500.000												0,00	5	27.154.500	13,51	4,49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	unit	20	139.230.000				33.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	dokumen	12	69.615.000				16.500.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan	5	53.859.000				11.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.02	***Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur***	***Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur***	***%***	***100***	***3.817.472.900***	***100***	***538.239.700***		***715.000.000***												***0,00***	***50***	***538.239.700***	***50,00***	***14,10***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	208	1.669.184.000	17	198.696.400		275.000.000												0,00	17	198.696.400	8,17	11,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	laporan	532	2.148.288.900	174	339.543.300		440.000.000												0,00	174	339.543.300	32,71	15,81	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.03	***Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi***	***Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi***	***%***	***100***	***928.200.000***	***100***			***220.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	laporan	24	232.050.000	0			55.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	dokumen	240	696.150.000				165.000.000												0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani**	**%**	**100**	**590.000.000**	**100**	**519.771.250**		**120.000.000**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**100**	**519.771.250**	**100,00**	**88,10**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.10.11.5.01	***Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***%***	***100***	***590.000.000***	***100***	***519.771.250***	***120.000.000***												***0,00***	***50***	***519.771.250***	***50,00***	***88,10***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	1	100.000.000			0											0,00	0			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.10.11.5.01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	4	490.000.000	1	519.771.250	120.000.000											0,00	1	519.771.250	25,00	106,08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Omah Jaga Warga yang aktif**	**%**	**100**	**117.506.115.500**	**70,09**	**12.586.046.292**	**18.500.000.000**	**80,36**								**80,36**		**0,00**	**0,00**	**75,225**	**12.586.046.292**	**75,23**	**10,71**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
				Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa	**%**	**100**		**100**			**100**							**100**		**0,00**		**100**		**100,00**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***%***	***100***	***16.500.000.000***	***100***	***662.574.600***	***4.000.000.000***												***0,00***	***50***	***662.574.600***	***50,00***	***4,02***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	jenis	34	16.500.000.000	44	662.574.600	4.000.000.000											0,00	44	662.574.600	129,41	4,02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***%***	***100***	***101.006.115.500***	***100***	***11.923.471.692***	***14.500.000.000***												***0,00***	***50***	***11.923.471.692***	***50,00***	***11,80***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA***
		2.22.08.5.09.16	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	orang	48.000	62.842.358.500	8.050	3.325.813.834	5.000.000.000											0,00	8.050	3.325.813.834	16,77	5,29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	48	38.163.757.000	12	8.597.657.858	9.500.000.000											0,00	12	8.597.657.858	25,00	22,53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						246.071.359.710		28.603.663.847		45.502.673.092									0,00		0,00	0,00		28.603.663.847	32,87	11,62	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Adanya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Perda / Perkada yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Adanya produk - produk peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, baik APBD regular maupun dana keistimewaan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang, ditambah dengan banyaknya personil yang purna tugas dan tidak adanya penambahan personil. 2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, salah satunya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS, pengadaan barang / jasa dan informasi teknologi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketugasan. 4. Peningkatan angka kejahatan dan kebutuhan masyarakat.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambangan liar, minuman beralkohol, kejahatan jalanan / klithih, reklame, dll). 2. Peningkatan sistem komunisasi integral untuk seluruh anggota Jaga Warga dan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 3. Peningkatan peran aktif Satlinmas dan Jagawarga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada scope wilayah yang lebih sempit (Kalurahan dan Padukuhan) yang ada di DIY. 4. Pengendalian gejolak sosial masyarakat. 5. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan sosialisasi, baik luring maupun daring. 6. Peningkatan peran aktif Satlinmas Rescue Istimewa dalam melakukan pengamanan di objek wisata. 7. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0.76	0.71
2 Kategori RB Perangkat Daerah	87.26	87.16

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**87,22**	**99.733.690.492**	**86,92**	**12.418.396.251**		**17.060.030.462**	**86,92**	**3.201.133.236**							**86,92**	**3.201.133.236**	**0,00**	**18,76**	**173,84**	**15.619.529.487**	**199,31**	**15,66**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***839.610.225***	***100***	***10.718.550***		***166.282.750***	***100***	***8.396.000***							***100***	***8.396.000***	***0,00***	***5,05***	***100***	***19.114.550***	***100,00***	***2,28***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	296.117.700	5	6.943.500		58.793.900	5	1.405.000							5	1.405.000	0,00	2,39	10	8.348.500	166,67	2,82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	202.975.000	4	1.825.050		40.000.000	1	4.540.000							1	4.540.000	0,00	11,35	5	6.365.050	125,00	3,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	340.517.525	3	1.950.000		67.488.850	3	2.451.000							3	2.451.000	0,00	3,63	6	4.401.000	200,00	1,29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY***	***Bulan***	***12***	***79.660.476.882***	***12***	***10.607.521.827***		***12.791.031.437***	***3***	***2.717.327.409***							***3***	***2.717.327.409***	***0,00***	***21,24***	***15***	***13.324.849.236***	***125,00***	***16,73***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	64.235.524.440	110	10.542.241.827		12.698.424.450	110	2.710.534.909							110	2.710.534.909	0,00	21,35	220	13.252.776.736	200,00	20,63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	367.066.564	12	34.520.000		77.919.402	3	2.340.500							3	2.340.500	0,00	3,00	15	36.860.500	125,00	10,04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.046.962.463	1	1.500.000		12.491.435	1	725.000							1	725.000	0,00	5,80	2	2.225.000	200,00	0,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	10.923.415	12	29.260.000		2.196.150	3	3.727.000							3	3.727.000	0,00	169,71	15	32.987.000	125,00	301,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY***	***Tahun***	***1***	***138.000.000***	***1***	***19.781.550***		***27.500.000***	***1***	***4.512.496***							***1***	***4.512.496***	***0,00***	***16,41***	***2***	***24.294.046***	***200,00***	***17,60***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646							0,00	3.627.808.646	0,00	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I				II				III				IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				11				12				13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	138.000.000	1	19.781.550		27.500.000	1	4.512.496									1	4.512.496	0,00	16,41	2	24.294.046	200,00	17,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY***	***Tahun***	***1***	***2.311.299.500***	***1***	***103.107.214***		***549.882.200***	***1***	***30.197.126***									***1***	***30.197.126***	***0,00***	***5,49***	***2***	***133.304.340***	***200,00***	***5,77***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	2.311.299.500	12	103.107.214		509.649.000		16.750.059										16.750.059		3,29	12	119.857.273	100,00	5,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0				2.490.200	1	2.490.200									1	2.490.200	0,00	100,00	1	2.490.200	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	0				19.872.000	4	6.729.600									4	6.729.600	0,00	33,86	4	6.729.600	100,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0				17.871.000	1	4.227.267									1	4.227.267	0,00	23,65	1	4.227.267	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY***	***Tahun***	***1***	***9.346.057.080***	***1***	***1.483.418.186***		***1.884.125.360***	***1***	***357.782.305***									***1***	***357.782.305***	***0,00***	***18,99***	***2***	***1.841.200.491***	***200,00***	***19,70***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4.254.041.710	1	502.176.986		864.680.570		141.980.105										141.980.105		16,42	1	644.157.091	100,00	15,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.092.015.370	12	981.241.200		1.019.444.790	2	215.802.200									2	215.802.200	0,00	21,17	14	1.197.043.400	116,67	23,51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY***	***Tahun***	***1***	***7.438.246.805***	***1***	***193.848.924***		***1.641.208.715***	***1***	***82.917.900***									***1***	***82.917.900***	***0,00***	***5,05***	***2***	***276.766.824***	***200,00***	***3,72***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2.381.017.700	2	14.944.300		500.000.000	1	15.972.900									1	15.972.900	0,00	3,19	3	30.917.200	150,00	1,30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2.043.376.950	6	14.987.000		497.365.200														0,00	6	14.987.000	150,00	0,73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	692.823.555	45	91.098.300		137.314.115	3	38.057.200									3	38.057.200	0,00	27,72	48	129.155.500	0,00	18,64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646									0,00	3.627.808.646	0,00	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																						SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	2.321.028.600	23	72.819.324		506.529.400		28.887.800								28.887.800		5,70	23	101.707.124	32,86	4,38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY**	**Indeks**	**0,88**	**43.691.640.724**	**0,86**	**2.680.038.440**		**7.093.691.313**	**0,86**	**408.324.410**							**0,86**	**408.324.410**	**0,00**	**5,76**	**1,72**	**3.088.362.850**	**195,45**	**7,07**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
				Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	**Indeks**	**0,8**		**0,62**				**0,62**								**0,62**		**0,00**		**1,24**		**155,00**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
				Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	**Indeks**	**0,85**		**0,61**				**0,61**								**0,61**		**0,00**		**1,22**		**143,53**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
				Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	**Indeks**	**0,88**		**0,66**				**0,66**								**0,66**		**0,00**		**1,32**		**150,00**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		1.05.03.1.01	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi***	***Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi***	***%***	***100***	***1.539.761.400***	***100***	***144.585.024***		***300.000.000***	***100***	***44.209.114***							***100***	***44.209.114***	***0,00***	***14,74***	***100***	***188.794.138***	***100,00***	***12,26***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.539.761.400	2	144.585.024		300.000.000		44.209.114								44.209.114		14,74	2	188.794.138	100,00	12,26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana***	***%***	***100***	***27.882.020.823***	***100***	***1.014.711.401***		***3.876.867.406***	***100***	***199.606.308***							***100***	***199.606.308***	***0,00***	***5,15***	***100***	***1.214.317.709***	***100,00***	***4,36***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	8.270.750.200	1	361.207.610		1.760.000.000		17.490.072								17.490.072		0,99	1	378.697.682	100,00	4,58	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 25	Unit	5	12.967.648.300	5	501.313.700		800.135.000	5	136.268.236							5	136.268.236	0,00	17,03	10	637.581.936	200,00	4,92	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	32	6.643.622.323	32	152.190.091		1.316.732.406		45.848.000								45.848.000		3,48	32	198.038.091	100,00	2,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***%***	***100***	***10.505.997.801***	***100***	***1.401.964.672***		***2.101.823.907***		***139.350.335***								***139.350.335***		***6,63***	***50***	***1.541.315.007***	***50,00***	***14,67***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	1.245.359.201	13	83.003.700		246.823.907		38.733.450								38.733.450		15,69	13	121.737.150	108,33	9,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646							0,00	3.627.808.646	0,00	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5.000	9.260.638.600	2.500	1.318.960.972		1.855.000.000	200	100.616.885							200	100.616.885	0,00	5,42	2.700	1.419.577.857	54,00	15,33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***%***	***100***	***3.763.860.700***	***100***	***118.777.343***		***815.000.000***	***100***	***25.158.653***							***100***	***25.158.653***	***0,00***	***3,09***	***100***	***143.935.996***	***100,00***	***3,82***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	3.763.860.700	2	118.777.343		815.000.000		25.158.653								25.158.653		3,09	2	143.935.996	100,00	3,82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**2.619.767.000**	**96,09**	**22.500.000**		**605.000.000**	**98**	**18.351.000**							**98**	**18.351.000**	**0,00**	**3,03**	**97,045**	**40.851.000**	**97,05**	**1,56**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		1.05.04.1.02	***Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	***%***	***100***	***2.619.767.000***	***100***	***22.500.000***		***605.000.000***	***100***	***18.351.000***							***100***	***18.351.000***	***0,00***	***3,03***	***100***	***40.851.000***	***100,00***	***1,56***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	2.619.767.000	1	22.500.000		605.000.000	1	18.351.000							1	18.351.000	0,00	3,03	2	40.851.000	200,00	1,56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY**	**Angka**	**0,9**	**2.400.449.800**	**0,8**	**450.738.750**		**350.000.000**	**0,8**								**0,8**		**0,00**	**0,00**	**1,6**	**450.738.750**	**177,78**	**18,78**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY***	***%***	***100***	***2.400.449.800***	***100***	***450.738.750***		***350.000.000***	***100***								***100***		***0,00***	***0,00***	***100***	***450.738.750***	***100,00***	***18,78***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	2	2.400.449.800	3	450.738.750		350.000.000												0,00	3	450.738.750	150,00	18,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646							0,00	3.627.808.646	0,00	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY																										
Rata-rata capaian kinerja (%)						148.445.548.016		15.571.673.441		25.108.721.775		3.627.808.646							0,00	3.627.808.646	0,00	14,45		19.199.482.087	128,19	12,93	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Koordinasi antar sekretariat dengan bidang dan sub bidang berjalan baik 2. Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA dengan nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal : 31 Desember 2024																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Dalam dokumen perencanaan belum mencantumkan sub kegiatan dan tolok ukur kinerja yang dapat mengakomodir aktivitas yang dilaksanakan terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Adanya Deviasi keuangan berupa Efisiensi Anggaran dikarenakan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; 3. Adanya peraturan perundangan yang perlu dilaksanakan penerapannya; 4. Keterbatasan lahan parkir BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua kendaraan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya, terutama kendaraan berukuran besar berupa kendaraan roda enam yang saat ini berjumlah 11 unit; 5.. Sampai saat ini peralatan penanggulangan bencana yang ada memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar serta membutuhkan biaya operasional, terutama pada saat dukungan respon kejadian/bencana 6.Keterbatasan gudang penyimpanan BPBD DIY mengakibatkan, tidak semua peralatan penanggulangan bencana dapat tersimpan sebagaimana mestinya.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Menyusun tolok ukur kinerja dari sub kegiatan; 2. Meminimalisir deviasi keuangan yang diakibatkan oleh efisiensi Anggaran; 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Pembinaan danPengawasan Sub-Urusan Bencana;4. Melakukan koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan penempatan barang/peralatanpenanggulangan bencana.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	21.51	29.72
2 Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	26.26	0.74
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	4
4 Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	61.03	8.73

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran**	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemer**	**%**	**0**	**35.547.950.937**	**21,41**	**1.373.529.185**		**8.151.534.855**		**15,1**							**15,1**		**0,00**	**0,00**	**18,255**	**1.373.529.185**	**0,00**	**3,86**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.02.1.02	***Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi***	***Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***	***Orang***	***1.943***	***35.547.950.937***	***493***	***1.373.529.185***		***8.151.534.855***												***0,00***	***493***	***1.373.529.185***	***25,37***	***3,86***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1.800	9.769.494.356	415	408.074.900		1.543.987.830												0,00	415	408.074.900	23,06	4,18	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	78	9.410.754.400	78	860.000.135		2.052.983.000												0,00	78	860.000.135	100,00	9,14	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	16	16.367.702.181	3	105.454.150		4.554.564.025												0,00	3	105.454.150	18,75	0,64	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058										0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	(Resos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0	195.540.151.187	61,38	164.646.585.612		44.144.876.056	9,73								9,73		0,00	0,00	35,555	164.646.585.612	0,00	84,20	DINAS SOSIAL
				(Linsos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		10,3				2,43								2,43		0,00		6,365		0,00		DINAS SOSIAL
				(BRTPD) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5				0,02								0,02		0,00		11,26		0,00		DINAS SOSIAL
				(BPRSW) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		0,07				0,05								0,05		0,00		0,06		0,00		DINAS SOSIAL
				(BRSBKL) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		2,22				1,38								1,38		0,00		1,8		0,00		DINAS SOSIAL
				(BPRSR) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5				6,72								6,72		0,00		14,61		0,00		DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(BRSPA) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5				2,34								2,34		0,00		12,42		0,00		DINAS SOSIAL
				(BPSTW) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		0,07				0,07								0,07		0,00		0,07		0,00		DINAS SOSIAL
				(Program) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		93,51				12,17								12,17		0,00		52,84		0,00		DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti*	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)*	*Orang*	*185*	*59.163.954.210*		*40.473.198.653*		*13.280.029.910*										*0,00*	*0*	*40.473.198.653*		*68,41*	*DINAS SOSIAL*
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	*Orang*	*275*		*180*														*180*		*65,45*		*DINAS SOSIAL*
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	*Orang*	*100*		*70*														*70*		*70,00*		*DINAS SOSIAL*
		1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	560	28.710.212.052	70	38.014.018.097		6.240.412.860										0,00	70	38.014.018.097	12,50	132,41	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	560	7.315.862.116	70	1.236.161.061		1.617.460.724										0,00	70	1.236.161.061	12,50	16,90	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	460	2.517.984.600	50	79.007.261		561.629.500										0,00	50	79.007.261	10,87	3,14	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	116.639.500	0	248.790		17.188.500												0,00	0	248.790		0,21	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	560	4.366.212.701	70	789.215.384		998.849.313												0,00	70	789.215.384	12,50	18,08	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	560	11.653.748.705	50	52.189.038		2.826.553.345												0,00	50	52.189.038	8,93	0,45	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	460	3.179.169.000				740.313.500												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	8	16.745.280	2	250.000		3.920.400												0,00	2	250.000	25,00	1,49	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	505	730.971.600	50	287.046.200		159.138.000												0,00	50	287.046.200	9,90	39,27	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	18	85.243.020	36	6.620.000		21.388.444												0,00	36	6.620.000	200,00	7,77	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	28	29.870.320	1	5.190.000		5.517.600												0,00	1	5.190.000	3,57	17,38	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	1	441.295.316	1	3.252.822		87.657.724												0,00	1	3.252.822	100,00	0,74	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02	***Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti***	***Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)***	***Anak***	***125***	***28.158.099.960***	***70***	***3.225.317.244***		***6.535.602.295***												***0,00***	***70***	***3.225.317.244***	***56,00***	***11,45***	***DINAS SOSIAL***
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	***Anak***	***343***		***28***															***28***		***8,16***		***DINAS SOSIAL***
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	Orang	125	813.028.491	70	150.000		229.304.680												0,00	70	150.000	56,00	0,02	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pengasuhan Kewenangan Provinsi																								
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	468	9.507.222.412	28	769.125.300		2.133.981.410												0,00	28	769.125.300	5,98	8,09	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	468	3.049.915.845	70	1.236.161.061		692.077.045												0,00	70	1.236.161.061	14,96	40,53	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.526.482.700	13	79.007.261		320.000.000												0,00	13	79.007.261	10,40	5,18	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	468	1.362.040.532	28	789.215.384		311.975.510												0,00	28	789.215.384	5,98	57,94	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	463	5.399.299.500	13	52.189.038		1.412.762.000												0,00	13	52.189.038	2,81	0,97	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	442.110.892				100.957.560												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	5	15.616.000	1	100.000		3.630.000												0,00	1	100.000	20,00	0,64	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	458	4.525.801.092	13	287.046.200		973.881.810												0,00	13	287.046.200	2,84	6,34	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	428	216.790.080	5	6.620.000		63.996.900												0,00	5	6.620.000	1,17	3,05	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	358	585.213.776	5	5.190.000		155.101.430												0,00	5	5.190.000	1,40	0,89	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	2	17.164.800	1	100.000		4.114.000												0,00	1	100.000	50,00	0,58	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	697.413.840	1	413.000		133.819.950												0,00	1	413.000	100,00	0,06	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.03	***Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti***	***Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)***	***Orang***	***228***	***44.370.279.430***	***200***	***39.689.341.507***		***10.170.473.994***												***0,00***	***200***	***39.689.341.507***	***87,72***	***89,45***	***DINAS SOSIAL***
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	***Orang***	***3.345***		***8.000***															***8.000***		***239,16***		***DINAS SOSIAL***
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3.428	26.500.597.568	8.000	38.014.018.097		5.711.313.740												0,00	8.000	38.014.018.097	233,37	143,45	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	328	3.176.487.760	200	1.236.161.061		716.537.800												0,00	200	1.236.161.061	60,98	38,92	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	303	578.543.544	200	79.007.261		169.311.670												0,00	200	79.007.261	66,01	13,66	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	270.000.000	0	248.790		65.000.000												0,00	0	248.790		0,09	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.346.351.072	200	65.401.201		567.702.960												0,00	200	65.401.201	87,72	2,79	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	228	7.608.989.060	615	242.515.097		1.948.015.300												0,00	615	242.515.097	269,74	3,19	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.691.939.680				695.677.400												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	216	112.435.200	30	6.620.000		26.136.000												0,00	30	6.620.000	13,89	5,89	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	2	32.568.960	6	5.190.000		7.477.800												0,00	6	5.190.000	300,00	15,94	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	762.219.520	12	40.000.000		175.643.600												0,00	12	40.000.000	30,00	5,25	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar	Dokumen	13	290.147.066		180.000		87.657.724												0,00	0	180.000		0,06	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi																								
		1.06.04.1.1.04	***Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti***	***Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)***	***Orang***	***50***	***6.739.179.433***		***40.622.180.619***		***1.489.683.635***												***0,00***	***0***	***40.622.180.619***		***602,78***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.04.1.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.754.288.960	30	38.014.018.097		604.915.300												0,00	30	38.014.018.097	60,00	1.380,18	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	756.940.840	30	1.236.161.061		167.427.700												0,00	30	1.236.161.061	60,00	163,31	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	219.867.185	30	235.035.980		48.108.995												0,00	30	235.035.980	60,00	106,90	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	76.136.800	30	789.215.384		14.520.000												0,00	30	789.215.384	60,00	1.036,58	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	907.301.944	30	242.515.097		205.823.420												0,00	30	242.515.097	60,00	26,73	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	146.180.000				36.300.000												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	1.617.243.704	86	3.946.500		355.113.220												0,00	86	3.946.500	172,00	0,24	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	10	9.744.000	1	400.000		2.420.000												0,00	1	400.000	10,00	4,11	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	66.745.600	40	2.985.000		11.858.000												0,00	40	2.985.000	80,00	4,47	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	8	81.619.200	1	97.723.500		22.506.000												0,00	1	97.723.500	12,50	119,73	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	103.111.200	1	180.000		20.691.000												0,00	1	180.000	25,00	0,17	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05	***Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti***	***Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)***	***Orang***	***70***	***57.108.638.154***	***50***	***40.636.547.589***		***12.669.086.222***												***0,00***	***50***	***40.636.547.589***	***71,43***	***71,16***	***DINAS SOSIAL***
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	***Orang***	***80***		***40***															***40***		***50,00***		***DINAS SOSIAL***
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	***Orang***	***157***		***105***													***105***		***66,88***		***DINAS SOSIAL***
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	327	19.357.230.984	105	38.014.018.097		4.188.290.370												0,00	105	38.014.018.097	32,11	196,38	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	327	4.570.324.506	40	1.236.161.061		938.251.908												0,00	40	1.236.161.061	12,23	27,05	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	227	2.625.774.500	105	235.035.980		540.000.000												0,00	105	235.035.980	46,26	8,95	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	undefined	307	4.204.833.104	105	789.215.384		967.433.720												0,00	105	789.215.384	34,20	18,77	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	307	11.843.159.204	105	242.515.097		2.649.412.370												0,00	105	242.515.097	34,20	2,05	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	307	4.252.120.218				1.076.405.836												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	7.746.497.676	16	3.946.500		1.746.201.336												0,00	16	3.946.500	10,67	0,05	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	70	11.692.800	2	400.000		2.904.000												0,00	2	400.000	2,86	3,42	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	230	193.870.282		2.985.000		31.761.532												0,00	0	2.985.000		1,54	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	227	1.847.513.280	105	97.723.500		438.401.150												0,00	105	97.723.500	46,26	5,29	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	undefined	0	455.621.600	1	14.546.970		90.024.000												0,00	1	14.546.970	0,00	3,19	DINAS SOSIAL
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**(Linsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial**	**%**	**0**	**71.281.741.488**	**0**	**2.025.425.374**		**20.072.843.040**	**0,57**								**0,57**		**0,00**	**0,00**	**0,285**	**2.025.425.374**	**0,00**	**2,84**	**DINAS SOSIAL**
				(Jamsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	**%**	**0**		**0,29**															**0,145**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(Program) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	**%**	**0**		**23,07**				**0,57**							**0,57**		**0,00**		**11,82**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.05.1.01	***Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal***	***Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.***	***undefined***	***31***	***3.140.388.600***	***21***	***22.937.050***		***888.776.000***												***0,00***	***21***	***22.937.050***	***67,74***	***0,73***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	30	3.013.795.600	20	22.571.750		858.013.000												0,00	20	22.571.750	66,67	0,75	DINAS SOSIAL
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	1	126.593.000	1	365.300		30.763.000												0,00	1	365.300	100,00	0,29	DINAS SOSIAL
		1.06.05.1.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi***	***Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.***	***undefined***	***1.600***	***68.141.352.888***	***1.600***	***2.002.488.324***		***19.184.067.040***												***0,00***	***1.600***	***2.002.488.324***	***100,00***	***2,94***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	1.990	6.007.933.500	2.197	1.329.268.200		1.201.586.700												0,00	2.197	1.329.268.200	110,40	22,13	DINAS SOSIAL
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	1.900	62.133.419.388	230	673.220.124		17.982.480.340												0,00	230	673.220.124	12,11	1,08	DINAS SOSIAL
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya**	**%**	**0**	**26.515.289.500**	**8,24**	**2.726.205.553**		**6.000.000.000**												**0,00**	**4,12**	**2.726.205.553**	**0,00**	**10,28**	**DINAS SOSIAL**
		2.22.08.5.01	***Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman***	***Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya serta terpeliharanya Monumen, Tetenger, Makam Pahlawan Nasional.***	***%***	***8,18***	***4.244.629.000***																***nan***	***0***			***0,00***	***DINAS SOSIAL***
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	0	4.244.629.000				0												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan***	***%***	***8,18***	***22.270.660.500***	***8,18***	***2.726.205.553***		***6.000.000.000***											***0,00***	***4,09***	***2.726.205.553***	***50,00***	***12,24***	***DINAS SOSIAL***
		2.22.08.5.09.23	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen	6	22.270.660.500	6	2.726.205.553		6.000.000.000											0,00	6	2.726.205.553	100,00	12,24	DINAS SOSIAL
2	**Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat**	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial**	**%**	**0**	**238.239.700**	**0,84**	**1.242.650**		**56.870.000**											**0,00**	**0,42**	**1.242.650**	**0,00**	**0,52**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.03.1.01	***Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal***	***Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial***	***Orang***	***10***	***238.239.700***	***1***	***1.242.650***		***56.870.000***											***0,00***	***1***	***1.242.650***	***10,00***	***0,52***	***DINAS SOSIAL***
				Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	***Orang***	***5***																***0***				***DINAS SOSIAL***
		1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	238.239.700	1	1.242.650		56.870.000											0,00	1	1.242.650	20,00	0,52	DINAS SOSIAL
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat**	**%**	**0**	**3.942.664.000**	**35,68**	**125.758.000**		**804.620.000**											**0,00**	**17,84**	**125.758.000**	**0,00**	**3,19**	**DINAS SOSIAL**
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.07.1.01	***Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi***	***Terlaksananya penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.***	***Orang***	***7.099***	***3.942.664.000***	***34,6***	***125.758.000***		***804.620.000***											***0,00***	***34,6***	***125.758.000***	***0,49***	***3,19***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	23	3.942.664.000	23	125.758.000		804.620.000											0,00	23	125.758.000	100,00	3,19	DINAS SOSIAL
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**(Dinas) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**0**	**458.425.747.000**	**91,2**	**49.637.618.232**		**104.753.156.192**	**87**								**87**		**0,00**	**0,00**	**89,1**	**49.637.618.232**	**0,00**	**10,83**	**DINAS SOSIAL**
				(BRTPD) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**	**0**		**356,92**				**89**								**89**		**0,00**		**222,96**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(BPRSW) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**	**0**		**354,48**				**88,65**								**88,65**		**0,00**		**221,565**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(BRSBKL) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai**	**0**						**88,09**								**88,09**		**0,00**		**88,09**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(BPRSR) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai**	**0**		**90,82**				**88,8**								**88,8**		**0,00**		**179,62**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(BRSPA) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai**	**0**		**90,18**				**88,95**								**88,95**		**0,00**		**179,13**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
				(BPSTW) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**	**0**		**91,21**				**88,43**								**88,43**		**0,00**		**89,82**		**0,00**		**DINAS SOSIAL**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Bulan***	***12***	***501.645.500***	***12***	***20.334.450***		***110.896.500***											***0,00***	***12***	***20.334.450***	***100,00***	***4,05***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	208.465.500	1	6.360.400		44.346.500											0,00	1	6.360.400	50,00	3,05	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	130.400.000	2	8.919.300		30.250.000											0,00	2	8.919.300	100,00	6,84	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	162.780.000	2	5.054.750		36.300.000											0,00	2	5.054.750	100,00	3,11	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Bulan***	***12***	***255.797.001.261***	***12***	***37.745.413.115***		***53.678.269.160***												***0,00***	***12***	***37.745.413.115***	***100,00***	***14,76***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	247	254.439.970.761	414	37.506.744.833		53.407.106.400												0,00	414	37.506.744.833	167,61	14,74	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.031.760.000	12	200.035.254		207.780.000												0,00	12	200.035.254	100,00	19,39	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	15.240.000	3	2.000.510		3.500.000												0,00	3	2.000.510	300,00	13,13	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	58.827.040	1	4.397.700		11.700.700												0,00	1	4.397.700	100,00	7,48	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tahun	12	237.885.260	12	29.733.518		45.182.060												0,00	12	29.733.518	100,00	12,50	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran	Laporan	1	13.318.200	1	2.501.300		3.000.000												0,00	1	2.501.300	100,00	18,78	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah***	***Bulan***	***12***	***437.760.000***	***12***	***93.378.978***		***87.840.000***												***0,00***	***12***	***93.378.978***	***100,00***	***21,33***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	437.760.000	6	93.378.978		87.840.000												0,00	6	93.378.978	100,00	21,33	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Bulan***	***12***	***671.454.000***	***12***	***1.647.950***		***150.000.000***												***0,00***	***12***	***1.647.950***	***100,00***	***0,25***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Orang	1	671.454.000	2	1.647.950		150.000.000												0,00	2	1.647.950	200,00	0,25	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Bulan***	***12***	***8.468.067.010***	***12***	***223.560.023***		***1.777.845.650***												***0,00***	***12***	***223.560.023***	***100,00***	***2,64***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.304.641.070	1	22.438.551		305.376.000												0,00	1	22.438.551	14,29	1,72	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	2.125.187.500	1	25.104.315		508.197.500												0,00	1	25.104.315	14,29	1,18	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1.159.347.800	1	20.968.528		125.000.000												0,00	1	20.968.528	14,29	1,81	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	100.327.100				20.215.400												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	874.618.520	1	21.428.240		193.140.000												0,00	1	21.428.240	14,29	2,45	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	undefined	4	172.338.200	4	6.772.500		40.125.500												0,00	4	6.772.500	100,00	3,93	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	undefined	12	2.494.585.800	12	101.450.889		532.127.750												0,00	12	101.450.889	100,00	4,07	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	237.021.020	1	25.397.000		53.663.500												0,00	1	25.397.000	100,00	10,72	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***undefined***	***12***	***46.598.474.583***	***12***	***36.967.799***		***11.669.221.421***												***0,00***	***12***	***36.967.799***	***100,00***	***0,08***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	30	3.500.000.000				1.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	18	319.445.100				68.981.700												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	875.462.972	1	10.000.000		144.332.672												0,00	1	10.000.000	14,29	1,14	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84	2.648.414.390	1	13.637.499		343.962.580												0,00	1	13.637.499	1,19	0,51	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	17.504.760.620				4.515.720.000												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	21.750.391.501	2	13.330.300		5.596.224.469												0,00	2	13.330.300	0,00	0,06	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Bulan***	***12***	***60.152.933.138***	***12***	***10.290.488.517***		***12.430.586.521***												***0,00***	***12***	***10.290.488.517***	***100,00***	***17,11***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	undefined	12	97.797.901	12	1.990.000		20.833.901												0,00	12	1.990.000	100,00	2,03	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	undefined	12	8.414.559.834	12	974.211.653		1.806.457.448												0,00	12	974.211.653	100,00	11,58	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	51.640.575.403	12	9.314.286.864		10.603.295.172												0,00	12	9.314.286.864	171,43	18,04	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Bulan***	***12***	***85.798.411.508***	***12***	***1.225.827.400***		***24.848.496.940***												***0,00***	***12***	***1.225.827.400***	***100,00***	***1,43***	***DINAS SOSIAL***
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	362	5.117.158.084	32	125.634.000		1.318.937.026												0,00	32	125.634.000	8,84	2,46	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	116	7.735.359.526	53	1.053.873.200		1.557.741.852												0,00	53	1.053.873.200	45,69	13,62	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	33	24.680.800	12	450.000		4.973.000												0,00	12	450.000	36,36	1,82	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	356	1.613.554.900	23	45.870.200		350.000.000												0,00	23	45.870.200	6,46	2,84	DINAS SOSIAL
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	71.307.658.198				21.616.845.062												0,00	0			0,00	DINAS SOSIAL
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**%**	**0**	**450.000.000**	**75**	**364.469.770**		**100.000.000**												**0,00**	**37,5**	**364.469.770**	**0,00**	**80,99**	**DINAS SOSIAL**
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***450.000.000***	***100***	***364.469.770***		***100.000.000***												***0,00***	***50***	***364.469.770***	***50,00***	***80,99***	***DINAS SOSIAL***
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	2	450.000.000	1	364.469.770		100.000.000												0,00	1	364.469.770	50,00	80,99	DINAS SOSIAL
4	**Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)**	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar**	**%**	**0**	**22.149.344.122**	**76,67**	**39.477.156.158**		**5.503.456.915**	**2,91**								**2,91**		**0,00**	**0,00**	**39,79**	**39.477.156.158**	**0,00**	**178,23**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.06.1.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi***	***Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.***	***Orang***	***1.820***	***22.149.344.122***	***10.477***	***39.477.156.158***		***5.503.456.915***												***0,00***	***10.477***	***39.477.156.158***	***575,66***	***178,23***	***DINAS SOSIAL***
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	100.500	2.819.514.500	10.000	38.014.018.097		713.900.000												0,00	10.000	38.014.018.097	9,95	1.348,25	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	150	438.885.000	50	1.236.161.061		145.200.000												0,00	50	1.236.161.061	33,33	281,66	DINAS SOSIAL
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	10	2.054.389.100	5	1.000.000		605.000.000												0,00	5	1.000.000	50,00	0,05	DINAS SOSIAL
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	215	908.137.000	132	88.537.000		196.020.000												0,00	132	88.537.000	61,40	9,75	DINAS SOSIAL
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1.215	15.928.418.522	270	137.440.000		3.843.336.915												0,00	270	137.440.000	22,22	0,86	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja (%)							814.091.127.934		260.377.990.534		189.587.357.058									0,00		0,00	0,00		260.377.990.534	49,87	31,98	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	90	100
2 Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	75	32
3 Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	70	22
4 Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	0	
5 Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	70	24.57
6 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	0	
7 Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2639	2634
8 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2768	2760
9 Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	0	
10 Kategori RB Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat**																											
2	**Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja**	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten**	**%**	**80**	**109.764.210.450**	**95,5**	**21.807.751.511**		**23.931.758.000**		**163.257.410**								**163.257.410**		**0,68**	**47,75**	**21.971.008.921**	**59,69**	**20,02**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	**%**	**0**		**98**																**49**		**0,00**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase peserta magang yang ditempatkan	**%**	**60**		**74**																**37**		**61,67**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	**%**	**100**		**100**				**100**								**100**		**0,00**		**100**		**100,00**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar	**%**	**90**		**100**				**35**								**35**		**0,00**		**67,5**		**75,00**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Jumlah tenaga kerja yang kompeten	**Orang**	**0**																		**0**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2.07.03.1.01	***Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi***	***Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n***	***Orang***	***6.180***	***108.534.973.150***		***21.749.033.831***		***23.700.000.000***		***131.868.410***								***131.868.410***		***0,56***	***0***	***21.880.902.241***		***20,16***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
				Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	***Orang***	***760***																		***0***				***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
				Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang	***Orang***	***280***		***150***																***150***		***53,57***		***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014		140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3	***Orang***	***840***																		***0***				***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	5.600	103.534.973.150	179	21.737.637.981		22.500.000.000		131.868.410								131.868.410		0,59	179	21.869.506.391	3,20	21,12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Paket	4	5.000.000.000	3	11.395.850		1.200.000.000												0,00	3	11.395.850	75,00	0,23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.02	***Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja***	***Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n***	***Lembaga***	***135***	***194.728.500***	***111***	***9.657.380***		***39.270.000***												***0,00***	***111***	***9.657.380***	***82,22***	***4,96***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Lembaga	135	194.728.500	103	9.657.380		39.270.000												0,00	103	9.657.380	76,30	4,96	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.03	***Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah***	***Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas pada Tahun-n***	***Perusahaan***	***40***	***510.300.000***				***121.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	40	510.300.000				121.000.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.04	***Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah***	***Dokumen***	***45***	***524.208.800***	***10***	***49.060.300***		***71.488.000***		***31.389.000***								***31.389.000***		***43,91***	***10***	***80.449.300***	***22,22***	***15,35***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	45	524.208.800	0	49.060.300		71.488.000		31.389.000								31.389.000		43,91	0	80.449.300		15,35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja**	**%**	**100**	**279.629.081.000**	**100**	**15.959.123.364**		**61.181.962.400**	**50**								**50**		**0,00**	**0,00**	**75**	**15.959.123.364**	**75,00**	**5,71**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	**%**	**80**		**95,5**															**47,75**		**59,69**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	**%**	**100**		**100**															**50**		**50,00**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	**%**	**35**		**37**															**18,5**		**52,86**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan	**%**	**70**		**100**															**50**		**71,43**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	**%**	**75**		**120**															**60**		**80,00**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014		140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	**orang**	**0**																		**0**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya***	***Dokumen***	***9***	***279.629.081.000***	***9***	***15.959.123.364***		***61.181.962.400***												***0,00***	***9***	***15.959.123.364***	***100,00***	***5,71***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	4	5.601.000.000	1	708.257.333		692.762.400												0,00	1	708.257.333	25,00	12,65	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	33	55.743.881.000	7	3.787.450.235		6.465.000.000												0,00	7	3.787.450.235	21,21	6,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.22.08.5.09.22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	8	218.284.200.000	2	11.463.415.796		54.024.200.000												0,00	2	11.463.415.796	25,00	5,25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		4.01.10.5.02.0001	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**%**	**100**	**240.000.000**	**40**	**81.343.875**		**114.898.000**	**3**								**3**		**0,00**	**0,00**	**21,5**	**81.343.875**	**21,50**	**33,89**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***240.000.000***		***81.343.875***		***114.898.000***												***0,00***	***0***	***81.343.875***		***33,89***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	4	240.000.000	2	81.343.875		114.898.000												0,00	2	81.343.875	50,00	33,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**Meningkatnya Kesempatan Kerja**	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK**	**Kab/Kota**	**5**	**1.101.665.000**	**5**	**9.792.600**		**271.500.000**												**0,00**	**5**	**9.792.600**	**100,00**	**0,89**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2.07.02.1.01	***Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)***	***Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro***	***Dokumen***	***1***	***1.101.665.000***	***1***	***9.792.600***		***271.500.000***												***0,00***	***1***	***9.792.600***	***100,00***	***0,89***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5	800.000.000	1	9.792.600		200.000.000												0,00	1	9.792.600	20,00	1,22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	80	301.665.000				71.500.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik**	**%**	**60**	**5.727.014.800**	**46**	**61.946.944**		**1.314.380.000**	**7,14**								**7,14**		**0,00**	**0,00**	**26,57**	**61.946.944**	**44,28**	**1,08**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	**%**	**90**		**100**															**50**		**55,56**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	**%**	**90**		**100**															**50**		**55,56**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014		140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	Orang	0																		0				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.01	***Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n***	***Orang***	***8.000***	***1.663.723.800***	***6.500***	***48.741.357***		***335.875.000***												***0,00***	***6.500***	***48.741.357***	***81,25***	***2,93***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	8.500	902.810.000	25	21.032.185		168.725.000												0,00	25	21.032.185	0,29	2,33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	295.126.000	25	4.697.312		69.950.000												0,00	25	4.697.312	25,00	1,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	250	348.590.400		7.274.244		72.200.000												0,00	0	7.274.244		2,09	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	6.340	117.197.400	6.315	15.737.616		25.000.000												0,00	6.315	15.737.616	99,61	13,43	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.02	***Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku***	***Lembaga***	***40***	***301.665.000***				***71.500.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	10	301.665.000				71.500.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	***jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online***	***Dokumen***	***1***	***1.561.626.000***	***1***	***7.836.665***		***357.005.000***												***0,00***	***1***	***7.836.665***	***100,00***	***0,50***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	204.204.000	1	4.326.399		48.400.000												0,00	1	4.326.399	100,00	2,12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	9.000	356.402.000	50	3.510.266		66.605.000												0,00	50	3.510.266	0,56	0,98	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	180	1.001.020.000				242.000.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.04	***Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi***	***Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan***	***Orang***	***100***	***2.200.000.000***	***25***	***5.368.922***		***550.000.000***												***0,00***	***25***	***5.368.922***	***25,00***	***0,24***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	1.200.000.000	40	5.368.922		300.000.000												0,00	40	5.368.922	20,00	0,45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014		140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																									
		2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	25	1.000.000.000			250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan**	**%**	**80**	**1.344.572.000**	**125**	**197.046.100**	**275.000.000**												**0,00**	**62,5**	**197.046.100**	**78,13**	**14,65**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	**%**	**0**																**0**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		3.32.03.1.01	***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah transmigran yang ditempatkan***	***KK***	***145***	***1.344.572.000***	***30***	***197.046.100***	***275.000.000***												***0,00***	***30***	***197.046.100***	***20,69***	***14,65***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	624.637.000	1	58.138.808	125.000.000												0,00	1	58.138.808	100,00	9,31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	30	719.935.000	20	138.907.292	150.000.000												0,00	20	138.907.292	66,67	19,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	**Meningkatnya layanan ketenagakerjaan**	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase jumlah layanan yang terselesaikan**	**%**	**99**	**2.197.254.700**	**100**	**313.795.013**	**410.800.000**	**77**	**6.012.062**							**77**	**6.012.062**	**0,00**	**1,46**	**88,5**	**319.807.075**	**89,39**	**14,55**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan	**Perusahaan**	**0**																**0**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2.07.05.1.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n***	***Perkara***	***1.130***	***1.297.255.700***	***210***	***162.319.421***	***210.800.000***		***3.351.337***								***3.351.337***		***1,59***	***210***	***165.670.758***	***18,58***	***12,77***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	1.130	470.000.000	210	49.956.567	90.000.000												0,00	210	49.956.567	18,58	10,63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	10	84.225.200	10	9.986.860	17.000.000												0,00	10	9.986.860	100,00	11,86	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	200	230.000.000	8	49.890.551	0												0,00	8	49.890.551	4,00	21,69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	320.000.000	1	49.990.746	65.000.000												0,00	1	49.990.746	100,00	15,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Orang	80	193.030.500	6	2.494.697	38.800.000		3.351.337								3.351.337		8,64	6	5.846.034	7,50	3,03	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.03	***Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)***	***Jumlah Penetapan UMP***	***SK***	***5***	***899.999.000***	***1***	***151.475.592***	***200.000.000***		***2.660.725***								***2.660.725***		***1,33***	***1***	***154.136.317***	***20,00***	***17,13***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SK	1	450.000.000	4	50.856.869	100.000.000		2.660.725								2.660.725		2,66	4	53.517.594	400,00	11,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	399	449.999.000	300	100.618.723	100.000.000												0,00	300	100.618.723	75,19	22,36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan**	**%**	**80**	**6.695.569.100**	**100**	**634.429.664**	**1.213.231.000**	**25,33**								**25,33**		**0,00**	**0,00**	**62,665**	**634.429.664**	**78,33**	**9,48**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	**%**	**100**		**100**			**26,25**								**26,25**		**0,00**		**63,125**		**63,13**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	**%**	**89,1**		**100**			**91,29**								**91,29**		**0,00**		**95,645**		**107,35**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3	**Perusahaan**	**0**																	**0**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2.07.06.1.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan***	***Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n***	***Perusahaan***	***975***	***6.695.569.100***		***634.429.664***	***1.213.231.000***												***0,00***	***0***	***634.429.664***		***9,48***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n	***Perusahaan***	***160***																	***0***				***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	***Perusahaan***	***85***		***145***															***145***		***170,59***		***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1.135	2.031.665.300	1.416	308.053.625	363.027.000												0,00	1.416	308.053.625	124,76	15,16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85	4.663.903.800	145	326.376.039	850.204.000												0,00	145	326.376.039	170,59	7,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor**	**91**	**248.006.359.842**	**91,46**	**33.002.249.943**	**51.396.634.000**	**87,12**								**87,12**		**0,00**	**0,00**	**178,58**	**33.002.249.943**	**196,24**	**13,31**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Nilai PKKI Program Penunjang (BLKPP)	**score**	**91**		**88,5**			**85,1**								**85,1**		**0,00**		**173,6**		**190,77**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
				Nilai PKKI Program Penunjang (Balai K3)	**score**	**91**		**88,5**			**86,08**								**86,08**		**0,00**		**174,58**		**191,85**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah***	***Dokumen***	***25***	***1.318.377.000***	***6***	***61.300.120***	***279.600.000***												***0,00***	***6***	***61.300.120***	***24,00***	***4,65***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	484.707.000	2	27.731.726	91.055.000												0,00	2	27.731.726	100,00	5,72	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	263.500.000	0		61.700.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	257.389.000	2	19.105.274	56.265.000												0,00	2	19.105.274	100,00	7,42	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	312.781.000	2	14.463.120	70.580.000												0,00	2	14.463.120	100,00	4,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah***	***Dokumen***	***5***	***193.280.034.722***	***1***	***27.041.449.642***	***39.753.716.000***												***0,00***	***1***	***27.041.449.642***	***20,00***	***13,99***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	192.101.595.022	178	26.885.326.154	39.500.000.000												0,00	178	26.885.326.154	1.483,33	14,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	964.060.000	18	134.390.070	207.636.000												0,00	18	134.390.070	1.800,00	13,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.879.900	2	7.207.628	14.080.000											0,00	2	7.207.628	200,00	10,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	148.499.800	14	14.525.790	32.000.000											0,00	14	14.525.790	93,33	9,78	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Dokumen***	***5***	***400.010.000***	***1***	***51.560.312***	***84.983.000***											***0,00***	***1***	***51.560.312***	***20,00***	***12,89***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	155.000.000	1	9.507.312	36.000.000											0,00	1	9.507.312	100,00	6,13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	245.010.000	2	42.053.000	48.983.000											0,00	2	42.053.000	33,33	17,16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai***	***Dokumen***	***5***	***105.757.000***	***1***	***10.051.345***	***20.740.000***											***0,00***	***1***	***10.051.345***	***20,00***	***9,50***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	105.757.000	6	10.051.345	20.740.000											0,00	6	10.051.345	100,00	9,50	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah***	***Tahun***	***5***	***4.442.813.100***	***1***	***424.531.821***	***944.945.000***											***0,00***	***1***	***424.531.821***	***20,00***	***9,56***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	369.652.000	1	42.971.993	99.820.000											0,00	1	42.971.993	100,00	11,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	984.692.900	3	91.855.722	206.785.000											0,00	3	91.855.722	300,00	9,33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	304.860.700	5	32.579.225	62.975.000											0,00	5	32.579.225	500,00	10,69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0			0											0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	359.809.900	2	50.173.245	71.865.000											0,00	2	50.173.245	200,00	13,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	98.541.600	2	3.245.000	21.000.000											0,00	2	3.245.000	200,00	3,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.647.756.000	4	203.706.636	350.000.000											0,00	4	203.706.636	400,00	12,36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	677.500.000	1		132.500.000												0,00	1		50,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Bulan***	***60***	***5.378.120.000***	***12***	***10.956.500***	***1.350.000.000***												***0,00***	***12***	***10.956.500***	***20,00***	***0,20***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.877.950.000			500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.400.000.000			350.000.000												0,00	0			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2.100.170.000	2	10.956.500	500.000.000												0,00	2	10.956.500	40,00	0,52	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Bulan***	***60***	***26.073.248.620***	***12***	***4.362.058.937***	***5.098.250.000***												***0,00***	***12***	***4.362.058.937***	***20,00***	***16,73***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	112.869.000	4	8.944.495	24.000.000												0,00	4	8.944.495	133,33	7,92	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.289.828.420	9	687.714.145	1.221.550.000												0,00	9	687.714.145	300,00	10,93	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	19.670.551.200	12	3.665.400.297	3.852.700.000												0,00	12	3.665.400.297	400,00	18,63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Bulan***	***60***	***17.007.999.400***	***12***	***1.040.341.266***	***3.864.400.000***												***0,00***	***12***	***1.040.341.266***	***20,00***	***6,12***	***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	197.691.400	1	27.175.999	41.000.000												0,00	1	27.175.999	100,00	13,75	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.606.519.800	5	56.738.500	594.400.000												0,00	5	56.738.500	500,00	2,18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	4.418.529.400	15	437.551.335	900.000.000												0,00	15	437.551.335	27,27	9,90	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	3	318.791.500	5	1.300.000	65.000.000												0,00	5	1.300.000	166,67	0,41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	1.229.967.300	63	139.650.755	264.000.000												0,00	63	139.650.755	2.100,00	11,35	DINAS TENAGA KERJA DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014	140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	3	8.236.500.000	3	377.924.677		2.000.000.000											0,00		3	377.924.677	100,00	4,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							654.705.726.892		72.067.479.014		140.110.163.400		169.269.472							0,00	169.269.472	0,00	0,12		72.236.748.486	118,61	11,03	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan SOP serta sinergi antar bidang dan UPT di Disnakertrans DIY mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang ditentukan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk menindaklanjuti adanya instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melakukan penyesuaian anggaran dan penjadwalan kembali beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	Mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis ketenagakerjaan di DIY untuk menentukan skala prioritas sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta meningkatkan kerjasama lintas sektor agar capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan lebih optimal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	19	19
2 Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	95.5	100
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2
4 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan	23	11.5
5 Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	5	6

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	persen	0	17.065.226.861	25,1475	43.380.000	3.869.935.348	40,63	3.168.000							40	3.168.000	0,00	0,08	32,57375	46.548.000	0,00	0,27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.01	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi*	*Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender*	*OPD*	*37*	*787.662.950*	*0*	*500.000*	*186.237.000*		*500.000*								*500.000*		*0,27*	*0*	*1.000.000*		*0,13*	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK*
				Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	*OPD*	*37*		*0*			*38*								*38*		*0,00*		*38*		*102,70*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK*
		2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	25	721.490.000	0		170.730.000	5								5		0,00	0,00	5		20,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	OPD	37	66.172.950	0	500.000	15.507.000	1	500.000							1	500.000	0,00	3,22	1	1.000.000	2,70	1,51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.02	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi*	*Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi*	*Persen*	*17*	*14.743.641.411*	*0*		*3.320.698.348*	*14,37*								*14*		*0,00*	*0,00*	*7*		*41,18*	*0,00*	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK*
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	9.963.839.886	0		2.211.679.503												0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan	Organisasi	40	4.779.801.525	0		1.109.018.845	7								7		0,00	0,00	7		17,50	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota																							PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi***	***Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA***	***organisasi***	***3***	***1.533.922.500***		***42.880.000***		***363.000.000***	***3***	***2.668.000***							***3***	***2.668.000***	***0,00***	***0,73***	***3***	***45.548.000***	***100,00***	***2,97***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	3	1.149.922.500	0	42.380.000		272.250.000	3	2.168.000							3	2.168.000	0,00	0,80	3	44.548.000	100,00	3,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	300	384.000.000	0	500.000		90.750.000	60	500.000							60	500.000	0,00	0,55	60	1.000.000	20,00	0,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik**	**%**	**0**	**1.535.105.000**	**100**	**1.000.000**		**363.000.000**	**100**	**250.000**							**100**	**250.000**	**0,00**	**0,07**	**100**	**1.250.000**	**0,00**	**0,08**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.08.05.1.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi***	***Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak***	***Dokumen***	***10***	***1.535.105.000***	***1***	***1.000.000***		***363.000.000***	***2***	***250.000***							***2***	***250.000***	***0,00***	***0,07***	***3***	***1.250.000***	***30,00***	***0,08***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	10	896.217.500	2	500.000		211.750.000	2	125.000							2	125.000	0,00	0,06	4	625.000	40,00	0,07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	15	638.887.500	3	500.000		151.250.000	3	125.000							3	125.000	0,00	0,08	6	625.000	40,00	0,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan**	**persen**	**0**	**108.006.721.900**	**0,0766**	**4.481.239.527**		**20.150.000.000**	**0,00095**	**152.616.773**							**0,00095**	**152.616.773**	**0,00**	**0,76**	**0,038775**	**4.633.856.300**	**0,00**	**4,29**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239		51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Unit***	***27***	***1.378.000.000***			***250.000.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana Prasarana Budaya	Unit	27	1.378.000.000			250.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima***	***Kelompok***	***160***	***106.628.721.900***	***30***	***4.481.239.527***	***19.900.000.000***	***5***	***152.616.773***							***5***	***152.616.773***	***0,00***	***0,77***	***35***	***4.633.856.300***	***21,88***	***4,35***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.22.08.5.09.19	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang	1.250	68.766.721.900	370	4.017.439.677	11.700.000.000	50	124.001.129							50	124.001.129	0,00	1,06	420	4.141.440.806	33,60	6,02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	2	37.862.000.000	2	463.799.850	8.200.000.000	2	28.615.644							2	28.615.644	0,00	0,35	4	492.415.494	200,00	1,30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak**	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**Persen**	**97**	**14.345.538.252**	**100**	**919.501.630**	**3.139.524.120**	**100**	**716.280.000**							**100**	**716.280.000**	**0,00**	**22,81**	**100**	**1.635.781.630**	**103,09**	**11,40**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.08.03.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***jumlah kebijakan yang tersusun***	***Dokumen***	***5***	***1.936.153.000***	***1***	***50.710.000***	***437.268.000***	***1***	***640.000***							***1***	***640.000***	***0,00***	***0,15***	***2***	***51.350.000***	***40,00***	***2,65***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	235.403.000	1	50.210.000	37.268.000	1	140.000							1	140.000	0,00	0,38	2	50.350.000	40,00	21,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	20	1.700.750.000	5	500.000	400.000.000	5	500.000							5	500.000	0,00	0,13	10	1.000.000	50,00	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.08.03.1.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah penerima manfaat***	***Orang***	***650***	***10.390.942.252***	***145***	***833.584.330***	***2.237.256.120***	***26***	***715.000.000***							***26***	***715.000.000***	***0,00***	***31,96***	***171***	***1.548.584.330***	***26,31***	***14,90***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1	8.194.721.500	1	715.000.000	1.772.650.000	1	715.000.000							1	715.000.000	0,00	40,34	2	1.430.000.000	200,00	17,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	3	2.196.220.752	3	118.584.330	464.606.120	3								3		0,00	0,00	6	118.584.330	200,00	5,40	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.03.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi***	***jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi***	***Organisasi***	***3***	***2.018.443.000***	***3***	***35.207.300***	***465.000.000***	***3***	***640.000***							***3***	***640.000***	***0,00***	***0,14***	***6***	***35.847.300***	***200,00***	***1,78***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150	327.693.000	30	34.707.300	65.000.000	30	140.000							30	140.000	0,00	0,22	60	34.847.300	40,00	10,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	17	1.690.750.000	4	500.000	400.000.000	4	500.000							4	500.000	0,00	0,13	8	1.000.000	47,06	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar**	**%**	**0**	**4.363.750.000**	**100**	**64.484.800**	**1.000.000.000**	**100**	**10.112.800**							**100**	**10.112.800**	**0,00**	**1,01**	**100**	**74.597.600**	**0,00**	**1,71**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.08.06.1.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi***	***Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan***	***Kab/Kota***	***5***	***2.401.500.000***	***5***	***1.000.000***	***550.000.000***	***5***	***1.000.000***							***5***	***1.000.000***	***0,00***	***0,18***	***10***	***2.000.000***	***200,00***	***0,08***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	1.100.750.000	1	500.000	250.000.000	1	500.000							1	500.000	0,00	0,20	2	1.000.000	40,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	80	1.300.750.000	2	500.000	300.000.000	16	500.000							16	500.000	0,00	0,17	18	1.000.000	22,50	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.06.1.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi***	***Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak***	***Lembaga***	***210***	***1.962.250.000***	***42***	***63.484.800***	***450.000.000***	***42***	***9.112.800***							***42***	***9.112.800***	***0,00***	***2,03***	***84***	***72.597.600***	***40,00***	***3,70***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	180	210.750.000	90	4.000.000	50.000.000	1	250.000							1	250.000	0,00	0,50	91	4.250.000	50,56	2,02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.300.750.000	1	500.000	300.000.000	1	500.000							1	500.000	0,00	0,17	2	1.000.000	40,00	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	450.750.000	1	58.984.800	100.000.000	1	8.362.800							1	8.362.800	0,00	8,36	2	67.347.600	6,67	14,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang dilayani**	**%**	**97**	**6.071.432.452**	**100**	**193.285.421**	**1.381.797.120**	**100**	**1.280.000**							**100**	**1.280.000**	**0,00**	**0,09**	**100**	**194.565.421**	**103,09**	**3,20**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.08.07.1.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Dokumen***	***5***	***332.845.000***	***1***	***51.090.000***	***60.000.000***	***1***	***140.000***							***1***	***140.000***	***0,00***	***0,23***	***2***	***51.230.000***	***40,00***	***15,39***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	332.845.000	1	51.090.000	60.000.000	1	140.000							1	140.000	0,00	0,23	2	51.230.000	40,00	15,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07.1.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah penerima manfaat***	***Orang***	***235***	***5.427.864.452***	***52***	***141.695.421***	***1.259.697.120***	***9***	***640.000***							***9***	***640.000***	***0,00***	***0,05***	***61***	***142.335.421***	***25,96***	***2,62***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.08.07.1.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	200	3.829.575.000	9	500.000		907.500.000	9	500.000							9	500.000	0,00	0,06	18	1.000.000	191,00	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07.1.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan kewenangan Provinsi	Layanan	3	1.598.289.452	3	107.982.721		352.197.120	3								3		0,00	0,00	6	107.982.721	200,00	6,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK kewenangan Provinsi	orang	0	0	56	33.212.700		0		140.000								140.000		0,00	56	33.352.700	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.07.1.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Dokumen***	***5***	***310.723.000***	***1***	***500.000***		***62.100.000***	***1***	***500.000***							***1***	***500.000***	***0,00***	***0,81***	***2***	***1.000.000***	***40,00***	***0,32***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.07.1.03.07	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	310.723.000		500.000		62.100.000	1	500.000							1	500.000	0,00	0,81	1	1.000.000	20,00	0,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**0**	**87.630.561.834**	**88,51**	**8.159.280.861**		**18.105.229.556**	**88,51**	**2.466.752.400**							**88,51**	**2.466.752.400**	**0,00**	**13,62**	**177,02**	**10.626.033.261**	**0,00**	**12,13**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Dokumen***	***40***	***655.619.300***	***8***	***48.654.300***		***139.150.000***	***2***	***14.791.000***							***2***	***14.791.000***	***0,00***	***10,63***	***10***	***63.445.300***	***25,00***	***9,68***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	267.996.100	2	19.151.100		54.450.000	1	6.169.000							1	6.169.000	0,00	11,33	3	25.320.100	27,27	9,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	188.921.600	1	10.236.600		42.350.000	1	2.500.000							1	2.500.000	0,00	5,90	2	12.736.600	40,00	6,74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239		51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	198.701.600	5	19.266.600	42.350.000	2	6.122.000							2	6.122.000	0,00	14,46	7	25.388.600	35,00	12,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun***	***Laporan***	***100***	***54.560.269.770***	***0***	***5.559.164.210***	***11.206.427.216***	***5***	***1.875.061.062***							***5***	***1.875.061.062***	***0,00***	***16,73***	***5***	***7.434.225.272***	***5,00***	***13,63***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79	54.029.596.044	55	5.487.814.060	11.100.000.000	79	1.861.131.862							79	1.861.131.862	0,00	16,77	134	7.348.945.922	169,62	13,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	299.720.000	1	40.220.000	60.000.000	1	4.206.800							1	4.206.800	0,00	7,01	2	44.426.800	40,00	14,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	20.638.326	0		4.077.216												0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	210.315.400	18	31.130.150	42.350.000	4	9.722.400							4	9.722.400	0,00	22,96	22	40.852.550	24,44	19,42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD***	***Laporan***	***5***	***193.200.000***	***0***	***13.328.000***	***40.000.000***	***1***	***3.430.000***							***1***	***3.430.000***	***0,00***	***8,58***	***1***	***16.758.000***	***20,00***	***8,67***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	193.200.000	1	13.328.000	40.000.000	1	3.430.000							1	3.430.000	0,00	8,58	2	16.758.000	40,00	8,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah***	***Laporan***	***20***	***4.804.146.414***	***0***	***148.696.990***	***983.882.340***	***2***	***69.476.700***							***2***	***69.476.700***	***0,00***	***7,06***	***2***	***218.173.690***	***10,00***	***4,54***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	490.607.500	3	61.214.800	100.000.000	2	38.431.300							2	38.431.300	0,00	38,43	5	99.646.100	500,00	20,31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	444.968.400	4	11.552.800	90.000.000	2	14.998.900							2	14.998.900	0,00	16,67	6	26.551.700	600,00	5,97	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	352.596.314	5	19.830.000	69.882.340												0,00	5	19.830.000	50,00	5,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	418.651.000	1	2.999.750	85.000.000	1	5.966.500							1	5.966.500	0,00	7,02	2	8.966.250	200,00	2,14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	152.370.200	2	1.068.000	30.000.000	4	1.655.000							4	1.655.000	0,00	5,52	6	2.723.000	150,00	1,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	2.396.953.000	1,75	51.531.640	500.000.000	2	8.425.000							2	8.425.000	0,00	1,69	3,75	59.956.640	37,50	2,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	548.000.000	1	500.000	109.000.000												0,00	1	500.000	20,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor***	***Laporan***	***5***	***6.998.349.200***		***61.909.000***	***1.567.000.000***												***0,00***	***0***	***61.909.000***		***0,88***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	825.000.000	0		412.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.216.000.000	0		370.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	373.980.800	1	32.935.000	45.000.000											0,00	1	32.935.000	14,29	8,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	3.013.368.400	39	21.024.000	650.000.000											0,00	39	21.024.000	195,00	0,70	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	20	190.000.000	0		40.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	107	380.000.000	3	7.950.000	50.000.000											0,00	3	7.950.000	2,80	2,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor***	***Laporan***	***15***	***11.624.732.950***	***0***	***1.776.527.119***	***2.283.270.000***	***3***	***394.995.459***							***3***	***394.995.459***	***0,00***	***17,30***	***3***	***2.171.522.578***	***20,00***	***18,68***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	116.672.000	4	1.100.000	26.620.000	2	900.000							2	900.000	0,00	3,38	6	2.000.000	120,00	1,71	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	4.047.005.550	4	324.620.879	786.500.000	4	84.322.216							4	84.322.216	0,00	10,72	8	408.943.095	53,33	10,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	7.461.055.400	1	1.450.806.240	1.470.150.000	4	309.773.243							4	309.773.243	0,00	21,07	5	1.760.579.483	100,00	23,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor***	***Laporan***	***20***	***8.794.244.200***		***551.001.242***	***1.885.500.000***	***4***	***108.998.179***							***4***	***108.998.179***	***0,00***	***5,78***	***4***	***659.999.421***	***20,00***	***7,50***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.858.117.900	0	36.469.000	425.500.000	1	9.335.779							1	9.335.779	0,00	2,19	1	45.804.779	100,00	2,47	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	107	524.100.000	104	91.366.400	110.000.000	13	14.042.000							13	14.042.000	0,00	12,77	117	105.408.400	109,35	20,11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	2.408.127.900		276.114.792	500.000.000	18	63.430.400							18	63.430.400	0,00	12,69	18	339.545.192	100,00	14,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	973.898.400	59	73.078.850	200.000.000	18	22.190.000							18	22.190.000	0,00	11,10	77	95.268.850	102,67	9,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.030.000.000	3	73.972.200	650.000.000												0,00	3	73.972.200	150,00	2,44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4	**Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan**	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)**	**%**	**77,5**	**2.417.775.000**	**319,07**	**500.000**	**652.500.000**	**80,6**	**1.000.000**							**80,6**	**1.000.000**	**0,00**	**0,15**	**199,835**	**1.500.000**	**257,85**	**0,06**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.14.02.1.01	***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk***	***Jumlah Forum yang terfasilitasi***	***Forum***	***0***	***2.417.775.000***	***0***	***500.000***	***652.500.000***		***1.000.000***								***1.000.000***		***0,15***	***0***	***1.500.000***		***0,06***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	35	1.140.750.000	0		350.000.000	1	500.000							1	500.000	0,00	0,14	1	500.000	2,86	0,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	10	1.277.025.000	2	500.000	302.500.000	1	500.000							1	500.000	0,00	0,17	3	1.000.000	30,00	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)**	**%**	**56,6**	**5.704.732.290**	**63,1**	**34.500.000**	**972.875.000**	**63,1**	**500.000**							**63,1**	**500.000**	**0,00**	**0,05**	**63,1**	**35.000.000**	**111,48**	**0,61**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
		2.14.03.1.01	***Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun***	***Paket***	***4***	***3.698.499.790***	***0***	***34.000.000***	***625.000.000***	***1***							***1***		***0,00***	***0,00***	***1***	***34.000.000***	***25,00***	***0,92***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	25	3.698.499.790	6	34.000.000	625.000.000	1							1		0,00	0,00	7	34.000.000	28,00	0,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03.1.02	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB***	***Kali***	***4***	***2.006.232.500***	***0***	***500.000***	***347.875.000***	***3***	***500.000***							***3***	***500.000***	***0,00***	***0,14***	***3***	***1.000.000***	***75,00***	***0,05***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	2.006.232.500	0	500.000	347.875.000	5	500.000							5	500.000	0,00	0,14	5	1.000.000	20,00	0,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5	**Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang diimplementasikan dengan baik**	**Laporan**	**0**	**5.240.554.000**	**2**	**2.500.000**	**1.253.000.000**	**2**	**2.500.000**							**2**	**2.500.000**	**0,00**	**0,20**	**4**	**5.000.000**	**0,00**	**0,10**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.08.04.1.01	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi***	***Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak***	***%***	***97,8***	***2.012.539.000***	***0***	***1.000.000***	***491.500.000***	***97,8***	***1.000.000***							***97,8***	***1.000.000***	***0,00***	***0,20***	***48,9***	***2.000.000***	***50,00***	***0,10***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	64	386.789.000	40	500.000	91.500.000	52	500.000							52	500.000	0,00	0,55	92	1.000.000	143,75	0,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	10	1.625.750.000	2	500.000	400.000.000	2	500.000							2	500.000	0,00	0,13	4	1.000.000	40,00	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.04.1.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi***	***Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga***	***Lembaga***	***4***	***2.067.265.000***	***1***	***1.000.000***	***481.500.000***	***3***	***1.000.000***							***3***	***1.000.000***	***0,00***	***0,21***	***4***	***2.000.000***	***100,00***	***0,10***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	766.515.000	4	500.000	181.500.000	5	500.000							5	500.000	0,00	0,28	9	1.000.000	900,00	0,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	250	1.300.750.000	50	500.000	300.000.000	50	500.000							50	500.000	0,00	0,17	100	1.000.000	40,00	0,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.04.1.03	***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi***	***Lembaga***	***1***	***1.160.750.000***	***1***	***500.000***	***280.000.000***	***1***	***500.000***							***1***	***500.000***	***0,00***	***0,18***	***2***	***1.000.000***	***200,00***	***0,09***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	2	1.160.750.000	2	500.000	280.000.000	2	500.000							2	500.000	0,00	0,18	4	1.000.000	200,00	0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif**	**%**	**0**	**2.668.004.000**	**0,4**	**2.000.000**	**631.623.500**	**0,4**	**5.711.300**							**0,4**	**5.711.300**	**0,00**	**0,90**	**0,4**	**7.711.300**	**0,00**	**0,29**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01	***Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan***	***Jenis***	***5***	***2.668.004.000***	***0***	***2.000.000***	***631.623.500***	***1***	***5.711.300***							***1***	***5.711.300***	***0,00***	***0,90***	***1***	***7.711.300***	***20,00***	***0,29***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK***
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.532.280.000	1,3	500.000	363.000.000	1	4.211.300							1	4.211.300	0,00	1,16	2,3	4.711.300	46,00	0,31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	750	519.072.000	0	500.000	122.852.000	15	500.000							15	500.000	0,00	0,41	15	1.000.000	2,00	0,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok	75	307.091.000	0	500.000	72.566.000	15	500.000							15	500.000	0,00	0,69	15	1.000.000	20,00	0,33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Dokumen	75	309.561.000	0	500.000	73.205.500	3	500.000							3	500.000	0,00	0,68	3	1.000.000	4,00	0,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata capaian kinerja (%)							255.049.401.589		13.901.672.239	51.519.484.644		3.360.171.273							0,00	3.360.171.273	0,00	6,52		17.261.843.512	74,98	6,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; AA=1 (Skor >100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50)	2	2
2 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	25.34	15.75
3 Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6.03	5.69
4 Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5	69.74
5 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	4.61	4.55

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**95,89**	**263.623.226.956**	**91,07**	**45.076.734.285**	**52.624.189.198**	**84,56**								**84,56**		**0,00**	**0,00**	**87,815**	**45.076.734.285**	**91,58**	**17,10**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***679.018.350***	***100***	***247.899.960***	***134.445.000***											***0,00***	***50***	***247.899.960***	***50,00***	***36,51***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	315.240.900	4	19.765.800	54.000.000											0,00	4	19.765.800	100,00	6,27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Perencanaan perangkat daerah	dokumen	0		4														4		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	27.356.150	2	4.342.950	5.445.000											0,00	2	4.342.950	100,00	15,88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Dokumen DPA dan DPPA	dokumen	0		2														2		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	336.421.300	22	223.791.210	75.000.000											0,00	22	223.791.210	100,00	66,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	0		22														22		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Publikasi	Paket	0		1														1		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah***	***%***	***100***	***228.695.389.255***	***100***	***40.521.620.814***	***45.869.385.819***												***0,00***	***50***	***40.521.620.814***	***50,00***	***17,72***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	369	227.945.683.455	369	40.410.071.123	45.719.225.819												0,00	369	40.410.071.123	100,00	17,73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	578.356.000	1	91.430.000	114.160.000												0,00	1	91.430.000	100,00	15,81	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	19.949.800	2	2.324.696	4.000.000												0,00	2	2.324.696	100,00	11,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	151.400.000	14	17.794.995	32.000.000												0,00	14	17.794.995	100,00	11,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***440.745.700***	***100***	***67.800.000***	***82.038.000***												***0,00***	***50***	***67.800.000***	***50,00***	***15,38***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	440.745.700	1	67.800.000	82.038.000												0,00	1	67.800.000	100,00	15,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***5.630.445.934***	***100***	***321.445.219***	***1.250.660.500***												***0,00***	***50***	***321.445.219***	***50,00***	***5,71***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	303.557.200	1	22.520.115	57.432.000												0,00	1	22.520.115	100,00	7,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	764.527.900	1	49.212.229	152.527.000												0,00	1	49.212.229	100,00	6,44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	774.004.600	1	36.975.071	174.063.000												0,00	1	36.975.071	100,00	4,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	511.094.400	1	41.751.476	104.863.000												0,00	1	41.751.476	100,00	8,17	DINAS LINGKUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	58.311.700	1	6.204.000	11.749.500											0,00	1	6.204.000	100,00	10,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3.218.950.134	1	164.782.328	750.026.000											0,00	1	164.782.328	100,00	5,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***2.549.876.680***			***320.106.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	1.703.313.580			167.660.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	846.563.100			152.446.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***15.491.397.810***	***100***	***3.074.500.704***	***2.837.973.999***											***0,00***	***50***	***3.074.500.704***	***50,00***	***19,85***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	32.539.000	1	1.934.000	6.320.000											0,00	1	1.934.000	100,00	5,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4.657.779.500	1	831.942.288	818.084.200											0,00	1	831.942.288	100,00	17,86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10.801.079.310	1	2.240.624.416	2.013.569.799											0,00	1	2.240.624.416	100,00	20,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***10.136.353.227***	***100***	***843.467.588***	***2.129.579.880***											***0,00***	***50***	***843.467.588***	***50,00***	***8,32***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	105.152.600	1	14.935.000	21.050.000											0,00	1	14.935.000	100,00	14,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	259	4.845.939.968	99	354.153.379	1.054.426.680											0,00	99	354.153.379	38,22	7,31	DINAS LINGKUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	255	1.722.213.580	156	168.144.910		359.103.200												0,00	156	168.144.910	61,18	9,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	3.463.047.079	2	306.234.299		695.000.000												0,00	2	306.234.299	50,00	8,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		0.00.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**95,69**		**95,69**														**nan**	**47,845**		**50,00**	**0,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
2	**Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**%**	**0**	**867.268.400**	**80**	**28.298.725**			**80**								**80**		**0,00**	**nan**	**80**	**28.298.725**	**0,00**	**3,26**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.02.1.01	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi***	***Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH***	***%***	***100***	***388.279.700***	***0***														***nan***	***0***			***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	388.279.700	1			0											0,00	1		0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.02.1.02	***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi***	***Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun***	***%***	***100***	***478.988.700***	***0***	***28.298.725***													***nan***	***0***	***28.298.725***		***5,91***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	0	30.261.200				0											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	448.727.500	4	28.298.725		0											0,00	4	28.298.725	400,00	6,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani**	**%**	**5**	**16.570.976.180**	**2,24**	**1.062.630.316**		**2.713.548.200**	**2,24**								**2,24**		**0,00**	**0,00**	**2,24**	**1.062.630.316**	**44,80**	**6,41**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
				Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	**Parameter**	**24.370**		**18.313**				**4.261**								**4.261**		**0,00**		**22.574**		**92,63**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301		167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.11.03.1.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup***	***Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	***%***	***100***	***14.168.068.280***	***0***	***1.007.917.116***	***2.237.304.000***											***0,00***		***0***	***1.007.917.116***		***7,11***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.206.718.900	3	219.356.580	261.196.000											0,00		3	219.356.580	75,00	18,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	625.529.480	3	189.986.050	133.308.000											0,00		3	189.986.050	150,00	30,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	12.335.819.900	2	598.574.486	1.842.800.000											0,00		2	598.574.486	100,00	4,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.02	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	***Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan***	***%***	***100***	***2.402.907.900***	***50***	***54.713.200***	***476.244.200***											***0,00***		***25***	***54.713.200***	***25,00***	***2,28***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	50	2.402.907.900	50	54.713.200	476.244.200											0,00		50	54.713.200	100,00	2,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi**	**%**	**100**	**345.075.500**	**100**	**10.860.000**	**94.853.000**	**25**								**25**		**0,00**	**0,00**	**62,5**	**10.860.000**	**62,50**	**3,15**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.05.1.01	***Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik***	***%***	***100***	***345.075.500***	***0***	***10.860.000***	***94.853.000***											***0,00***		***0***	***10.860.000***		***3,15***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	345.075.500	1	10.860.000	94.853.000											0,00		1	10.860.000	100,00	3,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi**	**%**	**85**	**1.716.902.200**	**75,68**	**98.272.785**	**355.100.000**	**81,62**								**81,62**		**0,00**	**0,00**	**78,65**	**98.272.785**	**92,53**	**5,72**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.06.1.01	***Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	***Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***1.716.902.200***	***0***	***98.272.785***	***355.100.000***											***0,00***	***0***	***98.272.785***		***5,72***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	578.434.000	1	85.156.785	97.500.000											0,00	1	85.156.785	100,00	14,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	154	370.425.700	32	13.116.000	88.000.000											0,00	32	13.116.000	20,78	3,54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	768.042.500			169.600.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya**	**%**	**100**	**764.964.500**	**34**		**130.622.500**	**34**								**34**		**0,00**	**0,00**	**34**		**34,00**	**0,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.08.1.01	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi***	***Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat***	***Entitas***	***250***	***764.964.500***	***85***		***130.622.500***											***0,00***	***85***		***34,00***	***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	60	764.964.500	45		130.622.500											0,00	45		75,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional**	**%**	**100**	**830.234.300**	**53,78**	**99.951.735**	**140.680.000**	**53,78**								**53,78**		**0,00**	**0,00**	**53,78**	**99.951.735**	**53,78**	**12,04**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.11.09.1.01	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***830.234.300***	***0***	***99.951.735***	***140.680.000***												***0,00***	***0***	***99.951.735***		***12,04***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	25	830.234.300	30	99.951.735	140.680.000												0,00	30	99.951.735	120,00	12,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)**	**%**	**100**	**431.227.800**	**100**		**77.000.000**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**100**		**100,00**	**0,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.10.1.01	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi***	***Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup***	***%***	***100***	***431.227.800***			***77.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Dokumen	1	431.227.800			77.000.000												0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional**	**%**	**100**	**246.941.415.292**	**100**	**6.808.404.873**	**40.258.716.882**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**100**	**6.808.404.873**	**100,00**	**2,76**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.11.11.1.01	***Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional***	***Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional***	***%***	***100***	***246.941.415.292***	***100***	***6.808.404.873***	***40.258.716.882***												***0,00***	***50***	***6.808.404.873***	***50,00***	***2,76***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	4	213.502.250			66.901.250												0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	600	164.792.947.000	0		27.500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	13	76.645.243.800	10	6.157.273.042	12.000.000.000												0,00	10	6.157.273.042	76,92	8,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	600	2.270.236.142	350	82.018.429	491.815.632												0,00	350	82.018.429	58,33	3,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	15	3.019.486.100	7	569.113.402	200.000.000											0,00	7	569.113.402	46,67	18,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**Terwujudnya pengelolaan hutan lestari**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis**	**ha**	**0**		**10**													**nan**	**10**		**0,00**	**0,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta**	**%**	**0**	**1.146.995.000**	**85**	**117.354.750**	**500.000.000**	**85**								**85**		**0,00**	**0,00**	**85**	**117.354.750**	**0,00**	**10,23**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.10.11.5.01	***Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan***	***%***	***100***	***1.146.995.000***	***0***	***117.354.750***	***500.000.000***											***0,00***	***0***	***117.354.750***		***10,23***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	6	1.146.995.000	1	117.354.750	500.000.000											0,00	1	117.354.750	16,67	10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta**	**%**	**30**	**29.146.705.000**	**0,57**	**785.282.968**	**7.943.200.000**	**0,57**								**0,57**		**0,00**	**0,00**	**0,57**	**785.282.968**	**1,90**	**2,69**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		2.22.08.5.01	***Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman***	***Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)***	***%***	***1***	***2.146.500.000***	***1***		***600.000.000***											***0,00***	***0,5***		***50,00***	***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	1	2.146.500.000	1		600.000.000											0,00	1		100,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaan***	***%***	***100***	***4.370.000.000***			***3.970.000.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	15	4.370.000.000			3.970.000.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***%***	***100***	***2.830.955.000***	***100***	***642.876.838***	***173.200.000***												***0,00***	***50***	***642.876.838***	***50,00***	***22,71***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	%	2	0			0											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek	2	2.830.955.000	2	642.876.838	173.200.000											0,00	2	642.876.838	100,00	22,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau***	***Desa/Kelurahan***	***10***	***19.799.250.000***	***4***	***142.406.130***	***3.200.000.000***												***0,00***	***4***	***142.406.130***	***40,00***	***0,72***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1	19.799.250.000	1	142.406.130	3.200.000.000											0,00	1	142.406.130	100,00	0,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan**	**%**	**82,375**	**116.311.129.965**	**81,025**	**5.002.386.785**	**60.766.205.432**	**81,025**								**81,025**		**0,00**	**0,00**	**81,025**	**5.002.386.785**	**98,36**	**4,30**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	**%**	**5**		**8,32**			**5**								**5**		**0,00**		**6,66**		**133,20**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	**%**	**100**		**85**			**85**								**85**		**0,00**		**85**		**85,00**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	**%**	**100**		**49,02**			**50,89**								**50,89**		**0,00**		**49,955**		**49,96**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		3.28.03.1.02	***Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)***	***Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH***	***Dokumen***	***6***	***2.133.442.931***	***3***	***184.710.376***	***253.862.500***												***0,00***	***3***	***184.710.376***	***50,00***	***8,66***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	2.133.442.931	1	184.710.376	253.862.500											0,00	1	184.710.376	14,29	8,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.03	***Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung***	***Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan***	***Ha***	***15,581***	***91.979.840.651***	***15.581***	***3.127.404.449***	***55.671.569.792***												***0,00***	***15.581***	***3.127.404.449***	***100.000,00***	***3,40***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	274.850.800	1	3.105.443.866	65.000.000											0,00	1	3.105.443.866	100,00	1.129,87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	43	335.309.600	36	16.936.903	70.000.000											0,00	36	16.936.903	83,72	5,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	8	132.906.700	9	5.023.680	25.000.000											0,00	9	5.023.680	112,50	3,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Laporan Pemanfaatan hutan di KPH	Laporan	1	80.467.550.426			53.178.319.792											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/ atau Jasa Lingkungan	Laporan	1	10.769.223.125			2.333.250.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.04	***Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara***	***Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan***	***Ha***	***1.279***	***10.795.120.276***	***226***	***621.897.256***	***2.500.620.000***											***0,00***	***226***	***621.897.256***	***17,67***	***5,76***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	3	952.682.200	1	19.931.306	216.500.000											0,00	1	19.931.306	33,33	2,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Fasilitasi Forum DAS	dokumen	0		1														1		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Dokumen RTnRL 2025	dokumen	0		1														1		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	250	2.368.195.200	200	102.680.000	524.070.000											0,00	200	102.680.000	80,00	4,34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Pembangunan KPR	Unit	0																0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	125	2.498.394.000	6	421.945.750	580.000.000											0,00	6	421.945.750	4,80	16,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	7	688.000.000	5	77.340.200	158.000.000											0,00						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat	Batang	400.000	3.095.432.326			735.050.000											0,00						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	4	1.192.416.550			287.000.000											0,00						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.05	***Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi***	***Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi***	***%***	***97***	***9.736.775.818***	***92,42***	***794.689.906***	***1.971.887.550***											***0,00***		***46,21***	***794.689.906***	***47,64***	***8,16***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	7.262.217.818	15.581	445.988.930	1.426.887.550											0,00		15.581	445.988.930	100,00	6,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	2.274.769.200	15.581	331.728.076	510.000.000											0,00		15.581	331.728.076	100,00	14,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	199.788.800	1	16.972.900	35.000.000											0,00		1	16.972.900	100,00	8,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.07	***Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun***	***Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi***	***Unit Managemen***	***28***	***1.092.007.286***	***28***	***74.849.442***	***244.260.000***											***0,00***		***28***	***74.849.442***	***100,00***	***6,85***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Managemen	28	290.000.000	18	44.584.794	70.000.000											0,00		18	44.584.794	64,29	15,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	802.007.286	1	30.264.648	174.260.000											0,00		1	30.264.648	100,00	3,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.09	***Perbenihan Tanaman Hutan***	***Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit***	***%***	***100***	***573.943.003***	***100***	***198.835.356***	***124.005.590***											***0,00***		***50***	***198.835.356***	***50,00***	***34,64***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	113.097.700	1	17.532.270	22.740.000											0,00		1	17.532.270	100,00	15,50	DINAS LINGKUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	62.653.800	1	9.089.638	12.680.000											0,00	1	9.089.638	100,00	14,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	1	74.268.400	1	11.993.742	14.750.000											0,00	1	11.993.742	100,00	16,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	80.485.800	1	15.898.989	20.500.000											0,00	1	15.898.989	100,00	19,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	5	243.437.303	5	144.320.717	53.335.590											0,00	5	144.320.717	100,00	59,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi**	**Indeks**	**69**	**5.741.450.400**	**66**	**148.794.553**	**1.344.100.000**	**66**								**66**		**0,00**	**0,00**	**132**	**148.794.553**	**191,30**	**2,59**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		3.28.04.1.01	***Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi***	***Luas hutan konservasi yang dikelola***	***Ha***	***634,1***	***3.390.420.900***	***634,1***	***119.292.753***	***812.100.000***											***0,00***	***634,1***	***119.292.753***	***100,00***	***3,52***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan	1	979.928.000			172.600.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	6	1.509.696.100	6	105.109.385	359.000.000											0,00	6	105.109.385	100,00	6,96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	4	900.796.800	5	14.183.368	280.500.000											0,00	5	14.183.368	125,00	1,57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.04.1.03	***Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam***	***Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola***	***Kawasan***	***3***	***2.351.029.500***	***3***	***29.501.800***	***532.000.000***											***0,00***	***3***	***29.501.800***	***100,00***	***1,25***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	3	794.725.700	1	29.501.800	170.000.000											0,00	1	29.501.800	33,33	3,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem	Ha	10	1.556.303.800			362.000.000											0,00	0			0,00	DINAS LINGKUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301	167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Penting yang Dikelola																								HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)**	**%**	**23**	**2.110.767.000**	**20,58**	**495.123.526**		**468.799.100**	**20,58**								**20,58**		**0,00**	**0,00**	**20,58**	**495.123.526**	**89,48**	**23,46**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
		3.28.05.1.01	***Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan***	***Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat***	***Kelompok***	***25***	***2.110.767.000***	***10***	***495.123.526***		***468.799.100***												***0,00***	***10***	***495.123.526***	***40,00***	***23,46***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN***
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	57	1.135.193.400	40	44.616.852		260.469.700												0,00	40	44.616.852	70,18	3,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	45	975.573.600	10	450.506.674		208.329.400												0,00	10	450.506.674	22,22	46,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							686.548.338.493		59.734.095.301		167.417.014.312									0,00		0,00	0,00		59.734.095.301	799,48	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Intensitas hujan yang stabil mendukung keberhasilan kegiatan penanaman 2. Semakin kuatnya jejaring dan kolaborasi khususnya dalam implementasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota. Semakin banyak stakeholder yang bergabung untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti yang terbaru adalah pencanangan KKN Tematik Pengelolaan Sampah																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Tindak Lanjut Inpres No.1 Tahun 2025, Sekretaris Daerah mengeluarkan SE Sekda No. B.900.1.12/510/SET tentang Efisiensi Belanja Daerah TA 2025 sehingga beberapa aktivitas harus ditunda/diefisiensi. Kegiatan Dana Keistimewaan sampai dengan Februari juga tidak dapat dilaksanakan sesuai ROPK Keuangan karena terdapat penundaan sesuai arahan dari Paniradya Pati Kaistimewan melalui Surat No.S/100.1.5.1./1673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. DLHK DIY melakukan inventarisasi kegiatan dan melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi 2. Mengefektifkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung terhadap ketercapaian target kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	3
2 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94	97.24
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas bahan rumusan kebijakan, kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat**	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren**	**%**	**0**					**41.777.750**	**50**								**50**		**0,00**	**0,00**	**25**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.13.04.1.01	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***																									
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa								41.777.750												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan**	**Lembaga**	**0**					**3.808.460.550**	**3**								**3**		**0,00**	**0,00**	**3**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												PENCATATAN SIPIL
				Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	**Kelurahan**	**0**		**0**				**6**								**6**		**0,00**		**6**		**0,00**		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		4.01.04.1.02	***Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar***																									
		4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial								162.864.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		4.01.04.1.03	***Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar***																									
		4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja								3.645.596.550												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Pemerintah Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik**	**%**	**0**					**2.770.336.680**	**1,28**								**1,28**		**0,00**	**0,00**	**0,64**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		4.01.10.5.01	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan***																									
		4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan								2.770.336.680												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA)**	**%**	**0**					**56.534.800**	**94,3**								**94,3**		**0,00**	**0,00**	**47,15**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.02.1.01	***Pelayanan Pendaftaran Kependudukan***																									
		2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi								24.800.800												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.1.02	***Penyelenggaraan Pendaftaran***																									
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kependudukan																									
		2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk								11.520.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk								20.214.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan akta kematian) bagi masyarakat DIY**	**%**	**0**					**61.315.700**	**99,72**	**1.300.000**							**99,72**	**1.300.000**	**0,00**	**2,12**	**49,86**	**1.300.000**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.03.1.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***																									
		2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota								36.455.700		1.300.000								1.300.000		3,57		1.300.000		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.1.03	***Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***																									
		2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil								24.860.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN,
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase akumulasi instansi/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan**	**%**	**0**					**64.385.900**	**76**								**76**		**0,00**	**0,00**	**38**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.04.1.02	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi***																									
		2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								60.025.500												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								4.360.400												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar**	**%**	**0**					**50.094.500**												**0,00**	**0**			**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.12.05.1.01	***Penyediaan Profil Kependudukan***																									
		2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain								50.094.500												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	**Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI program penunjang rusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**0**				**10.899.311.037**		**86**								**86**		**0,00**	**0,00**	**86**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.13.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***																									
		2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								18.040.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								8.428.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***																									
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								8.231.795.148												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								10.465.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								9.561.400												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***																									
		2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								15.354.600												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***																									
		2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								7.404.200												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								58.994.200												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								23.531.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								5.424.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								500.591.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***																									
		2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								615.505.889												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								97.330.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***																									
		2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								352.785.400												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								479.904.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***																									
		2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								36.232.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								211.548.400												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								16.750.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								88.570.800												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								111.096.000												0,00				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)											17.752.216.917		1.300.000							0,00	1.300.000	0,00	0,01		1.300.000	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - SDM yang tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat - Sarana dan prasarana, dan media komunikasi dan informasi yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			- Penyesusaian dengan regulasi keuangan yang baru - Belum ada juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			- Koordinasi dan komunikasi serta komunikasi yang terjalin baik dengan Stake holder terkait. - Persiapan sembari menunggu juknis Epdeskel dari pusat																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

	Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1	1. Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	59.19	48.1
2	2. Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	61.29	35.36
3	3. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum**	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY**	**%**	**64,68**	**883.220.684.875**	**56,65**	**80.680.562.346**	**288.123.337.777**	**45,2**								**45,2**		**0,00**	**0,00**	**50,925**	**80.680.562.346**	**78,73**	**9,13**	**DINAS PERHUBUNGAN**
				2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	**%**	**48,06**		**41,49**			**39,5**								**39,5**		**0,00**		**40,495**		**84,26**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	**%**	**66,77**		**36,39**			**38,59**								**38,59**		**0,00**		**37,49**		**56,15**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	**%**	**86,49**		**67,57**			**3,92**								**3,92**		**0,00**		**35,745**		**41,33**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	**%**	**90,35**		**78,07**			**4,12**								**4,12**		**0,00**		**41,095**		**45,48**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	**%**	**100**		**22,25**			**24,07**								**24,07**		**0,00**		**23,16**		**23,16**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				7. Persentase Ketertiban LLAJ	**%**	**85,98**		**74,49**			**70,43**								**70,43**		**0,00**		**72,46**		**84,28**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	**%**	**70**		**10**			**10**								**10**		**0,00**		**10**		**14,29**		**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.15.02.1.01	***Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi***	***Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY***	***%***	***100***	***5.885.977.800***	***100***	***639.812.007***	***1.100.000.000***											***0,00***	***50***	***639.812.007***	***50,00***	***10,87***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	36	5.885.977.800	7	639.812.007	1.100.000.000											0,00	7	639.812.007	19,44	10,87	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi***	***Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia***	***%***	***100***	***60.974.982.800***	***100***	***8.004.870.700***	***14.133.869.700***											***0,00***	***50***	***8.004.870.700***	***50,00***	***13,13***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	89	455.000.000			50.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6.289	33.865.850.000	65	5.927.704.968	7.975.250.000											0,00	65	5.927.704.968	1,03	17,50	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	452	2.349.598.800	113	545.663.850	582.399.700											0,00	113	545.663.850	25,00	23,22	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092	382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3.946	24.304.534.000	0	1.531.501.882		5.526.220.000												0,00	0	1.531.501.882		6,30	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03	***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B***	***Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B***	***%***	***100***	***99.423.750.000***	***100***			***94.550.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***DINAS PERHUBUNGAN***
				Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (TKP)	***%***	***100***		***100***														***50***		***50,00***		***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	11	2.723.750.000				700.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	93.000.000.000				93.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	28	2.600.000.000				550.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	23	1.100.000.000				300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi***	***Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY***	***%***	***100***	***48.628.344.920***	***100***	***420.746.904***		***12.912.940.409***												***0,00***	***50***	***420.746.904***	***50,00***	***0,87***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	80	168.000.000	20	50.120.616		42.000.000												0,00	20	50.120.616	25,00	29,83	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1.104	37.571.941.320				10.235.901.109												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	24	5.579.903.000	1	46.003.164		1.348.068.000												0,00	1	46.003.164	4,17	0,82	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	28	4.789.500.600	3	299.469.603		1.145.971.300												0,00	3	299.469.603	10,71	6,25	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	53	519.000.000	1	25.153.521		141.000.000												0,00	1	25.153.521	1,89	4,85	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.06	***Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi***	***Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi***	***%***	***100***	***145.000.000***	***100***			***30.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***DINAS PERHUBUNGAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	12	145.000.000				30.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.07	***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	***Pelaksanaan Audit Standarisasi Kendaraan dan Pengemudi Untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang***	***%***	***100***	***1.230.000.000***				***650.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	3	770.000.000				540.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	4	460.000.000				110.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.08	***Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek***	***%***	***100***	***616.041.020.196***	***100***	***71.493.332.735***		***131.840.451.979***												***0,00***	***50***	***71.493.332.735***	***50,00***	***11,61***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	651	607.607.886.136	95	70.226.492.363		130.120.451.979												0,00	95	70.226.492.363	14,59	11,56	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	234	8.433.134.060	5	1.266.840.372		1.720.000.000												0,00	5	1.266.840.372	2,14	15,02	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.09	***Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan***	***%***	***100***	***50.446.609.159***	***100***	***11.000.000***		***32.831.075.689***												***0,00***	***50***	***11.000.000***	***50,00***	***0,02***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	48.271.754.359				32.287.361.989												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan	Dokumen	16	2.174.854.800	1	11.000.000		543.713.700												0,00	1	11.000.000	6,25	0,51	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi																								
		2.15.02.1.10	***Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi***	***%***	***100***	***445.000.000***	***100***	***110.800.000***		***75.000.000***												***0,00***	***50***	***110.800.000***	***50,00***	***24,90***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	300.000.000	1	99.800.000		0												0,00	1	99.800.000	33,33	33,27	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	145.000.000	1	11.000.000		75.000.000												0,00	1	11.000.000	33,33	7,59	DINAS PERHUBUNGAN
2	**2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis**	**%**	**59**	**240.848.643.285**	**20,5**	**11.089.663.572**		**66.038.160.833**	**23**	**7.488.713**							**23**	**7.488.713**	**0,00**	**0,01**	**21,75**	**11.097.152.285**	**36,86**	**4,61**	**DINAS PERHUBUNGAN**
				2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	**%**	**54,63**		**13,89**				**13,89**								**13,89**		**0,00**		**13,89**		**25,43**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	**%**	**95**		**33,25**				**33,85**								**33,85**		**0,00**		**33,55**		**35,32**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	**%**	**100**		**100**				**25**								**25**		**0,00**		**62,5**		**62,50**		**DINAS PERHUBUNGAN**
				5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	**%**	**74,73**		**67,62**				**44,93**								**44,93**		**0,00**		**56,275**		**75,30**		**DINAS PERHUBUNGAN**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***%***	***100***	***240.848.643.285***	***100***	***11.089.663.572***		***66.038.160.833***		***7.488.713***								***7.488.713***		***0,01***	***50***	***11.097.152.285***	***50,00***	***4,61***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	109	137.156.068.285	18	7.127.907.845		34.314.490.833		7.488.713								7.488.713		0,02	18	7.135.396.558	16,51	5,20	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	24	25.812.200.000	1	966.930.630		6.756.050.000												0,00	1	966.930.630	4,17	3,75	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	umlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	10.164.480.000	1	135.231.995		2.910.000.000												0,00	1	135.231.995	10,00	1,33	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja Raja Mataram Imogiri	Dokumen	5	4.103.800.000	1	511.505.788		1.000.000.000												0,00	1	511.505.788	20,00	12,46	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	7	4.831.620.000				1.981.620.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Baru	Dokumen	3	2.500.000.000	1	211.540.970		2.220.000.000												0,00	1	211.540.970	33,33	8,46	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	16	16.822.275.000	1	966.961.078		4.295.000.000												0,00	1	966.961.078	6,25	5,75	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gede	Dokumen	3	1.340.000.000				140.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Samas - Parangtritis	Dokumen	9	9.000.000.000	1	135.231.995		3.525.000.000												0,00	1	135.231.995	11,11	1,50	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen	3	1.200.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	7	5.977.200.000	3	334.826.877		1.800.000.000												0,00	3	334.826.877	42,86	5,60	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	5.200.000.000				1.800.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	4	1.720.000.000	2	211.265.970		320.000.000												0,00	2	211.265.970	50,00	12,28	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	5	3.525.000.000				1.250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	1	50.000.000				50.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo	Dokumen	1	3.396.000.000				3.396.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	2	5.400.000.000	6	277.094.454		0												0,00	6	277.094.454	300,00	5,13	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713								0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Dokumen	7	2.650.000.000	1	211.165.970		280.000.000													1	211.165.970	14,29	7,97	DINAS PERHUBUNGAN
3	**3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**94,69**	**131.945.532.816**	**92,87**	**19.499.572.174**		**28.832.698.354**	**86,35**								**86,35**		**0,00**	**0,00**	**179,22**	**19.499.572.174**	**189,27**	**14,78**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***0***	***571.000.000***	***100***	***39.753.541***		***143.500.000***													***0,00***	***50***	***39.753.541***	***0,00***	***6,96***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	265.000.000	4	19.951.314		66.000.000													4	19.951.314	25,00	7,53	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	16	82.000.000	4	9.925.365		21.500.000													4	9.925.365	25,00	12,10	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	224.000.000	3	9.876.862		56.000.000													3	9.876.862	25,00	4,41	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***0***	***77.746.491.585***	***100***	***13.553.732.187***		***15.696.489.428***													***0,00***	***50***	***13.553.732.187***	***0,00***	***17,43***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	122	76.852.464.785	112	13.392.603.077		15.477.496.578													112	13.392.603.077	91,80	17,43	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	655.885.000	2	128.448.168		163.052.000													2	128.448.168	12,50	19,58	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	74.461.475	2	10.884.437		17.765.825													2	10.884.437	16,67	14,62	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	140	163.680.325	17	21.796.505		38.175.025													17	21.796.505	12,14	13,32	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***0***	***33.992.000***	***100***	***4.885.852***		***7.731.000***													***0,00***	***50***	***4.885.852***	***0,00***	***14,37***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	29	33.992.000	5	4.885.852		7.731.000													5	4.885.852	17,24	14,37	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran***	***%***	***0***	***6.194.170.340***	***100***	***376.425.598***		***1.354.265.600***													***0,00***	***50***	***376.425.598***	***0,00***	***6,08***	***DINAS PERHUBUNGAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	46	185.755.000	7	22.684.044		42.800.000												0,00	7	22.684.044	15,22	12,21	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	236	1.211.967.700	17	96.819.891		237.776.000												0,00	17	96.819.891	7,20	7,99	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	154.195.200	4	21.171.293		37.734.400												0,00	4	21.171.293	6,67	13,73	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	76	588.569.200	10	19.243.299		137.132.800												0,00	10	19.243.299	13,16	3,27	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17	37.582.524	1	1.644.000		8.205.400												0,00	1	1.644.000	5,88	4,37	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	123	2.346.100.716	2	214.863.071		485.617.000												0,00	2	214.863.071	1,63	9,16	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48	400.000.000				100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	9	1.270.000.000				305.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***0***	***3.088.515.000***				***2.422.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.400.000.000				2.400.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9	166.000.000				22.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	68.750.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	453.765.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran***	***%***	***0***	***29.539.175.604***	***100***	***4.114.196.445***		***5.930.769.576***												***0,00***	***50***	***4.114.196.445***	***0,00***	***13,93***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	39.918.360	1	10.000.000		9.356.000												0,00	1	10.000.000	12,50	25,05	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	240	4.528.812.500	25	629.875.925		891.450.000												0,00	25	629.875.925	10,42	13,91	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	42	1.152.448.060	1	133.354.910		246.874.620													0,00	1	133.354.910	2,38	11,57	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	240	23.817.996.684	24	3.340.965.610		4.783.088.956													0,00	24	3.340.965.610	10,00	14,03	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***0***	***14.772.188.287***	***100***	***1.410.578.551***		***3.277.942.750***													***0,00***	***50***	***1.410.578.551***	***0,00***	***9,55***	***DINAS PERHUBUNGAN***
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	3.743.220.000	1	50.385.000		935.805.000													0,00	1	50.385.000	3,13	1,35	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	338	4.154.547.987	29	482.852.816		813.767.750													0,00	29	482.852.816	8,58	11,62	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	59.920.500				13.800.000													0,00	0			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	3.191.399.800	7	256.811.376		721.950.000													0,00	7	256.811.376	6,86	8,05	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	3.623.100.000	1	620.529.359		792.620.000													0,00	1	620.529.359	2,86	17,13	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.256.014.860.976		111.269.798.092		382.994.196.964		7.488.713							0,00	7.488.713	0,00	0,00		111.277.286.805	23,01	8,86	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	35.14	40.54
2 Indeks Kematangan Manajemen SPBE (Assesmen Mandiri)	1.97	4.82
3 Kategori RB Perangkat Daerah	94.96	99.48

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang terespon tepat waktu**	**persen**	**88**	**32.445.098.800**	**86,24**	**2.887.211.008**		**6.883.000.000**	**86,15**	**76.005.303**							**86,15**	**76.005.303**	**0,00**	**1,10**	**86,195**	**2.963.216.311**	**97,95**	**9,13**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		2.16.02.1.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi***	***%***	***100***	***32.445.098.800***		***2.887.211.008***		***6.883.000.000***		***76.005.303***								***76.005.303***		***1,10***	***0***	***2.963.216.311***		***9,13***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	3.237.121.600	1	368.909.669		695.000.000												0,00	1	368.909.669	100,00	11,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	3.500.000.000				850.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	5.031.906.000	1	1.002.851.853		783.000.000		76.005.303								76.005.303		9,71	1	1.078.857.156	100,00	21,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	2.839.000.000				680.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	7.561.208.000	1	812.706.486		1.600.000.000												0,00	1	812.706.486	100,00	10,75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Dokumen	3.180	3.745.000.000				895.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	6.530.863.200	1	702.743.000		1.380.000.000												0,00	1	702.743.000	100,00	10,76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri**	**indeks**	**2**	**33.905.333.050**	**5**	**48.319.547**		**9.151.694.000**	**5**								**5**		**0,00**	**0,00**	**10**	**48.319.547**	**500,00**	**0,14**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
				Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri	**indeks**	**1,38**		**4,33**				**4,33**								**4,33**		**0,00**		**8,66**		**627,54**		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		2.16.03.1.01	***Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***13.660.000.000***		***23.510.938***		***3.325.000.000***												***0,00***	***0***	***23.510.938***		***0,17***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	269	13.660.000.000	269	23.510.938		3.325.000.000												0,00	269	23.510.938	100,00	0,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02	***Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***20.245.333.050***		***24.808.609***		***5.826.694.000***												***0,00***	***0***	***24.808.609***		***0,12***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	319.340.000				76.500.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	3.034.553.050				704.754.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	14.289.920.000				4.432.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	715.880.000				172.800.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1.885.640.000	1	24.808.609		440.640.000												0,00	1	24.808.609	100,00	1,32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY**	**skor**	**633**	**33.011.302.800**	**643**	**24.797.460**		**9.039.880.000**	**643**	**224.775**							**643**	**224.775**	**0,00**	**0,00**	**1.286**	**25.022.235**	**203,16**	**0,08**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		2.21.02.1.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi***	***Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***17.864.982.800***		***24.797.460***		***5.517.880.000***		***224.775***								***224.775***		***0,00***	***0***	***25.022.235***		***0,14***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	17.864.982.800	1	24.797.460		5.517.880.000	0	224.775								224.775		0,00	1	25.022.235	100,00	0,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.1.02	***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi***	***%***	***100***	***15.146.320.000***				***3.522.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	37	15.146.320.000				3.522.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri**	**indeks**	**2,55**	**209.815.800.000**	**5**	**33.441.040.372**		**47.650.000.000**	**5**	**26.505.000**							**5**	**26.505.000**	**0,00**	**0,06**	**10**	**33.467.545.372**	**392,16**	**15,95**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***%***	***100***	***209.815.800.000***		***33.441.040.372***		***47.650.000.000***		***26.505.000***								***26.505.000***		***0,06***	***0***	***33.467.545.372***		***15,95***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	1	209.815.800.000		33.441.040.372		47.650.000.000		26.505.000								26.505.000		0,06	0	33.467.545.372		15,95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**84,5**	**105.331.908.091**	**91,99**	**10.594.814.790**		**28.345.131.201**	**87,2**	**330.392.449**							**87,2**	**330.392.449**	**0,00**	**1,17**	**179,19**	**10.925.207.239**	**212,06**	**10,37**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***%***	***100***	***336.000.000***		***28.133.673***		***76.000.000***												***0,00***	***0***	***28.133.673***		***8,37***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	120.000.000	9	19.186.818		25.000.000	2								2		0,00	0,00	11	19.186.818	366,67	15,99	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	128.000.000				30.000.000	1								1		0,00	0,00	1		25,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	88.000.000	3	8.946.855		21.000.000	0											0,00	3	8.946.855	100,00	10,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD***	***%***	***100***	***73.633.832.861***		***9.205.368.164***		***14.522.186.201***		***302.479.351***								***302.479.351***		***2,08***	***0***	***9.507.847.515***		***12,91***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	73.179.676.238	75	9.162.889.817		14.413.613.000	76	302.179.351							76	302.179.351	0,00	2,10	151	9.465.069.168	201,33	12,93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	undefined	1	181.556.023				60.316.201												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	85.692.100	12	29.456.430		7.000.000	0											0,00	12	29.456.430	1.200,00	34,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.263.000	1	4.373.694		13.990.000	0	300.000								300.000		2,14	1	4.673.694	100,00	7,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	121.645.500	18	8.648.223		27.267.000	1								1		0,00	0,00	19	8.648.223	100,00	7,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***70.000.000***				***17.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	undefined	1	70.000.000				17.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	***%***	***100***	***270.000.000***				***65.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terkait teknologi informasi	undefined	75	270.000.000				65.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD***	***%***	***100***	***2.091.503.750***		***191.651.574***		***434.603.000***		***2.794.500***								***2.794.500***		***0,64***	***0***	***194.446.074***		***9,30***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.354.750	1	6.897.000		8.346.000	0											0,00	1	6.897.000	100,00	16,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	192.683.000	4	23.407.163		39.744.000	0											0,00	4	23.407.163	400,00	12,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	116.301.000	2	13.492.577		24.166.000	0											0,00	2	13.492.577	66,67	11,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	162.445.000	3	17.842.780		33.762.000	0	396.900								396.900		1,18	3	18.239.680	100,00	11,23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.577.720.000	12	130.012.054		328.585.000	0	2.397.600								2.397.600		0,73	12	132.409.654	1.200,00	8,39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya***	***%***	***100***	***15.503.040.378***		***38.827.202***		***11.612.966.821***												***0,00***	***0***	***38.827.202***		***0,25***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1.300.000.000				650.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.955.000.000				985.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.010.000.000	3	38.827.202		250.000.000												0,00	3	38.827.202	300,00	3,84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	undefined	1	9.699.000.000				9.600.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	539.040.378				127.966.821												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan																									DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor***	***%***	***100***	***11.427.479.802***		***835.082.577***		***1.210.637.179***		***19.784.838***								***19.784.838***		***1,63***	***0***	***854.867.415***		***7,48***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	33.808.000				8.452.000												0,00	0			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	8.093.310.600	12	234.165.217		554.894.000	0	19.484.838								19.484.838		3,51	12	253.650.055	1.200,00	3,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	3.300.361.202	12	600.917.360		647.291.179	1	300.000							1	300.000	0,00	0,05	13	601.217.360	650,00	18,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***	***%***	***100***	***2.000.051.300***		***295.751.600***		***406.738.000***		***5.333.760***								***5.333.760***		***1,31***	***0***	***301.085.360***		***15,05***	***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	120.869.300	1	21.856.000		25.000.000	1	1.403.300							1	1.403.300	0,00	5,61	2	23.259.300	200,00	19,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	276.127.000	1	39.919.700		55.966.000	0											0,00	1	39.919.700	100,00	14,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	720.908.000	16	119.074.900		142.759.000	1	3.930.460							1	3.930.460	0,00	2,75	17	123.005.360	106,25	17,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	882.147.000	1	114.901.000		183.013.000	0											0,00	1	114.901.000	100,00	13,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						414.509.442.741		46.996.183.177		101.069.705.201		433.127.527							0,00	433.127.527	0,00	0,43		47.429.310.704	148,39	11,44	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan 3. Adanya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 4. Adanya Pergub Nomor 67 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik 5. Adanya Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 6. Adanya Pergub nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Komitmen pimpinan dalam melakukan riview DIK Pemda DIY 8. Adaya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Banyaknya ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY 2. Belum memiliki satpras pengamanan yang belum memadai 3. Banyak aplikasi OPD yang dibangun belum menggunakan Konsep Secure System Development Life Cycle (SDLC) dalam meningkatkan kualitas software dalam aspek keamanannya 4. Belum adanya lembaga audit eksternal SPBE tersertifikasi 5. Pengelolaan aset TIK yang belum optimal																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemda DIY Tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Resiko SPBE Tahun 2025 3. Melakukan Audit aplikasi SPBE, Audit keamanan informasi SPBE dan Audit insfrastruktur SPBE																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:		Target	Realisasi
1	Jumlah koperasi modern	9	
2	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	0	
3	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya(pada tahun n)	1550	685
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	0	
5	Kategori RB Perangkat Daerah (1=AA, 2=A, 3=BB, 4=CC)	2	
6	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	8365	6829
7	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%)	0	
8	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	130	40

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya jumlah koperasi modern**	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah kea**	**Unit**	**0**	**112.417.364**	**16**	**8.000.000**		**22.000.000**	**16**							**16**		**0,00**	**0,00**	**32**	**8.000.000**	**0,00**	**7,12**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)	**%**	**0**																	**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.02.1.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***undefined***	***24***	***112.417.364***	***15***	***8.000.000***		***22.000.000***												***0,00***	***15***	***8.000.000***	***62,50***	***7,12***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	5	112.417.364	1	8.000.000		22.000.000												0,00	1	8.000.000	20,00	7,12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59		
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)**	**Koperasi**	**0**	**276.000.000**	**26**			**54.000.000**	**2**							**2**		**0,00**	**0,00**	**28**		**0,00**	**0,00**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	**%**	**0**																		**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.03.1.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi***	***undefined***	***13***	***276.000.000***	***8***			***54.000.000***												***0,00***	***8***		***61,54***	***0,00***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	3	166.000.000				32.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	60	110.000.000				22.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya**	**Koperasi**	**0**	**90.300.000**	**34**			**18.000.000**	**5**							**5**		**0,00**	**0,00**	**39**		**0,00**	**0,00**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya	**%**	**0**																		**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.04.1.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi***	***undefined***	***95***	***90.300.000***	***95***			***18.000.000***												***0,00***	***95***		***100,00***	***0,00***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																										
		2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	110	90.300.000				18.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM**	**%**	**0**	**18.137.130.200**	**100**	**774.120.640**		**3.600.000.000**												**0,00**	**50**	**774.120.640**	**0,00**	**4,27**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya	**KUMKM**	**0**																	**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.05.1.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah oabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi***	***undefined***	***725***	***8.843.125.200***	***725***	***774.120.640***		***1.750.000.000***												***0,00***	***725***	***774.120.640***	***100,00***	***8,75***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	630	8.843.125.200	250	774.120.640		1.750.000.000												0,00	250	774.120.640	39,68	8,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.05.1.02	***Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah peserta pendidikan dan latihan UMKM dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***undefined***	***1.100***	***9.294.005.000***				***1.850.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM	Orang	1.150	9.294.005.000				1.850.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam**	**Koperasi**	**0**	**2.070.000.000**	**88**	**244.316.000**		**455.000.000**	**88**								**88**		**0,00**	**0,00**	**176**	**244.316.000**	**0,00**	**11,80**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
				pelayanan dan usaha koperasi																										
				jumlah koperasi modern	**Koperasi**	**0**																		**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.06.1.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha***	***undefined***	***60***	***2.070.000.000***	***60***	***244.316.000***		***455.000.000***												***0,00***	***60***	***244.316.000***	***100,00***	***11,80***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Unit Usaha	22	920.000.000				225.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	3	1.150.000.000	3	244.316.000		230.000.000												0,00	3	244.316.000	100,00	21,24	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	**Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis**	**Sentra**	**0**	**30.000.000.000**	**1**	**1.163.461.359**		**6.500.000.000**												**0,00**	**1**	**1.163.461.359**	**0,00**	**3,88**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis***	***Dokumen***	***21***	***30.000.000.000***	***2***	***1.163.461.359***		***6.500.000.000***												***0,00***	***2***	***1.163.461.359***	***9,52***	***3,88***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	6.000.000.000	1	204.134.550		4.750.000.000												0,00	1	204.134.550	25,00	3,40	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Karst Gunung Sewu	Karst Gunung Sewu																								DAN USAHA KECIL MENENGAH
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	2	4.250.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	4	4.250.000.000				250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	5	6.500.000.000	4	959.326.809		500.000.000												0,00	4	959.326.809	80,00	14,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	3	4.500.000.000				500.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing**	**%**	**0**	**7.391.330.700**	**0,46**	**1.101.500.400**		**1.552.730.000**	**0,1**								**0,1**		**0,00**	**0,00**	**0,28**	**1.101.500.400**	**0,00**	**14,90**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	**UMKM**	**0**																	**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.08.1.01	***Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah***	***Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)***	***undefined***	***1.095***	***7.391.330.700***	***850***	***1.101.500.400***		***1.552.730.000***												***0,00***	***850***	***1.101.500.400***	***77,63***	***14,90***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.270	6.016.574.700	25	867.250.400		1.277.730.000												0,00	25	867.250.400	1,97	14,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	258	1.374.756.000	360	234.250.000		275.000.000												0,00	360	234.250.000	139,53	17,04	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor**	**0**	**53.062.374.240**	**91,21**	**11.944.688.906**	**10.547.999.888**	**79,55**	**750.158.547**								**79,55**	**750.158.547**	**0,00**	**7,11**	**170,76**	**12.694.847.453**	**0,00**	**23,92**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***403.515.300***	***100***	***19.264.170***	***81.000.000***													***0,00***	***50***	***19.264.170***	***50,00***	***4,77***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	276.406.300	1	6.764.670	55.000.000													0,00	1	6.764.670	5,00	2,45	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	65.730.000	1	6.499.800	13.000.000													0,00	1	6.499.800	5,00	9,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	61.379.000	1	5.999.700	13.000.000													0,00	1	5.999.700	6,67	9,77	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***38.312.200.840***	***100***	***7.225.654.891***	***7.662.240.188***		***750.158.547***									***750.158.547***		***9,79***	***50***	***7.975.813.438***	***50,00***	***20,82***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	37.824.400.940	53	7.152.794.891	7.564.880.188		750.158.547									750.158.547		9,92	53	7.902.953.438	94,64	20,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	346.800.000	1	69.360.000	69.360.000													0,00	1	69.360.000	20,00	20,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	55.999.900	1	1.500.000	11.000.000													0,00	1	1.500.000	20,00	2,68	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	85.000.000	13	2.000.000	17.000.000													0,00	13	2.000.000	20,00	2,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376	97.211.387.568		750.158.547								0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																									KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***66.000.000***	***100***	***13.200.000***		***13.200.000***												***0,00***	***50***	***13.200.000***	***50,00***	***20,00***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	66.000.000	4	13.200.000		13.200.000												0,00	4	13.200.000	20,00	20,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***1.324.542.500***	***100***	***138.195.091***		***277.139.000***												***0,00***	***50***	***138.195.091***	***50,00***	***10,43***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	65.992.600	1	2.500.000		13.000.000												0,00	1	2.500.000	10,00	3,79	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	120.077.400	2	2.500.000		24.000.000												0,00	2	2.500.000	100,00	2,08	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	68.612.600	1	1.000.000		14.641.000												0,00	1	1.000.000	100,00	1,46	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	109.677.500	5	5.000.000		22.000.000												0,00	5	5.000.000	250,00	4,56	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	63.942.400	1	1.370.000		13.198.000												0,00	1	1.370.000	10,00	2,14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	733.040.000	30	125.825.091		150.000.000												0,00	30	125.825.091	50,00	17,16	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	86.000.000				21.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	77.200.000				19.300.000												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***4.520.372.800***	***100***	***5.999.000***		***825.000.000***												***0,00***	***50***	***5.999.000***	***50,00***	***0,13***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	784.145.800	4	1.160.000		75.000.000												0,00	4	1.160.000	200,00	0,15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	3.736.227.000	4	4.839.000		750.000.000												0,00	4	4.839.000	36,36	0,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***6.375.252.200***		***951.510.707***		***1.278.165.000***												***0,00***	***0***	***951.510.707***		***14,93***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	3.470.000	1	98.000		700.000												0,00	1	98.000	10,00	2,82	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.744.000.000	7	262.156.707		550.000.000												0,00	7	262.156.707	46,67	9,55	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	3.627.782.200	7	689.256.000		727.465.000												0,00	7	689.256.000	46,67	19,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***2.060.490.600***	***100***	***3.590.865.047***		***411.255.700***												***0,00***	***50***	***3.590.865.047***	***50,00***	***174,27***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	259.520.500	1	28.535.000		52.194.000												0,00	1	28.535.000	100,00	11,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	83.639.000	1	1.984.000		17.000.000												0,00	1	1.984.000	16,67	2,37	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	864.340.000	17	107.648.100		171.200.000												0,00	17	107.648.100	106,25	12,45	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	113.682.600	2	2.000.000		23.000.000												0,00	2	2.000.000	25,00	1,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	739.308.500	1	3.450.697.947		147.861.700												0,00	1	3.450.697.947	100,00	466,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4	**Meningkatnya jumlah wirausaha**	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)**	**Orang**	**0**	**19.515.335.000**	**563**	**6.201.476.120**		**4.253.000.000**	**70**								**70**		**0,00**	**0,00**	**633**	**6.201.476.120**	**0,00**	**31,78**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	**UMKM**	**0**		**24.630**				**24.630**							**24.630**		**0,00**		**49.260**		**0,00**		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	**Orang**	**0**																	**0**				**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.17.07.1.01	***Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan***	***Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi***	***undefined***	***835***	***19.515.335.000***	***725***	***6.201.476.120***		***4.253.000.000***												***0,00***	***725***	***6.201.476.120***	***86,83***	***31,78***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		17
			Para Pemangku Kepentingan																										
		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	5	6.018.479.900	5	2.185.362.450		1.253.000.000												0,00	5	2.185.362.450	100,00	36,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	180	13.496.855.100	7.514	4.016.113.670		3.000.000.000												0,00	7.514	4.016.113.670	4.174,44	29,76	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	**Angka**	**0**	**581.613.418.921**	**2.375**	**160.079.622.951**		**70.208.657.680**	**131**								**131**		**0,00**	**0,00**	**2.506**	**160.079.622.951**	**0,00**	**27,52**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Jumlah desa preneur	**Angka**	**0**		**72**			**72**									**72**		**0,00**		**144**		**0,00**		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
				Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**0**		**84,1**			**84,1**									**84,1**		**0,00**		**168,2**		**0,00**		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
		2.22.08.5.04	***Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***	***Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya***	***%***	***100***	***156.743.140.121***	***100***	***9.906.857.843***		***12.650.207.680***												***0,00***	***50***	***9.906.857.843***	***50,00***	***6,32***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	96.130.755.600	0			0												0,00	0			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	60.612.384.521	4	9.906.857.843		12.650.207.680												0,00	4	9.906.857.843	400,00	16,34	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan***	***Tersedianya sarana dan prasarana budaya***	***%***	***100***	***141.498.840.600***	***100***	***101.550.660.389***		***700.000.000***												***0,00***	***50***	***101.550.660.389***	***50,00***	***71,77***	***DINAS KOPERASI***
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			Kebudayaan																									***DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	3	141.498.840.600	14	101.550.660.389		700.000.000												0,00	14	101.550.660.389	466,67	71,77	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)***	***%***	***100***	***101.431.375.500***	***100***	***22.975.563.418***		***24.041.050.000***												***0,00***	***50***	***22.975.563.418***	***50,00***	***22,65***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	3.500	101.431.375.500	3.450	22.975.563.418		24.041.050.000												0,00	3.450	22.975.563.418	98,57	22,65	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya***	***undefined***	***150***	***181.940.062.700***	***30***	***25.646.541.301***		***32.817.400.000***												***0,00***	***30***	***25.646.541.301***	***20,00***	***14,10***	***DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***
		2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	112	181.940.062.700	32	25.646.541.301		32.817.400.000												0,00	32	25.646.541.301	28,57	14,10	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5	**Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya pada kantong-kantong kemiskinan di DIY**																											
Rata-rata capaian kinerja (%)							712.268.306.425		181.517.186.376		97.211.387.568		750.158.547							0,00	750.158.547	0,00	0,77		182.267.344.923	91,48	25,59	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Masifnya penyelenggaraan event di Destinasi Tujuan Wisata DIY oleh OPD, BUMN, swasta maupun lembaga terkait menjadi daya tarik wisatawan 2. Partisipasi warga luar DIY pada event skala nasional seperti Festival Malioboro Menari dan Sibakul Sport Festival, dll 3. Ketersediaan kesempatan bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam mengisi booth pada event 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas KUMKM, perijinan & sertifikasi produk, promosi, pemasaran, subsidi pengiriman DN dan LN 5. Pendampingan KUMKM oleh ASN, Tenaga Pendamping KUMK dan Konsultan PLUT meminimalisir permasalahan yang dihadapi KUMKM 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menghasilkan produk unggulan KUMKM sebagai daya tarik wisata belanja di DIY
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan anggaran dan rencana kegiatan sesuai kebijakan nasional maupun daerah 2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur requirement pemasaran/display produk unggulan KUMKM di toko retail nasional wilayah setempat 3. Masih banyak SDM yang belum menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas diri maupun usahanya 4. Masih banyak pelaku usaha yang tidak berkomitmen mengembangkan usahanya 5. Koperasi belum menjadi tujuan prioritas masyarakat untuk mengakses layanan keuangan maupun belanja konsumsi 6. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi karena rendahnya minat generasi milenial untuk berkontribusi mengembangkan Koperasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Nilai Realisasi Investasi di DIY	0	0
2 Nilai Predikat Pelayanan Prima	0	
3 Kategori RB Perangkat Daerah	0	
4 Nilai Realisasi Investasi di DIY	3.22	2.05
5 Nilai Predikat Pelayanan Prima	1	1
6 Kategori RB Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY**																											
2	**Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima**																											
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah**																											
4	**Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY**	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)**	**lokus**	**0**	**1.444.999.900**	**1**			**350.000.000**	**1**								**1**		**0,00**	**0,00**	**2**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
				Jumlah izin Usaha	**izin**	**0**		**0**																**0**				**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.02.1.02	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***	***Jumlah Dokumen Peta Potensi***	***dokumen***	***8***	***1.444.999.900***	***1***			***350.000.000***												***0,00***	***1***		***12,50***	***0,00***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	dokumen	8	1.444.999.900				350.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kepeminatan Investasi**	**kepeminatan**	**0**	**3.386.560.500**	**14**	**193.330.000**		**650.000.000**	**2**								**2**		**0,00**	**0,00**	**16**	**193.330.000**	**0,00**	**5,71**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
				Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)	**trilyun**	**0**		**0**																**0**				**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.03.1.01	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal***	***dokumen***	***10***	***3.386.560.500***	***1***	***193.330.000***		***650.000.000***											***0,00***	***1***	***193.330.000***	***10,00***	***5,71***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	dokumen	10	3.386.560.500	1	193.330.000		650.000.000											0,00	1	193.330.000	10,00	5,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM**	**kegiatan usaha**	**0**	**4.941.511.000**	**9.252**			**985.000.000**	**3.745**								**3.745**		**0,00**	**0,00**	**12.997**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
				Jumlah Proyek yang patuh memberikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	**proyek**	**0**		**0**																**0**				**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.05.1.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal***	***kali***	***38***	***4.941.511.000***	***6***			***985.000.000***											***0,00***	***6***		***15,79***	***0,00***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan diawasi	***undefined***	***420***																		***0***				***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	2.000	4.417.758.900				880.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	140	523.752.100				105.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif**	**mitra**	**0**	**10.500.000.000**	**2**	**959.540.577**		**2.500.000.000**	**2**								**2**		**0,00**	**0,00**	**4**	**959.540.577**	**0,00**	**9,14**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah kerjasama***	***kerjasama***	***1***	***10.500.000.000***	***1***	***959.540.577***		***2.500.000.000***												***0,00***	***1***	***959.540.577***	***100,00***	***9,14***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dalam rangka Diplomasi Budaya	laporan	4	10.500.000.000	1	959.540.577		2.500.000.000												0,00	1	959.540.577	25,00	9,14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	**Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima**	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**skor**	**0**	**3.496.371.100**	**88,03**			**705.000.000**	**87,58**								**87**		**0,00**	**0,00**	**175,03**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.04.1.02	***Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani***	***pelaku usaha***	***9.244***	***3.496.371.100***	***610***			***705.000.000***												***0,00***	***610***		***6,60***	***0,00***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	pelaku usaha	3.015	2.096.550.300				420.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	kegiatan usaha	279	310.596.200				65.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	orang	5.950	1.089.224.600				220.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan**	**%**	**0**	**1.111.799.100**	**85**			**220.000.000**	**20**							**20**		**0,00**	**0,00**	**52,5**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
				Jumlah data yang tersaji	**jenis**	**0**		**0**															**0**				**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.06.1.01	***Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada***	***Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha***	***jenis***	***5***	***1.111.799.100***	***5***			***220.000.000***												***0,00***	***5***			***100,00***	***0,00***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000								0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Tingkat Daerah Provinsi	***Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.***																								
		2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	5	1.111.799.100	5			220.000.000												0,00	5		100,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**skor**	**0**	**60.781.341.574**	**90,93**	**9.344.036.942**		**11.982.000.000**	**86,79**								**86,79**		**0,00**	**0,00**	**177,72**	**9.344.036.942**	**0,00**	**15,37**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi***	***dokumen***	***9***	***368.432.800***	***9***	***24.056.750***		***84.500.000***												***0,00***	***9***	***24.056.750***	***100,00***	***6,53***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	257.144.800	3	12.001.750		60.000.000												0,00	3	12.001.750	20,00	4,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	14	28.393.000	3	5.480.000		6.500.000												0,00	3	5.480.000	21,43	19,30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	82.895.000	3	6.575.000		18.000.000												0,00	3	6.575.000	20,00	7,93	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Keuangan***	***dokumen***	***15***	***44.454.933.074***	***3***	***7.988.630.652***		***8.961.500.000***												***0,00***	***3***	***7.988.630.652***	***20,00***	***17,97***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	65	44.150.533.274	62	7.956.932.652		8.900.000.000											0,00	62	7.956.932.652	95,38	18,02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	213.640.000	1	31.535.000		43.000.000											0,00	1	31.535.000	20,00	14,76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	90.759.800	1	163.000		18.500.000											0,00	1	163.000	20,00	0,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***laporan***	***5***	***80.702.000***	***1***	***10.766.000***		***17.500.000***											***0,00***	***1***	***10.766.000***	***20,00***	***13,34***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	80.702.000	1	10.766.000		17.500.000											0,00	1	10.766.000	20,00	13,34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah***	***paket/dokumen***	***80***	***4.597.189.500***	***8***	***178.470.877***		***946.500.000***											***0,00***	***8***	***178.470.877***	***10,00***	***3,88***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	85.177.600	1	6.051.000		18.000.000											0,00	1	6.051.000	20,00	7,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	448.994.600	1	5.342.000		90.000.000											0,00	1	5.342.000	20,00	1,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	243.950.400	1	5.337.500		50.000.000											0,00		1	5.337.500	20,00	2,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	55.399.200	1	5.210.000		11.500.000											0,00		1	5.210.000	20,00	9,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	483.484.500	1	20.290.192		97.000.000											0,00		1	20.290.192	20,00	4,20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	33	62.383.200	1	220.000		13.000.000											0,00		1	220.000	3,03	0,35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	46.000.000				11.000.000											0,00		0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	2.478.800.000	1	125.819.085		500.000.000											0,00		1	125.819.085	20,00	5,08	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	148.000.000	1	10.201.100		36.000.000											0,00		1	10.201.100	25,00	6,89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	545.000.000				120.000.000											0,00		0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519		18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang (Unit/Paket)***	***paket/unit***	***52***	***4.245.219.300***	***7***	***46.134.998***		***580.000.000***												***0,00***	***7***	***46.134.998***	***13,46***	***1,09***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	600.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	800.000.000				400.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	4	175.000.000	1	1.000.000		40.000.000												0,00	1	1.000.000	25,00	0,57	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	22	358.701.600	1	41.118.749		75.000.000												0,00	1	41.118.749	4,55	11,46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	2.000.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	21	311.517.700	1	4.016.249		65.000.000												0,00	1	4.016.249	4,76	1,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan***	***laporan***	***15***	***3.639.432.200***	***3***	***702.271.934***		***738.500.000***												***0,00***	***3***	***702.271.934***	***20,00***	***19,30***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	64.770.000	1	6.794.920		14.000.000												0,00	1	6.794.920	20,00	10,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	567.400.000	1	117.197.014		114.500.000												0,00	1	117.197.014	20,00	20,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	5	3.007.262.200	1	578.280.000		610.000.000												0,00	1	578.280.000	20,00	19,23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)***	***unit***	***840***	***3.395.432.700***	***56***	***393.705.731***		***653.500.000***												***0,00***	***56***	***393.705.731***	***6,67***	***11,60***	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	217.132.000	1	33.471.880		46.500.000												0,00	1	33.471.880	100,00	15,42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	242	344.381.500	14	19.390.000		70.000.000												0,00	14	19.390.000	5,79	5,63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	811.494.200	7	134.380.400		166.000.000												0,00	7	134.380.400	77,78	16,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	252	73.637.400	1	350.000		14.000.000												0,00	1	350.000	0,40	0,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	275	292.537.600	25	28.050.000		57.000.000											0,00		25	28.050.000	9,09	9,59	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1.656.250.000	1	178.063.451		300.000.000											0,00		1	178.063.451	50,00	10,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		07	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor**	**0**		**90,93**														**nan**	**90,93**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Rata-rata capaian kinerja (%)							85.662.583.174		10.496.907.519		17.392.000.000									0,00		0,00	0,00		10.496.907.519	18,99	12,25	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	6.09	5.27
2 Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	16	15
3 Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	395	385
4 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan**	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola**	**Objek**	**0**	**10.000.000.000**	**10**	**1.992.714.960**		**2.000.000.000**												**0,00**	**10**	**1.992.714.960**	**0,00**	**19,93**	**DINAS KEBUDAYAAN**
		2.22.02.1.01	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan***	***Laporan***	***3***	***10.000.000.000***	***1***	***1.992.714.960***		***2.000.000.000***												***0,00***	***1***	***1.992.714.960***	***33,33***	***19,93***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	1	4.189.268.000	1	745.429.500		837.853.600												0,00	1	745.429.500	100,00	17,79	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	40	2.810.732.000	40	650.000.000		562.146.400												0,00	40	650.000.000	100,00	23,13	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1	3.000.000.000	1	597.285.460		600.000.000	0											0,00	1	597.285.460	100,00	19,91	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo**	**Nilai Akreditasi**	**4**	**10.000.000.000**	**4**	**1.962.144.145**		**2.000.000.000**	**4**	**52.353.668**							**4**	**52.353.668**	**0,00**	**2,62**	**8**	**2.014.497.813**	**200,00**	**20,14**	**DINAS KEBUDAYAAN**
		2.22.06.1.01	***Pengelolaan Museum Provinsi***	***Jumlah museum provinsi yang terkelola***	***Museum***	***1***	***10.000.000.000***	***1***	***1.962.144.145***		***2.000.000.000***		***52.353.668***								***52.353.668***		***2,62***	***1***	***2.014.497.813***	***100,00***	***20,14***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	1	3.000.000.000	1	593.251.098		600.000.000												0,00	1	593.251.098	100,00	19,78	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1	5.000.000.000	1	970.059.500		1.000.000.000	0								0		0,00	0,00	1	970.059.500	100,00	19,40	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	2.000.000.000	1	398.833.547		400.000.000	0	52.353.668								52.353.668		13,09	1	451.187.215	100,00	22,56	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman**	**Kegiatan**	**18**	**3.615.138.510.148**	**18**	**373.486.575.261**		**841.397.094.120**		**39.658.336.562**								**39.658.336.562**		**4,71**	**18**	**413.144.911.823**	**100,00**	**11,43**	**DINAS KEBUDAYAAN**
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	**%**	**10**		**13,21**															**6,605**		**66,05**		**DINAS KEBUDAYAAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100						0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	**%**	**100**		**100**															**50**		**50,00**		**DINAS KEBUDAYAAN**
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n	**Desa**	**45**		**40**				**40**								**40**		**0,00**		**80**		**177,78**		**DINAS KEBUDAYAAN**
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni	**%**	**9**		**7,5**															**3,75**		**41,67**		**DINAS KEBUDAYAAN**
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis	**%**	**0,23**		**0**															**0**				**DINAS KEBUDAYAAN**
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	**Indeks**	**4**		**4**				**4**								**4**		**0,00**		**8**		**200,00**		**DINAS KEBUDAYAAN**
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta	**Index**	**0**		**3**															**3**		**0,00**		**DINAS KEBUDAYAAN**
		2.22.08.5.01	***Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman***	***Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum***	***Laporan***	***25***	***101.312.500.000***	***21***	***11.376.183.253***	***19.250.000.000***		***265.893.000***								***265.893.000***		***1,38***	***21***	***11.642.076.253***	***84,00***	***11,49***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	10	29.875.500.000	6	2.625.401.004	6.050.000.000	0	210.693.000								0	210.693.000	0,00	3,48	6	2.836.094.004	60,00	9,49	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	14	38.487.000.000	9	4.587.345.582	7.700.000.000	0									0		0,00	0,00	9	4.587.345.582	64,29	11,92	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	40	32.950.000.000	40	4.163.436.667	5.500.000.000	3	55.200.000								3	55.200.000	0,00	1,00	43	4.218.636.667	107,50	12,80	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03	***Penguatan Museum Sonobudoyo***	***Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo***	***Laporan***	***2***	***132.301.340.669***	***0***	***7.072.635.639***	***31.734.099.900***		***518.797.218***								***518.797.218***		***1,63***	***0***	***7.591.432.857***		***5,74***	***DINAS KEBUDAYAAN***
				Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola dan dikembangkan	***Unit***	***1***		***0***															***0***				***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit	1	34.789.870.669	1	4.641.273.647	6.734.099.900	0	466.917.890								0	466.917.890	0,00	6,93	1	5.108.191.537	100,00	14,68	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit	1	97.511.470.000	1	2.431.361.992	25.000.000.000	0	51.879.328								0	51.879.328	0,00	0,21	1	2.483.241.320	100,00	2,55	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04	***Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***	***Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan***	***Objek***	***288***	***164.155.360.122***	***246***	***16.140.783.959***	***33.592.929.040***	***246***	***403.989.840***								***246***	***403.989.840***	***0,00***	***1,20***	***492***	***16.544.773.799***	***170,83***	***10,08***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	75	83.931.130.000	75	8.985.149.481	17.523.000.000	0	403.989.840									403.989.840		2,31	75	9.389.139.321	100,00	11,19	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	8	39.196.000.000	6	3.676.301.087	7.700.000.000	0												0,00	6	3.676.301.087	75,00	9,38	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	205	41.028.230.122	11	3.479.333.391	8.369.929.040	11									11		0,00	0,00	22	3.479.333.391	10,73	8,48	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.05	***Pengelolaan Taman Budaya***	***Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman***	***Event***	***13***	***115.089.143.030***	***4***	***11.073.944.967***	***25.102.460.130***	***3***	***206.700.274***								***3***	***206.700.274***	***0,00***	***0,82***	***7***	***11.280.645.241***	***53,85***	***9,80***	***DINAS KEBUDAYAAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551	885.808.415.746		46.667.267.100								0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Budaya Yogyakarta selama satu tahun																								
		2.22.08.5.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	1	115.089.143.030	1	11.073.944.967		25.102.460.130		206.700.274								206.700.274		0,82	1	11.280.645.241	100,00	9,80	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya***	***Unit***	***821***	***76.039.528.400***	***699***	***15.285.069.126***		***14.511.640.000***	***699***								***699***		***0,00***	***0,00***	***1.398***	***15.285.069.126***	***170,28***	***20,10***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	277	6.877.938.400	209	1.255.620.146		1.322.640.000	0											0,00	209	1.255.620.146	75,45	18,26	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	544	69.161.590.000	527	14.029.448.980		13.189.000.000	0											0,00	527	14.029.448.980	96,88	20,29	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.07	***Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan***	***Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan***	***Dokumen***	***22***	***1.550.107.437.147***	***22***	***6.217.530.984***		***429.320.147.050***												***0,00***	***22***	***6.217.530.984***	***100,00***	***0,40***	***DINAS KEBUDAYAAN***
				Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan	***undefined***	***5***		***5***				***5***								***5***		***0,00***		***10***		***200,00***		***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	3	1.512.393.258.347	3	487.324.355		421.730.147.050	0											0,00	3	487.324.355	100,00	0,03	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan	4	2.256.400.000	4	318.331.879		440.000.000	0								0		0,00	0,00	4	318.331.879	100,00	14,11	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	77	35.457.778.800	13	5.411.874.750		7.150.000.000	0											0,00	13	5.411.874.750	16,88	15,26	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya***	***Kegiatan***	***13***	***1.476.133.200.780***	***13***	***306.320.427.333***		***287.885.818.000***	***13***	***38.262.956.230***							***13***	***38.262.956.230***	***0,00***	***13,29***	***26***	***344.583.383.563***	***200,00***	***23,34***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa	96	199.377.097.280	76	14.454.883.300		38.004.318.000	100	364.221.270							100	364.221.270	0,00	0,96	176	14.819.104.570	183,33	7,43	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina	Lembaga	11	38.387.000.000	9	4.667.452.919		7.700.000.000	0								0		0,00	0,00	9	4.667.452.919	81,82	12,16	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2	20.831.682.000	1	2.298.483.633		4.400.000.000		378.944.046								378.944.046		8,61	1	2.677.427.679	50,00	12,85	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	675	14.102.500.000	28	2.132.669.288		2.750.000.000	0											0,00	28	2.132.669.288	4,15	15,12	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	1	27.705.000.000	1	4.112.958.500		5.500.000.000	0								0		0,00	0,00	1	4.112.958.500	100,00	14,85	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	10	49.261.481.600	10	5.830.035.334		9.900.000.000	0								0		0,00	0,00	10	5.830.035.334	100,00	11,83	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	8	31.856.361.800	8	2.663.105.600		6.451.500.000	0								0		0,00	0,00	8	2.663.105.600	100,00	8,36	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	360	14.796.149.000	360	1.676.816.090		3.080.000.000	0								0		0,00	0,00	360	1.676.816.090	100,00	11,33	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100							0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	14	55.689.165.000	14	6.869.256.193		11.000.000.000	0										0,00	0,00	14	6.869.256.193	100,00	12,33	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan	1	10.582.000.000	1	354.205.000		2.200.000.000	0								0		0,00	0,00	1	354.205.000	100,00	3,35	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	2	42.488.475.000	2	8.803.951.500		8.250.000.000	0								0		0,00	0,00	2	8.803.951.500	100,00	20,72	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	2	955.158.500.000	2	250.808.122.576		185.350.000.000	2	37.300.000.914							2	37.300.000.914	0,00	20,12	4	288.108.123.490	200,00	30,16	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	6	15.897.789.100	6	1.648.487.400		3.300.000.000	1	219.790.000							1	219.790.000	0,00	6,66	7	1.868.277.400	116,67	11,75	DINAS KEBUDAYAAN
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah**	**0.00.01.2**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA)**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**0**		**86,636**				**77,09**								**77**		**0,00**	**nan**	**163,636**		**0,00**	**0,00**	**DINAS KEBUDAYAAN**
		0.00.01.3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO)**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**90**		**88,62**				**93,6**								**93**		**0,00**	**nan**	**181,62**		**201,80**	**0,00**	**DINAS KEBUDAYAAN**
		2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**0**	**208.409.578.477**	**91,3**	**28.313.670.185**		**40.411.321.626**	**74,53**	**6.956.576.870**							**74,53**	**6.956.576.870**	**0,00**	**17,21**	**165,83**	**35.270.247.055**	**0,00**	**16,92**	**DINAS KEBUDAYAAN**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (TBY)	**nilai**	**0**		**346,544**				**88,6**								**88,6**		**0,00**		**435,144**		**0,00**		**DINAS KEBUDAYAAN**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (MSB)	**Nilai**	**90**		**88,62**				**88,43**								**88**		**0,00**		**176,62**		**196,24**		**DINAS KEBUDAYAAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***6***	***162.007.998***	***6***	***900.000***		***30.709.122***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***7***	***900.000***	***116,67***	***0,56***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	22.211.980	2	300.000		4.019.184												0,00	2	300.000	33,33	1,35	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	81.065.959	2	300.000		16.066.864												0,00	2	300.000	20,00	0,37	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	58.730.059	1	300.000		10.623.074												0,00	1	300.000	20,00	0,51	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***144.006.347.722***	***100***	***21.401.819.705***		***28.517.693.769***	***25***	***5.558.712.144***							***25***	***5.558.712.144***	***0,00***	***19,49***	***62,5***	***26.960.531.849***	***62,50***	***18,72***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.964	142.626.635.955	2.964	21.213.699.371		28.267.879.233	0	5.527.838.104							0	5.527.838.104	0,00	19,56	2.964	26.741.537.475	100,00	18,75	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.141.883.800	12	156.384.091		206.543.000	3	28.981.115							3	28.981.115	0,00	14,03	15	185.365.206	125,00	16,23	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100							0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	110.697.463	1	13.667.750		20.276.212		1.892.925								1.892.925		9,34	1	15.560.675	100,00	14,06	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	127.130.504	18	18.068.493		22.995.324												0,00	18	18.068.493	150,00	14,21	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***513.755.400***	***100***	***77.687.188***		***92.928.000***	***25***	***17.791.624***							***25***	***17.791.624***	***0,00***	***19,15***	***62,5***	***95.478.812***	***62,50***	***18,58***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	513.755.400	1	77.687.188		92.928.000	0,25	17.791.624							0,25	17.791.624	0,00	19,15	1,25	95.478.812	25,00	18,58	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***6.362.209.139***	***100***			***1.200.916.423***	***25***	***62.106.301***							***25***	***62.106.301***	***0,00***	***5,17***	***62,5***	***62.106.301***	***62,50***	***0,98***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.019.732.600	1			186.285.000	0,25	12.405.748							0,25	12.405.748	0,00	6,66	1,25	12.405.748	125,00	1,22	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.438.041.400	0			261.626.000	1,25	23.449.831							1,25	23.449.831	0,00	8,96	1,25	23.449.831	25,00	1,63	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	273.339.424				50.730.823	1	4.949.000							1	4.949.000	0,00	9,76	1	4.949.000	100,00	1,81	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	168.793.804				33.454.080	0	5.760.000								5.760.000		17,22	0	5.760.000		3,41	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	934.096.500	0			169.534.000	0	13.452.722							0	13.452.722	0,00	7,94	0	13.452.722		1,44	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	95.249.800	0			17.087.000	0	514.000							0	514.000	0,00	3,01	0	514.000		0,54	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	2.432.955.611				482.199.520	0,25	1.575.000							0,25	1.575.000	0,00	0,33	0,25	1.575.000	0,21	0,06	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***51.272.786.499***	***100***	***6.342.489.664***		***9.455.521.702***	***25***	***1.237.295.601***							***25***	***1.237.295.601***	***0,00***	***13,09***	***62,5***	***7.579.785.265***	***62,50***	***14,78***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	98.341.900				18.150.000	1	3.000.000							1	3.000.000	0,00	16,53	1	3.000.000	33,33	3,05	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.999.598.399	5	2.170.784.862		3.049.974.702	0,25	253.731.008							0,25	253.731.008	0,00	8,32	5,25	2.424.515.870	175,00	15,15	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	35.174.846.200	3	4.171.704.802		6.387.397.000	0,25	980.564.593							0,25	980.564.593	0,00	15,35	3,25	5.152.269.395	108,33	14,65	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***6.092.471.719***	***100***	***490.773.628***		***1.113.552.610***	***25***	***80.671.200***							***25***	***80.671.200***	***0,00***	***7,24***	***62,5***	***571.444.828***	***62,50***	***9,38***	***DINAS KEBUDAYAAN***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	269.530.500	1	40.358.350		48.920.000	0,25	4.937.600							0,25	4.937.600	0,00	10,09	1,25	45.295.950	125,00	16,81	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100							0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	354.156.600				64.560.000	4,08	10.030.000							4,08	10.030.000	0,00	15,54	4,08	10.030.000	5,91	2,83	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	3.128.604.781	19	450.415.278		569.202.271		49.666.200								49.666.200		8,73	19	500.081.478	100,00	15,98	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	25	213.678.500				42.350.000												0,00	0			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	211	661.725.711				120.671.001	6,5	4.897.400							6,5	4.897.400	0,00	4,06	6,5	4.897.400	3,08	0,74	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.464.775.627				267.849.338	0,25	11.140.000							0,25	11.140.000	0,00	4,16	0,25	11.140.000	25,00	0,76	DINAS KEBUDAYAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							3.843.548.088.625		405.755.104.551		885.808.415.746		46.667.267.100							0,00	46.667.267.100	0,00	5,27		452.422.371.651	81,09	11,77	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	51	59.23
2 Tingkat Ketersediaan Arsip	51.25	70.01
3 Kategori Reformasi Birokrasi OPD	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan**	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	**%**	**16**	**5.489.057.484**	**24,6**	**9.021.176.363**		**1.325.028.100**	**24,6**								**24,6**		**0,00**	**0,00**	**24,6**	**9.021.176.363**	**153,75**	**164,35**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
				Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) (Balai Layanan Perpustakaan)	**perpustakaan**	**0**		**48**				**48**								**48**		**0,00**		**96**		**0,00**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.23.02.1.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah perpustakaan ber-SNP***	***perpustakaan***	***575***	***4.820.344.944***	***560***	***544.445.094***		***1.174.709.600***											***0,00***	***560***	***544.445.094***	***97,39***	***11,29***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	***perpustakaan***	***50***																	***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	perpustakaan	1	2.367.240.000	1	750.000		534.500.000												0,00	1	750.000	100,00	0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	1	0	1	375.000		0												0,00	1	375.000	100,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	2																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50	0	1	500.000		0												0,00	1	500.000	2,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan	perpustakaan	50																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan																								
		2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37	0	1	375.000		0												0,00	1	375.000	2,70	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	orang	50	1.189.106.572	25	500.000		292.957.300												0,00	25	500.000	50,00	0,04	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6	0	1	386.306.808		0												0,00	1	386.306.808	16,67	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6		1															1		16,67		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1	0	1	500.000		0												0,00	1	500.000	100,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000	0	1.446	155.138.286		0												0,00	1.446	155.138.286	14,46	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1.263.998.372				347.252.300												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat***	***kali***	***48***	***668.712.540***	***48***	***8.476.731.269***		***150.318.500***												***0,00***	***48***	***8.476.731.269***	***100,00***	***1.267,62***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah sosialisasi budaya baca	***kali***	***48***																	***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	538	0	222	8.330.560.279		0												0,00	222	8.330.560.279	41,26	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	48																	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	50	668.712.540	3	1.892.996		150.318.500												0,00	3	1.892.996	6,00	0,28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	perpustakaan	5	0	8	144.277.994		0												0,00	8	144.277.994	160,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	layanan	5																	0					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan**	**eksemplar**	**2.535**	**2.702.828.160**	**7.756**	**11.589.499**		**515.744.000**	**3.163**								**3.163**		**0,00**	**0,00**	**10.919**	**11.589.499**	**430,73**	**0,43**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan (Balai Layanan Perpustakaan)	**Eksemplar**	**0**		**2.562**				**518**								**518**		**0,00**		**3.080**		**0,00**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.23.03.1.01	***Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi***	***Jumlah KCKR daerah yang dihimpun***	***eksemplar***	***2.500***	***2.344.188.160***	***2.500***	***375.000***		***441.744.000***												***0,00***	***2.500***	***375.000***	***100,00***	***0,02***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah karya cetak dan karya rekam baru	***eksemplar***	***2.500***																	***0***					***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	eksemplar	2.500	2.344.188.160	7.756	375.000		441.744.000												0,00	7.756	375.000	310,24	0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02	***Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah***	***jumlah judul yang tercantum dalam KID***	***entri***	***2.500***	***358.640.000***	***2.500***	***8.589.499***		***74.000.000***												***0,00***	***2.500***	***8.589.499***	***100,00***	***2,40***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah katalog induk daerah dan bibliografi	***terbitan***	***6***																	***0***					***DINAS PERPUSTAKAAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				daerah																								***DAN ARSIP DAERAH***
		2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	entri	2.500	358.640.000	16.841	6.530.499		74.000.000												0,00	16.841	6.530.499	673,64	1,82	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5	0	1	2.059.000		0												0,00	1	2.059.000	20,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.03	***Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi***	***jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan***	***lembar***	***800***		***10***	***2.025.000***													***nan***	***10***	***2.025.000***	***1,25***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan	***eksemplar***	***50***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250	0	25	1.275.000		0												0,00	25	1.275.000	10,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250		0																0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	200	0	1	750.000		0												0,00	1	750.000	0,50	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	50																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.04	***Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	***jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar***	***eksemplar***	***10***		***4***	***600.000***													***nan***	***4***	***600.000***	***40,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah lokasi penelusuran Koleksi Budaya Etnis Nusantara	***lokasi***	***15***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15	0	4	600.000		0												0,00	4	600.000	26,67	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	**Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi**	**dokumen**	**3.000**	**4.368.000.000**	**4.729**	**5.812.398.639**		**1.200.000.000**	**251**								**251**		**0,00**	**0,00**	**4.980**	**5.812.398.639**	**166,00**	**133,07**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.22.08.5.02	***Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten***	***Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi***	***jenis***	***2***		***2***	***5.812.398.639***												***nan***	***2***	***5.812.398.639***	***100,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.22.08.5.02.02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	12.000	0	35.142	2.913.573.318		0											0,00	35.142	2.913.573.318	292,85	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	12.000																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.22.08.5.02.03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	unit	72.510	0	116.457	2.898.825.321		0											0,00	116.457	2.898.825.321	160,61	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	unit	72.510																	0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan***	***unit***	***20***	***4.368.000.000***				***1.200.000.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	undefined	0	4.368.000.000				1.200.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip**	**nilai**	**97,5**	**4.939.325.237**	**100**	**83.620.725**		**1.179.615.120**	**100**								**100**		**0,00**	**0,00**	**200**	**83.620.725**	**205,13**	**1,69**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.24.02.1.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi***	***persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip***	***%***	***43***	***2.227.358.200***	***41,5***	***82.622.729***		***531.600.000***											***0,00***	***20,75***	***82.622.729***	***48,26***	***3,71***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Institusi yang terbina dan dikelola kearsipannya	***insitusi***	***100***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	12.000	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	12.000																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	laporan	2	2.227.358.200	1	82.622.729		531.600.000												0,00	1	82.622.729	50,00	3,71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi***	***persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip***	***%***	***44***		***42,5***														***nan***	***21,25***		***48,30***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				Jumlah arsip statis yang dikelola	***arsip***	***20.000***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	20.000	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	20.000																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi***	***Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN***	***%***	***21***	***2.711.967.037***	***19,5***	***997.996***		***648.015.120***												***0,00***	***9,75***	***997.996***	***46,43***	***0,04***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				Entri data Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	***data***	***5.000***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	pengguna	750	1.532.845.704	272.054	499.998		360.333.600												0,00	272.054	499.998	36.273,87	0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	laporan	3	1.179.121.333	1	497.998		287.681.520												0,00	1	497.998	33,33	0,04	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3	**Meningkatnya Tata Kelola**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan**	**nilai**	**91,5**	**102.498.455.278**	**91,68**	**18.887.356.504**		**21.663.866.460**	**88,25**								**88,25**		**0,00**	**0,00**	**179,93**	**18.887.356.504**	**196,64**	**18,43**	**DINAS PERPUSTAKAAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah		**PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Pemerintah Daerah**																								**DAN ARSIP DAERAH**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Layanan Perpustakaan)	**Angka**	**0**		**91,65**				**89,69**								**89,69**		**0,00**		**181,34**		**0,00**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja***	***dokumen***	***10***	***96.293.300***	***10***	***1.125.000***		***18.355.000***												***0,00***	***10***	***1.125.000***	***100,00***	***1,17***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
				jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	***dokumen***	***7***																		***0***				***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	0	4	375.000		0												0,00	4	375.000	133,33	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4		4																4		100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	0	4	375.000		0												0,00	4	375.000	100,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	layanan	2	96.293.300	2	375.000		18.355.000												0,00	2	375.000	100,00	0,39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***jumlah laporan administrasi keuangan***	***layanan***	***14***	***95.989.030.823***	***14***	***14.743.161.904***		***19.930.817.860***												***0,00***	***14***	***14.743.161.904***	***100,00***	***15,36***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	100	95.478.634.297	390	14.660.132.755		19.830.508.160												0,00	390	14.660.132.755	390,00	15,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1																		0				DINAS PERPUSTAKAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680											0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																						SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	13	388.444.950	59	74.549.961		75.540.000													0,00	59	74.549.961	453,85	19,19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	53.362.324	1	4.446.994		11.500.400													0,00	1	4.446.994	100,00	8,33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	68.589.252	23	4.032.194		13.269.300													0,00	23	4.032.194	191,67	5,88	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku***	***laporan***	***4***		***4***	***38.182.700***													***nan***	***4***	***38.182.700***	***100,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	0	19	38.182.700		0													0,00	19	38.182.700	316,67	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional***	***dokumen***	***4***	***185.972.859***	***2***	***3.000.000***		***43.087.600***													***0,00***	***2***	***3.000.000***	***50,00***	***1,61***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	4	185.972.859	5	3.000.000		43.087.600													0,00	5	3.000.000	125,00	1,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah***	***jenis***	***6***	***6.227.158.296***	***6***	***35.787.589***		***1.671.606.000***													***0,00***	***6***	***35.787.589***	***100,00***	***0,57***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	0	2	2.099.068		0													0,00	2	2.099.068	50,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	388.501.143	6	9.756.637		84.557.000													0,00	6	9.756.637	75,00	2,51	DINAS PERPUSTAKAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	327.768.850	3	1.409.561		74.188.000												0,00	3	1.409.561	50,00	0,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	0	2	3.521.669		0												0,00	2	3.521.669	50,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4		1																1		25,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	0	1	137.000		0												0,00	1	137.000	50,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	5.110.888.303	3	18.488.654		1.412.861.000												0,00	3	18.488.654	75,00	0,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	400.000.000	1	375.000		100.000.000												0,00	1	375.000	100,00	0,09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***unit***	***4***		***3***	***2.664.000***													***nan***	***3***	***2.664.000***	***75,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	30	0	3	2.664.000		0												0,00	3	2.664.000	10,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	39																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	0				0												0,00	0			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***jenis***	***3***		***3***	***3.648.179.862***														***nan***	***3***	***3.648.179.862***	***100,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	0	2	750.000		0												0,00	2	750.000	50,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6	0	7	2.256.594.577		0												0,00	7	2.256.594.577	116,67	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	0	3	1.390.835.285		0												0,00	3	1.390.835.285	100,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***unit***	***16***		***16***	***415.255.449***														***nan***	***16***	***415.255.449***	***100,00***	***0,00***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680											0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																						SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	0	4	147.126.500		0												0,00	4	147.126.500	200,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	30																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	0	27	91.278.200		0												0,00	27	91.278.200	100,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26		0																0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	75	0	5	1.500.000		0												0,00	5	1.500.000	6,67	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	4																		0				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	16	0	2	2.900.000		0												0,00	2	2.900.000	12,50	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15		1																1		6,67		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	0	3	172.450.749		0												0,00	3	172.450.749	150,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5		1																1		20,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							119.997.666.159		33.816.141.730		25.884.253.680									0,00		0,00	0,00		33.816.141.730	348,65	28,18	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2305813	1513713
2 Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	5822.92	
3 Kategori reformasi birokrasi OPD	2	2
4 Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin	180	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya nilai produksi perikanan**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase desa maritim dalam tahap mandiri**	**%**	**45**	**170.931.251.258**	**38,23**	**7.004.086.028**		**36.653.547.510**		**301.924.960**								**301.924.960**		**0,82**	**19,115**	**7.306.010.988**	**42,48**	**4,27**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	**%**	**55**		**50**															**25**		**45,45**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	**%**	**100**		**40**															**20**		**20,00**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	**%**	**100**		**100**															**50**		**50,00**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)***	***%***	***100***	***47.128.804.000***		***1.573.365.900***		***14.000.000.000***										***0,00***	***0***	***1.573.365.900***		***3,34***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (unit)	Unit	9	47.128.804.000	4	1.573.365.900		14.000.000.000										0,00	4	1.573.365.900	44,44	3,34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)***	***undefined***	***1***	***123.802.447.258***	***1***	***5.430.720.128***		***22.653.547.510***		***301.924.960***								***301.924.960***		***1,33***	***1***	***5.732.645.088***	***100,00***	***4,63***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		2.22.08.5.08.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek	4	123.802.447.258	4	5.430.720.128		22.653.547.510		301.924.960								301.924.960		1,33	4	5.732.645.088	100,00	4,63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**ton**	**7.754**	**4.303.870.200**	**7.339**	**1.943.778.700**		**700.000.000**	**1.502**								**1.502**		**0,00**	**0,00**	**8.841**	**1.943.778.700**	**114,02**	**45,16**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Nilai survei kepuasan masyarakat penggunaan jasa/fasilitas pelabuhan (skor)	**skor**	**83**		**81,85**				**81**							**81**		**0,00**		**162,85**		**196,20**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		3.25.03.1.01	***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil***	***Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)***	***undefined***	***3***	***1.300.000.000***				***350.000.000***										***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	200.000.000				50.000.000										0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038						0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	1.100.000.000				300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.03	***Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT***	***Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)***	***undefined***	***10***	***497.748.200***	***10***	***363.958.700***		***100.000.000***												***0,00***	***10***	***363.958.700***	***100,00***	***73,12***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	497.748.200	11	363.958.700		100.000.000												0,00	11	363.958.700	110,00	73,12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.06	***Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi***	***Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)***	***undefined***	***3***	***2.148.630.000***	***3***	***1.541.373.800***		***175.000.000***												***0,00***	***3***	***1.541.373.800***	***100,00***	***71,74***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	1.798.630.000	2	1.488.483.800		100.000.000												0,00	2	1.488.483.800	100,00	82,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	350.000.000	12	52.890.000		75.000.000												0,00	12	52.890.000	100,00	15,11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.09	***Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT***	***Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal)***	***undefined***	***2***	***357.492.000***	***2***	***38.446.200***		***75.000.000***												***0,00***	***2***	***38.446.200***	***100,00***	***10,75***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	357.492.000	5	38.446.200		75.000.000												0,00	5	38.446.200	250,00	10,75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**ton**	**98.200**	**48.624.885.500**	**97.494,5**	**11.607.821.196**		**10.194.400.000**	**30.931,1**	**18.753.880**							**30.931,1**	**18.753.880**	**0,00**	**0,18**	**128.425,6**	**11.626.575.076**	**130,78**	**23,91**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	**%**	**35,42**		**34,87**				**11,73**								**11,73**		**0,00**		**23,3**		**65,78**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
				Produksi perikanan budidaya di lingkungan kelompok miskin (ton)	**ton**	**9**		**9,9**																**9,9**		**110,00**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		3.25.04.1.01	***Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)***	***undefined***	***5***	***1.032.290.100***	***5***	***219.551.181***		***294.400.000***		***18.753.880***								***18.753.880***		***6,37***	***5***	***238.305.061***	***100,00***	***23,09***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang	Rekomendasi	2	1.032.290.100	10	219.551.181		294.400.000		18.753.880								18.753.880		6,37	10	238.305.061	500,00	23,09	DINAS KELAUTAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bidang Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan																								DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.05	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***	***Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)***	***undefined***	***5***	***950.000.000***	***5***	***39.992.000***		***200.000.000***												***0,00***	***5***	***39.992.000***	***100,00***	***4,21***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Rekomendasi	50	950.000.000	25	39.992.000		200.000.000												0,00	25	39.992.000	50,00	4,21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.06	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat***	***Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)***	***undefined***	***5***	***46.642.595.400***	***5***	***11.348.278.015***		***9.700.000.000***												***0,00***	***5***	***11.348.278.015***	***100,00***	***24,33***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
				Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	***undefined***	***5***		***5***																***5***		***100,00***		***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	7	16.353.758.000	7	5.941.771.078		3.300.000.000												0,00	7	5.941.771.078	100,00	36,33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	60	30.288.837.400	187	5.406.506.937		6.400.000.000												0,00	187	5.406.506.937	311,67	17,85	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)**	**%**	**82**	**2.014.426.700**	**88,31**	**300.088.075**		**410.000.000**												**0,00**	**44,155**	**300.088.075**	**53,85**	**14,90**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		3.25.05.1.01	***Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***	***Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil***	***Tahun***	***1***	***1.521.850.900***	***1***	***245.994.350***		***300.000.000***												***0,00***	***1***	***245.994.350***	***100,00***	***16,16***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	862.851.900	3	88.874.350		200.000.000												0,00	3	88.874.350	100,00	10,30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	33	658.999.000	5	157.120.000		100.000.000												0,00	5	157.120.000	15,15	23,84	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13			16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.05.1.02	***Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya***	***Tahun***	***1***	***492.575.800***	***1***	***54.093.725***		***110.000.000***												***0,00***	***1***	***54.093.725***	***100,00***	***10,98***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	20	252.652.500	10	24.279.475		60.000.000												0,00	10	24.279.475	50,00	9,61	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	20	239.923.300	10	29.814.250		50.000.000												0,00	10	29.814.250	50,00	12,43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)**	**kg/kapita/tahun**	**35**	**34.192.668.400**	**35,83**	**6.987.268.934**		**6.875.000.000**												**0,00**	**35,83**	**6.987.268.934**	**102,37**	**20,43**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		3.25.06.1.01	***Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Tahun***	***1***	***836.568.800***	***1***	***10.043.999***		***175.000.000***												***0,00***	***1***	***10.043.999***	***100,00***	***1,20***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	5	507.762.000	2	10.043.999		100.000.000												0,00	2	10.043.999	40,00	1,98	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	328.806.800				75.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.02	***Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar***	***Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)***	***undefined***	***3***	***31.598.450.700***	***3***	***6.852.074.935***		***6.500.000.000***												***0,00***	***3***	***6.852.074.935***	***100,00***	***21,68***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	Unit Usaha	50	14.521.046.000	50	3.424.288.348		3.100.000.000												0,00	50	3.424.288.348	100,00	23,58	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko																								
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	50	17.077.404.700	50	3.427.786.587		3.400.000.000												0,00	50	3.427.786.587	100,00	20,07	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.03	***Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan***	***Tahun***	***1***	***1.757.648.900***	***1***	***125.150.000***		***200.000.000***												***0,00***	***1***	***125.150.000***	***100,00***	***7,12***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	10	1.541.232.100	5	125.150.000		150.000.000												0,00	5	125.150.000	50,00	8,12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	1	216.416.800				50.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	**Meningkatnya status pengelolaan kawasan konservasi perairan**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan**	**%**	**100**	**4.750.000.000**	**42,5**	**459.268.125**		**1.250.000.000**												**0,00**	**21,25**	**459.268.125**	**21,25**	**9,67**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)***	***%***	***100***	***4.750.000.000***	***100***	***459.268.125***		***1.250.000.000***												***0,00***	***50***	***459.268.125***	***50,00***	***9,67***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	10	4.350.000.000	3	459.268.125		1.250.000.000												0,00	3	459.268.125	30,00	10,56	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	1	400.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Persentase Kawasan Konservasi yang Ditetapkan dan Dikelola (%)**	**%**	**100**	**939.081.200**	**63**	**1.303.460.445**		**185.000.000**		**13.140.198**								**13.140.198**		**7,10**	**31,5**	**1.316.600.643**	**31,50**	**140,20**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		3.25.02.1.01	***Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***	***Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)***	***undefined***	***3***	***687.947.900***	***2***	***1.303.460.445***		***135.000.000***		***13.140.198***								***13.140.198***		***9,73***	***2***	***1.316.600.643***	***66,67***	***191,38***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038						0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	5.822,92	557.947.900	5.675,87	1.303.460.445		75.000.000		13.140.198								13.140.198		17,52	5.675,87	1.316.600.643	97,47	235,97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	200	130.000.000				60.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.02	***Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***	***Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi)***	***Rekomendasi***	***1***	***251.133.300***				***50.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	251.133.300				50.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**Meningkatnya tata kelola penyeleng-garaan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)**	**skor**	**89,2**	**135.326.464.984**	**90,68**	**23.098.951.478**		**26.771.148.338**	**87,94**	**7.930.000**							**87,94**	**7.930.000**	**0,00**	**0,03**	**178,62**	**23.106.881.478**	**200,25**	**17,07**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)***	***%***	***100***	***704.000.000***	***100***	***43.535.463***		***153.500.000***		***7.930.000***								***7.930.000***		***5,17***	***50***	***51.465.463***	***50,00***	***7,31***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	430.000.000	3	25.294.923		95.000.000		7.930.000								7.930.000		8,35	3	33.224.923	100,00	7,73	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.000.000	1	2.303.980		5.500.000												0,00	1	2.303.980	100,00	10,47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	37.000.000	1	2.388.760		5.500.000												0,00	1	2.388.760	100,00	6,46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	22.000.000	1	2.239.800		5.500.000												0,00	1	2.239.800	100,00	10,18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	193.000.000	1	11.308.000		42.000.000												0,00	1	11.308.000	100,00	5,86	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan***	***%***	***100***	***94.371.515.923***	***100***	***16.910.899.779***		***18.809.197.981***												***0,00***	***50***	***16.910.899.779***	***50,00***	***17,92***	***DINAS KELAUTAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah	***Perangkat Daerah (%)***																								***DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	152	93.337.903.723	152	16.765.354.029		18.600.097.981												0,00	152	16.765.354.029	100,00	17,96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	762.820.000	24	110.880.000		153.000.000												0,00	24	110.880.000	200,00	14,54	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	51.754.800	6	8.854.650		10.100.000												0,00	6	8.854.650	300,00	17,11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	219.037.400	6	25.811.100		46.000.000												0,00	6	25.811.100	33,33	11,78	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)***	***%***	***100***	***388.208.500***	***100***	***41.683.821***		***82.670.000***												***0,00***	***50***	***41.683.821***	***50,00***	***10,74***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	71.510.900				16.300.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.900.000	1	283.821		370.000												0,00	1	283.821	100,00	14,94	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	62.997.600				14.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	251.800.000	24	41.400.000		52.000.000												0,00	24	41.400.000	200,00	16,44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)***	***%***	***100***	***60.000.000***				***15.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	120	60.000.000				15.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)***	***%***	***100***	***3.878.529.200***	***100***	***422.545.318***		***793.000.000***												***0,00***	***50***	***422.545.318***	***50,00***	***10,89***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	318.806.900	21	43.401.383		67.000.000												0,00	21	43.401.383	105,00	13,61	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	502.771.600	21	55.804.304		98.000.000												0,00	21	55.804.304	42,00	11,10	DINAS KELAUTAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	476.216.100	37	44.051.195		98.000.000												0,00	37	44.051.195	123,33	9,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.030.000	3	4.235.000		10.000.000												0,00	3	4.235.000	300,00	8,82	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	462.018.800	6	63.181.856		98.000.000												0,00	6	63.181.856	200,00	13,68	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	125.708.800	5	7.438.000		27.000.000												0,00	5	7.438.000	50,00	5,92	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1.758.005.000	40	204.433.580		350.000.000												0,00	40	204.433.580	142,86	11,63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	186.972.000				45.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)***	***%***	***100***	***1.772.906.900***	***100***	***5.841.000***		***375.000.000***												***0,00***	***50***	***5.841.000***	***50,00***	***0,33***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	577.906.900				0												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	50.000.000				0												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	275.000.000	3	2.089.000		100.000.000												0,00	3	2.089.000	3,00	0,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	600.000.000				200.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	270.000.000	5	3.752.000		75.000.000												0,00	5	3.752.000	6,25	1,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***%***	***100***	***24.641.188.681***	***100***	***4.633.666.947***		***4.939.780.357***												***0,00***	***50***	***4.633.666.947***	***50,00***	***18,80***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	58.128.000	3	9.710.000		12.000.000												0,00	3	9.710.000	150,00	16,70	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	36	9.042.359.825	83	1.352.167.267		1.810.000.000												0,00	83	1.352.167.267	230,56	14,95	DINAS KELAUTAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan																								DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.540.700.856	93	3.271.789.680		3.117.780.357												0,00	93	3.271.789.680	258,33	21,05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***%***	***100***	***9.510.115.780***	***100***	***1.040.779.150***		***1.603.000.000***												***0,00***	***50***	***1.040.779.150***	***50,00***	***10,94***	***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	385.828.700	2	72.399.850		77.000.000												0,00	2	72.399.850	100,00	18,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250	490.249.000	33	45.540.000		100.000.000												0,00	33	45.540.000	13,20	9,29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	80	4.180.830.100	26	731.819.500		870.000.000												0,00	26	731.819.500	32,50	17,50	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	25.000.000				6.000.000												0,00	0			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	270	474.390.500	69	78.814.000		100.000.000												0,00	69	78.814.000	25,56	16,61	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	55	3.953.817.480	3	112.205.800		450.000.000												0,00	3	112.205.800	5,45	2,84	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	**Meningkatnya nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin**																											
Rata-rata capaian kinerja (%)							401.082.648.242		52.704.722.981		83.039.095.848		341.749.038							0,00	341.749.038	0,00	0,41		53.046.472.019	82,24	13,23	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:		Target	Realisasi
1	Lama Tinggal Wisatawan	0	
2	Lama Tinggal Wisatawan mancanegara	2.52	1.9
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.57	1.39
4	Spending money wisatawan	0	
5	Rata-Rata Spending Money Wisatawan Mancanegara ($)	600	
6	Rata-rata Spending Money Wisatawan Nusantara (Rp)	2500000	
7	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91.04	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan**	**Kawasan**	**0**	**34.700.000.000**	**7**	**1.425.197.594**	**7.000.000.000**	**2**							**2**		**0,00**	**0,00**	**9**	**1.425.197.594**	**0,00**	**4,11**	**DINAS PARIWISATA**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata***	***Kawasan***	***9***	***34.700.000.000***	***3***	***1.425.197.594***	***7.000.000.000***										***0,00***	***3***	***1.425.197.594***	***33,33***	***4,11***	***DINAS PARIWISATA***
				Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***%***	***100***															***0***				***DINAS PARIWISATA***
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	2	700.000.000			0										0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	2.400.000.000			200.000.000										0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	6	4.800.000.000	1	795.885.650	2.000.000.000										0,00	1	795.885.650	16,67	16,58	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	4.600.000.000	1	598.819.944	800.000.000										0,00	1	598.819.944	10,00	13,02	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	3	6.000.000.000			2.000.000.000										0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	11	7.800.000.000			1.500.000.000										0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	4	5.700.000.000		30.492.000	200.000.000										0,00	0	30.492.000		0,53	DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	2	700.000.000				0											0,00	0				0,00	DINAS PARIWISATA
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	4	2.000.000.000				300.000.000											0,00	0				0,00	DINAS PARIWISATA
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)**	**Orang**	**0**	**257.064.112.138**	**10.555.447**	**18.147.063.498**		**58.736.900.000**	**2.406.661**								**2.406.661**		**0,00**	**0,00**	**12.962.108**	**18.147.063.498**	**0,00**	**7,06**	**DINAS PARIWISATA**
		2.22.08.5.04	***Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***	***Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi***	***Objek***	***1***	***7.958.300.000***	***1***	***1.065.230.671***		***1.600.000.000***											***0,00***	***1***	***1.065.230.671***	***100,00***	***13,39***	***DINAS PARIWISATA***
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	7.958.300.000	1	1.065.230.671		1.600.000.000											0,00	1	1.065.230.671	100,00	13,39	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya***	***Unit***	***1***	***14.604.320.000***	***1***	***2.180.056.948***		***6.000.000.000***											***0,00***	***1***	***2.180.056.948***	***100,00***	***14,93***	***DINAS PARIWISATA***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	1	14.604.320.000	2	2.180.056.948		6.000.000.000											0,00	2	2.180.056.948	200,00	14,93	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY***	***Orang***	***3.550.000***	***196.734.992.138***	***750.000***	***11.871.145.988***		***42.136.900.000***											***0,00***	***750.000***	***11.871.145.988***	***21,13***	***6,03***	***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual	***undefined***	***3.620***																***0***					***DINAS PARIWISATA***
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek	1.064	188.339.195.000	199	11.871.145.988		40.000.000.000											0,00	199	11.871.145.988	18,70	6,30	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	2.263	8.395.797.138				2.136.900.000											0,00	0				0,00	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri***	***Lokasi***	***31***	***37.766.500.000***	***5***	***3.030.629.891***		***9.000.000.000***											***0,00***	***5***	***3.030.629.891***	***16,13***	***8,02***	***DINAS PARIWISATA***
		2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga	1.517	37.766.500.000	163	3.030.629.891		9.000.000.000											0,00	163	3.030.629.891	10,74	8,02	DINAS PARIWISATA
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)**	**Orang**	**0**	**6.349.999.900**	**35.698.682**	**1.534.779.500**		**1.500.000.000**	**5.165.070**								**5.165.070**		**0,00**	**0,00**	**40.863.752**	**1.534.779.500**	**0,00**	**24,17**	**DINAS PARIWISATA**
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	**UJP**	**0**		**328**				**328**								**328**		**0,00**		**656**		**0,00**		**DINAS PARIWISATA**
		3.26.02.1.01	***Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi***	***Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan***	***undefined***	***4***	***2.000.000.000***	***0***			***500.000.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PARIWISATA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	2.000.000.000				500.000.000												0,00	0				DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.02	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi***	***Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat***	***undefined***	***375***	***800.000.000***	***50***			***150.000.000***												***0,00***	***50***		***13,33***	***0,00***	***DINAS PARIWISATA***
		3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	375	800.000.000				150.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi***	***Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi***	***Dokumen***	***9***	***2.499.999.900***	***50***	***1.534.779.500***		***600.000.000***												***0,00***	***50***	***1.534.779.500***	***555,56***	***61,39***	***DINAS PARIWISATA***
		3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	21	899.999.900	1	193.473.000		200.000.000												0,00	1	193.473.000	4,76	21,50	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4	1.200.000.000	16	1.341.306.500		300.000.000												0,00	16	1.341.306.500	400,00	111,78	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	400.000.000				100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04	***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah UJP yang dipantau dan dibina***	***Usaha***	***460***	***1.050.000.000***	***20***			***250.000.000***												***0,00***	***20***		***4,35***	***0,00***	***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	***Usaha***	***25***		***4***														***4***		***16,00***		***DINAS PARIWISATA***
		3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	54	850.000.000				200.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	25	200.000.000				50.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
2	**Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan**	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n**	**Orang**	**0**	**4.219.999.600**	**238.053**	**454.837.513**		**950.000.000**	**29.012**								**29.012**		**0,00**	**0,00**	**267.065**	**454.837.513**	**0,00**	**10,78**	**DINAS PARIWISATA**
				Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	**Orang**	**0**		**7.749.260**				**1.274.585**								**1.274.585**		**0,00**		**9.023.845**		**0,00**		**DINAS PARIWISATA**
		3.26.03.1.01	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi***	***Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwsiata DIY dan visitingjogja***	***undefined***	***8.000***	***4.219.999.600***	***1***	***454.837.513***		***950.000.000***												***0,00***	***1***	***454.837.513***	***0,01***	***10,78***	***DINAS PARIWISATA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata	***Dokumen***	***13***		***20***																***20***		***153,85***		***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah pengunjung TIC	***Orang***	***9***		***500***																***500***		***5.555,56***		***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar	***Orang***	***900***		***6.000***																***6.000***		***666,67***		***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah transaksi B2B	***Milyar***	***40***		***6.500***																***6.500***		***16.250,00***		***DINAS PARIWISATA***
		3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	20	900.000.000		395.237.513		200.000.000												0,00	0	395.237.513		43,92	DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	1.200.000.000	1	59.600.000		300.000.000												0,00	1	59.600.000	12,50	4,97	DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	899.999.600				200.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	1.220.000.000				250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)**	**Orang**	**0**	**6.951.999.800**	**389**	**73.639.700**		**1.809.000.000**												**0,00**	**389**	**73.639.700**	**0,00**	**1,06**	**DINAS PARIWISATA**
		3.26.04.1.01	***Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif***	***Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya***	***undefined***	***400***	***3.029.999.900***				***700.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***DINAS PARIWISATA***
		3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar	Laporan	17	1.200.000.000				300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	4	450.000.000				100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	10	1.379.999.900				300.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02	***Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif***	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI***	***%***	***90***	***3.921.999.900***		***73.639.700***		***1.109.000.000***												***0,00***	***0***	***73.639.700***		***1,88***	***DINAS PARIWISATA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728											0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																						SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	12	800.000.000			200.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	9	900.000.000			300.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	1.154.000.000			297.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	453.000.000			112.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	200.000.000			100.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	414.999.900	2	73.639.700	100.000.000											0,00	2	73.639.700	40,00	17,74	DINAS PARIWISATA
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)**	**Orang**	**0**	**16.779.500.000**	**4.565**	**1.368.687.000**	**3.626.000.000**											**0,00**	**4.565**	**1.368.687.000**	**0,00**	**8,16**	**DINAS PARIWISATA**
		3.26.05.1.01	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan***	***Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata***	***Orang***	***2.750***	***12.342.000.000***	***125***	***402.000.000***	***2.626.000.000***											***0,00***	***125***	***402.000.000***	***4,55***	***3,26***	***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata	***Orang***	***1.875***		***325***														***325***		***17,33***		***DINAS PARIWISATA***
		3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	330	3.214.000.000			656.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	680	2.240.000.000			545.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	740	1.985.000.000			375.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	1.875	4.053.000.000	115	402.000.000	800.000.000											0,00	115	402.000.000	6,13	9,92	DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926	85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																								
		3.26.05.1.01.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	90	450.000.000				150.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	undefined	2	400.000.000				100.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.02	***Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih***	***Orang***	***360***	***4.437.500.000***	***225***	***966.687.000***		***1.000.000.000***												***0,00***	***225***	***966.687.000***	***62,50***	***21,78***	***DINAS PARIWISATA***
				Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf	***Orang***	***400***																	***0***				***DINAS PARIWISATA***
		3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	1.000	2.700.000.000				600.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	345	1.737.500.000	225	966.687.000		400.000.000												0,00	225	966.687.000	65,22	55,64	DINAS PARIWISATA
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**0**	**58.382.945.131**	**88,85**	**10.457.469.121**		**11.996.487.728**	**81,83**								**81,83**		**0,00**	**0,00**	**170,68**	**10.457.469.121**	**0,00**	**17,91**	**DINAS PARIWISATA**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***784.000.000***	***100***	***26.273.441***		***168.000.000***												***0,00***	***50***	***26.273.441***	***50,00***	***3,35***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	371.400.000	3	8.706.396		74.000.000												0,00	3	8.706.396	15,00	2,34	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	138.200.000	3	9.977.866		31.000.000												0,00	3	9.977.866	12,50	7,22	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	274.400.000	3	7.589.179		63.000.000												0,00	3	7.589.179	12,50	2,77	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***46.969.398.521***	***100***	***9.330.441.684***		***9.256.700.000***												***0,00***	***50***	***9.330.441.684***	***50,00***	***19,86***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	46.682.168.521	74	9.281.499.083		9.200.000.000												0,00	74	9.281.499.083	101,37	19,88	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	202.600.000	1	37.500.000		40.000.000												0,00	1	37.500.000	16,67	18,51	DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	11.130.000	1	1.500.000		2.200.000												0,00	1	1.500.000	16,67	13,48	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	108	73.500.000	18	9.942.601		14.500.000												0,00	18	9.942.601	16,67	13,53	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***146.200.000***	***100***	***25.349.943***		***29.400.000***												***0,00***	***50***	***25.349.943***	***50,00***	***17,34***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	60.000.000	1	8.549.943		12.000.000												0,00	1	8.549.943	16,67	14,25	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	86.200.000	1	16.800.000		17.400.000												0,00	1	16.800.000	16,67	19,49	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***2.391.847.100***	***100***	***96.100.909***		***559.820.000***												***0,00***	***50***	***96.100.909***	***50,00***	***4,02***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	37	59.992.000	1	2.896.000		12.000.000												0,00	1	2.896.000	2,70	4,83	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	300.355.100	1	3.765.000		60.000.000												0,00	1	3.765.000	20,00	1,25	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.000.000	1	5.935.192		7.000.000												0,00	1	5.935.192	20,00	16,96	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	208.789.000	3	6.956.434		43.560.000												0,00	3	6.956.434	30,00	3,33	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	36.643.000	1	137.000		7.260.000												0,00	1	137.000	6,67	0,37	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.320.318.000	2	70.861.183		300.000.000												0,00	2	70.861.183	20,00	5,37	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	160.000.000	1	5.550.100		40.000.000												0,00	1	5.550.100	12,50	3,47	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	270.750.000	0			90.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***1.426.768.250***	***100***	***17.950.000***		***630.175.000***												***0,00***	***50***	***17.950.000***	***50,00***	***1,26***	***DINAS PARIWISATA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728											0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																						SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000				400.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	131	750.768.250	9	4.900.000		170.175.000												0,00	9	4.900.000	6,87	0,65	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	276.000.000	19	13.050.000		60.000.000												0,00	19	13.050.000	67,86	4,73	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***4.252.287.660***	***100***	***765.035.829***		***845.412.728***												***0,00***	***50***	***765.035.829***	***50,00***	***17,99***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	19	168.001.000	2	3.400.000		39.000.000												0,00	2	3.400.000	10,53	2,02	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18	1.236.521.250	4	142.555.829		242.000.000												0,00	4	142.555.829	22,22	11,53	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	2.847.765.410	2	619.080.000		564.412.728												0,00	2	619.080.000	15,38	21,74	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***2.412.443.600***	***100***	***196.317.315***		***506.980.000***												***0,00***	***50***	***196.317.315***	***50,00***	***8,14***	***DINAS PARIWISATA***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	182.499.500	3,2	15.965.000		36.300.000												0,00	3,2	15.965.000	320,00	8,75	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	275.250.000	22	20.050.000		60.000.000												0,00	22	20.050.000	169,23	7,28	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	1.086.752.600	36	115.335.100		214.370.000												0,00	36	115.335.100	300,00	10,61	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	379	56.156.000	40	6.500.000		13.310.000												0,00	40	6.500.000	10,55	11,57	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	341	321.785.500	100	18.475.000		73.000.000												0,00	100	18.475.000	29,33	5,74	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	490.000.000	3	19.992.215		110.000.000												0,00	3	19.992.215	300,00	4,08	DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)							384.448.556.569		33.461.673.926		85.618.387.728									0,00		0,00	0,00		33.461.673.926	239,94	8,70	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Diversifikasi dan Bervariasinya destinasi wisata di DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengeksplor destinasi wisata baru di DIY 2. Pengaruh media sosial, dengan viralnya destinasi wisata baru baik destinasi wisata alam, kuliner menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata baru tersebut 3. Mulai banyaknya event sport tourism di DIY yang bertaraf nasional maupun internasional, selain diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending money wisatawan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara berefek pada berbagai sektor, termasuk anggaran OPD yang berdampak pada kurang efektifitasnya pelayanan publik, misal di Dispar untuk Edukasi HKI dihilangkan,. 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi. Walaupun sudah mulai menunjukkan angka kunjungan wisatawan yang naik namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggalnya. Begitu pula dengan jumlah kunjungan 3. Wisata pendidikan yang bersifat mass tourism walaupun pergerakannya tinggi, khususnya yang berasal dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Jawa Barat kebanyakan tidak menginap, sehingga tidak berdampak terhadap LoS wisnus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Berkolaborasi dengan semua elemen pariwisata, termasuk swasta untuk menciptakan event yang tidak hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan namun dapat menaikkan lama tinggal dan jumlah belanjanya, misalnya dengan menggalakkan event sport tourism, event musik bertaraf internasional. Dispar DIY berkontribusi melalui promosi melalui media sosialnya 2. Melaksanakan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan pada dokumen penganggaran dinas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	3.99	7.92
2 Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	0.21	1.37
3 Kategori RB Perangkat Daerah	89.59	97.45
4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96.4	95.66
5 Persentase daerah rentan rawan pangan	3.85	0.0000000001

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang**																											
2	**Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (Perkebunan)**	**ha**	**0**	**23.408.030.000**	**167,5**	**1.556.674.162**		**5.590.000.000**	**243,5**								**243,5**		**0,00**	**0,00**	**411**	**1.556.674.162**	**0,00**	**6,65**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (BPTP)	**Ha**	**0**		**167,5**														**167,5**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (bp3mbtp)	**Ha**	**0**		**89,35**				**243,5**								**243,5**		**0,00**		**332,85**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian***	***SRS***	***4***	***23.408.030.000***	***4***	***1.556.674.162***		***5.590.000.000***												***0,00***	***4***	***1.556.674.162***	***100,00***	***6,65***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
				Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	***kelompok***	***0***																		***0***				***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	20	6.098.030.000	1	294.592.000		1.350.000.000												0,00	1	294.592.000	5,00	4,83	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	24	5.750.000.000	3	621.491.462		1.450.000.000												0,00	3	621.491.462	12,50	10,81	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	dokumen	28	7.460.000.000	3	640.590.700		1.790.000.000												0,00	3	640.590.700	10,71	8,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	dokumen	4	4.100.000.000				1.000.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Tanaman Pangan)**	**%**	**0**	**132.794.683.450**	**98,61**	**20.447.998.788**		**26.780.000.000**	**98,61**								**98,61**		**0,00**	**0,00**	**98,61**	**20.447.998.788**	**0,00**	**15,40**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Peternakan)	**%**	**0**		**98,61**				**98,61**								**98,61**		**0,00**		**98,61**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Tanaman Pangan)	**%**	**0**		**100,5**				**0,00000001**								**0,00000001**		**0,00**		**50,250000005**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Peternakan)	**%**	**0**		**100,5**				**0,0000001**								**0,0000001**		**0,00**		**50,25000005**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	**%**	**0**		**3,09**				**0,3**								**0,3**		**0,00**		**1,695**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	**%**	**0**		**93,69**				**93,69**								**93,69**		**0,00**		**93,69**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Hortikultura)	**%**	**0**		**100,5**				**0,000001**								**0,000001**		**0,00**		**50,2500005**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Perkebunan)	**%**	**0**		**393,93**				**98,61**								**98,61**		**0,00**		**246,27**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Hortikultura)	**%**	**0**		**98,61**				**98,61**								**98,61**		**0,00**		**98,61**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.27.02.1.01	***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***	***Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian***	***kabupaten***	***4***	***20.047.075.700***		***3.388.303.312***		***4.025.000.000***											***0,00***	***0***	***3.388.303.312***		***16,90***	***DINAS PERTANIAN DAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
																											KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	10	656.790.000	1	135.295.500		125.000.000											0,00	1	135.295.500	10,00	20,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	dokumen	27	19.390.285.700	7	3.253.007.812		3.900.000.000											0,00	7	3.253.007.812	25,93	16,78	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.02	***Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman***	***Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman***	***kabupaten/kota***	***5***	***8.835.232.850***		***111.038.200***		***1.755.000.000***											***0,00***	***0***	***111.038.200***		***1,26***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	lembar	696	644.010.800	138	111.038.200		130.000.000											0,00	138	111.038.200	19,83	17,24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	laporan	10	2.524.777.350				500.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	dokumen	10	5.204.458.500				1.030.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	laporan	10	461.986.200				95.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.04	***Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi***	***Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat***	***ekor***	***355***	***103.912.374.900***		***16.948.657.276***		***21.000.000.000***											***0,00***	***0***	***16.948.657.276***		***16,31***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
				Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan	***kelompok***	***942***																	***0***				***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	dokumen	5	86.471.402.900	4	16.948.657.276		17.500.000.000											0,00	4	16.948.657.276	80,00	19,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	laporan	5	17.440.972.000				3.500.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp		
			Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																								KETAHANAN PANGAN
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Tanaman Pangan)**	**%**	**0**	**32.039.364.900**	**16,67**	**4.996.651.742**	**2.375.000.000**											**0,00**	**8,335**	**4.996.651.742**	**0,00**	**15,60**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Perkebunan)	**%**	**0**		**16,67**														**8,335**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (BP3MBTP)	**%**	**0**		**16,67**														**8,335**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.27.03.1.01	***Penataan Prasarana Pertanian***	***Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian***	***kabupaten***	***4***	***32.039.364.900***	***4***	***4.996.651.742***	***2.375.000.000***											***0,00***	***4***	***4.996.651.742***	***100,00***	***15,60***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	5	872.418.300			175.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	dokumen	5	11.118.069.600	1	1.773.631.800	2.200.000.000											0,00	1	1.773.631.800	20,00	15,95	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	unit	11	20.048.877.000	10	3.223.019.942	0											0,00	10	3.223.019.942	90,91	16,08	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (Peternakan)**	**- %**	**0**	**6.818.890.700**	**13,86**	**1.206.597.700**	**1.322.000.000**	**6,44**								**6,44**		**0,00**	**0,00**	**20,3**	**1.206.597.700**	**0,00**	**17,69**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (BPPTDK)	**- %**	**0**		**13,86**			**6,44**								**6,44**		**0,00**		**20,3**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.27.04.1.01	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular***	***kabupaten/kota***	***5***	***512.920.000***	***5***		***80.000.000***											***0,00***	***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																									
		3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	5	512.920.000				80.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.02	***Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi***	***Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah***	***kabupaten/kota***	***5***	***3.256.171.000***	***5***			***632.500.000***											***0,00***	***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	5	301.171.000				52.500.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	5	2.955.000.000				580.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.03	***Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan***	***Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***sampel***	***96.220***	***2.984.000.000***		***1.206.597.700***		***596.000.000***											***0,00***	***0***	***1.206.597.700***		***40,44***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	5	2.984.000.000	3	1.206.597.700		596.000.000											0,00	3	1.206.597.700	60,00	40,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.05	***Kesejahteraan Hewan***	***Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan***	***kabupaten/kota***	***5***	***65.799.700***	***5***			***13.500.000***											***0,00***	***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	lembar	10	65.799.700	2			13.500.000											0,00	2		20,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditang**	**%**	**0**	**541.096.630**	**87,1**	**41.452.000**		**75.096.630**	**83,23**								**83,23**		**0,00**	**0,00**	**85,165**	**41.452.000**	**0,00**	**7,66**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.27.05.1.01	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***	***Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan***	***sub sektor***	***3***	***541.096.630***	***3***	***41.452.000***		***75.096.630***											***0,00***		***3***	***41.452.000***	***100,00***	***7,66***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	hektar	3.425	541.096.630	700	41.452.000		75.096.630											0,00		700	41.452.000	20,44	7,66	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)**	**%**	**0**	**16.340.431.362**	**68,61**	**2.367.564.400**		**3.281.498.500**	**66,1**								**66,1**		**0,00**	**0,00**	**67,355**	**2.367.564.400**	**0,00**	**14,49**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.27.07.1.01	***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***	***Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***	***kabupaten/kota***	***5***	***833.000.700***	***5***			***107.688.500***											***0,00***		***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	orang	870	733.000.700				107.688.500											0,00		0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	60	100.000.000				0											0,00		0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.02	***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***	***Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***	***kabupaten/kota***	***5***	***15.352.429.662***	***5***	***2.367.564.400***		***3.100.000.000***											***0,00***		***5***	***2.367.564.400***	***100,00***	***15,42***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	5	14.788.921.162	2	2.230.890.400		3.000.000.000											0,00		2	2.230.890.400	40,00	15,08	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	174	563.508.500	45	136.674.000		100.000.000											0,00		45	136.674.000	25,86	24,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.03	***Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan***	***Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya***	***unit***	***10***	***155.001.000***				***73.810.000***											***0,00***		***0***			***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	laporan	2	155.001.000				73.810.000											0,00		0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor**	**0**	**301.866.292.355**	**91,75**	**48.124.641.865**	**60.561.857.728**	**82,16**								**82,16**		**0,00**	**0,00**	**173,91**	**48.124.641.865**	**0,00**	**15,94**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BP3MBTP)	**Nilai**	**0**		**93,35**			**84,16**								**84,16**		**0,00**		**177,51**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPPTDK)	**Nilai**	**0**		**93,92**			**84,16**								**84,16**		**0,00**		**178,08**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat***	***%***	***100***	***451.763.700***	***100***	***53.842.100***	***89.537.000***											***0,00***	***50***	***53.842.100***	***50,00***	***11,92***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24	180.576.400	3	17.845.000	35.789.000											0,00	3	17.845.000	12,50	9,88	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	24	113.524.100	4	16.197.800	22.500.000											0,00	4	16.197.800	16,67	14,27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	157.663.200	3	19.799.300	31.248.000											0,00	3	19.799.300	20,00	12,56	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***263.490.171.558***	***100***	***42.079.931.000***	***53.179.113.035***											***0,00***	***50***	***42.079.931.000***	***50,00***	***15,97***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	386	262.586.531.558	386	41.947.175.000	53.000.017.035											0,00	386	41.947.175.000	100,00	15,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15	823.086.000	3	122.250.000	163.131.000											0,00	3	122.250.000	20,00	14,85	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	80.554.000	1	10.506.000	15.965.000											0,00	1	10.506.000	20,00	13,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116	112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***531.873.000***	***100***	***87.120.000***		***105.415.000***											***0,00***	***50***	***87.120.000***	***50,00***	***16,38***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	15	531.873.000	3	87.120.000		105.415.000											0,00	3	87.120.000	20,00	16,38	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***206.485.000***	***100***	***10.260.730***		***40.924.000***											***0,00***	***50***	***10.260.730***	***50,00***	***4,97***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	25	206.485.000	1	10.260.730		40.924.000											0,00	1	10.260.730	4,00	4,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***2.299.820.300***	***100***	***169.688.539***		***472.380.000***											***0,00***	***50***	***169.688.539***	***50,00***	***7,38***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	275.171.100	3	14.455.105		54.537.000											0,00	3	14.455.105	20,00	5,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15	617.517.600	3	39.332.179		122.389.000											0,00	3	39.332.179	20,00	6,37	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	70.433.500	2	5.879.450		13.959.000											0,00	2	5.879.450	20,00	8,35	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	457.175.900	3	34.913.025		90.610.000											0,00	3	34.913.025	20,00	7,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	15	80.149.200				15.885.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	799.373.000	3	75.108.780		175.000.000											0,00	3	75.108.780	20,00	9,40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858										0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100	15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah***	***%***	***100***	***2.310.985.900***	***100***	***6.261.960***		***175.000.000***											***0,00***	***50***	***6.261.960***	***50,00***	***0,27***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	600.000.000				0											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	350.000.000				0											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	28	150.000.000	3	6.077.700		75.000.000											0,00	3	6.077.700	10,71	4,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	758.761.000				0											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	28	452.224.900	1	184.260		100.000.000											0,00	1	184.260	3,57	0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***22.993.531.866***	***100***	***4.552.732.873***		***4.583.925.141***											***0,00***	***50***	***4.552.732.873***	***50,00***	***19,80***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	15	14.651.000	2	1.495.000		2.904.000											0,00	2	1.495.000	13,33	10,20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	15	6.574.120.475	3	1.171.345.159		1.307.866.000											0,00	3	1.171.345.159	20,00	17,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	15	16.404.760.391	3	3.379.892.714		3.273.155.141											0,00	3	3.379.892.714	20,00	20,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan***	***%***	***100***	***9.581.661.031***	***100***	***1.164.804.663***		***1.915.563.552***											***0,00***	***50***	***1.164.804.663***	***50,00***	***12,16***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	10	418.625.000	2	65.872.300		82.969.000											0,00		2	65.872.300	20,00	15,74	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	607	628.340.800	55			107.682.000											0,00		55		9,06	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1.040	5.883.603.331	219	1.016.686.296		1.174.912.552											0,00		219	1.016.686.296	21,06	17,28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	427	707.209.000	45	81.511.067		150.000.000											0,00		45	81.511.067	10,54	11,53	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	1.943.882.900	5	735.000		400.000.000											0,00		5	735.000	41,67	0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	**Terwujudnya ketahanan pangan**	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)**	**kkal/kap/hari**	**0**	**3.807.592.000**	**14.940**	**815.598.300**		**675.000.000**	**3.735**								**3.735**		**0,00**	**0,00**	**18.675**	**815.598.300**	**0,00**	**21,42**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	**kkal/kap/hari**	**0**		**8.174**				**2.015**								**2.015**		**0,00**		**10.189**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.03.1.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	***Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya***	***tahun***	***1***	***2.404.000.000***	***1***	***513.179.300***		***375.000.000***											***0,00***	***1***	***513.179.300***	***100,00***	***21,35***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	30	696.000.000				150.000.000											0,00		0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	13	1.708.000.000	1	513.179.300		225.000.000											0,00		1	513.179.300	7,69	30,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.04	***Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan***	***Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian***	***kg/kapita/tahun***	***10,6***	***1.403.592.000***	***10,5***	***302.419.000***		***300.000.000***											***0,00***	***10,5***	***302.419.000***	***99,06***	***21,55***	***DINAS PERTANIAN DAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
			Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi																									***KETAHANAN PANGAN***
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen	5	315.277.100	2	278.928.000		50.000.000												0,00	2	278.928.000	40,00	88,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	laporan	5	1.038.314.900				250.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	1	50.000.000	1	23.491.000		0												0,00	1	23.491.000	100,00	46,98	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)**	**%**	**0**	**713.030.000**	**94,32**	**16.208.000**		**113.250.000**	**94,32**								**94,32**		**0,00**	**0,00**	**94,32**	**16.208.000**	**0,00**	**2,27**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.04.1.01	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi***	***Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan***	***dokumen***	***22***	***215.750.000***	***5***	***16.208.000***		***50.000.000***												***0,00***	***5***	***16.208.000***	***22,73***	***7,51***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	dokumen	25	215.750.000	5	16.208.000		50.000.000												0,00	5	16.208.000	20,00	7,51	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04.1.02	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi***	***Penanganan Kerawanan Pangan***	***kabupaten/kota***	***5***	***497.280.000***	***5***			***63.250.000***												***0,00***	***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	dokumen	5	497.280.000				63.250.000												0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)**	**%**	**0**	**819.900.000**	**80,84**			**170.000.000**	**80,84**								**80,84**		**0,00**	**0,00**	**80,84**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.05.1.01	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar***	***kabupaten/kota***	***5***	***819.900.000***	***5***			***170.000.000***												***0,00***	***5***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	dokumen	5	223.800.000				50.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	lembar	25	278.400.000				60.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5	317.700.000	1			60.000.000											0,00	1		20,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Ketahanan Pangan)**	**%**	**0**	**60.237.936.100**	**90,78**	**8.484.164.159**		**11.312.638.000**	**24,6**								**24,6**		**0,00**	**0,00**	**57,69**	**8.484.164.159**	**0,00**	**14,08**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Tanaman Pangan)	**%**	**0**		**90,78**														**45,39**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPSDMP)	**%**	**0**		**24,6**														**12,3**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Hortikultura)	**%**	**0**		**90,78**				**24,6**								**24,6**		**0,00**		**57,69**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Peternakan)	**%**	**0**		**24,6**				**24,6**								**24,6**		**0,00**		**24,6**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPPTDK)	**%**	**0**						**24,6**								**24,6**		**0,00**		**12,3**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (BPTP)	**%**	**0**						**24,6**								**24,6**		**0,00**		**12,3**		**0,00**		**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan***	***objek***	***2***	***7.889.700.000***	***1***	***2.978.894.305***		***1.870.000.000***											***0,00***	***1***	***2.978.894.305***	***50,00***	***37,76***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	1	7.889.700.000	2	2.978.894.305		1.870.000.000											0,00	2	2.978.894.305	200,00	37,76	DINAS PERTANIAN DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												KETAHANAN PANGAN
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan***	***jenis***	***5***	***52.348.236.100***	***5***	***5.505.269.854***		***9.442.638.000***											***0,00***	***5***	***5.505.269.854***	***100,00***	***10,52***	***DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN***
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	72	47.797.886.100	24	5.505.269.854		8.013.138.000											0,00	24	5.505.269.854	33,33	11,52	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	18	4.550.350.000				1.429.500.000											0,00	0			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							579.387.247.497		88.057.551.116		112.256.340.858									0,00		0,00	0,00		88.057.551.116	24,16	15,20	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	3	
2 Produktivitas tenaga kerja industri	0	0
3 Kategori RB Perangkat Daerah	2	
4 Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5.38	
5 Nilai Ekspor Tahun n	0	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya industri pengolahan**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina**	**Sentra**	**3**	**6.500.000.000**	**1**	**1.536.884.157**		**1.500.000.000**											**0,00**		**1**	**1.536.884.157**	**33,33**	**23,64**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis***	***Dokumen***	***9***	***6.500.000.000***	***1***	***1.536.884.157***		***1.500.000.000***											***0,00***		***1***	***1.536.884.157***	***11,11***	***23,64***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	3.000.000.000				1.000.000.000											0,00		0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	2.000.000.000	1	1.536.884.157		500.000.000											0,00		1	1.536.884.157	33,33	76,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	undefined	2	1.500.000.000				0											0,00		0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan**	**Rp Triliun**	**14,84**	**92.924.702.000**	**14,87**	**11.996.421.151**		**19.500.000.000**											**0,00**		**14,87**	**11.996.421.151**	**100,20**	**12,91**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	**Triliun**	**0**		**0**												**0**				**0**				**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***%***	***100***	***19.000.000.000***	***100***	***4.144.090.397***		***6.000.000.000***											***0,00***		***50***	***4.144.090.397***	***50,00***	***21,81***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	undefined	7	19.000.000.000	3	4.144.090.397		6.000.000.000											0,00		3	4.144.090.397	42,86	21,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan***	***IKM***	***31.545***	***73.924.702.000***	***6.200***	***7.852.330.754***		***13.500.000.000***											***0,00***		***6.200***	***7.852.330.754***	***19,65***	***10,62***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	31.545	73.924.702.000	6.200	7.852.330.754		13.500.000.000											0,00		6.200	7.852.330.754	19,65	10,62	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah tenaga kerja di sektor Industri**	**Orang**	**415.000**	**24.242.934.750**	**373.480**	**23.456.790.941**		**3.600.000.000**											**0,00**	**373.480**	**23.456.790.941**	**90,00**	**96,76**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	**%**	**89,5**		**85**														**42,5**		**47,49**		**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.31.02.1.01	***Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi***	***Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi***	***Dokumen***	***3***	***24.242.934.750***	***3***	***23.456.790.941***		***3.600.000.000***											***0,00***	***3***	***23.456.790.941***	***100,00***	***96,76***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	4.050.000.000	1	21.000.000		1.000.000.000											0,00	1	21.000.000	100,00	0,52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	2.955.957.600	1	719.248.456		600.000.000											0,00	1	719.248.456	100,00	24,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	17.236.977.150	1	22.716.542.485		2.000.000.000											0,00	1	22.716.542.485	25,00	131,79	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin**	**Perusahaan**	**18.043**	**80.000.000**	**23.582**			**20.000.000**											**0,00**	**23.582**		**130,70**	**0,00**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.31.03.1.01	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi***	***Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait***	***%***	***40***	***80.000.000***	***37***			***20.000.000***											***0,00***	***18,5***		***46,25***	***0,00***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	4	40.000.000				10.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di	Dokumen	4	40.000.000				10.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi																							DAN PERDAGANGAN
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS**	**Perusahaan**	**900**	**704.483.400**	**2.552**	**1.000.000**		**140.000.000**											**0,00**		**2.552**	**1.000.000**	**283,56**	**0,14**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.31.04.1.01	***Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)***	***Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS***	***Orang***	***925***	***704.483.400***	***200***	***1.000.000***		***140.000.000***											***0,00***		***200***	***1.000.000***	***21,62***	***0,14***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	704.483.400	1	1.000.000		140.000.000											0,00		1	1.000.000	100,00	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**%**	**100**	**500.000.000**	**60**	**774.098.588**		**50.000.000**											**0,00**		**30**	**774.098.588**	**30,00**	**154,82**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***500.000.000***		***774.098.588***		***50.000.000***											***0,00***		***0***	***774.098.588***		***154,82***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	undefined	4	500.000.000	1	774.098.588		50.000.000											0,00		1	774.098.588	25,00	154,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor**	**85**	**125.510.975.157**	**95,47**	**17.334.219.402**		**25.480.035.000**											**0,00**		**95,47**	**17.334.219.402**	**112,32**	**13,81**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.***	***%***	***100***	***616.040.400***	***100***	***84.896.600***		***122.000.000***											***0,00***		***50***	***84.896.600***	***50,00***	***13,78***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	326.098.000	2	68.270.000		65.000.000											0,00		2	68.270.000	50,00	20,94	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	125.940.000	2	3.329.100		25.000.000											0,00		2	3.329.100	50,00	2,64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	164.002.400	3	13.297.500		32.000.000											0,00		3	13.297.500	100,00	8,11	DINAS PERINDUSTRIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***92.976.736.407***	***100***	***14.569.974.357***	***18.723.115.000***												***0,00***	***50***	***14.569.974.357***	***50,00***	***15,67***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	139	91.963.415.407	128	14.508.154.357	18.500.000.000												0,00	128	14.508.154.357	92,09	15,78	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	464.882.000			113.135.000												0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	354.900.000	11	59.820.000	70.980.000												0,00	11	59.820.000	91,67	16,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	107.764.100	1	1.000.000	22.000.000												0,00	1	1.000.000	100,00	0,93	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	85.774.900	18	1.000.000	17.000.000												0,00	18	1.000.000	100,00	1,17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***234.115.000***	***100***	***58.243.473***	***47.000.000***												***0,00***	***50***	***58.243.473***	***50,00***	***24,88***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	234.115.000	12	58.243.473	47.000.000												0,00	12	58.243.473	92,31	24,88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***3.005.739.300***	***100***	***134.344.104***	***637.890.000***												***0,00***	***50***	***134.344.104***	***50,00***	***4,47***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	167.678.100	2	1.394.777	33.000.000												0,00	2	1.394.777	11,76	0,83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	271.184.000	2	10.437.973	54.000.000												0,00	2	10.437.973	200,00	3,85	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	160.610.400	2	1.350.813	32.000.000												0,00	2	1.350.813	200,00	0,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	36.015.000	1	1.475.800	7.203.000												0,00	1	1.475.800	25,00	4,10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	21	517.620.000	2	10.414.248	110.000.000												0,00	2	10.414.248	9,52	2,01	DINAS PERINDUSTRIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penggandaan	Disediakan																								DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	75.868.800	23	2.566.548		17.100.000												0,00	23	2.566.548	1.150,00	3,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.220.477.000	2	106.080.945		264.937.000												0,00	2	106.080.945	200,00	8,69	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	556.286.000	1	623.000		119.650.000												0,00	1	623.000	100,00	0,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***12.755.931.300***	***100***	***2.039.940***		***2.872.030.000***												***0,00***	***50***	***2.039.940***	***50,00***	***0,02***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	5.000.000.000				1.000.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.700.000.000				600.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	200.000.000	1	391.941		50.000.000												0,00	1	391.941	14,29	0,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	727.811.300	1	1.000.000		140.000.000												0,00	1	1.000.000	7,69	0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	4	2.600.000.000				700.000.000												0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	400.000.000	1			100.000.000												0,00	1		12,50	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1.128.120.000	1	647.999		282.030.000												0,00	1	647.999	5,56	0,06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***13.590.556.200***	***100***	***2.222.923.361***		***2.640.000.000***												***0,00***	***50***	***2.222.923.361***	***50,00***	***16,36***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.397.565.000	2	755.642.061		1.200.000.000												0,00	2	755.642.061	66,67	11,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.192.991.200	2	1.467.281.300		1.440.000.000												0,00	2	1.467.281.300	50,00	20,40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***2.331.856.550***	***100***	***261.797.567***		***438.000.000***												***0,00***	***50***	***261.797.567***	***50,00***	***11,23***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	189.833.400	1	31.973.800		38.000.000												0,00	1	31.973.800	100,00	16,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	303.940.000	1	200.000		60.000.000												0,00	1	200.000	5,26	0,07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	200.000.000	1	11.714.000		50.000.000												0,00	1	11.714.000	12,50	5,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	873.238.750	18	214.413.767		135.000.000												0,00	18	214.413.767	52,94	24,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	42.000.000	1	1.000.000		10.000.000												0,00	1	1.000.000	33,33	2,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	225.844.400	2	1.496.000		45.000.000												0,00	2	1.496.000	10,53	0,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	497.000.000	1	1.000.000		100.000.000												0,00	1	1.000.000	50,00	0,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri**	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah Perusahaan Ekspor**	**Perusahaan**	**635**	**199.788.700**	**565**	**9.621.847**		**40.000.000**												**0,00**	**565**	**9.621.847**	**88,98**	**4,82**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.02.1.04	***Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)***	***Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu***	***%***	***99***	***199.788.700***	***94***	***9.621.847***		***40.000.000***												***0,00***	***47***	***9.621.847***	***47,47***	***4,82***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	137.800	199.788.700	1	9.621.847		40.000.000												0,00	1	9.621.847	0,00	4,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**%**	**90**	**3.687.883.900**	**100**	**1.848.788.356**		**743.000.000**												**0,00**	**50**	**1.848.788.356**	**55,56**	**50,13**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Inflasi Pangan Bergejolak	**%**	**0**																		**0**				**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.04.1.02	***Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan***	***Jumlah jenis barang yang dipantau***	***undefined***	***25***	***3.687.883.900***	***25***	***1.848.788.356***		***743.000.000***											***0,00***	***25***	***1.848.788.356***	***100,00***	***50,13***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	5	340.613.300	1	991.250		68.000.000											0,00	1	991.250	20,00	0,29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	3.347.270.600	1	1.847.797.106		675.000.000											0,00	1	1.847.797.106	20,00	55,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru**	**%**	**20**	**4.190.212.000**	**46,2**	**72.151.740**		**990.000.000**											**0,00**	**23,1**	**72.151.740**	**115,50**	**1,72**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.05.1.01	***Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi***	***Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina***	***%***	***2.015***	***4.190.212.000***	***371***	***72.151.740***		***990.000.000***											***0,00***	***185,5***	***72.151.740***	***9,21***	***1,72***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	490	2.800.000.000	20	71.165.690		700.000.000											0,00	20	71.165.690	4,08	2,54	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	540.000.000	1	986.050		120.000.000											0,00	1	986.050	3,33	0,18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	1.495	850.212.000				170.000.000											0,00	0			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard**	**%**	**97,5**	**1.651.336.300**	**99,94**	**171.385.481**		**330.000.000**											**0,00**	**49,97**	**171.385.481**	**51,25**	**10,38**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
				Persentase penanganan sengketa konsumen	**%**	**99**		**100**														**50**		**50,51**		**DINAS PERINDUSTRIAN**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN PERDAGANGAN
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	**%**	**0**																		**0**				**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.06.1.01	***Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani***	***undefined***	***125***	***1.501.334.300***	***30***	***171.385.481***		***300.000.000***												***0,00***	***30***	***171.385.481***	***24,00***	***11,42***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	125	1.501.334.300	24	171.385.481		300.000.000												0,00	24	171.385.481	19,20	11,42	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.03	***Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah jenis barang yang dipantau***	***undefined***	***25***	***150.002.000***	***25***			***30.000.000***												***0,00***	***25***		***100,00***	***0,00***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	150.002.000	1			30.000.000												0,00	1		100,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina**	**Rp Milyar**	**2,74**	**6.775.000.000**	**3,19**	**191.207.993**		**1.250.000.000**												**0,00**	**3,19**	**191.207.993**	**116,42**	**2,82**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.07.1.02	***Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN***	***IKM***	***65***	***6.775.000.000***	***50***	***191.207.993***		***1.250.000.000***												***0,00***	***50***	***191.207.993***	***76,92***	***2,82***	***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
		3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	2.590	6.775.000.000		191.207.993		1.250.000.000												0,00	0	191.207.993		2,82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						266.967.316.207		57.392.569.656		53.643.035.000									0,00		0,00	0,00		57.392.569.656	64,48	21,50	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	a. Tumbuhnya IKM seiring dengan meningkatnya permintaan produk-produk khas Ramadhan dan persiapan lebaran diantaranya komoditi pangan dan sandang, serta kendaraan bermotor. b. Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN. c. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis. d. Peningkatan pemanfatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal. e. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi. f. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi. g. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global h. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya: o Indonesia-chile o Indonesia- Uni Emirat Arab o Indo -Mozambik o Indo-australia o Indo-Hongkong i. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk j. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya: o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online o Diperbolehkan nya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha) k. Penambahan rute penerbangan internasional dari bandara YIA seperti Thailand, Malaysia, Australia, dan India l. Kebijakan macro prudential berupa pengetatan persyaratan modal dari Bank Indonesia untuk sektor prioritas, salah satunya industri dan perdagangan. m. Pelaksanaan program makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman n. Melemahnya harga dolar yang menyebabkan kenaikan harga impor bahan baku
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	a. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. b. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. c. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dari negara pengimpor seperti diberlakukannya EUDR di negara-negara Eropa. d. Mahalnya harga transportasi pengiriman terutama ke eropa karena tidak bisa melewati laut merah e. Menurunnya aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) akibat dari efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak terhadap penurunan permintaan akan produk-produk yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. f. kelangkaan gas elpiji 3 kg yang digunakan oleh IKM dalam berproduksi membuat produksi menjadi terhambat. g. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakukan regulasi anti deforestasi (Europe Union Deforestation Regulation/EUDR) h. Situasi global yang kurang kondusif sehingga pasar ekspor cukup lesu mengakibatkan persaingan kualitas produk inovasi, teknologi, standarisasi, dan lain-lain menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. i. Penurunan permintaan ekspor khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY. j. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dr neg pengimpor k. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas. l. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor m. Melemahnya harga dolar sehingga menaikkan volume ekspor barang n. Kelangkaan elpiji 3 kg akibat dari perubahan kebijakan distribusi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Penyelenggaraan fasilitasi promosi dan pemasaran 2. Mendorong pelaku usaha industri untuk memiliki akun SIINas agar dapat mengikuti program-program Pemerintah 3. Mendorong penggunaan alat teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas industri 4. Mendorong pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti proses pengadaan barang jasa Pemerintah. 5. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi TKDN 6. Peningkatan sektor unggulan sentra IKM coklat dan IKM gula semut melalui kegiatan SRS
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM DAN PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Kategori Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Protool Setda DIY	87.8	88.44

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**%**	**100**				**200.000.000**	**22,5**	**45.000.000**							**22,5**	**45.000.000**	**0,00**	**22,50**	**11,25**	**45.000.000**	**11,25**	**0,00**	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***%***	***100***				***200.000.000***		***45.000.000***								***45.000.000***		***22,50***	***0***	***45.000.000***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis							200.000.000		45.000.000								45.000.000		22,50		45.000.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**89**				**16.204.745.860**	**84,86**	**2.036.518.859**							**84,86**	**2.036.518.859**	**0,00**	**12,57**	**42,43**	**2.036.518.859**	**47,67**	**0,00**	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**
		4.01.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***				***12.117.000***		***4.840.113***								***4.840.113***		***39,94***	***0***	***4.840.113***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
Rata-rata capaian kinerja (%)										16.404.745.860		2.081.518.859								0,00	2.081.518.859	0,00	12,69		2.081.518.859	4,91	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Perangkat Daerah																								
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								4.993.000		3.885.113								3.885.113		77,81		3.885.113		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								5.549.000		955.000								955.000		17,21		955.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.575.000												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***					***10.920.500***		***608.350***								***608.350***		***5,57***	***0***	***608.350***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								9.015.000												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								555.500		408.500								408.500		73,54		408.500		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								1.350.000		199.850								199.850		14,80		199.850		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***					***70.597.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								10.500.000												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)											16.404.745.860		2.081.518.859							0,00	2.081.518.859	0,00	12,69		2.081.518.859	4,91	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								60.097.000												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***				***1.426.172.420***		***248.018.926***									***248.018.926***		***17,39***	***0***	***248.018.926***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								120.222.000		120.222.000								120.222.000		100,00		120.222.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								189.388.900		52.240.470								52.240.470		27,58		52.240.470		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								181.891.270		8.252.416								8.252.416		4,54		8.252.416		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								144.591.250		1.461.950								1.461.950		1,01		1.461.950		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								47.004.000		5.700.000								5.700.000		12,13		5.700.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								573.786.000		46.589.599								46.589.599		8,12		46.589.599		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								169.289.000		13.552.491								13.552.491		8,01		13.552.491		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***				***169.210.000***		***15.207.000***									***15.207.000***		***8,99***	***0***	***15.207.000***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
Rata-rata capaian kinerja (%)										16.404.745.860		2.081.518.859								0,00	2.081.518.859	0,00	12,69		2.081.518.859	4,91	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								112.830.000		15.207.000								15.207.000		13,48		15.207.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								56.380.000												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***				***6.102.706.000***		***741.777.628***								***741.777.628***		***12,15***	***0***	***741.777.628***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								7.950.000		654.378								654.378		8,23		654.378		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								3.253.828.000		485.928.250								485.928.250		14,93		485.928.250		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								124.369.000		19.465.000								19.465.000		15,65		19.465.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								2.716.559.000		235.730.000								235.730.000		8,68		235.730.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***				***3.344.889.090***		***348.177.842***								***348.177.842***		***10,41***	***0***	***348.177.842***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								554.866.000		56.156.252								56.156.252		10,12		56.156.252		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)											16.404.745.860		2.081.518.859							0,00	2.081.518.859	0,00	12,69		2.081.518.859	4,91	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								1.314.843.090		200.017.136								200.017.136		15,21		200.017.136		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								260.880.000		21.066.666								21.066.666		8,08		21.066.666		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								1.085.800.000		63.937.788								63.937.788		5,89		63.937.788		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								128.500.000		7.000.000								7.000.000		5,45		7.000.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.13	***Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan***	***Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan***	***%***	***100***				***33.086.000***		***17.726.000***								***17.726.000***		***53,58***	***0***	***17.726.000***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								33.086.000		17.726.000								17.726.000		53,58		17.726.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan								0												0,00				0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.14	***Fasilitasi Keprotokolan***	***Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan***	***%***	***100***				***5.035.047.850***		***660.163.000***								***660.163.000***		***13,11***	***0***	***660.163.000***		***0,00***	***BIRO UMUM DAN PROTOKOL***
		4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara								2.836.211.300		25.055.000								25.055.000		0,88		25.055.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1.484.558.000		582.520.000								582.520.000		39,24		582.520.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan								714.278.550		52.588.000								52.588.000		7,36		52.588.000		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)											16.404.745.860		2.081.518.859						0,00		2.081.518.859	0,00	12,69		2.081.518.859	4,91	inf	
Predikat Kinerja																			SR		SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100	54
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren**	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi**	**%**	**100**	**1.314.140.000**	**35,7**	**161.645.628**		**300.000.000**	**42,86**								**42,86**		**0,00**	**0,00**	**39,28**	**161.645.628**	**39,28**	**12,30**	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
		2.10.11.5.01	***Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan***	***dokumen***	***19***	***1.314.140.000***		***161.645.628***		***300.000.000***												***0,00***	***0***	***161.645.628***		***12,30***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	19	1.314.140.000	5	161.645.628		300.000.000												0,00	5	161.645.628	26,32	12,30	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.10.11.5.03	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan***	***Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten***	***%***	***100***																***nan***	***0***			***0,00***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop	unit	1	0				0											0,00	0			0,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							48.299.155.423		5.077.024.168		6.968.335.445		47.482.663						0,00	47.482.663	0,00	0,68		5.124.506.831	38,80	10,61	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan oleh Biro Tapem dengan Kabupaten/Kota, OPD lintas sektor terkait, instansi vertikal, maupun pusat. 2. SDM yang kompeten 3. Sarana dan pra-sarana yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan berdasarkan Inpres RI No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar adanya efisiensi tidak menghambat proses pencapaian kinerja 2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam Catatan Atas Pelaksanaan APBD status Triwulan 1 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis	unit	1																		0				BIRO TATA PEMERINTAHAN
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer	unit	1																0				BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan**	**%**	**100**	**2.035.029.000**	**300**	**907.539.236**		**500.000.000**												**0,00**	**150**	**907.539.236**	**150,00**	**44,60**	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
		2.22.08.5.01	***Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman***	***Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman***	***undefined***	***100***	***1.800.000.000***		***907.539.236***		***500.000.000***												***0,00***	***0***	***907.539.236***		***50,42***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	dokumen	6	1.800.000.000	3	907.539.236		500.000.000												0,00	3	907.539.236	50,00	50,42	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***%***	***100***	***235.029.000***																***nan***	***0***			***0,00***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	undefined	0	235.029.000				0												0,00	0			0,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah**	**%**	**100**	**22.531.553.050**	**191,67**	**557.584.486**		**1.222.750.000**	**28,57**	**44.968.001**							**28,57**	**44.968.001**	**0,00**	**3,68**	**110,12**	**602.552.487**	**110,12**	**2,67**	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
		4.01.03.1.01	***Pelaksanaan Tugas Pemerintahan***	***Terlaksananya tugas pemerintahan***	***%***	***100***	***19.590.799.900***		***277.206.916***		***592.000.000***												***0,00***	***0***	***277.206.916***		***1,41***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							48.299.155.423		5.077.024.168		6.968.335.445		47.482.663							0,00	47.482.663	0,00	0,68		5.124.506.831	38,80	10,61	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan oleh Biro Tapem dengan Kabupaten/Kota, OPD lintas sektor terkait, instansi vertikal, maupun pusat. 2. SDM yang kompeten 3. Sarana dan pra-sarana yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan berdasarkan Inpres RI No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar adanya efisiensi tidak menghambat proses pencapaian kinerja 2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam Catatan Atas Pelaksanaan APBD status Triwulan 1 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen	17	17.948.800.000	5	230.087.716		192.000.000												0,00	5	230.087.716	29,41	1,28	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dokumen	19	1.641.999.900	1	47.119.200		400.000.000												0,00	1	47.119.200	5,26	2,87	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03.1.02	***Pelaksanaan Otonomi Daerah***	***Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah***	***%***	***100***	***1.450.053.750***		***83.984.010***		***330.750.000***		***44.968.001***								***44.968.001***		***13,60***	***0***	***128.952.011***		***8,89***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan	14	1.450.053.750	2	83.984.010		330.750.000		44.968.001								44.968.001		13,60	2	128.952.011	14,29	8,89	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03.1.03	***Fasilitasi Kerja Sama Daerah***	***Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah***	***%***	***100***	***1.490.699.400***		***196.393.560***		***300.000.000***												***0,00***	***0***	***196.393.560***		***13,17***	***BIRO TATA PEMERINTAHAN***
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	dokumen	0	1.490.699.400	2	196.393.560		300.000.000												0,00	2	196.393.560	0,00	13,17	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.03.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah**	**%**	**100**		**146,15**				**33,34**								**33,34**		**0,00**	**nan**	**89,745**		**89,75**	**0,00**	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	**%**	**100**		**325**				**15**								**15**		**0,00**		**170**		**170,00**		**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**88**		**95,42**				**87,6**								**87,6**		**0,00**	**nan**	**183,02**		**207,98**	**0,00**	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							48.299.155.423		5.077.024.168		6.968.335.445		47.482.663							0,00	47.482.663	0,00	0,68		5.124.506.831	38,80	10,61	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan oleh Biro Tapem dengan Kabupaten/Kota, OPD lintas sektor terkait, instansi vertikal, maupun pusat. 2. SDM yang kompeten 3. Sarana dan pra-sarana yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan berdasarkan Inpres RI No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar adanya efisiensi tidak menghambat proses pencapaian kinerja 2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam Catatan Atas Pelaksanaan APBD status Triwulan 1 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100	
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya**	**%**	**0**		**100**		**755.393.500**													**0,00**	**50**		**0,00**	**0,00**	**BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***																									
		2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya							755.393.500													0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)**	**%**	**0**		**100**		**639.350.500**		**10.798.600**								**10.798.600**		**1,69**	**50**	**10.798.600**	**0,00**	**0,00**	**BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
		4.01.06.1.01	***Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian***																									
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							353.980.100		5.844.700								5.844.700		1,65		5.844.700		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro							131.605.000		3.435.000								3.435.000		2,61		3.435.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.02	***Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam***																									
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								151.507.900		1.518.900								1.518.900		1,00		1.518.900		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.03	***Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD***																									
		4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha								2.257.500												0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**skor**	**0**		**90,81**		**255.747.750**		**58.422.151**								**58.422.151**		**22,84**	**90,81**	**58.422.151**	**0,00**	**0,00**	**BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
		4.01.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***																									
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								5.940.000		4.557.000								4.557.000		76,72		4.557.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								2.570.000												0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3.920.800		2.620.800								2.620.800		66,84		2.620.800		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***																									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							3.780.000												0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1.853.000												0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							3.422.000		674.000								674.000		19,70		674.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***																								
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							7.800.000												0,00				0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***																								
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.220.000		1.688.000								1.688.000		40,00		1.688.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							14.329.200		5.974.700								5.974.700		41,70		5.974.700		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							6.617.200		2.717.200								2.717.200		41,06		2.717.200		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							11.720.000		3.145.000								3.145.000		26,83		3.145.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							2.868.000		478.000								478.000		16,67		478.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							56.060.000		2.250.000								2.250.000		4,01		2.250.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***																								
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							700.000		700.000								700.000		100,00		700.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							3.900.000		2.866.451								2.866.451		73,50		2.866.451		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***																								
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							29.139.200		8.217.500								8.217.500		28,20		8.217.500		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							74.386.350		17.407.500								17.407.500		23,40		17.407.500		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							17.418.000		3.850.000								3.850.000		22,10		3.850.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5.104.000		1.276.000								1.276.000		25,00		1.276.000		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)										1.650.491.750		69.220.751							0,00	69.220.751		0,00	4,19		69.220.751	0,00	inf	
Predikat Kinerja																			SR	SR						SR	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Kerjasama TPID DIY dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) - Komunikasi yang baik dengan Kemenko Bidang Perekonomian terkait koordinasi dan konsultasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja TPID dan sebagai narasumber - Data-data program kerja OPD terkait untuk mendukung Penyusunan Laporan Kinerja TPID - Komunikasi yang baik oleh anggota TPID dalam penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 - Gencarnya Operasi Pasar/Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah ikut mendukung stabilnya harga dan pasokan di masyarakat - Fasilitasi BI dalam penyelenggaraan Konsinyering. - Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan OPD Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota sehingga tersampaikannya informasi data terkini terkait isu strategis untuk sektor pariwisata - Keterlibatan dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten dalam proses seleksi calon Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya sehingga mendorong terjaminnya keberlanjutan program DMB di desa/kalurahan terpilih. - Adanya amanat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang menyampaikan bahwa pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah dilaksanakan oleh TPAKD. Percepatan akses keuangan ini juga didukung oleh implementasi program KUR - Besarnya harapan masyarakat dan pentingnya informasi (pinjaman formal, pinjaman online, investasi online, judi onlino, dan pasar modal) dan kecakapan akan akses keuangan digital di era digital, serta didukung banyaknya masyarakat yang terjerat masalah dalam hal tersebut - Koordinasi dan sinergi antar OPD dan instansi lainnya yang solid, serta adanya kolaborasi kegiatan yang berkelanjutan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Cuaca hujan yang masih menyebabkan komoditas hortikultura mengalami kenaikan harga - Ketegangan geopolitik negara Timur Tengah dan ketidakpastian global memberikan dinamika pada harga-harga komoditas pangan terutama yang impor - Peningkatan demand khususnya pada komoditas pangan sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) - Penurunan produksi akibat alih fungsi lahan - Volatilitas harga aneka cabai dan aneka bawang akibat berakhirnya panen raya komoditas hortikultura dan komoditas bawang putih yang bergantung pada kuota impor. - Terbatasnya anggaran pengembangan website KURjogja, menyebabkan seringnya terjadi serangan pada website. - Kurang lengkapnya data bukti kegiatan yang dikirimkan oleh instansi terkait, menghambat proses penyusunan laporan - Penyesuaian kebijakan terkait penganggaran seperti penghematan, optimalisasi dan efisiensi berpengaruh terhadap timeline pelaksanaan kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	- Melakukan koordinasi bersama TPID DIY - Bersama BI, mendiskusikan hasil inflasi pada bulan Maret 2025 yang baru Rilis pada April 2025 setelah libur Lebaran - Telah dilakukan pemantauan/evaluasi secara internal setiap bulannya, dan evaluasi triwulan bersama dengan bappeda, biro organisasi, paniradya, inspektorat. - Dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama TPAKD dan instansi terkait, serta berkoordinasi kepada pihak ketiga (pemelihara Website) untuk back up data dan mengajukan sharing anggaran kepada OJK DIY - Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan tercapainya target kinerja sesuai dengan timeline yang telah disusun. - Mengoptimalkan koordinasi secara nonformal maupun koordinasi secara daring bersama dengan mitra OPD terkait.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69.49	55.56
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	92.61	93.48

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**%**	**80,8**						**86,86**	**15.000.000**							**86,86**	**15.000.000**	**0,00**	**inf**	**43,43**	**15.000.000**	**53,75**	**0,00**	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Fasilitasi pelayanan PBJ***	***Kegiatan***	***0***							***15.000.000***								***15.000.000***		***inf***	***0***	***15.000.000***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	0	0				0		15.000.000								15.000.000		0,00	0	15.000.000		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**%**	**78,74**					**1.078.153.000**	**33,93**	**102.985.410**							**33,93**	**102.985.410**	**0,00**	**9,55**	**16,965**	**102.985.410**	**21,55**	**0,00**	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**
		4.01.07.1.01	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas***	***%***	***0***					***840.579.000***	***43,15***	***87.793.410***							***43,15***	***87.793.410***	***0,00***	***10,44***	***21,575***	***87.793.410***	***0,00***	***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	0					840.579.000		87.793.410								87.793.410		10,44	0	87.793.410		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.07.1.02	***Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik***	***Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik***	***%***	***0***					***117.587.000***	***24,31***	***146.000***							***24,31***	***146.000***	***0,00***	***0,12***	***12,155***	***146.000***	***0,00***	***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	0					117.587.000		146.000								146.000		0,12	0	146.000		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.07.1.03	***Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa***	***Pemenuhan level kematangan strategis***	***%***	***0***					***119.987.000***	***25***	***15.046.000***							***25***	***15.046.000***	***0,00***	***12,54***	***12,5***	***15.046.000***	***0,00***	***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
Rata-rata capaian kinerja (%)											1.947.690.700		328.767.369							0,00	328.767.369	0,00	16,88		328.767.369	4,87	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	0					119.987.000		15.046.000								15.046.000		12,54	0	15.046.000		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
2	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**86,17**					**869.537.700**	**86,23**	**210.781.959**							**86,23**	**210.781.959**	**0,00**	**24,24**	**86,23**	**210.781.959**	**100,07**	**0,00**	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**
		4.01.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***0***					***10.654.000***		***5.164.000***								***5.164.000***		***48,47***	***0***	***5.164.000***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Angka	0	0				5.678.000	2	3.060.000							2	3.060.000	0,00	53,89	2	3.060.000	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Angka	0	0				2.616.000											0,00	0			0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0					2.360.000	1	2.104.000							1	2.104.000	0,00	89,15	1	2.104.000	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***0***					***8.819.000***		***2.141.991***								***2.141.991***		***24,29***	***0***	***2.141.991***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Indikator SIPD)	dokumen	0					4.560.000	3	1.628.995							3	1.628.995	0,00	35,72	3	1.628.995	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0					1.970.000											0,00	0			0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
Rata-rata capaian kinerja (%)											1.947.690.700		328.767.369							0,00	328.767.369	0,00	16,88		328.767.369	4,87	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0					2.289.000	4	512.996							4	512.996	0,00	22,41	4	512.996	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***0***					***8.924.000***		***2.291.997***								***2.291.997***		***25,68***	***0***	***2.291.997***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0					8.924.000		2.291.997								2.291.997		25,68	0	2.291.997		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***0***					***150.315.400***		***54.139.471***								***54.139.471***		***36,02***	***0***	***54.139.471***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0					3.434.000		1.317.503								1.317.503		38,37	0	1.317.503		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	Paket	0					31.465.400		15.815.485								15.815.485		50,26	0	15.815.485		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0					5.040.000		1.260.000								1.260.000		25,00	0	1.260.000		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0					12.460.000		1.995.000								1.995.000		16,01	0	1.995.000		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0					97.916.000	1	33.751.483							1	33.751.483	0,00	34,47	1	33.751.483	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***0***					***569.091.000***		***133.275.000***								***133.275.000***		***23,42***	***0***	***133.275.000***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0					569.091.000	12	133.275.000							12	133.275.000	0,00	23,42	12	133.275.000	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***0***					***600.000***		***600.000***								***600.000***		***100,00***	***0***	***600.000***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
Rata-rata capaian kinerja (%)											1.947.690.700		328.767.369							0,00	328.767.369	0,00	16,88		328.767.369	4,87	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0					600.000	1	600.000							1	600.000	0,00	100,00	1	600.000	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***0***					***121.134.300***		***13.169.500***								***13.169.500***		***10,87***	***0***	***13.169.500***		***0,00***	***BIRO PENGADAAN BARANG/JASA***
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0					76.692.500		10.458.300								10.458.300		13,64	0	10.458.300		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0					32.863.800		1.936.200								1.936.200		5,89	0	1.936.200		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0					6.088.000												0,00	0			0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0					5.490.000	2	775.000							2	775.000	0,00	14,12	2	775.000	0,00	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
Rata-rata capaian kinerja (%)											1.947.690.700		328.767.369							0,00	328.767.369	0,00	16,88		328.767.369	4,87	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	94.6	
2 Kategori RB Perangkat Daerah	2	0

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Terwujudnya kelembagaan istimewa yang Agile**	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B**	**%**	**0**	**1.618.290.500**	**50**	**127.019.417**		**323.658.100**												**0,00**	**25**	**127.019.417**	**0,00**	**7,85**	**BIRO ORGANISASI**
				Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah	**%**	**0**		**93,42**															**46,71**		**0,00**		**BIRO ORGANISASI**
		4.01.02.1.02	***Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja***	***Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja***	***%***	***100***	***1.618.290.500***	***100***	***127.019.417***		***323.658.100***												***0,00***	***50***	***127.019.417***	***50,00***	***7,85***	***BIRO ORGANISASI***
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7	422.025.000	2	37.937.501		84.405.000												0,00	2	37.937.501	28,57	8,99	BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	5	71.893.500	1	16.556.216		14.378.700												0,00	1	16.556.216	20,00	23,03	BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	15	411.065.000				82.213.000												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	20	713.307.000	3	72.525.700		142.661.400												0,00	3	72.525.700	15,00	10,17	BIRO ORGANISASI
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kematangan Perangkat Daerah**	**nilai**	**0**	**250.640.884.000**	**42**	**1.966.534.036**		**57.994.087.000**												**0,00**	**42**	**1.966.534.036**	**0,00**	**0,78**	**BIRO ORGANISASI**
		4.01.10.5.01	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan***	***Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan***	***%***	***100***	***244.190.884.000***	***100***	***914.777.564***		***56.594.087.000***												***0,00***	***50***	***914.777.564***	***50,00***	***0,37***	***BIRO ORGANISASI***
		4.01.10.5.01.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	96	3.734.945.000	6	439.289.362		800.000.000												0,00	6	439.289.362	6,25	11,76	BIRO ORGANISASI
		4.01.10.5.01.04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	26	1.400.000.000	6	65.612.093		250.000.000												0,00	6	65.612.093	23,08	4,69	BIRO ORGANISASI
		4.01.10.5.01.05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	5 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	5	232.692.340.000				54.294.087.000												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		4.01.10.5.01.06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	15	2.113.599.000	4	274.918.649		400.000.000												0,00	4	274.918.649	26,67	13,01	BIRO ORGANISASI
		4.01.10.5.01.08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	24	4.250.000.000	5	134.957.460		850.000.000												0,00	5	134.957.460	20,83	3,18	BIRO ORGANISASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***5.750.000.000***	***100***	***1.051.756.472***		***1.200.000.000***													***0,00***	***50***	***1.051.756.472***	***50,00***	***18,29***	***BIRO ORGANISASI***
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Implementasi Budaya Pemerintahan Berkategori Baik	Dokumen	5	5.750.000.000	3	1.051.756.472		1.200.000.000													0,00	3	1.051.756.472	60,00	18,29	BIRO ORGANISASI
		4.01.10.5.07	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan***	***Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan***	***%***	***100***	***700.000.000***				***200.000.000***													***0,00***	***0***			***0,00***	***BIRO ORGANISASI***
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	Unit	18	700.000.000				200.000.000													0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
2	**Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**0**	**5.148.743.500**	**92,2**	**350.344.533**		**941.248.700**	**79,04**								**79,04**		**0,00**	**0,00**	**85,62**	**350.344.533**	**0,00**	**6,80**	**BIRO ORGANISASI**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***%***	***100***	***58.560.000***	***100***	***7.049.700***		***11.712.000***													***0,00***	***50***	***7.049.700***	***50,00***	***12,04***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	28.575.000	4	1.162.600		5.715.000													0,00	4	1.162.600	20,00	4,07	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	12.340.000	4	2.368.100		2.468.000													0,00	4	2.368.100	40,00	19,19	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	17.645.000	3	3.519.000		3.529.000													0,00	3	3.519.000	20,00	19,94	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi keuangan daerah***	***%***	***100***	***204.025.500***	***100***	***36.331.400***		***40.805.100***													***0,00***	***50***	***36.331.400***	***50,00***	***17,81***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	170.100.000	12	29.559.000		34.020.000													0,00	12	29.559.000	240,00	17,38	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.435.000	1	3.874.600		3.887.000													0,00	1	3.874.600	100,00	19,94	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	undefined	20	14.490.500	18	2.897.800		2.898.100													0,00	18	2.897.800	90,00	20,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***%***	***100***	***56.735.000***	***100***	***11.319.750***		***11.347.000***													***0,00***	***50***	***11.319.750***	***50,00***	***19,95***	***BIRO ORGANISASI***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	56.735.000	2	11.319.750	11.347.000												0,00	2	11.319.750	200,00	19,95	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah***	***%***	***100***	***1.680.000.000***			***407.500.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	30.000.000			7.500.000												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	66	1.650.000.000			400.000.000												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	***%***	***100***	***1.308.829.000***	***100***	***174.436.283***	***261.765.800***												***0,00***	***50***	***174.436.283***	***50,00***	***13,33***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.330.000	1	1.680.400	666.000												0,00	1	1.680.400	20,00	50,46	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.396.500	4	5.498.400	6.479.300												0,00	4	5.498.400	80,00	16,97	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	19.329.500	2	1.889.600	3.865.900												0,00	2	1.889.600	40,00	9,78	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	26.883.000	1	3.309.250	5.376.600												0,00	1	3.309.250	20,00	12,31	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0			0												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	1.219.390.000	12	160.558.633	243.878.000												0,00	12	160.558.633	60,00	13,17	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	7.500.000	1	1.500.000	1.500.000												0,00	1	1.500.000	20,00	20,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***	***1.100.000.000***			***60.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	620.000.000			0												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	4	240.000.000			60.000.000												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	240.000.000			0												0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***70.000.000***				***14.000.000***											***0,00***	***0***			***0,00***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2.500.000				500.000											0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	67.500.000				13.500.000											0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0				0											0,00	0			0,00	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***	***670.594.000***	***100***	***121.207.400***		***134.118.800***											***0,00***	***50***	***121.207.400***	***50,00***	***18,07***	***BIRO ORGANISASI***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.004.000	1	28.360.800		31.600.800											0,00	1	28.360.800	100,00	17,95	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	92.088.000	25	20.040.000		18.417.600											0,00	25	20.040.000	312,50	21,76	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	420.502.000	7	72.806.600		84.100.400											0,00	7	72.806.600	100,00	17,31	BIRO ORGANISASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						257.407.918.000		2.443.897.986		59.258.993.800									0,00		0,00	0,00		2.443.897.986	39,67	0,95	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1) Adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut Biro Organisasi SETDA DIY diberikan Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. 2) Adanya Permendagri Nomor 8 Tahun 2017 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 3) Adanya Kerjasama, komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dan OPD lainnya dalam bidang kelembagaan organisasi. 4) Adanya koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sehingga pemda DIY memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan. 5) Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga ada pedoman yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 6) Adanya percepatan Reformasi Birokrasi
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 2. Data dan informasi yang tersedia (kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur) belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses implementasi kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. 3. Perubahan kebijakan implementasi reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat yang berkontribusi pada target pembangunan. 4. Belum Optimalnya implementasi one agency one inovation menuju budaya inovatif. 5. Adanya Inpres Nomer 1 Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Dinamika implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2. Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan; 3. Budaya kerja, etos kerja, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN berkelas dunia; 4. Akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi; 5. Industrialisasi 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas tinggi dalam pelayanan publik; 6. Adaptasi kebiasaan baru birokrasi pemerintah pasca efisiensi anggaran.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD: Target Realisasi

1 Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan 80 30

2 Kategori RB Perangkat Daerah 88.19 92.07

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama**	**1**	**Kesejahteraan Rakyat**																									
		2	**Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**																									
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat**	**Laporan**	**0**				**4.100.749.000**		**2**	**51.132.200**						**2**	**51.132.200**	**0,00**	**1,25**	**2**	**51.132.200**	**0,00**	**0,00**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat***	***Laporan***	***0***				***4.100.749.000***		***2***	***51.132.200***						***2***	***51.132.200***	***0,00***	***1,25***	***2***	***51.132.200***	***0,00***	***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	0	0			4.100.749.000		2	51.132.200						2	51.132.200	0,00	1,25	2	51.132.200	0,00	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase 4 jenis fasilitasi keagamaan**	**Persen**	**0**				**4.145.272.750**			**2.403.180.764**							**2.403.180.764**		**57,97**	**0**	**2.403.180.764**		**0,00**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Rata-rata capaian kinerja (%)										8.657.539.300			2.509.820.402						0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	**Rumusan**	**0**																		**0**				**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
				Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	**Dokumen**	**0**						**2**								**2**		**0,00**		**2**		**0,00**		**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
		4.01.04.1.01	***Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual***	***Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan***	***Dokumen***	***0***					***3.408.106.000***	***1***	***2.330.015.000***							***1***	***2.330.015.000***	***0,00***	***68,37***	***1***	***2.330.015.000***	***0,00***	***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Tempat Ibadah yang Difasilitasi	Unit	0	0				225.000		225.000							225.000		100,00	0	225.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	0	0				3.407.881.000		2.329.790.000							2.329.790.000		68,36	0	2.329.790.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.02	***Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar***	***Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar***	***Dokumen***	***0***					***352.252.900***		***50.607.864***							***50.607.864***		***14,37***	***0***	***50.607.864***		***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0				161.931.500		4.345.000							4.345.000		2,68	0	4.345.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	0	0				190.321.400		46.262.864							46.262.864		24,31	0	46.262.864		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.03	***Fasilitasi Pengembangan***	***Terlaksanya Fasilitasi***	***Dokumen***	***0***					***384.913.850***		***22.557.900***							***22.557.900***		***5,86***	***0***	***22.557.900***		***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		2.509.820.402						0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	***Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar***																								***RAKYAT***
		4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	0	0				384.913.850		22.557.900								22.557.900		5,86	0	22.557.900		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**3**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**																									
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**0**					**411.517.550**	**84,62**	**55.507.438**							**84,62**	**55.507.438**	**0,00**	**13,49**	**84,62**	**55.507.438**	**0,00**	**0,00**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
		4.01.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***0***					***10.666.600***	***7***	***1.375.000***							***7***	***1.375.000***	***0,00***	***12,89***	***7***	***1.375.000***	***0,00***	***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0				7.459.000	3	908.000							3	908.000	0,00	12,17	3	908.000	0,00	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0				1.385.600												0,00	0			0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0				1.822.000	3	467.000							3	467.000	0,00	25,63	3	467.000	0,00	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***0***					***13.778.000***		***3.825.000***								***3.825.000***		***27,76***	***0***	***3.825.000***		***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		2.509.820.402							0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0				8.663.000		1.260.000								1.260.000		14,54	0	1.260.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	0	0				2.713.000		2.565.000								2.565.000		94,54	0	2.565.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0				2.402.000												0,00	0			0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***0***					***12.425.000***		***2.580.000***								***2.580.000***		***20,76***	***0***	***2.580.000***		***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	0	0				12.425.000		2.580.000								2.580.000		20,76	0	2.580.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***0***					***200.553.950***	***1***	***20.237.600***							***1***	***20.237.600***	***0,00***	***10,09***	***1***	***20.237.600***	***0,00***	***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	0	0				2.872.000		2.847.000								2.847.000		99,13	0	2.847.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0				12.788.900		2.025.600								2.025.600		15,84	0	2.025.600		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	0					2.316.000												0,00	0			0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	0					15.090.000		7.880.000								7.880.000		52,22	0	7.880.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		2.509.820.402							0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	0	0				1.764.000		300.000								300.000		17,01	0	300.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0				165.723.050		7.185.000								7.185.000		4,34	0	7.185.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Dokumen***	***0***					***8.900.000***	***2***	***7.369.838***							***2***	***7.369.838***	***0,00***	***82,81***	***2***	***7.369.838***	***0,00***	***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0				5.000.000	1	5.000.000							1	5.000.000	0,00	100,00	1	5.000.000	0,00	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	0				3.900.000		2.369.838								2.369.838		60,77	0	2.369.838		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Dokumen***	***0***					***165.194.000***		***20.120.000***								***20.120.000***		***12,18***	***0***	***20.120.000***		***0,00***	***BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT***
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0				34.592.000		6.345.000								6.345.000		18,34	0	6.345.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0				96.054.000		7.825.000								7.825.000		8,15	0	7.825.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0				2.340.000	6								6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		2.509.820.402							0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0				19.448.000		3.250.000								3.250.000		16,71	0	3.250.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0				12.760.000		2.700.000								2.700.000		21,16	0	2.700.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja (%)											8.657.539.300		2.509.820.402							0,00	2.509.820.402	0,00	28,99		2.509.820.402	0,00	inf	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	60	50
2 Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	69.49	
3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)**	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda**	**%**	**0**	**1.660.422.098**	**50**	**181.700.000**		**389.738.096**	**50**								**50**		**0,00**	**0,00**	**50**	**181.700.000**	**0,00**	**10,94**	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
		1.03.13.5.02	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	***Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang***	***%***	***100***	***1.660.422.098***	***25***	***181.700.000***		***389.738.096***												***0,00***	***12,5***	***181.700.000***	***12,50***	***10,94***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	2	861.321.192				389.738.096												0,00	0			0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	2	799.100.906	1	181.700.000		0												0,00	1	181.700.000	50,00	22,74	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda**	**%**	**0**	**10.527.871.000**	**100**	**1.098.817.940**		**1.981.230.000**												**0,00**	**50**	**1.098.817.940**	**0,00**	**10,44**	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
		2.22.08.5.04	***Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***	***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan***	***%***	***0***	***9.792.871.000***		***1.098.817.940***		***1.981.230.000***												***0,00***	***0***	***1.098.817.940***		***11,22***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
				Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan	***Objek***	***2***		***2***															***2***		***100,00***		***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	2	9.792.871.000	2	1.098.817.940		1.981.230.000												0,00	2	1.098.817.940	100,00	11,22	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan***	***%***	***100***	***735.000.000***															***nan***	***0***			***0,00***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	20	735.000.000				0												0,00	0			0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda**	**%**	**0**	**10.714.753.198**	**66,67**	**254.033.050**		**2.864.738.096**	**66,67**	**155.977.450**							**66,67**	**155.977.450**	**0,00**	**5,44**	**66,67**	**410.010.500**	**0,00**	**3,83**	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
		4.01.08.1.01	***Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah***	***persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi***	***%***	***100***	***5.669.527.198***	***36,84***	***102.597.900***		***1.514.738.096***		***27.187.850***								***27.187.850***		***1,79***	***18,42***	***129.785.750***	***18,42***	***2,29***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	19	5.669.527.198	2	102.597.900		1.514.738.096	0	27.187.850							0	27.187.850	0,00	1,79	2	129.785.750	10,53	2,29	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08.1.02	***Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda***	***%***	***100***	***5.045.226.000***	***45,45***	***151.435.150***		***1.350.000.000***		***128.789.600***								***128.789.600***		***9,54***	***22,725***	***280.224.750***	***22,73***	***5,55***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	11	5.045.226.000	3	151.435.150		1.350.000.000	0	128.789.600							0	128.789.600	0,00	9,54	3	280.224.750	27,27	5,55	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa**	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa**	**%**	**0**	**5.882.503.228**	**70,93**	**253.036.880**		**1.365.768.800**											**0,00**		**35,465**	**253.036.880**	**0,00**	**4,30**	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
				Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik	**%**	**0**		**85**														**42,5**		**0,00**		**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
		4.01.07.1.01	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas***	***%***	***90***	***4.427.604.600***	***86***	***208.142.930***		***1.028.610.000***											***0,00***		***43***	***208.142.930***	***47,78***	***4,70***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	14	4.427.604.600	2	208.142.930		1.028.610.000											0,00		2	208.142.930	14,29	4,70	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.07.1.02	***Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik***	***Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik***	***%***	***69,94***	***565.083.200***	***62,44***	***19.858.000***		***133.100.000***											***0,00***		***31,22***	***19.858.000***	***44,64***	***3,51***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	3	565.083.200	3	19.858.000		133.100.000											0,00		3	19.858.000	100,00	3,51	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.07.1.03	***Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa***	***Pemenuhan level kematangan strategis***	***%***	***62,5***	***889.815.428***	***25***	***25.035.950***		***204.058.800***											***0,00***		***12,5***	***25.035.950***	***20,00***	***2,81***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	889.815.428	3	25.035.950		204.058.800											0,00		3	25.035.950	100,00	2,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**0**	**57.910.276.460**	**95,7**	**358.666.956**		**11.730.127.906**	**96,37**	**49.373.100**							**96,37**	**49.373.100**	**0,00**	**0,42**	**96,035**	**408.040.056**	**0,00**	**0,70**	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***115.925.100***	***100***	***10.735.700***		***25.345.000***		***6.907.800***								***6.907.800***		***27,26***	***50***	***17.643.500***	***50,00***	***15,22***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	46.753.700	3	4.216.400		10.050.000	0	3.185.000							0	3.185.000	0,00	31,69	3	7.401.400	75,00	15,83	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	22.236.800	4	2.868.600		4.900.000	0	415.000							0	415.000	0,00	8,47	4	3.283.600	100,00	14,77	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	46.934.600	3	3.650.700		10.395.000	2	3.307.800							2	3.307.800	0,00	31,82	5	6.958.500	166,67	14,83	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***52.944.320.460***	***100***	***31.936.200***		***10.585.987.906***		***1.155.000***								***1.155.000***		***0,01***	***50***	***33.091.200***	***50,00***	***0,06***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	52.702.384.460				10.534.052.906											0,00	0			0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	168.800.000	12	28.800.000		35.000.000	3	1.155.000							3	1.155.000	0,00	3,30	15	29.955.000	125,00	17,75	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	28.515.600	2	1.536.200		6.595.000	0								0		0,00	0,00	2	1.536.200	100,00	5,39	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	44.620.400	18	1.600.000		10.340.000											0,00	18	1.600.000	100,00	3,59	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***90.437.000***	***100***	***10.950.300***		***19.020.000***		***2.839.200***								***2.839.200***		***14,93***	***50***	***13.789.500***	***50,00***	***15,25***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	90.437.000	2	10.950.300		19.020.000	0	2.839.200							0	2.839.200	0,00	14,93	2	13.789.500	100,00	15,25	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***3.374.931.000***	***100***	***178.244.978***		***788.978.000***		***15.204.400***								***15.204.400***		***1,93***	***50***	***193.449.378***	***50,00***	***5,73***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.424.000	1	2.378.000		10.245.000		1.246.000								1.246.000		12,16	1	3.624.000	100,00	8,16	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	198.633.200	1	9.472.000		45.375.000	1	5.119.400							1	5.119.400	0,00	11,28	2	14.591.400	200,00	7,35	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.560.900	1	942.000		4.275.000	1	914.000							1	914.000	0,00	21,38	2	1.856.000	200,00	10,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	90.014.900	1	7.478.400		20.168.000	1	4.550.000							1	4.550.000	0,00	22,56	2	12.028.400	200,00	13,36	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	4	2.985.688.000	4	157.974.578		700.000.000	1	3.375.000							1	3.375.000	0,00	0,48	5	161.349.578	125,00	5,40	BIRO PENGEMBANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 14		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	37.610.000				8.915.000												0,00	0			0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***307.650.000***	***100***	***16.490.000***		***73.150.000***												***0,00***	***50***	***16.490.000***	***50,00***	***5,36***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	231.000.000	1	8.790.000		55.000.000												0,00	1	8.790.000	10,00	3,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	76.650.000	2	7.700.000		18.150.000	0								0		0,00	0,00	2	7.700.000	40,00	10,05	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***212.850.000***	***100***	***10.400.000***		***51.700.000***		***500.000***								***500.000***		***0,97***	***50***	***10.900.000***	***50,00***	***5,12***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.180.000	1	500.000		7.200.000	0	500.000							0	500.000	0,00	6,94	1	1.000.000	100,00	3,31	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	1	182.670.000	1	9.900.000		44.500.000												0,00	1	9.900.000	100,00	5,42	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***864.162.900***	***100***	***99.909.778***		***185.947.000***		***22.766.700***								***22.766.700***		***12,24***	***50***	***122.676.478***	***50,00***	***14,20***	***BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.217.900	1	25.969.541		32.932.000	1	6.817.700							1	6.817.700	0,00	20,70	2	32.787.241	200,00	20,72	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	65.657.000	16	6.480.000		14.602.000											0,00	16	6.480.000	533,33	9,87	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	564.686.000	6	60.955.237		121.418.000	0	12.949.000							0	12.949.000	0,00	10,66	6	73.904.237	100,00	13,09	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	12	75.602.000	23	6.505.000		16.995.000	3	3.000.000							3	3.000.000	0,00	17,65	26	9.505.000	216,67	12,57	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							86.695.825.984		2.146.254.826		18.331.602.898		205.350.550							0,00	205.350.550	0,00	1,12		2.351.605.376	73,77	2,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder 2. Pemanfaatan teknologi informasi perencanaan 3. Penguatan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal yang terlibat 4. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 5. Sarana dan prasarana yang memadai																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Beberapa aktivitas mengalami kemunduran jadwal karena kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 2. Terdapat efisiensi pada beberapa jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Dana Keistimewaan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100	56.63
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Terwujudnya produk hukum daerah dan bantuan hukum yang berkualitas**	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan**	**%**	**100**	**2.809.806.232**	**100**	**168.549.756**		**528.184.360**	**27**								**27**		**0,00**	**0,00**	**63,5**	**168.549.756**	**63,50**	**6,00**	**BIRO HUKUM**
		2.10.11.5.02	***Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	***%***	***100***	***2.429.806.232***	***100***	***168.549.756***		***528.184.360***												***0,00***	***50***	***168.549.756***	***50,00***	***6,94***	***BIRO HUKUM***
		2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	150	504.394.800	1			134.300.000												0,00	1		0,67	0,00	BIRO HUKUM
		2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	5	1.925.411.432	1	168.549.756		393.884.360												0,00	1	168.549.756	20,00	8,75	BIRO HUKUM
		2.10.11.5.03	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan***	***Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan***	***%***	***100***	***380.000.000***																***nan***	***0***			***0,00***	***BIRO HUKUM***
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	Unit	1	380.000.000				0												0,00	0			0,00	BIRO HUKUM
		4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Perundang - undangan dan Dokumentasi Hukum)**	**%**	**100**	**17.612.912.980**	**100**	**2.513.350.863**		**3.550.000.000**	**32,28**								**32,28**		**0,00**	**0,00**	**66,14**	**2.513.350.863**	**66,14**	**14,27**	**BIRO HUKUM**
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Pembinaan dan Pengawasan PH Kab/Kota)	**%**	**100**		**100**				**32,38**								**32,38**		**0,00**		**66,19**		**66,19**		**BIRO HUKUM**
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum (Bagian Bantuan dan Layanan Hukum)	**%**	**100**		**100**				**32,38**								**32,38**		**0,00**		**66,19**		**66,19**		**BIRO HUKUM**
		4.01.05.1.01	***Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan***	***Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum***	***%***	***100***	***7.211.996.500***		***1.003.577.900***		***1.450.000.000***												***0,00***	***0***	***1.003.577.900***		***13,92***	***BIRO HUKUM***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendoklumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota																							
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	158	449.196.000	128	106.595.000	90.000.000											0,00	128	106.595.000	81,01	23,73	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	315	146.386.000	428	34.075.000	30.000.000											0,00	428	34.075.000	135,87	23,28	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	15	5.379.663.700	570	726.938.100	1.080.000.000											0,00	570	726.938.100	3.800,00	13,51	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	570	1.236.750.800	70	135.969.800	250.000.000											0,00	70	135.969.800	12,28	10,99	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02	***Fasilitasi Bantuan Hukum***	***Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM***	***%***	***100***	***10.400.916.480***		***1.509.772.963***	***2.100.000.000***											***0,00***	***0***	***1.509.772.963***		***14,52***	***BIRO HUKUM***
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	5	1.983.430.900	1	218.836.000	400.000.000											0,00	1	218.836.000	20,00	11,03	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	500	8.417.485.580	187	1.290.936.963	1.700.000.000											0,00	187	1.290.936.963	37,40	15,34	BIRO HUKUM
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kab/Kota)**	**%**	**100**	**4.950.000.000**	**100**	**645.275.947**	**1.000.000.000**	**25**								**25**		**0,00**	**0,00**	**62,5**	**645.275.947**	**62,50**	**13,04**	**BIRO HUKUM**
				Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum)	**%**	**100**		**100**			**25**								**25**		**0,00**		**62,5**		**62,50**		**BIRO HUKUM**
		4.01.10.5.01	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan***	***Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan***	***%***	***100***	***4.950.000.000***		***645.275.947***	***1.000.000.000***											***0,00***	***0***	***645.275.947***		***13,04***	***BIRO HUKUM***
		4.01.10.5.01.07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan	Dokumen	110	2.950.000.000	26	234.253.000	600.000.000											0,00	26	234.253.000	23,64	7,94	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kewenangan Keistimewaan	Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi																								
		4.01.10.5.01.09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	75	2.000.000.000	16	411.022.947		400.000.000												0,00	16	411.022.947	21,33	20,55	BIRO HUKUM
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai PKKI**	**3**	**6.383.204.900**	**87,2**	**646.389.143**		**1.877.535.000**	**72,4**	**3.100.000**							**72,4**	**3.100.000**	**0,00**	**0,17**	**159,6**	**649.489.143**	**5.320,00**	**10,17**	**BIRO HUKUM**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***93.050.400***		***3.842.500***		***18.535.000***		***3.100.000***								***3.100.000***		***16,73***	***0***	***6.942.500***		***7,46***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	25.173.800	5	2.302.500		5.035.000		2.425.000								2.425.000		48,16	5	4.727.500	16,67	18,78	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	40.637.000	1			8.000.000		675.000								675.000		8,44	1	675.000	5,00	1,66	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	27.239.600	3	1.540.000		5.500.000												0,00	3	1.540.000	20,00	5,65	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD***	***%***	***100***	***245.780.300***		***33.838.000***		***49.500.000***												***0,00***	***0***	***33.838.000***		***13,77***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	198.680.000	12	32.380.000		40.000.000												0,00	12	32.380.000	20,00	16,30	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	12.187.600	1	710.000		2.500.000												0,00	1	710.000	20,00	5,83	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	70	34.912.700	14	748.000		7.000.000												0,00	14	748.000	20,00	2,14	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD***	***%***	***100***	***64.320.000***		***12.820.000***		***13.000.000***												***0,00***	***0***	***12.820.000***		***19,93***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	64.320.000	4	12.820.000		13.000.000												0,00	4	12.820.000	20,00	19,93	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	***%***	***100***	***229.761.400***		***6.300.000***		***58.000.000***										***0,00***	***0***	***6.300.000***		***2,74***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	40.261.400	1	6.300.000		8.000.000										0,00	1	6.300.000	20,00	15,65	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	189.500.000				50.000.000										0,00	0			0,00	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	***%***	***100***	***2.170.248.100***		***353.413.267***		***439.000.000***										***0,00***	***0***	***353.413.267***		***16,28***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.130.200	1	2.744.500		6.500.000										0,00	1	2.744.500	20,00	8,54	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	355.762.500	2	64.383.600		70.000.000										0,00	2	64.383.600	20,00	18,10	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	39.716.000	1	4.785.000		8.000.000										0,00	1	4.785.000	20,00	12,05	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	246.539.000	1	32.765.900		50.000.000										0,00	1	32.765.900	20,00	13,29	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	10	21.738.400	2	5.040.000		4.500.000										0,00	2	5.040.000	20,00	23,18	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.474.362.000	1	243.694.267		300.000.000										0,00	1	243.694.267	20,00	16,53	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***1.469.113.900***		***87.804.000***		***836.000.000***										***0,00***	***0***	***87.804.000***		***5,98***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000				700.000.000										0,00	0			0,00	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	137.000.000				9.000.000										0,00	0			0,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	547.896.900	34	81.904.000		110.000.000												0,00	34	81.904.000	97,14	14,95	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	84.217.000	1	5.900.000		17.000.000												0,00	1	5.900.000	10,00	7,01	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	***%***	***100***	***232.720.000***		***4.316.572***		***53.500.000***												***0,00***	***0***	***4.316.572***		***1,85***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	17.120.000	1	1.020.000		3.500.000												0,00	1	1.020.000	20,00	5,96	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	25.600.000	1	3.296.572		5.000.000												0,00	1	3.296.572	20,00	12,88	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	190.000.000				45.000.000												0,00	0			0,00	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***1.878.210.800***		***144.054.804***		***410.000.000***												***0,00***	***0***	***144.054.804***		***7,67***	***BIRO HUKUM***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	198.707.900	1	32.183.302		40.000.000												0,00	1	32.183.302	20,00	16,20	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	475.692.700	6	88.311.502		95.000.000												0,00	6	88.311.502	20,00	18,56	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	130.000.000				30.000.000												0,00	0			0,00	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	223.410.200	38	23.560.000		45.000.000												0,00	38	23.560.000	108,57	10,55	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	850.400.000	0,5			200.000.000												0,00	0,5		4,17	0,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						31.755.924.112		3.973.565.709		6.955.719.360		3.100.000							0,00	3.100.000	0,00	0,04		3.976.665.709	180,53	12,52	
Predikat Kinerja																			SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					1. Perencanaan, Koordinasi dan kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah Pengampu dan pihak - pihak terkait (instansi vertikal, OPD Pemda DIY, instansi Kab/Kota, pihak swasta dan masyarakat) 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 3. Ketersediaan data/bahan pendukung yang lengkap 4. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPA Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 31 Desember 2024 5. Perangkat Daerah pengampu/Stakeholder memberikan kontribusi positif dan kerjasama yang baik dalam proses penyelarasan rancangan produk hukum 6. Koordinasi dengan Dinas Kominfo DIY penyedia terkait Redesign JDIH TA 2025																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					1. Kendala teknis pencairan anggaran TW I pada aplikasi SIPD RI. 2. Data Dukung berupa Site Plan dan Gambar Denah Lokasi yang kurang lengkap. 3. Penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunanan Tanah Kalurahan tidak sesuai peruntukan pemohon. 4. Penyelesaian permasalahan hukum melalui pengadilan terkendala waktu pelaksanaan sidang. 5. Kesulitan dalam penelusuran dan pencarian data dukung untuk melengkapi alat bukti dalam rangka memenuhi pembuktian di persidangan. 6. Proses Fasilitasi Produk Hukum Daerah di Kementerian Dalam Negeri yang membutuhkan waktu relatif lama karena ditentukan oleh jumlah antrian produk hukum daerah yang perlu dilakukan fasilitasi. 7. Substansi materi rancangan produk hukum dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundangan yang terkait 8. Website JDIH kurang responsif, sehingga untuk mengunggah Produk Hukum Daerah membutuhkan waktu lebih lama 9. Adanya peraturan perundangan yang masih tumpang tindih 10. Belum optimalnya saran dan masukan terkait substansi dari Perangkat Daerah terkait. 11. Dinamika regulasi Reformasi Birokrasi Nasional menyebabkan perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum Setda DIY 12. Pergeseran dan/atau perubahan anggaran pada tahun berjalan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):					1. Melakukan koordinasi dengan BPKA DIY, Inspektorat DIY, Paniradya DIY dan Bappeda DIY terkait kendala pencairan anggaran TW I pada aplikasi SIPD RI 2. Menyusun surat pengembalian berkas ijin penggunaan Tanah Kas Desa untuk obyek TKD yang belum lengkap administrasinya 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin penggunaan Tanah Kas Desa 4. Melakukan koordinasi dengan pengadilan terkait penjadwalan sidang 5. Melakukan koordinasi dengan Perangat Daerah dan para pihak berperkara untuk mempermudah penelusuran data dalam rangka pembuktian pengadilan 6. Melakukan koordinasi dan konsinyering dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu upaya percepatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah 7. Menyusun kebijakan terkait pembentukan produk hukum daerah 8. Melakukan koordinasi dengan penyedia untuk redesign website JDIH 9. Melakukan konsultasi ke Pusat dalam rangka menyikapi ketentuan pada peraturan perundangan yang saling tumpang tindih 10. Menyusun surat permohonan saran dan masukan terhadap fasilitasi perda/perkada kab/kota 11. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda DIY selaku Perangkat Daerah pengampu pelaksanaan Reformasi Birokrasi 13. Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Perangkat Daerah terkait penyusunan pergeseran dan/atau perubahan anggaran tahun berjalan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH PANIRADYA KAISTIMEWAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90.2	
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3	
3 Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90.2	99.53
4 Kategori Reformasi Birokrasi Paniradya Kaistimewan DIY	3	93.99

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan**	**001**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**persen**	**91,67**		**86**															**nan**	**43**		**46,91**	**0,00**	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**																											
3	**Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan**	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**91,67**	**116.680.445.000**	**100**	**20.572.514.030**		**23.187.444.000**	**100**	**2.269.775.933**							**100**	**2.269.775.933**	**0,00**	**9,79**	**100**	**22.842.289.963**	**109,09**	**19,58**	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**
		4.01.10.5.03	***Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara***	***Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara***	***%***	***100***	***6.621.498.000***	***100***	***1.519.878.471***		***1.330.380.000***	***20,67***	***78.911.010***							***20,67***	***78.911.010***	***0,00***	***5,93***	***60,335***	***1.598.789.481***	***60,34***	***24,15***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		4.01.10.5.03.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	dokumen	30	4.093.458.000	8	785.901.221		820.380.000	1	42.237.010							1	42.237.010	0,00	5,15	9	828.138.231	30,00	20,23	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	laporan	21	2.528.040.000	6	733.977.250		510.000.000	1	36.674.000							1	36.674.000	0,00	7,19	7	770.651.250	33,33	30,48	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.04	***Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***%***	***100***	***8.092.214.000***	***100***	***1.216.503.500***		***1.644.135.000***	***18,36***	***99.705.700***							***18,36***	***99.705.700***	***0,00***	***6,06***	***59,18***	***1.316.209.200***	***59,18***	***16,27***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674		31.278.812.463		4.374.039.909							0,00	4.374.039.909	0,00	13,98		33.134.016.583	54,22	21,04	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.10.5.04.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen	25	4.509.159.000	5	570.078.400		907.500.000	1	57.484.000							1	57.484.000	0,00	6,33	6	627.562.400	24,00	13,92	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	laporan	21	3.583.055.000		646.425.100		736.635.000	1	42.221.700							1	42.221.700	0,00	5,73	1	688.646.800	4,76	19,22	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.05	***Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang***	***Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang***	***%***	***100***	***12.620.455.000***	***100***	***2.685.926.270***		***2.480.500.000***	***18,08***	***422.934.844***							***18,08***	***422.934.844***	***0,00***	***17,05***	***59,04***	***3.108.861.114***	***59,04***	***24,63***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		4.01.10.5.05.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	dokumen	35	3.663.060.000	9	676.973.123		726.000.000	1	109.279.661							1	109.279.661	0,00	15,05	10	786.252.784	28,57	21,46	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	laporan	27	2.452.040.000	6	431.326.590		484.000.000	1	33.946.551							1	33.946.551	0,00	7,01	7	465.273.141	25,93	18,97	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.05.03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	33	3.903.315.000	8	568.240.746		786.500.000	2	163.175.248							2	163.175.248	0,00	20,75	10	731.415.994	30,30	18,74	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.05.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	laporan	26	2.602.040.000		1.009.385.811		484.000.000	2	116.533.384							2	116.533.384	0,00	24,08	2	1.125.919.195	7,69	43,27	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.06	***Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan***	***Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY***	***%***	***100***	***27.004.962.000***	***100***	***2.662.019.194***		***5.441.370.000***	***26,44***	***481.246.620***							***26,44***	***481.246.620***	***0,00***	***8,84***	***63,22***	***3.143.265.814***	***63,22***	***11,64***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		4.01.10.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	74	12.892.977.000	19	1.243.861.954		2.597.870.000	6	274.629.120							6	274.629.120	0,00	10,57	25	1.518.491.074	33,78	11,78	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	laporan	96	14.111.985.000		1.418.157.240		2.843.500.000	7	206.617.500							7	206.617.500	0,00	7,27	7	1.624.774.740	7,29	11,51	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.07	***Sarana dan Prasarana Keistimewaan***	***Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan***	***%***	***100***	***16.557.814.000***	***100***	***3.204.458.678***		***3.156.769.000***												***0,00***	***50***	***3.204.458.678***	***50,00***	***19,35***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	unit	26	16.557.814.000		3.204.458.678		3.156.769.000	1								1		0,00	0,00	1	3.204.458.678	3,85	19,35	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.08	***Peningkatan Pelayanan Parampara***	***Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan***	***%***	***100***	***6.350.454.000***	***100***	***709.543.000***		***1.293.490.000***		***161.481.762***								***161.481.762***		***12,48***	***50***	***871.024.762***	***50,00***	***13,72***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674		31.278.812.463		4.374.039.909							0,00	4.374.039.909	0,00	13,98		33.134.016.583	54,22	21,04	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Praja	***Keistimewaan***																								
		4.01.10.5.08.01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	rekomendasi	57	6.350.454.000	6	709.543.000		1.293.490.000	2	161.481.762							2	161.481.762	0,00	12,48	8	871.024.762	14,04	13,72	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		4.01.10.5.09	***Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan***	***Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan***	***%***	***100***	***39.433.048.000***	***100***	***8.574.184.917***		***7.840.800.000***	***17,61***	***1.025.495.997***							***17,61***	***1.025.495.997***	***0,00***	***13,08***	***58,805***	***9.599.680.914***	***58,81***	***24,34***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		4.01.10.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	dokumen	20	39.433.048.000	4	8.574.184.917		7.840.800.000	2	1.025.495.997							2	1.025.495.997	0,00	13,08	6	9.599.680.914	30,00	24,34	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**89,79**	**40.813.106.480**	**91,21**	**8.187.462.644**		**8.091.368.463**	**91,21**	**2.104.263.976**							**91,21**	**2.104.263.976**	**0,00**	**26,01**	**91,21**	**10.291.726.620**	**101,58**	**25,22**	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***84.645.800***	***100***	***11.920.662***		***16.854.000***	***51,35***	***4.637.400***							***51,35***	***4.637.400***	***0,00***	***27,52***	***75,675***	***16.558.062***	***75,68***	***19,56***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	30	37.110.000	6	4.454.650		7.400.000	5	3.533.400							5	3.533.400	0,00	47,75	11	7.988.050	36,67	21,53	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	30.471.600	4	4.487.400		6.054.000		484.450								484.450		8,00	4	4.971.850	20,00	16,32	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	79	17.064.200	19	2.978.612		3.400.000	7	619.550							7	619.550	0,00	18,22	26	3.598.162	32,91	21,09	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri?kasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	***%***	***100***	***35.715.684.480***	***100***	***7.571.523.328***		***7.049.474.463***	***43,61***	***1.942.623.090***							***43,61***	***1.942.623.090***	***0,00***	***27,56***	***71,805***	***9.514.146.418***	***71,81***	***26,64***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.503.240.680		7.529.615.346		7.007.674.463		1.939.175.040								1.939.175.040		27,67		9.468.790.386		26,67	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	185.742.000	1	36.596.200		36.420.000	3	1.452.850							3	1.452.850	0,00	3,99	4	38.049.050	80,00	20,48	PANIRADYA KAISTIMEWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674		31.278.812.463		4.374.039.909							0,00	4.374.039.909	0,00	13,98		33.134.016.583	54,22	21,04	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	6.981.800	1	1.010.900		1.380.000		801.200								801.200		58,06	1	1.812.100	20,00	25,95	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	19.720.000	13	4.300.882		4.000.000	3	1.194.000							3	1.194.000	0,00	29,85	16	5.494.882	17,78	27,86	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***58.140.000***	***100***	***11.528.450***		***11.400.000***	***32,65***	***1.900.000***							***32,65***	***1.900.000***	***0,00***	***16,67***	***66,325***	***13.428.450***	***66,33***	***23,10***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	58.140.000	1	11.528.450		11.400.000	1	1.900.000							1	1.900.000	0,00	16,67	2	13.428.450	40,00	23,10	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	***%***	***100***	***1.062.125.200***	***100***	***89.018.604***		***228.940.000***	***31,15***	***12.239.223***							***31,15***	***12.239.223***	***0,00***	***5,35***	***65,575***	***101.257.827***	***65,58***	***9,53***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	17.402.100	1	2.073.556		3.440.000	1	350.950							1	350.950	0,00	10,20	2	2.424.506	40,00	13,93	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	72.266.800	1	9.944.330		14.100.000	4	2.945.522							4	2.945.522	0,00	20,89	5	12.889.852	100,00	17,84	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	56.122.100	1	5.696.118		11.600.000		3.783.651								3.783.651		32,62	1	9.479.769	16,67	16,89	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	39	92.526.000	3	14.270.100		18.500.000	1	2.576.100							1	2.576.100	0,00	13,92	4	16.846.200	10,26	18,21	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	25	58.012.200	2	2.535.000		12.000.000	1	633.000							1	633.000	0,00	5,28	3	3.168.000	12,00	5,46	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	765.796.000	1	54.499.500		169.300.000	3	1.950.000							3	1.950.000	0,00	1,15	4	56.449.500	80,00	7,37	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***100***	***1.670.498.800***	***100***	***300.084.000***		***336.500.000***	***33,98***	***75.062.563***							***33,98***	***75.062.563***	***0,00***	***22,31***	***66,99***	***375.146.563***	***66,99***	***22,46***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	111.820.000	6	12.516.000		22.100.000	3	23.342.563							3	23.342.563	0,00	105,62	9	35.858.563	180,00	32,07	PANIRADYA KAISTIMEWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674		31.278.812.463		4.374.039.909							0,00	4.374.039.909	0,00	13,98		33.134.016.583	54,22	21,04	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	5	1.558.678.800	6	287.568.000		314.400.000	3	51.720.000							3	51.720.000	0,00	16,45	9	339.288.000	180,00	21,77	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***	***%***	***100***	***2.222.012.200***	***100***	***203.387.600***		***448.200.000***	***35,71***	***67.801.700***							***35,71***	***67.801.700***	***0,00***	***15,13***	***67,855***	***271.189.300***	***67,86***	***12,20***	***PANIRADYA KAISTIMEWAN***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	154.855.000	1	28.778.500		30.600.000	1	8.184.000							1	8.184.000	0,00	26,75	2	36.962.500	200,00	23,87	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1.001.500.000				210.000.000												0,00	0			0,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	1.022.562.200	16	168.159.100		199.100.000	16	55.277.700							16	55.277.700	0,00	27,76	32	223.436.800	200,00	21,85	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	36	43.095.000	6	6.450.000		8.500.000	10	4.340.000							10	4.340.000	0,00	51,06	16	10.790.000	44,44	25,04	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		002	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**skor**	**89,79**																	**nan**	**0**			**0,00**	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**
Rata-rata capaian kinerja (%)							157.493.551.480		28.759.976.674		31.278.812.463		4.374.039.909							0,00	4.374.039.909	0,00	13,98		33.134.016.583	54,22	21,04	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Paniradya 3. SDM yang berkomitmen tinggi pada tugas 4. Sarana dan prasarana yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Terdapat dinamika kebijakan di Pusat sehingga mempengaruhi pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2025 2. Beberapa aktivitas kegiatan ditunda setelah lebaran 3. Alur perencanaan semakin kompleks sebagai contoh adanya keharusan reviu dari inspektorat pada setiap tahapan perencanaan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Mengutamakan program-program prioritas yang bersifat urgent dan wajib sebagai tindaklanjut dari adanya kebijakan efisiensi 2. Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan agar dapat selesai sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pada tahap perencanaan agar dapat diselesaikann sesuai dengan tata kala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96	54.76
2 Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	88.56	88.56

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Terfasilitasinya Kinerja DPRD**	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Bahan Acara Pengawasan Urusan Keistimewaan, selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY**	**persen**	**0**		**95,5**															**nan**	**47,75**		**0,00**	**0,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.01.10. 5.03	***Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara***																									
		4.01.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY**	**Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY**	**%**		**4.785.950.000**																**nan**	**0**			**0,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.01.11.5.01	***Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY***	***Terlaksananya Penyeleng garaan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur***	***%***	***0***	***4.785.950.000***																***nan***	***0***			***0,00***	***SEKRETARIAT DPRD***
		4.01.11.5.01.02	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	laporan	3	4.785.950.000				0												0,00	0			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Persidangan)**	**%**	**0**	**428.632.934.100**	**128,57**	**50.758.078.189**		**93.426.268.000**	**17,16**								**17,16**		**0,00**	**0,00**	**72,865**	**50.758.078.189**	**0,00**	**11,84**	**SEKRETARIAT DPRD**
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian PPHP)	**%**	**0**		**128,57**				**17,16**							**17,16**		**0,00**		**72,865**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	**%**	**0**		**128,57**				**17,16**							**17,16**		**0,00**		**72,865**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500								0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(bagian Penyusunan Progam dan Keuangan)																							
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (humas dan Protokol)	**%**	**0**		**128,57**			**17,16**							**17,16**		**0,00**		**72,865**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Umum)	**%**	**0**		**99,06**			**17,16**							**17,16**		**0,00**		**58,11**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.1.01	***Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD***	***Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD***	***%***	***9.700***	***77.768.311.940***	***94,96***	***10.268.550.481***		***19.199.980.000***										***0,00***	***47,48***	***10.268.550.481***	***0,49***	***13,20***	***SEKRETARIAT DPRD***
		4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	50	15.412.525.760	15	1.339.459.467		3.107.764.000										0,00	15	1.339.459.467	30,00	8,69	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	dokumen	72	39.963.493.460	10	5.197.874.421		8.101.639.000										0,00	10	5.197.874.421	13,89	13,01	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	40	5.711.016.340	2	847.584.620		1.081.593.000										0,00	2	847.584.620	5,00	14,84	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	790	16.681.276.380	158	2.883.631.973		3.297.060.000										0,00	158	2.883.631.973	20,00	17,29	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.05	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	orang	0	0				3.611.924.000										0,00	0			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD***	***%***	***9.700***	***12.275.085.220***	***95,5***	***1.538.611.362***		***2.509.001.000***										***0,00***	***47,75***	***1.538.611.362***	***0,49***	***12,53***	***SEKRETARIAT DPRD***
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500								0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	10	2.577.996.660	2	388.042.820		521.721.000											0,00	2	388.042.820	20,00	15,05	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	10	616.328.880	2	52.115.000		125.132.000											0,00	2	52.115.000	20,00	8,46	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	5	3.237.574.040	1	239.483.036		675.309.000											0,00	1	239.483.036	20,00	7,40	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	dokumen	5	2.478.108.840	1	421.730.200		503.718.000											0,00	1	421.730.200	20,00	17,02	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	5	255.445.080	1	18.280.000		51.988.000											0,00	1	18.280.000	20,00	7,16	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	5	3.109.631.720	1	418.960.306		631.133.000											0,00	1	418.960.306	20,00	13,47	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.03	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	***Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian***	***%***	***9.700***	***5.755.403.040***	***95,5***	***2.876.700.415***		***1.140.756.000***											***0,00***	***47,75***	***2.876.700.415***	***0,49***	***49,98***	***SEKRETARIAT DPRD***
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	27	1.896.442.320	6	1.097.338.375		285.189.000											0,00	6	1.097.338.375	22,22	57,86	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	24	1.286.320.240	5	539.870.040		285.189.000											0,00	5	539.870.040	20,83	41,97	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	24	1.286.320.240	5	631.573.300		285.189.000											0,00	5	631.573.300	20,83	49,10	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	24	1.286.320.240	5	607.918.700		285.189.000											0,00	5	607.918.700	20,83	47,26	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	***Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan,***	***%***	***97***	***129.991.260.960***	***95,5***	***9.593.547.481***		***26.692.459.000***											***0,00***	***47,75***	***9.593.547.481***	***49,23***	***7,38***	***SEKRETARIAT DPRD***
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500									0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																								
		4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen	1	800.000.000	1	975.168.390		0											0,00	1	975.168.390	100,00	121,90	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	28	18.105.783.040	6	3.113.078.621		3.862.482.000											0,00	6	3.113.078.621	21,43	17,19	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	77	68.404.536.520	6			14.039.898.000											0,00	6		7,79	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	90	8.657.046.220	18	819.303.852		1.728.749.000											0,00	18	819.303.852	20,00	9,46	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	35	4.307.288.560	7	640.684.300		855.721.000											0,00	7	640.684.300	20,00	14,87	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	164	29.716.606.620	36	4.045.312.318		6.205.609.000											0,00	36	4.045.312.318	21,95	13,61	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses***	***%***	***97***	***57.096.765.260***	***95,5***	***4.456.168.000***		***12.738.625.000***											***0,00***	***47,75***	***4.456.168.000***	***49,23***	***7,80***	***SEKRETARIAT DPRD***
		4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	240	5.947.127.760				1.456.509.000											0,00	0			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	5	1.364.364.420	1	108.062.000		234.859.000											0,00	1	108.062.000	20,00	7,92	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	14	49.785.273.080	2	4.348.106.000		11.047.257.000											0,00	2	4.348.106.000	14,29	8,73	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.06	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%***	***%***	***97***	***2.220.310.660***	***95,5***	***316.433.422***		***455.692.000***											***0,00***	***47,75***	***316.433.422***	***49,23***	***14,25***	***SEKRETARIAT DPRD***
		4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	15	2.220.310.660	2	316.433.422		455.692.000											0,00	2	316.433.422	13,33	14,25	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08	***Fasilitasi Tugas DPRD***	***Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi***	***%***	***97***	***143.525.797.020***	***95,5***	***21.708.067.028***		***30.689.755.000***											***0,00***	***47,75***	***21.708.067.028***	***49,23***	***15,12***	***SEKRETARIAT DPRD***
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500										0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																								
		4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	185	104.093.612.740	48	12.449.658.124		23.319.309.000											0,00	48	12.449.658.124	25,95	11,96	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	5	164.075.880	2	34.169.000		32.786.000											0,00	2	34.169.000	40,00	20,83	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	70	9.615.909.120	15	1.248.221.397		2.025.768.000											0,00	15	1.248.221.397	21,43	12,98	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	65	29.652.199.280	13	7.976.018.507		5.311.892.000											0,00	13	7.976.018.507	20,00	26,90	SEKRETARIAT DPRD
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian umum)**	**%**	**0**	**744.665.504.220**	**70,68**	**62.326.103.483**		**20.253.504.011.500**	**81,4**							**81,4**		**0,00**	**0,00**	**76,04**	**62.326.103.483**	**0,00**	**8,37**	**SEKRETARIAT DPRD**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian penyusunan Program dan keuangan)	**%**	**0**		**91,99**				**81,4**							**81,4**		**0,00**		**86,695**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Persidangan)	**%**	**0**		**91,99**				**81,4**							**81,4**		**0,00**		**86,695**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Humas Protokol)	**persen**	**0**						**81,4**							**81,4**		**0,00**		**40,7**		**0,00**		**SEKRETARIAT DPRD**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***662.567.320***	***100***	***91.608.400***		***137.106.000***											***0,00***	***50***	***91.608.400***	***50,00***	***13,83***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	290.763.260	5	45.058.000		62.461.000											0,00	5	45.058.000	20,00	15,50	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	174.562.560	4	23.166.400		34.808.000											0,00	4	23.166.400	20,00	13,27	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500								0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	197.241.500	5	23.384.000														0,00	5	23.384.000	33,33	11,86	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD***	***%***	***100***	***57.709.793.415***	***100***	***8.860.245.720***		***11.714.931.000***												***0,00***	***50***	***8.860.245.720***	***50,00***	***15,35***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	470	56.996.856.835	80	8.718.906.520		11.572.563.000												0,00	80	8.718.906.520	17,02	15,30	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	319.126.040	12	56.495.000		63.727.000												0,00	12	56.495.000	20,00	17,70	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	69.868.400	1	12.711.000		13.952.000												0,00	1	12.711.000	20,00	18,19	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	65	323.942.140	13	72.133.200		64.689.000												0,00	13	72.133.200	20,00	22,27	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***141.462.160***	***100***	***14.905.000***		***29.404.000***												***0,00***	***50***	***14.905.000***	***50,00***	***10,54***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	70	141.462.160	14	14.905.000		29.404.000												0,00	14	14.905.000	20,00	10,54	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	***%***	***100***	***1.991.958.040***	***100***	***219.102.500***		***400.685.000***												***0,00***	***50***	***219.102.500***	***50,00***	***11,00***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	80	83.517.520	16	24.713.000		19.374.000												0,00	16	24.713.000	20,00	29,59	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500										0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	110	1.908.440.520	25	194.389.500		381.311.000											0,00		25	194.389.500	22,73	10,19	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***	***%***	***100***	***7.794.133.780***	***100***	***1.100.265.860***		***1.592.568.000***											***0,00***		***50***	***1.100.265.860***	***50,00***	***14,12***	***SEKRETARIAT DPRD***		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	38	182.276.260	5	36.693.664		36.418.000											0,00		5	36.693.664	13,16	20,13	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25	1.087.857.980	6	242.140.059		226.681.000											0,00		6	242.140.059	24,00	22,26	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	66.520.580	3	188.930.128		10.623.000											0,00		3	188.930.128	12,50	284,02	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	773.953.600	5	97.975.544		153.621.000											0,00		5	97.975.544	50,00	12,66	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	5.683.525.360	36	534.526.465		1.165.225.000											0,00		36	534.526.465	30,00	9,40	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel***	***%***	***100***	***375.833.889.744***	***100***	***681.427.672***		***19.743.697.355.500***											***0,00***		***50***	***681.427.672***	***50,00***	***0,18***	***SEKRETARIAT DPRD***		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	539	6.174.223.140	37	298.924.000		109.397.800.000											0,00		37	298.924.000	6,86	4,84	SEKRETARIAT DPRD		
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500									0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60			
Predikat Kinerja																				SR	SR					T	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	369.602.273.604	1	375.703.672		19.634.299.555.500												0,00	1	375.703.672	100,00	0,10	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	57.393.000	1	6.800.000		0												0,00	1	6.800.000	16,67	11,85	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***1***	***17.337.820.820***	***100***	***3.344.391.504***		***220.497.366.000***												***0,00***	***50***	***3.344.391.504***	***5.000,00***	***19,29***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	300	6.264.597.180	60	1.047.022.020		1.248.166.000												0,00	60	1.047.022.020	20,00	16,71	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	300	11.073.223.640	48	2.297.369.484		219.249.200.000												0,00	48	2.297.369.484	16,00	20,75	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***1***	***11.057.501.512***		***1.292.973.694***		***29.238.188.000***												***0,00***	***0***	***1.292.973.694***		***11,69***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	2.221.861.740	5	262.627.282		437.819.000												0,00	5	262.627.282	100,00	11,82	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672		20.346.930.279.500								0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	64.880.000			0												0,00	0			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	3.477.199.580	28	489.801.562	670.849.000												0,00	28	489.801.562	96,55	14,09	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	60	4.120.000	14	8.400.000	0												0,00	14	8.400.000	23,33	203,88	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	274	1.367.595.680	274	273.441.850	27.353.600.000												0,00	274	273.441.850	100,00	19,99	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	3.921.844.512	3	258.703.000	775.920.000												0,00	3	258.703.000	300,00	6,60	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD***	***%***	***100***	***247.984.011.309***	***99,88***	***43.243.364.133***	***49.382.040.000***												***0,00***	***49,94***	***43.243.364.133***	***49,94***	***17,44***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	55	244.259.381.629	55	42.422.865.113	48.558.032.000												0,00	55	42.422.865.113	100,00	17,37	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	275	2.232.752.460	495	608.559.900	526.091.000												0,00	495	608.559.900	180,00	27,26	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	55	1.491.877.220	0	211.939.120	297.917.000												0,00	0	211.939.120		14,21	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.16	***Layanan Administrasi DPRD***	***Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD***	***%***	***100***	***24.152.366.120***	***100***	***3.477.819.000***	***196.814.368.000***												***0,00***	***50***	***3.477.819.000***	***50,00***	***14,40***	***SEKRETARIAT DPRD***
		0.00.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	1.204	14.382.697.300	371	3.003.787.000	2.801.068.000												0,00	371	3.003.787.000	30,81	20,88	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	583	9.769.668.820	40	474.032.000	194.013.300.000												0,00	40	474.032.000	6,86	4,85	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)							1.178.084.388.320		113.084.181.672	20.346.930.279.500											0,00		0,00	0,00		113.084.181.672	85,09	9,60	
Predikat Kinerja																			SR	SR					T	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat terobosan dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW 1 terkait pelayanan pimpinan dengan memilih tunjangan transportasi dari pada kendaraan dinas perorangan, Perubahan kebijakan regulasi yang terjadi dengan berlakunya kembali Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Pelayanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dinamika yang ada dan tetap berpedoman regulasi dan SOP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	88.89	99.21
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan**	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah**	**%**	**85**	**5.306.279.700**	**76,2**	**231.748.223**		**3.862.100.000**	**76,2**								**76,2**		**0,00**	**0,00**	**76,2**	**231.748.223**	**89,65**	**4,37**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		2.20.02.1.01	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral***	***Dokumen***	***39***	***5.306.279.700***	***8***	***231.748.223***		***3.862.100.000***	***1***								***1***		***0,00***	***0,00***	***9***	***231.748.223***	***23,08***	***4,37***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	39	5.306.279.700	8	231.748.223		3.862.100.000												0,00	8	231.748.223	20,51	4,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan**	**%**	**100**	**18.529.037.135**	**100**	**2.226.778.344**	**0**	**3.861.651.000**	**100**	**111.496.265**							**100**	**111.496.265**	**0,00**	**2,89**	**100**	**2.338.274.609**	**100,00**	**12,62**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.02.1.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)***	***Dokumen***	***34***	***8.295.827.700***	***5***	***972.121.843***		***1.673.215.000***	***2***	***39.983.825***							***2***	***39.983.825***	***0,00***	***2,39***	***7***	***1.012.105.668***	***20,59***	***12,20***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	563.503.000	2	65.535.009		111.683.000	0	11.823.825							0	11.823.825	0,00	10,59	2	77.358.834	20,00	13,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	23	7.732.324.700	4	906.586.834		1.561.532.000	0	28.160.000							0	28.160.000	0,00	1,80	4	934.746.834	17,39	12,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.1.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi***	***Dokumen***	***135***	***10.233.209.435***	***28***	***1.254.656.501***		***2.188.436.000***	***2***	***71.512.440***							***2***	***71.512.440***	***0,00***	***3,27***	***30***	***1.326.168.941***	***22,22***	***12,96***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	124	9.898.723.335	25	1.227.906.001		2.110.894.000	2	71.512.440							2	71.512.440	0,00	3,39	27	1.299.418.441	21,77	13,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	15	334.486.100	3	26.750.500		77.542.000												0,00	3	26.750.500	20,00	8,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Pemerintahan**	**%**	**94**	**4.359.356.000**	**100**	**619.594.472**		**849.118.000**	**100**	**168.649.415**							**100**	**168.649.415**	**0,00**	**19,86**	**100**	**788.243.887**	**106,38**	**18,08**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sosial Budaya	**%**	**94**		**100**				**100**								**100**		**0,00**		**100**		**106,38**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Perekonomian	**%**	**94**		**100**		**0**		**100**								**100**		**0,00**		**100**		**106,38**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sarana dan Prasarana	**%**	**94**		**100**				**96,3**								**96,3**		**0,00**		**98,15**		**104,41**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan - Bidang Sosial Budaya	**%**	**28,97**		**32,41**		**0**		**32,41**								**32,41**		**0,00**		**32,41**		**111,87**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) - Bidang Perekonomian	**%**	**94**		**100**				**100**								**100**		**0,00**		**100**		**106,38**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan - Bidang Sarana dan Prasarana	**%**	**100**		**100**				**100**								**100**		**0,00**		**100**		**100,00**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.03.1.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)***	***Dokumen***	***8***	***2.826.129.500***	***2***	***447.672.350***		***560.105.000***		***125.835.470***								***125.835.470***		***22,47***	***2***	***573.507.820***	***25,00***	***20,29***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	***dokumen***	***20***		***5***		***0***													***5***		***25,00***		***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	13	610.510.000	2	94.613.100		121.000.000	0	17.399.470							0	17.399.470	0,00	14,38	2	112.012.570	15,38	18,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	2.215.619.500	5	353.059.250		439.105.000	0	108.436.000							0	108.436.000	0,00	24,69	5	461.495.250	20,83	20,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.03.1.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)***	***Dokumen***	***18***	***610.509.900***	***3***	***87.943.300***		***121.000.000***		***22.707.195***								***22.707.195***		***18,77***	***3***	***110.650.495***	***16,67***	***18,12***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	610.509.900	3	87.943.300		121.000.000	0	22.707.195							0	22.707.195	0,00	18,77	3	110.650.495	21,43	18,12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.1.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)***	***Dokumen***	***15***	***922.716.600***	***3***	***83.978.822***		***168.013.000***		***20.106.750***								***20.106.750***		***11,97***	***3***	***104.085.572***	***20,00***	***11,28***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15	922.716.600	3	83.978.822		168.013.000	0	20.106.750							0	20.106.750	0,00	11,97	3	104.085.572	20,00	11,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**85**	**1.709.304.100**	**81,37**	**127.249.133**		**352.304.000**	**81,37**	**28.536.907**							**81,37**	**28.536.907**	**0,00**	**8,10**	**81,37**	**155.786.040**	**95,73**	**9,11**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
				Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional	**%**	**70**		**60,26**				**60,26**								**60,26**		**0,00**		**60,26**		**86,09**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.05.02.1.01	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum***	***Laporan***	***2***	***29.095.000***																***nan***	***0***			***0,00***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	29.095.000				0												0,00	0			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.02	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	***Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial***	***Dokumen***	***8***	***521.974.100***	***1***	***31.509.039***		***116.922.000***		***8.147.185***								***8.147.185***		***6,97***	***1***	***39.656.224***	***12,50***	***7,60***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	8	521.974.100	1	31.509.039		116.922.000	0	8.147.185							0	8.147.185	0,00	6,97	1	39.656.224	12,50	7,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah***	***Dokumen***	***4***		***0***														***nan***	***0***			***0,00***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	undefined	0	0				0												0,00	0			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan***	***Laporan***	***25***	***1.158.235.000***	***5***	***95.740.094***		***235.382.000***		***20.389.722***								***20.389.722***		***8,66***	***5***	***116.129.816***	***20,00***	***10,03***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																								***RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	20	993.100.000	5	95.740.094		235.382.000	0	20.389.722							0	20.389.722	0,00	8,66	5	116.129.816	25,00	11,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen	5	165.135.000				0												0,00	0			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**96**	**118.822.719.606**	**93,05**	**18.084.410.522**	**95,16**	**25.204.754.935**	**93,05**	**2.977.300.704**							**93,05**	**2.977.300.704**	**97,78**	**11,81**	**93,05**	**21.061.711.226**	**96,93**	**17,73**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***150***	***469.154.100***	***29***	***57.027.255***		***92.984.000***	***8***	***8.624.000***							***8***	***8.624.000***	***0,00***	***9,27***	***37***	***65.651.255***	***24,67***	***13,99***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	157.401.800	3	13.606.700		31.196.000	1	2.383.000							1	2.383.000	0,00	7,64	4	15.989.700	20,00	10,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	120.184.500	4	14.709.500	4	23.820.000	0								0		0,00	0,00	4	14.709.500	16,67	12,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	132	191.567.800	22	28.711.055		37.968.000	7	6.241.000							7	6.241.000	0,00	16,44	29	34.952.055	21,97	18,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	***dokumen /laporan /org/bln***	***715***	***93.682.968.209***	***131***	***16.125.297.980***		***18.783.232.935***	***119***	***2.639.491.098***							***119***	***2.639.491.098***	***0,00***	***14,05***	***250***	***18.764.789.078***	***34,97***	***20,03***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	undefined	630	93.007.798.999	115	16.044.471.750		18.649.416.935	115	2.623.332.948							115	2.623.332.948	0,00	14,07	230	18.667.804.698	36,51	20,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	474.308.210	2	56.571.250		94.006.000	0	2.954.600							0	2.954.600	0,00	3,14	2	59.525.850	20,00	12,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	54.800.600	4	8.223.540		10.861.000		2.337.750								2.337.750		21,52	4	10.561.290	40,00	19,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	65	146.060.400	13	16.031.440		28.949.000		10.865.800								10.865.800		37,53	13	26.897.240	20,00	18,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***Laporan***	***60***	***122.348.000***	***6***	***19.739.600***		***24.249.000***	***1***	***2.850.000***							***1***	***2.850.000***	***0,00***	***11,75***	***7***	***22.589.600***	***11,67***	***18,46***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	undefined	60	122.348.000	6	19.739.600	12	24.249.000	0	2.850.000							0	2.850.000	0,00	11,75	6	22.589.600	10,00	18,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	***dokumen***	***65***	***912.538.200***	***13***	***56.305.639***		***184.720.000***	***3***	***7.377.419***							***3***	***7.377.419***	***0,00***	***3,99***	***16***	***63.683.058***	***24,62***	***6,98***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	undefined	65	912.538.200	13	56.305.639		184.720.000	3	7.377.419							3	7.377.419	0,00	3,99	16	63.683.058	24,62	6,98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD***	***paket/ dokumen /laporan***	***139***	***6.814.051.807***	***14***	***530.961.493***		***1.363.306.000***	***10***	***134.886.114***							***10***	***134.886.114***	***0,00***	***9,89***	***24***	***665.847.607***	***17,27***	***9,77***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	10	109.836.900	2	10.901.021		21.769.000	1	11.688.829							1	11.688.829	0,00	53,69	3	22.589.850	30,00	20,57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	475.345.100	3	48.414.152		94.211.000	3	52.298.800							3	52.298.800	0,00	55,51	6	100.712.952	40,00	21,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	15	308.221.600	3	36.681.477	2	61.088.000	2	24.281.191							2	24.281.191	100,00	39,75	5	60.962.668	33,33	19,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	undefined	20	323.283.700	4	24.529.054	1	64.073.000	1	22.714.317							1	22.714.317	100,00	35,45	5	47.243.371	25,00	14,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	26	90.831.600	5	9.707.000		18.002.000	3	2.850.000							3	2.850.000	0,00	15,83	8	12.557.000	30,77	13,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	undefined	30	4.751.823.407	6	325.383.216	2	939.163.000	0	20.654.227							0	20.654.227	0,00	2,20	6	346.037.443	20,00	7,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	undefined	9	754.709.500	1	75.345.573		165.000.000	0	398.750							0	398.750	0,00	0,24	1	75.744.323	11,11	10,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***unit/ paket***	***346***	***5.475.551.500***	***12***	***295.179.000***		***805.257.000***											***0,00***	***12***	***295.179.000***	***3,47***	***5,39***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	200.000.000				50.000.000											0,00	0			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	719.470.800				147.000.000	0										0,00	0			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	175	2.854.793.000	13	226.649.000	1	511.000.000	0								0		0,00	0,00	13	226.649.000	7,43	7,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	1.701.287.700	1	68.530.000		97.257.000	0								0		0,00	0,00	1	68.530.000	2,08	4,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.***	***Laporan***	***45***	***3.136.359.060***	***6***	***496.471.818***	***3***	***621.611.000***		***124.160.174***								***124.160.174***	***19,97***	***6***	***620.631.992***	***13,33***	***19,79***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	10	70.370.000	2	8.235.000		13.947.000	0	250.000							0	250.000	0,00	1,79	2	8.485.000	20,00	12,06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	10	413.169.900	1	39.230.318		81.888.000	0	9.629.720							0	9.629.720	0,00	11,76	1	48.860.038	10,00	11,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	10	326.788.560	1	51.181.000		64.768.000	0	8.782.592							0	8.782.592	0,00	13,56	1	59.963.592	10,00	18,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	15	2.326.030.600	3	397.825.500	1	461.008.000	0	105.497.862							0	105.497.862	0,00	22,88	3	503.323.362	20,00	21,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran***	***Unit***	***1.185***	***8.209.748.730***	***168***	***503.427.737***	***27***	***3.329.395.000***	***78***	***59.911.899***							***78***	***59.911.899***	***288,89***	***1,80***	***246***	***563.339.636***	***20,76***	***6,86***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.																					***INOVASI DAERAH***
		5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	210.102.600	1	29.316.500		41.643.000	1	6.750.000							1	6.750.000	0,00	16,21	2	36.066.500	40,00	17,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	1.621.589.400	9	168.270.148		321.394.000	0	29.031.899								29.031.899		9,03	9	197.302.047	13,43	12,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	5	61.968.000	1	10.150.000		12.282.000	1	2.500.000							1	2.500.000	0,00	20,35	2	12.650.000	40,00	20,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	298	79.096.400	21	10.990.000		15.677.000	3	2.790.000							3	2.790.000	0,00	17,80	24	13.780.000	8,05	17,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	417	394.540.400	102	54.755.400		78.196.000	24	14.090.000							24	14.090.000	0,00	18,02	126	68.845.400	30,22	17,45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.650.551.630	1	208.081.689		2.822.169.000	0								0		0,00	0,00	1	208.081.689	10,00	3,68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	226	191.900.300	33	21.864.000	0	38.034.000	39	4.750.000							39	4.750.000	0,00	12,49	72	26.614.000	31,86	13,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						150.041.696.541		21.289.780.694		34.129.927.935		3.285.983.291							7,72	3.285.983.291	7,72	9,63		24.575.763.985	31,63	16,38	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Komitmen pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten untuk meningktakan kualitas pengendalian. 2. Dukungan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem yang dapat menjadi intrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian. 3. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024 ttg APBD 2025 4. Pergub DIY No 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Pergub DIY No 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapperida DIY 7. Aplikasi Jogja plan 8. Aplikasi Sengguh 9. Aplikasi Simnangkis 10. Aplikasi/Sistem Informasi Internal (Sintal) 11. Aplikasi Jogja Dataku 12. Aplikasi Geoportal 13. Aplikasi SiHK 14. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 15. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Serapan anggaran yang masih belum optimal karena faktor eksternal, penyesuaian harga pasar 2. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah 3. Capaian Kinerja Bapperida DIY sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				1. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPERIDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 2.Meningkatkan evaluasi internal Bapperida DIY secara rutin; 3.Koordinasi secara intensif dengan perangkat Daerah; 4.Koordinasi insentif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; 5.Pengembangan sistem informasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan/kebijakan yang berlaku																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100	54
2 Optimalisasi Barang Milik Daerah	9703109475	4136622889
3 Kategori RB Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah)**	**%**	**0**	**4.195.968.880.170**	**100**	**966.918.897.209**		**447.890.410.389**	**25**	**138.150.967**								**25**	**138.150.967**	**0,00**	**0,03**	**62,5**	**967.057.048.176**	**0,00**	**23,05**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Anggaran Belanja)	**%**	**0**		**71,25**				**25**								**25**		**0,00**		**48,125**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang BAKD)	**%**	**0**		**100**				**25**								**25**		**0,00**		**62,5**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Pengelola Kas Daerah)	**%**	**0**		**100**				**25**								**25**		**0,00**		**62,5**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Akuntansi)	**%**	**0**		**100**				**25**								**25**		**0,00**		**62,5**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
		5.02.02.1.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran***	***%***	***100***	***19.336.622.200***	***100***	***746.597.874***		***4.480.000.000***	***25***	***23.705.913***								***25***	***23.705.913***	***0,00***	***0,53***	***62,5***	***770.303.787***	***62,50***	***3,98***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	***%***	***0***																	***0***				***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni &	***%***	***0***																	***0***				***BADAN PENGELOLA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532								0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																							***KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.378.726.000	2	28.470.595		550.000.000											0,00	2	28.470.595	20,00	1,20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.377.226.000	2	30.099.955		550.000.000											0,00	2	30.099.955	20,00	1,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0				0											0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0				0											0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	150	3.289.815.600		295.085.000		730.000.000	30	6.991.224							30	6.991.224	0,00	0,96	30	302.076.224	20,00	9,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	5.122.515.500	2	331.061.957		1.200.000.000		12.449.218								12.449.218		1,04	2	343.511.175	20,00	6,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	10	5.542.782.000	2	59.705.367		1.300.000.000	1	4.265.471							1	4.265.471	0,00	0,33	3	63.970.838	30,00	1,15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	625.557.100	2	2.175.000		150.000.000											0,00	2	2.175.000	20,00	0,35	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.02	***Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabuaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***3.297.195.700***		***18.074.000***		***760.000.000***	***55,85***	***704.300***							***55,85***	***704.300***	***0,00***	***0,09***	***27,925***	***18.778.300***	***27,93***	***0,57***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000											0,00	5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota																								
		5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000												0,00	5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000												0,00	5	5.000.000	20,00	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	10	46.213.900		3.074.000		10.000.000	1	704.300							1	704.300	0,00	7,04	1	3.778.300	10,00	8,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.03	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	***Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait***	***%***	***100***	***2.161.970.500***	***0***	***53.492.000***		***490.000.000***	***25***	***4.607.994***							***25***	***4.607.994***	***0,00***	***0,94***	***12,5***	***58.099.994***	***12,50***	***2,69***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	10	1.139.310.000	1	20.610.000		250.000.000	1	1.500.000							1	1.500.000	0,00	0,60	2	22.110.000	20,00	1,94	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	40.000	1.022.660.500		32.882.000		240.000.000	1.100	3.107.994							1.100	3.107.994	0,00	1,29	1.100	35.989.994	2,75	3,52	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																								
		5.02.02.1.04	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD***	***%***	***100***	***5.508.358.700***		***164.054.850***	***1.224.000.000***		***7.862.760***								***7.862.760***		***0,64***	***0***	***171.917.610***		***3,12***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	60	183.857.800	12	7.323.700		40.000.000	1								1		0,00	0,00	13	7.323.700	21,67	3,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	227.484.400	2	20.563.000		50.000.000	1	7.212.760							1	7.212.760	0,00	14,43	3	27.775.760	30,00	12,21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	10	3.540.453.600	1	45.932.250		800.000.000												0,00	1	45.932.250	10,00	1,30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	54.051.600		3.469.900		12.000.000												0,00	0	3.469.900		6,42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	54.778.400	1	4.753.000		12.000.000												0,00	1	4.753.000	20,00	8,68	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	41.000.000	1			10.000.000												0,00	1		25,00	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	749.777.200	1	53.306.000		150.000.000											0,00	1	53.306.000	20,00	7,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	600	426.704.100	120	6.711.000		100.000.000											0,00	120	6.711.000	20,00	1,57	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	8	230.251.600	11	21.996.000		50.000.000	27	650.000							27	650.000	0,00	1,30	38	22.646.000	475,00	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.05	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi***	***%***	***100***	***4.165.664.733.070***		***965.936.678.485***		***440.936.410.389***	***30***	***101.270.000***							***30***	***101.270.000***	***0,00***	***0,02***	***15***	***966.037.948.485***	***15,00***	***23,19***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	49	9.342.477.600	6	717.668.450		2.000.000.000		1.270.000								1.270.000		0,06	6	718.938.450	12,24	7,70	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	1.180.768.293.600	5	94.839.603.526		15.000.000.000	1	100.000.000							1	100.000.000	0,00	0,67	6	94.939.603.526	120,00	8,04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	106.021.177.076	1	20.000.000		20.000.000.000											0,00	1	20.000.000	20,00	0,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	5	2.869.532.784.794	1	870.359.406.509		403.936.410.389	1								1		0,00	0,00	2	870.359.406.509	40,00	30,33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (Pendapatan Pemda/BPKA sebagai SKPKD))**	**%**	**0**	**68.140.990.557**	**60,05**	**6.128.784.143**		**14.423.736.310**	**13,13**	**680.921.755**							**13,13**	**680.921.755**	**0,00**	**4,72**	**36,59**	**6.809.705.898**	**0,00**	**9,99**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	**%**	**0**		**9,6**				**1,37**							**1,37**		**0,00**		**5,485**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	**%**	**0**		**12,11**				**1,78**							**1,78**		**0,00**		**6,945**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah ((KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	**%**	**0**		**4,27**				**0,58**							**0,58**		**0,00**		**2,425**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	**%**	**0**		**3,75**				**0,53**							**0,53**		**0,00**		**2,14**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	**%**	**0**		**21,93**				**3,11**								**3,11**		**0,00**		**12,52**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
		5.02.04.1.01	***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.***	***%***	***100***	***68.140.990.557***	***0***	***6.128.784.143***	***14.423.736.310***	***22,97***	***680.921.755***							***22***	***680.921.755***	***0,00***	***4,72***	***11***	***6.809.705.898***	***11,00***	***9,99***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	5	20.880.986.000		2.984.688.450	4.150.000.000	1	21.500.000							1	21.500.000	0,00	0,52	1	3.006.188.450	20,00	14,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	0	1	13.588.550	0	1								1		0,00	0,00	2	13.588.550	40,00	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	5																	0				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	3.118.209.400	1	56.555.000	675.000.000	1								1		0,00	0,00	2	56.555.000	40,00	1,81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	300	12.785.347.353	48	946.453.704	2.734.740.720	15	59.376.528							15	59.376.528	0,00	2,17	63	1.005.830.232	21,00	7,87	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	300	30.586.141.689	15	2.094.638.489	6.679.215.347	15	597.270.227							15	597.270.227	0,00	8,94	30	2.691.908.716	10,00	8,80	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	319.951.875	1	31.860.000	78.750.000	1	2.775.000							1	2.775.000	0,00	3,52	2	34.635.000	50,00	10,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	10	450.354.240	2	999.950	106.030.243	1								1		0,00	0,00	3	999.950	30,00	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2	**Optimalisasi aset Pemda DIY**	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur**	**%**	**0**	**31.617.409.040**	**100**	**2.148.376.867**	**7.450.000.000**	**13**	**217.985.408**							**13**	**217.985.408**	**0,00**	**2,93**	**56,5**	**2.366.362.275**	**0,00**	**7,48**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.03.1.01	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah***	***%***	***100***	***31.617.409.040***		***2.148.376.867***	***7.450.000.000***	***13***	***217.985.408***							***13***	***217.985.408***	***0,00***	***2,93***	***6,5***	***2.366.362.275***	***6,50***	***7,48***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	3.415.699.000	1	299.139.500	750.000.000	1	4.304.000							1	4.304.000	0,00	0,57	2	303.443.500	40,00	8,88	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	869.622.200	1	53.468.450	200.000.000	1	384.000							1	384.000	0,00	0,19	2	53.852.450	40,00	6,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	3.454.885.100	2	275.531.430	800.000.000	1	17.802.000							1	17.802.000	0,00	2,23	3	293.333.430	30,00	8,49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	15	18.621.752.240		982.772.637	4.500.000.000	1	56.407.008							1	56.407.008	0,00	1,25	1	1.039.179.645	6,67	5,58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	10	2.308.477.000	2	209.057.900	500.000.000	1	4.071.500							1	4.071.500	0,00	0,81	3	213.129.400	30,00	9,23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	15	2.946.973.500	3	328.406.950	700.000.000	1	135.016.900							1	135.016.900	0,00	19,29	4	463.423.850	26,67	15,73	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
3	**Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**0**	**900.717.646.849**	**91,11**	**95.636.607.205**	**236.073.747.820**	**83,98**	**4.564.951.402**							**83,98**	**4.564.951.402**	**0,00**	**1,93**	**175,09**	**100.201.558.607**	**0,00**	**11,12**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	**Nilai**	**0**		**85,9**			**83**							**83**		**0,00**		**168,9**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	**Nilai**	**0**		**85,9**			**83**							**83**		**0,00**		**168,9**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	**Nilai**	**0**		**85,9**			**83**							**83**		**0,00**		**168,9**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	**Nilai**	**0**		**85,9**				**83**							**83**		**0,00**		**168,9**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	**Nilai**	**0**		**85,9**				**83**							**83**		**0,00**		**168,9**		**0,00**		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***6***	***648.325.300***	***1***	***9.094.672***	***140.000.000***		***3***	***2.299.000***							***3***	***2.299.000***	***0,00***	***1,64***	***2***	***11.393.672***	***33,33***	***1,76***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	204.373.700	6	3.998.000	45.000.000		1	1.850.000							1	1.850.000	0,00	4,11	7	5.848.000	21,88	2,86	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	274.738.700		3.936.972	60.000.000		1	195.000							1	195.000	0,00	0,33	1	4.131.972	10,00	1,50	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	169.212.900	12	1.159.700	35.000.000		3	254.000							3	254.000	0,00	0,73	15	1.413.700	25,00	0,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	***%***	***100***	***496.101.001.903***		***80.633.294.712***	***99.476.671.001***		***24***	***3.262.568.107***							***24***	***3.262.568.107***	***0,00***	***3,28***	***12***	***83.895.862.819***	***12,00***	***16,91***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	240	494.602.043.009	240	80.619.841.262	99.175.668.291		240	3.255.113.817							240	3.255.113.817	0,00	3,28	480	83.874.955.079	200,00	16,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	360	1.319.708.894	72	5.840.000	265.002.710		13	6.433.290							13	6.433.290	0,00	2,43	85	12.273.290	23,61	0,93	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	102.250.000	1	4.617.700	20.500.000		1	1.021.000							1	1.021.000	0,00	4,98	2	5.638.700	40,00	5,51	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	77.000.000		2.995.750	15.500.000		1								1		0,00	0,00	1	2.995.750	10,00	3,89	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***2.946.720.000***		***5.700.000***	***700.000.000***		***4***	***14.573.214***							***4***	***14.573.214***	***0,00***	***2,08***	***2***	***20.273.214***	***2,00***	***0,69***	***BADAN PENGELOLA***
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424	705.837.894.519			5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perangkat Daerah																								***KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	360	2.946.720.000	72	5.700.000		700.000.000	13	14.573.214							13	14.573.214	0,00	2,08	85	20.273.214	23,61	0,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD***	***%***	***100***	***75.544.900***		***7.596.250***		***17.500.000***	***25***	***1.725.000***							***25***	***1.725.000***	***0,00***	***9,86***	***12,5***	***9.321.250***	***12,50***	***12,34***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60	75.544.900	12	7.596.250		17.500.000	3	1.725.000							3	1.725.000	0,00	9,86	15	9.321.250	25,00	12,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD***	***%***	***100***	***74.977.332.014***		***988.608.781***		***17.177.091.732***	***29,91***	***141.633.793***							***29,91***	***141.633.793***	***0,00***	***0,82***	***14,955***	***1.130.242.574***	***14,96***	***1,51***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	843.846.548	6	70.029.122		176.664.800	1	20.331.275							1	20.331.275	0,00	11,51	7	90.360.397	23,33	10,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	158	2.612.541.641	12	194.023.705		540.998.399	3	63.024.572							3	63.024.572	0,00	11,65	15	257.048.277	9,49	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	180	1.431.551.579	9	54.343.586		289.332.936	9	22.980.036							9	22.980.036	0,00	7,94	18	77.323.622	10,00	5,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	98	312.145.249	4	22.937.000		66.644.886	4	6.011.000							4	6.011.000	0,00	9,02	8	28.948.000	8,16	9,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	1.478.738.640	8	76.782.950		313.336.181	2	7.117.950							2	7.117.950	0,00	2,27	10	83.900.900	12,50	5,67	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	85	280.936.957	8	10.216.700		59.114.530	1	2.594.000							1	2.594.000	0,00	4,39	9	12.810.700	10,59	4,56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	5.417.571.400	72	491.679.618		1.231.000.000	1	17.562.960							1	17.562.960	0,00	1,43	73	509.242.578	20,28	9,40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	22.100	32.000.000.000	12	68.596.100		7.500.000.000	1	2.012.000							1	2.012.000	0,00	0,03	13	70.608.100	0,06	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	30.600.000.000				7.000.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***250.789.914.222***		***615.160.146***		***103.454.829.402***	***100***	***30.902.400***							***100***	***30.902.400***	***0,00***	***0,03***	***50***	***646.062.546***	***50,00***	***0,26***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	undefined	0	0				0												0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.580.000.000				930.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	105	28.543.550.000				6.337.500.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	681	11.267.857.022	53	465.460.146		1.648.169.402	1	30.902.400							1	30.902.400	0,00	1,87	54	496.362.546	7,93	4,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	203.742.473.000	1	149.700.000		93.612.160.000												0,00	1	149.700.000	10,00	0,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	397	4.656.034.200				927.000.000	0											0,00	0			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***100***	***53.143.686.711***		***9.639.869.503***		***10.601.359.277***	***22,84***	***957.890.408***							***22,84***	***957.890.408***	***0,00***	***9,04***	***11,42***	***10.597.759.911***	***11,42***	***19,94***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30	300.128.351	5	11.191.230		65.142.100	1	2.150.000							1	2.150.000	0,00	3,30	6	13.341.230	20,00	4,45	BADAN PENGELOLA
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																												KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	360	22.438.193.883	72	3.744.612.768		4.437.754.290	1	470.855.529							1	470.855.529	0,00	10,61	73	4.215.468.297	20,28	18,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	al	30	2.963.887.946	33	367.184.327		595.851.600	1	18.664.924							1	18.664.924	0,00	3,13	34	385.849.251	113,33	13,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	27.441.476.531	60	5.516.881.178		5.502.611.287	1	466.219.955							1	466.219.955	0,00	8,47	61	5.983.101.133	101,67	21,80	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***22.035.121.799***		***3.737.283.141***		***4.506.296.408***	***20,82***	***153.359.480***							***20,82***	***153.359.480***	***0,00***	***3,40***	***10,41***	***3.890.642.621***	***10,41***	***17,66***	***BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.500.000	1	4.546.500		12.000.000	1	800.000							1	800.000	0,00	6,67	2	5.346.500	200,00	10,59	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	491	4.025.644.334	267	774.086.115		846.877.110	1	41.654.900							1	41.654.900	0,00	4,92	268	815.741.015	54,58	20,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	5.286.995.333	51	973.773.922		1.053.876.410	1	99.073.480							1	99.073.480	0,00	9,40	52	1.072.847.402	83,87	20,29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	7.504.449.632	263	1.276.396.441		1.511.542.888	1	11.831.100							1	11.831.100	0,00	0,78	264	1.288.227.541	242,20	17,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	5.167.532.500	15	708.480.163		1.082.000.000												0,00	15	708.480.163	60,00	13,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)							5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0,00	5.602.009.532	0,00	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2. Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN	70.73	68.87
2 Kategori RB Perangkat Daerah	2	2

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN**	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY**	**%**	**85**	**5.800.739.000**	**90,73**	**970.047.497**		**1.136.464.000**												**0,00**	**45,365**	**970.047.497**	**53,37**	**16,72**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***5.800.739.000***	***25***	***970.047.497***		***1.136.464.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***970.047.497***	***12,50***	***16,72***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	8	1.790.700.000	2	310.331.896		310.000.000												0,00	2	310.331.896	25,00	17,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	3.013	4.010.039.000	630	659.715.601		826.464.000												0,00	630	659.715.601	20,91	16,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi**	**%**	**66,48**	**76.745.275.785**	**79,47**	**2.802.496.982**		**17.067.801.978**		**1.702.700**								**1.702.700**		**0,01**	**39,735**	**2.804.199.682**	**59,77**	**3,65**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN	**%**	**96,9**		**97,27**															**48,635**		**50,19**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	**%**	**70**		**79,66**															**39,83**		**56,90**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Keterisian Jabatan	**%**	**89,8**		**87,89**															**43,945**		**48,94**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan	**%**	**35,28**		**29,15**															**14,575**		**41,31**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN	**%**	**95**		**94,8**															**47,4**		**49,89**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
				Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS	**%**	**90**		**95,65**															**47,825**		**53,14**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	**%**	**87,46**		**88,81**															**44,405**		**50,77**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
		5.03.02.1.01	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***%***	***100***	***23.125.487.700***	***25***	***1.170.263.722***		***5.317.430.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***1.170.263.722***	***12,50***	***5,06***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	581.254.600	2	3.257.669		142.000.000												0,00	2	3.257.669	100,00	0,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	15.945.618.000	2	1.039.220.648		3.700.000.000												0,00	2	1.039.220.648	100,00	6,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500	2.174.962.000	619	67.179.725		463.430.000												0,00	619	67.179.725	123,80	3,09	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	7	2.692.672.000	1	27.591.516		612.000.000												0,00	1	27.591.516	14,29	1,02	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	7	1.730.981.100	2	33.014.164		400.000.000												0,00	2	33.014.164	28,57	1,91	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.02	***Mutasi dan Promosi ASN***	***Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN***	***%***	***100***	***6.871.410.390***	***100***	***362.019.959***		***1.496.184.900***												***0,00***	***50***	***362.019.959***	***50,00***	***5,27***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	220	1.213.262.700	248	21.749.066		260.100.000												0,00	248	21.749.066	112,73	1,79	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	1.847.673.590	2	82.430.052		403.764.900												0,00	2	82.430.052	100,00	4,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	3.810.474.100	1	257.840.841		832.320.000												0,00	1	257.840.841	100,00	6,77	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03	***Pengembangan Kompetensi ASN***	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***%***	***100***	***41.837.972.162***	***25***	***1.068.235.155***		***9.108.724.022***		***1.702.700***									***0***	***1.702.700***		***0,02***	***12,5***	***1.069.937.855***	***12,50***	***2,56***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	6	5.575.188.000	6	372.526.549		1.174.656.500											0,00	6	372.526.549	100,00	6,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	1.165.697.650	1	28.820.400		240.566.150		1.702.700						1.702.700		0,71	1	30.523.100	100,00	2,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	21.729.469.145	1	543.374.930		4.730.777.293										0,00	1	543.374.930	100,00	2,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	12.060.698.867	1	111.820.609		2.658.342.079										0,00	1	111.820.609	100,00	0,93	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	30	742.752.000	28	4.970.183		174.332.000										0,00	28	4.970.183	93,33	0,67	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	115	564.166.500	216	6.722.484		130.050.000										0,00	216	6.722.484	187,83	1,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***%***	***100***	***4.910.405.533***	***0***	***201.978.146***		***1.145.463.056***									***0***		***0,00***	***0***	***201.978.146***		***4,11***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	285.016.884	4	16.463.397		57.594.366										0,00	4	16.463.397	100,00	5,78	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	20	3.675.400.149	14	118.156.809		888.368.690										0,00	14	118.156.809	70,00	3,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	480	122.943.500	519	16.677.407		25.500.000										0,00	519	16.677.407	108,13	13,57	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	765.603.000	450	44.682.138		160.000.000										0,00	450	44.682.138	180,00	5,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	61.442.000	1	5.998.395		14.000.000										0,00	1	5.998.395	100,00	9,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**87,5**	**299.721.781.168**	**92,11**	**76.361.440.845**		**23.875.433.182**										**0,00**	**46,055**	**76.361.440.845**	**52,63**	**25,48**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***773.043.300***	***25***	***20.572.705***		***166.000.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***20.572.705***	***12,50***	***2,66***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	561.330.600	5	12.589.687		120.000.000												0,00	5	12.589.687	100,00	2,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	35.905.200	4	2.341.361		8.000.000												0,00	4	2.341.361	200,00	6,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	175.807.500	3	5.641.657		38.000.000												0,00	3	5.641.657	100,00	3,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***0***	***76.182.077.968***	***100***	***14.503.668.279***		***15.354.633.182***												***0,00***	***50***	***14.503.668.279***	***0,00***	***19,04***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	97	75.797.351.568	90	14.476.717.285		15.277.633.182												0,00	90	14.476.717.285	92,78	19,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	265.884.500	12	14.307.346		53.000.000												0,00	12	14.307.346	100,00	5,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	23.428.000	1	2.130.805		5.000.000												0,00	1	2.130.805	100,00	9,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	95.413.900	18	10.512.843		19.000.000												0,00	18	10.512.843	128,57	11,02	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***114.480.000***	***0***	***325.850***		***25.000.000***									***0***			***0,00***	***0***	***325.850***		***0,28***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	114.480.000	2	325.850		25.000.000												0,00	2	325.850	100,00	0,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***130.500.000***	***100***			***30.000.000***												***0,00***	***50***		***50,00***	***0,00***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	13	130.500.000				30.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***6.572.287.100***	***25***	***175.595.497***		***1.599.500.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***175.595.497***	***12,50***	***2,67***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	162.181.700	1	17.784.039		35.000.000												0,00	1	17.784.039	100,00	10,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	538.925.800	5	19.280.088		125.500.000												0,00	5	19.280.088	500,00	3,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	332.501.900	6	14.482.970		133.000.000												0,00	6	14.482.970	600,00	4,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	416.462.000	2	28.698.264		87.000.000												0,00	2	28.698.264	100,00	6,89	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	36.343.200	4	1.920.000		7.000.000												0,00	4	1.920.000	100,00	5,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	5.085.872.500	12	93.430.136		1.212.000.000												0,00	12	93.430.136	600,00	1,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***81.179.738.000***	***25***	***59.956.973.540***		***4.525.300.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***59.956.973.540***	***12,50***	***73,86***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1.477.600.000				1.477.600.000												0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2.481.700.000				1.811.700.000												0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.030.560.600				836.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	75.300.000.000	1	59.956.973.540		0												0,00	1	59.956.973.540	0,00	79,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	0	539.877.400				300.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan																								DAERAH
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	350.000.000				100.000.000											0,00	0			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***131.774.491.900***	***0***	***1.364.124.674***		***1.582.000.000***									***0***			***0,00***	***0***	***1.364.124.674***		***1,04***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	127.518.000	1	14.268.723		27.000.000											0,00	1	14.268.723	100,00	11,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.388.418.700	12	223.065.951		475.000.000											0,00	12	223.065.951	400,00	9,34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	129.258.555.200	12	1.126.790.000		1.080.000.000											0,00	12	1.126.790.000	600,00	0,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***2.995.162.900***	***25***	***340.180.300***		***593.000.000***									***0***			***0,00***	***12,5***	***340.180.300***	***12,50***	***11,36***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	66.005.400	1	13.788.000		13.000.000											0,00	1	13.788.000	100,00	20,89	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	934.989.900	11	166.862.300		180.000.000											0,00	11	166.862.300	100,00	17,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	1.299.989.600	227	119.530.000		300.000.000											0,00	227	119.530.000	75,67	9,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	694.178.000	1	40.000.000		100.000.000											0,00	1	40.000.000	100,00	5,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							382.267.795.953		80.133.985.324		42.079.699.160		1.702.700							0,00	1.702.700	0,00	0,00		80.135.688.024	98,14	20,96	
Predikat Kinerja																				SR	SR					ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya komitmen yang tinggi dari level pimpinan, pejabat struktural hingga staff dalam memberikan pelayanan kepegawaian; 2. Adanya Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa; 3. Regulasi baik dari pusat maupun daerah dalam pengelolaan SDM Aparatur; 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait;																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Masih belum terbitnya peraturan pemerintah turunan UU No 20 tahun 2023 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						1. Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 2. Seleksi PPPK Tahap II 3. Pelaksanaan Seleksi JPT Madya 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan kepegawaian																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun	16	21.7
2 Kategori RB Perangkat Daerah	89	96.13

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis smart learning**	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi**	**%**	**89**	**10.800.846.000**	**90**	**611.043.190**	**86**	**2.484.600.000**													**0,00**	**45**	**611.043.190**	**50,56**	**5,66**	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
		4.01.10.5.02	***Peningkatan Budaya Pemerintahan***	***Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan***	***%***	***100***	***10.800.846.000***	***100***	***611.043.190***		***2.484.600.000***													***0,00***	***50***	***611.043.190***	***50,00***	***5,66***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	1.560	10.800.846.000	120	611.043.190		2.484.600.000													0,00	120	611.043.190	7,69	5,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan**	**%**	**100**	**50.160.044.336**	**99,95**	**3.121.281.258**		**9.806.677.356**													**0,00**	**49,975**	**3.121.281.258**	**49,98**	**6,22**	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
		5.04.02.1.01	***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis***	***%***	***100***	***10.855.500.000***	***100***	***209.020.748***		***2.271.000.000***													***0,00***	***50***	***209.020.748***	***50,00***	***1,93***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	23	1.399.500.000	5	52.026.300		327.000.000													0,00	5	52.026.300	21,74	3,72	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	2.460	9.456.000.000	60	156.994.448		1.944.000.000													0,00	60	156.994.448	2,44	1,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356											0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																						SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.04.02.1.02	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***%***	***100***	***39.304.544.336***	***99,95***	***2.912.260.510***		***7.535.677.356***											***0,00***	***49,975***	***2.912.260.510***	***49,98***	***7,41***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	53	3.328.400.000	6	215.847.001		732.000.000											0,00	6	215.847.001	11,32	6,49	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	5	776.333.651	1	91.588.798		162.821.900											0,00	1	91.588.798	20,00	11,80	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	70	1.313.914.685	7	60.242.512		282.855.456											0,00	7	60.242.512	10,00	4,58	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	2.370	33.885.896.000	995	2.544.582.199		6.358.000.000											0,00	995	2.544.582.199	41,98	7,51	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**skor**	**91**	**158.548.040.851**	**92,08**	**14.309.071.083**		**53.563.975.000**	**85,81**								**85,81**		**0,00**	**0,00**	**177,89**	**14.309.071.083**	**195,48**	**9,03**	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***540.471.500***	***100***	***71.206.300***		***110.975.000***											***0,00***	***50***	***71.206.300***	***50,00***	***13,17***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356									0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	225.671.500	5	29.339.800		46.475.000												0,00	5	29.339.800	20,00	13,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	132.500.000	4	17.681.300		27.000.000												0,00	4	17.681.300	20,00	13,34	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	182.300.000	3	24.185.200		37.500.000												0,00	3	24.185.200	20,00	13,27	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***	***%***	***100***	***58.557.005.499***	***100***	***10.615.538.341***		***11.555.000.000***												***0,00***	***50***	***10.615.538.341***	***50,00***	***18,13***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	5.876	58.272.805.499	76	10.558.372.091		11.500.000.000												0,00	76	10.558.372.091	1,29	18,12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	162.900.000	12	37.113.500		31.000.000												0,00	12	37.113.500	20,00	22,78	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	34.300.000	1	4.526.050		7.000.000												0,00	1	4.526.050	20,00	13,20	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	87.000.000	18	15.526.700		17.000.000												0,00	18	15.526.700	20,00	17,85	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***90.400.000***	***100***	***13.289.000***		***18.000.000***												***0,00***	***50***	***13.289.000***	***50,00***	***14,70***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	90.400.000	2	13.289.000		18.000.000												0,00	2	13.289.000	10,00	14,70	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356											0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																				SR	SR						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	***%***	***100***	***1.115.000.000***				***255.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	100	420.000.000				85.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	86	695.000.000				170.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	***%***	***100***	***5.534.125.400***	***100***	***220.962.445***		***1.268.000.000***												***0,00***	***50***	***220.962.445***	***50,00***	***3,99***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	239.626.200	1	11.596.500		50.000.000												0,00	1	11.596.500	20,00	4,84	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	194.562.500	4	14.436.200		42.000.000												0,00	4	14.436.200	80,00	7,42	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	100.172.500	2	53.618.045		20.000.000												0,00	2	53.618.045	40,00	53,53	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	187.482.200	1	13.542.600		40.000.000												0,00	1	13.542.600	11,11	7,22	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	4.533.782.000	51	69.161.100		1.050.000.000												0,00	51	69.161.100	42,50	1,53	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	278.500.000	1	58.608.000		66.000.000												0,00	1	58.608.000	25,00	21,04	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan***	***%***	***100***	***73.554.000.000***	***100***	***215.920.000***		***36.400.000.000***												***0,00***	***50***	***215.920.000***	***50,00***	***0,29***	***BADAN PENDIDIKAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356												0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																							SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																															

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***																								***DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	380.000.000				380.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.040.000.000				920.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	325.000.000	1	79.900.000		0												0,00	1	79.900.000	33,33	24,58	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	410.000.000	11	136.020.000		100.000.000												0,00	11	136.020.000	27,50	33,18	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	70.399.000.000				35.000.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***100***	***11.366.612.372***	***100***	***2.386.794.602***		***2.166.000.000***												***0,00***	***50***	***2.386.794.602***	***50,00***	***21,00***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.820.000	12	2.820.000		6.000.000												0,00	12	2.820.000	20,00	10,51	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	3.517.533.472	12	417.089.913		710.000.000												0,00	12	417.089.913	20,00	11,86	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	7.822.258.900	12	1.966.884.689		1.450.000.000												0,00	12	1.966.884.689	20,00	25,14	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan***	***%***	***100***	***7.790.426.080***	***100***	***785.360.395***		***1.791.000.000***												***0,00***	***50***	***785.360.395***	***50,00***	***10,08***	***BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356											0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																						SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel																								
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	118.193.400	1	23.727.000		24.000.000												0,00	1	23.727.000	20,00	20,07	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	674	876.884.000	93	68.876.500		175.000.000												0,00	93	68.876.500	13,80	7,85	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	796.806.600	12	177.247.750		156.000.000												0,00	12	177.247.750	20,00	22,24	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.200	48.000.000				12.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5.950.542.080	1	515.509.145		1.424.000.000												0,00	1	515.509.145	20,00	8,66	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							219.508.931.187		18.041.395.531		65.855.252.356											0,00		0,00	0,00		18.041.395.531	29,11	8,22	
Predikat Kinerja																						SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	88	92.95
2 Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	88.55	88.43

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan Penghubung**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah**	**%**	**100**	**25.897.892.689**	**100**	**4.108.079.863**		**5.330.357.090**	**100**	**330.134.385**							**100**	**330.134.385**	**0,00**	**6,19**	**100**	**4.438.214.248**	**100,00**	**17,14**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**
		2.22.08.5.06	***Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan***	***Jenis***	***3***	***1.596.200.000***	***3***	***239.228.250***		***250.000.000***	***1***	***198.559.435***							***1***	***198.559.435***	***0,00***	***79,42***	***4***	***437.787.685***	***133,33***	***27,43***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Jenis	3	1.596.200.000	12	239.228.250		250.000.000	0	198.559.435								198.559.435		79,42	12	437.787.685	400,00	27,43	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.08	***Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***	***Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif***	***%***	***100***	***4.618.385.000***	***100***	***794.644.700***		***1.150.000.000***												***0,00***	***50***	***794.644.700***	***50,00***	***17,21***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	292	4.618.385.000	1	794.644.700		1.150.000.000	1								1		0,00	0,00	2	794.644.700	0,68	17,21	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Terlaksananya dukungan penyelenggaran Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***%***	***100***	***19.683.307.689***	***100***	***3.074.206.913***		***3.930.357.090***	***5,29***	***131.574.950***							***5,29***	***131.574.950***	***0,00***	***3,35***	***52,645***	***3.205.781.863***	***52,65***	***16,29***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	41	19.683.307.689	33	3.074.206.913		3.930.357.090	2	131.574.950							2	131.574.950	0,00	3,35	35	3.205.781.863	85,37	16,29	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY**	**%**	**100**	**2.621.707.900**	**100**	**173.882.828**		**398.985.600**	**100**	**44.475.314**							**100**	**44.475.314**	**0,00**	**11,15**	**100**	**218.358.142**	**100,00**	**8,33**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**
		5.07.02.1.01	***Pelaksanaan Pelayanan Penghubung***	***Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya***	***%***	***100***	***2.621.707.900***	***100***	***173.882.828***		***398.985.600***	***100***	***44.475.314***							***100***	***44.475.314***	***0,00***	***11,15***	***100***	***218.358.142***	***100,00***	***8,33***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	25	1.309.173.900	5	96.854.828		113.985.600	5	29.389.314							5	29.389.314	0,00	25,78	10	126.244.142	40,00	9,64	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	10	1.312.534.000	2	77.028.000		285.000.000	1	15.086.000							1	15.086.000	0,00	5,29	3	92.114.000	30,00	7,02	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2	**Meningkatnya tata kelola penyelengaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**91**	**51.875.705.435**	**90,85**	**7.013.109.504**		**10.836.000.000**	**82,22**	**1.768.594.627**							**82,22**	**1.768.594.627**	**0,00**	**16,32**	**86,535**	**8.781.704.131**	**95,09**	**16,93**	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195		16.565.342.690		2.143.204.326							0,00	2.143.204.326	0,00	12,94		13.438.276.521	63,99	16,72	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***234.700.000***	***100***	***6.773.000***		***52.000.000***	***18,69***	***1.301.441***							***18,69***	***1.301.441***	***0,00***	***2,50***	***59,345***	***8.074.441***	***59,35***	***3,44***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	159.880.000	3	1.883.000		35.000.000	1	650.541							1	650.541	0,00	1,86	4	2.533.541	16,00	1,58	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	17.300.000	2	1.150.000		3.750.000	2								2		0,00	0,00	4	1.150.000	40,00	6,65	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	15.000.000	2	1.475.000		3.750.000												0,00	2	1.475.000	20,00	9,83	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	42.520.000	1	2.265.000		9.500.000	0	650.900								650.900		6,85	1	2.915.900	6,67	6,86	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	***%***	***100***	***33.593.619.235***	***100***	***5.516.206.478***		***6.897.000.000***	***23,01***	***1.396.757.390***							***23,01***	***1.396.757.390***	***0,00***	***20,25***	***61,505***	***6.912.963.868***	***61,51***	***20,58***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	33.134.429.435	50	5.474.441.978		6.800.000.000	40	1.393.457.390							40	1.393.457.390	0,00	20,49	90	6.867.899.368	150,00	20,73	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	337.000.000	11	39.730.000		70.000.000	3	2.640.000							3	2.640.000	0,00	3,77	14	42.370.000	23,33	12,57	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	9.009.800	1	738.500		2.000.000	0	220.000								220.000		11,00	1	958.500	20,00	10,64	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	113.180.000	12	1.296.000		25.000.000	3	440.000							3	440.000	0,00	1,76	15	1.736.000	25,00	1,53	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***91.600.000***	***100***	***6.756.000***		***20.000.000***	***25***	***3.311.600***							***25***	***3.311.600***	***0,00***	***16,56***	***62,5***	***10.067.600***	***62,50***	***10,99***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	91.600.000	12	6.756.000		20.000.000	3	3.311.600							3	3.311.600	0,00	16,56	15	10.067.600	25,00	10,99	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan***	***%***	***100***	***2.405.515.400***	***100***	***126.813.846***		***537.000.000***	***24,45***	***16.614.900***							***24,45***	***16.614.900***	***0,00***	***3,09***	***62,225***	***143.428.746***	***62,23***	***5,96***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195		16.565.342.690		2.143.204.326							0,00	2.143.204.326	0,00	12,94		13.438.276.521	63,99	16,72	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	120.000.000	1	11.011.579		25.000.000	0											0,00	1	11.011.579	20,00	9,18	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	321.228.000	3	33.801.732		80.000.000	4	9.952.000							4	9.952.000	0,00	12,44	7	43.753.732	140,00	13,62	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	121.000.000	1	13.025.907		25.000.000	1	1.470.000							1	1.470.000	0,00	5,88	2	14.495.907	40,00	11,98	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	33.734.400	2	2.205.100		7.000.000	1	1.500.000							1	1.500.000	0,00	21,43	3	3.705.100	30,00	10,98	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.809.553.000	2	66.769.528		400.000.000	2	3.692.900							2	3.692.900	0,00	0,92	4	70.462.428	40,00	3,89	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler***	***Unit***	***0***	***3.450.000.000***	***5***	***48.575.000***		***800.000.000***	***100***	***8.400.000***							***100***	***8.400.000***	***0,00***	***1,05***	***105***	***56.975.000***	***0,00***	***1,65***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.100.000.000				0												0,00	0			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.750.000.000				600.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	600.000.000				200.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	5	48.575.000		0	3	8.400.000							3	8.400.000	0,00	0,00	8	56.975.000	0,00	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***100***	***6.561.726.400***	***100***	***1.039.564.694***		***1.330.000.000***	***16,46***	***236.745.899***							***16,46***	***236.745.899***	***0,00***	***17,80***	***58,23***	***1.276.310.593***	***58,23***	***19,45***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	141.970.000	12	9.293.906		30.000.000	3	1.308.600							3	1.308.600	0,00	4,36	15	10.602.506	25,00	7,47	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.159.800.000	12	228.942.867		450.000.000	3	88.411.164							3	88.411.164	0,00	19,65	15	317.354.031	100,00	14,69	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195		16.565.342.690		2.143.204.326							0,00	2.143.204.326	0,00	12,94		13.438.276.521	63,99	16,72	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):				Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	4.259.956.400	12	801.327.921		850.000.000	3	147.026.135							3	147.026.135	0,00	17,30	15	948.354.056	150,00	22,26	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***5.538.544.400***	***100***	***268.420.486***		***1.200.000.000***	***30,47***	***105.463.397***							***30,47***	***105.463.397***	***0,00***	***8,79***	***65,235***	***373.883.883***	***65,24***	***6,75***	***BADAN PENGHUBUNG DAERAH***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	675.000.000				150.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	232.310.400	20	4.000.000		50.000.000	10	1.000.000							10	1.000.000	0,00	2,00	30	5.000.000	300,00	2,15	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	2.430.408.500	12	264.420.486		500.000.000	3	104.463.397							3	104.463.397	0,00	20,89	15	368.883.883	88,24	15,18	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.200.825.500				500.000.000												0,00	0			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							80.395.306.024		11.295.072.195		16.565.342.690		2.143.204.326							0,00	2.143.204.326	0,00	12,94		13.438.276.521	63,99	16,72	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Koordinasi Banhubda DIY baik intern maupun dengan pemangku kepentingan dijaga dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kendaraan listrik yang dimiliki tidak dalam kondisi optimal dan faktor cuaca dalam pelaksanaan kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						Menjaga komunikasi dan koordinasi Banhubda DIY dengan pemangku kepentingan terkait.																							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	92	90.39
2 Nilai Kapabilitas APIP	3	3.47
3 Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY	91	96.24

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal**	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur**	**%**	**0**	**39.828.946.000**	**221**	**5.672.914.958**		**6.801.135.500**	**20**	**809.743.103**							**20**	**809.743.103**	**0,00**	**11,91**	**120,5**	**6.482.658.061**	**0,00**	**16,28**	**INSPEKTORAT**
		6.01.02.1.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	***Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP***	***%***	***100***	***35.025.708.000***	***100***	***4.586.584.814***		***5.882.442.900***		***702.643.103***								***702.643.103***		***11,94***	***50***	***5.289.227.917***	***50,00***	***15,10***	***INSPEKTORAT***
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	80	2.449.694.200	16	301.650.600		424.767.000		298.356.377								298.356.377		70,24	16	600.006.977	20,00	24,49	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	870	21.540.988.000	174	2.827.970.000		3.735.695.900												0,00	174	2.827.970.000	20,00	13,13	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	565	5.232.871.700	113	856.665.556		935.018.750		200.684.650								200.684.650		21,46	113	1.057.350.206	20,00	20,21	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	190	2.475.577.000	38	204.681.396		216.164.600		202.702.076								202.702.076		93,77	38	407.383.472	20,00	16,46	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan	105	2.187.474.600	21	370.074.982		544.691.150												0,00	21	370.074.982	20,00	16,92	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	10	962.342.500	1	17.119.400		17.730.000												0,00	1	17.119.400	10,00	1,78	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	176.760.000	2	8.422.880		8.375.500		900.000								900.000		10,75	2	9.322.880	20,00	5,27	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.02	***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***	***Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu***	***%***	***100***	***4.803.238.000***	***100***	***1.086.330.144***		***918.692.600***		***107.100.000***								***107.100.000***		***11,66***	***50***	***1.193.430.144***	***50,00***	***24,85***	***INSPEKTORAT***
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408							0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	20	229.552.400	2	16.821.893		16.818.600												0,00	2	16.821.893	10,00	7,33	INSPEKTORAT
		6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	490	4.573.685.600	125	1.069.508.251		901.874.000		107.100.000								107.100.000		11,88	125	1.176.608.251	25,51	25,73	INSPEKTORAT
2	**Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting**	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan**	**%**	**0**	**6.311.243.100**	**100**	**384.461.314**		**326.955.150**	**100**	**14.730.000**							**100**	**14.730.000**	**0,00**	**4,51**	**100**	**399.191.314**	**0,00**	**6,33**	**INSPEKTORAT**
		6.01.03.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan***	***%***	***100***	***877.640.500***	***100***	***24.200.010***		***27.272.900***												***0,00***	***50***	***24.200.010***	***50,00***	***2,76***	***INSPEKTORAT***
		6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	5	253.705.000	1	319.125		325.000												0,00	1	319.125	20,00	0,13	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	10	623.935.500	2	23.880.885		26.947.900												0,00	2	23.880.885	20,00	3,83	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02	***Pendampingan dan Asistensi***	***Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas***	***%***	***100***	***5.433.602.600***	***100***	***360.261.304***		***299.682.250***		***14.730.000***								***14.730.000***		***4,92***	***50***	***374.991.304***	***50,00***	***6,90***	***INSPEKTORAT***
		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	40.129.000	37	1.631.475		2.400.000		180.000								180.000		7,50	37	1.811.475	100,00	4,51	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	236.825.900	37	2.527.650		2.400.000												0,00	37	2.527.650	100,00	1,07	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	4.281.939.700	4	354.758.179		292.182.250		14.550.000								14.550.000		4,98	4	369.308.179	100,00	8,62	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	37	874.708.000	37	1.344.000		2.700.000												0,00	37	1.344.000	100,00	0,15	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408							0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**0**	**129.031.741.597**	**92,96**	**18.467.863.446**		**21.498.759.194**	**82,07**	**1.793.901.305**							**82,07**	**1.793.901.305**	**0,00**	**8,34**	**175,03**	**20.261.764.751**	**0,00**	**15,70**	**INSPEKTORAT**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***237.811.800***	***100***	***6.769.855***		***6.909.400***		***3.452.150***								***3.452.150***		***49,96***	***50***	***10.222.005***	***50,00***	***4,30***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	16	98.847.800	3	5.368.900		3.667.000		2.612.000								2.612.000		71,23	3	7.980.900	18,75	8,07	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	77.642.900	4	255.300		1.960.000												0,00	4	255.300	20,00	0,33	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	61.321.100	8	1.145.655		1.282.400		840.150								840.150		65,51	8	1.985.805	80,00	3,24	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***	***%***	***100***	***92.603.777.437***	***100***	***14.834.941.810***		***17.601.122.994***		***1.512.401.427***								***1.512.401.427***		***8,59***	***50***	***16.347.343.237***	***50,00***	***17,65***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	92.315.617.637	81	14.791.580.032		17.588.787.594		1.509.669.150								1.509.669.150		8,58	81	16.301.249.182	90,00	17,66	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	232.509.000	12	40.319.598		9.318.000		1.715.759								1.715.759		18,41	12	42.035.357	20,00	18,08	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	55.650.800	18	3.042.180		3.017.400		1.016.518								1.016.518		33,69	18	4.058.698	20,00	7,29	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***152.975.100***	***100***	***14.299.500***		***14.299.400***		***2.200.000***								***2.200.000***		***15,39***	***50***	***16.499.500***	***50,00***	***10,79***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	30	152.975.100	6	14.299.500		14.299.400		2.200.000								2.200.000		15,39	6	16.499.500	20,00	10,79	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	***%***	***100***	***3.167.596.600***	***100***	***216.499.632***		***427.859.200***		***8.253.084***								***8.253.084***		***1,93***	***50***	***224.752.716***	***50,00***	***7,10***	***INSPEKTORAT***
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408							0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	296.527.800	2	638.250		650.000													0,00	2	638.250	20,00	0,22	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	60	2.871.068.800	99	215.861.382		427.209.200		8.253.084								8.253.084		1,93	99	224.114.466	165,00	7,81	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD***	***%***	***100***	***4.212.491.800***	***100***	***416.150.044***		***708.576.000***		***629.820***								***629.820***		***0,09***	***50***	***416.779.864***	***50,00***	***9,89***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	147.554.500	1	1.143.966		1.260.000		629.820								629.820		49,99	1	1.773.786	1,67	1,20	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	60	404.969.300	5	13.593.171		13.678.000												0,00	5	13.593.171	8,33	3,36	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	391.127.500	3	28.873.764		38.241.000												0,00	3	28.873.764	5,00	7,38	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	120.797.500	1	3.994.000		7.548.000												0,00	1	3.994.000	1,67	3,31	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	108.059.000	0			0												0,00	0			0,00	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	2.527.284.000	12	279.123.543		557.849.000												0,00	12	279.123.543	20,00	11,04	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	512.700.000	1	89.421.600		90.000.000												0,00	1	89.421.600	100,00	17,44	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana***	***%***	***100***	***13.190.238.700***	***100***	***376.387.640***		***14.800.000***												***0,00***	***50***	***376.387.640***	***50,00***	***2,85***	***INSPEKTORAT***
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408							0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0				0												0,00	0			0,00	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	15	5.822.000.000				0												0,00	0			0,00	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	56.300.200				0												0,00	0			0,00	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	563	7.258.691.800	43	376.387.640		14.800.000												0,00	43	376.387.640	7,64	5,19	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	53.246.700				0												0,00	0			0,00	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	***%***	***100***	***8.824.828.300***	***100***	***1.440.264.385***		***1.748.817.600***		***240.839.224***								***240.839.224***		***13,77***	***50***	***1.681.103.609***	***50,00***	***19,05***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	60	35.513.000	12	2.432.500		2.440.000		616.500								616.500		25,27	12	3.049.000	20,00	8,59	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	2.395.119.300	12	275.921.885		344.339.600		49.881.519								49.881.519		14,49	12	325.803.404	20,00	13,60	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	60	317.800.000				29.160.000		4.800.000								4.800.000		16,46	0	4.800.000		1,51	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	6.076.396.000	12	1.161.910.000		1.372.878.000		185.541.205								185.541.205		13,51	12	1.347.451.205	20,00	22,18	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***%***	***100***	***6.642.021.860***	***100***	***1.162.550.580***		***976.374.600***		***26.125.600***								***26.125.600***		***2,68***	***50***	***1.188.676.180***	***50,00***	***17,90***	***INSPEKTORAT***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	182.800.000	1	34.916.500		37.376.000												0,00	1	34.916.500	100,00	19,10	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408							0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.520.000.000	2	242.682.630		186.334.150												0,00	2	242.682.630	200,00	15,97	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	22	1.956.761.800	16	386.387.700		355.779.600		16.193.600								16.193.600		4,55	16	402.581.300	72,73	20,57	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	2.137.665.560	113	304.978.750		254.534.850		9.932.000								9.932.000		3,90	113	314.910.750	161,43	14,73	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	844.794.500	1	193.585.000		142.350.000												0,00	1	193.585.000	100,00	22,92	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)							175.171.930.697		24.525.239.718		28.626.849.844		2.618.374.408								0,00	2.618.374.408	0,00	9,15		27.143.614.126	41,63	15,50	
Predikat Kinerja																				SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:	Target	Realisasi
1 Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	73.57	79.55
2 Kategori RB Perangkat Daerah	84	91.36

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu**	**0.00.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka**	**96,98**	**68.041.481.906**	**93,32**	**8.852.796.984**	**13.365.844.700**		**87,1**	**1.653.156.590**							**87,1**	**1.653.156.590**	**0,00**	**12,37**	**180,42**	**10.505.953.574**	**186,04**	**15,44**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		0.00.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***509.633.000***	***100***	***67.550.477***	***101.007.000***		***35,06***	***6.372.625***							***35,06***	***6.372.625***	***0,00***	***6,31***	***67,53***	***73.923.102***	***67,53***	***14,51***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	146.422.000	5	20.397.437	29.020.000		2	4.322.635							2	4.322.635	0,00	14,90	7	24.720.072	28,00	16,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	202.522.000	4	24.648.225	40.139.000		1	2.049.990							1	2.049.990	0,00	5,11	5	26.698.215	50,00	13,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	160.689.000	3	22.504.815	31.848.000		3								3		0,00	0,00	6	22.504.815	40,00	14,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	***Laporan***	***100***	***45.094.958.319***	***100***	***6.723.800.885***	***8.937.593.000***		***25,74***	***1.646.783.965***							***25,74***	***1.646.783.965***	***0,00***	***18,43***	***125,74***	***8.370.584.850***	***125,74***	***18,56***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	52	44.514.116.319	46	6.631.363.136	8.822.473.000		47	1.644.506.863							47	1.644.506.863	0,00	18,64	93	8.275.869.999	178,85	18,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	245.061.000	12	46.680.000	48.570.000		3	2.277.102							3	2.277.102	0,00	4,69	15	48.957.102	25,00	19,98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272	38.338.605.700			12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	122.102.000	1	15.015.645		24.200.000												0,00	1	15.015.645	20,00	12,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	213.679.000	18	30.742.104		42.350.000	3								3		0,00	0,00	21	30.742.104	23,33	14,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***%***	***100***	***57.000.000***	***100***	***12.013.000***		***11.400.000***	***29,26***								***29,26***		***0,00***	***0,00***	***64,63***	***12.013.000***	***64,63***	***21,08***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	57.000.000	2	12.013.000		11.400.000												0,00	2	12.013.000	40,00	21,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi***	***%***	***100***	***600.000.000***				***140.000.000***												***0,00***	***0***			***0,00***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	600.000.000				140.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	***%***	***100***	***3.749.415.400***	***100***	***440.398.122***		***768.019.000***	***36,44***								***36,44***		***0,00***	***0,00***	***68,22***	***440.398.122***	***68,22***	***11,75***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	155.675.900	6	7.783.377		30.854.000												0,00	6	7.783.377	10,00	5,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	160	323.493.100	4	50.341.235		64.115.000	3								3		0,00	0,00	7	50.341.235	4,38	15,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	51	271.860.000	1	29.834.691		55.274.000	1								1		0,00	0,00	2	29.834.691	3,92	10,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	208.814.400	8	29.210.531		41.959.000	1								1		0,00	0,00	9	29.210.531	36,00	13,99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	9.123.000				1.808.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2.575.449.000	12	323.228.288		529.009.000	3								3		0,00	0,00	15	323.228.288	25,00	12,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	205.000.000				45.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***	***%***	***100***	***7.666.647.200***	***100***	***115.050.000***		***1.376.854.000***	***100***								***100***		***0,00***	***0,00***	***100***	***115.050.000***	***100,00***	***1,50***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1.954.580.000				488.645.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	1.876.300.000				469.075.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	315.259.300				62.199.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	934.841.700	4	71.050.000		136.500.000	3								3		0,00	0,00	7	71.050.000	12,96	7,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	997.000.000				199.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	1.588.666.200	4	44.000.000		21.435.000												0,00	4	44.000.000	13,33	2,77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***%***	***100***	***6.345.915.200***	***100***	***1.082.232.213***		***1.283.596.000***	***51,69***								***51,69***		***0,00***	***0,00***	***75,845***	***1.082.232.213***	***75,85***	***17,05***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	1.417.358.800	12	163.435.067		288.175.000	3								3		0,00	0,00	15	163.435.067	100,00	11,53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	200.781.000	3	66.997.646		47.589.000	3								3		0,00	0,00	6	66.997.646	75,00	33,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	4.727.775.400	12	851.799.500		947.832.000	3								3		0,00	0,00	15	851.799.500	107,14	18,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***	***%***	***100***	***4.017.912.787***	***100***	***411.752.287***		***747.375.700***	***22,68***								***22,68***		***0,00***	***0,00***	***61,34***	***411.752.287***	***61,34***	***10,25***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.988.100	1	62.601.500		36.069.000												0,00	1	62.601.500	100,00	34,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	1.553.292.987	10	246.414.487		307.854.700	2								2		0,00	0,00	12	246.414.487	92,31	15,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	9	356.842.100				71.703.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	669.789.600	144	102.736.300		132.749.000	18								18		0,00	0,00	162	102.736.300	578,57	15,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.256.000.000				199.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan**	**Lembaga**	**3**	**17.308.686.300**	**3**	**2.153.547.006**		**3.630.000.000**												**0,00**	**3**	**2.153.547.006**	**100,00**	**12,44**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		2.22.08.5.09	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	***Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya***	***Dokumen***	***18***	***17.308.686.300***	***3***	***2.153.547.006***		***3.630.000.000***												***0,00***	***3***	***2.153.547.006***	***16,67***	***12,44***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	30	17.308.686.300	3	2.153.547.006		3.630.000.000												0,00	3	2.153.547.006	10,00	12,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN**	**Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI**	**Angka**	**30,05**	**19.906.368.800**	**82,7**	**2.129.240.907**		**4.133.795.000**	**82,7**	**8.446.175**							**82,7**	**8.446.175**	**0,00**	**0,20**	**165,4**	**2.137.687.082**	**550,42**	**10,74**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KARAKTER KEBANGSAAN																									
		8.01.02.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***%***	***100***	***19.906.368.800***	***100***	***2.129.240.907***		***4.133.795.000***	***6,09***	***8.446.175***							***6,09***	***8.446.175***	***0,00***	***0,20***	***53,045***	***2.137.687.082***	***53,05***	***10,74***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4	58.429.000				13.850.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	80	15.600.000.000				3.850.000.000												0,00	0			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	796.824.000	50	16.929.772		188.875.000												0,00	50	16.929.772	8,33	2,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	15	572.113.800	2	83.959.600		81.070.000	1	8.446.175							1	8.446.175	0,00	10,42	3	92.405.775	20,00	16,15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.07	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	135.260.000	38	43.866.590		0												0,00	38	43.866.590	0,00	32,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	0	400.282.000	1			0												0,00	1		0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	0	390.605.600	1	315.674.750		0												0,00	1	315.674.750	0,00	80,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.12	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	1.952.854.400	38	1.668.810.195		0												0,00	38	1.668.810.195	0,00	85,45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI**	**Angka**	**70,44**	**55.297.803.000**	**70,39**	**11.677.490.985**		**12.557.305.000**	**70,39**	**10.858.299.016**							**70,39**	**10.858.299.016**	**0,00**	**86,47**	**140,78**	**22.535.790.001**	**199,86**	**40,75**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.03.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***%***	***100***	***55.297.803.000***	***100***	***11.677.490.985***		***12.557.305.000***	***61,93***	***10.858.299.016***							***61,93***	***10.858.299.016***	***0,00***	***86,47***	***80,965***	***22.535.790.001***	***80,97***	***40,75***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	16.950	52.418.591.000	1.550	11.042.245.393		12.039.210.000	50	10.836.189.366							50	10.836.189.366	0,00	90,01	1.600	21.878.434.759	9,44	41,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	10	2.879.212.000	3	635.245.592		518.095.000		22.109.650								22.109.650		4,27	3	657.355.242	30,00	22,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI**	**Angka**	**100**	**2.494.615.000**	**100**	**215.408.402**		**494.446.000**	**100**	**1.401.675**							**100**	**1.401.675**	**0,00**	**0,28**	**200**	**216.810.077**	**200,00**	**8,69**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.04.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan***	***%***	***100***	***2.494.615.000***	***100***	***215.408.402***		***494.446.000***	***19,18***	***1.401.675***							***19,18***	***1.401.675***	***0,00***	***0,28***	***59,59***	***216.810.077***	***59,59***	***8,69***	***BADAN KESATUAN***
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***																								***BANGSA DAN POLITIK***
		8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	576.887.600	1	32.010.085		114.350.000		1.401.675							1.401.675			1,23	1	33.411.760	20,00	5,79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.200	1.145.316.200	150	96.447.314		226.996.000												0,00	150	96.447.314	12,50	8,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	5	772.411.200	1	86.951.003		153.100.000												0,00	1	86.951.003	20,00	11,26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI**	**Angka**	**88,38**	**7.039.948.400**	**65,4**	**726.693.938**		**1.395.310.000**	**65,4**	**12.351.222**							**65,4**	**12.351.222**	**0,00**	**0,89**	**130,8**	**739.045.160**	**148,00**	**10,50**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.05.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***%***	***100***	***7.039.948.400***	***100***	***726.693.938***		***1.395.310.000***	***15,66***	***12.351.222***							***15,66***	***12.351.222***	***0,00***	***0,89***	***57,83***	***739.045.160***	***57,83***	***10,50***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	438.951.800	1	49.126.475		87.010.000		12.028.212							12.028.212			13,82	1	61.154.687	20,00	13,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	7.500	4.254.820.900	300	105.018.100		843.300.000		323.010							323.010			0,04	300	105.341.110	4,00	2,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	20	2.346.175.700	4	572.549.363		465.000.000												0,00	4	572.549.363	20,00	24,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI**	**Angka**	**0**	**13.894.425.300**	**79,24**	**2.417.703.050**		**2.761.905.000**	**79,24**	**439.934.889**							**79,24**	**439.934.889**	**0,00**	**15,93**	**158,48**	**2.857.637.939**	**0,00**	**20,57**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.06.1.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***%***	***100***	***13.894.425.300***	***100***	***2.417.703.050***		***2.761.905.000***	***30,86***	***439.934.889***							***30,86***	***439.934.889***	***0,00***	***15,93***	***65,43***	***2.857.637.939***	***65,43***	***20,57***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
		8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	208.550.000	1	8.322.400		49.430.000		2.047.197							2.047.197		4,14	1	10.369.597	25,00	4,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	50	13.685.875.300	11	741.016.650		2.712.475.000		61.499.749							61.499.749		2,27	11	802.516.399	22,00	5,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	5	0	1	1.668.364.000		0	1	376.387.943							1	376.387.943	0,00	0,00	2	2.044.751.943	40,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Kategori RB Perangkat Daerah (BB)	undefined	0																		0				BADAN KESATUAN
Rata-rata capaian kinerja (%)							183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																				SR	SR					R	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											BANGSA DAN POLITIK
2	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah**																										
Rata-rata capaian kinerja (%)						183.983.328.706		28.172.881.272		38.338.605.700		12.973.589.567							0,00	12.973.589.567	0,00	33,84		41.146.470.839	57,03	22,36	
Predikat Kinerja																			SR	SR					R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6 Analisis Pencapaian Kinerja *Output* Dan *Outcome* Perangkat Daerah

2.3.6.1 Badan Kepegawaian Daerah DIY

Badan Kepegawaian Daerah DIY, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Tujuan "Indeks Profesionalitas ASN", yang penilaiannya dilakukan oleh BKN, belum ada realisasi di triwulan I. Demikian juga pada Indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator yang dimiliki, kedua indikator tersebut, realisasi ada di triwulan IV. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran yang berjumlah 9 (Sembilan) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah", sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja program lainnya, realisasi ada di triwulan IV. Kemudian, pada Sub Kegiatan, dari total 45 sub kegiatan, realisasi fisik sudah sesuai target yang ditetapkan, namun terdapat deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal adanya kebijakan efisiensi anggaran, belanja makan dan minum rapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.3.6.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas" telah mencapai target. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari 2 (dua) indikator, realisasi seluruhnya sudah sesuai target. Kemudian untuk indikator kinerja program, dari 7 (tujuh) program yang ada, terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target kinerja Triwulan I, antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi karena seluruh kegiatan pada program tersebut bukan termasuk ke dalam kegiatan prioritas, sehingga dilakukan pergeseran anggaran kas dari triwulan I, untuk pelaksanaan kegiatan mulai triwulan II. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi disebabkan oleh data kinerja yang bersifat tahunan sehingga akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 38 subkegiatan, terdapat 3

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(tiga) subkegiatan yang tidak mencapai target fisik yang telah ditentukan karena terdapat aktivitas yang belum dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan rasionalisasi/pemotongan anggaran. Realisasi fisik hampir memenuhi target, dengan deviasi yang hanya berada pada angka 1,09%. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 4,35% dari target kinerja keuangan sebesar 49,89% dan telah terealisasi sebesar 45,54%. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya karena seluruh aktivitas belum dapat dilaksanakan, sehubungan dengan kegiatan tidak termasuk dalam daftar kegiatan prioritas Triwulan I. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan rasionalisasi/pemotongan anggaran.

2.3.6.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu "Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY", realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Selanjutnya untuk indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator sasaran, semua tercapai sesuai target di triwulan I. Kemudian pada Sub kegiatan, dari total 27 Sub Kegiatan, realisasi fisik sesuai target pada triwulan I, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi yang disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan, seperti pada gaji dan tunjangan pegawai.

2.3.6.4 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan" belum mencapai target yang ditetapkan karena pada TW I belum ada penyelenggaraan diklat yang telah selesai, sehingga belum dapat diperoleh presentase untuk indikator Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, terdapat 2 (dua) sasaran kinerja. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang pada triwulan I belum mencapai target karena beban pekerjaan yang tinggi dari ASN mempersempit peluang untuk mengikuti pelatihan/bimtek, kurangnya motivasi ASN dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mengikuti pelatihan karena belum tersedianya kompensasi yang dapat diterima secara langsung dan beberapa kebutuhan pelatihan belum tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, terdapat total 3 (tiga) indikator, untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum mencapai target karena belum ada pelatihan yang selesai. Untuk pelaksanaan sub kegiatan, dari 32 sub kegiatan pada triwulan I terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% dan secara fisik telah sesuai target. Secara kinerja fisik, realisasi fisik telah mencapai target sehingga tidak terdapat deviasi. Untuk kinerja keuangan, masih menunjukkan adanya deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang relatif kecil yaitu sebesar 5,81%. Beberapa deviasi disebabkan oleh sifat sub kegiatan yang merupakan persediaan/menyesuaikan kebutuhan, efisiensi, serta beberapa permasalahan terkait standar satuan harga.

2.3.6.5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel “ telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja program, dari total 4 (empat) indikator seluruhnya sudah sesuai target pada triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 73 Sub Kegiatan, secara fisik seluruhnya telah terlaksana 100%. Namun, secara keuangan terjadi deviasi yang disebabkan antara lain terdapat sub kegiatan yang bersifat persediaan, adanya selisih harga antara SHS dengan harga pasar, serta adanya efisiensi belanja.

2.3.6.6 Badan Penghubung Daerah DIY

Badan Penghubung Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase Layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain”, telah tercapai sesuai target pada Triwulan I. Selanjutnya dari total 2 (dua) indikator sasaran yang dimiliki, 1 (satu) indikator telah mencapai target pada triwulan I, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

“Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY”, realisasi belum mencapai target, karena masih menggunakan capaian tahun 2024. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator yang dimiliki, terdapat 2 (dua) indikator telah mencapai target pada triwulan I, sedangkan 1 (satu) indikator, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai target. Kemudian, dari total 25 Sub Kegiatan, untuk Kinerja Fisik Sub Kegiatan sampai triwulan I, realisasi sudah sesuai dengan target. Sedangkan untuk kinerja keuangan terdapat deviasi yang sebagian besar disebabkan karena adanya rasionalisasi, anggaran berkurang pada DPA pergeseran, efisiensi, serta pembayaran menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.7 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk kinerja tujuan OPD) terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi, dengan capaian kinerja masih menggunakan tahun sebelumnya. Kinerja tujuan BAPPERIDA DIY baru dapat dihitung pada akhir Triwulan IV dikarenakan kinerja tujuan Bapperida DIY diperoleh dari kinerja tujuan seluruh OPD akhir tahun 2025. Sampai dengan Triwulan I yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi di masing-masing OPD mitra bidang sektoral. Hal yang sama terjadi pada kinerja sasaran, capaian dua indikator kinerja sasaran semuanya juga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya (capaian realisasi baru dapat dihitung apda akhir tahun 2025). Pada kinerja program dengan jumlah 12 indikator kinerja program yang telah dilaksanakan, hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yang dapat dilakukan perhitungan pada triwulan I yaitu Indikator kinerja program “Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sarana dan Prasarana”, dengan capaian sebesar 96,30% atau melebihi dari target sebesar 92% atau tercapai sebesar 104,67% terhadap target. Sedangkan 11 (sebelas) Indikator kinerja program yang lain, baru dapat dihitung pada akhir Triwulan IV. Selanjutnya pada kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 41 sub kegiatan tercermin pada progres Kinerja fisik, sampai dengan triwulan I tahun 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

realisasi fisik sudah memenuhi dari target fisik yang ditetapkan sebesar 31,41%. Sedangkan progres Kinerja keuangan masih mengalami deviasi sebesar 12,64%, dari target sebesar 27,24% terealisasi baru sebesar 14,60% dan terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 sub kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Penyebab deviasi keuangan tersebut dikarenakan adanya sisa belanja atau efisiensi dari penyesuaian harga pasar, karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

2.3.6.8 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DIY

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk capaian indikator kinerja Program, dari total dua indikator, semua Indikator sudah sesuai target pada TW I tahun 2025. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan, dari total sebanyak 20 sub kegiatan strategis menunjukkan hasil Baik, di tunjukkan dengan dengan tidak adanya deviasi fisik dari target. Sedangkan pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi keuangan sebesar 1,11% yang disebabkan adanya selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.9 Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja DIY

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan Selatan”. Hal tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator “Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi” dan “Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja” telah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut didorong faktor SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi dan jumlah pemohon pelayanan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja telah memenuhi target pelayanan. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 17 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.10 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target Triwulan I 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan, dari total 10 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, negosiasi harga pada saat proses pengadaan.

2.3.6.11 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 5 (lima) indikator program, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase peserta pelatihan yang terampil” indikator “Persentase penumbuhan calon wirausaha baru” dan “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik”. Hal tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025 dan kendala teknis penatausahaan keuangan. Sedangkan untuk indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar” telah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisik dan keuangannya mengalami deviasi. Hal tersebut terjadi karena kendala teknis pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.12 Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 indikator belum ada yang tercapai. Pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan I capaiannya di angka 86,65 dari target Triwulan I sebesar 86,71 atau dengan presentase capaian 99,93% dikarenakan beberapa sub kegiatan terdapat deviasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keuangan. Pada indikator Jumlah penerima sertifikat keahlian Teknik belum terdapat capaian pada triwulan I dikarenakan uji kompetensi direncanakan mulai diselenggarakan pada triwulan III setelah siswa SMK menyelesaikan semua mata pelajaran (tamat SMK) atau setelah siswa menyelesaikan mata pelajaran pada semester 5 SMK. Untuk Sub Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Namun masih terdapat deviasi keuangan disebabkan beberapa belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, dan adanya efisiensi anggaran.

2.3.6.13 Balai Layanan Perpustakaan DIY

Balai Layanan Perpustakaan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target pada triwulan I karena realisasi dihitung di akhir tahun, yaitu "Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All*)" dan "Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan". Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah memenuhi target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ serta adanya efisiensi anggaran untuk biaya perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat.

2.3.6.14 Balai Pelatihan Kesehatan DIY

Balai Pelatihan Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator belum mencapai target triwulan yang ditetapkan yaitu indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Untuk Sub Kegiatan, dari total 6 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan. Realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, pembayaran listrik yang dibayarkan di triwulan I sesuai dengan kebutuhan dan penghematan daya serta adanya kendala teknis terkait gerakan efisiensi awal tahun 2025 ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.15 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha DIY

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 23 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.16 Balai Pemuda dan Olah Raga DIY

Balai Pemuda dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 4 (emapat) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan. Sedangkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha dan Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS tidak memiliki target pada triwulan I, kemudian untuk 1 (satu) indikator lainnya yaitu indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak tercapai karena hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan di Program Penunjang. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik dan beberapa capaiannya melebihi target karena kegiatan yang pelaksanaannya mendahului dari yang sudah ditargetkan. Deviasi keuangan disebabkan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyebab lainnya adalah pertukaran pengurus penerima hibah dan teknis pencairan untuk DAU.

2.3.6.17 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan DPA dan belanja tagihan listrik yang menyesuaikan dengan kebutuhan (fluktuatif).

2.3.6.18 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.19 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 29 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan harga di DPA.

2.3.6.20 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk realisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.21 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta DIY

Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.22 Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi DIY

Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Program, dari total 4 (empat) indikator, ada 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan, sebanyak 14 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, tetapi masih terdapat deviasi fisik sebesar 0,17%. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang termasuk dalam usulan rasionalisasi

yang merujuk pada Surat Edaran No. B/900.1.12/510/SET TAHUN 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBD TA 2025 tindak lanjut atas Inpres RI No. 1 tahun 2025. Sedangkan kinerja keuangan sub kegiatan masih terdapat deviasi keuangan sebesar 0,57%, yang disebabkan oleh belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta termasuk dalam usulan rasionalisasi.

2.3.6.23 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran DIY

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki sejumlah dua program dan indikator kinerja program sebanyak tiga indikator dengan persentase capaian 100%. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY melaksanakan total

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebanyak 18 sub kegiatan utama yang telah

menunjukkan hasil baik, dengan tidak ada deviasi fisik dan tidak ada deviasi keuangan di atas 10%. Deviasi keuangan sebesar 3,41% terjadi karena selisih harga di pasaran dan harga di aplikasi Mbiz yang lebih rendah dibandingkan dengan SHBJ, selain itu adanya selisih dari pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik yang dibayarkan sesuai dengan tagihan. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2.3.6.24 Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian DIY

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, terdapat hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan”. Hal tersebut karena Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Berdasarkan Kepmenkeu RI No 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pangan Pertanian termasuk dana yang dicadangkan sehingga kegiatan yang didanai melalui DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian untuk Provinsi DIY ditiadakan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” indikator “Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi” dan “Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten” telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Hal tersebut terjadi karena terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.25 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DIY

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: "Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian". Hal tersebut karena terdapat kendala teknis pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" indikator "Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi" dan "Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Peternakan)" telah melebihi target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 19 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.26 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 2 (dua) indikator program yaitu: "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" belum mencapai target yang di tetapkan. Untuk indikator "Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi" belum sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 12 (sebelas) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.27 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 3

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(tiga) indikator program, terdapat hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik”. Hal tersebut karena realisasi baru bisa dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG” telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Ketercapaian didukung oleh faktor penyebarluasan informasi layanan BPTTG melalui media sosial, Iklim industri di DIY yang didominasi oleh IKM terutama industri makanan dan kerajinan. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Selanjutnya terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.28 Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target Triwulan I 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Untuk Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai pemenuhan kebutuhan pembayaran klaim yang diajukan oleh mitra dan faskes. Untuk Sub Kegiatan, dari total 15 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan. Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja pembayaran klaim jaminan Kesehatan semesta (Jamkesta) sesuai dengan yang diajukan oleh mitra dan faskes, adanya efisiensi sisa pembayaran kontribusi iuran BPJS, belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, dan selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.29 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat perbedaan harga pasar dan SHBJ pada beberapa sub kegiatan yang memiliki efisiensi sisa belanja.

2.3.6.30 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai sesuai dengan target triwulan I. Namun untuk indikator Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial berdasarkan capaian tahun 2024 belum tercapai. Untuk capaian tahun 2025 akan dihitung pada akhir triwulan IV 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa, seperti negosiasi pembelian dimana harga di pasaran lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta pembelian barang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.6.31 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 39 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, sisa belanja karena adanya selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ serta adanya rasionalisasi anggaran.

2.3.6.32 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY

Balai Rehabiltasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan, dari total 27 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Sedangkan realisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keuangan terdapat deviasi karena adanya belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan harga pasar, harga di e-katalog dan toko daring.

2.3.6.33 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas DIY

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yaitu Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial belum dapat dihitung ketercapaiannya karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Sedangkan untuk kinerja keuangan terdapat deviasi keuangan disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa, seperti karena perbedaan harga antara SHBJ dengan harga pasaran, penyesuaian kebutuhan listrik dan layanan sampah.

2.3.6.34 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yaitu Persentase guru jenjang Pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran Jogja Belajar tidak tercapai sesuai target karena masih kesulitan membagi waktu guru antara mengikuti Bimtek dan mengajar di sekolah. Untuk Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Deviasi keuangan disebabkan belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ.

2.3.6.35 Biro Hukum DIY, Sekretariat Daerah

Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase layanan hukum yang berkualitas”, realisasinya telah sesuai target. Demikian juga untuk indikator sasaran yang berjumlah 2 (dua) indikator semuanya sudah sesuai target. Kemudian dari 4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(empat) indikator kinerja Program yang dimiliki, 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada Sub Kegiatan, dari total 34 Sub Kegiatan, tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat deviasi keuangan yang relatif kecil, disebabkan adanya sisa pengadaan.

2.3.6.36 Biro Kesejahteraan Rakyat DIY, Sekretariat Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda " belum dapat dihitung ketercapaiannya karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, belum ada yang mencapai target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5 (lima) indikator, juga belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik 100%, ada 5 subkegiatan yang memiliki deviasi keuangan >10% karena penawaran lebih rendah dari pagu anggaran dan juga belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.37 Biro Organisasi DIY, Sekretariat Daerah

Biro Organisasi Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian pada indikator Tujuan "Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan tinggi", belum ada realisasi di triwulan I, realisasi ada pada akhir tahun. Demikian juga pada indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang ada, sampai dengan triwulan I juga belum ada capaian, karena realisasi juga akan dihitung pada akhir tahun. Selanjutnya untuk indikator kinerja Program, yang berjumlah 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" sedangkan 1 (satu) indikator lainnya, yaitu "Kematangan Perangkat Daerah", realisasi ada pada akhir tahun. Untuk Sub Kegiatan dari total 23 Sub Kegiatan, realisasi fisik seluruh sub kegiatan telah memenuhi target, sedangkan kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan kebutuhan, terdapat rapat yang dilaksanakan secara online.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.38 Biro Pengadaan Barang/Jasa DIY, Sekretariat Daerah

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Triwulan I 2025 memiliki indikator kinerja tujuan, yaitu Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan ini realisasi capaian yang diperoleh adalah sebesar 64,36 dari target 96,50, atau sebesar 66,69% dari target. Sedangkan pada indikator sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 39,23 dari target 69,49 atau sebesar 56,45% dari target. Indikator sasaran kedua Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target 92,61 atau sebesar 100,94% dari target. Selanjutnya, pada kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator program pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 86,86 dari target 80,70 (107,63%). Pada indikator program kedua, Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 85,66 dari target 85,57 atau mencapai 100,10% dari target. Indikator ketiga, Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa baru terealisasi sebesar 33,93% dari target 68,24% atau hanya mencapai sebesar 49,73% dari target. Hal ini disebabkan karena sebagian besar paket pengadaan barang/jasa masih dalam tahapan pelaksanaan sehingga progres pengadaan barang/jasa Pemda DIY belum maksimal dikarenakan proses penyelesaiannya pada sistem belum dapat dilakukan. Selanjutnya, secara umum kinerja sub kegiatan tercermin pada progres fisik dan keuangan sampai dengan TW I tahun 2025, masih menunjukkan adanya deviasi fisik sebesar 0,46% dengan 6 (enam) sub kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100%. Deviasi fisik tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, serta adanya kegiatan yang masuk pada efisiensi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sedangkan pada kinerja keuangan, terdapat deviasi sebesar 1,45% dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki deviasi diatas 10%. Deviasi keuangan terjadi karena masih dalam proses pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. Selanjutnya untuk sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik fisik maupun keuangan terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan

realisasi fisik dan keuangan 100%. Pada kegiatan yang bersumber dari Dana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Keistimewaan terdapat 1 (satu) sub kegiatan, tidak terdapat dengan deviasi fisik tapi masih ada deviasi keuangan sebesar 0,30%.

2.3.6.39 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan DIY, Sekretariat Daerah

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki indikator kinerja tujuan Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara persentase baru mencapai 83,33% dari target. Sedangkan pada indikator sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara persentase baru mencapai 83,33% dari target. Sedangkan indikator sasaran kedua Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target 93,48 atau sebesar 100% dari target. (Capaian indikator tujuan dan kinerja sasaran masih menggunakan realisasi kumulatif dari tahun sebelumnya karena kinerja tujuan dan sasaran baru dapat dihitung di akhir Triwulan IV Tahun 2025). Selanjutnya, pada kinerja Program sampai dengan triwulan I tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator program pertama yaitu Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda terealisasi sebesar 66,67% dari target 50% (133,34%). Pada indicator program kedua, Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda (Program Dais) terealisasi sebesar 25% dari target 50% atau baru mencapai 50% dari target. Indikator ketiga, Nilai PKKI

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah baru terealisasi sebesar 85,94 dari target 95,80 atau baru mencapai sebesar 89,70% dari target. (Target nilai PKKI yang tercantum merupakan target akhir tahun 2025 sedangkan realisasi merupakan nilai yang diambil dari nilai rata-rata PKKI program Penunjang TW I tahun 2025). Secara umum sebanyak 22 sub kegiatan progres realisasi fisik telah memenuhi target, tidak terdapat deviasi sama sekali yang berarti target ketercapaian fisik sebesar 14,94% telah tercapai sepenuhnya. Pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi sebesar 2,47%, dari target sebesar 11,34% baru terealisasi sebesar 8,87%. Deviasi keuangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terbesar terjadi pada sub kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang yaitu deviasi 7,63% dikarenakan adanya surat edaran untuk menunda kegiatan pada bulan Januari dan Februari sehingga kegiatan baru dapat dilakukan pada bulan Maret. Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya antara lain: perjalanan dinas luar daerah, pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, dan pelaksanaan publikasi. Terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai pada triwulan I 2025 telah terealisasi 100%. Capaian kinerja fisik sampai dengan Triwulan I telah sesuai target, sedangkan untuk kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 2,47%, dari target sebesar 11,34% hanya terealisasi sebesar 8,87% .

2.3.6.40 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY, Sekretariat Daerah

Biro Perekonomian dan SDA DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan "Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan" belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruhnya belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena capaian kinerjanya bersifat *outcome* dan proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, kesemua indikator belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Capaian kinerjanya bersifat *outcome* dan proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun masih terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut karena efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.41 Biro Tata Pemerintahan DIY, Sekretariat Daerah

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian pada indikator tujuan "Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dapat mencapai target. Begitu juga dari 2 (dua) indikator sasaran yang dimiliki, realisasi kedua indikator tersebut dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan I. Adapun untuk capaian Program, dari total 6 (enam) indikator program yang dimiliki, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi (%), hal ini karena proses sinkronisasi garis batas daerah memerlukan proses yang cukup panjang hingga tercapai kesepakatan antara pihak DIY, Provinsi Jawa Tengah, Kab./Kota maupun Desa/Kalurahan yang berbatasan. Kemudian dari total subkegiatan yang berjumlah 23 Sub kegiatan, realisasi fisik telah sesuai target, namun terdapat deviasi keuangan yang relatif besar karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah, serta adanya kebijakan efisiensi yang diatur oleh Inpres RI No 1 Tahun 2025.

2.3.6.42 Biro Umum dan Protokol DIY, Sekretariat Daerah

Biro Umum dan Protokol Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pada indikator tujuan yang dimiliki yaitu "Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan dan nilai reformasi birokrasi" capaian telah mencapai target triwulan I. Demikian juga dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dimiliki, realisasinya sudah mencapai target triwulan I. Selanjutnya untuk indikator kinerja Program, dari 2 (dua) indikator yang dimiliki, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk capaian sub kegiatan, dari total 32 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik dikarenakan faktor eksternal berupa kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian juga untuk kinerja keuangan terdapat deviasi keuangan disebabkan karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.43 Dinas Kebudayaan DIY

Dinas Kebudayaan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu "Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola", "Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola", dan "Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola". Seluruh indikator tersebut realisasi menggunakan tahun 2024 dan belum memenuhi target karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 4 (empat) indikator, terdapat 1 (Satu) indikator realisasi merupakan tahun 2024 pada "Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" dan 3 (tiga) indikator lainnya yaitu "Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum", "Peningkatan jumlah penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi, nasional, internasional", serta "Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY", belum memiliki realisasi karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 6 (enam) indikator, terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" dan 5 (lima) indikator lainnya sama seperti indikator kinerja Sasaran, belum dilaksanakan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Untuk Sub Kegiatan, dari total 45 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi tidak sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi pada 7 (tujuh) Sub Kegiatan disebabkan oleh sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD yang baru efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.44 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang pertama "Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Perikanan yang Berkelanjutan (juta rupiah)", yang kedua "Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan (skor)" dan yang ketiga "Meningkatnya aktivitas perekonomian perikanan budidaya di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (juta rupiah/tahun)" belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas) indikator, terdapat 2 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan sub kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat persediaan.

2.3.6.45 Dinas Kesehatan DIY

Dinas Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita " telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena didukung oleh kegiatan Pemberian makanan tambahan pada akhir tahun 2024 memberikan dampak pada penurunan *prevalensi underweight* dan Pemantauan disertai konseling PMBA tentang MP-ASI yang bergizi sesuai standar. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, semua indikator kinerja sasaran masih menggunakan capaian tahun sebelumnya disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 18 indikator, ada 13 Indikator sudah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target karena masih akan berjalan dalam pengumpulan/input data hingga triwulan IV 2025 dan tidak dilakukan karena dampak rasionalisasi dan efisiensi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 57 Sub Kegiatan Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, selisih harga penawaran dan juga belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.46 Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu "Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY melalui asesmen mandiri" telah tercapai sesuai target pada Triwulan I. Selanjutnya dari total 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dimiliki, realisasi sudah mencapai target di triwulan I. Kemudian dari total 6 (enam) indikator kinerja program yang ada, realisasi semua indikator kinerja telah mencapai target pada triwulan I, meskipun ada yang merupakan data sementara karena capaian di Triwulan IV. Dari total 28 sub Kegiatan yang dimiliki, sampai dengan triwulan I, realisasi fisik telah sesuai target, sedangkan realisasi keuangan terdapat sedikit deviasi karena menyesuaikan kebutuhan dan dilakukan efisiensi.

2.3.6.47 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan "Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)" telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut di dukung oleh perbaikan tata kelola Koperasi sehingga meningkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi yang berdampak pada penambahan jumlah anggota koperasi, penambahan jumlah anggota Koperasi selaras dengan peningkatan omset Koperasi. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 13 (lima belas) indikator, terdapat 11 (sebelas) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Faktor pendorong ketercapaian dikarenakan adanya kolaborasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan pendukung ketercapaian program yang tidak ada pendanaan bisa dilakukan melalui kolaborasi tersebut. Sementara masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru bisa dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, terdapat 6 (enam) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Salah satu faktor karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain hal tersebut terdapat pula kendala teknis seperti kekurangan kelengkapan dokumen, serangan website dan kendala teknis lainnya. Selain itu, juga terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan kendala teknis lain.

2.3.6.48 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 bahwa berdasarkan kinerja tujuan terdapat satu indikator dan sudah mencapai target yaitu Ketercapaian Kinerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari dari target 77,20% tercapai 77,20%. Pada kinerja sasaran, dari lima indikator kinerja sasaran seluruhnya dapat tercapai terhadap target. Pada kinerja program dari sebanyak 19 indikator program, 17 diantaranya tercapai. Terdapat 1 (satu) indikator program yang belum dapat diukur capaiannya pada triwulan I, yaitu Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis (ha), serta 1 (satu) indikator program yang tidak tercapai yaitu Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan (parameter) dari target 4.300 parameter tercapai sebanyak 4.261

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

parameter atau sebesar 99,09% terhadap target. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pergeseran jadwal sampling dari pelanggan yang semula diagendakan awal tahun menjadi pertengahan/akhir tahun. Sampai dengan Triwulan I 2025, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mencapai target fisik 100% yaitu subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari 3 (tiga) subkegiatan yang ditargetkan selesai 100% di Triwulan I. Sedangkan 1 (satu) subkegiatan lainnya yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian fisiknya masih 95,05%. Secara umum progres fisik antara realisasi fisik dengan target, masih terdapat deviasi meski relatif sangat kecil yang berada pada angka 0,04%. Kinerja pada progres keuangan masih terdapat deviasi keuangan sebesar 5,33% dari target sebesar 23,16% terealisasi sebesar 17,83%. Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 3 sub kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu deviasi 14,84% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.6.49 Dinas Pariwisata DIY

Dinas Pariwisata DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan "*Total Yield* (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator realisasi belum sesuai target yang ditetapkan, disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 9 (sembilan) indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut terjadi karena ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 serta kebijakan nasional dan situasi global yang mempengaruhi ketercapaiannya. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025 karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.6.50 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY" belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 10 indikator, terdapat tujuh indikator dengan realisasi sudah sesuai target, tetapi masih terdapat tiga indikator yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 27 indikator, ada 16 Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 11 indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025.

Pada kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 65 sub kegiatan tercermin pada progres kinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat deviasi sebesar 4,54%. Terjadinya deviasi fisik tersebut karena adanya tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan secara umum kinerja sub kegiatan pada progres kinerja keuangan juga masih memiliki deviasi sebesar 6,61%. Hal ini disebabkan karena masih adanya empat sub kegiatan dengan deviasi keuangan lebih dari 10%. Deviasi keuangan terbesar yaitu 19,81 % pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo yang berdampak pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Prambanan-Gayamharjo

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Segmen B4-B5. Sub kegiatan tersebut menggunakan anggaran dana keistimewaan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu pergeseran DPA dana keistimewaan (dampak INPRES Nomor 1 Tahun 2025).

2.3.6.51 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu "Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas" sudah sesuai target, meskipun masih data sementara, karena capaian ada di triwulan IV. Demikian juga dari total 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran yang ada, realisasi sudah mencapai target triwulan I. Selanjutnya, dari total 9 (Sembilan) indikator kinerja Program yang dimiliki, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sudah mencapai target triwulan I, ada 1 (satu) indikator belum mencapai target, yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah", serta 1 (satu) indikator yang belum ditargetkan pada triwulan I, realisasi baru ada di triwulan IV. Kemudian, dari total 32 Sub Kegiatan yang dimiliki, realisasi fisik sudah sesuai target triwulan I, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi karena beberapa faktor eksternal seperti gaji dan tunjangan yang menyesuaikan jumlah ASN, penyesuaian harga pasar, efisiensi belanja perjalanan dinas, menyesuaikan kebutuhan, seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2.3.6.52 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu "Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Masyarakat" dan "Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga". Kedua indikator kinerja tersebut capaian telah melebihi target meskipun pada indikator "Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga" capaian masih menggunakan capaian tahun 2024 karena capaian diukur di akhir tahun 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 5 (lima) indikator, realisasi seluruh indikator sudah sesuai target. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

10 indikator, terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, yang merupakan indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Untuk Sub Kegiatan, dari total 66 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah memenuhi target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran sesuai Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025.

2.3.6.53 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Nilai Realisasi Investasi di DIY“ sudah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 3 (tiga) indikator, semuanya sudah sesuai target. Hal tersebut di dorong oleh faktor-faktor masih adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen; komitmen pimpinan dan staf dalam memberikan layanan perizinan, diwujudkan dengan fasilitas layanan yang memadai; pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka identifikasi masalah dan pendampingan pengisian LKPM sebagai dasar nilai realisasi investasi; adanya inovasi *integrated call center* yang memperkuat layanan perizinan kepada masyarakat; dan Penerapan *AGILE Government* dan sistem merit terhadap pencapaian kinerja instansi. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 7 (tujuh) indikator, terdapat 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025 dan hambatan teknis pelaksanaan kegiatan. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta kendala teknis penatausahaan keuangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.54 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, dari 8 (delapan) indikator tujuan, sebanyak 6 (enam) indikator telah mencapai target. Ada 2 (dua) indikator menggunakan capaian tahun 2024 yaitu Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda karena data capaian tahun 2025 baru akan dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang belum memiliki target pada triwulan 1 yaitu Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS serta Indikator Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS karena kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS akan diselenggarakan di triwulan III. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 10 indikator, 9 (sembilan) indikator realisasi sudah sesuai target, baik menggunakan capaian 2024 atau sudah dengan capaian triwulan I. Masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target yaitu Indikator Jumlah capaian medali di bidang olahraga pada kejuaraan multi *event* (emas, perak, perunggu) belum memiliki target pada triwulan I karena kompetisi akan diselenggarakan pada triwulan IV (target akhir 24 medali). Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 10 indikator, ada 7 (tujuh) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 64 Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada triwulan I karena penyaluran UKT belum dapat dilaksanakan. Demikian juga realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan penyaluran UKT dan belanja menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.55 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki Kinerja tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dengan indikator Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dihitung dari Rerata Persentase Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum serta Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan telah terealisasi melebihi target sebesar 101,06%. Indikator tujuan tersebut didukung melalui tiga sasaran yaitu; Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, Pengelolaan Sektor

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan serta Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan I capaian kinerja sasaran, semuanya telah tercapai. Sedangkan pada kinerja program dicapai melalui 14 indikator kinerja program, sampai dengan triwuilan I tahun 2025 semua indikator tersebut telah sesuai dengan target. Capaian realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, serta Program seluruhnya telah tercapai dengan persentase capaian 100%. Untuk kinerja sub kegiatan dari total sebanyak 43 sub kegiatan sampai triwulan I tahun 2025, hanya terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100% yaitu sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Secara umum tidak terdapat deviasi fisik, sedangkan terkait dengan deviasi keuangan, masih terdapat tiga sub kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

2.3.6.56 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY” dan “Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY” belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 3 (tiga) indikator semuanya belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas) indikator, semua indikator belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 41 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.57 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Tujuan "Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip", realisasi sudah melebihi target namun angka realisasi tersebut merupakan angka tahun 2024, karena realisasi tahun 2025 dihitung pada akhir tahun. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh realisasi indikator merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi dihitung di akhir tahun atau awal tahun 2026. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5 (lima) indikator, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" serta "Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi". Untuk Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi tidak sesuai target triwulan I karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran No B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

2.3.6.58 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator tujuan "Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah" ini sementara masih menggunakan capaian Triwulan IV Tahun 2024 dan sedang berproses seiring dengan penyesuaian kebijakan nasional terkait dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total tiga indikator, terdapat dua indikator dengan realisasi sudah sesuai target, tetapi masih terdapat satu indikator yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena perhitungan capaian dilakukan pada setiap akhir tahun. Selanjutnya pada tahun 2025 ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mengampu enam Program, 15 Kegiatan dan didukung dengan 37 Sub Kegiatan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total sembilan indikator, ada enam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator sudah sesuai target pada TW I, dan masih terdapat tiga indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 37 sub kegiatan tercermin pada progres kinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja fisik terealisasi sebesar 18,85% sudah sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga tidak terdapat deviasi. Sedangkan pada kinerja keuangan sub kegiatan terealisasi sebesar 12,29% dari target sebesar 15,50% sehingga masih terdapat deviasi sebesar 3,21% pada tujuh sub kegiatan. Deviasi keuangan tersebut disebabkan efisiensi, belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, harga pasar yang lebih rendah dari SHBJ, dan masih dalam proses administrasi keuangan. Belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan seperti pembelian buku cek bank, pengiriman barang, tagihan telpon, air, listrik, pemeliharaan peralatan dan mesin, tenaga ahli, narasumber dan perjalanan dinas dan hasil penyesuaian terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.3.6.59 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang pertama “Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)“ belum mencapai target yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Nilai PDRB Tahun 2025 baru akan dirilis dibulan Februari n+1 oleh BPS. Untuk indikator kinerja tujuan yang ke-dua: “Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)” sudah melebihi target yang di tetapkan. Untuk indikator kinerja tujuan yang ke-tiga: “Indeks Ketahanan Pangan (skor)” sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya untuk indikator kinerja tujuan yang ke-empat: “Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan” juga sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima) indikator, 4 (empat) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

untuk indikator Kinerja Program, dari total 15 (lima belas) indikator, terdapat 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 (dua belas) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 50 (lima puluh) Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025 karena terkait kendala pada DPA pergeseran. Demikian juga terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut salah satunya dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya kendala teknis pelaksanaan kegiatan.

2.3.6.60 Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial " telah mencapai target triwulan I yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 9 (Sembilan) indikator, ada 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 73 Sub Kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada triwulan I karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun Anggaran 2025. Demikian juga realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, sisa pengadaan dan belanja menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.61 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Dinas Tenaga Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan "Tingkat produktivitas DIY (juta rupiah/tenaga kerja)" telah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 7 (tujuh) indikator, 6 (enam) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target. Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, sementara masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 49 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun demikian terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.62 Inspektorat DIY

Inspektorat DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Indeks Penilaian Integritas" bersifat tahunan sehingga realisasi Triwulan I merupakan realisasi tahun 2024. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) sasaran kinerja, terdapat 1 (satu) sasaran kinerja telah melampaui target TW I, yaitu Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal dengan indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan capaian 90,88 dari target TW I 88,50. Adapun dua sasaran lainnya,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penghitungannya bersifat tahunan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, Inspektorat DIY memiliki 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator. Terdapat satu indikator, yaitu nilai PKKI program penunjang yang belum mencapai target karena terkait dengan pergeseran aliran kas, juga terkait dengan kelengkapan pelaporan seperti inovasi. Untuk kinerja pelaksanaan sub kegiatan, dari total 45 sub kegiatan, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan deviasi fisik cukup besar. Hal ini terkait dengan proses pergeseran aliran kas sehingga beberapa tahap pelaksanaan sub kegiatan terdampak. Secara keseluruhan, realisasi fisik hampir memenuhi target, dengan deviasi yang hanya berada pada angka 0,04%. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 8,27% (target keuangan sebesar 27,77% hanya terealisasi sebesar 19,50%). Deviasi ini diantaranya disebabkan oleh penundaan pelaksanaan sub kegiatan, sifatnya menyesuaikan kebutuhan. Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 (lima) sub kegiatan, hal ini disebabkan pergeseran angkas sub kegiatan masih dalam proses, merupakan penjagaan serta addendum pengadaan barang/jasa masih dalam proses.

2.3.6.63 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan. Sebanyak 17 sub kegiatan penunjang dan 2 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, dengan tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat deviasi keuangan sebesar 3,89% yang disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas, harga pasar yang lebih rendah dari SHBJ, dan belanja yang belum dapat direalisasikan karena kendala dari pihak penyedia. Selanjutnya, terdapat tiga sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan ≥10%, karena karena harga pasar lebih rendah dari SHBJ dan adanya perubahan aliran kas.

2.3.6.64 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 20 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik dan tidak ada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

deviasi fisik. Namun, secara keuangan terjadi deviasi sebesar 2,16% disebabkan adanya efisiensi belanja dan perbedaan antara harga pasar dengan SHBJ dimana terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan ≥10%.

2.3.6.65 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 21 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik. Namun, terdapat sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik, yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3,00%) serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1,00%). Penyebab deviasi fisik tersebut adalah adanya efisiensi pada salah satu komponen belanja. Secara keseluruhan terdapat deviasi keuangan sebesar 3,52% yang disebabkan oleh efisiensi belanja dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ dimana terdapat 2 sub kegiatan yang mengalami deviasi keuangan ≥10%.

2.3.6.66 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Sleman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki 2 (dua) indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan I. Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki Sebanyak 19 sub kegiatan telah menunjukkan hasil baik dan tidak ada deviasi fisik. Namun, secara keseluruhan masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab deviasi keuangan tersebut karena adanya efisiensi.

2.3.6.67 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki 2 (dua) indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan I. Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki sebanyak 19 sub kegiatan menunjukkan hasil baik dan tidak mengalami deviasi fsik. Namun, secara keseluruhan masih terjadi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab deviasi keuangan tersebut karena adanya selisih harga antara harga pasar yang lebih rendah dibandingkan standar harga.

2.3.6.68 Museum Negeri Sonobudoyo DIY

Museum Negeri Sonobudoyo DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh indikator telah memenuhi target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta negosiasi harga dari pengadaan barang dan jasa.

2.3.6.69 Paniradya Kaistimewan DIY

Paniradya Kaistimewan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan". Realisasi indikator tujuan tersebut telah melebihi target karena menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 90,95% atau sebesar 101,96% dari target tahun 2025 sebesar 89,20%. Selanjutnya Paniradya Kaistimewan memiliki 2 (dua) indikator Sasaran. Perhitungan realisasi dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 sehingga realisasi pada triwulan I 2025 menggunakan angka realisasi tahun 2024 sehingga seluruh indikator sasaran telah melebihi target. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target karena aktivitas OPD yang semakin banyak sehingga rentang kendali pun semakin panjang dan terdapat deviasi keuangan pada beberapa sub kegiatan karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100% namun secara total realisasi fisik melebihi target sampai dengan bulan Maret yaitu 21,36% dari target sebesar 20,68%. Hal ini karena pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan terdapat pekerjaan Penyusunan Kajian Perumusan Arah Kebijakan Keistimewaan dan Kajian Indikator Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan yang target fisiknya pada bulan April, namun diselesaikan pada triwulan I (Bulan Maret) karena mengingat kontrak kerja berakhir ketika libur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

lebaran. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 5,05%, dari target sebesar 20,45%, terealisasi sebesar 15,4%. Deviasi keuangan terjadi karena beberapa aktivitas tidak dilaksanakan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi.

2.3.6.70 Pelabuhan Perikanan Pantai DIY

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 2 (dua) indikator program yaitu: "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" belum mencapai target yang di tetapkan. Untuk indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/Fasilitas Pelabuhan (skor)" belum sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 11 Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

2.3.6.71 Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator kinerja sasaran belum mencapai target triwulan I yaitu indikator Persentase ODGJ berat ditangani dan tidak ditelantarkan. Faktor penghambat ketidaktercapaian indikator tersebut adalah adanya kebijakan rujukan berjenjang BPJS sehingga hanya pasien dengan diagnose gangguan jiwa berat yang bisa di rawat inap di RS Jiwa Grhasia yang merupakan rumah sakit jiwa kelas A, serta terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap sehubungan saat ini sudah terdapat beberapa rumah sakit non kekhususan jiwa yang juga menyediakan layanan rawat inap bagi pasien jiwa. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, ada 2 (dua) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 29 Sub Kegiatan terdapat deviasi antara target dengan realisasi fisik sebesar 1,10%. Deviasi fisik terjadi karena proses pengadaan masih sampai pada tahap evaluasi sebagai akibat terdapat calon penyedia yang mengajukan penawaran dibawah 80% sehingga BLP menetapkan kebijakan untuk melakukan reviu kewajaran harga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penawaran yang mengakibatkan penetapan penyedia melebihi dari jadwal yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut untuk pembangunan gedung Psikiatri Terpadu perlu dilakukan kajian terhadap HPS oleh Inspektorat sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk dapat dilakukan pemaketan ke BLP, selanjutnya untuk realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, pembayaran uang muka untuk jasa konstruksi pembangunan gedung Psikiatri Terpadu, Instalasi Farmasi dan Instalasi Rehabilitasi Medik belum dapat dilaksanakan dan adanya pergeseran anggaran.

2.3.6.72 Rumah Sakit Paru Respira DIY

Rumah Sakit Paru Respira DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 7 (tujuh) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena efisiensi belanja, adanya beberapa belanja yang belum dapat dibayarkan karena terkendala aplikasi coretax dari pihak penyedia dan pembayaran uang muka Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Andalalin tidak dilakukan karena belum ada kepastian anggaran DAU Pemda DIY.

2.3.6.73 Satuan Polisi Pamong Praja DIY

Satuan Polisi Pamong Praja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan “Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum mencapai target. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari 2 (dua) sasaran kinerja, seluruh indikator Sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 4 (empat) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, antara lain disebabkan pemahaman dari masyarakat/wisatawan yang kurang dalam melihat situasi dan kondisi dari Pantai Selatan yang memiliki *rip current*/palung sehingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

banyak terjadi laka laut, serta belum adanya sistem informasi yang memadai dalam mengakomodir pelaporan dari setiap kelompok Jagawarga. Untuk Sub Kegiatan, dari total 49 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100% yang disebabkan karena adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang terdampak Inpres No. 1 Tahun 2025. Demikian juga, terdapat deviasi keuangan sebesar 5,4% disebabkan oleh adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang terdampak Inpres No. 1 Tahun 2025.

2.3.6.74 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya negosiasi harga dan fluktuasi tagihan listrik.

2.3.6.75 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan adanya sisa anggaran dari pembayaran belanja.

2.3.6.76 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya sisa dari pembayaran listrik hingga bulan Maret 2025 dan sisa penawaran jasa keamanan dan kebersihan.

2.3.6.77 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena terdapat efisiensi anggaran sisa belanja dari listrik, surat kabar, telepon, perjalanan dinas, serta hasil

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

negosiasi belanja BLUD seperti penyediaan bahan keramik, bahan edotel, ATK, buku cek, bahan kulit, dan bahan tekstil.

2.3.6.78 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.79 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan pelaksanaan telah melebihi target triwulan I.

2.3.6.80 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya penyesuaian termin pembayaran pada triwulan I jasa keamanan dan kebersihan.

2.3.6.81 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada selisih harga pasaran yang lebih rendah dibadingkan dengan SHBJ.

2.3.6.82 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisik dan keuangnya nya sudah sesuai target pada triwulan I.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.83 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik dan keuangan terdapat deviasi karena berkurangnya tagihan rutin untuk belanja listrik akibat tidak adanya praktik di jurusan disebabkan masa ujian.

2.3.6.84 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi Belanja.

2.3.6.85 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan dengan tagihan belanja listrik, telepon, sampah; serta perjalanan dinas yang menyesuaikan kebutuhan untuk koordinasi administrasi sekolah.

2.3.6.86 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh honor UKK yang direncanakan di April dimajukan di bulan Maret, sehingga terdapat deviasi negatif pada sub kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik.

2.3.6.87 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik dan keuangan terdapat deviasi karena adanya kendala pada pembayaran pajak Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Termin I dan Belanja Honorarium Pengelola Dapodik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.88 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi dari sisa belanja listrik dan Belanja Jasa Keamanan.

2.3.6.89 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah melebihi target karena Pelaksanaan Gelar Kreativitas dan Persiapan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dilaksanakan lebih awal dari yang direncanakan, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena Pembuatan produk BLUD menggunakan bahan yang masih disediakan dari anggaran BOS.

2.3.6.90 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan oleh efisiensi belanja.

2.3.6.91 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi negatif karena adanya pembayaran THR di bulan April (Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan), direalisasikan di bulan Maret karena disesuaikan dengan aturan pencairan THR sebelum hari raya.

2.3.6.92 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik belum memenuhi target karena jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah yang mundur dari rencana, menyesuaikan Jadwal UKK (Sesuai Surat dari Dirjen Pendidikan Vokasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nomor 0035/D2/DV.00.01/2025 tertanggal 2 Januari 2025 Perihal Penyampaian Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025), sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan adanya sisa belanja yang sesuai kebutuhan dan penundaan belanja bahan Unit Layanan teknik mesin dan teknik otomotif.

2.3.6.93 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik belum memenuhi target karena Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2025, No. 9 Tahun 2025, No. 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dimana terdapat perbedaan dengan Kalender Pendidikan yang semula siswa libur Ramadhan tanggal 3,4,5 Maret 2025 menjadi tanggal 27, 28 Februari 2025 sehingga kegiatan kemah bakti yang semula akan dilaksanakan tgl 26-28 Februari menjadi mundur di bulan Mei 2025. Sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya kegiatan belanja sewa peralatan kantor atau sewa panggung yang semula akan digunakan pada kegiatan tersebut.

2.3.6.94 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena sisa belanja dari belanja Cetak dan Cover dan belanja Keamanan dan Kebersihan sekolah, serta belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.95 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang bersifat fluktuatif, terdapat selisih standar harga dan menyesuaikan kebutuhan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.96 Sekretariat Daerah DIY

Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 10 Sub Kegiatan yang ada, realisasi fisik dan keuangan terdapat deviasi. Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah menyesuaikan kebutuhan.

2.3.6.97 Sekretariat DPRD DIY

Sekretariat DPRD DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja tujuan "Kepuasan pelayanan kepada DPRD" dari target 84 terealisasi sebesar 89,18 atau melebihi target. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dari 2 (dua) indikator yaitu "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah", realisasi kurang dari target karena merupakan target absolut yang akan dinilai di akhir tahun anggaran atau triwulan IV, selain itu belum ada subkegiatan yang selesai 100% di Triwulan I sehingga kegiatan masih berjalan. Untuk capaian sub kegiatan, terdapat deviasi fisik sebesar 0,02 untuk 5 sub kegiatan dan deviasi keuangan sebesar 17,17% untuk 15 sub kegiatan. Deviasi fisik terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan dan adanya rasionalisasi 50% perjalanan dinas. Sedangkan deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, antara lain karena adanya selisih harga tiket dan hotel dalam perjalanan dinas.

2.3.6.98 Taman Budaya Yogyakarta DIY

Taman Budaya Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, pada indikator "Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" realisasi belum memenuhi target karena terdapat kegiatan yang masih berlangsung sampai dengan triwulan IV, sementara realisasi indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta" belum mencapai target karena survey kepuasan konsumen belum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dilakukan pada triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 18 Sub Kegiatan, secara fisik terdapat deviasi dikarenakan terdapat sub kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai target, sementara kinerja keuangan juga terdapat deviasi karena terdapat kendala dalam proses NPD (terkait kebijakan Efisiensi Anggaran) yang berdampak pada proses penyelesaian SPJ, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta kendala teknis terkait dengan pencairan DAK Non Fisik.

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.4.1.1 Kemiskinan

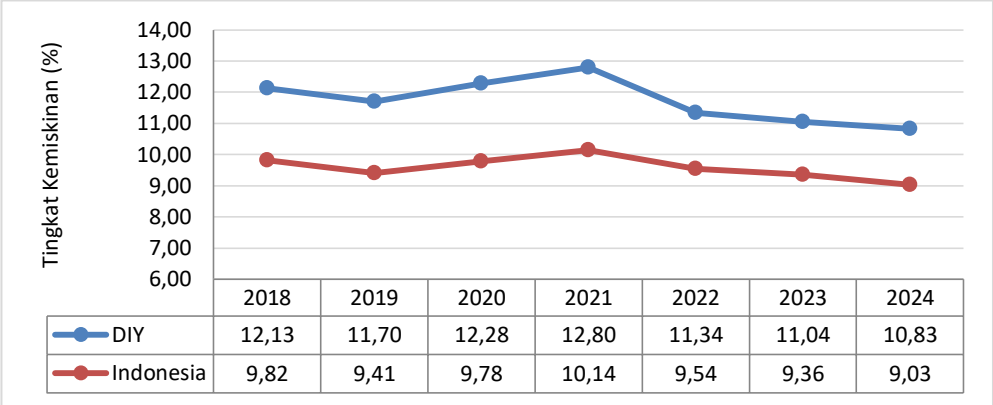
Terkait Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius yang perlu diperhatikan, dan banyak negara lain masalah ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian menjadi sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi.

Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita RPJMN yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya dalam program prioritas RPJMN juga ditekankan terkait pemberantasan kemiskinan dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) berupa melanjutnya dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya pandemi Covid-19.Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY di tahun 2020 sampai dengan 2021 dari 11,70 (2019) menjadi 12,80 (2021). Sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penduduk miskin DIY pada 2024 sebesar 10,83% dan turun 0,21 poin dibandingkan 2023.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DIY	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Indonesia	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 126 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia 2018 – 2024 dalam Persen (Maret)

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini juga mencerminkan adanya ketimpangan antara wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 15,62%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 15,18% dan Kabupaten Bantul 11,66%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memilki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (10,38%) yaitu 7,46% untuk Kabupaten Sleman dan 6,26% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 2- 211 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2024 (%)

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,3	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,43	12,92	13,5	14,04	12,27	11,95	11,66
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86	15,6	15,18
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp351.957/orang/bulan (Bank Dunia, 2023). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14% atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya penurunan persentasi kemiskinan saja, Tetapi ukuran lain perlu diperhatikan yaitu kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Apabila dilihat pada persentase pengeluaran, maka proporsi pengeluaran terbesar penduduk miskin adalah makanan. Ketimpangan yang tinggi akan mereduksi kue pembangunan dan distorsi penurunan kemiskinan, sedangkan kecepatan penduduk golongan bawah dalam menikmati kue pembangunan masih kalah dengan penduduk golongan menengah apalagi golongan penduduk atas (indikasi ketimpangan tinggi terutama di Kota Yogyakarta). Inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam upaya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengentasan kemiskinan harus *link and match* dengan katup perekonomian Yogyakarta yaitu pariwisata dan keberadaan kampus. Selain itu, Keistimewaan Yogyakarta menjadi modal besar bagi percepatan pengentasan kemiskinan dalam waktu yang cepat. Strategi pengentasan kemiskinan juga memerlukan pendekatan antropologi-Etnografi agar memberikan perbaikan penghidupan rumah tangga miskin.

Kemiskinan juga dipengaruhi dengan masih adanya Inclusion dan Exclusion Error pada data BNBA sasaran Program. Kondisi UHH yang tinggi membawa konsekuensi kepada pemenuhan layanan lansia terutama layanan dasar seperti kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan lansia untuk mengaktualisasikan dirinya. Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud.

Permasalahan kemiskinan merupakan akibat dari beberapa kondisi di DIY. Hal ini didukung oleh beberapa kondisi seperti :

1. Meskipun TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dari semula 3,58% menjadi 3,24% dibandingkan periode Februari 2023. Namun apabila di-breakdown berdasarkan Tingkat pendidikan yang ditamatkan, terjadi peningkatan TPT pada jenjang tamatan SMA, diikuti oleh peningkatan TPT pada jenjang SMK, dan Diploma I/II/III.
2. Prevalensi balita *stunting* berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik, tetapi persebarannya belum merata, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY.
4. Capaian akses air minum dan sanitasi layak Tahun 2023 di 147 No Bidang / Urusan Faktor Pendorong Faktor Penghambat kegiatan lintas sektor dari nonpemerintah, seperti perusahaan melalui dana CSR, filantropi, dan sebagainya. DIY belum memenuhi target Nasional, selain itu penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2023 belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku.
5. Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan,rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi : pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (*top u*p) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *universal health coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Selain itu beberapa hal secara kelembagaan juga masih menghadapi kendala dalam penanggulangan kemiskian khususnya kemiskinan ekstrem diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan dan pemahaman SDM penyelenggara di OPD teknis maupun perencana
3. Penentuan waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak didasari dengan analisis waktu maupun kondisi sekitar
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Ketidakjujuran penerima manfaat dalam memberikan keterangan atau informasi ketika dilakukan pendataan
6. Pelaksaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan

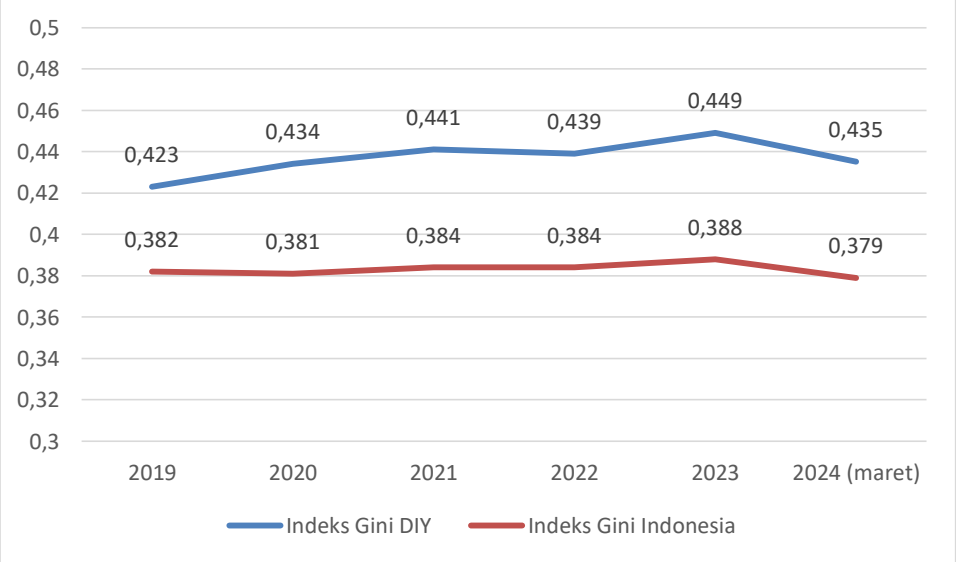
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

2.4.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2019 hingga 2024 Maret digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 127 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2019-2024 (Maret)

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2019 berada di angka

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

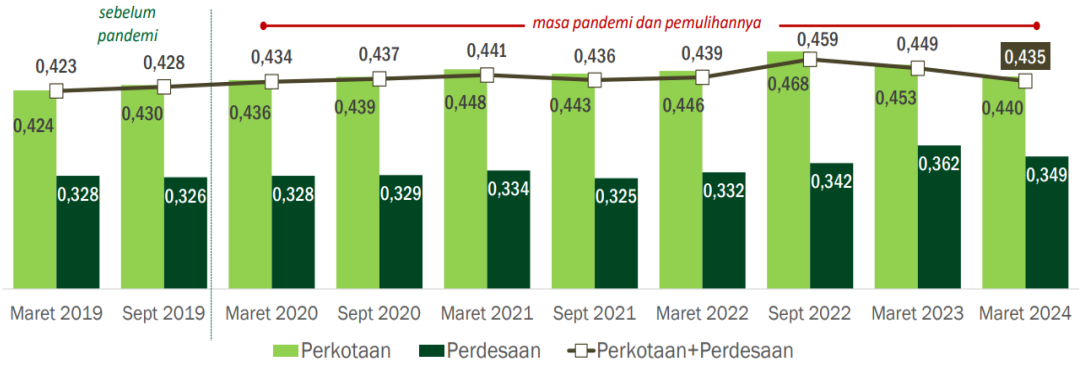
0,423. Periode berikutnya mengalami tren menaik karena terdampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio gini DIY sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio gini di daerah perkotaan pada 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan rasio gini 2021 yang sebesar 0,448. Rasio gini di daerah perdesaan pada 2022 mencapai 0,332. Rasio gini tersebut lebih rendah bila dibanding rasio gini 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di perdesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2- 128 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2019-2024

2.4.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2022 adalah 0,464 dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,456. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi rata-rata terbesar pada tahun 2018 - 2022 berada di Kota Yogyakarta (36%).Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 7%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan terserier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 88,61 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,86) dan Bantul (81,74) masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 75,82 dan Gunungkidul sebesar 71,46 termasuk dalam kategori “Tinggi”. Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,29 tahun) dan terendah di Bantul (73,94 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2023 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.1.4 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana semakin Meningkat

Pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup saling berkaitan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut tertuang dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Indikasi awal atau nilai yang menggambarkan kualitas atau kondisi lingkungan hidup dalam suatau wilayah pada lingkup dan periode tertentu disebut Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas air laut (IKAL).

Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup DIY tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren nilai IKLH mengalami kondisi fluktuatif. Sedangkan tahun 2022 hingga 2024, cenderung mengalami peningkatan. Capaian~~ya~~ IKLH tahun 2022 hingga 2024 berkisar antara 59,92sampai dengan 68,44 angka indeks, dengan kategori berdasar PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 termasuk dalam kategori sedang.

Indeks penyusun IKLH yang masih berada pada kategori kurang dari tahun 2022 hingga 2024 yaitu IKA dengan kisaran capaian antara 32,14 sampai dengan 42,94 angka indeks, meskipun capaian di dua tahun terakhir tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk IKTL pada tahun 2022 dan tahun 2024 berada pada ketegori sedang dan di tahun 2023 berada pada kategori kurang, dengan capaian di dua tahun terakhir tidak mencapai target. Capaian IKTL tahun 2023 sebesar 48,68 dari target 51,36 dan tahun 2024 sebesar 51,13 dari target 51,44.

Bencana adalah permasalahan yang kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Kajian Risiko Bencana DIY untuk tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terdapat 6 jenis ancaman yang memiliki risiko tinggi, yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami dari total 12 ancaman yang diidentifikasi di DIY.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 DIY memiliki indeks risiko bencana 102,83. Capain tersebut meningkat dibanding tahun 2023, dengan indeks risiko bencana 108,15. Capaian 2023 dan 2024 tersebut mencerminkan konsistensi keberhasilan capaian penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY, dengan kondisi awal pada tahun 2019 indeks risiko bencana DIY sebesar 148,00 (kategori tinggi). Penurunan indeks risiko ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor usaha.

Salah satu tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY adalah masih tingginya risiko bencana di Kawasan Selatan DIY. Indeks risiko bencana tahun 2024 untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 152,65 yang justru meningkat (memburuk) dibanding capaian pada 2023 sebesar 140,98. Kabupaten Bantul meskipun skor indeksnya turun (membaik) pada 2024 sebesar 129,50 dibanding capaian tahun 2023 sebesar 149,27 namun masih relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di DIY. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul mencapai perkembangan peningkatan yang signifikan dari capaian sebesa r94,43 di tahun 2023 menjadi106,55 pada tahun 2024.

Indeks Risiko Bencana di 3 kabupaten pada kawasan selatan DIY yang masih relatif tinggi tersebut mengindikasikan tantangan pengelolaan pembangunan DIY yang diafirmasi prioritasnya di kawasan selatan harus mampu mengelola risiko bencana yang ada serta tidak menambah faktor risiko bencana.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.2.1.1 Urusan Pendidikan

1.) Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.

Sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya. hal ini terlihat dari indeks Harapan Lama SekolahMenurut data BPS tahun 2024 naik menjadi HLS DIY 15,70. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul selalu berada di bawah rata-rata DIY . begitu juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di ketiga kabupaten tersebut masih tertinggal dengan Kota Yogyakarta dan Sleman. Oleh karena itu, meskipun capaian pendidikan DIY secara agregat tergolong tinggi, ketimpangan dalam HLS dan RLS menunjukkan bahwa layanan pendidikan berkualitas belum sepenuhnya merata di seluruh DIY.

2.) Mutu pendidikan yang belum optimal

Mutu pendidikan di DIY masih belum merata, terutama di sekolah swasta yang tertinggal dibandingkan sekolah negeri. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi atau belum mencapai standar tertinggi, sehingga perlu upaya peningkatan kualitas secara menyeluruh.

Kemampuan literasi siswa sudah cukup baik, tetapi numerasi masih perlu diperbaiki. Ketimpangan pendidikan terlihat antara perkotaan dan perdesaan, di mana daerah dengan akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki capaian yang lebih tinggi. Beberapa wilayah masih tertinggal, menunjukkan perlunya pemerataan akses, infrastruktur, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.) Relevansi Pendidikan Kejuruan belum optimal;

Relevansi dan daya saing pendidikan vokasi belum optimal karena lulusan SMK, dan diploma, sering kali bekerja di luar bidang keahliannya. Kurikulum yang kurang fleksibel, minimnya keterlibatan industri, serta terbatasnya kesempatan magang berbasis kompetensi menyebabkan kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan instruktur vokasi agar memiliki keahlian yang relevan dan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja sertaperkembangan teknologi yang cepat belum diimbangi dengan pembaruan keterampilan yang sesuai.

4.) Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Tingkat pendidikan tenaga kerja di DIY masih cukup rendah, yang ditandai dengan dominasi lulusan pendidikan menengah dan masih terbatasnya proporsi tenaga kerja dengan pendidikan tinggi. Selain itu, masih terdapat tenaga kerja yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau bahkan belum menamatkan pendidikan formal, yang berpotensi menghambat daya saing mereka di pasar kerja. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan dengan upah layak dan peluang karir yang lebih baik, terutama di sektor formal yang semakin kompetitif.

2.4.2.1.2 Urusan Kesehatan

1.) Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan prevalensi yang tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional seperti kanker, Diabetes Melitus (DM), ginjal kronis, stroke, hipertensi, jantung, asma, dan gangguan jiwa. Apabila disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan Riskesdas Tahun 2018,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

capaian prevalensi beberapa penyakit tersebut cenderung menurun kecuali prevalensi Diabetes Melitus.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2022 baru mencapai 46,02%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

2.) Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2023, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 7.741 kasus dengan penemuan kasus baru HIV sebanyak 957 kasus. Penemuan tertinggi di Kabupaten Sleman sebanyak 237 kasus dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 54 kasus. Jumlah kasus seluruhnya sebanyak 7.665 kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 71,08%. Kelompok

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

usia dengan kasus tertinggi adalah pada rentang usia 30-49 tahun sebanyak 43,99%.

Untuk penyakit TB, success rate penyakit TB pada tahun 2023 sebesar 86,9% meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 85,90. Permasalahan penanganan TB di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (case detection rate) yaitu 6.280 kasus dari target penemuan sebesar 9.301 (47%). Capaian tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 52,30%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pencegahan dan pengendalian TB antara lain memperkuat kapasitas fasyankes, selain itu juga melalui pelibatan kemitraan pentahelix yang terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penangananya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menorah.

Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2023 kasus DBD di DIY sebanyak 701 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 2 orang menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.253 kasus dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,3 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,8.

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

3.) Prevalensi Balita *Stunting* di DIY masih Cukup Tinggi

Prevalensi balita *stunting* berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menunjukkan capaian prevalensi *stunting* DIY sebesar 21,4% dan menurun di tahun 2019 mencapai 21% berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran sehubungan terjadinya pandemi covid 19, tetapi di tingkat pusat menerbitkan buku prediksi *stunting* sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja program *stunting*. Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* DIY sebesar 20% dan berturut-turut menurun di tahun 2021 sebesar 17,3% dan tahun 2022 sebesar 16,4% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* DIY kembali meningkat menjadi 18%. Peningkatan angka prevalensi *stunting* juga diikuti oleh kabupaten/kota di DIY kecuali Kabupaten Sleman.

Hal tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan cakupan intervensi spesifik dan sensitif serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta peningkatan akses pangan bergizi menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan.

Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensipada penyebab langsung *stunting* seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

4.) Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dari yang sebelumnya sebanyak 40 kasus di tahun 2020 menjadi 131 kasus di tahun 2021 karena dalam masa pandemi covid 19. Dari 131 kasus kematian ibu di tahun 2021, 80 diantaranya karena terpapar covid 19, selain itu pandemi covid 19 menyebabkan kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak. Seiring dengan menurunnya kasus covid di tahun 2022, terjadi pula penurunan kasus kematian ibu menjadi 43 kasus di tahun 2022 dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi sebanyak 22 kasus. Mekipun terjadi penurunan kasus kematian ibu melahirkan di tahun 2022, masih menjadi perhatian di DIY dalam pencegahan dan penanganannya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan.

5.) Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan

Ketersediaan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah DIY masih menjadi perhatian, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Dari sisi tenaga kesehatan, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di DIY sudah mencukupi apabila dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan, akan tetapi bila dilihat dari distribusi tenaga kesehatan di 5 kabupaten/kota di DIY masih belum merata, terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Jumlah tenaga medis terbanyak di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 2.697. Sedangkan jumlah tenaga medis paling sedikit terdapat di Kabupaten Kulon Progo yaitu 302 orang.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layananan dan penguatan layanan kesehatan, selain itu perlu adanya penguatan sistem rujukan dan peningkatan kapasitas layanan primer menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

6.) Ancaman kejadian bencana dan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana DIY tahun 2022-2026 terdapat 14 (empat belas) bencana yang berpotensi terjadi di DIY yaitu : banjir, banjir bandang, covid 19, cuaca ekstrim, epidemi wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, letusan gunungapi merapi, likuefaksi, tanah longsor, dan tsunami.

Selain dari kondisi geografis, timbulnya permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan kejadian bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit seperti permasalahan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, perubahan fungsi lahan, permasalahan lingkungan, dan mobilisasi penduduk juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat kerentanan DIY dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menghadapi kejadian bencana termasuk epidemi wabah penyakit. Posisi DIY sebagai daerah pusat pendidikan dan pariwisata memiliki risiko yang tinggi terhadap krisis kesehatan karena tingkat mobilisasi dan interaksi masyarakat dari berbagai daerah.

Perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat polusi udara serta peningkatan kasus DBD akibat perubahan pola cuaca. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sektor kesehatan menjadi hal yang penting menjadi perhatian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal diamatkan bahwa kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.

Selain itu, DIY perlu terus memperkuat ketahanan sistem kesehatannya, terutama dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) di masa mendatang. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan, digitalisasi layanan, dan peningkatan sistem informasi kesehatan menjadi prioritas utama dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7.) Kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat DIY belum optimal

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Sampai dengan 1 Desember 2024, cakupan *Universal Health Coverage*(UHC) DIY sebesar 99,39% dari jumlah penduduk 3.708.168 orang dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul dan terendah di Kabupaten Bantul.

Meskipun status DIY sudah mencapai UHC, tetapi terdapat tantangan terkait keaktifan peserta dan sinkronisasi data kepesertaan. Dari total peserta JKN di DIY, peserta aktif sebesar 89,09% dan peserta non aktif sebesar 10,29%.

Perlu upaya peningkatan sinkronisasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan dan kabupaten/kota dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI JKN yang sebagai usulan updating integrasi penerima PBI JKN.

Dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, Pemda DIY melalui Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial DIY (BapelJamkesos DIY) menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Layanan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta. Jaminan Kesehatan Semesta merupakan sistem jaminan kesehatan di DIY yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari layanan Jamkesta adalah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga yang meliputi Masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. Penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase

a.) Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan/atau irigasi pertanian rakyat belum mencukupi pada waktu dan wilayah tertentu.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo Serang. Berdasarkan Jogja Dataku per Oktober tahun 2024 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS OYO sebesar 4.804 juta m3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 1.573,46 juta m3.

Potensi ketersediaan air di wilayah sungai Progo Opak Serang (WS POS) secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada. Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilakukan melalui pembangunan bendung/waduk, embung, sumur air tanah dalam, dan seterusnya. Sampai dengan saat ini pemenuhan air baku pada daerah sulit air melalui sumur air tanah dalam telah terlayani sebanyak 55 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, dan terlayani sumber air lain (PDAM, SPAMDES, dan lainnya) sebanyak 21 titik sehingga masih ada 75 titik yang belum terlayani. Untuk pembangunan embung masih perlu dilakukan penambahan embung baru hingga saat ini baru ada 25 embung. Sementara air untuk irigasi, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 10.259,24 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 73,35%.

b.) Sebagian besar daerah irigasi kewenangan pemda DIY belum mencapai indeks kinerja daerah irigasi kategori optimum.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kinerja layanan irigasi dipengaruhi oleh faktor fisik atau prasarana yang meliputi kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka peningkatan kinerja layanan sistem irigasi keseluruhan faktor tersebut perlu dilakukan peningkatan.

Indeks kinerja daerah irigasi diukur dari parameter kondisi jaringan irigasi, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A. Indeks kinerja daerah irigasi masuk dalam kategori optimum apabila nilainya di atas 77,5%. Berdasarkan data tahun 2024 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemda DIY, baru 10.259,24 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 73,35%. Adapun daerah irigasi kewenangan Pemda DIY saat ini yang masuk dalam kategori indeks kinerja optimum saat ini seluas 5.117,20 hekatar terdiri dari DI Klampok, DI Ponggok, DI Sekarsuli, DI Timoho, DI Trini, DI Tumut, DI Blawong, DI Pendowo, dan DI Sapon, dengan nilai persentase total yaitu 36,59%, sehingga masih banyak daerah irigasi yang belum masuk dalam kategori optimum.

c.) Masih terdapat daerah yang mengalami genangan.

Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan dalam penanganan pengelolaan wilayah sungai, termasuk kesepakatan dalam penanganan drainase, dimana perlu adanya pemetaan yang dilakukan oleh Pusat hal-hal terkait drainase yang perlu ditangani oleh DIY. Total genangan yang ada adalah sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, yang sudah ditangani seluas 5,44 ha, setara 34 titik sehingga masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

d.) Wilayah DIY rawan terhadap daya rusak air.

Wilayah DIY memiliki sumber bencana alam yang tersebar mulai dari gunung berapi, sesar/patahan, erosi dan tanah longsor, hingga potensi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

banjir dan tsunami. Erupsi gunung api Merapi berpotensi menimbulkan awan panas hingga banjir lahar dingin. Permasalahan banjir juga terjadi di beberapa WS POS. Hal ini disebabkan karena antara lain curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, adanya endapan atau sedimen di muara sungai (delta), atau karena daerah banjir yang memang merupakan dataran rendah. Pada saat ini penambangan bahan galian mineral yang banyak dilakukan di sepanjang sungai-sungai khususnya di sungai wilayah sungai Progo-Opak-Serang (WS POS) berdampak pada lingkungan diantaranya terhadap stabilitas bangunan sarana prasarana sungai, terhadap morfologi sungai yaitu terjadinya penurunan dasar sungai yang cukup signifikan dan berakibat kurang berfungsinya bangunan pengairan serta mengancam stabilitas bangunan pengairan dan prasarana lain. Pada saat kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian penduduk di sebagian wilayah di WSPOS terutama di daerah dengan dengan formasi geologi spesifik seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Pada sisi Selatan wilayah DIY mempunyai potensi abrasi dan banjir rob. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap sarana prasarana khususnya pada kawasan Selatan apabila tidak dilakukan mitigasi bencana. Berdasarkan data frekuensi terjadinya bencana (Jogja Dataku) pada tahun 2024 terjadi bencana yaitu 1.565 kali gempa bumi (skala kecil), 381 kali angin ribut, 39 kali tanah longsor, 17 kali kebakaran bangunan, 12 kali kebakaran hutan, 8 kali banjir, dan 1 kali kekeringan.

2.) Sub. Urusan Jalan

a.) Kondisi kemantapan jaringan jalan di DIY masih rendah.

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kondisi jaringan jalan kewenangan DIY belum seluruhnya dalam kondisi mantap, belum memenuhi standar teknis jalan dan standar keselamatan jalan. Total panjang ruas jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 41/KEP/2023 sepanjang 674,585 Km. Kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi di DIY pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 71,56%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kondisi mantap di tahun 2020, 70,52% kondisi mantap pada tahun 2021, tahun 2022 kondisi jalan mantap 70,18%, dan pada tahun 2023 kondisi kemantapan jalan sebesar 70,58%. Pada tahun 2024 kondisi kemantapan jalan sebesar 68,042% di mana masih ada 31,958% jalan tidak mantap atau setara dengan 215,581 kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi kemantapan jalan akan menurun apabila penanganan jalan tidak dilakukan dengan optimal. Selain itu peningkatan beban volume lalu lintas yang melintas serta kondisi tanah yang tidak stabil terutama saat musim hujan juga mempengaruhi kondisi jalan.

b.) Aksesibilitas jalan di DIY untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud.

Perwujudan aksesibilitas jalan sesuai dengan RTRW DIY dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan jalan berupa:

(1) Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
(2) Pengembangan Jaringan Jalan Ruas Jalan Legundi–Gesing penghubung Panggang–Legundi–Gesing
(3) Pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas Bandara YIA dengan KSPN Borobudur(Ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon dan Ruas Jalan Temon–Tegalsari–Samigaluh–Suroloyo–Klangon)
(4) Pembangunan jalan bebas hambatan Ruas Yogyakarta–Bawen dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo
(5) Pengembangan *Jogja Outer Ringroad* (JORR) pada ruas Sentolo–Minggir; Minggir–Tempel; Tempel–Prambanan; Sentolo–Imogiri; Imogiri–Piyungan; dan Piyungan–Prambanan.

Sampai dengan tahun 2024 pengembangan jaringan jalan JJLS untuk pengembangan kawasan Selatan masih berproses pada pelaksanaan kostruksi pembangunan Jembatan Srandakan 3 (Jembatan Pandansimo) dan ruas Kretek–Girijati. Pembangunan jalan tol di wilayah DIY telah dimulai proses konstruksinya dan direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Aksesibilitas dari bandara YIA ke KSPN Borobudur telah terlayani melalui peningkatan ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon. Adapun untuk ruas Temon–Borobudur direncanakan tindak lanjut akan dimulai seiring penetapan IPL tol Yogyakarta–Kulon Progo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah masih diperlukan pembangunan ruas jalan. Pengembangan konektivitas melalui pembangunan ruas jalan Prambanan–Gading sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul, sampai dengan tahun 2024 telah terbangun 20,175 kilometer atau 73,15% dari total 27,68 kilometer, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 7,405 kilometer. Konektivitas antar wilayah juga dilakukan untuk mendukung struktur ruang khususnya di kawasan Pansela yaitu melalui jalan strategis provinsi ruas Panggang–Legundi–Gesing. Pembangunan ruas jalan tersebut masih diperlukan yaitu pada segmen Legundi–Gesing sepanjang 11 kilometer.

3.) Sub. Urusan Cipta Karya

a.) Capaian akses air minum layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman.

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2023 di DIY adalah 95,49% dengan kondisi akses air minum aman yaitu 17,88% yang diperoleh dari data penduduk DIY yang telah memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Peningkatan akses air minum aman dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Berdasarkan rencana induk SPAM Regional DIY terdapat 4 SPAM Regional yang akan dikembangkan. Sampai dengan tahun 2023 hanya SPAM Regional Kartamantul yang telah terselesaikan pembangunannya dengan kapasitas air curah 700 liter/detik atau setara dengan 104.704 sambungan rumah dan diharapkan dapat mensuplai kebutuhan air minum pada PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota di Kartamantul, namun penyerapan sampai dengan tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 36,82%.

b.) Capaian akses sanitasi layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses sanitasi aman.

Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2023 adalah 97,69% dimana 21% berakses aman. Rendahnya akses aman disebabkan karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

domestik terpusat regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sistem IPAL Terpusat Sewon saat ini telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 SR dengan kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung yaitu 27.205 SR atau 36,72%. Peningkatan jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan sanitasi aman di DIY. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Sedangkan terkait dengan pengelolaan sampah dengan penutupan TPA Regional Piyungan, ditahun 2024,Pemda DIY mengeluarkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah dimana pengelolaan sampah dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

c.) Pengelolaan bangunan gedung Negara baru dilakukan sebatas pelayanan rekomendasi pembangunan/rehabilitasi, belum tersedia peta jalan menuju bangunan gedung Negara yang andal di wilayah DIY.

Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Keandalan bangunan gedung secara legal diperoleh dari dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sampai dengan saat ini belum tersedia data terkait capaian keandalan gedung di DIY sehingga diperlukan data dasar dan peta jalan untuk mencapai keandalan bangunan gedung. Layanan yang dilakukan sampai dengan tahun 2023 adalah dalam hal rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

gedung Negara. Rasio pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara masih rendah, tercermin dari kemampuan dalam pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun 2023 hanya mampu 12 bangunan gedung negara.

d.) Penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagai upaya perwujudan pola dan struktur ruang belum dilakukan pada semua satuan ruang strategis.

Berdasarkan Perdais DIY Nomor Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, perwujudan pola dan struktur ruang pada satuan ruang strategis salah satunya diwujudkan melalui penataan kawasan yang meliputi bangunan gedung dan lingkungannya. Dari 18 satuan ruang strategis yang ada fokus pelaksanaan penataan kawasan dengan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan berada pada kawasan sumbu filosofis. Penyediaan infrastruktur pedestrian yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) sebagai ikon baru di kawasan sumbu filosofi yang akan menjadi pusat kebudayaan. Pembangunan JPG sekaligus menjadi visi dan strategi yang dilakukan dalam pengejawantahan masa lalu dan perencanaan pengembangan DIY di masa mendatang.

Pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan satuan ruang strategis akan dilakukan mengikuti dokumen perencanaan pada masing-masing SRS, baik berupa rencana induk atau RTBL.

4.) Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

a.) Perwujudan layanan jasa konstruksi belum maksimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kewenangan pemerintah daerah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga/badan seperti lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan badan nasional sertifikasi profesi. Pada tahun 2024 terdapat permintaan tenaga ahli mencapai 12.098 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.168 orang dengan asumsi satu tenaga ahli menangani 3 sampai dengan 4 proyek. Kegiatan pelatihan dilakukan Pemda DIY untuk mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli. Pada tahun 2024 terdapat sejumlah 200 orang tenaga kerja konstruksi yang terlatih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli pada tahun 2024 terdapat 80 orang.

Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2023 adalah 81,12% yaitu 1.933 orang dari target 2.383 orang, di mana dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli. Berdasarkan data tersebut maka penyediaan tenaga kontruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi masih belum mencukupi kebutuhan.

Pada tahun 2024 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi capaiannya sebesar 102,35%, yang terdiri dari realisasi jumlah capaian tenaga ahli konstruksi terlatih sebesar 46,97%, jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi sebesar 35,38%, dan terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif sebesar 20%. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

Layanan jasa pengujian yang dilakukan oleh pemda DIY telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa penyedia jasa konstruksi baik di DIY maupun di luar DIY. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengujian di laboratorium konstruksi telah terakreditasi. Dalam rangka mempertahankan akreditasi laboratorium harus selalu dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Persyaratan sumber daya yang meliputi SDM berkualitas dan sarana prasarana pendukung untuk operasional pengujian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

jasa konstruksi harus dilakukan peningkatan untuk mempertahankan akreditasi laboratorium jasa konstruksi.

5.) Sub Urusan Penataan Ruang

a.) Dokumen Rencana Tata Ruang belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang.

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Startegis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sampai tahun 2024, dari total 1 RTRW DIY dan 5 RTRW Kab/Kota, terdapat 3 (tiga) yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 yaitu RTRW Kota Yogyakarta melalui Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021, RTRW Kabupaten Sleman melalui Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2021 dan RTRW DIY dengan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023. Sedangkan RTRW Kabupaten Gunungkidul, RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kabupaten Kulon Progo masih dalam tahap revisi penyesuaian dengan PP 21 Tahun 2021 dan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023.

Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kota Yogyakarta telah menyelesaikan untuk seluruh kecamatan, namun pada 4 kabupaten yang lain belum semua RDTR telah tersusun dan diterbitkan.Dari total22 RDTR yang direncanakan di wilayah DIY, baru terdapat 7 (tujuh) RDTR yang ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Tengah, RDTR Kota Yogkakarta, RDTR Siung Wediombo dan RDTR Pantai Selatan Kulon Progo. Dari RDTR yang telah ditetapkan baru tersedia 5 (lima) RDTR yang telah terintegrasi OSS yaitu RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo, RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta dan RDTR Kota Yogyakarta.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b.) Kesesuaian pemanfaatan ruang belum maksimal

Hasil penilaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun2023 mencapai 84,87% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 11,21% (kawasan lindung 0% dan kawasan budidaya 11,21%) dan yang tidak sesuai sebesar 4,39% (kawasan lindung 2,47%) dan kawasan budidaya 4,43%). Pada tahun 2024 sebesar 82,83%, menurun dari tahun sebelumnya karena merupakan pelaksanaan tahun pertama setelah berlakunya Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY 2023-2043.Terdapat perbedaan pada indikasi program utama dengan Perda DIY No 5 Tahun 2019 sebelumnya, sehingga mengakibatkan banyaknya program yang belum terwujud.

Perwujudan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya pada pola ruang kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan lindung geologi sebesar 8,60% dan kawasan konservasi sebesar 1,65%. Sedangkan pada kawasan budidaya perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan pertanian sebesar 16,63%, kawasan transportasi sebesar 2,72% dan kawasan hutan produksi sebesar 0,97%. Sedangkan perwujudan struktur ruang pada tahun 2024 sebesar 75,88% dan masih terdapat struktur ruang yang belum terwujud sebesar 24,12%. Struktur ruang yang belum terwujud paling rendah yaitu pada perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebesar 57,61% dan perwujudan sistem jaringan tranportasi sebesar 57,61%.

c.) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil Audit Tata Ruang Tahun 2021 terdapat 12 objek prioritas penanganan untuk ditindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2022. Dari 12 objek tersebut 5 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY, 4 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat (Kementerian ATR/BPN) dan 3 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY. Berdasarkan kegiatan tersebut masih terdapat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

182 indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditapis berdasarkan kriteria pola ruang yang terdiri dari Kabupaten Bantul sebanyak 25 indikasi, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 32 indikasi, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 58 indikasi, Kabupaten Sleman sebanyak 64 indikasi dan Kota Yogyakarta sebanyak 3 indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran tersebut akan digunakan sebagai dasar objek melakukan audit tata ruang. Pada tahun 2023 dilaksanakan audit dengan jumlah rekomendasi audit sebanyak 51 objek dan telah dilaksanakan fasilitasi penertiban di tahun 2024 dengan rekomendasi pembinaan sebanyak 7 objek dan pengenaan sanksi administrative sebanyak 16 objek.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dengan hasil sebanyak 25 objek yang perlu untuk ditindaklanjuti DIY. Terhadap hasil identifikasi telah dilakukan proses audit tata ruang dan menghasilkan rekomendasi peringatan tertulis, pembongkaran bangunan, penghentian sementara kegiatan dan penutupan lokasi.

Pemerintah Daerah DIY juga melakukan koordinasi terhadap upaya tindak lanjut penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang ke depannya.

Upaya tindak lanjut ke depan adalah mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dasar aturan yang telah diterbitkan serta mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar ASN Pemda DIY dapat diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan Inspektur Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

d.) Dokumen Rencana Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Belum Lengkap

Dalam Perdais 2 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) dokumen rencana yang diamanahkan untuk disusun yakni Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Induk (RI) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja RRTR tidak perlu disusun, namun dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat karena dasar Perdais tersebut tetap diperbolehkan dengan berganti menjadi Strategi Pengembangan Wilayah (SPW).

Sampai tahun 2022, terhadap RRTR SRS telah ditetapkan SK Gubernur No. 10/Kep/2022 tentang Delineasi SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan telah tersusun 18 dokumen materi teknis RRTR SRS yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Untuk RI SRS, telah dilakukan penyusunan mulai tahun 2019 sampai 2024 sebanyak 14 RI dari total kebutuhan 18 RI. Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan RI diklasterisasi menjadi 9 klaster antara lain tahun 2023 terdapat 4 klaster, tahun 2024 terdapat 2 klaster, tahun 2025 terdapat 2 klaster dan tahun 2026 terdapat 1 klaster. Sedangkan untuk RTBL SRS sampai dengan saat ini sudah tersusun sebanyak 18 RTBL yang tersebar pada 18 SRS dari target kebutuhan penyusunan sebanyak 45 RTBL.

e.) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang pada SRS

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) di DIY. Nilai perwujudan struktur ruang SRS tahun 2024 sebesar 34,34%. Nilai keterwujudan struktur ruang paling tinggi pada SRS Karst Gunungsewu sebesar 66,67% dan nilai perwujudan terendah pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede yaitu sebesar 18,46%. Nilai perwujudan pola ruang SRS untuk kawasan lindung sebesar 86,59% dan kawasan budidaya sebesar 83,14%. Konsentrasi pemanfaatan ruang tertinggi didominasi pada kawasan SRS yang berada di kawasan perkotaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yaitu SRS Kraton, SRS Sumbu Filosofi, SRS Masjid dan Makam Raja Mataran di Kotagede, SRS Kotabaru dan SRS Puro Pakualaman. SRS dengan mayoritas zona kendali ada pada 5 SRS di KPY dan SRS Masjid Pathok Negoro sedangkan SRS dengan mayoritas zona yang didorong ada pada SRS yang berada di Pantai Selatan DIY yaitu SRS Pansela Kulon Progo, SRS Samas Parangtritis, SRS Pansela Gunungkidul serta SRS Perbukitan Menoreh. Tipologi wilayah tiap SRS yang berbeda menghasilkan perbedaan hasil analisis untuk setiap wilayahnya, sesuai keistimewaannya masing-masing. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyusunan arahan / insentif dan disinsentif dalam pelanggaran / pencegahan pelanggaran bangunan dan Sinkronikasi terkait dengan peraturan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Pada tahun 2024 nilai keterwujudan program pada 18 SRS di DIY adalah sebesar 34,34%. dengan total sebanyak 990 arahan indikasi program dalam SPW SRS yang pelaksanaannya diarahkan di tahun 2024.

2.4.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.) Penanganan rumah tidak layak huni di DIY belum dapat dituntaskan.

Penanganan rumah tidak layak huni di DIY dilakukan melalui program yang bersumber dari berbagai pendanaan baik dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, Kemensos, Danais, BAZNAS, dan sumber-sumber pembiayaan lain. Penanganan RTLH pada tahun 2024 sejumlah 7.348 unit dari total target 54.991 unit. Hal ini menjadi salah satu faktor cukup tingginya capaian rumah layak huni di DIY. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di DIY telah mencapai 86,68%. Namun, penanganan belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku. Penanganan rumah tidak layak huni oleh pemda DIY akan diprioritaskan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan miskin ekstrem dan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha atau kewenangan provinsi serta kapanewon miskin di DIY. Selain itu untuk meningkatkan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat maka perlu dilakukan pelayanan penyediaan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

2.) Perubahan penetapan kawasan kumuh di wilayah DIY belum ditindaklanjuti untuk dilakukan penanganan.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, sampai dengan tahun 2019 Pemda DIY telah melakukan penanganan kawasan kumuh 10 -15 ha secara tuntas. Pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan penyesuaian penetapan kawasan kumuh di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerbitan SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/Kota tebaru, dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha.

3.) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.

Harga perumahan yang relatif semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang layak dan aman semakin sulit. *Backlog* kepemilikan perumahan di DIY tahun 2024 adalah 172.027 unit, dengan rincian Kulon Progo 8.061 unit, Bantul 40.051 unit, Gunungkidul 8.061 unit, Sleman 47.621 unit dan kota Yogyakarta 68.233 unit. *Backlog* penghunian perumahan di DIY tahun 2024 adalah 91.821 unit.

Tingginya harga lahan juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas. Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

miskin yang tidak *bankable*, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa (rusunawa atau melalui skema pasar).

4.) Kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan RTRW belum secara keseluruhan terlayani dengan prasarana sarana utilitas umum yang memadai.

Penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) pada tahun 2024 sebanyak 550 lokasi meliputi PSU berupa jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, dan air bersih. Penyediaan PSU yang telah dilakukan belum semua pada kawasan permukiman, sehingga masih banyak kawasan permukiman yang belum memiliki PSU yang memadai.

5.) Pelestarian budaya rumah tradisional jawa belum maksimal.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan bagian dari bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standaryaitu, 7,2 m^2 per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini selalu mengutamakan pada struktur dan konstruksi ketahanan bangunan, menyebabkan rumah lebih banyak dibangun dengan gaya modern. Pada lokasi-lokasi RTLH yang berada di pedesaan, seringkali rumah-rumah tradisional berganti menjadi rumah modern dan hal ini menyebabkan semakin berkurangnya rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional Jawa.

2.4.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.) Masih Tingginya Angka Kriminalitas

Stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan salah satu prasyarat utama dalam kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Banyak aspek yang dapat menjadi tolok ukur dalam tercapainya stabilitas dan kondusivitas wilayah, salah satunya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun faktanya kasus kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja cenderung mengalami peningkatan, sehingga sedikit banyak menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan Masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan data dari POLDA DIY angka kejahatan jalanan di DIY relatif fluktuatif. Namun, secara spesifik kasus kejahatan jalanan di DIY tahun 2023 meningkat secara signifikan hingga mencapai 70 kasus. Berdasarkan data tersebut secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY relatif tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat karena jika tidak dilakukan langkah pencegahan segara akan menjadi potensi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat berujung pada perpecahan. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga Pendidikan serta pariwisata yang menjadi magnet kedatangan dari banyak masyarakat daerah lain bahkan manca negera. Untukperlu dilakukan berbagai langkah dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik.

2.) Penyalahgunaan Narkoba di DIY cenderung meningkat

DIY dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak pelak menjadikan DIY bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di DIY. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di DIY membuat DIY menjadi wadah bagi berbagai kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Salah satu ancaman nyata yang mengancam sebagai dampak negatif dari pesatnya dinamika kehidupan di DIY adalah peredaran gelap narkoba.

Besarnya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda tentu berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait penanganan narkoba serta seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga fokus Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat terlaksana secara optimal.

3.) Degradasi terhadap pemahaman nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan

Ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. Berbagai paham dan ajaran yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan kontril baik berupa deteksi dini maupun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai ke-Pancasilaan yang di dalamnya juga terkandung ajaran kebangsaan dengan pendalaman Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 serta berbagai haluan negara yang harus menjadi pedoman hidup warga negara dalam berkehidupan bernegara, berkebangsaan serta bermasyarakat. Upaya pemelintiran paham bernegara biasanya menumpang pada isu-isu terkini yang menjadi bahasan dalam masyarakat, semisal isu kemiskinan, kenaikan harga atauapun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.) Perlunya Mendorong Partisipasi yang Bermakna

Stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, black campaign dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks pertisipasi pemilu di DIY;Berdasarkan data KPU atas partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004, 2009,2014, 2019, dan 2024 (baik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pilpres, Pileg, dan Pilkada), dapat dilihat bahwa angka partisipasi pemilih di DIY relatif fluktuatif. Dalam rangka memberikan upaya penguatan kapasitas bagi para pemilih, kegiatan pendidikan politik diselenggarakan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipasi guna terpilihnya wakil rakyat yangkompeten dan memiliki kapabilitas yang baik. Penguatan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga mitra juga dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah baik sebelum, saat maupun setelah pesta demokrasi diselenggarakan.

5.) Masih Maraknya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Hingga tahun 2023, atas penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di DIY ditemukan masih terdapat pelanggaran yang diantaranya meliputi jenis pelanggaran terkait anak jalanan,gelandangan dan pengemis, minuman beralkohol, papan reklame, tambang, irigasi, sampah,air tanah, bangunan liar, KIR dan muatan, dan beberapa pelanggaran lainnya. Hal ini menuntut semakin giatnya usaha yang dilakukan untuk meminimalisirnya. Mulai dari yang sifatnya preventif, seperti internalisasi substansi dari Perda/Perkada tersebut, operasi penegakan maupun sampai dengan penanganan pasca pelanggaran.

6.) Perlunya Pemberdayaan Kelompok Jaga Warga dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kelompok Jaga warga diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban di masyarakat melalui penghidupan kembali fungsi pranata sosial sehingga dapat menyelesaikan masalah di tingkat dasar secara kekeluargaan. Pranata sosial yang hidup di masyarakat mengandung nilai luhur kearifan budaya di DIY dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Jaga Warga diberdayakan dalam bentuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kelompok dimaksudkan sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

7.) Perlunya Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Satlinmas *Rescue* Istimewa (SRI)

SRI mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah, melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya perlu sarana prasarana operasional di wilayah kerjanya sesuai dengan jenis tugas dan medan yang dikerjakan. Selain sarana prasarana, kapasitas dari SRI sendiri perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bertugas. Di samping pada keterlaksanaan tugas, koordinasi dan publikasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal perlu diperjelas, mengingat ketugasan SRI seringkali berjalan bersama banyak stakeholder yang berkaitan.

8.) Meningkatnya Intensitas Bencana Kategori Hidrometeorologi dan Belum Optimalnya Potensi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Jenis bencana yang masuk kategori bencana hidrometeorologi antara lain adalah siklon tropis, curah hujan ekstrim, banjir, longsor, angin kencang, gelombang tinggi, kekeringan,serta kebakaran permukiman, hutan dan lahan. Hampir semua wilayah DIY memiliki ancaman bencana jenis hidrometeorologi ini. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas telah diinisiasi sejak awal, bahkan telah menjadi percontohan di tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, seiring meningkatnya ancaman bencana, khususnya jenis bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim, dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi berupa literasi, peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, aksi cepat dan tepat, perlindungan sosial adaptif, maupun pemanfaatan teknologi serta pengetahuan lokal untuk peringatan dini dan pengurangan risiko bencana dengan pelibatan parapihak multiheliks secara partisipatif, inklusif, dan kolaboratif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.2.1.6 Urusan Sosial

1.) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DIY.

Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2023 sebesar (11,04%) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,36%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 14 dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2023 Gini Rasio DIY sebesar 0,449 menurun sebesar 0,010 dibandingkan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 mencapal 25,90 juta Jiwa atau 9,36% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Garis kemiskinan DIY (BPS, Maret 2023) sebesar Rp 573.022 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 414.480 (72,33%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.542 (27,67%). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,32 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.475.455,00/rumah tangga/bulan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang dan turun 15,2 ribu orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6,3 ribu orang.

Berbagai program pada bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan. Integrasi data sasaran penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya DIY dalam meningkatkan kualitas agar seluruh masyarakat miskin di DIY terlayani dan terjangkau program peningkatan kesejahteraan. Selain itu juga didukung dengan program lintas sektor yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

diupayakan terintegrasi satu sama lain. DIY juga memiliki program-program inovasi dengan memanfaatkan integrasi data seperti data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK , DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial, Satu Data REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) dari Bappenas dan data sektoral lainnya.

2.) Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.

Terdapat 8 (delapan) jenis Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilihat berdasarkan jumlah terbesar yaitu : Penyandang disabilitas, Lanjut usia terlantar, Korban Bencana Alam, Perempuan rawan sosial ekonomi, Orang dengan HIV/AIDS, Anak terlantar, Keluarga bermasalah sosial psikologis, dan Anak dengan kedisabilitasan. Dari Delapan jenis PPKS tersebut beberapa diantaranya masuk dalam katagori kelompok rentan.

Tabel 2- 212 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2019 – 2023.

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	55	N/A	72	122	175
2	Anak Balita Terlantar	620	N/A	441	431	255
3	Anak Dengan Kedisabilitasan	2.075	N/A	1.971	2012	2553
4	Anak Jalanan	72	N/A	47	132	66
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	13	N/A	10	165	77
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	10	N/A	29	25	98
7	Anak Terlantar	9.607	N/A	7.902	5200	5128
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	225	N/A	170	157	258
9	Fakir Miskin	322.459	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Gelandangan	197	N/A	123	72	58
11	Korban Bencana Alam	8	N/A	7.687	21.908	16.178
12	Korban Bencana Sosial	117	N/A	80	59	77
13	Keluarga Bermasalah Sosial	4.979	N/A	4.515	4.165	3.815

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Psikologis					
14	Kelompok Minoritas	1021	N/A	124	138	130
15	Korban Penyalahgunaan Napza	439	N/A	323	242	224
16	Korban Trafifcking	1	N/A	1	6	8
17	Korban Tindak Kekerasan	697	N/A	560	470	332
18	Lanjut Usia Terlantar	37.442	N/A	33.129	26.525	25.780
19	Orang dengan HIV/AIDS	4.193	N/A	5.127	5.617	6.393
20	Penyandang Disabilitas	27.129	N/A	26.866	28.137	26.512
21	Pemulung	465	N/A	412	327	300
22	Pengemis	147	N/A	111	64	61
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	327	N/A	278	208	177
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.365	N/A	12.407	11.526	11.819
25	Tuna Susila	259	N/A	361	90	100

Sumber: Dinsos DIY, 2024

Tingginya kasus Lanjut Usia Terlantar jumlahnya pada tahun 2023 sebesar 25.780 orang akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis, kemiskinan absolut dan Lansia di jalanan. Kasus lanjut usia terlantar memang menjadi perhatian serius dalam masyarakat kita. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang lanjut usia yang tidak mendapatkan perawatan atau dukungan yang memadai dari keluarga atau lingkungan sekitarnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus lanjut usia terlantar yaitu dari Perubahan Struktur Keluarga dikarenakan banyak keluarga modern yang mengalami perubahan struktur, seperti orang tua yang tinggal terpisah dengan anak-anak mereka karena faktor pekerjaan atau migrasi. Kondisi Kesehatan pada orang tua yang mengalami masalah kesehatan serius, seperti demensia atau gangguan lainnya, mungkin sulit untuk diurus di rumah sendiri oleh keluarga mereka. Keterbatasan Sosial dan Ekonomi pada Orang tua yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau yang menghadapi masalah ekonomi sering kali berisiko tinggi terlantar.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kurangnya Kesadaran dan Sumber Daya pada Beberapa keluarga mungkin tidak disadari akan pentingnya perawatan yang diperlukan untuk orang tua mereka, atau mereka mungkin tidak memiliki sumber daya baik finansial maupun waktu untuk merawat mereka dengan baik. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi cara kita merawat orang tua. Beberapa masyarakat tradisional memiliki sistem perawatan yang lebih terstruktur untuk orang tua mereka.

Sementara itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran akan isu ini, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, serta memperkuat jaringan dukungan sosial bagi keluarga yang merawat orang tua mereka dapat membantu mengurangi tingkat lanjut usia terlantar. Saat ini Pemerintah Daerah DIY sudah memiliki program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi Lanjut Usia Terlantar yang masuk kedalam DTKS sebanyak 8.000 Penerima Manfaat (PM).

PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) merujuk pada segala potensi dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu dan kelompok. PSKS mencakup berbagai aspek, termasuk program-program kesejahteraan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Berikut Data Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2019-2023.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 213 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 – 2023

No	Jenis PSKS	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pekerja Sosial Profesional	3	N/A	3	3	8	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	36	N/A	36	41	45	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	5130	N/A	5057	3073	3122	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	1068	N/A	1091	662	581	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	381	N/A	316	283	316	Lembaga
5	Karang Taruna	438	N/A	438	438	438	Lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	12	N/A	12	12	7	Lembaga
7	Keluarga Pioner	30	N/A	30	N/A	N/A	Keluarga
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	263	N/A	229	304	310	Lembaga
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	43	N/A	120	120	120	Orang
10	Penyuluh Sosial Fungsional	7	N/A	6	10	7	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	N/A	78	78	78	Orang
12	Dunia Usaha	57	N/A	238	237	238	Lembaga

Sumber: Dinsos DIY, 2024

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 – 2023 menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2019-2023.

Tahun 2022 PSM di DIY berjumlah 3.073 orang yang terdiri dari 1.656 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 1.417 orang berjenis kelamin Perempuan, hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah dilakukanpada PSM di DIY yang tersebar di masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah PSM di DIY meningkat dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berjumlah 3.122 orang. PSM bekerja secara langsung menangani permasalahan sosial yang ada di tingkat desa dan masyarakat.

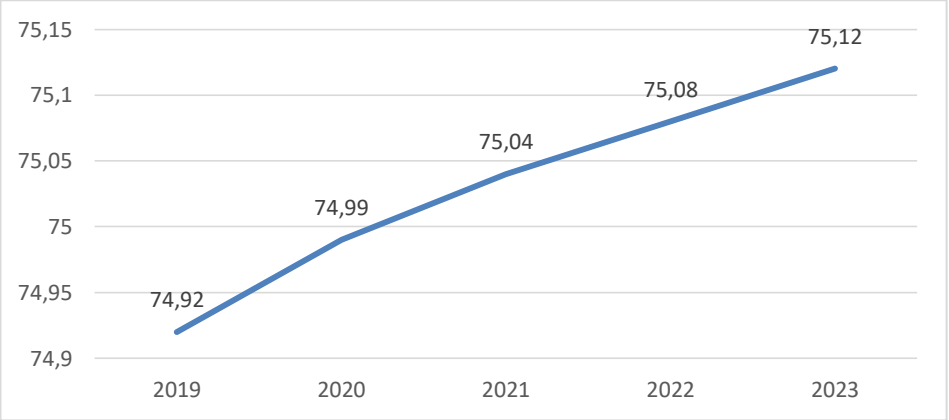
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 – 2023 menunjukkan penurunan data dari tahun 2019 berjumlah 381 lembaga,tahun 2021 berjumlah 316 lembaga hingga di tahun 2022 menjadi 283 lembaga. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar lembaga sosial tersebut dapat bergerak dalam penanganan berbagai masalah sosial baik menangani permasalahan anak terlantar, gelandangan, pengemis, lansia dan permasalahan sosial lainnya.

Penyuluh sosial masyarakat adalah relawan sosial yang bekerja atas inisiatif sendiri atau karena ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan/kelurahan. Pada pelaksanaan dilapangan, Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan data jumlah Pensosmas di DIY terbilang stabil, Pensosmas berkedudukan di kalurahan/kelurahan. Data tahun 2021 hingga tahun 2023 berjumlah 120 orang, dimana keadaan tersebut masih mengalami kekurangan yang seharusnya berjumlah 438 orang, idealnya satu kalurahan/kelurahan memiliki satu Pensosmas.

3.) Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2023 adalah 75,12 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia. Perkembangan UHH di DIY dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang disajikan pada grafik berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2- 129 Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2019-2023

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung semakin meningkat. Walaupun tahun 2020 sedikit menurun karena adanya pandemi Covid-19 tetapi kemudian meningkat kembali di tahun berikutnya hingga mencapai angka 81,09 pada tahun 2023. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik.Level IPM selama periode 2017-2023 selalu berada dalam kategori IPM tinggi (70≤IPM<80). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2023 masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya terjadi lebih awal dibandingan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

UHH yang tinggi membawa konsekuensi kepada pemenuhan layanan lansia terutama layanan dasar seperti kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

lansia untuk mengaktualisasikan dirinya. Berdasarkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan, strategi yang perlu dilakukan yaitu :

- Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu,
- Peningkatan derajat kesehatan dan kualiitas hidup lanjut usia,
- Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan,
- Penhormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

UHH yang tinggi juga diikuti dengan cukup banyaknya jumlah lanjut usia terlantar dimana tahun 2023 mencapai 25.780 orang (Dataku Bappeda DIY, 2024). Sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

Dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui jaminan sosial kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksudkan adalah lanjut usia, perempuan pada rumah tangga miskin dan kaum *difabel*. Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai payung kebijakan dalam memberikan intervensi kepada lansia di DIY baik yang potensial maupun non potensial. Dalam Peraturan Daerah tersebut disampaikan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia meliputi :

- Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan kesempatan kerja;
- Pelayanan keterampilan/pelatihan;
- Pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- Bantuan sosial dan;
- Perlindungan sosial

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga perlu dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a.) Memberikan fasilitas kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

b.) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkokoh budaya semangat dan jiwa K2KS secara sinergis, terarah, terencana dan berkelanjutan.

4.) Peningkatan Perhatian Terhadap *Difabel* Kurang Terpenuhi

Penyandang disabilitas PPKS di DIY pada tahun 2021 adalah 26.866 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 28.137 orang, jumlah tersebut cukup besar, dan dari survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan. Dari permasalahan berikut maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai *Difabel* dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

5.) Wilayah DIY Rentan Terhadap Bencana Alam.

Wilayah DIY terletak di wilayah sungai dan gunung berapi. Oleh karena itu DIY menjadi rentan terhadap bencana alam, baik itu bencana letusan Gunung Merapi, Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut maupun bencana kekeringan. Menurut data PPKS yang sebelumnya disebut PMKS, Korban Bencana Alam pada tahun 2022 tercatat 21.908 jiwa, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

korban bencana sosial sebanyak 59 jiwa. Kerugian material yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kesejahteraan sosial masyarakat baik fisik maupun psikologis.

Dikarekanakan wilayah fisik DIY merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Sehingga, memerlukan strategi khusus untuk meminimalisir kerugian berupa harta,benda, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaaan bencana. Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness* (CBDP) adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, di DIY program tersebut sudah terlaksana dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kebencanaan yang juga merupakan bagian dari SPM Sosial dan selama ini telah didukung dengan menggerakkan Tagana untuk turut menangani kegiatan lapangan saat terjadi bencana.

2.4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

1.) Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada Jenjang SMU, SMK, dan Perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) masih cukup tinggi yakni pada rentang 4,50-5,03%, mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain : adanya *mismatch* keterampilan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri yang berkembang sangat pesat, persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terbatasnya jumlah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi lulusan, serta keterbatasan informasi dan jejaring terkait pasar kerja.

2.) Masih rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat produktivitas adalah jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, maka pendapatan atau upah/ gaji seseorang cenderung semakin tinggi. Berdasarkan data Sakernas Februari 2024, pekerja penuh di DIY (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 64,25%. Sementara itu, pekerja tidak penuh di DIY pada mencapai 35,75% yang terdiri dari pekerja paruh waktu sebesar 30,74% dan pekerja setengah penganggur sebesar 5,01%. Persentase pekerja penuh ini relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni periode Februari 2023 sebesar 67,68% dan bahkan sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, pekerja penuh diDIY mencapai 74,01%, tahun 2018 mencapai 71,46% dan 2019 mencapai 69,37%. Selain itu, terlihat juga kecenderungan penurunan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja penuh.

Indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan. Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Februari 2024 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 26,86% diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 24,08%. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi(Diploma ke atas) sebesar 16,41% yang mencakup (13,64%)berpendidikan Universitas dan (2,77%) berpendidikan Diploma.

3.) Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan world talent ranking (IMD), misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 47 untuk tahun 2023 dengan skor daya saing SDM 51,13 dari 100 poin. IMD menilai daya saing SDM melalui tiga indikator besar, yaitu investasi dan pengembangan SDM dalam negeri (*investment and development*), kemampuan negara menarik SDM terampil dari luar negeri (*appeal*), dan tingkat kesiapan SDM secara umum (*readiness*). Berdasarkan capaian tersebut, Indonesia hanya berada pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

peringkat ke-4 dari 5 negara Asia Tenggara, masih tertinggal apabila dibandingkan dengan Negara Singapura (8), Malaysia (33), dan Thailand (45).

2.4.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

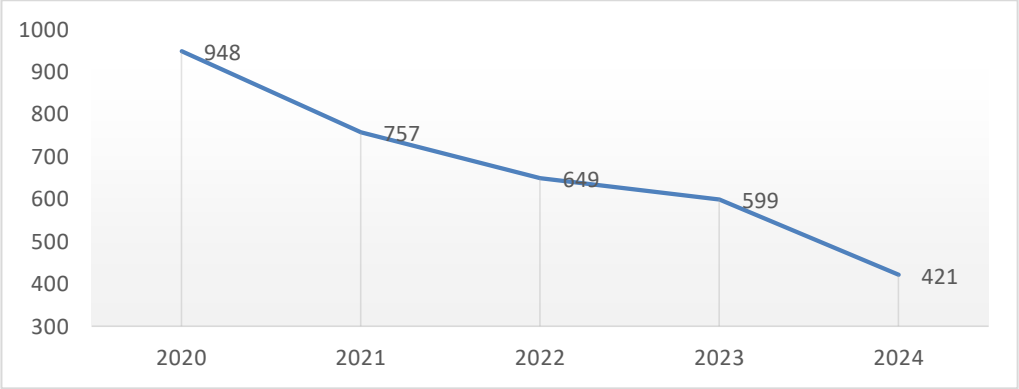
1. Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Penyetaraan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan mengandung visi supaya dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Sebab, jika dipandang dari berbagai aspek: fisik, psikis, dan finansial, anak-anak masih sangat rentan dan penuh dengan risiko.

Namun pada faktanya, praktik perkawinan anak masih terjadi di diy. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa telah terjadi 421 permohonan dispensasi kawin. Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kemunculan permohonan dispensasi nikah ini erat kaitannya dengan pergaulan negatif di kalangan remaja dan kecepatan akses informasi global yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan anak untuk memilah informasi.

Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah dispensasi kawin terbanyak di DIY, yaitu sebanyak 122 permohonan. Disusul dengan Kabupaten Gunungkidul dengan 115 dispensasi kawin, Bantul dengan 94 dispensasi kawin, Kulon Progo dengan 62 dispensasi kawin, dan Kota Yogyakarta dengan 28 dispensasi kawin.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2024

Gambar 2- 130 Data Jumlah Dispensasi Kawin Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2024

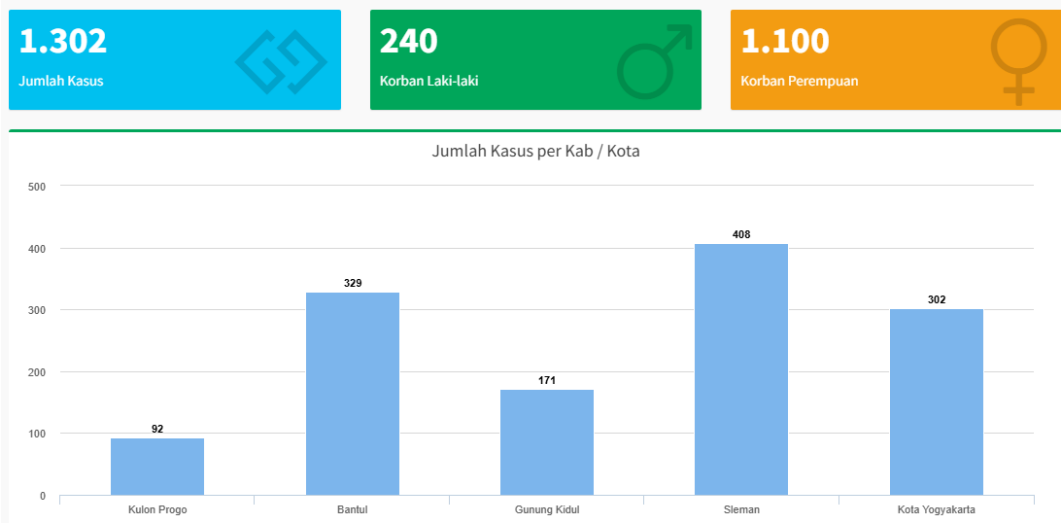
Kecenderungan terjadinya kasus perkawinan anak di DIY disebabkan beragam faktor. Diantaranya yaitu kesadaran untuk memastikan kesiapan anak di keluarga masih rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penting bagi Pemda DIY untuk segera menggalakan berbagai upaya sosialisasi dan bimbingan kepada remaja mengenai pendewasaan usia nikah. Sosialisasi dan bimbingan ini diperlukan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada remaja mengenai kondisi kesehatan reproduksinya dan berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak.

2. Masih adanya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Hingga tahun 2024, DIY telah berhasil memenuhi target penekanan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga berada pada angka 0,54. Capaian ini lebih baik dari target yang tercantum dalam RPJMD DIY 2022-2027 yang menargetkan untuk menekan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga berada pada angka 0,63. Namun, tren selama 10 thun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1.000 korban per tahun. Lebih lanjut, data Simfoni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah korban kekerasan berjenis kelamin perempuan mendekati lima kali lipat jumlah korban laki-laki. Jumlah korban kekerasan berjenis kelamin perempuan mencapai 1.100 orang sedangkan jumlah korban kekerasan berjenis kelamin laki-laki ada pada angka 240 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan adalah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kelompok yang **paling rentan terhadap kasus kekerasan.** Kondisi ini juga menandakan adanya **ketimpangan perlindungan, diskriminasi gender**, atau sistem sosial yang membuat perempuan **lebih mudah menjadi target korban** di DIY.



Sumber: Aplikasi Simfoni, KemenPPPA 2024

Gambar 2- 131 Jumlah Kasus per Kabupaten/Kota tahun 2024

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan bagi seluruh warganya, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan indikator bahwa sistem perlindungan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya sebagai respons setelah kekerasan terjadi. Upaya pencegahan harus ditopang oleh pendidikan publik yang masif, melalui kampanye sosial yang berkelanjutan tentang kesetaraan gender, pola pengasuhan tanpa kekerasan, dan bahaya kekerasan berbasis gender. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kesadaran dan keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan, tanpa takut stigma atau pembalasan. Lebih lanjut, diperlukan penanganan terpadu bagi korban kekerasan dan pemberdayaan pasca kasus. Hal tersebut di antaranya dilakukan dengan sosialisasi pencegahan kekerasan hingga tingkat kelurahan dan kalurahan, optimalisasi layanan konseling perempuan; anak; dan keluarga melalui TESAGA dan PUSPAGA, serta pendekatan berbasis komunitas di mana tokoh masyarakat; tokoh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

agama; dan organisasi lokal dilibatkan secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

3. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan

Upaya mendorong partisipasi perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan secara nasional salah satunya dilakukan dengan menerapkan kebijakan afirmasi melalui mekanisme kuota 30% dalam pengajuan bakal calon dan calon legislatif, anggota KPU, serta pendirian dan kepengurusan partai politik. Upaya ini penting karena partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan memiliki korelasi erat dengan upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan.

Dalam faktanya di DI Yogyakarta, persentase keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal) pada tahun 2024 masih berada pada angka 19%. Angka ini menunjukkan bahwa DIY belum dapat memenuhi regulasi afirmasi kuota 30% perempuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target tersebut, antara lain: keraguan masyarakat kepada calon legislatif (caleg) perempuan dan adanya sindrom queen bee yaitu persaingan tidak sehat antara calon legislatif dan calon anggota Bamuskal perempuan, serta masih adanya maskulinitas dalam internal partai politik.

2.4.2.2.3 Urusan Pangan

1.) Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2023 sudah mencapai 96,3, merupakan yang tertinggi di level nasional. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, yaitu umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta menyebutkan bahwa pengujian terhadap sampel pangan tertarget menunjukkan sebesar 19,12% pangan tidak memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2023. Sebagian besar sampel Tidak Memenuhi Syarat tersebut

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(49%) merupakan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) dengan parameter uji mikrobiologi. Selain itu, data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2023) menyatakan bahwa meskipun hasil pengujian menunjukkan bahwa 100% Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang menjadi sampel aman untuk dikonsumsi, namun masih ada produk PSAT yang belum mempunyai izin edar.

2.) Kurangnya pengelolaan pangan tercecer (*food loss*) dan kelebihan pangan (*food waste*)

Isu food loss di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2022 Tetap (DPKP DIY, 2023) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami food loss cukup besar antara lain: gabah, jagung, bawang merah, telur ayam buras, dan daging sapi masing-masing sebesar 4,92%, 7,16%, 3,24%, 3,86%, dan 5% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2022. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut *food waste*. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. Sementara itu,kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

Sementara itu, *food waste* terjadi pada tingkat ritel dan konsumen akibat perencanaan pembelian dan penyediaan makanan yang kurang bijak dan perilaku menyisakan makanan. Berdasarkan data dari DPKP DIY (2022), kejadian kelebihan pangan didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, nasi merupakan kontributor utama *food waste* di DIY.

3.) Masih terdapat wilayah atau populasi penduduk DIY dalam kondisi rentan pangan

Berdasarkan data *Food Safety and Vulnerability* Atlas (DPKP DIY, 2023), dapat diketahui bahwa terdapat 3 kecamatan (kemantren) yang berada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dalam kondisi rentan. Penyebab status desa waspada pangan maupun kecamatan rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan.

Sementara itu, data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) DIY menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2019-2023. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan kondisi di mana konsumsi makanan harian suatu individu tidak mencukupi kebutuhan energi ideal. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan DIY sejak tahun 2020 selalu berada di atas rata-rata nasional, sehingga masih perlu upaya perbaikan.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan PoU terbesar, yaitu 14,67% pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan PoU terkecil, yaitu 6,64%. Namun bila dikonversi menjadi jumlah penduduk, Kota Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk *undernourished* terbanyak, yaitu sebesar 39.712 jiwa.

4.) Kurang Stabilnya Pasokan dan Harga Bahan Pangan

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, inflasi pangan DIY pada tahun 2023 mencapai 7,58%. Hal ini disebabkan ketersediaan pangan yang terganggu dan terjadinya fluktuasi harga pangan. Beberapa komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian karena andilnya terhadap inflasi yang besar antara lain: beras, cabai merah, dan bawang putih.

2.4.2.2.4 Urusan Pertanahan

1.) Kegiatan Strategis Nasional dan Daerah Memerlukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tepat Waktu

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di DIY sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdiri dari Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Kereta Api Akses Bandar Udara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Baru Yogyakarta-Kulon Progo, *Double Track* Jawa Selatan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul Kulon Progo).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, program prioritas pembangunan DIY tahun terkait dengan pembangunan infrastruktur prioritas yaitu pembangunan Jalan Temon-Borobudur, pembangunan Jalan Prambanan-Gading, pembangunan dan pengembangan TPA Regional Piyungan, Pembangunan SPAM RegionalKamijoro, pembangunan SPAM Regional Kartamantul, pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Bener, dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Jumlah SK penetapan lokasi yang telah terbit pada periode tahun 2015 – 2024 terdapat 28 SK. Untuk pelaksanaan PSN dan program prioritas DIY, masih terdapat beberapa rencana program strategis lain belum mulai proses pengadaan tanahnya.

2.) Belum Dapat Dilakukan Legalisasi Alas Hak pada Status Tanah Tertentu

Masih terdapat tanah dengan status tertentu yang belum dapat dilegalisasi atau diberikan alas hak. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aset dan akses) pada jenis tanah tertentua diantaranya tanah tutupan, tanah enklave, dan tanah hasil tukar menukar.

Tanah tutupan di DIY terdapat di Kabupaten Bantul. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun 2021 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kasultanan, Gubernur DIY, dan Kanwil BPN DIY terkait penyelesaian tanah Tutupan dengan dilakukan redistribusi tanah (penataan kembali) dengan memberikan status hukum kepemilikan kepada para penghuni/pengelola. Progress penanganan tanah tutupan sudah dalam tahap konsolidasi lahan dan telah dilakukan pemasangan patok oleh BPN. Proses konsolidasi tanah dilakukan terhadap 960 bidang tanah milik warga. Dari total 960 bidang tanah baru sebanyak 800 bidang tanah yang telah dilakukan proses sertifikasi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tanah enklave adalah tanah yang asal usulnya dari Kasunanan dan Mangkunegaran bukan tanah Kasultanan. Untuk Tanah enklave sebelumnya sudah dilakukan pensertifikatan hak milik atas nama Kasultanan, namun dalam perjalanan waktu dihentikan pensertifikatannya sehingga sekarang statusnya menjadi terkatung katung (tidak ada kepastian). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian status terkait dengan tanah enklave untuk kemudian dapat diambil kebijakan.

Tanah yang diperoleh dari hasil tukar menukar adalah proses tukar menukar tanah kalurahan dengan masyarakat. Berdasarkan Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa setiap tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik warga harus mendapat ijin dari Kasultanan dan Kadipaten. Kendala yang ada adalah beberapa tukar menukar belum diajukan dikarenakan tidak ada bukti pendukung atau catatan sama sekali di Pemerintah Kalurahan walaupun keduanya sudah saling menguasai dan pemerintah kalurahan tidak berani mengeluarkan keputusan lurah sebagai salah satu syarat.

3.) Tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa belum seluruhnya tersertifikasi

Jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 14.044 bidang dan tanah desa sebanyak 50.279 bidang . Sampai dengan 2024 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 14.100 bidang dan telah diterbitkan sertipikat sebanyak 11.615 bidang. Sedangkan terkait dengan tanah desa terbagi sebagai berikut:

a.) Jumlah bidang Tanah Desa belum bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 3.421. Sampai dengan tahun 2024 jumlah bidang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 3.232bidang dan telah terbit sertifikat sejumlah 1.510 bidang.

b.) Jumlah bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 16.068 bidang. Sampai tahun 2022 telah didaftarkan untuk dilakukan perubahan pencatatan sertipikat menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa di atas Tanah Milik Kasultanan /

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kadipaten sebanyak 7.266 bidang dan pada tahun 2023 bertambah sebanyak 2.016 bidang sehingga total menjadi 9.282 bidang sedangkan yang belum sebanyak 6.369 bidang.

c.) Bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat sebanyak 16.068 bidang masih harus dilakukan penetapan Hak Milik Kasultanan / Kadipaten dan dilanjutkan dengan pendaftaran kembali sertipikat hak pakai Pemerintah Desa di atasnya.

4.) Masih terdapat Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang Belum sesuai Ketentuan/Perencanaan

Pemanfaatan SG dan PAG secara umum sudah sesuai dengan permohonan kekancingan yang diajukan, terhadap pemanfaatan yang belum memiliki kekancingan dilakukan sosialisasi dan dihimbau untuk dapat melakukan permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan Tata Ruang, apabila tidak sesuai dengan Tata Ruang tentunya tidak diproses kekancingannya dan diberikan peringatan apabila melakukan aktivitas pembangunan serta dilakukan pemasangan papan peringatan.

Terkait pemanfaatan tanah desa secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan walaupun masih ada sebagian kecil pelanggaran seperti pengalihan ijin kepada pihak lain dan pemanfaatn tidak sesuai dengan ijin yang diterbitkan. Selain itu masih banyak pemerintah desa yang tidak jujur terkait pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga yang belum berizin. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengawasan berupa teguran sampai dengan pemerintah kalurahan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan melakukan usulan pencabutan izin terhadap Keputusan Gubernur.

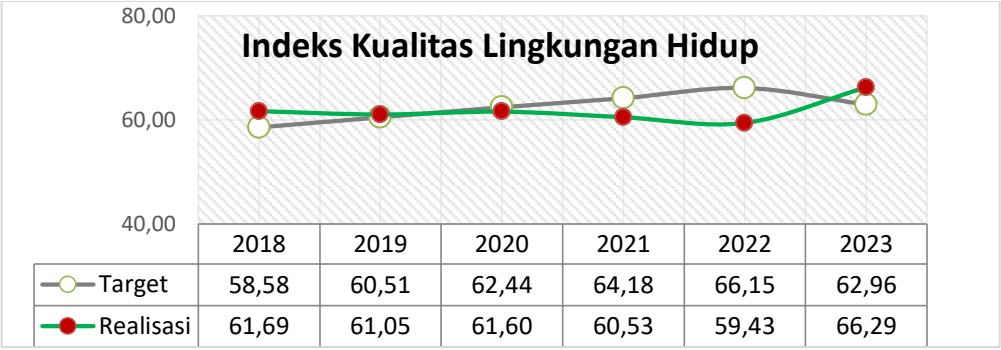
2.4.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1.) Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan dibidang lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup secara umum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

semakin baik. Capaian IKLH DIY tahun 2018-2023, sebagaimana grafik berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	58,58	60,51	62,44	64,18	66,15	62,96
Realisasi	61,69	61,05	61,60	60,53	59,43	66,29

Sumber: DLHK DIY, 2023

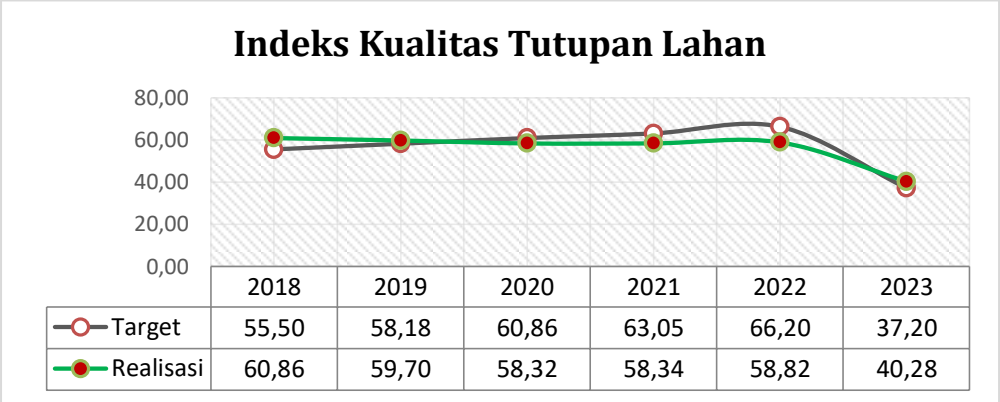
Gambar 2- 132 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY 2018-2023.

Berdasarkan grafik indeks kualitas lingkungan hidup DIY berkisar antara 59,43 sampai dengan 66,29. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 2,26 poin dari semula 61,69 di tahun 2018 menjadi 59,43 di tahun 2022 dan naik menjadi 66,29 di tahun 2023. Grafik tersebut juga menunjukan bahwa meskipun di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi di tahun 2023 realisasinya sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 66,29 atau sebesar 105,29% dari target sebesar 62,96 yang tercantum didalam RPJMD DIY 2022-2027.

Berdasarkan indeks pembentuk IKLH, indeks tutupan lahan menjadi indeks yang mengalami tren selalu menurun dibandingkan dengan IKA dan IKU.Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2023, nilai IKTL DIY memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi 40,28 di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 menjadi capaian yang terendah yaitu sebesar 40,28 akan tetapi capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 37,20. Pada tahun 2023 juga dilakukan perubahan metode perhitungan indeks sehingga terdapat penyesuaian target didalam RPJMD DIY 2022-2027. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL, upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018-2023 sebagaimana grafik berikut ini.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	55,50	58,18	60,86	63,05	66,20	37,20
Realisasi	60,86	59,70	58,32	58,34	58,82	40,28

Sumber: DLHK DIY, 2023

Gambar 2- 133 Data capaian IKTL DIY 2018-2023

2.) Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih kurang.

Berdasarkan kajian jogja hijau terdapat 213 kelurahan/kalurahan yang mengisi kuesioner dari total 392 kelurahan/kalurahan di DIY, sebanyak 179 kelurahan/kalurahan tidak mengisi kuesioner. Dari kajian tersebut didapatkan bahwa dalam pilar pengelolaan lahan terbuka (RTH), pemanenan air hujan (konservasi air), pengelolaan sampah mandiri dan konservasi energi, kelurahan/kalurahan yang sudah mendapatkan nilai baik (≥90) yaitu sebanyak 11 kalurahan/kelurahan yang terdiri dari 3 kalurahan di Kab Sleman (dari total 86 kalurahan), 1 kalurahan di kab Bantul (dari total 75 kalurahan), 4 Kalurahan di Kab Kulon progo (dari total 87 kalurahan), 2 kalurahan di Kab Gunungkidul (dari total 144 kalurahan) dan 1 kelurahan kota Yogyakarta (dari total 45 kelurahan).

3.) Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ketaatan ijin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Selain itu berdasarkan regulasi yang berwenang melakukan pengawasan adalah PPLH. Saat ini di Pemda DIY hanya ada 4 orang PPLH, sehingga memerlukan penambahan SDM PPLH untuk mencapai rasio PPLH yang ideal.

4.) Desentraslisasi pengelolaan sampah belum berjalan optimal

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan september mencapai 20,79% dan penanganan sampah mencapai 47,94% hal ini masih di bawah targetjakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di kab Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Selain itu sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu, serta sampah belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023.

2.4.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.) Belum adanya *database* yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen adminitrasi kependudukan, maka tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. Namun demikian, sampai saat ini di DIY belum ada *database* terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta penduduk rentan lain yang terintegrasi.

Permasalahan lain yang dialami dalam pelayanan kependudukan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, belum semua masyarakat memahami adanya pelayanan online pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil. Kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.) Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan Desember 2023 terdapat 697.070 anak atau 85,14% yang telah memiliki KIA dari total 818.731 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki KIA, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Akta Kelahiran.

2.4.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kalurahan

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan, rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kalurahan sehingga mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ada yang masuk dalam kriteria berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Rinciannya terdapat 136 Desa/Kalurahan dengan status Maju dan 256 Desa/Kalurahan dengan status Mandiri dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Namun demikian menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Belum optimalnya tata Kelola kalurahan dapat juga dilihat dari masih rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, hal ini terlihat masih banyaknya Pemerintah Kalurahan yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa dalam bentuk Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli kalurahan masih di bawah jumlah dana transfer dari lembaga supra-desa.

Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan. Aparatur Pemerintah Kalurahan merupakan ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, namun saat ini kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Data rata-rata pendidikan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY tahun 2023 masih didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 20-60 tahun. Sehingga peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan harus terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan responsivitas aparatur dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Optimalisasi TIK juga masih menjadi permasalahan yang menghambat tata Kelola di Kalurahan, meskipun konektivitas sudah tidak lagi menjadi kendala. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 Kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringan serta perluasan pemanfaatannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di Kalurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.) Perlu Reformasi Kalurahan untuk percepatan pembangunan desa/kalurahan

Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai perubahan model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kemakmuran masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masatah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Reformasi Kalurahan menyangkut reformasi pemerintahan Kalurahan dan reformasi perekonomian Kalurahan. Reformasi Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan dengan memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan kelembagaannya. Reformasi perekonomian Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan meningkatkan nilai lebih aset dan sumberdaya aiam lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.) Masih Tingginya Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan

Ketimpangan perdesaan dan perkotaan di DIY ditandai oleh Gambaranmakro yang nyata dan kontras. Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu, kawasaan perdesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan data-data ekonomi, terutama persentase kemiskinan dan indeks ketimpangan di lima daerah ini.

Secara umum, persentase kemiskinan tertinggi berada di Gunungkidul, Kulon Progo, dan disusul Bantul. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga daerah lainnya. Dari sudut pandang regional, hal ini menunjukkan fenomena ketimpangan yang cukup parah. Bagian ini akan melihat secara lebih mikro kondisi ketimpangan desa-desa di kawasan rural dan urban serta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan baik dari sisi ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan non-ekonomi (dimensi kualitas hidup).

Secara umum, tingkat kemiskinan DIY pada periode Maret 2017 – Maret 2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tetapi, Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022, tren tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 dan Maret 2024 kemiskinan kembali mengalami penurunan.

Periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 488,53 ribu orang. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 47,64 ribu orang. Namun, terjadinya wabah Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin kembali meningkat. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Periode Maret 2024 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 445,55ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 2,9ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,83 persen turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022.

Jumlah penduduk miskin di DIY yang mengalami keniakan yaitu di wilayah perkotaan naik sebanyak 6,6 ribu orang dibandingkan Maret 2023 dengan jumlah total sebanyak 319,40 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 126,15 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 12,49 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 12 hingga 13 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

10,29 persen. Pada periode September 2022 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 1,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 16,4 ribu orang.

Pada kurun waktu 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 18,1 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,35 poin persen. Sementara itu persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 1,51 persen poin. Dalam 18 bulan terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 0,66 poin persen.Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp602.437,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp437.891,00 (72,69 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp164.546,00 (27,31 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.710.967,00/rumah tangga/bulan.

Namun permasalahan kemiskinan bukan hanya pada berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.Pada kurun waktu 18 bulan terakhir nilai indeks P1 DIY mengalami kenaikan. Pada September 2022, indeks P1 tercatat sebesar 1,526. Kemudian, pada Maret 2023, indeks P1 mengalami kenaikan menjadi 1,717. Pada Maret 2024, indeks P1 naik kembali menjadi sebesar 1,867. Kenaikan indeks P1 selama 18 bulan terakhir ini memberikan Gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perdesaan dan perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.Sejalan dengan indeks P1 yang mengalami peningkatan, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat pada rentang waktu yang sama. Pada September 2022 indeks P2 tercatat sebesar 0,282. Pada Maret 2023, indeks P2 mengalami kenaikan menjadi 0,382. Selanjutnya pada Maret 2024, nilai indeks P2 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,450. Kenaikan indeks P2 selama 18 bulan terakhir memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Pada daerah perkotaan DIY. Nilai indeks P2 perkotaan selama 18 bulan terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada September 2022 indeks P2 perkotaan sebesar 0,249. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami peningkatan menjadi 0,373. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,421.Secara umum, peningkatan P2 ini menunjukkan bahwa Tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah.

Di perdesaan DIY, indeks P2 menunjukkan juga kecenderungan yang meningkat. Pada September 2022, indeks P2 perdesaan sebesar 0,382. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 naik menjadi 0,411. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,450. Secara umum, peningkatan P2 di perdesaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin bertambah.

4.) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.

Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.Ketiga kabupaten tersebut, memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk hampir 60% total penduduk DIY. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY belum optimal apabila dibandingkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dengan total PDRB DIY, di bawah 50 persen dari total PDRB DIY. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY belum dapat mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga potensi ekonomi wilayah pesisir selatan DIY masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan DIY jika dibandingkan dengan wilayah utara DIY.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2023 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Dukungan berbagai elemen pembangunan diharapkan semakin memantapkan desa/kalurahan dalam mencapai kemandirian.

Tabel 2- 214 Status IDM Tahun 2023 Menurut Kalurahan di DIY

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2023
1	Kulon Progo	Temon	Jangkaran	Mandiri
2	Kulon Progo	Temon	Sindutan	Maju
3	Kulon Progo	Temon	Palihan	Maju
4	Kulon Progo	Temon	Glagah	Maju
5	Kulon Progo	Wates	Karangwuni	Mandiri
6	Kulon Progo	Panjatan	Garongan	Mandiri
7	Kulon Progo	Panjatan	Pleret	Mandiri
8	Kulon Progo	Panjatan	Bugel	Mandiri
9	Kulon Progo	Galur	Banaran	Mandiri
10	Kulon Progo	Galur	Karangsewu	Mandiri
11	Bantul	Srandakan	Poncosari	Mandiri
12	Bantul	Sanden	Gadingsari	Mandiri
13	Bantul	Sanden	Srigading	Mandiri
14	Bantul	Kretek	Parangtritis	Mandiri
15	Bantul	Kretek	Tirtohargo	Mandiri

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2023
16	Gunungkidul	Panggang	Girikarto	Maju
17	Gunungkidul	Panggang	Giriwungu	Maju
18	Gunungkidul	Tepus	Sidoharjo	Mandiri
19	Gunungkidul	Tepus	Tepus	Mandiri
20	Gunungkidul	Tepus	Purwodadi	Mandiri
21	Gunungkidul	Saptosari	Krambilsawit	Maju
22	Gunungkidul	Saptosari	Kanigoro	Maju
23	Gunungkidul	Girisubo	Balong	Maju
24	Gunungkidul	Girisubo	Jepitu	Maju
25	Gunungkidul	Girisubo	Tileng	Mandiri
26	Gunungkidul	Girisubo	Pucung	Mandiri
27	Gunungkidul	Girisubo	Songbanyu	Mandiri
28	Gunungkidul	Tanjungsari	Kemadang	Mandiri
29	Gunungkidul	Tanjungsari	Ngestirejo	Mandiri
30	Gunungkidul	Purwosari	Giripurwo	Mandiri
31	Gunungkidul	Purwosari	Giricahyo	Maju

Sumber: Kementrian Desa,PDT Dan Transmigrasi, 2023

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing.

Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel di Kabupaten Kabupaten Gunungkidul dan hingga tembus perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, akan sangat strategis untuk mewujudkan program Pemerintah DIY yaitu Misi dan Visi Gubernur DIY Sri

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sultan Hamengku Buwono X, bahwa Pantai Selatan menjadi Halaman Depan DIY dan Konsep Among Tani, Dagang Layar (ATDL).

Upaya lain dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir antara lain :

a.) Pemberian bantuan dan jaminan sosial.
b.) Penyediaan akses sarana prasarana dasar.
c.) Pemberdayaan kelompok nelayan.
d.) Akses transportasi menuju tempat wisata dan penumbuhan, pengembangan wisata yang bersertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*).

5.) Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Digital Economy* Masih Kurang Berkembang.

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki *digital economy* diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemi COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapatbertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital. Masyarakat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sasarannya meliputi: rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

6.) Masih Belum Optimalnya BUMKal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Stagnan.

Sejak tahun 2017 perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMKal) di DIY cukup pesat, setiap tahun terjadi pembentukan baru dan peningkatan strata kategori. Namun perlu senantiasa diupayakan peningkatan kapasitas bagi pengelola maupun aparat Desa/Kalurahan agar mampu berperan dan memberdayakan lembaga ekonomi desa ini agar berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2- 215 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY
2017	183
2018	279
2019	306
2020	343
2021	349
2022	392
2023	392

Sumber: Dataku, 2023

Terdapat 4 kategori berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap aspek kelembagaan, manajemen, Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kerja sama atau kemitraan, asset dan permodalan, administrasi pelaporan dan akuntabilitas, dan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. Data Bumkal berdasarkan kategorinya sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 216 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Desa	Kategori BUMKal				Jumlah BUMkal sudah upload	BUMKal Belum Upload	Jumlah Desa belum terbentuk BUMkal
		Perintis	Pemula	Berkembang	Maju			
Bantul	75	10	4	27	12	53	22	0
Gunungkidul	144	0	11	34	5	50	94	0
Sleman	86	44	5	15	8	72	0	14
Kulon Progo	87	3	4	38	42	87	0	0
Total	392	57	24	114	67	262	116	14

Sumber : Biro Bermas, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes telah memberikan peta jalan kepada pemerintah desa dan supra desa serta pengelola BUMDes untuk lebih berkembang dan profesional dalam mengelola usahanya. Dengan adanya peraturan ini keberadaan BUMKal merupakan entitas badan hukum yang bisa memperluas usahanya baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ke tiga. Masih banyak permasalahan pada BUMKal itu sendiri, baik SDM, tata kelola dengan pemerintah desa sebagai pemilik modal, manajemen maupun pemasarannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi pengelola dan pemilik (dalam hal ini Pemerintah Kalurahan) BUMKal. Pelatihan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi (status) dan jenis usaha BUMKal tersebut. Jika statusnya dasar tentunya akan berbeda materi pelatihan dengan BUMKal yang sudah tumbuh, berkembang atau mandiri. Dan yang kalah penting juga adalah perlunya reorganisasi dan digitalisasi pengelolaan BUMKal.

7.) Perlunya Optimalisasi Peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.

Dalam pembangunan kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah kalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu Lurah sebagai kepala tertinggi dalam Pemerintahan Kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakat Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen Pemerintahan Desa dan manajemen pembangunan desa, peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisapasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan Kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD/K, dan masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD/K. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kualitas LPMD/K. Dari berbagai permasalahan sektor pemberdayaan masyarakat yang ada maka dibutuhkan strategi untuk penanggulannya.

Peran LPMD/K yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui muskal dan musrenbangkal serta mengawal usulan perencanaan pembangunan kalurahan agar sesuai dengan usulan masyarakat dan perundang undangan. Saat ini sumber pendapatan / keuangan kalurahan yang berasal dari perolehan pajak dan restribusi daerah, dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi terlampau cukup baik. Oleh karena itu, keberadaan LPMD/K sangatlah penting untuk bisa mengontrol proses pembangunan desa.

LPMD/K harus bisa memerankan semua elemen di kalurahan terutama para pemuda dan perempuan. Peran pemuda sebagai kader pembangunan kalurahan harus terus digalakkan agar proses regenerasi peran pembangunan bisa berlanjut. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan juga harus di optimalkan, mengingat selama ini gerak peran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perempuan lebih banyak di sektor dasar kebutuhan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain lain. Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD/K harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran LPMD/K dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan.

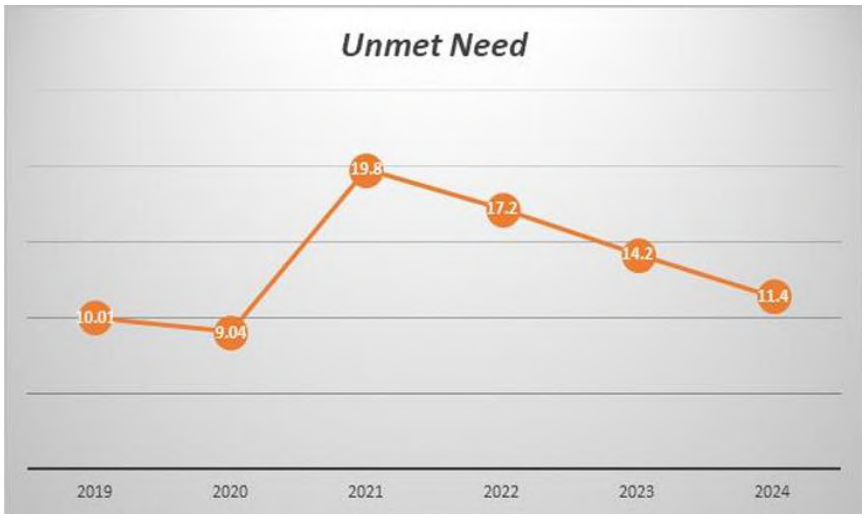
2.4.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1.) Tingginya *unmet need* kebutuhan ber-KB

Unmet need Keluarga Berencana (KB) adalah suatu kondisi ketika perempuan usia subur (PUS) membutuhkan program KB, namun tidak dapat melaksanakan KB karena beberapa alasan. Angka *Unmet Need* memberikan gambaran seberapa baik sistem kesehatan dan kondisi sosial suatu daerah mendukung kemampuan perempuan untuk mewujudkan pilihan mereka untuk menunda atau membatasi kelahiran. Unmet Need ini merupakan ukuran yang bersifat inverse, dimana semakin rendah angka Unmet Need maka semakin baik kondisinya.

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2024, persentase *unmet need* di DIY sebesar 11,4%. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi daripada capaian unmet need nasional (11,1%). Pada tahun 2024 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan kembali berupaya menekan angka *Unmet Need* mengingat secara nasional masih banyak akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB selama pandemi Covid-19 belum terlayani hingga akhir 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: LKIP Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Yogyakarta 2024

Gambar 2- 134 Angka Kebutuhan *Unmeet Need* di DIY Tahun 2019-2024

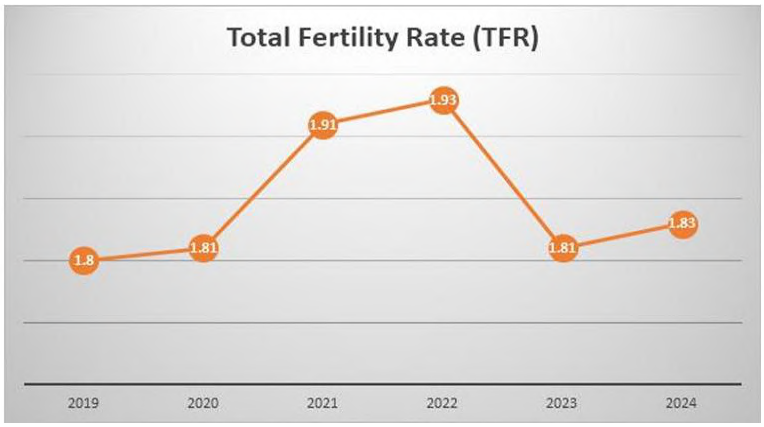
Unmet need menjadi tantangan bagi program keluarga berencana (KB) karena ketika kondisi ini terjadi, perempuan usia subur kemudian cenderung menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang sifatnya alami dan harus dilakukan berulang kali. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan *unmet need* KB harus mempertimbangkan karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan Pasangan Usia Subur yang menginginkan untuk ber KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok *unmet need* KB akan semakin berkurang.

2.) Capaian *Total Fertility Rate* (TFR) yang terlalu rendah

Total Fertility Rate (TFR) di DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (2,04). Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024, capaian TFR DIY adalah sebesar 1,83. Di satu sisi, DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional sebesar 2,11. Namun, di sisi lain TFR yang rendah ini akan juga berpotensi menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana DIY dapat menjaga TFR ini pada kisaran ideal tanpa membiarkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

angka TFR ini turun terlalu rendah. Membiarkan kondisi TFR sangat rendah berpotensi membuat DIY mencapai *point of no return*, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan kekurangan generasi muda dan usia produktif.



Sumber: LKIP Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Yogyakarta 2024

Gambar 2- 135 Capaian *Total Fertility Rate* DIY Tahun 2019-2024

3.) Meningkatnya Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun yaitu angkatan kerja. *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 berdasar data BPS di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2- 217 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020

Uraian	*Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk		
	2010	2015	2020
DIY	45,8	44,9	45,6

Sumber : BPS (2020)

Sementara menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk di usia lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga luar DIY yang berusia lanjut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 (Data Agustus 2020: 71,12%) serta Migrasi masuk DIY banyak diwarnai penduduk usia lansia sementara migrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keluar DIYbanyak dari penduduk usia produktif. Apabila dielaborasikan dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio Dependensi yang tinggi akan juga disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai. Di sisi kebijakan, juga telah disusun regulasi mengenai kelompok rentan seperti Disabilitas, Kelanjutusiaan, Pemenuhan Hak Anak, Kesetaraan Gender dan lain-lain, yang menjadi modal untuk menindaklanjuti Dependency Ratio dan masalah terkait kelompok rentan di DIY.

Tabel 2- 218 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2025-2035

Uraian	*Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk		
	2025	2030	2035
DIY	46,8	47,7	48,4

Sumber : BPS (2020)

Untuk mengatasi masalah *Dependency Ratio* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: mengupayakan kualitas kesehatan lansia sehingga tidak ada beban tambahan, memberdayakan lansia produktif melalui usaha ekonomi produktif, dan meningkatkan lowongan pekerjaan di DIY sehingga meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pemaksimalan potensi yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu Angka harapan hidup DIY tinggi (2021: 75,04) dan adanya Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan lansia di DIY, serta kondisi mayoritas lansia DIY tinggal di rumah bersama keluarga sehingga tidak dalam kondisi terlantar(2021 : 94.42%). Berbagai kondisi tersebut diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tingginya jumlah penduduk usia non-produktif, khususnya usia diatas 65 tahun.

2.4.2.2.9 Urusan Perhubungan

1) Tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Propinsi dikategorikan mendekati arus tidak stabil pada jam-jam puncak.

Tingkat kepadatan lalu lintas secara kuantitatif dievaluasi melalui parameter derajat kejenuhan (DS), yang didefinisikan sebagai rasio antara volume kendaraan dan kapasitas ruas jalan (*V/C ratio*). Derajat kejenuhan berfungsi sebagai indikator

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kinerja operasional jalan, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan prioritas intervensi penanganan lalu lintas. Berdasarkan data *V/C ratio* yang diperoleh dari Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi tahun 2024, ditemukan bahwa wilayah dengan karakteristik urban, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menunjukkan nilai DS tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rincian distribusi DS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bantul

Berdasarkan data hasil perhitungan analisis ruas jalan di wilayah Kabupaten Bantul dapat disimpulkan rata – rata jam puncak pagi sekitar pukul 07.00-08.00 dimana pada jam puncak ini banyak kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja. Jam puncak siang rata-rata pada pukul 11.00-12.00 yang merupakan jam istirahat dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.00-17.00 dimana pada jam ini orang mulai kembali dari aktivitas di luar untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga pada jam puncak sore banyak sekali jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan.

Tabel 2- 219 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bantul

No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
1	1	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis) depan ISI	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.15 - 17.15	0,82	0,46	0,73	28	0,82	5
2	1	Yogyakarta - Bakulan (depan Ima Swalayan)	08.00 - 09.00	11.30 - 12.30	15.00 - 16.00	0,76	0,63	0,70	30	0,76	8
3	2	Yogyakarta - Barongan (Brimob Imogiri)	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	15.45 - 16.45	0,63	0,42	0,67	37	0,67	12
4	2	Yogyakarta - Barongan (Pasar Jejeran)	07.15 - 08.15	11.15 - 12.15	16.00 - 17.00	0,51	0,30	0,42	41	0,51	17
5	3	Barongan - Bibal	06.15 - 07.15	11.00 - 12.00	15.00 - 16.00	0,77	0,39	0,72	22	0,77	6
6	4	Sedayu - Pandak	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	15.45 - 16.45	0,42	0,29	0,36	47	0,42	20
7	5	Palbapang - Srandakan (depan RS UII)	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,73	0,43	0,76	34	0,76	9
8	5	Palbapang - Srandakan (depan PT WEE Jaya Kusuma)	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,72	0,41	0,74	36	0,74	10
9	5	Palbapang - Srandakan (depan Pasar Mangiran)	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,79	0,45	0,82	31	0,82	4

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

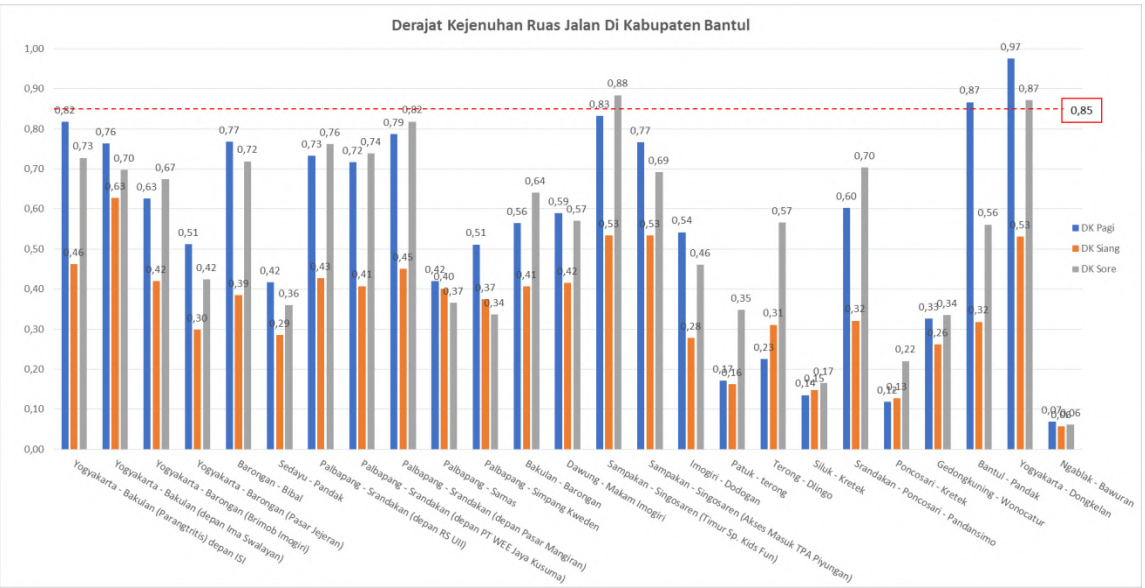
No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
10	6	Palbapang - Samas	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,42	0,40	0,37	47	0,42	19
11	7	Palbapang - Simpang Kweden	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.45 - 17.45	0,51	0,37	0,34	41	0,51	18
12	8	Bakulan - Barongan	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	16.00 - 17.00	0,56	0,41	0,64	40	0,64	13
13	9	Dawung - Makam Imogiri	07.30 - 08.30	12.00 - 13.00	16.00 - 17.00	0,59	0,42	0,57	30	0,59	14
14	10	Sampakan - Singosaren (Timur Sp. Kids Fun)	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	16.00 - 17.00	0,83	0,53	0,88	20	0,88	2
15	10	Sampakan - Singosaren (Akses Masuk TPA Piyungan)	07.30 - 08.30	11.00 - 12.00	15.00 - 16.00	0,77	0,53	0,69	20	0,77	7
16	11	Imogiri - Dodogan	07.00 - 08.00	11.00 - 12.00	16.00 - 17.00	0,54	0,28	0,46	42	0,54	16
17	12	Patuk - terong	06.30 - 07.30	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,17	0,16	0,35	55	0,35	21
18	13	Terong - Dlingo	07.15 - 08.15	12.00 - 13.00	16.15 - 17.15	0,23	0,31	0,57	46	0,57	15
19	14	Siluk - Kretek	06.30 - 07.30	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,14	0,15	0,17	49	0,17	24
20	15	Srandakan - Poncosari - Pandansimo	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,60	0,32	0,70	30	0,70	11
21	16	Poncosari - Kretek	06.30 - 07.30	11.00 - 12.00	16.30 - 17.30	0,12	0,13	0,22	48	0,22	23
22	21	Gedongkuning - Wonocatur	07.45 - 08.45	12.00 - 13.00	15.30 - 16.30	0,33	0,26	0,34	54	0,34	22
23	98	Bantul - Pandak	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,87	0,32	0,56	31	0,87	3
24	99	Yogyakarta - Dongkelan	07.00 - 08.00	11.00 - 12.00	16.45 - 17.45	0,97	0,53	0,87	26	0,97	1
25	100	Ngablak - Bawuran	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.00 - 17.00	0,07	0,06	0,06	50	0,07	25

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Pada tabel di atas dilakukan perhitungan hasil analisis yang selanjutnya dilakukan perangkingan berdasarkan kinerja yang terburuk atau memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi hingga terendah. Perangkingan berdasarkan hasil analisis 106 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat kita lihat untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta – Dongkelan dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 2436 smp/jam, jam puncak siang 1371 smp/jam, jam puncak sore 2179 smp/jam, kecepatan arus bebas 41 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2597 smp/jam, siang hari 2597 smp/jam, sore hari 2597 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

0,97 pagi hari, 0,53 pada siang hari, dan 0,87 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,97 dan berada pada peringkat 2 dari total ruas yang dikaji.



Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Gambar 2- 136 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Bantul

Dari grafik derajat kejenuhan di atas, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan mengalami kondisi puncak pada periode pagi maupun sore hari. Periode pagi dengan waktu survei 06.00 – 09.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang mulai melakukan perjalanan untuk bekerja, sekolah, dll. Sedangkan pada periode sore dengan waktu survey 15.00 – 18.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang melakukan perjalanan pulang setelah beraktivitas.

Berdasarkan grafik diatas, nilai derajat kejenuhan pada kondisi kritis atau lebih dari 0,85 terjadi pada tiga ruas jalan di Kabupaten Bantul. Ruas jalan di Kabupaten Bantul dengan nilai Derajat Kejenuhan di atas 0,85 terjadi pada ruas jalan Sampakan - Singosaren periode sore, Bantul – Pandak periode pagi, dan Yogyakarta – Dongkelan periode pagi dan sore.

b. Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data hasil perhitungan analisis ruas jalan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan rata – rata jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dimana pada jam puncak ini banyak kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja. Jam puncak siang rata-rata pada pukul 11.00-12.00 yang merupakan jam istirahat dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.30-17.30 dimana pada jam ini orang mulai kembali dari aktivitas di luar untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga pada jam puncak sore banyak sekali jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan.

Tabel 2- 220 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Kulon Progo

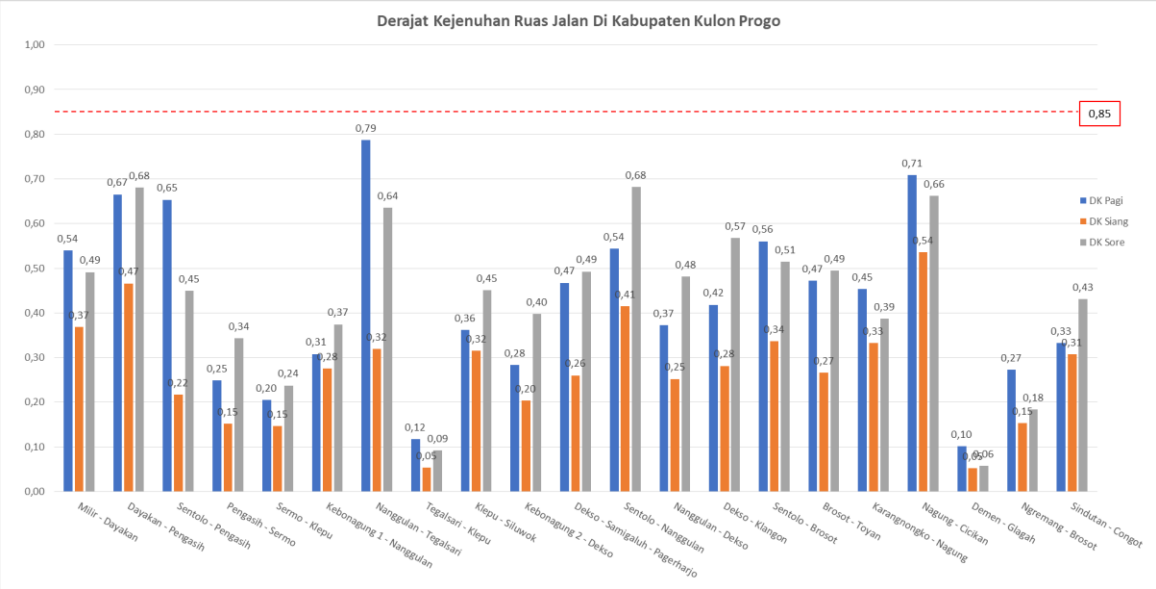
No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
26	022	Milir - Dayakan	07.00 - 08.00	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,54	0,37	0,49	48	0,54	8
27	023	Dayakan - Pengasih	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,67	0,47	0,68	35	0,68	4
28	024	Sentolo - Pengasih	06.30 - 07.30	11.45 - 12.45	15.30 - 16.30	0,65	0,22	0,45	48	0,65	5
29	025	Pengasih - Sermo	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	16.00 - 17.00	0,25	0,15	0,34	54	0,34	17
30	026	Sermo - Klepu	06.30 - 07.30	11.30 - 12.30	16.30 - 17.30	0,20	0,15	0,24	47	0,24	19
31	027	Kebonagung 1 - Nanggulan	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	16.30 - 17.30	0,31	0,28	0,37	52	0,37	16
32	028	Nanggulan - Tegalsari	06.15 - 07.15	11.00 - 12.00	16.30 - 17.30	0,79	0,32	0,64	37	0,79	1
33	029	Tegalsari - Klepu	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	17.00 - 18.00	0,12	0,05	0,09	47	0,12	20
34	030	Klepu - Siluwok	06.00 - 07.00	12.00 - 13.00	16.15 - 17.15	0,36	0,32	0,45	38	0,45	13
35	031	Kebonagung 2 - Dekso	06.30 - 07.30	11.30 - 12.30	16.30 - 17.30	0,28	0,20	0,40	53	0,40	15
36	032	Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,47	0,26	0,49	48	0,49	10
37	033	Sentolo - Nanggulan	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	16.15 - 17.15	0,54	0,41	0,68	46	0,68	3
38	034	Nanggulan - Dekso	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.15 - 17.15	0,37	0,25	0,48	50	0,48	11
39	035	Dekso - Klangon	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	16.30 - 17.30	0,42	0,28	0,57	50	0,57	6
40	036	Sentolo - Brosot	06.30 - 07.30	11.45 - 12.45	16.15 - 17.15	0,56	0,34	0,51	38	0,56	7
41	037	Brosot - Toyan	06.15 - 07.15	11.45 - 12.45	15.30 - 16.30	0,47	0,27	0,49	48	0,49	9
42	038	Karangnongko - Nagung	07.15 - 08.15	11.45 - 12.45	16.30 - 17.30	0,45	0,33	0,39	42	0,45	12
43	039	Nagung - Cicikan	07.15 - 08.15	11.45 - 12.45	16.30 - 17.30	0,71	0,54	0,66	34	0,71	2
44	040	Demen - Glagah	07.15 - 08.15	11.45 - 12.45	16.45 - 17.45	0,10	0,05	0,06	57	0,10	21
45	043	Ngremang - Brosot	07.15 - 08.15	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,27	0,15	0,18	52	0,27	18
46	044	Sindutan - Congot	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.45 - 17.45	0,33	0,31	0,43	48	0,43	14

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Pada tabel di atas dilakukan perhitungan hasil analisis yang selanjutnya dilakukan perangkingan berdasarkan kinerja yang terburuk atau memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi hingga terendah. Perangkingan berdasarkan hasil analisis 106 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapah kita lihat untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Nanggulan - Tegalsari dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1839 smp/jam, jam puncak siang 794 smp/jam, jam puncak sore 1436 smp/jam, kecepatan arus bebas 49 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2336 smp/jam, siang hari 2490 smp/jam, sore hari 2259 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(DS) 0,79 pagi hari, 0,32 pada siang hari, dan 0,64 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,79 dan berada pada peringkat 16 dari total ruas yang dikaji.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2- 137 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Kulon Progo

Dari grafik derajat kejenuhan di atas, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan mengalami kondisi puncak pada periode pagi maupun sore hari. Periode pagi dengan waktu survei 06.00 – 09.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang mulai melakukan perjalanan untuk bekerja, sekolah, dll. Sedangkan pada periode sore dengan waktu *survey* 15.00 – 18.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang melakukan perjalanan pulang setelah beraktivitas. Dapat dilihat pada grafik di atas, nilai derajat kejenuhan Ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih di bawah 0,85 yang berarti semua ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih memiliki kinerja baik.

c. Kabupaten Sleman

Berdasarkan data hasil perhitungan analisis ruas jalan di wilayah Kabupaten Slema dapat disimpulkan rata – rata jam puncak pagi sekitar pukul 06.45 - 07.45 dimana pada jam puncak ini banyak kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja. Jam puncak siang rata-rata pada pukul 11.00 - 12.00 yang merupakan jam istirahat dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.30 - 17.30 dimana pada jam ini orang mulai kembali dari aktivitas di luar untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga pada jam puncak sore banyak sekali jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan.

Tabel 2- 221 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Sleman

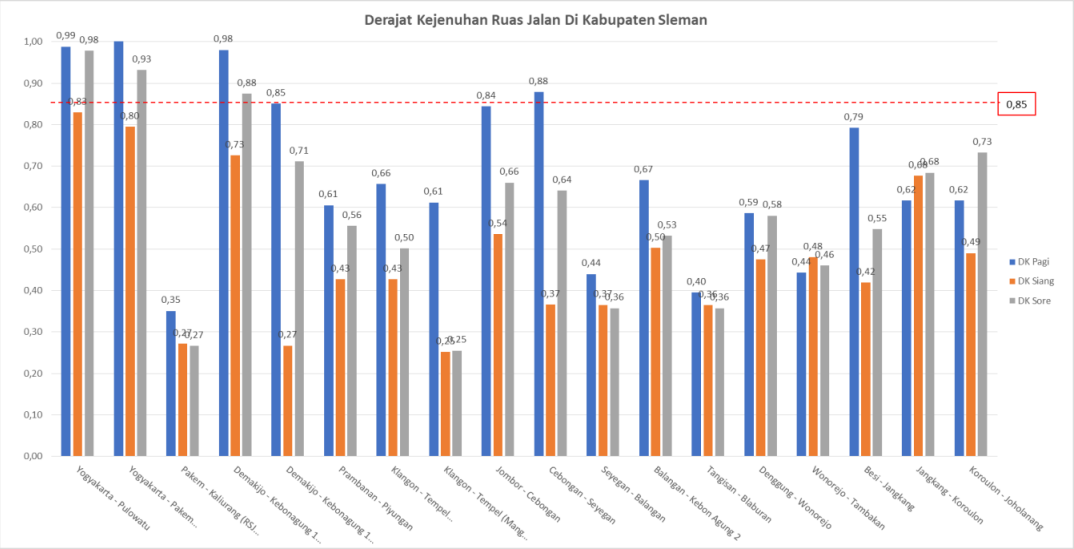
No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
82	083	Yogyakarta - Pulowatu	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,99	0,83	0,98	16	0,99	2
83	084	Yogyakarta - Pakem (Gardu PLN)	06.30 - 07.30	11.00 - 12.00	15.00 - 16.00	1,05	0,80	0,93	16	1,05	1
84	084	Pakem - Kaliurang (RSJ Grasia)	06.15 - 07.15	11.15 - 12.15	15.30 - 16.30	0,35	0,27	0,27	51	0,35	18
85	085	Demakijo - Kebonagung 1 (Ruko Bantulan)	07.00 - 08.00	11.00 - 12.00	16.00 - 17.00	0,98	0,73	0,88	16	0,98	3
86	085	Demakijo - Kebonagung 1 (Sentra Genteng)	06.00 - 07.00	11.00 - 12.00	16.30 - 17.30	0,85	0,27	0,71	30	0,85	5
87	086	Prambanan - Piyungan	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	17.00 - 18.00	0,61	0,43	0,56	40	0,61	13
88	087	Klangon - Tempel (Kecamatan Moyudan)	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	16.45 - 17.45	0,66	0,43	0,50	36	0,66	11
89	087	Klangon - Tempel (Mang Engking)	07.30 - 08.30	11.45 - 12.45	16.15 - 17.15	0,61	0,25	0,25	32	0,61	12
90	088	Jombor - Cebongan	06.00 - 07.00	11.00 - 12.00	17.00 - 18.00	0,84	0,54	0,66	18	0,84	6
91	089	Cebongan - Seyegan	07.30 - 08.30	11.00 - 12.00	16.30 - 17.30	0,88	0,37	0,64	18	0,88	4
92	090	Seyegan - Balangan	08.00 - 09.00	11.00 - 12.00	15.00 - 16.00	0,44	0,37	0,36	42	0,44	16
93	091	Balangan - Kebon Agung 2	07.45 - 08.45	11.30 - 12.30	16.30 - 17.30	0,67	0,50	0,53	36	0,67	10
94	092	Tangisan - Blaburan	06.30 - 07.30	11.15 - 12.15	15.15 - 16.15	0,40	0,36	0,36	38	0,40	17
95	093	Denggung - Wonorejo	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,59	0,47	0,58	29	0,59	14
96	094	Wonorejo - Tambakan	07.30 - 08.30	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,44	0,48	0,46	32	0,48	15
97	095	Besi - Jangkang	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	17.00 - 18.00	0,79	0,42	0,55	30	0,79	7
98	096	Jangkang - Koroulon	08.00 - 09.00	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,62	0,68	0,68	35	0,68	9
99	097	Koroulon - Joholanang	06.15 - 07.15	11.15 - 12.15	15.30 - 16.30	0,62	0,49	0,73	42	0,73	8

Sumber : Hasil Analisis, 2024

ada tabel di atas dilakukan perhitungan hasil analisis yang selanjutnya dilakukan perangkingan berdasarkan yang terburuk atau memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi hingga terendah. Perangkingan berdasarkan hasil analisis 106 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapah kita lihat untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta – Pakem (Gardu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PLN) dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 2221 smp/jam, jam puncak siang 1685 smp/jam, jam puncak sore 1975 smp/jam, kecepatan arus bebas 35 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2118 smp/jam, siang hari 2118 smp/jam, sore hari 2118 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 1,05 pagi hari, 0,80 pada siang hari, dan 0,93 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 1,05 dan berada pada peringkat 1 dari total ruas yang dikaji. Ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi selanjutnya yaitu Yogyakarta - Pulowatu dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1822 smp/jam, jam puncak siang 1482 smp/jam, jam puncak sore 1692 smp/jam, kecepatan arus bebas 32 km/jam, kapasitas pada pagi hari 1843 smp/jam, siang hari 1786 smp/jam, sore hari 1729 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,99 pagi hari, 0,83 pada siang hari, dan 0,98 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,99 dan berada pada peringkat 2 dari total ruas yang dikaji.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2- 138 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Sleman

Dari grafik derajat kejenuhan di atas, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan mengalami kondisi puncak pada periode pagi maupun sore hari. Periode pagi dengan waktu survei 06.00 – 09.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang mulai melakukan perjalanan untuk bekerja, sekolah, dll. Sedangkan pada periode sore dengan waktu survey 15.00 – 18.00 digambarkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang melakukan perjalanan pulang setelah beraktivitas.

Berdasarkan grafik diatas, nilai derajat kejenuhan pada kondisi kritis atau lebih dari 0,85 terjadi pada empat ruas jalan di Kabupaten Sleman. Ruas jalan di Kabupaten Sleman dengan nilai Derajat Kejenuhan di atas 0,85 terjadi pada ruas jalan Yogyakarta - Pulowatu periode pagi dan sore, Yogyakarta – Pakem periode pagi dan sore, Demak Ijo – kebonagung 1 periode pagi dan sore, dan Cebongan - Seyegan periode pagi.

d. Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data hasil perhitungan analisis ruas jalan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan rata – rata jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dimana pada jam puncak ini banyak kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja. Jam puncak siang rata-rata pada pukul 11.00-12.00 yang merupakan jam istirahat dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15 dimana pada jam ini orang mulai kembali dari aktivitas di luar untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga pada jam puncak sore banyak sekali jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan.

Tabel 2- 222 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
47	045	Gading – Playen	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	15.45 - 16.45	0,40	0,29	0,28	48	0,40	15
48	046	Playen – Gledag	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.00 - 17.00	0,53	0,56	0,41	42	0,56	5
49	047	Playen – Paliyan	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,45	0,22	0,31	46	0,45	12
50	048	Paliyan - Saptosari	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,55	0,23	0,38	42	0,55	6
51	049	Legundi - Panggang	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,42	0,13	0,49	38	0,49	10
52	050	Bibal - Panggang	06.30 - 07.30	11.00 - 12.00	16.45 - 17.45	0,59	0,11	0,18	30	0,59	3
53	051	Panggang - Girijati	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,25	0,13	0,25	54	0,25	20
54	052	Dodogan - Playen	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,23	0,12	0,32	54	0,32	17
55	053	Wonosari - Mulo	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	16.30 - 17.30	0,67	0,33	0,77	36	0,77	1
56	054	Mulo – Tepus	06.00 - 07.00	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,27	0,25	0,47	44	0,47	11
57	055	Mulo – Baron	06.30 - 07.30	12.00 - 13.00	15.30 - 16.30	0,36	0,16	0,41	39	0,41	14
58	056	Wonosari - Karangmojo	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	16.15 - 17.15	0,59	0,38	0,62	40	0,62	2

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

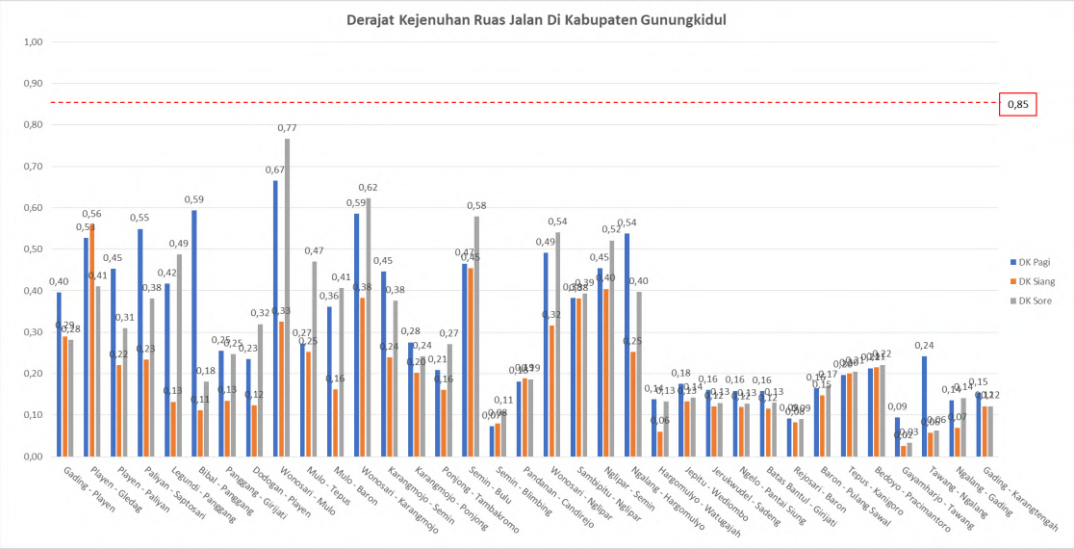
No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kec (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
59	057	Karangmojo - Semin	06.15 - 07.15	12.00 - 13.00	15.15 - 16.15	0,45	0,24	0,38	47	0,45	13
60	058	Karangmojo - Ponjong	07.00 - 08.00	11.30 - 12.30	16.15 - 17.15	0,28	0,20	0,24	43	0,28	18
61	059	Ponjong - Tambakromo	07.00 - 08.00	11.45 - 12.45	16.45 - 17.45	0,21	0,16	0,27	46	0,27	19
62	060	Semin – Bulu	07.00 - 08.00	12.00 - 13.00	16.45 - 17.45	0,47	0,45	0,58	36	0,58	4
63	061	Semin - Blimbing	07.30 - 08.30	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,07	0,08	0,11	57	0,11	33
64	062	Pandanan - Candirejo	07.00 - 08.00	11.30 - 12.30	17.00 - 18.00	0,18	0,19	0,19	56	0,19	24
65	063	Wonosari - Nglipar	07.15 - 08.15	11.00 - 12.00	16.00 - 17.00	0,49	0,32	0,54	35	0,54	7
66	064	Sambipitu - Nglipar	06.15 - 07.15	11.45 - 12.45	16.30 - 17.30	0,38	0,38	0,39	41	0,39	16
67	065	Nglipar – Semin	06.45 - 07.45	11.00 - 12.00	16.15 - 17.15	0,45	0,40	0,52	37	0,52	9
68	066	Ngalang - Hargomulyo	07.00 - 08.00	11.15 - 12.15	16.30 - 17.30	0,54	0,25	0,40	30	0,54	8
69	067	Hargomulyo - Watugajah	07.00 - 08.00	11.00 - 12.00	16.45 - 17.45	0,14	0,06	0,13	48	0,14	32
70	068	Jepitu - Wediombo	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,18	0,13	0,14	44	0,18	25
71	070	Jerukwudel - Sadeng	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,16	0,12	0,13	48	0,16	27
72	071	Ngelo - Pantai Siung	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,16	0,12	0,13	48	0,16	28
73	073	Batas Bantul - Girijati	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,16	0,12	0,13	48	0,16	29
74	080	Rejosari – Baron	06.45 - 07.45	11.30 - 12.30	16.00 - 17.00	0,09	0,08	0,09	57	0,09	35
75	081	Baron - Pulang Sawal	07.00 - 08.00	11.15 - 12.15	16.00 - 17.00	0,16	0,15	0,17	48	0,17	26
76	081	Tepus - Kanigoro	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	16.00 - 17.00	0,20	0,20	0,21	48	0,21	23
77	082	Bedoyo - Pracimantoro	06.45 - 07.45	11.15 - 12.15	15.15 - 16.15	0,21	0,21	0,22	46	0,22	22
78	102	Gayamharjo - Tawang	06.30 - 07.30	11.00 - 12.00	15.00 - 16.00	0,09	0,02	0,03	57	0,09	34
79	103	Tawang - Ngalang	06.30 - 07.30	12.00 - 13.00	16.30 - 17.30	0,24	0,06	0,06	54	0,24	21
80	104	Ngalang - Gading	06.30 - 07.30	12.00 - 13.00	15.00 - 16.00	0,14	0,07	0,14	57	0,14	31
81	105	Gading - Karangtengah	06.30 - 07.30	12.00 - 13.00	15.30 - 16.30	0,15	0,12	0,12	57	0,15	30

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Pada tabel di atas dilakukan perhitungan hasil analisis yang selanjutnya dilakukan perangkingan berdasarkan yang terburuk atau memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi hingga terendah. Perangkingan berdasarkan hasil analisis 106 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapah kita lihat untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Wonosari - Mulo dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 2075 smp/jam, jam puncak siang 1199 smp/jam, jam puncak sore 2650 smp/jam, kecepatan arus bebas 59 km/jam, kapasitas pada pagi hari 3116 smp/jam, siang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

hari 3686 smp/jam, sore hari 3458 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,67 pagi hari, 0,33 pada siang hari, dan 0,77 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,77 dan berada pada peringkat 19 dari total ruas yang dikaji. Sedangkan ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan terendah yaitu pada ruas jalan Rejosari - Baron dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 322 smp/jam, jam puncak siang 287 smp/jam, jam puncak sore 316 smp/jam, kecepatan arus bebas 58 km/jam, kapasitas pada pagi hari 3495 smp/jam, siang hari 3495 smp/jam, sore hari 3495 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,09 pagi hari, 0,08 pada siang hari, dan 0,09 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,09 dan berada pada peringkat 105 dari total ruas yang dikaji.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2- 139 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kabupaten Gunungkidul

Dari grafik derajat kejenuhan di atas, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan mengalami kondisi puncak pada periode pagi maupun sore hari. Periode pagi dengan waktu survei 06.00 – 09.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang mulai melakukan perjalanan untuk bekerja, sekolah, dll. Sedangkan pada periode sore dengan waktu survey 15.00 – 18.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang melakukan perjalanan pulang setelah beraktivitas. Dapat dilihat pada grafik di atas, nilai derajat kejenuhan Ruas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

jalan di Kabupaten Gunungkidul masih di bawah 0,85 yang berarti semua ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih memiliki kinerja baik.

e. Kota Yogyakarta

Berdasarkan data hasil perhitungan analisis ruas jalan di wilayah Kota Yogyakarta dapat disimpulkan rata – rata jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dimana pada jam puncak ini banyak kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja. Jam puncak siang rata-rata pada pukul 11.00-12.00 yang merupakan jam istirahat dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.30-17.30 dimana pada jam ini orang mulai kembali dari aktivitas di luar untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga pada jam puncak sore banyak sekali jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan.

Tabel 2- 223 Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta

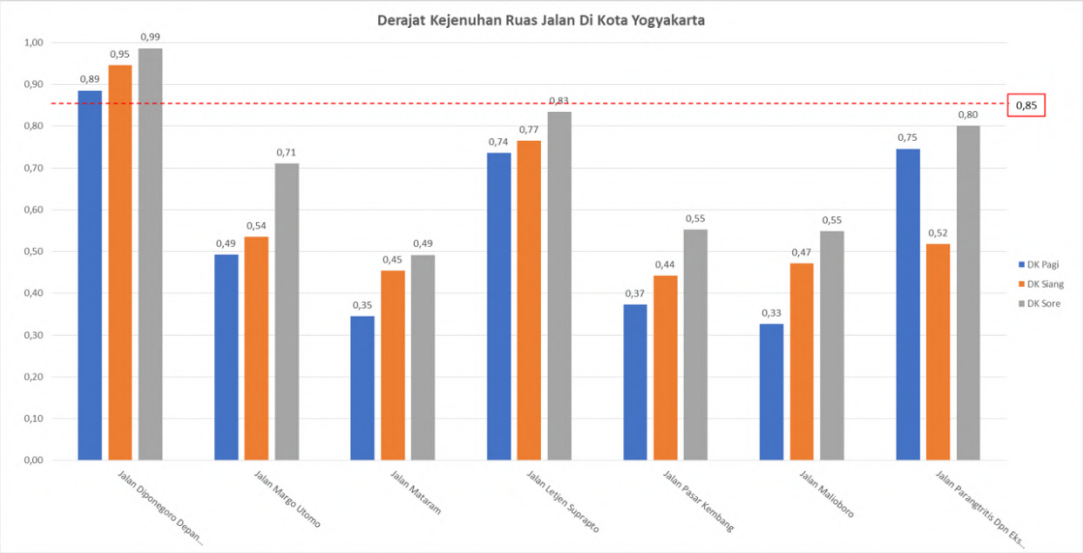
No	No Ruas	Ruas Jalan	Jam Puncak			Derajat Kejenuhan			Kecepatan (km/jam)	DS MAX	Ranking
			Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore			
100		Jalan Diponegoro Depan Pasar Kranggan	07.45 - 08.45	11.15 - 12.15	16.30 - 17.30	0,89	0,95	0,99	25	0,99	1
101		Jalan Margo Utomo	07.30 - 08.30	11.45 - 12.45	16.00 - 17.00	0,49	0,54	0,71	38	0,71	4
102		Jalan Mataram	08.00 - 09.00	11.15 - 12.15	16.15 - 17.15	0,35	0,45	0,49	42	0,49	7
103		Jalan Letjen Suprapto	07.30 - 08.30	11.45 - 12.45	16.00 - 17.00	0,74	0,77	0,83	38	0,83	2
104		Jalan Pasar Kembang	07.45 - 08.45	11.45 - 12.45	16.00 - 17.00	0,37	0,44	0,55	40	0,55	5
105		Jalan Malioboro	07.30 - 08.30	11.45 - 12.45	16.00 - 17.00	0,33	0,47	0,55	44	0,55	6
106		Jalan Parangtritis Dpn Eks Stieker	06.45 - 07.45	12.00 - 13.00	16.45 - 17.45	0,75	0,52	0,80	24	0,80	3

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Pada tabel di atas dilakukan perhitungan hasil analisis yang selanjutnya dilakukan perangkingan berdasarkan yang terburuk atau memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi hingga terendah. Perangkingan berdasarkan hasil analisis 106 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapah kita lihat untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Diponegoro depan Pasar Kranggan dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1864 smp/jam, jam puncak siang 1992 smp/jam, jam puncak sore 2077 smp/jam, kecepatan arus bebas 35 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2106 smp/jam, siang hari 2106 smp/jam, sore hari 2106 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,89 pagi hari, 0,95 pada siang hari, dan 0,99 pada sore hari dimana DS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

maksimum sebesar 0,99 dan berada pada peringkat 7 dari 130 ruas yang dikaji. Sedangkan ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan terendah yaitu ruas jalan Mataram dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 872 smp/jam, jam puncak siang 1147 smp/jam, jam puncak sore 1243 smp/jam, kapasitas pada pagi hari 2526 smp/jam, siang hari 2526 smp/jam, sore hari 2526 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,35 pagi hari, 0,45 pada siang hari, dan 0,49 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,49 dan berada pada peringkat 58 dari total ruas yang dikaji.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2- 140 Grafik Derajat Kejenuhan Ruas Jalan di Kota Yogyakarta

Dari grafik derajat kejenuhan di atas, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan mengalami kondisi puncak pada periode pagi maupun sore hari. Periode pagi dengan waktu survei 06.00 – 09.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang mulai melakukan perjalanan untuk bekerja, sekolah, dll. Sedangkan pada periode sore dengan waktu survey 15.00 – 18.00 digambarkan sebagai kondisi lalu lintas pengguna jalan yang melakukan perjalanan pulang setelah beraktivitas.

Berdasarkan grafik diatas, nilai derajat kejenuhan pada kondisi kritis atau lebih dari 0,85 terjadi pada satu ruas jalan di Kota Yogyakarta. Ruas jalan di Kota Yogyakarta dengan nilai Derajat Kejenuhan di atas 0,85 terjadi pada ruas jalan Diponegoro pada periode pagi, siang dan sore hari.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2- 224 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja Tahun 2024

No	No Ruas	Ruas Jalan	Derajat Kejenuhan			Kecepatan (km/jam)	DS MAX	Ranking
83	084	Yogyakarta - Pakem (Gardu PLN)	1,05	0,80	0,93	16	1,05	1
82	083	Yogyakarta - Pulowatu	0,99	0,83	0,98	16	0,99	2
100		Jalan Diponegoro Depan Pasar Kranggan	0,89	0,95	0,99	25	0,99	3
85	085	Demakijo - Kebonagung 1 (Ruko Bantulan)	0,98	0,73	0,88	16	0,98	4
24	099	Yogyakarta - Dongkelan	0,97	0,53	0,87	26	0,97	5
14	010	Sampakan - Singosaren (Timur Sp. Kids Fun)	0,83	0,53	0,88	20	0,88	6
91	089	Cebongan - Seyegan	0,88	0,37	0,64	18	0,88	7
23	098	Bantul - Pandak	0,87	0,32	0,56	31	0,87	8
86	085	Demakijo - Kebonagung 1 (Sentra Genteng)	0,85	0,27	0,71	30	0,85	9
90	088	Jombor - Cebongan	0,84	0,54	0,66	18	0,84	10

Sumber: Dinas Perhubungan (2025)

Berdasarkan hasil analisis kinerja ruas jalan, dapat diketahui beberapa ruas jalan memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari 0,85. Berdasarkan hasil pemeringkatan pada nilai derajat kejenuhan, ruas jalan dengan prioritas penanganan antara lain Jalan Yogyakarta – Pakem (Gardu PLN), Yogyakarta – Pulowatu, Jalan Diponegoro (depan Pasar ranggan), Jalan Demak Ijo – Kebonagung 1 (Ruko Bantulan), Jalan Yogyakarta – Dongkelan, Jalan Sampakan – Singosaren (Timur Sp Kids Fun), Jalan Cebongan – Seyegan, Jalan Bantul – Pandak, Jalan Demak Ijo – Kebonagung 1 (sentra Genteng), dan Jalan Jombor – Cebongan. Berikut merupakan alternatif perbaikan kinerja lalu lintas pada ruas jalan prioritas.

Derajat kejenuhan yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas jalan yang sangat rendah, dan peningkatan volume kendaraan yang dipicu oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan berakibat pada masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Manajemen lalu lintas dilakukan untuk mengatasi permasalahan DS yang tinggi. Namun penyelenggaraan ATCS yang sudah tersedia di DIY belum bersinergi dengan baik dalam hal pengelolaan karena masih berbasis kewilayahan. ATCS *(Area Traffic Control System*) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pasa suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimaisasi dan koordinasi lampu lalu lintas disetiap persimpangan jalan. Pada saat ini ATCS yang terhubung dengan control room di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perhubungan masih sebatas pemantauan dan belum pada fungsi pengaturan dan pengendalian. Fungsi pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan meningkatkan ATCS menjadi ATMS (*Advanced Traffic Managemen Systems*) sebagai bagian dari ITS (*Intelligent transportation system*).

Akibat manajemen lalu lintas yang belum optimal diperlukan suatu rekayasa lalu lintas sebagai upaya untuk menurunkan DS. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada beberapa kawasan/jalan telah memberikan signifikan namun masih terdapat beberapa ruas yang belum dapat dilkasanakan secara tuntas dan memberikan hasil optimum.

2) Penggunaan Angkutan Umum Lebih Rendah dari Penggunaan Kendaraan Pribadi.

Secara sistem, layanan angkutan umum sudah tersedia mulai dari Angkutan Perdesaan dalam propinsi, AKDP dan angkutan perkotaan. Kinerja sistem layanan ini belum memberikan hasil yang optimal dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Kondisi saat ini layanan AKPD di DIY masih cenderung bersifat untuk mempertahankan layanan AKDP eksisting yang masih beroperasi yang meliputi trayek :

1) Terminal Giwangan - Wonosari - Terminal Semin;
2) Terminal Giwangan - Bandara YIA;
3) Terminal Jombor - Bandara YIA;
4) Terminal Imogiri - Palbapang - Bandara YIA;
5) Terminal Giwangan - Terminal Parangtritis;
6) Stasiun Tugu - *Park And Ride* Baron;

Kondisi tersebut hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Hingga tahun 2024 kondisi Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, (AKDP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga perusahaan otobus tidak dapat mengoperasionalkan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil Kajian Rencana Umum jaringan Trayek Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) di DIY pada tahun 2021, dari 14 Trayek yang terdaftar dalam Keputusan Gubernur No 78/KEP/ 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat 6 trayek yang terlayani.

Tabel 2- 225 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2024

No	Kode	Trayek	Keterangan	Status
1	A01	Terminal Giwangan - Wonosari - Terminal Semin	AKDP	Terlayani
2	A02	Terminal Giwangan - Bandara YIA	AKDP	Terlayani
3	A03	Terminal Pakem - Bandara YIA	AKDP	Belum Terlayani
4	A04	Terminal Jombor - Bandara YIA	AKDP	Terlayani
5	A05	*Park And Ride* Gamping - Terminal Wates	AKDP	Belum Terlayani
6	B01	Terminal Prambanan - Piyungan - Terminal Giwangan	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
7	B02	Teminal Palbapang - Brosot - Terminal Wates	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
8	B03	Terminal Giwangan - Terminal Imogiri	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
9	B04	*Park And Ride* Ngabean - Terminal Kenteng	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
10	B05	Terminal Imogiri - Palbapang - Bandara YIA	Angkutan Perdesaan	Terlayani
11	B06	Terminal Giwangan - Terminal Parangtritis	Angkutan Perdesaan	Terlayani
12	B07	Terminal Jombor - Pasar Dekso	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
13	B08	*Park And Ride* Ngabean - Eks Stasiun Tempel	Angkutan Perdesaan	Belum Terlayani
14	B09	Stasiun Tugu - Park And Ride Baron	Angkutan Perdesaan	Terlayani

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2025

Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (Buy The Service). Pada tahun 2024 total angkutan perkotaan telah melayani 19 rute dengan mengoperasikan 95 unit bus. Kementerian Perhubungan juga turut berpartisipasi melalui Program Buy the Service (BTS) atau biasa disebut dengan Program Teman Bus yang melayani 3 rute

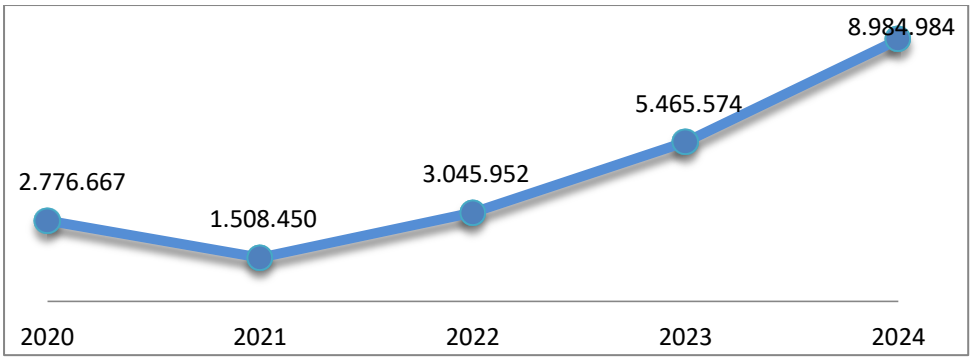
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dengan 44 unit bus. Secara keseluruhan, layanan angkutan umum perkotaan ini telah menjangkau 25 kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, Dinas Perhubungan DIY telah mengembangkan inovasi berupa Aplikasi Perhitungan Jumlah Penumpang. Aplikasi tersebut berfungsi untuk memantau jumlah penumpang yang melakukan transaksi pembayaran pada mesin tiket serta total pendapatan yang diperoleh. Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan data transaksi dan pendapatan secara real time. Berdasarkan data dari aplikasi tersebut, tercatat jumlah penumpang yang melakukan pembayaran/transaksi sebesar 4.523.238 penumpang. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) tahun 2024, yaitu sebesar 4.300.000 penumpang.

Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penumpang Trans Jogja pada tahun 2024, yaitu sebanyak 3.500.000 penumpang dibandingkan tahun 2023. Angka ini mencerminkan total penumpang yang menggunakan layanan Trans Jogja selama periode satu tahun, termasuk mereka yang melakukan transit.

Pada tahun 2024, layanan Bus Trans Jogja mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencapai 64,39% atau setara dengan 3.500.000 penumpang, dengan rata-rata penumpang harian sebesar 24.616 penumpang. Angka tersebut mencerminkan total penumpang yang menggunakan layanan Trans Jogja selama periode satu tahun, termasuk didalamnya penumpang yang melakukan transit.



Sumber: Dishub DIY, 2025

Gambar 2- 141 Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Persentase Capaian SPM Trans Jogja berdasarkan pada capaian tahun 2024 yakni sebesar 94.20% (Hasil Studi Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Trayek Angkutan Perkotaan Tahun 2024). Capaian SPM Trans Jogja berdasarkan variabel- variabel yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Capaian tersebut diukur dari 6 indikator SPM yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Realisasi indikator SPM meliputi:

1) Indikator Keamanan telah tercapai 100%;
2) Indikator Keselamatan telah tercapai 95,7%;
3) Indikator Keselamatan belum tercapai pada aspek ketersediaan sarana bus seperti peralatan keselamatan dan faasilitas kesehatan (dari bobot 33% tercapai 29,7%);
4) Indikator Kenyamanan telah tercapai 100%;
5) Indikator Keterjangkauan telah tercapai 100%;
6) Indikator Kesetaraan telah tercapai 100%;
7) Indikator Keteraturan telah tercapai 69,5%. Indikator Keteraturan belum tercapai pada aspek waktu berhenti di halte (maksimal 60 detik), *Headway* (paling lama 15 menit saat *peak* 30 menit) serta usia kendaraan (maksimal 20 tahun atau sesuai kondisi daerah).

Capaian Pemenuhan SPM pada tahun 2023 dan 2024 masih sama yakni sebesar 94.20%, hal tersebut ditunjukan dengan nilai *headway* yang tidak jauh berbeda. Dimana pada tahun 2023 rata-rata *headway* sebesar 28.11 menit serta pada tahun 2024 rata-rata *headway* sebesar 28.21 menit.

Simpul transportasi dan fasilitas pendukung masih memerlukan pengembangan dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum secara menyeluruh. Pengembangan park and ride sebagai bagian dari penyelenggaraan multimoda di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DIY merupakan bagian dari *push strategy* untuk menumbuhkan minat orang menggunakan angkutan umum.

3) Indek Fatalitas Kecelakaan di DIY masih lebih tinggi dari target nasional.

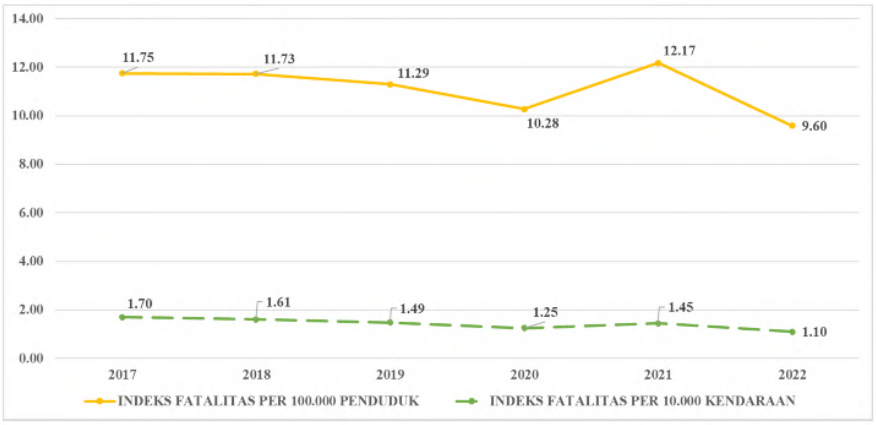
Berdasarkan target RUNK 2021 – 2024, diharapkan setelah implementasi dari Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan angka fatalitas korban kecelakaan akan menurun 80% pada tahun 2040 jika dibandingkan dengan jumlah fatalitas korban tanpa penanganan. Berdasarkan data kecelakaan DIY tahun 2017 – 2021, tida dapat dibuat grafik trend maupun target penurunan jumlah fatalitas korban kecelakaan yang sesuai dengan RUNK 2021 – 2040. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berimbas pada penurunan jumlah kecelakaan dan angka fatalitas korban akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam pencapaian Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dan indeks fatalitas per 100.000 penduduk. Kedua indeks fatalitas tersebut dari tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 226 Indeks Fatalitas Kecelakaan di DIY tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Jumlah Kendaraan	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
1	2017	442	3,762,200	11.75	2,603,181	1.7
2	2018	446	3,802,872	11.73	2,766,289	1.61
3	2019	434	3,842,932	11.29	2,919,609	1.49
4	2020	377	3,668,719	10.28	3,020,847	1.25
5	2021	452	3,712,896	12.17	3,126,443	1.45
6	2022	361	3,761,870	9.6	3,274,030	1.1

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023

Gambar 2- 142 Grafik Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 – 2022

Tabel 2- 227 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2022

Tahun	Kasus Kecelakaan	Tingkat Fatalitas			Kerugian Material
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2016	3.808	544	12	4.883	2.221.838.000
2017	4.313	398	49	5.963	2.879.731.000
2018	4.729	526	16	6.698	2.786.635.000
2019	6.113	498	7	7.706	2.722.255.008
2020	5.016	437	1	6.341	2.344.035.500
2021	5.350	452	3	6.390	2.393.687.000
2022	5.420	97	28	3.274	23.867.402.885

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY diolah, 2023

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di DIY adalah:

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Sebagai cintoh masih ditemukan pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Faktor kondisi lingkungan fisik

Faktor lingkungan fisik merupakan elemen ekstristik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan cuaca tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas, seperti jalan basah/licin, jalan rusak, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Menurut data yang diperoleh dari BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY, pada wilayah DIY terdapat 3 (tiga) satuan pelaksana unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yaitu Kulwaru (Kulon Progo), Kalitirto (Sleman), dan Taman Martani (Sleman). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, tentang hasil giat penegakan hukum angkutan orang dan angkutan barang tahun 2020-2022.



Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023

Gambar 2- 143 Hasil Giat Penegakan Hukum Angkutan Orang dan Angkutan Barang 2020 – 2022

4) Tingkat emisi dari sektor transportasi yang masih tinggi pada kawasan tertentu

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan transportasi darat di DIY terbukti menjadi penyebab meningkatnya polusi udara. Sebab, penyumbang terbesar emisi di Yogyakarta berasal dari transportasi darat kendaraan bermotor. Adapun beberapa permasahan dalam menyumbang tingginya emisi di DIY adalah:

- Pertumbuhan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil tidak dapat dikendalikan serta tingkat emisi yang berada di atas ambang batas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Penyelenggaraan angkutan *non motorized* dan pedestrianisasi masih terbatas. Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. Layanan angkutan tradisional terdiri dari dua jenis moda angkutan yaitu Becak dan Andong dengan fungsi layanan sebagai angkutan pariwisata. Pada kondisi saat ini angkutan tradisional yang berada di wilayah DIY untuk andong sebesar 462 Andong dan 336 becak di kawasan sumbu Filosofi.
- Layanan angkutan umum yang melayani kawasan belum menjadi prioritas dan masih berbahan bakar fosil.
- Penyediaan TKP dalam kawasan yang mendukung pedestrianisasi masih sangat terbatas.

5) Pemenuhan SPM Penyelanggaraan Terminal Penumpang Tipe B

Terdapat 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe B yang berada dibawah kewenangan Pemerintah daerah DIY yakni Terminal Jombor dan Wates. Pemenuhan SPM Penyelanggaraan Terminal Penumpang Tipe B pada kedua terminal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2- 228 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Wates Tahun 2022 - 2024

TERMINAL WATES									
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
	FASILITAS UTAMA								
1	Jalur Berangkat			v	1	v	1	v	1
2	Jalur Kedatangan			v	1	v	1	v	1
3	Ruang Tunggu Penumpang, Pengantar, dan /atau Penjemput			v	1	v	1	v	1
4	Tempat naik turun penumpang			v	1	v	1	v	1
5	Tempat parkir			v	1	v	1	v	1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TERMINAL WATES										
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
	kendaraan								
6	Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup			v	1	v	1		
7	Perlengkapan jalan			v	1	v	1	v	1
8	Media informasi			v	1	v	1	v	1
9	Kantor penyelenggara Terminal			v	1	v	1	v	1
10	Loket penjualan tiket			v	1	v	1	v	1
11	Pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus			v	1	v	1		
12	Outlet pembelian tiket secara online			v	1	v	1		
13	Jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus			v	1	v	1		
14	Tempat berkumpul darurat			v	1	v	1	v	1
	FASILITAS PENUNJANG								
15	Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui			v	1	v	1		
16	Pos Kesehatan			v	1	v	1	v	1
17	Fasilitas Kesehatan			v	1	v	1	v	1
18	Fasilitas peribadatan			v	1	v	1	v	1
19	Pos polisi			v	1	v	1	v	1
20	Alat pemadam kebakaran			v	1	v	1	v	1
21	Fasilitas Umum	-	Toilet	v	1	v	1	v	1
22		-	Rumah makan	v	1	v	1	v	1
23		-	Fasilitas telekomunikasi	v	1	v	1	v	1
24		-	Tempat istirahat awak kendaraan	-	-	-	-		
25		-	Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan	v	1	v	1		
26		-	Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang	-	-	-	-		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TERMINAL WATES									
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
27		-	Fasilitas kebersihan	v	1	v	1	v	1
28		-	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	-	-	-	-		
29		-	Fasilitas perdagangan, pertokoan;	v	1	v	1	v	1
30		-	Fasilitas penginapan	-	-	-	-		
31		-	Area merokok	v	1	v	1	v	1
32		-	Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM)	-	-	-	-		
33		-	Fasilitas pengantar barang (Trolley dan tenaga angkut)	-	-	-	-		
34		-	Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet	v	1	v	1	v	1
35		-	Ruang anak-anak	-	-	-	-		
36		-	Media pengaduan layanan	v	1	v	1	v	1
37		-	lain-lain (Charger Station)	v	1	v	1		
	JUMLAH				30		30		23
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B Terminal Wates			30/37	81,08%	30/37	81,08%	23/37	62.16%

Sumber: Dishub DIY 2025

Tabel 2- 229 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Jombor Tahun 2022 – 2024

TERMINAL JOMBOR									
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
	FASILITAS UTAMA								
1	Jalur Berangkat			v	1	v	1	v	1
2	Jalur Kedatangan			v	1	v	1	v	1
3	Ruang Tunggu Penumpang, Pengantar, dan			v	1	v	1	v	1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TERMINAL JOMBOR										
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
	/atau Penjemput								
4	Tempat naik turun penumpang			v	1	v	1	v	1
5	Tempat parkir kendaraan			v	1	v	1	v	1
6	Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup			v	1	v	1		
7	Perlengkapan jalan			v	1	v	1	v	1
8	Media informasi			v	1	v	1	v	1
9	Kantor penyelenggara Terminal			v	1	v	1	v	1
10	Loket penjualan tiket			v	1	v	1	v	1
11	Pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus			v	1	v	1		
12	Outlet pembelian tiket secara online			v	1	v	1	v	1
13	Jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus			v	1	v	1	v	1
14	Tempat berkumpul darurat			v	1	v	1	v	1
	FASILITAS PENUNJANG			-	-	-	-		
15	Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui			v	1	v	1	v	1
16	Pos Kesehatan			v	1	v	1	v	1
17	Fasilitas Kesehatan			-	-	-	-	v	1
18	Fasilitas peribadatan			v	1	v	1	v	1
19	Pos polisi			v	1	v	1		
20	Alat pemadam kebakaran			v	1	v	1	v	1
21	Fasilitas Umum	-	Toilet	v	1	v	1	v	1
22		-	Rumah makan	v	1	v	1	v	1
23		-	Fasilitas telekomunikasi	v	1	v	1	v	1
24		-	Tempat istirahat awak kendaraan	-	-	-	-	v	1
25		-	Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan	v	1	v	1	v	1
26		-	Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang	-	-	-	-		
27		-	Fasilitas kebersihan	v	1	v	1	v	1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TERMINAL JOMBOR									
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				**2022**		**2023**		**2024**	
				KETER SEDIAAN	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**	**KETER SEDIAAN**	**NILAI**
28		-	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	-	-	-	-		
29		-	Fasilitas perdagangan, pertokoan;	v	1	v	1	v	1
30		-	Fasilitas penginapan	-	-	-	-		
31		-	Area merokok	v	1	v	1	v	1
32		-	Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM)	-	-	-	-		
33		-	Fasilitas pengantar barang (Trolley dan tenaga angkut)	-	-	-	-		
34		-	Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet	v	1	v	1	v	1
35		-	Ruang anak-anak	-	-	-	-		
36		-	Media pengaduan layanan	v	1	v	1	v	1
37		-	lain-lain (Charger Station)	v	1	v	1		
	JUMLAH				**29**		**29**		**27**
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B Terminal Jombor			**29/37**	**78,38%**	**29/37**	**78,38%**	**27/37**	**72.97%**

Sumber: Dishub DIY 2025

2.4.2.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

1.) Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh DIY dengan skor 3,71. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam *Roadmap* Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar *digital skills, digital ethics, digital safety,* dan *digital culture.*

Berdasarkan hasil survei Status Literasi Digital Indonesia terakhir pada Tahun 2021 yang dilakukan Katadata *Insight Center* (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di daerah perkotaan memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5% dan indeks literasi digital 47,5%. Sedangkan di daerah perdesaan indeks literasi digital tinggi sebesar 49,8% dan indeks literasi digital 50,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terdapat selisih persentase indeks literasi digital tinggi di perkotaan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan perdesaan alias kawasan rural. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di DIY, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutamadi perdesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.

2.) Belum optimalnya integrasi dan kolaborasi rata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan *clastering*. Terdapat beberapa aplikasi yang melalukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapakan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh *service*/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum.

3.) Tantangan dalam transformasi digital penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

4.) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal

Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media *wireless* sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media *Virtual Private Network* (VPN) dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati bandwidth dengan kapasitas terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media *wireless* menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi ring membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai*backup link* yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional.

Tantangan lain dari infrastruktur jaringan, utamanya *fiber optic* yakni penataan terhadap utilitas yang pada beberapa titik menimbulkan kesan kesemrawutan. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam kajian Ombudsman Republik Indonesia DIY pada tahun 2024. Mempertimbangkan pertumbuhan layanan digital yang terus meningkat, penataan utilitas teknologi komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memberikan layanan publik yang memadai.

5.) Akselerasi dan pemantapan integrasi layanan publik prioritas dalam portal layanan terpadu digital

Pada tahun 2024 dilakukan proses integrasi 9 jenis layanan publik unggulan atau prioritas pada portal layanan terpadu digital. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dipercepat, dan dimantapkan pada jenis layanan publik lainnya, serta penyelarasan dan pengintegrasian layanan sejenis di kabupaten/kota guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih prima**.**

2.4.2.2.11 Urusan Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah

1.) Masih rendahnya kontribusi volume usaha koperasi

Volume usaha koperasi yang pada tahun 2024 mencapai Rp 5,4 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nilai tambah keseluruhan perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB ADHB, proporsi volume usaha koperasi tersebut masih relatif rendah. Dalam laporan PDRB ADHB DIY 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat hanya memberikan kontribusi sekitar 3-4% terhadap total PDRB DIY. Padahal, sektor koperasi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan angka tersebut, mengingat peran koperasi dalam perekonomian lokal dan ketahanan sosial-ekonomi di daerah ini. PDRB ADHB sendiri, yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu, menunjukkan bahwa sektor-sektor besar seperti sektor jasa,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

industri pengolahan, dan pertanian masih mendominasi. Misalnya, pada sektor jasa, kontribusinya mencapai lebih dari 60%, sementara sektor industri pengolahan juga berkontribusi signifikan dengan persentase lebih dari 25%.

Sektor koperasi, yang seharusnya memiliki peran strategis dalam distribusi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota, masih terpinggirkan jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB ADHB

2.) Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelanggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari Dataku, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2023 sekitar 1.061 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.734 unit. Artinya ada sebanyak 38,81% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara itu, apabila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang mejadi 1.106 unit, pada tahun 2021 berkurang menjadi 1.062 unit, pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 1.109 unit dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 1.061 unit.

3.) Masih rendahnya skala usaha UMKM

Tantangan pengembangan UMKM adalah masih rendahnya skala usaha UMKM terutama untuk usaha mikro dan kecil. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan UMKM dalam aspek keuangan, produksi, pemasaran, teknologi dan informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, serta SDM. Kondisi tersebut selaras dengan data Survei Industri Kecil dan Menengah yang dirilis oleh BPS tahun 2022, yang menyatakan bahwa jumlah usaha mikro di DIY sebesar 97,29% dari total unit industri. Di sisi lain, sebenarnya peluang untuk peningkatan omset usaha cukup terbuka lebar terutama di tengah kemudahan pelaku usaha untuk mengakses pasar baik lokal, domestik bahkan luar negeri. Walaupun demikian, peluang tersebut juga dibarengi dengan semakin meningkatnya iklim persaingan yang semakin kompetitif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Oleh karena itu, perlunya mendorong kenaikan skala usaha untuk meningkatkan produktivitas UKM/Industri melalui penguatan sektor industri mikro agar UMKM dapat naik kelas.

2.4.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

1.) Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, realisasi investasi PMDN di DIY sampai dengan bulan September tahun 2024 mencapai Rp 3.326,57 miliar, dengan proyek sejumlah 3.838 proyek. Sementara itu, realisasi investasi PMA mencapai 29,53 Juta US$ untuk sebaran 571 proyek. Berdasarkan data tersebut, DIY menduduki posisi ke-27 untuk realisasi PMDN, dan peringkat 33 untuk realisasi PMA dibanding semua provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. RPJMN 2024-2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2025-2029 pada nilai 8,0% dengan beberapa prasyarat. Salah satu prasyarat yang dimakasud ialah menciptakan sumber pertumbuhan baru sisi produksi *(supply side)* yang merata di seluruh Indonesia termasuk diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan potensi dan peluang yang ada, DIY diharapkan dapat menarik minat investor yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.) Penanaman modal yang belum berkualitas

Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Kualitas investasi di DIY masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penanaman modal berkualitas bagi DIY bisa dimaknai dengan kegiatan investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terhadap pembangunan berkelanjutan. Investasi semacam ini berorientasi pada ekspor, berbasis teknologi, berkelanjutan, dan mampu memperkuat UMKM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sektor-sektor seperti pariwisata, industri kreatif, teknologi informasi, serta industri makanan dan minuman memiliki potensi besar untuk menarik investasi berkualitas di DIY. Namun, sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum merata masih menjadi kendala. Keterbatasan infrastruktur dan akses pembiayaan juga tertuang dalam tantangan pada RPJMN 2025-2029 sebagai faktor penghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Akses pembiayaan yang terbatas, baik dari segi ketersediaan kredit maupun tingginya tingkat bunga mengakibatkan investasi yang masuk cenderung bersifat portabel, berorientasi pasar domestik, dan kurang berorientasi pada inovasi.

3.) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan.

Dalam laporan tahunan *Institute for Management Development* (IMD)*World Competitiveness Center* pada tahun 2024, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu dari posisi ke-34 menjadi posisi ke-27. Namun untuk kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Thailand. *IMD World Competitiveness Center (WCC)* menggunakan empat indikator untuk menentukan peringkat, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Indonesia masih memiliki kelemahan pada ketersediaan infrastruktur, terutama terkait infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi.

Dalam konteks nasional, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan DIY peringkat ke 4 Indeks Daya Saingnya dengannilai 3,84. Perbandingan daya saing DIY dengan daerah lain di Indonesia

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menunjukkan bahwa DIY memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, misalnya Pilar Institusi dan Pilar Ketrampilan namun masih tertinggal dalam Pilar Infrastruktur dan Pilar Sistem Keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menyediakan pelayanan penanaman modal yang optimal. DIY memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun perlu mengatasi tantangan dalam hal infrastruktur dan sistem keuangan. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal menjadi kunci untuk menarik investasi dan memaksimalkan potensi daerah.

2.4.2.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.) Masih tingginya pemuda yang mengalami masalah kesehatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda (IPP) 2022, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan 12,04% dan 22,46% pemuda adalah perokok.Sedangkan data Susenas 2023 menunjukkan bahwa 86,06 orang yang memiliki jaminan kesehatan.

2.) Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda dan kompetensi tenaga kerja pemuda

Kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada pada tahun 2045.Persentase wirausaha pemuda di DIY menurut data Kemenpora 2023 sebanyak 64,59% sehingga masih perlu didorong. Sementara itu, kompetensi kerja pemuda dapat dilihat dari kategori pekerjaan *white collar* atau pekerja profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha. Tahun 2023 proporsi pemuda dengan kategori white collar di DIY baru sebesar 25,46%. Sedangkan dalam kategori pekerjaan *blue collar* berkaitan dengan teknis dan melibatkan fisik mencapai 74,54%. Artinya, kompetensi tenaga kerja profesional pemuda masih perlu ditingkatkan.

3.) Pengangguran di Usia Muda

Permasalahan yang dialami pemuda dalam sektor ketenagakerjaan adalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemudadi DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menurut data Sakernas 2023 sebesar 8,52%. TPT pemuda DIY lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, dan secara gender lebih didominasi laki-laki.

4.) Minimnya Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Dilihat dari rasio ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk olahraga, menurut Laporan Nasional *Sport Development Index* (SDI) Kemenpora Tahun 2022 DIY memiliki indeks ruang terbuka sebesar 0,247 urutan terbawah nomor sepuluh secara nasional.

5.) Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Perkembangan era Industri 4.0 membawa dampak dalam cara belajar, cara bekerja dan gaya hidup Sedentary atau kurang gerak.Hal ini berdampak pada peningkatan risiko obesitas, dan gangguan penyakit. Tingkat partisipasi olahraga di DIY masih cukup rendah. Hasil SDI Kemenpora (2022) menyebutkan angka partisipasi olah raga di DIY sebesar 25,33% masih di bawah rata-rata masih di bawah rerata nasional 32,83%.

2.4.2.2.14 Urusan Statistik

1.) Belum terpenuhinya 4 prinsip menuju satu data Indonesia

Berdasarkan pelaksanaan empat prinsip menuju satu data indonesia, dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di DIY (data pembangunan daerah) pada proses pengumpulan data-data sektoral terutama untuk usulan data-data baru, ada beberapa data yang masih belum memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia (kode refeerensi, metadata, standar data dan interoperabilitas) sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia tersebut dengan cara verifikasi dan validasi data setiap 3 bulan sekali yang dilakukan dengan OPD statistik sektoral dan Didampingi BPS selaku Pembina data.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.) Pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih belum maksimal

Dasar pembentukan Simpul Jaringan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial di DIY masih banyak kendala yaitu minimnya sarana prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung pengelolaan geospasial, selain itu keterbatasan SDM yang berkompeten (berlatar belakang pendidikan ilmu kebumian seperti Geografi, Geodesi, Penataan Ruang, dan lain-lain) dalam pengelolaan geospasial baik di tingkat OPD dan Bapperida DIY sebagai pembina data geospasial.

2.4.2.2.15 Urusan Kebudayaan

1.) Proses Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya menghadapi ancaman perkembangan wilayah

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian bangunan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi, sarana prasarana ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasikan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.) Perlindungan nilai-nilai budaya khas DIY sebagai panutan dan jati diri masyarakat Yogyakarta

Dialektika antara globalisme dan lokalisme sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia Timur maupun di dunia Barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa, telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya; sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya maupun kebaruan dan pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya. Memang sulit menandai yang lebih dulu antara globalisme dan globalisasi, namun keduanya jelas sekali merupakan ujung sejarah dari suatu perjalanan dan perjumpaan yang panjang. Kebudayaan khas DIY juga tidak dapat mengelak dari ayunan gelombang globalisasi, DIY kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

2.4.2.2.16 Urusan Perpustakaan

1.) Masih Belum Idealnya Jumlah Pustakawan di DIY

Jumlah perpustakaan di DIY belum selaras dengan ketersediaan pustakawan. Saat ini DIY masih kekurangan pustakawan baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berdasarkan standar *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)*, rasio

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ketercukupan pustakawan adalah 1:2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang. Sementara rasio ketercukupan pustakawandi DIY adalah 1:44.370, dimana 1 orang pustakawan melayani 44.370 penduduk. Jumlah pustakawan di DIY tahun 2024 sebanyak 93 orang yang terdiri dari 15 orang pustakawan provinsi DIY, 12 orang pustakawan Kabupaten Kulon Progo, 16 orang pustakawan Kabupaten Bantul, 10 orang Pustakawan Kabupaten Gunungkidul, 15 orang pustakawan Kabupaten Sleman dan 26 Pustakawan Kota Yogyakarta.

2.) Kualitas penyelenggaraan Perpustakaan masih belum optimal

Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di DIY menurut data DPAD DIY pada tahun 2024 baru mencapai 22,9%*. Artinya, dari total jumlah perpustakaan di DIY sebanyak 3.618 perpustakaan, baru terdapat 828 perpustakaan yang menerapkan penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

2.4.2.2.17 Urusan Kearsipan

1.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2022-2027) pada tahun 2023 dari target 110 institusi baru tercapai 8 institusi.

2.4.2.2.18 Urusan Persandian

1.) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Pada tahun 2024 terdapat 366 insiden peretasan atau gangguan kemanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang. pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

militer, teetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

2.) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti *firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM*, perangkat kontra penginderaan, *jammer*, kendaraan operasional, dan lain-lain. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war* sehingga terjadi insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi. Berdasarkan data dari Dataku Bapperida DIY, pada tahun 2024 terdapat 366 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Insiden akan lebih mudah ditangani dengan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan.

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1.) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Berdasarkan data dari Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada perairan Samudra Hindia Selatan DIY, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 30,93% dari potensi yang boleh ditangkap. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pada tahun 2023 jumlah nelayan penuh di DIY 453 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.135 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 539 orang.

Selain itu, sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah perahu motor tempel (PMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas dikarenakan jangkauan PMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal di atas 5 GT untuk dapat menjangkau potensi ikan dengan nilai ekonomis tinggi tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal dengan kapasitas di atas 5 GT di DIY antara tahun 2019-2023 menunjukan hanya ada 58 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah PMT sebanyak 495 kapal sejak tahun 2018.

Di sisi lain, prasarana perikanan tangkap laut yang ada di DIY belum dimanfaatkan secara optimal. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi sehingga tidak ada kapal penangkap ikan yang dapat mendarat di PP Tanjung Adikarta. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Gesing baru akan resmi beroperasi pada triwulan IV tahun 2024.

2.) Pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) yang terus menurun dalam periode 2019-2023 dengan nilai NTPI terendah sebesar 90,06 pada tahun 2023, sehingga dapat dianggap belum sejahtera.

3.) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. Hal ini disebabkan preferensi masyarakat DIY untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemenuhan kebutuhan protein lebih banyak dipenuhi dari konsumsi daging ayam maupun sapi atau kambing. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,48 Kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Sementara itu,walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2022 menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,74% per tahun, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 34,92 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2022.

2.4.2.3.2 Urusan Pariwisata

1.) Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa menyamai kondisi sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebesar 433.027 orang,tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara masih pada angka 149.414orang. Sejak tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY tetap memperlihatkan kenaikan secara bertahap. Sampai di triwulan ketiga di tahun 2024, tercatat untuk jumlah wisatawan mancanegara orang yang berkunjung ke DIY sebanyak 205.407 orang hampir separuh dibandingkan capaian tahun 2019 atau sebesar 52,57%. Menurut laporan *Tourism Outlook 2023* dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menyebutkan bahwa pariwisata global secara umum baru akan pulih kembali seperti sebelum pandemi pada tahun 2024, maka tantangan bagi DIY pada sektor pariwisata ini adalah kemampuan untuk menangkap momentum dan mengambil langkah yang tepat untuk meraih kembali masa gemilang pariwisata di Yogyakarta.

2.) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY

Lama tinggal wisatawan yang berwisata di Yogyakarta masih relatif rendah. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara berdasarkan dari lama menginap di jasa akomodasi pada tahun 2022 hanya mencapai 2,40 hari. Sementara itu, untuk wisatawan nusantara hanya mencapai 1,36 hari. Pemerintah telah bergerak menarik wisatawan mancanegara dan domestik untuk tinggal lebih lama di Yogyakarta dengan pengoptimalan sektor pariwisata hingga menyelenggarakan *event* khusus untuk mengupayakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

agar wisatawandapat tinggal lebih lama untuk berwisata di DIY. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di DaerahIstimewa Yogyakarta mencapai 1,55 hari selama oktober 2024 sedangkan pada hotel non bintang mencapai 1,16 hari selama Oktober 2024.

3.) Belum Optimalnya Perkembangan Ekonomi Kreatif di DIY

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor penunjang perekonomian di DIY yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar dalam perekonomian yang disebabkan oleh pertumbuhan kunjungan wisatawan, *spending* wisatawan, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, serta pergerakan peningkatan daya saing destinasi wisata, industri pariwisata serta SDM pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2019 menunjukkan DIY memiliki tiga subsektor ekonomi kreatif unggulan yaitu kuliner, fesyen dan kriya, namun DIY pun memiliki beberapa subsektor berpotensi tinggi seperti film, animasi, video, aplikasi, game, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual (DKV). Potensi ini masih perlu dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya serta para ahli untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif DIY agar lebih maju, berdaya saing, dan mampu merangkul serta menumbuhkan pelaku usaha.

Selain itu, Data ekonomi kreatif yang tersedia saat ini masih kurang optimal dan belum sepenuhnya mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan data yang komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti jenis usaha ekonomi kreatif, jumlah pelaku usaha, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif, nilai investasi sectok ekonomi kreatif dan elemen-elemen penting lainnya. Pendataan yang akurat ini krusial untuk perencanaan pembangunan yang efektif, mengingat karakteristik ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, melintasi batas wilayah, dan menyentuh berbagai kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelatihan dan bimbingan teknis sangat diperlukan. Upaya ini bertujuan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

untuk mengembangkan potensi sektor ekonomi kreatif, serta mengidentifikasi dan mendorong pengembangannya secara optimal di DIY.

2.4.2.3.3 Urusan Pertanian

1.) Alih fungsi lahan pertanian produktif

Berdasarkan statistik BPS Provinsi DIY periode 2010-2022, lahan sawah di wilayah DIY mengalami pengurangan rata-rata sebesar 439,46 hektar setiap tahunnya. Fenomena ini didorong oleh alih fungsi lahan yang intensif di kawasan penyangga kota yogyakartaserta adanya pembangunan proyek strategis nasional yang melintasi wilayah DIY. Selain itu, upaya pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat kabupaten masih belum optimal, tercermin dari fakta bahwa hingga tahun 2023 baru Kabupaten Sleman yang memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Meskipun didalam Peraturan Daerah DIY no 5 tahun 2023 tentang RTRW telah mencantumkan luasan lahan yang ditetapkan kedalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun belum ada tindak lanjut dari kabupaten mengenai lokasi yang masuk menjadi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Selaian itu seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di DIY makan kebutuhan tempat tinggal juga semakin meningkat yang juga memicu konversi lahan pertanian ke non pertanian.

2.) Tingkat kesejahteraan petani belum optimal

Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani di DIY pada Oktober 2024 mengalami peningkatan menjadi 105,5 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, melebihi ambang batas kesejahteraan yang ditetapkan sebesar 100. Meskipun demikian, kondisi kesejahteraan petani masih belum merata, terlihat dari NTP subsektor perikanan dan peternakan yang masih di bawah 100. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas kesejahteraan antar subsektor pertanian. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah rendahnya efisiensi usaha tani dan kurang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

optimalnya penerapan prinsip-prinsip agribisnis. Selain itu, data Survei Pertanian Antar Sensus tahun 2018 menunjukkan dominasi rumah tangga petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

3.) Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

Data dari Sensus Pertanian 2023 (BPS Provinsi DIY, 2023) menunjukkan bahwa jumlah petani milenial yang berumur 19–39 tahun sebanyak 37.141 orang, atau sekitar 8,87% dari petani di DIY. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023, jumlah usaha pertanian di DIY tahun 2023 sebanyak 431.705 unit, yang berarti mengalami penurunan 26,18% dari tahun 2013 yang sebanyak 584.802 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa Usaha Tani Perorangan (UTP) sebanyak 431.133 unit (99,87%), sedangkan Usaha Pertanian Berbadanhukum (UPB) sebanyak 35 unit (0,01%), dan Usaha Tani Lainnya (UTL) sebanyak 537 unit (0,12%). Selain itu, berdasarkan data Statistik Sumber Daya Manusia Pertanian (Kementerian Pertanian, 2024) dapat diketahui bahwa kelompok tani di DIY masih didominasi oleh kelompok tani kelas pemula sebesar 34,62%.

4.) Perubahan iklim yang berdampak pada penurunan produksi pertanian

Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 454,27 ribu ton gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 79,84 ribu ton GKG atau 14,95 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 534,11 ribu ton GKG. Produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 258,04 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 45,35 ribu ton atau 14,95 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 303,39 ribu ton. demikian pula pada produksi tanaman hortikultura bawang merah. Penurunan produksi ini sebagai imbas dari perubahan iklim yang melanda dunia, yang mengakibatkan badai el nino atau kekeringan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berkepanjangan. Sementara ketersediaan air pada perairan umum juga mengalami kekeringan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pertanian. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah menyalurkan beberapa bantuan irigasi perpompaan namun belum mampu memenuhi kebutuhan air pertanian karena keterbatasan sumber air, terutama di kabupaten Gunungkidul. Sementara sumber air dari sungai bawah tanah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatassan biaya dan energi untuk mengangkat air sungai ke permukaan. Kekeringan juga berdampak pada peternakan yang mengakibatkan berkurangnya populasi sapi dan produksi susu karena sumber hijaun pakan ternak yang terbatas.

5.) Keterbatasan komoditas untuk memenuhi Program Makan Siang Bergizi (PMBG)

Program makan bergizi gratis merupakan peluang sekaligus ancaman bagi daerah, menjadi peluang karena mampu meningkatkan perekonomian dari sektor pertanian, namun menjadi ancaman apabila daerah tidak mampu mencukupi *supply* kebutuhan untuk daerahnya sendiri. DIY memiliki keterbatasan dalam produksi pada beberapa komoditas pertanian. DIY hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri untuk komoditas padi, cabai merah dan bawang merah, sementara untuk kebutuhan sayur mayur dan bawang putih masih harus didatangkan dari luar wilayah, hal ini dikarenakan topografi DIY tidak memungkinkan untuk budidaya sayur mayur seperti kentang, wortel, brokoli, kol, bunga kol dan bawang putih, meskipun untuk kategori sayur yang lain masih bisa dibudidayakan oleh petani lokal DIY. Sementara itu untuk kebutuhan susu segar, produksi peternak DIY sudah habis terserap oleh industri sehingga perlu alternatif upaya untuk meningkatkan produksi susu di DIY, salah satunya dengan pemanfaatan susu kambing. Namun susu kambing tidak populer karena harga jualnya yang cukup tinggi. Berkurangnya populasi sapi perah juga menjadi ancaman pada produksi sapi perah, belum pulihnya populasi sapi perah pasca wabah PMK menjadi kelemahan produksi susu di DIY. Dibukanya keran impor susu di Indonesia juga menjadi ancaman pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

produksi susu di DIY yang menyebabkan harga jatuh dan mengurangi minat petani untuk mengusahakan peternakan sapi perah. Produksi susu sapi pada tahun 2024 sebesar 3.774.411 liter, dan untuk kebutuhan PMBG sendiri mencapai 468,46 liter per tahun. Sedangkan untuk produksi daging sapi DIY pada tahun 2024 sebanyak 5.136,54 ton dan kebutuhan daging untuk PMBG mencapai 750,3 ton per tahun.

2.4.2.3.4 Urusan Kehutanan

1.) Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan Belum Optimal

Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan bersumber dari produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan (hutan rakyat) yang dikelola oleh kelompok tani hutan (KTH). Meskipun berdasarkan data realisasi tahun 2024 nilai produksi sektor kehutanan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.103.212.851,- (12,3%) atau meningkat menjadi Rp. 28.342.896.021,- dibandingkan nilai produksi sektor kehutanan di tahun 2023 sebesar Rp. 25.239.683.170,- namun demikian apabila dihitung berdasarkan rasio antara produksi sektor kehutanan dan luas kawasan hutan (19.133.95 ha) dan hutan rakyat (65.886.56 ha) sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 333.365 /ha/tahun.

2.) Penanganan lahan kritis masih belum optimal

Penanggulangan lahan kritis merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan pada penyelenggaraan pemerintahan urusan kehutanan di DIY. Di samping sebagai indikator kinerja, penanganan lahan kritismerupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan serta disaat yang bersamaan sekaligus berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di DIY dari komponen indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Berdasarkan realisasi kumulatif penanganan lahan kritis DIY, realisasi penanganan sampai dengan tahun 2024 sebesar 4.48% atauseluas 1.467,42 ha dari sasaran lahan kritis dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 seluas 35.902,62 ha. jika dibandingkan dengan sasaran luas lahan kritis yang tetapkan, realisasi tersebut sangat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kecil sehingga penanganan lahan kritis secara lintas sektor menjadi strategis untuk diselesaikan.

2.4.2.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1.) Masih terdapat penduduk yang belum terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah 100%, namun masih ada 4.498 KK yang masih menyalur meliputi kategori rumah tangga bersubsidi maupun non subsidi. Rumah tangga berlistrik menyalur ini belum menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga diperlukan penanganan khususnya untuk rumah tangga yang masukdalam kategori subsidi atau rumah tangga miskin.

2.) Masih terdapat pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Data pemegang izin usaha ketenagalistrikan pada tahun 2024 adalah 520 pengguna dengan jumlah pelaksanaan izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan adalah 105 izin atau setara dengan 20,19% dari keseluruhan yang berizin sehingga pemegang izin usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan. Masa berlaku IO/IUPTLS maksimal 5 tahun. Penentuan izin usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Apabila terdapat parameter penilaian turun dan mengakibatkan turunnya penilaian, maka pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang semula sesuai keselamatan ketenagalistrikan menjadi menjadi tidak sesuai keselamatan ketenagalistrikan. Pemegang izin tersebut dapat digantikan oleh pemegang izin lain yang penilaiannya sesuai keselamatan ketenagalistrikan.

3.) Masih tingginya pemanfaatan air tanah dalam

Pengguna air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan kegiatan bukan usaha. Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, dan bahan pembantu atau proses produksi. Pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air, tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, dan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat, wajib memperoleh izin dari Gubernur. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, mengatur tentang izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah termasuk di dalamnya mengatur perizinan sumur eksisting. Pengguna air tanah yang memiliki izin harus dipastikan mengambil sesuai ketentuan, sementara itu pengguna air tanah yang diluar berizin diindikasikan masih terjadi. Apabila pengguna air tanah yang telah mendapatkan izin memanfaatkan air tanah dalam melebihi ketentuan maka langkah yang dilakukan adalah menyampaikan data tersebut ke Badan Geologi, Kementerian ESDM untuk pemberian sanksi sesuai kewenangan perizinan air tanah berdasarkan KepMen ESDM No 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Sampai dengan tahun 2024 kondisi tingkat pengusahaan air tanah di DIY masih cukup rendah, yaitu rasio Jumlah Volume Pengusahaan Air Tanah terhadap Jumlah Volume Cadangan di angka kurang dari 10%. Namun masih ditemukan pengguna air tanah yang menjadi Wajib Pajak tidak memasang dan memastikan meteran air berfungsi dengan baik, selain itu belum semua pengguna air tanah yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menjadi Wajib Pajak menganggarkan biaya untuk pembelian meteran air. Dalam rangka meningkatkan usaha konservasi air tanah yang berkelanjutan telah dilakukan kajian Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2024 di mana terdapat potensi kenaikan rasio volume pengusahaan dibandingkan dengan volume cadangan dinamis yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan pada kajian tersebut, batas cadangan dinamis yang dimanfaatkan dipersempit menjadi 40% dari total cadangan dinamis (sebelumnya 60%).

4.) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah.

Bauran energi yang telah dicapai 93,09% minyak bumi dan 6,91% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

5.) Pendelegasian pengelolaan pertambangan ke daerah perlu ditindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

a) pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
b) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
c) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a) pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b) penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;

c) pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

2.4.2.3.6 Urusan Perdagangan

1.) Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2022 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan di DIY masih relatif rendah yaitu sebesar 35,86 juta rupiah per tahun. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp42,48 juta rupiah per tahun. Produktivitas sektor perdagangan ini mestinya masih dapat ditingkatkan lagi mengingat posisi DIY sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah jawa bagian selatan. Selain itu, pergerakan wisatawan maupun aktivitas pendidikan, juga dapat menjadi potensi penggerak kegiatan perdagangan lokal dan regional.

2.) Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Sampai dengan November 2024, inflasi Yogyakarta tahun berjalan (*year to date*) mencapai 2,60%. Permasalahan kenaikan harga-harga ini bahkan menjadi perhatian besar presiden dan pemerintah pusat. Meskipun inisiatif pengendalian inflasi telah segera dilakukan, namun potensi ketidakstabilan harga masih menjadi ancaman terutama dengan belum kondusifnya situasi perekonomian dan politik global. Gangguan rantai pasok antar negara berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas tertentu.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

3.) Masih rendahnya nilai ekspor DIY

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2023, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,21% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 583,3 Juta US$ (BPS).Jika dibandingan dengan tahun sebelumnya, ekspor DIY tahun 2023 turun 19,03 persen. Kondisi tersebut disebabkan pengaruh kondisi global yang berdampak pada ketidakpastian kondisi politik dan perekonomian global sehingga berpengaruh pada rute yang dilalui untuk ekspor, mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal.

4.) Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring

Mengacu pada Buku Profil Perdagangan Indonesia 2022, sekitar 52,25% pelaku usaha perdagangan di DIY yang memanfaatkan internet. Angka ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya mencapai 37%. Namun demikian, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, disebutkan bahwa sekitar 6 persen dari total nilai penjualan diperoleh melalui penjualan secara online dan 17 persen dari total nilai pembelian adalah melalui pembelian secara *online*. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

5.) Belum adanya Distributor level Dua (D2) di DIY

Pengembangan distributor D2 (Distribusi Dua) memiliki tujuan untuk memperlancar jalur distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Model distribusi ini mencakup distribusi langsung dari petani atau produsen pangan ke pasar tradisional atau pengecer di daerah terpencil dan pedesaan. Sistem distribusi ini memerlukan infrastruktur yang baik dan penggunaan teknologi untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasokan, guna

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

memastikan harga pangan tetap terjangkau dan pangan tetap segar serta aman dikonsumsi. Pengembangan distributor ini juga dapat mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor distribusi pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dengan harga yang wajar.

6.) Sistem tata niaga pangan yang belum efisien

Pada sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

2.4.2.3.7 Urusan Perindustrian

1.) Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan

industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukan kecenderungan pelambatan. Pada kurun waktu 2019-2024 rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan sebesar 2,31% dibawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 3,56%. Adanya gap tersebut mencerminkan bahwa peningkatan efisiensi dan kontribusi output sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal. Padahal sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi perekonomian di DIY, baik dari sisi penciptaan lapangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kerja maupun kontribusi terhadap perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain pelambatan output produksi akibat menurunnya daya saing dan kapasitas produksi pelaku industry lokal, ketergantungan terhadap sektor informal dan IKM yang memilik keterbatasan dalam teknologi, serta tingginya ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik.

2.) Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan kemitraan dan permodalan

Profil Industri Mikro dan Kecil BPS Provinsi DIY tahun 2023 menunjukan dari total 134.025 usaha/perusahaan IMK di DIYada sebanyak 57,92% mengalami kesulitan usaha. Persentase tersebut naik dari tahun 2022 yang menyatakan bahwa 48,03% IMK di DIY mengalami kesulitan. Usaha IMK pada kelompok industry makanan terbanyak mengalami kesulitasn yakni sebesar 41,41%. Sementara itu apabila ditinjau dari aspek kesulitan permodalan, IMK di Kabupaten Gunungkidul mengalami kesulitan permodalan terbesar diantara Kab/Kota lainnya yakni sebesar 34,78% , sementara Kabupaten Kulon Progo persentase usaha yang mengalami kesulitan permodalan terkecil dibawah 30%. Partisipasi usaha IMK yang menjalin kemitraan juga masih cukup rendah hanya sebesar 4,38%. Lembaga yang berperan besar dalam menjalin kemitraan dengan IMK adalah pihak swasta, sementara koperasi dan bumn/bumd yang mampu menjalin kemitraan masih cukup rendah. Program-program kemitraan dari pemerintah pusat/daerah tidak banyak dimanfaatkan oleh IMK hanya sebesar 4,55%. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah yang berperan aktif dalam menjalin kemitraan dan membuat program strategis dalam rangka mendorong kemajuan usaha IMK di DIY.

3.) Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melaui *Making Indonesia* 4.0, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia; dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang bersakala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22% yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

4.) Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, per Juli 2024 tercatat 171 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga produk-produk lain seperti batik, aksesoris rajutan, permesinan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12% hingga 99%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.2.3.8 Urusan Transmigrasi

1.) Alokasi Program transmigrasi dari pemerintah pusat dan ketersediaan lahan yang terbatas

Program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan pemerintah. Data menunjukkan bahwa minat masyarakat DIY terhadap program transmigrasi masih signifikan, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Keinginan untuk merubah nasib, meningkatkan taraf hidup, dan mencapai kesejahteraan keluarga merupakan faktor-faktor utama yang mendorong partisipasi mereka dalam program transmigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa program transmigrasi masih relevan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, keterbatasan alokasi dan ketersediaan lahan berdampak langsung pada jumlah calon transmigran yang dapat berpartisipasi. Banyak masyarakat yang berminat mengikuti program ini, namun karena kuota yang terbatas dan ketersediaan lahan yang belum memadai, para calon transmigran harus antri/menunggu atau bahkan gagal mendapatkan kesempatan untuk bertransmigrasi. Keberhasilan program transmigrasi tidak hanya bergantung pada penyediaan lahan oleh pemerintah, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi para transmigran di lokasi baru. Maka Pemda DIY melakukan pelatihan dan pendampingan yang intensif untuk mengembangkan produk atau komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi daerah tujuan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan para transmigran.

2.4.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.4.2.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

1.) Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja urusan hukum dan HAM, terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Dalam proses penyusunan dan pembentukan produk hukum provinsi
    a. Perencanaan produk hukum daerah belum mengoptimalkan peran naskah akademis;
    b. Pembahasan rancangan peraturan daerah masih menyesuaikan jadwal di DPRD, sehingga penetapan peraturan daerah tidak dapat ditentukan secara pasti;
    c. Penyusunan produk hukum daerah belum mengoptimalkan rekomendasi hasil kajian;
    d. Evaluasi produk hukum daerah yang disharmoni dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi belum optimal;
    e. Tindak lanjut amanat atas peraturan daerah ke dalam peraturan gubenur belum optimal.
2. Dalam proses pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota
    a. Pengajuan produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan;
    b. Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten/Kota;
    c. Terdapat muatan substansi yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. Terdapat rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang masih tumpang tindih dengan produk hukum kabupaten/kota yang berlaku;
    e. Masukan dari OPD teknis di level provinsi terhadap produk hukum Kabupaten/Kota belum optimal.
3. Dalam proses pelaksanaan bantuan dan layanan hukum
    a. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan nonlitigasi tidak dapat ditentukan secara pasti;
    b. Dokumen pendukung sebagai bahan telaah tidak selalu tersedia dan mudah diakses;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Data dukung pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum sesuai dengan format baik teknis maupun substantive;
d. Dokumen dan informasi terkait permasalahan litigasi dan nonlitigasi yang disampaikan OPD kurang lengkap, sehingga belum dapat menjadi dokumen pendukung dalam penyelesaian permasalahan litigasi dan nonlitigasi;

4. Dalam proses penyebarluasan serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
    a. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang masih sektoral;
    b. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data belum terpadu;
    c. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih rendah;
    d. Penerapan keamanan sistem informasi dan komunikasi yang belum optimal.

2.) Kualitas Pengadaan Barang/Jasa di DIY masih perlu ditingkatkan

Hal ini didasarkan pada capaian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pada Bela pengadaan dan Katalog Lokal DIY dibandingkan dengan Pagu Anggaran e-Purchasing belum memenuhi target nasional sebesar 75%.
2. Persentase jumlah paket pengadaan yang dilakukan pencatatan, transaksional dan tender/seleksi melalui SPSE baru mencapai 54,94% sehingga masih perlu ditingkatkan.
3. Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum memenuhi 24 unsur kematangan level 4 (level strategis).
4. Persentase peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemda DIY baru mencapai 52,65%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.2.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

1.) Sarana dan Prasarana serta Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Terkait sarana dan prasarana, tahun 2026 merupakan tahun ketiga pembangunan gedung DPRD dari tahun jamak yang dimulai tahun 2024. Kemudian terkait DPRD, pada tahun 2024 ditetapkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atributnya. Selain tunjangan kesejahteraan, pimpinan DPRD memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas dan belanja rumah tangga. Sedangkan untuk Anggota DPRD dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.

2.4.2.5 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.4.2.5.1 Perencanaan

1.) Target indikator makro pembangunan daerah belum semuanya tercapai.

Sampai dengan tahun 2023, target indikator makro pembangunan daerah masih terdapat yang belum tercapai. Target indikator yang belum tercapai diantaranya *inclusive growth index,* pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan wilayah, IPM, dan IPK. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas-sektor perencanaan belum optimal. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.) Sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah untuk mengatasi rendahnya kapasitas fiskal belum dapat terealisasikan.

Sampai dengan tahun 2023, sumber alternatif pendanaan sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal DIY untuk melaksanakan pembangunan daerah masih belum dapat terealisasi. Hal ini ditunjukan skema pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diinisiasi oleh DIY belum dapat direalisasikan.

2.4.2.5.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1.) Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.

2.) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta

Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapainfrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta.Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, hingga saat ini baru 49,56% pegawai yang telah dipetakan potensinya. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan manajemen talenta membutuhkan akuisisi, pengembangan, penghimpunan, dan penghargaan terhadap talenta.

Proses pengembangan talenta membutuhkan pengembangan kompetensi diantaranya melalui *corporate university*. Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensiPada tahun 2023 jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 9.209 orang. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga.

Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri SipilPada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat “sangatbaik” dalam penerapan Sistem Meritsetelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun demikian, Pemda DIY masih terdapat catatan penerapan sistem merit, salah satunya terkait dengan kedisiplinan pegawai, dari data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Daerah DIY tahun 2021 hingga 2022, jenis hukuman disiplin (hukdis) sedang jumlahnya mengalami kenaikan. Di tahun 2021 ditemukan 3 pelanggaran yang mengakibatkan penjatuhan hukdis sedang, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 4 pelangaran.

Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian Layanan yang dilakukan oleh BKD ditujukan untuk (data jumlah seluruhpegawai). Dengan jumlah pegawai lebih dari 13.000, maka diperlukan sarana prasarana pelayanan secara fisik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan Big Data serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan gedung negara yang memadahi sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

3.) Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan PemerintahDaerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran di samping karena alokasi anggaran yang harus diprioritaskan untuk belanja lain yang bersifat wajib/mengikat. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi *Corporate University* melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang *Corporate University* Pemerintah DIY. Dengan demikian, pengembangankompetensi aparatur di lingkungan Pemda DIY, meskipun sudah ada OPD yang menjadi *leading sector* (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan *corporate university*.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Melalui corporate university, seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

4.) Dinamika kebijakan terkait kepegawaian

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam roadmap RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yangtahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumberdaya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

Sarana prasarana pendukung sesuai standar dan persyaratan akreditasi LAN Sebagai pusat pengembangan kompetensi, dari sisi infrastruktur unit kerja Pendidikan dan Pelatihanmemerlukan sarana prasarana yang ramah difabel, Pengembangan kamar asrama sesuai standar hotel berbintang, *mobil shuttle* untuk peserta PKN, sarana prasarana olahraga, *smoking area*, pengembangan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengembangan perpustakaan, pengembangan sarana prasarana *smart learning (learning management system, campus management system, content management system, knowledge management system).*

2.4.2.5.3 Urusan Keuangan

1.) Pembinaan BUMD dan BUKP. PT Taru Martani

masalah kerugian atas investasi emas derivatif yang dilakukan oleh mantan Direktur PT Taru Martani, pada saat ini dicatat sebagai piutang perusahan sesuai asas akuntansi yang berlaku umum. dalam hal ditetapkan keputusan dari pengadilan mengenai permasalahan tersebut maka diperlukan adanya perlakuan akuntansi terhadap piutang dimaksud, yang memungkinkan akan mengurangi laba PT Taru Martani. Berkurangnya laba BUMD membawa konsekuensi terhadap besaran dividen yang akan diberikan kepada Pemda DIY. Perlu ada kebijakan yang diambil dalam rangkaian permasalahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tersebut dan perlu pendampingan terhadap PT Taru Martani agar dapat mempertahankan kinerja perusahaan.

Perumda Air Bersih Tirtatama (PDAB Tirtatama): masih belum optimalnya penyerapan air bersih oleh PDAM Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga pendapatan penjualan air belum dapat mengcover beban biaya produksi. Selain itu, tarif penjualan air bersih pada PDAB Tirtatama sebesar Rp2.250 per liter/detik masih jauh dibawah harga pokok produksi atau belum dapat memenuhi *Full Cost Recovery* (FCR). Permasalahan tersebut mengakibatkan PDAB Tirtatama masih berada pada kondisi rugi dan membutuhkan subsidi dari Pemda DIY untuk menjaga kelangsungan pelayanan penyediaan air bersih. Selain subsidi, untuk dapat melakukan pengembangan usaha agar dapat menjangkau wilayah pelayanan air bersih yang lebih luas, maka perlu biaya investasi untuk pembangunan jaringan distribusi baru. Untuk pemenuhan kebutuhan investasi dimaksud perlu adanya tambahan penyertaan modal berupa uang dari Pemda DIY.

BUKP: proses transformasi kelembagaan BUKP yang akan mulai berproses di tahun 2026 memiliki banyak konsekuensi. Transformasi kelembagaan BUKP meliputi restrukturisasi organisasi BUKP seperti penggabungan manajemen BUKP pada suatu Kabupaten/Kota menjadi 1 (satu) PT LKM, penggabungan laporan keuangan, rekrutmen Direksi dan Komisaris PT LKM BUKP, proses perijinan PT LKM BUKP di OJK dan Kemenkumham, dan sebagainya. konsekuensi yang akan muncul dari transformasi tersebut antara lain diperlukan biaya operasional PT LKM BUKP, biaya pengurusan izin di OJK sesuai ketentuan, dan biaya untuk menyelesaikan kewajiban dalam hal ketika konsolidasi keuangan terdapat kewajiban yang harus diselesaikan oleh PT LKM BUKP atau pemilik dalam hal ini Pemda DIY. Biaya-biaya sebagai akibat dari transformasi kelembagaan BUKP akan berdampak pada berkurangnya laba dan dividen yang diberikan kepada pemda, serta diperlukan tambahan penyertaan modal kepada PT LKM BUKP agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

2.) Pembinaan Administratif BLUD

Jumlah BLUD di tahun 2025 sebanyak 27 BLUD yang terdiri dari 4 BLUD di bawah urusan kesehatan yaitu Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, dan Balai Pelatihan Kesehatan, serta 23 BLUD di bawah urusan pendidikan yaitu Balai Latihan Pendidikan Teknis, serta 22 BLUD SMK. Pada 2026 terdapat kemungkinan penambahan lagi BLUD SMK baru sesuai dengan kebijakan terkait Revitalisasi SMK yang mendorong sekolah kejuruan Pusat Keunggulan yang memiliki program Tefa untuk diusulkan menjadi BLUD. Dengan semakin bertambahnya jumlah BLUD membutuhkan dukungan sumber daya untuk melaksanakan pembinaan dalam proses pengelolaan keuangan.

3.) Pendapatan Daerah

Permasalahan yang mungkin muncul di tahun 2026 terkait pendapatan daerah di Pemda DIY, diantaranya: lambatnya pengembangan digitalisasi penerimaan daerah karena terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan IT; Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang keluarnya tidak tepat waktu; Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah menjadi terhambat karena kurangnya jumlah SDM secara kuantitatif.

4.) Penatausahaan.

Permasalahan yang mungkin muncul di tahun 2026 terkait penatausahaan keuangan di Pemda DIY, yaitu terbatasnya akses terhadap aplikasi SIPD RI sehingga penyelesaian masalah yang selama ini terjadi membutuhkan waktu lama (penyelesaian masalah hanya dapat melalui laporan *helpdesk* dengan respon yang cukup lama).

2.4.2.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1.) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan ketercapaian target pembangunan daerah masih rendah

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%.

Proses pemilihan rekomendasi yang digunakan sebagai referensi untuk perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

a.) pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;

b.) pemilahan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan

c.) penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022

Pada tahun 2023 terdapat 197 (81,74%) rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 241 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. Sebanyak 197 rekomendasiterpilih tersebut terdiri dari urusan pendidikan 3 rekomendasi, kesehatan 8 rekomendasi, pekerjaan umum dan penataan ruang 13 rekomendasi, energi dan sumber daya 6rekomendasi, perumahan dan kawasan permukiman 13 rekomendasi, pangan 7 rekomendasi, lingkungan hidup 8 rekomendasi, komunikasi dan informatika 20 rekomendasi, koperasi dan usaha kecil menengah 1 rekomendasi, kebudayaan 6 rekomendasi, pariwisata 39 rekomendasi, pertanian 25 rekomendasi, kehutanan 8 rekomendasi, perencanaan 22 rekomendasi, keuangan 5 rekomendasi, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 5 rekomendasi, perdagangan 2 rekomendasi, keistimewaan urusan kelembagaan 2 rekomendasi, dan keistimewaan urusan tata ruang 4 rekomendasi.

Hasil rekomendasi sebagian bersifat sangat teknis sehingga perlu diterjemahkan kembali untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan. Setiap tahun dilaksanakan minimal 1 penelitian mandiri oleh peneliti Bapperida DIY. Jumlah penelitian tersebut masih sangat kurang mengingat beragamnya perencanaan pembangunan yang harus didukung dengan bukti/data.

2.4.2.5.5 UrusanPenghubung

1.) Fasilitasi terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.

Pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY di Jakarta merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan tugas dalam urusan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penghubung. Dinamika serta cakupan masyarakat DIY di Jakarta yang luas mengakibatkan meningkatnya tuntutan atas fasilitasi yang diberikan.

2.) Dukungan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi untuk mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY masih perlu ditingkatkan.

Perlu penguatan dukungan terhadap penyelenggara unsur penghubung dan teknologi informasi dalam mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY.

3.) Tindak lanjut kebijakan terkait Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat Pemerintah telah menetapkan lokasi IKNsebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka antisipasi terhadap kebijakan selanjutnya terkait lokasi kedudukan Badan Penghubung perlu dipersiapkan.

2.4.2.6 Unsur Pengawasan Pemerintahan

1.) Metode pengawasan masih kurang optimal dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini sangat dinamis yang diantaranya dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, sistem informasi, dan dinamika teknis di lapangan. Guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan tindak lanjut berupa pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih inovatif, komprehensif, berbasis risiko, dan adaptif dengan memanfaatkan sistem informasi dan kerja sama lintas sektor.

2.4.2.7 Urusan Keistimewaan

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tingkat DIY. Terakhir penyusunan *Grand Desain* Keistimewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan. Secara umum. dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidahpembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah. sedangkan harapan masyarakat terhadapcapaian tujuan keistimewaaan untuk kesejahteraaan masyarakat sangat besar
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan. sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Secara khususterdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY di setiap urusan yakni :

1.) Urusan Kelembagaan

a. Pelaksana kegiatan diurusan kelembagaan semakin banyak terutama di Kabupaten/Kota terkait penugasan urusan keistimewaan
b. Kurang meratanya pemahaman terkait perencanaan keistimewaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Masih perlunya sosialisasi yang masif terkait kebijakan dalam pelaksanaan urusan
d. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan terkait urusan kelembagaan masih terbatas
e. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kegiatan keistimewaan

2.) Urusan kebudayaan

a.) Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
b.) Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Aset asset Budaya baik benda maupun tak benda
c.) Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat
d.) Berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya di Yogyakarta
e.) Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan (vandalisme)
f.) Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan tehadap cagar budaya dan warisan budaya, tantangan untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan pemeliharaan fisik warisan budaya cagar budaya
g.) Keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan budaya
h.) Perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi menjadi tantangan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya
i.) Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk seluruh masyarakat, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan kegiatan kebudayaan, mengekspresikan seni dan budaya.
j.) Upaya untuk menjadikan sumbu filosofi sebagai nominasi warisan dunia ke UNESCO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.) Urusan Pertanahan

a.) Pensertifikatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang cukup lama karena proses dari tahap pendaftaran hingga penerbitan yang sangat kompleks.

b.) Penanganan permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang terkendala karena informasi yang diberikan oleh pihak terkait kurang lengkap.

c.) Kegiatan penegasan batas wilayah yang terkendala akibat hilang/rusaknya patok batas, serta data narasumber yang kurang lengkap.

d.) Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan

e.) Beberapa lahan status lahannya tidak jelas

4.) Urusan tata ruang

a.) Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi;

b.) Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin "tenggelam" di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;

c.) Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan;

d.) Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya. baik yang bersifat publik maupun *private;*

e.) Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang "acak-acakan" sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota;

f.) Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan. pencemaran lingkungan. intensitas bencana. dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain;

g.) Belum optimalnya Koordinasi. integrasi. sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

h.) Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang;

i.) Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah. khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi. lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY;

j.) Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta. mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia. tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

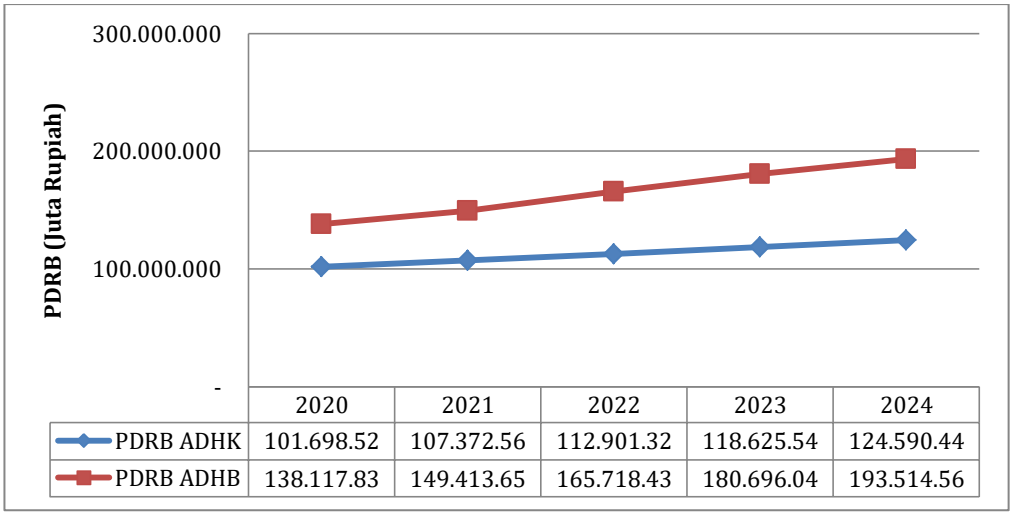
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2020-2024

Perekonomian DIY selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan perkembangan ekspansif. Pada tahun 2020, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp101,69 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp138,12 trilyun. Tren PDRB ADHK dan ADHB meningkat sampai tahun 2024 setelah menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid – 19. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp124,59 trilyun dan PDRB ADHB adalah Rp193,51 trilyun.



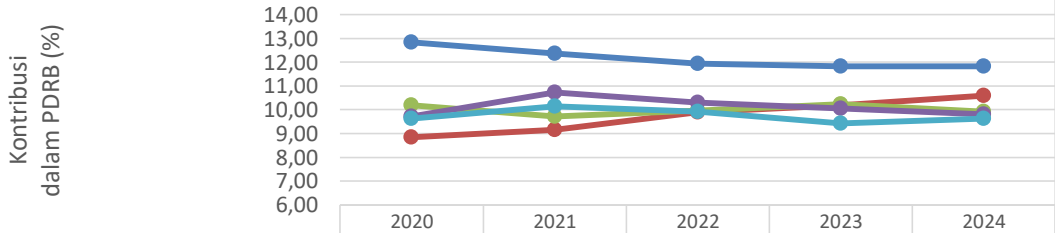
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK	101.698.52	107.372.56	112.901.32	118.625.54	124.590.44
PDRB ADHB	138.117.83	149.413.65	165.718.43	180.696.04	193.514.56

Sumber : BPS Provinsi DIY 2024

Gambar 3- 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2020 - 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan pangsa lapangan usaha dalam struktur PDRB menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut sampai tahun 2024. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini. Pada tahun 2024, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 11,83 %. Sementara itu, pangsa Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 10,59%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,92%, Informasi dan Komunikasi adalah 9,8 % serta konstruksi adalah 9,63 %,



	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	12,83	12,36	11,93	11,82	11,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,84	9,16	9,89	10,18	10,59
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,19	9,72	9,97	10,23	9,92
Informasi dan Komunikasi	9,72	10,72	10,30	10,06	9,8
Konstruksi	9,63	10,14	9,92	9,43	9,63

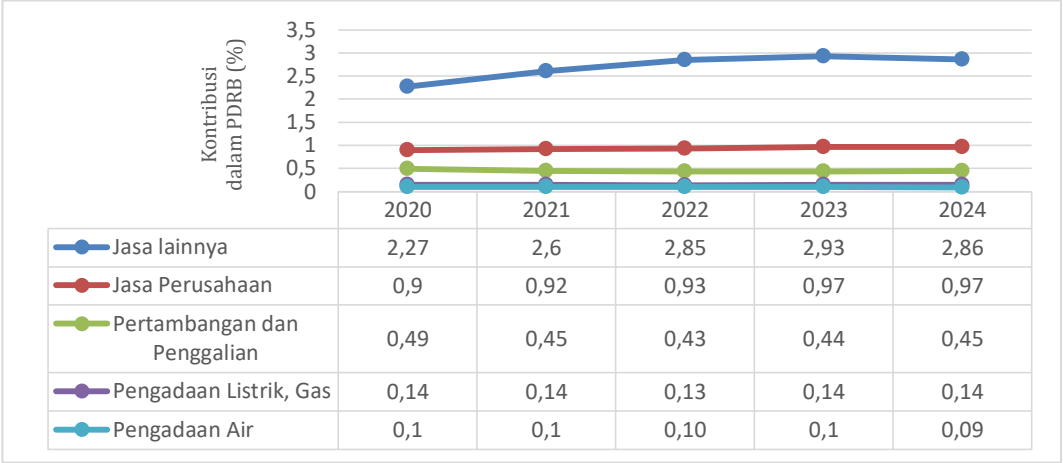
Sumber : BPS Provinsi DIY,
**)Triwulan IV*

Gambar 3- 2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2020 - 2024

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Meskipun demikian,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kontribusinya meningkat dari waktu ke waktu dengan tingkat penambahan yang kecil.



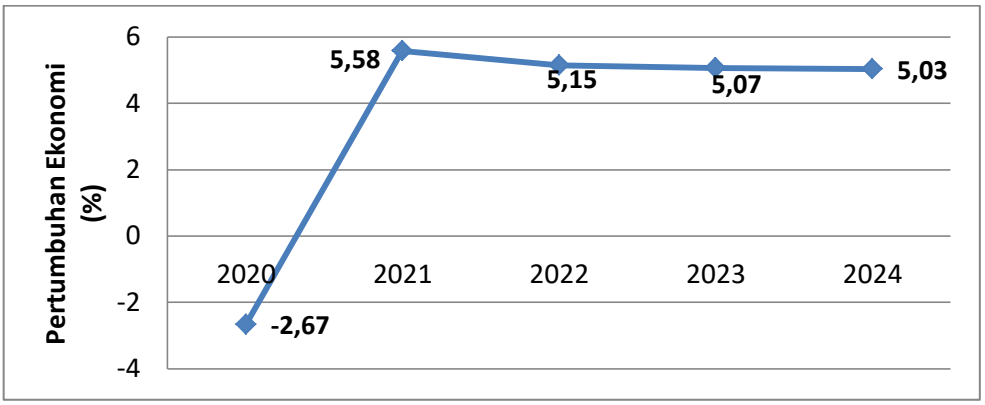
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa lainnya	2,27	2,6	2,85	2,93	2,86
Jasa Perusahaan	0,9	0,92	0,93	0,97	0,97
Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,45	0,43	0,44	0,45
Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14
Pengadaan Air	0,1	0,1	0,10	0,1	0,09

Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
** Triwulan IV*

Gambar 3- 3 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2020 - 2024 (%)

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Setelah terkontraksi di tahun 2020, perekonomian senantiasa mengalami ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi DIY positif selama periode 2021-2024.Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 5,58 %. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi melambat. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,03%.

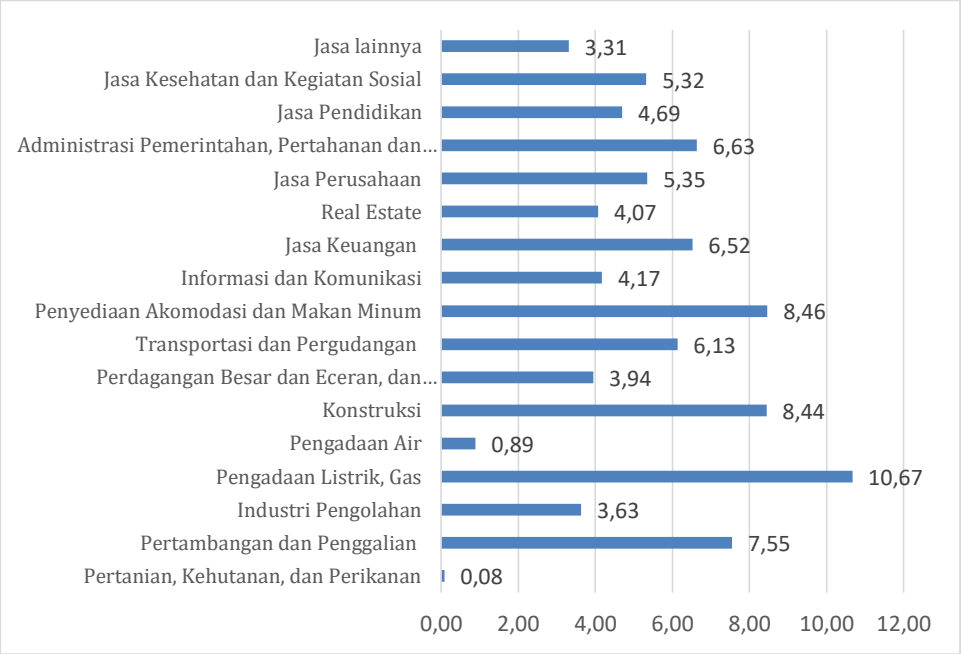


Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
** Proyeksi*

Gambar 3- 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2020 - 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2024 di dukung pertumbuhan semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 10,67%. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 0,08%.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 3- 5 Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2024

3.1.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2017-2019, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 semua mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65 % tapi kemudian menurun menjadi 53,25 %

Distribusi nilai output antar pengeluaran menunjukkan perkembangan yang dinamis selama tahun 2020 sampai 2024. Pengeluaran dominan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang pangsanya selalu di atas 60%. Distribusi pengeluaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ini di akhir periode adalah 61,80% yang menurun dari 61,90% di tahun sebelumnya. Pangsa terkecil adalah Perubahan Inventori yang hanya bernilai kurang dari 2%.

Tabel 3- 1 PDRB ADHK DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020 – 2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58.083.920	59.110.435	60.669.942	63.654.109,00	66.606.149,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.720.887	2.731.464	2.883.786	3.135.978,00	3.482.814,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.850.217	13.886.299	13.959.092	14.287.759,00	15.158.085,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25.995.231	28.127.239	29.774.647	31.709.055,00	34.215.014,00
Perubahan Inventori	1.208.612	1.312.912	1.283.142	1.202.099,00	1.232.934,00
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 160.347	2.204.212	4.330.715	4.636.543,00	3.895.453,00
Produk Domestik Regional Bruto	101.698.520	107.372.560	112.901.323	118.625.543	124.590.449,00

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Tabel 3- 2 Struktur PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (%), 2020 – 2024

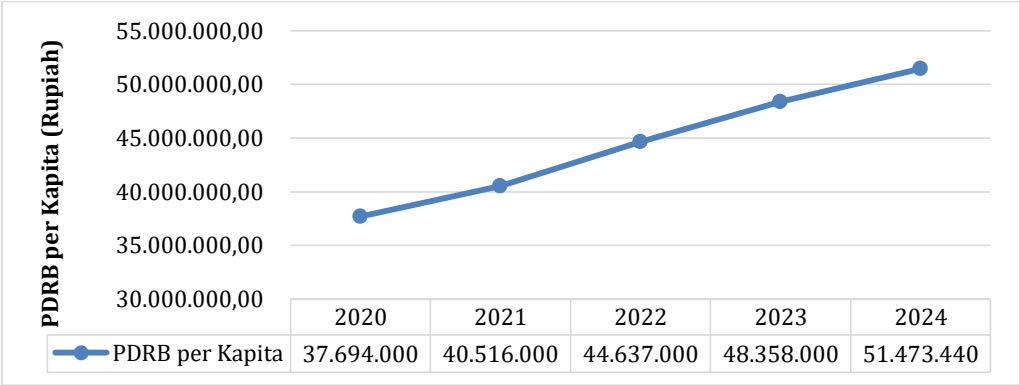
Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67,16	64,30	61,62	61,93	61,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,17	2,99	2,91	3,27	3,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,57	15,44	14,59	14,57	14,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,09	32,82	32,57	34,42	34,42
Perubahan Inventori	1,18	1,20	1,09	0,96	0,96
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20,17	-16,75	-12,77	-13,21	-14,03
Ekspor Barang Jasa				53,63	51,12
Dikurang Impor Barang dan Jasa				72,55	66,23

Sumber : BPS Provinsi DIY,2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.1.4 PDRB per Kapita

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan rata-rata yang diproksi dengan PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan grafik berikut ini:



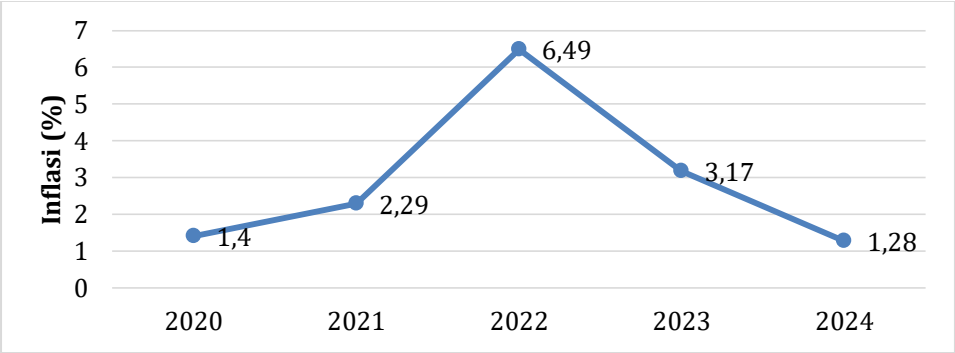
Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3- 6 PDRB ADHB per Kapita DIY (Rupiah), 2020 - 2024

PDRB per kapita tahun 2020 meningkat dari Rp37,69 juta menjadi Rp40,52 juta di tahun 2021. PDRB per kapita terus meningkat menjadi Rp51,47 juta di tahun 2024.

3.1.1.5 Inflasi

Tingkat inflasi DIY ditunjukkan oleh perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta. Selama tahun 2020 – 2024, perkembangan tingkat inflasi menunjukkan dinamika. Infasi meningkat dari tahun 2020 sampai 2022 dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,49%. Selanjutnya inflasi menurun di tahun 2024 mencapai 1,28 %.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 3- 7 Tingkat Inflasi IHK DIY (%), 2020 - 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.1.6 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun 2020 menuju tahun 2022 dan kemudian menurun kembali di tahun 2023. Namun di tahun 2024, jumlah angkatan kerja kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukan tren menurun selama 2020-2024, meskipun sempat meningkat di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 adalah 3,48% dengan jumlah penganggur terbuka sebanyak 78.670 orang. Dinamika indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2020 sampai 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3- 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2.221.690	2.261.440
Jumlah Penganggur Terbuka (orang)	101.850	106.430	94.950	81.980	78.670
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.57	4.56	4.06	3.69	3.48

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3.1.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2020-2024 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada sub periode 2020 – 2021 dan kemudian menurun pada sub periode berikutnya. Selama sub periode pertama jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 30.680 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2024 menurun sebanyak 2.920 orang.

Tabel 3- 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2020 - 2024 (Maret)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	475,72	506,4	454,76	448,47	445,55
Tingkat Kemiskinan (%)	12,28	12,8	11,34	11,04	10,83

Sumber: BPS Provinsi DIY

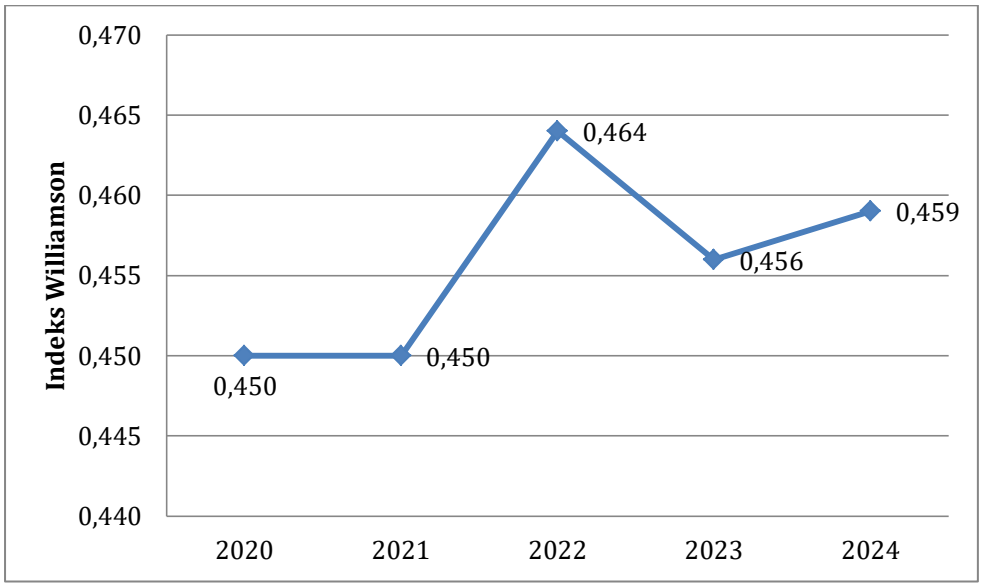
Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan 2021. Pada 2020, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 12,28%yang meningkat 12,8% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian menurun menjadi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

11,34% di tahun 2022 dan kemudian menurun kembali menjadi 10,83% di tahun 2024.

3.1.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan *Indeks Williamson* (IW) menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada tahun 2023 sampai 2024, ketimpangan regional menurun dengan *Indeks Willamson* turun dari 0,456 (2023) menjadi 0,459 (2024).



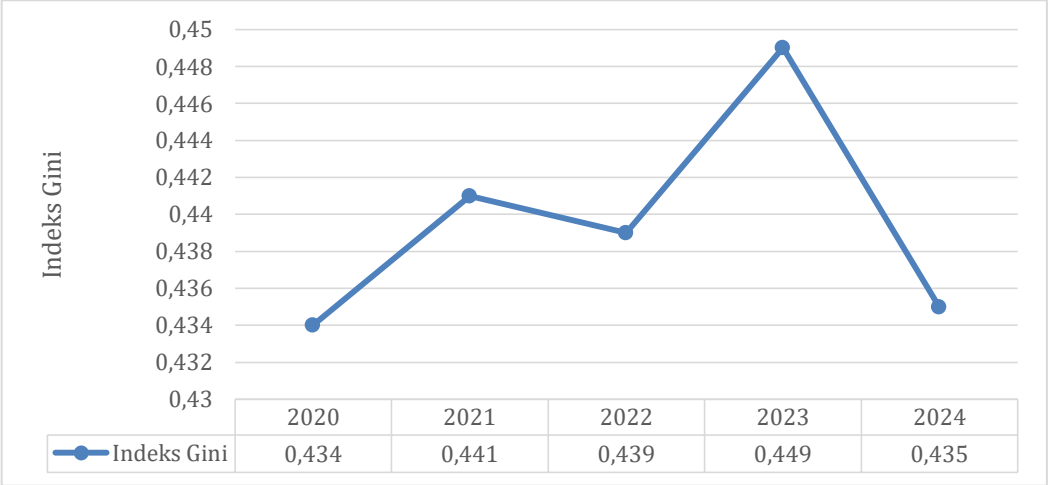
Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan

Gambar 3- 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2020-2024

3.1.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Ketimpangan meningkat dari 0,434 (2020) menjadi 0,449 (2023) Pada tahun 2024, Rasio Gini sempat menurun menjadi 0,435.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3- 9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2020 - 2024

3.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan 2026

Proyeksi perkembangan perekonomian global yang mengalami kontraksi diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian DIY. Kondisi perekonomian DIY diperkirakan mengalami ekspansi namun pertumbuhan positif tidak meningkat tinggi dibandingkan tahun 2023. Perkembangan ekonomi global dipengaruhi karena dampak perang dan kondisi politik dunia. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2025 dan 2026 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2025 dan 2026 didasarkan pada perkembangan proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif ekspansif namun secara konservatif. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat potensi konflik dan potensi perang dagang serta kendala jalur logistik internasional serta potensi peningkatan permintaan global yang relatif kecil. Kondisi perekonomian regional dan nasional masih dipengaruhi oleh menurunnya kelompok kelas menengah;
2. Dari sisi penawaran, kontribusi sektor-sektor yang selama ini mendominasi PDRB tersebut tetap diharapkan akan memberikan kontribusinya yang besar pada total produk daerah dengan peningkatan kapasitas yang bersifat minimal;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dari sisi permintaan, dominasi konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap memberikan kontribusi permintaan total namun pertumbuhannya tidak setinggi periode sebelumnya terutama dengan menurunnya proporsi masyarakat berpendapatan menengah.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2025 dan 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3- 5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026

No.	Indikator Ekonomi Makro	2025		2026	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	5,8	5,1	5,9
2.	PDRB per Kapita	53,10	55,1	55,45	56,03
3.	Inflasi (%)	3,8	2	3,5	2,1
4.	TPT (%)	4	3,12	3,3	2,8
5.	Kemiskinan (%)	10,60	10,10	10,38	9,97
6.	Indeks Gini	0,450	0,427	0,435	0,428
7.	Indeks Williamson	0,458	0,443	0,450	0,454

Sumber: Bapperida DIY diolah, 2025

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh sekitar 5,6%. untuk skenario optimis dan 4,5% untuk skenario pesimis seiring dengan dinamika sektor tersebut yang didorong salah satunya oleh program makan bergisi gratis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,3% untuk skenario pesimis dan 4,7% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat yang mempengaruh kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 8,8% untuk skenario pesimis dan 9% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang meningkat namun konservatif menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,6% untuk skenario pesimis dan 10,7% untuk optimis. Potensi dampak perang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dagang juga mempengaruhi kinerja ekspor DIY yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 akan berkisar 5,09 – 5,8%.

Kondisi politik internasional diperkirakan membaik dengan menurunnya intensitas ketegangan antar Negara dan perang dagang. Hal tersebut mendorong kondisi perekonomian 2026 berkinerja lebih baik dibandingkan tahun 2025. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh 5,3%. untuk skenario optimis dan 4,9% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,23% untuk skenario pesimis dan 5,11% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,28% untuk skenario pesimis dan 4,6% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat seiring dengan kondisi perekonomian nasional dan internasional yang membaik. Hal ini mempengaruh kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 8,8% untuk skenario pesimis dan 9% skenario optimis. Sementara itu perdagangan antar daerah dan negara diperkirakan meningkat yang mendorong perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,73% untuk skenario pesimis dan 10,9% untuk optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 adalah 5,1% sampai 5,9%;

3.1.2.2 PDRB per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tetap positif yang menunjukkan perkembangan ekspansif mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Pada tahun 2025, PDRB per kapita diperkirakan sebesar Rp53,10 juta sampai Rp55,10 juta yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09% sampai 5,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,10% sampai 5,9% akan mendorong perkiraan PDRB per kapita sebesar Rp55,45 juta sampai Rp56,03 juta.

3.1.2.3 Inflasi

Dinamika tingkat inflasi di DIY terjadi selama empat tahun terakhir ini. Meskipun demikian kinerja pengendalian inflasi telah menunjukkan capaian yang bagus di tahun 2024 dengan menurunkan inflasi dari 3,17% (2023) menjadi 1,15%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(November 2024). Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap di tahun 2025 dan 2026. Pemberian makan bergisi gratis diperkirakan dapat memacu inflasi jika penawaran bahan baku kurang memenuhi kebutuhan penyediaan makan, Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi serta meningkatnya kinerja sektor manufaktur. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2% sampai 3,8 % di tahun 2025 dan antara 2,1% sampai 3,5 % di tahun 2026;

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dinamika ekspansif kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja selama tahun 2025 dan 2026 mendorong tingkat pengangguran terbuka diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap hampir 20% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Perkiraan TPT selama tahun 2025 adalah berkisar 3,12% - 4% dan 2026 adalah 2,8% - 3,3%;

3.1.2.5 Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran diproyeksikan menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 dan 2026. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi dengan relatif rendahnya tingkat inflasi, kecuali potensi inflasi yang relatif di atas 4% akan mengurangi tingkat pengurangan kemiskinan. Prediksi tingkat kemiskinan di tahun 2025 akan berkisar 10,10% sampai 10,60% dan pada tahun 2026 berkisar antara 9,97% sampai 10,38%;

3.1.2.6 Indeks Gini

Pada tahun 2025 dan 2026, ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY diperkirakan menurun. Perbaikan pemerataan pendapatan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Proyeksi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini Tahun 2025 yaitu antara 0,427 sampai 0,450 dan 2026 adalah 0,428 sampai 0,435.

3.1.2.7 Indeks Williamson

Kebijakan affirmatif untuk mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Selatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemberdayaan masyarakat yang dikedepankan untuk membangun kawasan perdesaan akan mendorong dinamika industri, kecil dan menengah (IKM) yang mendominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68 % dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM di daerah yang selama ini masih tertinggal terutama di perdesaan dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pengembangan destinasi-destinasi baru di tiga kabupaten yang termasuk kawasan selatan DIY juga akan mendorong dinamika kinerja perekonomian di kawasan tersebut. Perkembangan tersebut diproyeksi akan mendorong ketimpangan pembangunan wilayah menurun. Proyeksi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson di tahun 2025 yaitu berkisar di antara 0,453 sampai 0,458 dan di tahun 2026 berkisar 0,450 sampai 0,454.

3.1.3 Keselarasan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)

Secara umum kerangka ekonomi makro DIY telah telah mengakomodir asumsi terkait proyeksi ekonomi makro DIY berupa proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif ekspansif namun secara konservatif. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat potensi konflik dan potensi perang dagang serta kendala jalur logistik internasional serta potensi peningkatan permintaan global yang relatif kecil. Asumsi tersebut searah dengan asumsi kondisi ekonomi global pada dokumen KEMPPKF 2026 yang secara umum menggambarkan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh antara lain masih berpotensinya kelanjutan perang dagang terutama antar AS dan Cina serta pergantian kepemimpinan di banyak negara yang menyebabkan perubahan kebijakan. Bahkan IMF pun memproyeksikan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perekonomian global tahun 2026 masih lemah yang antara lain ditandai dengan perdagangan global yang tumbuh melambat.

Meskipun demikian, dalam uraian proyeksi perekonomian domestik pada KEMPPKF yang menyatakan bahwa ada beberapa perkembangan positif yang memberikan sinyal ekspansif pada perekonomian nasional yang juga dapat berpengaruh pada perekonomian DIY. Perkembangan tersebut antara lain masih tumbuhnya perekonomian nasional sampai dengan triwulan I 2025 dan bahkan DIY dapat mencapai pertumbuhan sebesar 5,11%. Dasar perkembangan optimis antara lain dengan penguatan sektor pertanian sepanjang tahun 2025 dan sektor manufaktur yang tetap menjadi penopang perekonomian. Hal ini searah dengan proyeksi makro ekonomi DIY yang menyatakan bahwa kontribusi sektor-sektor unggulan akan tetap memberikan kontribusi yang besar pada PDRB DIY. Lebih lanjut, KEMPPKF dan proyeksi makro ekonomi DIY tetap memproyeksikan tetap meningkatnya peran konsumsi rumah tangga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan penentuan target ekonomi makro antara dokumen KEMPPKF dengan proyeksi makro ekonomi DIY, perbedaan tersebut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3- 6 Target Ekonomi Makro antara Dokumen KEMPPKF dengan Proyeksi Makro Ekonomi DIY Tahun 2026

Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)	
Proyeksi Indikator Makro DIY Tahun 2025	**Target KEMPPKF 2026**	**Proyeksi Indikator Makro DIY Tahun 2025**	**Target KEMPPKF 2026**
5,5 – 5,60	5,5 – 5,61	9,16	8,92 – 9,92

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, 2025 dan Bapperida DIY, 2025 (diolah)

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Arah pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh penentuan kebijakan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah DIY disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan menjadi modal utama terhadap keberhasilan pembangunan.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah ini dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada kebijakan keuangan daerah yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 , dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2026 telah menerapkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pengganti belanja bagi hasil bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada DIY, serta Opsen Pajak MBLB.

Penerapan opsen tersebut akan berpengaruh signifikan pada penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

   Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

   Terdapat alokasi DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendanaan DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan kualitas lingkungan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal (cukai ilegal), dan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Dana Alokasi Umum

   Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:

a. urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
b. urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

DAK terdiri atas:

a. DAK Fisik, merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
b. DAK Nonfisik, merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2026 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penerimaan Dana Keistimewaan, yaitu:

a. Disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berdasarkan rencana induk yang ditetapkan dengan Perda.
b. Selain rencana induk, dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program kegiatan kabupaten/kota sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan disinkronkan dengan rencana kerja K/L.
c. Rencana program dan kegiatan atas penggunaan dana keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang.

Dana Keistimewaan untuk urusan keistimewaan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan. Kewenangan urusan keistimewaan untuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan daerah Pemerintah Daerah DIY tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi, potensi sumber-sumber pendapatan daerah, pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Namun seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,88 dan apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025, peningkatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,13%, Pendapatan Transfer sebesar 3,24%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,31%. Proyeksi Dana Keistimewaan DIY pada Pendapatan Transfer menggunakan asumsi pesimis sesuai dengan Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dana Keistimewaan Daerah istimewa Yokyakarta Tahun Anggaran 2026 yang nantinya akan disesuaikan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Ikhtisar proyeksi Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3- 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027 (Rupiah)

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026	Proyeksi /Target pada Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.368.679.166.252,65	2.481.506.565.559,08	1.708.240.975.934,00	1.795.805.668.299,00	1.819.304.224.339,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.069.612.267.000,57	2.157.532.293.945,00	1.462.082.788.059,00	1.522.777.636.409,00	1.556.733.811.270,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.213.267.052,00	79.460.801.542,00	67.968.998.020,00	74.478.489.471,00	36.935.175.694,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.790.680.460,56	120.935.677.671,93	123.993.797.426,00	131.244.279.045,00	137.019.064.643,00
4.1.04	Lain-lain PAD	156.062.951.739,52	123.577.792.400,15	54.195.392.429,00	67.305.263.374,00	88.616.172.732,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026	Proyeksi /Target pada Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang Sah					
4.2	Pendapatan Transfer	3.463.926.176.823,00	3.535.479.452.702,00	3.309.663.362.631,00	3.416.907.541.631,00	3.883.438.624.490,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.463.090.270.403,00	3.534.495.647.472,00	3.308.682.436.000,00	3.404.726.615.000,00	3.882.567.331.000,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	1.372.725.809.224,00	1.396.157.452.432,00	1.200.000.000.000,00	1.581.157.350.000,00	2.061.410.108.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	80.876.155.000,00	12.089.917.000,00	8.452.393.000,00	-	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	106.084.972.357,00	114.358.785.000,00	113.604.866.000,00	107.719.505.000,00	88.140.721.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.267.622.165.192,00	1.337.180.068.000,00	1.371.652.284.000,00	1.204.880.401.000,00	1.224.852.487.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	635.781.168.630,00	674.709.425.040,00	614.972.893.000,00	510.969.359.000,00	508.164.015.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	983.805.230,00	980.926.631,00	12.180.926.631,00	871.293.490,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.955.658.016,00	8.084.153.000,00	7.605.500.000,00	7.857.248.000,00	7.576.500.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.950.630.000,00	8.084.153.000,00	7.605.500.000,00	7.857.248.000,00	7.576.500.000,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.028.016,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	5.840.561.001.091,65	6.025.070.171.261,08	5.025.509.838.565,00	5.220.570.457.930,00	5.710.319.348.829,00

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Daerah DIY menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

   a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
   b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
   c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

   Belanja Hibah tahun 2026 direncanakan untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Hibah Dana BOSP.

e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD.

2. Belanja Modal

   Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

   Alokasi belanja modal pada tahun 2026 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan rencana pengadaannya berdasarkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada dan sesuai dengan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

   a. pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja tranfer tahun 2026 terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Belanja bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selain itu, belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan ini dialokasikan pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan dengan memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

   Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling lambat pada TA 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut dialokasikan pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik dengan memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Pegawai

   Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai tersebut paling lambat pada TA 2027.

4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

   Dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

   1) Penggunaan atas hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
   2) Hasil penerimaan pajak rokokdialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok.

Alokasi belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya serta melengkapi informasi sumber pendanaannya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah selama 2 (dua) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, maka proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 5,08% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada belanja operasi naik sebesar 5,90%, belanja modal berkurang sebesar 19,11%, Belanja Tidak Terduga (BTT) berkurang sebesar 52,77%, dan pada belanja transfer naik sebesar 37,34.

Secara rinci Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2027, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3- 8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2027 (Rupiah)

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026	Proyeksi /Target pada Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1	Belanja Operasi	3.504.788.744.020,20	3.589.908.402.394,35	3.617.270.845.673,00	3.830.509.160.736,00	-
5.1.01	Belanja Pegawai	1.572.322.039.241,00	1.651.782.965.460,00	1.811.440.852.561,00	1.720.315.503.346,00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.945.486.879,20	1.155.896.100.440,35	1.257.242.069.759,00	1.476.743.586.477,00	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	74.269.644.598,00	75.368.890.530,00	96.029.746.301,00	93.766.620.563,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	583.965.119.370,00	653.554.770.630,00	421.062.271.052,00	506.336.495.850,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.286.453.932,00	53.305.675.334,00	31.495.906.000,00	33.346.954.500,00	-
5.1.07	Belanja Imbalan	-	-	-	-	-
5.2	Belanja Modal	745.354.723.452,00	659.153.310.940,95	708.569.177.994,00	573.161.470.143,00	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	169.306.929.192,00	35.792.256.125,00	-	21.960.400.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.110.825.035,00	204.099.193.397,00	162.795.056.675,00	144.693.086.257,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.886.570.710,00	220.538.449.546,95	301.061.894.630,00	218.886.055.311,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.450.247.009,00	182.299.322.051,00	237.092.472.566,00	178.558.949.000,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.437.651.506,00	11.562.606.421,00	7.519.754.123,00	8.902.979.575,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	162.500.000,00	4.861.483.400,00	100.000.000,00	160.000.000,00	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	198.487.268,00	20.000.000,00	31.760.589.370,00	15.000.000.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	198.487.268,00	20.000.000,00	31.760.589.370,00	15.000.000.000,00	-
5.4	Belanja Transfer	1.455.513.962.986,21	1.431.413.374.961,82	879.762.766.136,00	1.084.596.056.335,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	886.411.063.641,00	870.359.406.509,00	437.204.710.166,00	474.588.849.266,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	569.102.899.345,21	561.053.968.452,82	442.558.055.970,00	610.007.207.069,00	-
	TOTAL BELANJA DAERAH	5.705.855.917.726,41	5.680.495.088.297,12	5.237.363.379.173,00	5.503.266.687.214,00	6.083.432.258.829,00

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, yang digunakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

untuk pemanfaatan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) Penerimaan Pembiayaan

   Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Sumber Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Sumber penerimaan pembiayaan DIY pada tahun 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SILPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

   Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2026 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2024.

Berdasarkan analisis perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 serta dengan melihat target pada tahun 2025, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2026 sebesar Rp442,69 Miliar diasumsikan berasal dari pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp437,69 Miliar dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5 Miliar. Pemanfaatan SiLPA tersebut berasal dari pemanfaatan SiLPA BLUD dan SiLPA non-earmarked. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan pada tahun tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp160 Miliar diperuntukkan untuk Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD sebesar Rp155 Miliar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5 Miliar. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3- 9 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 s.d 2027 (Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026	Proyeksi /Target pada Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6,1	Penerimaan pembiayaan	465.555.386.955,24	295.621.146.320,48	319.895.540.608,00	442.696.229.284,00	455.000.000.000,00
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	462.271.562.955,24	295.260.470.320,48	314.895.540.608,00	437.696.229.284,00	450.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	3.283.824.000,00	360.676.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1.06	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	465.555.386.955,24	295.621.146.320,48	319.895.540.608,00	442.696.229.284,00	455.000.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026	Proyeksi /Target pada Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.2	Pengeluaran pembiayaan	305.000.000.000,00	202.500.000.000,00	108.042.000.000,00	160.000.000.000,00	81.887.090.000,00
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	300.000.000.000,00	200.000.000.000,00	105.542.000.000,00	155.000.000.000,00	81.887.090.000,00
6.2.03	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian pinjaman daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	202.500.000.000,00	108.042.000.000,00	160.000.000.000,00	81.887.090.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		160.555.386.955,24	93.121.146.320,48	211.853.540.608,00	282.696.229.284,00	373.112.910.000,00

3.2.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2022-2027. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perkiraan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 10 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Rupiah)

Kode	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025	Proyeksi Tahun 2026	Selisih (Naik/Turun)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.025.509.838.565**	**5.220.570.457.930**	**195.060.619.365**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.708.240.975.934**	**1.795.805.668.299**	**87.564.692.365**
4.1.01	Pajak Daerah	1.462.082.788.059	1.522.777.636.409	60.694.848.350
4.1.02	Retribusi Daerah	67.968.998.020	74.478.489.471	6.509.491.451
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	123.993.797.426	131.244.279.045	7.250.481.619
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.195.392.429	67.305.263.374	13.109.870.945
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.309.663.362.631**	**3.416.907.541.631**	**107.244.179.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.308.682.436.000	3.404.726.615.000	96.044.179.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631	12.180.926.631	11.200.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.605.500.000**	**7.857.248.000**	**251.748.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.857.248.000	251.748.000
	Jumlah Pendapatan	**5.025.509.838.565**	**5.220.570.457.930**	**195.060.619.365**
5	**BELANJA DAERAH**	**5.237.363.379.173**	**5.503.266.687.214**	**265.903.308.041**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.617.270.845.673**	**3.830.509.160.736**	**213.238.315.063**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.811.440.852.561	1.720.315.503.346	-91.125.349.215
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.242.069.759	1.476.743.586.477	219.501.516.718
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301	93.766.620.563	-2.263.125.738
5.1.05	Belanja Hibah	421.062.271.052	506.336.495.850	85.274.224.798
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.495.906.000	33.346.954.500	1.851.048.500
5.2	**BELANJA MODAL**	**708.569.177.994**	**573.161.470.143**	**-135.407.707.851**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	21.960.400.000	21.960.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.795.056.675	144.693.086.257	-18.101.970.418
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.061.894.630	218.886.055.311	-82.175.839.319
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	237.092.472.566	178.558.949.000	-58.533.523.566
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.519.754.123	8.902.979.575	1.383.225.452
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	160.000.000	60.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**31.760.589.370**	**15.000.000.000**	**-16.760.589.370**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025	Proyeksi Tahun 2026	Selisih (Naik/Turun)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	31.760.589.370	15.000.000.000	-16.760.589.370
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**879.762.766.136**	**1.084.596.056.335**	**204.833.290.199**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	437.204.710.166	474.588.849.266	37.384.139.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	442.558.055.970	610.007.207.069	167.449.151.099,00
	Jumlah Belanja	**5.237.363.379.173**	**5.503.266.687.214**	**265.903.308.041,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-211.853.540.608**	**-282.696.229.284**	**-70.842.688.676,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**211.853.540.608**	**265.796.229.284**	**53.942.688.676,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**319.895.540.608**	**442.696.229.284**	**122.800.688.676,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	314.895.540.608	437.696.229.284	122.800.688.676,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**319.895.540.608**	**442.696.229.284**	**122.800.688.676,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**108.042.000.000**	**160.000.000.000**	**51.958.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	105.542.000.000	155.000.000.000	49.458.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**108.042.000.000**	**160.000.000.000**	**51.958.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**211.853.540.608**	**282.696.229.284**	**70.842.688.676,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam pidato visi dan misi pada tanggal 7 Agustus 2022 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 menyampaikan visi ***"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.***," dan misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasardalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.,"

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI (*Inclusive Growth Index*)	
		Indeks Kebahagiaan	
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	
			2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	
			3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Sumber: RPJMD DIY tahun 2022-2027

4.2 PERUMUSAN TEMA PEMBANGUNAN

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di DIY disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan mempedomani kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2026. Selain itu juga melakukan internalisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – SDG's).

4.2.1 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tema RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 merupakan tahap kedua dari Lima Tahun pertama (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045. Posisi RKPD 2026 dalam RPJPD tersebut menjadi strategis karena menjadi fondasi awal dari pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045 adalah: **"Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan".** Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat delapan misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui **Transformasi Tata Kelola** yang Demokratis dan Transparan
4. Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur
5. Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7. Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
8. Menciptakan kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah **Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, (dijiwai) Kebudayaan yang Adiluhung/Luhur,** dan **(harmoni/rajutan) Keistimewaan.** Dalam melaksanakan visi misi pembangunan di atas, dirumuskan arah kebijakan yang kemudian dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan. Setiap tahapan tersebut memiliki tema atau fokus prioritas spesifik yang tertuang dalam target pencapaian sasaran pokok. Tema atau penekanan pada tahapan pertama 5 (lima) tahunan yaitu periode 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Pembangunan.**

Selanjutnya Visi Misi Arah Kebijakan tersebut diturunkan ke dalam sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat DIY;
2. Meningkatnya Pendidikan di DIY yang Berkualitas dan Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Meningkatnya penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau di DIY;
6. Meningkatnya Peran Transformasi Digital;
7. Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro DIY;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

13. Terciptanya Keragaman Agama yang ber-Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas;
16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

4.2.2 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2026

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2022-2027. Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumberdaya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 yaitu:

1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat
2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik

Selanjutnya agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4- 2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup-kehidupan-penghidupan Masyarakat	1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasiskan sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan *start up business* 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia 5. Meningkatkan produktivitas penggunaan sumber daya alam lokal
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* dalam rangka pengembangan pengetahuan,	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
		Meningkatkan penawaran Investment *Project Ready to Offer* di wilayah selatan	Meningkatkan kerja sama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerja sama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerja sama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan *(resiliency)* dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya *Good Governance*	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemenuhan SPM	
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		yang berkelanjutan	

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Berangkat dari perumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang kemudian dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan untuk mengarahkan pencapaiannya maka Tema RKPD Tahun 2026 sebagai tahun ketiga RPJMD Tahun 2022-2027 dapat mengandung tema penguatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

4.2.3 Internalisasi Tema RKP Tahun 2026 dengan Tema RKPD Tahun 2026

Sesuai dengan arahan Presiden kebijakan pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan energi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, rumusan tema RKP Tahun 2026 yaitu:

"**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**"

Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional/Asta Cita.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Keterangan: *) Lima Direktif Presiden
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Gambar 2- 144 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Kedelapan Prioritas Nasional tersebut meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi,Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk, Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Swasembada pangan, energi, dan air, dapat diwujudkan apabila swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*). Adapun berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

4.2.4 Tema RKPD DIY Tahun 2026

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD DIY Tahun 2025-2045, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, dan memperhatikan tema RKP Tahun 2026, serta isu-isu strategis yang aktual, maka dirumuskan tema pembangunan tahun 2026 yaitu:

"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi DIY yang trendnya terus meningkat setiap tahunnya perlu diakselerasi agar capaiannya sesuai dengan target nasional.

2. Produktivitas Sektor Unggulan

   Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY melalui strategi-strategi penguatan. Sektor unggulan di DIY meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan industri manukfaktur.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Teknologi informasi didorong pemanfaatannya pada berbagai sektor terutama pada sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi .

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Daerah

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2026 *"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Rumusan Prioritas Pembangunan DIY tersebut dirumuskan untuk mewujudkan ketercapaian Panca Mulia yang tertuang di dalam Visi RPJMD. Prioritas Pembangunan tersebut juga telah diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 3 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	*Base-line*	Target Tahun
					2022	2026
1.	*"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"*	Penurunan tingkat kemiskinan	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	9,16
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,5-6,0
				Pendapatan Perkapita(Rp juta)	28,00	35,42
				TPT	4,06	3,01-3,31
				Inflasi	6,49	2-4
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,97
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	75,18
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,18
5.		Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA (91,09)	AA (93,15)
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,36)	Tinggi (81,96)
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	84,86
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	104,29

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

4.3.2 Penyelarasan Prioritas dan Sasaran Daerah dengan Nasional

Prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan dengan Prioritas Nasional. Pada tabel berikut ini disajikan penyelarasan prioritas dan sasaran daerah dengan prioritas dan sasaran nasional yang masih mengacu pada RKP tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 4 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah (RPJMN dan RKP)

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		PD 5 Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
		1	Indeks Demokrasi Indonesia		
		2	Indeks HAM		
2	PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan		PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		1	*Asia Power Index (Military Capability)*		
		2	*Asia Power Index (Diplomatic Influence)*		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	*Global Cybersecurity Index*		
		5	Indeks Keamanan Laut Nasional		
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Panganyang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)			
		6	Indeks Ketahanan Pangan		
		7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 0		
		8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)		
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air *(FEW Nexus)*			
		9	Indeks Ketahanan Energi		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)			
		11	Indeks Ketahanan Air Nasional		
		12	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		
		13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan(%)		
		14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)		
		16	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		
		17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		
		Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau			
		18	Indeks Ekonomi Hijau		
		19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		
		20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
		21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)		
		22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)		
		23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
3	PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Perkapita(Rp juta)
		1	Stok Infrastruktur terhadap PDB(%)		
		Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
		2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB(%)		
		3	Aset Perbankan/PDB (%)		
		4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
		5	Aset Asuransi/PDB (%)		
		6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		7	Total Kredit/PDB (%)		
		8	Inklusi Keuangan (%)		
		Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
		9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
		10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
		12	Rasio Kewirausahaan (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
		13	Rasio PDB Pariwisata (%)		
		14	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
		Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
		15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
4	PN4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
		1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)		
		2	Harapan Lama Sekolah (tahun)		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	3	Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains		
		4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca Numerasi		
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			
		1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
		2	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)		
		3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)c)		
		4	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)c)		
		5	Insidensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk)c)		
		6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)c)		
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
		1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		2	Indeks Perlindungan Anak		
		3	Indeks Pembangunan Pemuda		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		4	Indeks Ketimpangan Gender		
		5	Indeks Pembangunan Gender		
		6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		
		7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
		Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		1	Peringkat Indeks Inovasi Global		
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
		4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)c)		
		Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		1	Peringkat pada Asian Games		
		2	Peringkat pada Asian Para Games		
		3	Peringkat pada ASEAN Para Games		
		4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%)		
5	PN5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		1	Rasio PDB IndustriPengolahan (%)		
		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		1	Biaya Logistik (% PDB)		
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		
		Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Nikel			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel (juta ton/tahun)		
		2	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp juta)		
6	PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		1	Tingkat Kemiskinan (%)		
		2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
		3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)		
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		
		5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)		
		Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
		Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong			
		1	Persentase Desa Mandiri (%)		
		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)		
		2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)		
7	PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional		PD 5 Penguatan *good-governance*	Opini BPK
		1	Indeks Pembangunan Hukum		
		2	Indeks Persepsi Korupsi		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	dan Penyelundupan	3	Indeks Integritas Partai Politik	pada berbagai tingkatan	
		Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			SAKIP
		1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		
		2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		
		Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
		1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)		
		Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan			
		1	*Return on Asset* (RoA) BUMN		
		Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan			
		1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB		
		2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
		1	Tingkat Inflasi (%)		
8	PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju		PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	yang Adil dan Makmur	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: Diolah dari Rancangan RKP Tahun 2026; RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Penyelarasan Prioritas Nasional dilakukan juga terhadap Kegiatan Prioritas Utama yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pemerintah Daerah DIY mendukung terlaksananya Kegiatan Prioritas Utama melalui Program, Kegiatan hingga level Sub Kegiatan. Keselarasan Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) tercantum pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 5 Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
Prioritas Nasional 2	1	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Sub kegiatan : a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar b. Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
	2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Kegiatan : Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sub kegiatan : Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub kegiatan : Pengembangan Lumbung Mataraman	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	
	3	Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provins 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negaraa. Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara b. Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan2. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksia. Sub Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksib. Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi b. Sub Kegiatan Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi c. Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam a. Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi b. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
	4	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	5	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1. Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 4. Sub Kegiatan Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
	6	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
Prioritas Nasional 3	1	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Subkegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2	3	4
	Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan 1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten SubKegiatan 1. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten SubKegiatan 2. Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang SubKegiatan 3. Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Kegiatan 2. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Subkegiatan 1. Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan 1. PENGENDALIAN PEMANFAATAN PENATAAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS Subkegiatan 1. Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan 2. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Subkegiatan 1. Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi. Sub Kegiatan 2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Sub kegiatan 3. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Sub kegiatan 4. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi subkegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHANKegiatan 1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenSubkegiatan 1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenSubkegiatan 2. Pemeliharaan Dokumen PertanahanSubkegiatan 3. Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah DesaSubkegiatan 4. Perencanaan Program/Kegiatan Urusan PertanahanSubkegiatan 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan PertanahanSubkegiatan 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi PertanahanKegiatan 2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenSubkegiatan 1. Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipatenSubkegiatan 2. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah DesaKegiatan 3. Sarana dan Prasarana KeistimewaanSubkegiatan 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Sub kegiatan 1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Kegiatan 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sub kegiatan 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sub kegiatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sub kegiatan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kegiatan 2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Sub kegiatan 1. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			Sub kegiatan 2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sub kegiatan 3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi sub kegiatan 4. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan 3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Sub kegiatan 2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan 4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sub kegiatan 1. Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjanang) Sub kegiatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kegiatan 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kegiatan 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Subkegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Subkegiatan : Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANGKegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan KadipatenSub Kegiatan 1 : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung SewuSub Kegiatan 2 : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sub kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Sub kegiatan 2 : Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Sub kegiatan 3 : Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Sub kegiatan 4 : Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi Kegiatan 2 : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Sub Kegiatan 2 : Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan 1 : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan 1 : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Sub Kegiatan 2 : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Sub Kegiatan 3 : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Sub Kegiatan : Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Sub Kegiatan : Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
	2	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	
Prioritas Nasional 4	1	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKATKegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan :a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatanb. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP ProvinsI Sub Kegiatan : a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan b. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
	2	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Audit KIPI, peningkatan cakupan imunisasi, pengembangan aplikasi SIMKIA, cetak buku kesehatan ibu anak
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Koordinasi dan sinkronisasi KIE terpadu penurunan *stunting* lintas instansi
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Pelatihan pencegahan perkawinan anak yang merupakan menurunkan salah satu penyebab kematian ibu dan anak
	3	Pencegahan dan Penurunan *Stunting*	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Audit KIPI, peningkatan cakupan imunisasi, pengembangan aplikasi SIMKIA, cetak buku kesehatan ibu anak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2	3	4
		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	PMT Lokal, PMT Lokal Penyuluhan 6 Bulan, Koordinasi *Stunting*, Koordinasi Gizi
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Pelatihan pencegahan perkawinan anak yang merupakan menurukan salah satu penyebab adanya *stunting* adalah perkawinan yang dilakukan anak sehingga belum siap secara ekonomi untuk pemenuhan gizi dan kemampuan melakukan pengasuhan anak dengan baik
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	4	Revitalisasi Sarana dan Prasana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2		3	4
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	
	5	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	-	
Prioritas Nasional 6	1	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif Melalui Kartu Kesejahteraaan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
	2	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Presiden telah menetapkan *Highlight* Intervensi dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Highlight* Intervensi yang dilaksanakan di DIY, maka Pemerintah DIY telah melakukan pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung *Highlight* Intervensi beserta lokasi prioritas di DIY. Dukungan tersebut tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4- 6 Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah dengan Highlight Intervensi

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	Provinsi Daerah Istimera Yogyakarta	Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.	Semua Kab/Kota di DIY	Program: PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Subkegiatan: Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing - Gerakan Ayo Makan Ikan di Sekolah - Festival Makan Ikan di Sekolah - Kampanye Gemarikan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan DIY
		Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.	-	Saat ini DIY masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat terkait dengan Sekolah Rakyat	-
		Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan	SMAN/SMKN/SLBN di DIY	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKANKegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah AtasSub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.			
		Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.	DIY	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Subkegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM DIY
		Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;	-	-	
		• Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi		KEBUDAYAANKegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budayasub kegiatan : Pengembangan Lumbung Mataraman- Peningkatan Cadangan Pangan MasyarakatPROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAANkegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budayasub kegiatan : Pengembangan Budaya Bahari-Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap di Kawasan Selatan DIY-Broodstok Pengkayaan Varietas Ikan Lokal-Pelatihan Kenelayanan	DIYDinas Kelautan dan Perikanan DIYDinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.			
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta (A2), dan Kawasan Aerotropolis YIA (A3)	• Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala Regional/Kota/Kawasan;	DIY	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Subkegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
		• Pembangunan TPST Regional Yogyakarta;	-	-	
		• Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Yogyakarta;	Yogyakarta, Sleman, Bantul	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas PUP ESDM DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		• Peningkatan Kualitas PSU Bidang Perumahan;	DIY	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU PermukimanSub Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Dinas PUP ESDM DIY
		• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;	Yogyakarta, Sleman, Bantul	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas PUP ESDM DIY
	• (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) • Kota Yogyakarta	• Perluasan SPAM;	Yogyakarta, Sleman, Bantul	"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas PUP ESDM DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	• Kab. Sleman • Kab. Kulon Progo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul			2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		• Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM;	Yogyakarta, Sleman, Bantul	"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMKegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)3. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas PUP ESDM DIY
		• Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Magelang– Bawen;	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUP ESDM DIY
		• Peningkatan kapasitas penelitian dan SDM STP di Universitas Gadjah Mada melalui pembiayaan PHLN;	-	-	-
		• Urban Renewal Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi Keraton	Yogyakarta, Bantul	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Dinas PUP ESDM DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta;		TATA RUANG Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
		• Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta– Bantul–Parangtritis, Yogyakarta–Kaliurang, Yogyakarta–Wonosari–Semanu–Pracimantoro;	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALANKegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUP ESDM DIY
		• Indonesia *Game Academy*;			
		• *Masterclass for Game Developers*;			
		• *Women for Indonesian Game*;			
		• Inkubasi Startup Gim;	DIY	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Dinas Pariwisata DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Lanjutan Sub Kegiatan : Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN kegiatan 1 : Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Kegiatan 2 : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan : Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	
		• Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim;	DIY	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALKegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota KreatifSub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Dinas Pariwisata DIY
		• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional;			
		• Pembangunan Pantai Congot Kab. Kulon Progo;			
		• Persiapan pembangunan Jalan Tol	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	Dinas PUP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		Yogyakarta– Kulon Progo (YIA).		Kegiatan Penyelenggaran Jalan Provinsi Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Subekgiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	ESDM DIY
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak • Kab. Sleman • Kab. Kulon Progo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul	• Kawasan aneka cabai;	DIY	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan :Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		• Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;	DIY	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIANKegiatan :Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan ProvinsiSub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan ProvinsiPROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIANKegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih TanamanSub kegiatan :1. Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang2. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan3. Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Batang	
		• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Karangtalun, D. I. Kalibawang, dan D. I. Progo Manggis-Kalibening;	DIY	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Dinas PUP ESDM DIY
		• Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan, Infeksi Baru, dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (One Health);	Kab. Bantul	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERKegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk HewanSub kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		• Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama	-	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Bribin;			
		• Pembangunan Bendungan Gari;	DIY	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Dinas PUP ESDM DIY
		• Pembangunan Bendungan Karangtalun;	DIY	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas PUP ESDM DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Permukaan4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	
		• Pembangunan Embung Pertanian;	DIY	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dinas PUP ESDM DIY
		• Pelatihan kepada Petani dan Penguatan Kelembagaan Petani;	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN kegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya sub kegiatan : Pengembangan Lumbung Mataraman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		• Penyediaan inputdan alat mesin produksi pertanian;	DIY	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		• Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI.	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAANkegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budayasub kegiatan : Pengembangan Lumbung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				MataramanPROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIANkegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsisub kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
D1	Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan) 1 Kab. Gunungkidul	• Peningkatan 6A pariwisata di Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul;	Kabupaten Gunungkidul	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan 1 : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dinas Pariwisata DIY
		• Pembangunan Jalan Kretek Girijati;	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUP ESDM DIY
		• Preservasi jalan ruas Yogyakarta–Wonosari.	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUP ESDM DIY
E1	Kawasan	• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi,	DIY	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	Dinas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	Konservasi TN Gunung Merbabu dan TN Gunung Merapi 2 Kab. Sleman	keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik;		ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYAKegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian AlamSubkegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
		• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri.	Kab. Gunungkidul	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul;	-	-	
		• Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;	DIY	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Penyediaaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelataman dan Evakuasi Korban Bencana	
		• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.	-	-	
P Y	Provinsi D.I	• Pengadaan peralatan kesehatan dan	DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Dinas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	ogyakarta	pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR-11);		KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kesehatan DIY
		• Pelatihan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7);	DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKATKegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan DIY
		• Bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya miskin dan rentan;	DIY	PROGAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas PUP ESDM DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		• Peserta pelatihan vokasi di Provinsi DI Yogyakarta – Kota Yogyakarta;	DIY	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
		• Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;	Kab Sleman, Kab Kulon Progo, Kota Yogyakarta	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHANKegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenSubkegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan(TUK: Penyediaan Foto Udara dan Peta Dasar 1:1000)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
		• Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;	DIY	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Subkegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
		• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana	DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANKegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP ProvinsSub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
		• Pengembangan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan	DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		Kesehatan Ibu Anak;		MASYARAKATKegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provins Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANKegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan KompetensiTeknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
		• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan dalam mendukung RS Lengkap Berkualitas;	DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKATKegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provins Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Sub Kegiatan : Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANKegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan KompetensiTeknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
		• Pemberian dukungan pembinaan BLU RS Pemerintah yang Mandiri;	DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			DIY	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANKegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP ProvinsSub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN	Dinas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANKegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan KompetensiTeknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah ProvinsiSub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
			DIY	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				DAERAH PROVINSI Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		• Unit sekolah baru SD yang dibangun;	-	-	
		• Unit sekolah baru SMP yang dibangun;	-	-	
		• Peningkatan Kapasitas SDM IPTEKIN;	DIY	Program : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan: - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan jenjang SMA, - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan jenjang SMA Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan: - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan jenjang SMK, - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan jenjang SMK Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khsusus	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Sub Kegiatan: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan khusus	
		• Penguatan infrastruktur IPTEKIN Strategis;	-	-	
		• Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin;	-	-	
		• Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);	-	-	
		• Penguatan kapasitas *Science Techno Park* (STP);	-	-	
		• Pengembangan pilot project hub ekosistem IPTEKIN di daerah;	-	-	
		• Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas;	-	-	
		• Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk;	DIY	Program : Program Pengembangan UMKMKegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha MenengahSub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan TeknologiProgram 1 : PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRIKegiatan 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dinas Koperasi dan UKMDinas Perindustrian dan Perdagangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				ProvinsiSub Kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk;	DIY	Program 1 : PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi Program 2 : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan 2 : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan 2 : Pengembangan Industri Kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			DIY	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Subkegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM
		• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;	DIY	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Dinas Koperasi dan UKM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				KEBUDAYAANKegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi BudayaSubkegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	
		• Akreditasi lembaga halal;	-	-	
		• MoU kemitraan jaminan produk halal;	-	-	
		• Prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda;	-	-	
		• Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi;	Kulon Progo	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Subkegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
		• Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana;	Kulon Progo	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Subkegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
		• Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana;	DIY	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
		• Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;	DIY	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Penyediaaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelataman dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS (KAB/KOTA)	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi;	-	-	
		• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;	Kab Bantul	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEEPenetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiKoordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
		• Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Objek Reforma Agraria.	Kab Bantul	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan prioritas nasional tersebut. Berikut merupakan dukungan dari Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4- 7 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita / Prioritas Nasional Tahun 2026

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program
PN1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
PN2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
PN3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
PN4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Program Hubungan Industrial
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Pendidikan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
PN5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
PN6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Hubungan Industrial
	Program Kawasan Permukiman
	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Penanganan Bencana
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengembangan UMKM
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program
	Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
PN7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Penghubung
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
PN8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah DIY berupaya mendukung pelaksanaan PSN tersebut yang ada di DIY sebagaimana tercantum di tabel berikut.

Tabel 4- 8 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Presiden dalam RKPD Tahun 2026

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
1	Makanan Bergizi Gratis	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	22.041.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.720.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesejahteraan Hewan	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	7.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	8.309.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	4.894.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		PERIKANAN	bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	710.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif	4.700.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
2	Koperasi Desa Merah Putih	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp. 49.943.600	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda DIY
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 2.076.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Rp. 359.020.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa	972.636.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 192.772.850,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.751.000.000	Dinas Pariwisata DIY
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata DIY
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	504.720.000	Dinas Pariwisata DIY
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	235.000.000	Dinas Pariwisata DIY
3	Sekolah Unggul Garuda					
4	Cek Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12.285.000	Dinas Kesehatan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		KESEHATAN MASYARAKAT	RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BK3
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.029.290.532	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BK3
5	Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.540.000	Dinas Kesehatan DIY
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	32.025.000	Dinas Kesehatan DIY
6	Program 3 Juta Rumah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	69.920.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	8.999.384.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi	76.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
			dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
7	Sekolah Rakyat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.640.000	Dinas Sosial DIY
8	Rehabilitasi Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	559.403.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	379.482.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.000.948.821	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	143.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	514.420.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.195.084.926	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.095.123.397	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
9	Penuntasan Tuberkulosis	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.460.000	Dinas Kesehatan DIY
10	Lumbung Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.414.710.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.905.169.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.911.610.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	85.990.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	30.340.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN	Pengawasan Peredaran	Pengawasan Mutu dan	10.000.000	Dinas Pertanian dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Sarana Pertanian	Peredaran Benih Tanaman Hortikultura		Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	1.740.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	680.961.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	129.999.850	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.111.882.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	60.721.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa	621.490.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
				Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	29.215.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	810.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.371.640.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	561.822.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.503.029.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.512.893.450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	905.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM	Pemanfaatan Ruang Satuan	Pemanfaatan Ruang	174.100.000	Dinas Pertanian dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Satuan Ruang Strategis Merapi		Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	274.700.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	502.153.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	7.082.622.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	230.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.885.938.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah	27.461.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
			Kabupaten/Kota	Sungai Kewenangan Provinsi		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	239.440.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	117.074.250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.088.078.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.629.886.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.594.880.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
			Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.215.850	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.517.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	22.296.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran RKPD 2026 (Rp)	OPD Pengampu
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	509.636.800	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.108.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari	5.898.088.000	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.982.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
11	Pembangunan Bendungan dan Irigasi	-	-	-	-	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penyusunan RKPD DIY tahun 2026 mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional per masing-masing provinsi:

Tabel 4- 9 Keselarasan Target RKPD DIY Tahun 2026 terhadap Target Sasaran Makro RKP Tahun 2026 dan Penyelarasan Target Dokumen Jangka Menengah DIY

No	Nama Indikator	Target DIY sesuai RKP Tahun 2026	Target Tahun 2026 (Penyelarasan Dokumen Jangka Menengah)	Target RKPD DIY Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (PE) (%)	5,5 – 6,1	5,45-6,05	5,45-6,05*
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	59,3 – 60,0	55,45-56,03	55,45-56,03
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,9	0,873-0,875	0,873-0,875
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,92 – 9,92	9,13-9,90	9,13-9,90*
5	Rasio Gini	0,42 – 0,430	0,420 - 0,430	0,420 - 0,430*
6	Indeks Modal Manusia	0,76	0,72-0,77	0,72-0,77
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	63,93 – 63,82	62,93-63,82	62,93-63,82
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,7	70,79	70,79
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,89 – 3,43	3,11-3,67	3,11-3,67*

Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas RI No 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, dan Bapperida DIY, 2025 (diolah)

**) Rakortekrenbang Tahun 2025*

Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan bentuk dukungan terhadap target Indikator Utaa RPJMN terhadap RPJMD DIY Tahun 2022-2027, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan pemetaan terhadap indikator-indikator IUP dalam RPJMN tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4- 10 Penyelarasan Target Dokumen Jangka Menengah DIY di Tahun 2026 terhadap Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMN

No	Indikator Utama Pembangunan	2026
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,87
2	Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	29
	b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,56
3	Penanganan Tuberkulosis:	
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	72,20-81,20
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) %)	88,88
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,08-98,68
5	Hasil pembelajaran	
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i) Literasi Membaca	80,00-100,00
	ii) Numerasi	40,00-80,00
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i) Literasi Membaca	79,93-81,61
	ii) Numerasi	63,82-65,82
	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,63-10,66
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,06-16,08
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,6
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,83
8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,13-9,90
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	40,19
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:	27,7
	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	
	b. Proksi: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi	
11	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,97-12,10
	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
12	Pengembangan Pariwisata	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	10,72
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	263.725
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	0,93
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
	a. (ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4,66
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,98
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,77

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Utama Pembangunan	2026
	*d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)**	2,09
15	Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Baik	
a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11-3,67
b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,88-70,48
17	Tingkat penguasaan IPTEK	
	Skor Indeks Inovasi Daerah	51,1
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,03
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	10,22
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	7,43
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	5,12-5,57
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,7
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7,19
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
	a. Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap PDRB DIY	40,56
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90,6
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	46,51
24	Indeks Reformasi Hukum	84,17-96,81
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,34
26	Indeks Pelayanan Publik	4,66
27	Indeks Integritas Nasional	82,2
28	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	71
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	75,74-80,17
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (84,28-87,71)
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,85
32	Tingkat Inflasi (%)	3,00-3,67
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	48,74
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,03
	c.Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	
	d. Total Kredit/PDRB (%)	31,33
34	Inklusi Keuangan (%)	88,96
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi dengan daerah lain di luar negeri (*sister province*)	6
36	*Crime Rate*	119,98
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	69,98-70,30
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,69-80,77
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	76,44-82,79
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,13-0,12

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Utama Pembangunan	2026
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,62
42	Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	70,79
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	19,67-23,44
	c. Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	22,55
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	43
43	Ketahanan energi, air, dan pangan	
	a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.125
	- Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)	
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	8,64
	c. Ketahanan Air	
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,51
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	21,99-38,10
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,21-90,62
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	a. Kumulatif	5,07
	b. Tahunan	15,46

Sumber: Bapperida DIY, 2025 (diolah)

4.3.3 Indikator Kinerja Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

Tahun 2025 telah dilaksanakan Rakortekrenbang yang membahas terkait target pembangunan daerah tahun 2026 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Target pembangunan daerah tersebut meliputi target indikator makro daerah dan target indikator *outcome* Urusan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mendukung tercapainya target nasional melalui capaian target daerah yang telah disepakati dalam Rakortekrenbang tahun 2025. Berikut adalah hasil pembahasan target indikator pembangunan daerah dalam pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025

Tabel 4- 11 Target Indikator Makro Daerah Hasil Rakortekrenbang

No	Indikator Makro Pembangunan	Target Nasional RKP 2026	Target Provinsi RKP 2026	Target Provinsi RKPD 2026	Kesepakatan Target DIY 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3	5,8-6,4	5,45-6,05	5,45-6,05
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96	2,89-3,43	3,11-3,67	3,11-3,67
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	8,92-9,92	9,13-9,90	9,13-9,90
4.	Rasio Gini	0,377-0,380	0,420-0,426	0,441-0,445	0,420-0,430

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Makro Pembangunan	Target Nasional RKP 2026	Target Provinsi RKP 2026	Target Provinsi RKPD 2026	Kesepakatan Target DIY 2026
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	62,93-66,49	63,64-63,82	62,93-63,82

Sumber: Berita Acara Pembahasan Desk Indikator Makro Daerah Antara Kementerian/Lembaga Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Di Yogyakarta Dalam Rakortekrenbang Tahun 2025

Tabel 4- 12 Target Indikator *Outcome* Hasil Pembahasam Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2025

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
1	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	109	76,42	Orang
2	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,7	98,8	%
3	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421	0,21	Provinsi
4	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	34,99	34	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan					
5	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,12	2,80	Materi Teknis
6	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,22	9,09	Rp
7	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,6	96,14	%
8	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82,12	Tinggi	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
9	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1.497	1.105	Persentase
10	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	145,4	67,58	Ha
11	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	19	5	Nilai
12	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Rasio Elektrifikasi	%	99,90	99,99	Persentase
13	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	220.000.000.000	2.259.400.000.000	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
14	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100	92,09	(per 100.000 kelahiran hidup)
15	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	77,52	(%)
16	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase ARG Daerah	%	7	66,8	Bidang Tanah
17	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,6	85	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	generasi Z), dan penyandang disabilitas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
18	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1.500.000	0	poin
19	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	25,85	11,50	Persentase
20	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Garam	Ton	2.500.000	4,86	Persentase
21	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.470.000	7.584	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
22	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.380.000	98.136	Persentase
23	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71,67	60	Persentase
24	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8,74	6	Kegiatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
25	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/penduku ng pertunjukan seni	%	1,76	3	Persentase
26	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Persentase rumah tangga yang menyelenggaraka n atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20,17	22,3	Persentase
27	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	%	65,50	60	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	dilestarikan				
28	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	50	Persentase
29	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,8	64,8	Nilai
30	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja	Orang	15.389.510	96.000	Rata-rata Anak per Wanita

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	dan dialog sosial				
31	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	80,88	Nilai
32	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	n/a	Persentase
33	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	100	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
34	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1.176.000.000	24.632.000	Kabupaten/ Kota
35	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Rasio PDB Pariwisata	%	4,7	10	Persentase
36	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	701	Kepala Keluarga
37	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	73,5	100	Nilai
38	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	96,5	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
39	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6.850	0	Persentase
40	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2.261	0	Persentase
41	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71,01	100	Ha

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan					
42	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,33	71,48	Nilai
43	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	96	Nilai
44	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22.704.470	375.969	Nilai
45	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Padi	Ton	57.534.326	398.835	Nilai
46	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3.084.276	75.277	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
47	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2.000.158	33.420	Nilai
48	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2.890.917	49.881	Persentase
49	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	633.290	1.854	Persentase
50	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	5.109.804	81.614	Persentase
51	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jumlah Produksi Telur	Ton	7.044.963	111.103	Persentase
52	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	%	85	100	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
53	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,11	95,02	Nilai
54	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	20,89	Ton
55	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83	79	Persentase
56	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Memperkuat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76,67	70,70	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
57	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,4	78	Per 100.000 Kelahiran Hidup
58	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	61	Nilai
59	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti	Persentase	77,55	65,74	Materi Teknis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir				
60	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	5,91	10,15	Perda/Perkada
61	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19.100.000	5.822,92	Persentase
62	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	7	1	Persentase
63	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	3,4	Nilai
64	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	880,0	1	Hektar
65	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2.175	3,42	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
66	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,6	3,85	Nilai
67	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19	9	Nilai
68	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,11	1,83	Nilai
69	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85,3	63,10	Nilai
70	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	5	Ton

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
71	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	5	Ton
72	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	197.650	0	Nilai
73	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	124.000	920	%
74	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,19	89,25	Indeks

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas					
75	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,74	78,15	(%)
76	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,90	79,00	%
77	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,31	67,65	%
78	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,79	84,79	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
79	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,31	75,84	(%)
80	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,33	85,00	Kwh/Kapita
81	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,37	79,25	(SBM/Rp Milyar)
82	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67,25	68,78	Kab/Kota
83	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,34	74,18	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas					
84	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	85,83	92,36	Rp
85	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	82,84	83,44	%
86	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim keamanan SMA	Nilai	73,73	88,48	%
87	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Iklim keamanan SMK	Nilai	70,68	73,65	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	penyandang disabilitas					
88	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim keamanan SDLB	Nilai	77,53	85,25	Indeks
89	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim keamanan SMPLB	Nilai	74,67	77,65	Keluarga
90	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim keamanan SMALB	Nilai	73,35	75,27	Kg/KAP/TH
91	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim kebinekaan SMA	Nilai	73,50	76,70	Ton
92	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Iklim kebinekaan SMK	Nilai	71,20	73,08	Ton

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas					
93	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	73,55	77,50	Ton
94	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,07	76,10	%
95	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	73,99	80,00	%
96	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	62,98	68,41	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	generasi Z), dan penyandang disabilitas					
97	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	61,23	63,59	%
98	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	70,26	81,85	%
99	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	71,51	74,55	%
100	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	70,41	86,87	Indeks
101	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang	Persentase	100	100	Dokumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	terpenuhi kebutuhan dasarnya				
102	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Poin
103	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Rp
104	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Persentase (%) gelandangan pengemis yang	Persentase	100	100	triliun rupiah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	terpenuhi kebutuhan dasarnya				
105	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	%
106	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	0	Ton
107	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	52	0	Ton

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
108	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,67	0,88	Nilai
109	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	15	*	Perda/Perkada
110	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	3,15	5,25	Rasio

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
111	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3,24	3,24	Persentase
112	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	96	Persentase
113	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	0	Ton
114	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	133	5	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
115	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	1	0	Nilai
116	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	45	10	Persentase
117	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	2	Persentase
118	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	2	Persentase
119	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan	Level	2	2	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi				
120	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	20	Persentase
121	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67	74,65	Rasio
122	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	23,79	12,18	Persentase
123	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	39,41	37	Level
124	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	38	40	Level

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
125	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/ Internasional	Persentase	99	85	Level
126	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daera h) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional	Persentase	79	78	Persentase
127	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	32,46	23	Orang
128	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	26.530.000	498.980	Ha

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
129	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	26.060.000	552.470	Indeks
130	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0,31	0,7	Orang
131	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13,80	10,10	%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
132	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek)	Persentase	17,5	11,8	Perjalanan
133	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Presentase lanjut usia yang mandiri	Persentase	77	70	%
134	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	1,4	1,4	Nilai
135	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	11,4	13	Persentase
136	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat	Persentase	30	20	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Desa/Kelurahan sesuai standar				
137	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	45	80	Orang
138	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	71	100	Lembaga
139	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	46	50	Persentase
140	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persentase	23,4	21,6	Indeks

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	penyandang disabilitas					
141	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/ Kota	100	2	%
142	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	55	48	Ton
143	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16.422.126	74.052	Desa
144	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65,0	64,5	Nilai
145	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10,9	11,80	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas					
146	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	74	Persentase
147	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	76	%
148	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	75	poin
149	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	76	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
150	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	64	Nilai
151	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	97	99,6	Nilai
152	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	Persentase	55	81,5	Nilai
153	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	7,4	0,17	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
154	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	20	20	Nilai
155	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283.168	1.285	%
156	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	38	22	Kasus
157	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	7,1	7,1	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	tambah di dalam negeri.					
158	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	1.100.000	1.594,89	Orang
159	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	2.470.000.000.000	5.953.489.500	Dokumen
160	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	5	2	Persentase
161	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	258.500	326	Persentase
162	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	Persentase	1	0,5	Ha
163	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	8,90	5,50	Persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
164	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	12	Persentase
165	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143.897	120	Indeks
166	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252	178	Ton
167	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	99,99	50	Nilai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Asta Cita	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Nasional	Target Daerah	Satuan
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
168	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	0	Nilai
169	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	71	99	Kasus

4.4 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu masukan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, berisi sejumlah pemikiran-pemikiran DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 sekaligus penekanan terhadap permasalahan-permasalahan penting untuk segera diselesaikan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 mengatur DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4.4.1 Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai bahan telaah Pemerintah DIY dalam menyusun rencana kerja pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan utama seperti masalah kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran serta persoalan pembangunan lainnya yang memerlukan penyelesaian. DPRD melalui dokumen pokok- pokok pikiran ingin memastikan bahwa berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan kemampuan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD ikut memberikan masukan, aspirasi dan sumbangsih pemikiran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pokok-Pokok pikiran ini juga merupakan bentuk komunikatif formal antara legeslatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk membangun harmoni pemerintah tanpa mengurangi tugas pokok fungsi legislatif di bidang pengawasan, anggaran serta legislasi daerah. Melalui pokok pokok pikiran, DPRD telah menyampaikan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dijadikan bahan telaah dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam penyusunan perundang–undangan.

Dengan demikian diharapkan RKPD tahun 2026 akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, efisien serta akuntabel. Kemampuan keuangan daerah yang meningkat dan didukung dengan dokumen perencanaan yang aspiratif serta dijalankan oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan responsif diharapkan akan menghasilkan kualitas program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat DIY.

4.4.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi DPRD

Pembangunan daerah DIY menunjukkan dinamika yang cukup menarik pada kurun waktu tahun 2023. Perkembangan pasca Pandemi ditahun-tahun sebelumnya, perihal kinerja pembangunan di DIY menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di DIY sepertinya sudah "*on the track*". Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka positif, dan bahkan dalam Triwulan pertama dan kedua melampaui dari capaian nasional. Demikian pula dengan ekspor DIY ke mancanegara pada kurun waktu 2021 juga menunjukkan pergerakan angka yang signifikan tidak kalah dengan tahun 2019 saat sebelum pandemi. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi bersama sebagai sebuah capaian yang positif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Namun sisi lain pembangunan di DIY juga menunjukkan data yang paradoksal, dimana ada beberapa capaian pembangunan yang belum mampu menembus target dalam target RPJMD 2017-2022 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pendapatan (Indeks Gini) dan persentase angka kemiskinan. Permasalahan serius ini masih ditambah pula dengan dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Semenjak RPJMD ditetapkan, maka ketiga hal tersebut belum pernah mencapai target sebagaimana seharusnya. Capaian ini sangat timpang bila dibandingkan dengan kinerja pada Tata Kelola Pemerintahan yang mendapatkan hasil sangat memuaskan sebagaimana target. Problematika inilah yang harus terus diselesaikan dalam proses pembangunan daerah selanjutnya.

Memasuki Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2020-2025, maka pembangunan daerah diarahkan pada penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Tahap IV inilah sebagai bagian akhir dari agenda besar target dalam RPJPD 2005-2025 yaitu "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Momentum ini harus mampu dimaksimalkan untuk menopang ketercapaian target lima tahun terakhir RPJPD DIY. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, maka dituntut kerja keras semua pemangku kepentingan untuk bisa bangkit dan melesat cepat menyesuaikan dengan pola kehidupan baru pasca pandemi. Seluruh sektor kehidupan harus bergerak cepat melakukan penyesuaian dan akselerasi langkah dalam mencapai tujuan pembangunan DIY, pembangunan yang melahirkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan berkeadaban. Pondasi terhadap langkah cepat tersebut telah kita miliki dengan capaian kinerja pembangunan pada kurun waktu 2022, dimana kebijakan pemulihan sosial-ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.

4.4.2.1 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan

4.4.2.1.1 Urusan Penunjang Pemerintahan

- Permasalahan
    1. Belum maksimalnya layanan publik, kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan daerah.
- Rekomendasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Meningkatkan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Penguatan aparatur daerah;
3. Evaluasi organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik;
4. Memperjelas tatakala BKK Kalurahan dan mempermudah persyaratannya (misal: tidak harus mandiri budaya, tapi minimal sudah termasuk desa prima, preneur, wisata, budaya, maritim, dll);
5. Menjadikan BKK Kalurahan untuk percepatan Reformasi Kalurahan.

4.4.2.1.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Permasalahan
  1. Masih perlunya memperbaiki sistem tata kelola administrasi kependudukan, khususnya layanan TIK.
- Rekomendasi
  1. Meningkatkan layanan pembuatan E-KTP;
  2. Penyediaan *data base* E-KTP untuk semua urusan layanan pemerintah dan kebijakan publik berbasis TIK;
  3. Pengendalian keamanan dan ketertiban melalui pendataan E-KTP berbasis TIK.

4.4.2.1.3 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

- Permasalahan
  1. Di pedesaan terdapat persoalan, mulai dari angka kemiskinan tinggi, minimnya infrastruktur pedesaan, hingga minimnya akses masyarakat desa terhadap pengembangan ekonomi.
- Rekomendasi
  1. Memperkuat infrastruktur kalurahan, khususnya bagi kalurahan tertinggal dan mempunyai angka kemiskinan tinggi;
  2. Melakukan pemberdayaan aparatur desa;
  3. Mendorong adanya *data base* pemerintahan desa satu atap untuk tingkat kabupaten agar bisa terpantau pembangunan pedesaan, misal sistem informasi desa/Kalurahan;
  4. Membangun aksesbilitas ekonomi masuk ke desa/Kalurahan;
  5. Memperjelas tatakala BKK Kalurahan dan mempermudah persyaratannya (misal: tidak harus mandiri budaya, tetapi minimal sudah termasuk desa prima, preneur, wisata, budaya, maritim, dll);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Menjadikan BKK Kalurahan untuk percepatan Reformasi Kalurahan dan Mandiri Budaya;
7. Menetapkan target akhir periode 2022 – 2027 seluruh desa/kalurahan berpredikat mandiri budaya.

4.4.2.1.4 Urusan Komunikasi dan Informatika

- Permasalahan
  1. Diperlukan pengembangan berbagai model penggunaan sistem informasi *data base* dan aksesibilitas terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan kebijakan dan informatif terhadap *stakeholders* dan masyarakat.
- Rekomendasi
  1. Pembaruan program-program sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah DI. Yogyakarta ke dalam sistem informasi yang lebih baru dan ter-*update* untuk memenuhi perbaikan layanan publik;
  2. Peningkatan layanan pemerintah daerah melalui *E-Governance*, *Jogja Smart Province*;
  3. Perluasan layanan informasi hingga ke desa/kalurahan agar tidak ada *blankspot area*;
  4. Pemasangan *wifi* di kawasan Selatan.

4.4.2.1.5 Urusan Penanganan Bencana

- Permasalahan
  1. Terdapat beberapa ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran, Abrasi dan Gelombang Ekstrim, serta Cuaca Ekstrim.
- Rekomendasi
  1. Menambah jumlah desa tangguh bencana;
  2. Memperkuat komunitas masyarakat untuk terlibat dalam program kebencanaan;
  3. Menambah fasilitas alat-alat pengurangan resiko bencana;
  4. Membangun sistem informasi kebencanaan yang mudah diakses kepada masyarakat luas.

4.4.2.1.6 Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Permasalahan
  1. Fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh generasi remaja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Kesadaran warga masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman umum masih kurang maksimal.

- Rekomendasi
  1. Pencegahan dengan tindakan preventif, penanganan kasus, dan pengurangan kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta.
  2. Penanganan, pengurangan isu SARA dan konflik horisontal dampak isu SARA;
  3. Pendidikan politik kewargaan dengan penguatan pilar-pilar kebangsaan;
  4. Pendidikan politik dengan tujuan peningkatan pengetahuan politik dan ideologi kebangsaan;
  5. Penguatan kohesivitas sosial kewargaan dengan kegiatan-kegiatan kesetiakawanan sosial.

4.4.2.1.7 Urusan Keistimewaan Yogyakarta

- Permasalahan
  1. Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;
  2. Kurang optimalnya pengelolaan data dan Informasi Aset, aset budaya baik benda maupun tak benda;
  3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat;
  4. Berkurangnya jumlah maestro -maestro seni budaya di Yogyakarta;
  5. Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan. *Vandalism*;
  6. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan tehadap cagar budaya dan warisan budaya;
  7. Belum optimalnya inventarisasi, dokumentasi, dan pendaftaran tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa;
  8. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan;
  9. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian;
  10. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  11. Intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin “tenggelam” di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

12. Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan;
13. Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya;
14. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

- Rekomendasi
  1. Menyelesaikan regulasi yang mendukung implementasi UU Keistimewaan DIY;
  2. Memperkuat nilai kebudayaan lokal Yogyakarta ke dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta;
  3. Menyelaraskan program Keistimewaan DIY dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  4. Peningkatan kapasitas aparatur atau infrastruktur dalam rangka Reformasi Kalurahan;
  5. Peningkatan kapasitas UMKM, khususnya di kawasan selatan melalui Dana Keistimewaan, misal: kajian program layak jual;
  6. Optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang ekonomi melalui Danais dengan tujuan penurunan angka kemiskinan, *stunting*, dan stabilitas inflasi;
  7. Pembangunan budaya dan Teknologi Informasi melalui pendidikan yang unggul;
  8. Membangun pusat kebudayaan di kampung dan di dusun sebagai pusat pengembangan kebudayaan lokal Yogyakarta;
  9. Membuka keleluasaan pengusulan program oleh OPD terkait ide inovasi kegiatan berbasis Danais, sesuai koridor keistimewaan;
  10. Pembentukan regulasi/Pergub yang mengatur batasan–batasan kebudayaan dalam perspektif ekonomi dan UKM;
  11. Perbentukan regulasi/Pergub SOP tentang nomenklatur kegiatan yang dapat menggunakan Danais;
  12. Memberikan solusi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang masih berstatus tanah *enclave*;
  13. Peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan dalam rangka Reformasi Kalurahan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

14. Optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang ekonomi melalui Danais dengan tujuan penurunan angka kemiskinan, *stunting*, dan stabilitas inflasi, misal: padat karya ekonomi/Istimewa;
15. Pembangunan budaya berbasis Teknologi Informasi melalui pendidikan yang unggul;
16. Fasilitasi Pendidikan Istimewa, misal: beasiswa;
17. Hibah bantuan sarana prasarana Pendidikan;
18. Fasilitasi *event* kebudayaan/pentas di destinasi wisata, usul perubahan paket menjadi 20 juta, 30 juta, dan 40 juta;
19. Bantuan sambungan listrik istimewa bagi masyarakat DIY kurang mampu;
20. Maksimalisasi program dan kegiatan sesuai dengan yang diusulkan oleh desa/kalurahan (sesuai hasil musrembang kalurahan) melalui BKK Kalurahan;
21. Membangun Data Keistimewaan terpadu dan terintegrasi dengan JSP bersama Kab/Kota;
22. Fasilitasi destinasi wisata, khususnya di Kawasan Selatan.
23. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi nelayan dan petani di kawasan Selatan;
24. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*;
25. Fasilitasi penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas hingga level kalurahan.

4.4.2.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian

4.4.2.2.1 Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- Permasalahan
  1. Omzet Koperasi mengalami penurunan;
  2. Penurunan omzet pada koperasi yang bergerak di sektor riil;
  3. Likuiditas koperasi mengalami penurunan karena sebagian anggota tidak bisa mengangsur dan anggota lain mengambil simpanan;
  4. Menurunnya usaha kecil dan menengah.
- Rekomendasi
  1. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil;
  2. Kebijakan bantuan untuk koperasi ditingkatkan;
  3. Sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan;
  4. Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Pertumbuhan Wirausaha baru harus ditingkatkan terutama dari kalangan muda ditandai adanya 100 pengusaha baru disetiap kabupaten/kota;
6. Mendorong koperasi dan UMKM untuk bisa terlibat dalam program Industri Kreatif;
7. Pendataan jumlah koperasi berdasarkan Kapanewon di DIY untuk melihat di Kapanewon mana koperasi itu ada dan di Kapanewon mana koperasi tidak ada/jarang;
8. Pelatihan UMKM dan tidak lanjut dari pelatihan dengan pemberian bantuan alat untuk mendukung usaha UMKM;
9. Lokasi pelatihan menjangkau Kapanewon, Kalurahan yang banyak penduduk miskinnya;
10. Pembinaan UMKM berbasis daerah yang tepat seperti Kota Yogyakarta adalah UMKM pengolahan, sedangkan kabupaten lain yang masih bisa usaha UMKM berbasis produk pertanian dan peternakan diwilayahnya.

4.4.2.2.2 Urusan Penanaman Modal

- Permasalahan
  1. Belum meratanya penanaman modal di DIY;
  2. Perijinan yang perlu disederhanakan;
  3. Perlu diciptakan usaha Mudah, cepat, dan nyaman investasi di DIY;
  4. Ketergantungan DIY pada Investor yang meningatkan PDRB DIY;
  5. Bandara NYIA perlu dioptimalkan untuk daya dukung penanaman modal di DIY.

- Rekomendasi
  1. Penyusunan rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulan potensi lokal;
  2. Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata terutama di daerah pesisir selatan;
  3. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih antar instansi;
  4. Peningkatan program kemudahan berusaha di DIY, agar investor merasa nyaman dan mudah investasi di DIY;
  5. Optimalisasi potensi NYIA dalam menarik investor ke DIY;
  6. Promosi bagi Kabupaten yang penanam modalnya kurang dibandingkan kabupaten lain;
  7. Penyempurnaan dan peningkatkan pelayanan perijian terpadu, OSS;
  8. Perubahan mandset dan iklim usaha di DIY yang perlu dilakukan dinamisasi dan kemudahan usaha di DIY;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9. Perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri di DIY;
10. Semua Investasi di DIY harus menggunakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam DIY;
11. Promosi untuk penggunaan fasilitas Bandara NYIA dalam mendukung penanaman modal di DIY (dukung fasilitas bandara yang memadai)
12. Melakukan kajian dampak pembangunan Jalan Tol DIY, dengan melihat pertumbuhan ekonomi baru dan pertumbuhan ekonomi jalur jalan lama;
13. Penumbuhan ekonomi jalur Selatan sekitar jalur Selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur.

4.4.2.2.3 Urusan Bidang Pariwisata

- Permasalahan
  1. Jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara yang menurun pada tahun 2020, 2021, 2022 akibat *pandemic Covid-19*;
  2. Perlu obyek wisata yang baru untuk menarik wisatawan dengan daya tahan yang obyek wisata jangka panjang;
  3. Perlu memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara;
  4. Peningkatan sarana obyek wisata untuk angkutan umum yang terbatas menuju obyek wisata baru;
  5. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara;
  6. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan.
- Rekomendasi
  1. Perlunya pengembalikan citra wisata ke DIY yang aman dan favorit;
  2. Perlu penambahan *event* pariwisata skala internasional, nasional, dan lokal dari tahun 2023 dan 2024. Lokasi *event* pariwisata agar di Kawasan selatan DIY, Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul;
  3. Fasilitasi dan penerapan protokol kesehatan (CHSE) di obyek wisata;
  4. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata;
  5. Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi obyek wisata;
  6. Pengembagan wisata berbasis komunitas desa wisata dan menjaga kelestarian alam;
  7. Penggunaan dana Istimewa untuk menunjang pariwisata di DIY melalui desa wisata;
  8. Tumbuhnya obyek wisata baru di 50% kalurahan di DIY;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9. Perlu dukungan jalur bus menuju obyek wisata yang sudah ada dan obyek wisata yang baru, dan memiliki daya tarik wisatawan.
10. Mendukung Badan Usaha Milik Kalurahan yang bergerak dibidang pariwisata

4.4.2.2.4 Urusan Bidang Perdagangan

- Permasalahan
  1. Nilai ekspor yang tumbuh di DIY membutuhkan bahan baku produk dari luar DIY;
  2. Tumbuhnya toko jejaring di DIY yang menyebabkan melemahnya pedagang tradisional;
  3. Perlu kebijakan monitoring dari Pemda DIY pada Kabupaten/kota terkait penguatan pasar tradisional.
- Rekomendasi
  1. Peningkatan ekspor komoditas DIY harus terus ditingkatkan, pendampingan dari Pemerintah Daerah DIY terus dilakukan;
  2. Diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional;
  3. Persaingan usaha sektor perdagangan ini sangat kompetitif, perlu perlindungan bagi pedagang kecil;
  4. Diperbanyak kegiatan promosi kepada masyarakat untuk belanja di pasar tradisional;
  5. Pemantauan toko jejaring untuk antisipasi, jangan sampai mematikan usaha dan minat berusaha dengan banyaknya toko jejaring di pedesaan;
  6. Pembangunan pasar tradisional dengan konsep modern dan perbaikan manajemen pengelola pasar untuk menjawab tantangan pasar *online*;
  7. Fasilitasi peningkatan ketrampilan dalam perdagangan bagi pelaku UKM perlu ditingkatkan;
  8. Monitoring pada Kabupaten/kota kebijakan penguatan pasar tradisional;
  9. Tumbuhnya nilai ekspor DIY setiap tahun minimal 10% dibanding tahun sebelumnya;
  10. Pembangunan pasar tradisional dan pasar desa yang respresentatif;
  11. Pengelola pasar tradisional harus melarang pratek rentenir atau bank plecit di pasar tradisioanl yang menjerat para pedagang kecil. Para pelaku bank plecit/rentenier beroperasi pagi hari harus terpantau petugas.

4.4.2.2.5 Urusan Perindustrian

- Permasalahan
  1. Kebutuhan bahan baku untuk industri IKM di DIY dari luar DIY;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Belum semua kawasan industri diminati perusahaan untuk membangun industrinya;
3. Menurunya permintaan produk industri dari pasar domestik maupun mancanegara akibat *Pandemic Covid-19* pada produk-produk tertentu;
4. Antisipasi resesi dunia yang akan menurunkan pasar luar negeri terhadap produk DIY.

- Rekomendasi
  1. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih baik dari pesaing daerah lain;
  2. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya berbasis warisan budaya;
  3. Perbanyak *event* pariwisata yang berdampak pada industri DIY;
  4. Adanya inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif melalui pendampingan pengusaha di setiap kabupaten/kota;
  5. Permasalahan bahan baku industri IKM karena keterbatasan sumber daya alam DIY diatasi melalui fasilitasi Pemda DIY dengan jaminan ketersediaan bahan baku;
  6. Fasilitasi IKM dalam meningkatkan produktifitasnya;
  7. Tumbuhnya IKM baru sebanyak 50 IKM di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya;
  8. Pembinaan IKM sesuai basis wilayahnya Kota Yogyakarta industri pengolahan, kabupaten lain yang masih bisa mengunakan industri berbasis produksi hasil pertaniannya;
  9. Pemanfaatan Kawasan Industri DIY di Kabupaten Bantul (Piyungan, Srandakan, Pajangan) dan Kabupaten Kulon Progo (Sentolo) ditandai dengan adanya perusahaan baru yang menanamkan usahanya dikawasan tersebut;
  10. Mengatisipasi resesi ekonomi dunia pada tahun 2025 dengan memberikan pembinaan pada para pengusaha ekspor.

4.4.2.2.6 Urusan Pangan

- Permasalahan
  1. Masih belum beragamnya cadangan pangan di DIY, hanya bertumpu pada gabah kering giling dan beras;
  2. Masih terdapat kemantren di Kota Yogyakarta yang rentan rawan pangan;
  3. Pengeluaran untuk rokok masih tinggi dibandingkan untuk pengeluaran konsumsi daging, buah dan sayur;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Masih terdapat golongan pangan yang berada di bawah skor pola pangan harapan yang ideal yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan dan gula;
5. Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di DIY;
6. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

- Rekomendasi
  1. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan OPD terkait dalam pengentasan 3 Kemantren di DIY yang berada dalam kategori rentan rawan pangan;
  2. Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai salah satu prioritas program urusan pangan dengan adanya data persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk menunjukkan ketahanan pangan rumah tangga;
  3. Mendiversifikasi dan meningkatkan cadangan pangan yang tidak hanya bertumpu pada gabah kering giling maupun beras;
  4. Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui sosialisasi, edukasi, promosi dan kampanye terus menerus, berkesinambungan dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur;
  5. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga;
  6. Perlu adanya diversifikasi keanekaragaman ketersedian pangan yang tidak hanya bertumpu pada beras dan gabah saja;
  7. Optimalisasi Dana Keistimewaan dalam urusan pangan.

4.4.2.2.7 Urusan Pertanian

- Permasalahan
  1. Masih rendahnya SDM pertanian baik di kalangan petani maupun petugas penyuluh lapangan;
  2. Adanya *El-Nino* yang menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, perubahan pola tanam, gagal panen, penyebaran hama dan penyakit tanaman (OPT) yang lebih cepat;
  3. Petani DIY belum Sejahtera;
  4. Alih fungsi lahan yang masih terus terjadi;
  5. Rendahnya minat generasi muda (generasi milineal) untuk terjun pada kegiatan pertanian;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak kendala di lapangan, yang sangat merugikan petani baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pupuk;
7. Belum adanya tata kelola penanganan paska panen produk hasil pertanian yang mengakibatkan kerugian petani karena terjadi *over supply* produk pertanian pada saat panen;
8. Infrastruktur pertanian dan irigasi yang tidak memadai;
9. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk kegiatan pertanian.

- Rekomendasi
  1. Meningkatkan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No.11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan sasarannya, sehingga petani DIY sejahtera;
  2. Adanya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milineal perlu dirancang dengan memperhatian target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholder* lain;
  3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan kabupaten terkait dengan pelaksanaan Perda DIY No. 6/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY;
  4. Pemda DIY dan pemerintah kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), seperti dimandatkan oleh Perda DIY No. 6/2021 tentang perubahan Perda DIY No. 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan perda PLP2B;
  5. Peningkakatan kapasitas kepada petani dan penyuluh pertanian;
  6. Perlunya diatur tata kelola pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif dan efisien, merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
  7. Adanya pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien;
  8. Pemda DIY perlu melakukan mitigasi terhadap gagal panen dan kematian ternak yang disebabkan karena faktor cuaca, OPT maupun virus dan bakteri;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9. Pemda DIY dan Kabupaten Sleman melakukan peningkatan produksi tanaman salak sebagai salah satu komoditas unggulan di Sleman;
10. Optimalisasi lahan pertanian dengan memfungsikan lahan yang tidak produktif untuk lahan pertanian;
11. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur pertanian baik saluran irigasi maupun jalan usaha tani di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang sulit (Kabupaten Gunungkidul dan Kulon progo);
12. Pemda DIY membuat tempat penyimpanan produk hasil pertanian dari petani untuk menampung produk pertanian pada saat panen;
13. Pemda DIY perlu memberikan perlindungan terhadap petani dengan memberikan asuransi petani yang mengalami gagal panen;
14. Memberikan bantuan ternak kepada kelompok ternak dengan tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan;
15. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan irigasi.

4.4.2.2.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

- Permasalahan
  1. Budaya Bahari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum tumbuh secara optimal;
  2. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang karena adanya kesalahan design pembangunan;
  3. Adanya kesenjangan produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan;
  5. Rendahnya angka konsumsi makan ikan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan;
  7. Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan.;
  8. Akses, sarana dan prasarana menuju Pelabuhan Perikanan Gesing masih belum optimal;
  9. Banyak potensi budidaya perikanan air tawar yang belum dioptimalkan dengan baik.
- Rekomendasi
  1. Perlu *exit strategy* dan melakukan *redesign* Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak, mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Meningkatkan budaya bahari masyarakat di DIY yang ada untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan;
3. Mengoptimalkan program-program kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, tepat sasaran dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY;
4. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing untuk memudahkan akses dan mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY;
5. Optimalisasi Gerakan Makan Ikan yang telah ada dengan melakukan sinergi lintas organisasi dan *stakeholder*;
6. Perlunya insentif dan pelatihan bagi nelayan DIY untuk menjadi nelayan yang modern;
7. Optimalkan potensi budidaya ikan air tawar (nila, lele) atau telaga di Gunungkidul;
8. Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di DIY.

4.4.2.2.9 Urusan Kehutanan

- Permasalahan
  1. Berkurangnya area hutan konservasi;
  2. Belum terpenuhinya indeks kualitas lahan (IKL);
  3. Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.;
  4. Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kehutanan.
- Rekomendasi
  1. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang berperspektif lingkungan;
  2. Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan;
  3. Penambahan lahan tutupan vegetasi di DIY;
  4. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.2.3 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pembangunan dan Infrastruktur

4.4.2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Permasalahan
    1. Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan/atau irigasi;
    2. Sebagian besar daerah irigasi kewenangan pemda DIY belum mencapai indeks kinerja daerah irigasi kategori optimum;
    3. Masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan air bersih;
    4. Masih terdapat daerah yang mengalami genangan;
    5. Kondisi kemantapan jaringan jalan Provinsi di DIY mengalami penurunan diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan;
    6. Aksesibilitas jalan di DIY untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud;
    7. Belum meratanya infrastruktur jalan akses menuju destinasi wisata terutama di destinasi wisata yang baru bermunculan dan dikelola serta dikembangkan oleh masyarakat sekitar;
    8. Capaian akses air minum layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman;
    9. Pemanfaatan Ruang belum optimal.
- Rekomendasi
    1. Penanganan jalan perlu dilakukan baik dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kemantapan namun juga perlu dilakukan peningkatan jalan baik berupa peningkatan kapasitas, rekonstruksi jalan, maupun rehabilitasi jalan dan jembatan DIY;
    2. Pemda DIY perlu memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan yang merupakan akses ke destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kunjungan wisata di DIY;
    3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan seperti Penerangan Jalan Umum, Rambu-rambu dan marka jalan yang tidak hanya berada di jalan Provinsi, tetapi sampai dengan jalan desa yang masih terbatas sarana dan prasarana jalannya;
    4. Pemda DIY perlu melakukan terobosan program pembangunan maupun peningkatan jalan selain Jalan Provinsi seperti Jalan lingkungan di perumahan dan Jalan Usaha Tani

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena secara riil, program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

5. Pemda DIY perlu melakukan perbaikan terhadap jembatan-jembatan di wilayah terisolir dan terpencil untuk membuka ruang akses jalan masyarakat di wilayah tersebut;
6. Pemda DIY perlu melakukan identifikasi dan upaya rehabilitasi terhadap Jalan yang bukan merupakan Jalan Tambang yang dilalui oleh kendaraan pengangkut material hasil pertambangan;
7. Penambahan pembangunan sumur bor yang dapat memberikan kontribusi keterseediaan air di daerah sulit air;
8. Pemda DIY perlu meningkatkan program pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi dan juga *system Drainase*;
9. Pemda DIY harus lebih intensif melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Tata Ruang Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Perlu upaya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
11. Optimalisasi pelibatan masyarakat petani pengguna air dalam pengelolaan jaringan irigasi, baik dalam tahap pengoperasian maupun pemeliharaan.

4.4.2.3.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

- Permasalahan
    1. sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 49.937 rumah tidak layak huni yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
    2. Pemukiman kumuh di wilayah DIY sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 12 Kawasan Lokasi Pemukiman kumuh yang belum ditangani;
    3. Kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan RTRW belum secara keseluruhan terlayani dengan prasarana sarana utilitas umum yang memadai serta masih adanya keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin;
    4. Pemda DIY telah memiliki Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Yogyakarta guna memperkuat keistimewaan, namun hal tersebut belum secara maksimal dilaksanakan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Rekomendasi
    1. Pemda DIY harus menuntasan pelaksanaan program penanganan rumah tidak layak huni sehingga adanya jaminan bagi masyarakat untuk menempati rumah yang layak;
    2. Pemerintah DIY perlu mengkoordinasikan data Rumah Tidak Layak Huni guna mengefektifkan pelaksanaan program Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang juga didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta melalui *Program Corporate Social Responsibility;*
    3. Perlu ditingkatkannya program pembangunan sarana dan prasarana utilitas umum di Kawasan pemukiman seperti Ruang Terbuka bagi masyarakat, jalan dan *system drainase*, penerangan jalan umum di pemukiman, cctv di perkampungan dan sarana prasarana utilitas lainnya;
    4. Perlu dibuka terobosan untuk pembangunan rumah vertikal guna mengatasi keterbatasan lahan terutama bagi rumah tangga baru berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak huni;
    5. Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta aturan tentang pembangunan perumahan dan gedung yang memiliki ciri khas Keisitimewaan Yogyakarta perlu ditingkatkan sehingga sehingga arsitektur bangunan yang ada dapat mencerminkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan;
    6. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara masif bagi masyarakat luas terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.2.3.3 Urusan Perhubungan

- Permasalahan
    1. Tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Propinsi dikategorikan mendekati arus tidak stabil pada jam-jam puncak dan musim liburan terutama pada wilayah dengan ciri perkotaan.
- Rekomendasi
    1. Perlu pengendalian laju peningkatan kendaraan pribadi diiringi dengan peningkatan jumlah angkutan umum;
    2. Restrukturisasi Angkutan Massal termasuk angkutan Antar Wilayah di DIY serta angkutan pedesaan guna mempermudah mobilitas masyarakat juga mempermudah akses masyarakat untuk jalur distribusi barang yang menjadi usaha dari masyarakat;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Perlu dibangun konektifitas antar moda dan intermoda angkutan umum yang dapat menghubungkan antara stasiun, terminal, bandara, kawasan pelayanan publik, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kawasan kuliner dan kawasan lain yang menjadi pusat mobilitas masyarakat;
4. Pemerintah DIY harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan inovasi pelayanan transportasi umum yang baik, layak dan nyaman yang dapat mempermudah akses mobilitas masyarakat serta sosialisasi pentingnya transportasi massal.

4.4.2.3.4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Permasalahan
    1. luas pengusahaan pertambangan yang diperoleh dari luas izin yang diterbitkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kontrak Karya (KK) di DIY sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 3.938,87 hektar, atau sebesar 9,17% dari luasan kawasan peruntukan pertambangan.
- Rekomendasi
    1. Perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan kebutuhan energi di DIY;
    2. Pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum di daerah pedesaan, daerah semi terisolir, dan perbatasan dan perlu dipertimbangkan menggunakan PJU Tenaga Surya yang merupakan salah satu inovasi energy baru terbarukan;
    3. Pemerintah DIY harus terus melakukan evaluasi kondisi pertambangan di DIY berikut dengan langkah reklamasi paska tambang dan pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup secara berkala;
    4. Pemerintah DIY perlu melakukan pencegahan sejak dini dengan memperketat perizinan usaha tambang termasuk pada aspek AMDAL dan Program Reklamasi Paska Tambang
    5. Dalam penegakan hukum pertambangan termasuk dalam penertiban tambang liar oleh masyarakat perlu dipertimbangkan untuk melakukan upaya persuasif dan potensi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang, agar wilayah pertambangan tersebut selain bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur, juga bermanfaat bagi peningkatan prekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Pemerintah DIY perlu mengupayakan pelaksanaan Reklamasi Paska Tambang yang menjadi kewajiban dari Pemilik IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khusunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

4.4.2.3.5 Urusan Lingkungan Hidup

- Permasalahan
    1. Perlu upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY;
    2. Desentralisasi pengelolaan sampah belum maksimal terutama di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah.
- Rekomendasi
    1. Pemerintah DIY harus meningkatkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara masif untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan hidup;
    2. Perlu pembangunan budaya Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari sektor hulu ke hilir dengan memperkuat pengelolaan sampah secara partisipatif dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sejak dari rumah tangga Berbasis Kelurahan/kalurahan;
    3. Memperbanyak pembangunan TPS 3R skala kecil untuk memotong distribusi sampah ke TPA;
    4. Penguatan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah seperti Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah lainnya;
    5. Pemerintah DIY tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    6. Pemerintah DIY harus tetap melaksanakan program pengelolaan sampah di TPST Piyungan guna menganani sampah yang masih tertimbun dan mengolahnya dengan teknologi tertentu agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4.4.2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

- Permasalahan
    1. Perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Rekomendasi
    1. Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat DIY;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus diperluas terutama harus menjangkau pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, kaum disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan pembangunan yang lainnya;
3. Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif dengan teknologi informasi dan media sosial.

4.4.2.4 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

4.4.2.4.1 Urusan Pendidikan

- Permasalahan
    1. Kurangnya SDM Lulusan Sarjana;
    2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
    3. Pendidikan Inklusif;
    4. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik.
- Rekomendasi
    1. Program Beasiswa Perguruan Tinggi/Sarjana (S1)
        a. Memperluas program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
        b. Meningkatkan kemampuan, kapasitas daya saing SDM DIY, khususnya dari warga kurang mampu;
        c. Universitas Terbuka salah satu contoh Universitas Pemerintah berakreditasi A dengan biaya rendah bisa menjadi salah satu pilihan untuk program Pokir – Beasiswa Sarjana;
    2. Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan: diperlukan program penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah DIY, khususnya di daerah terpencil dan terluar. Bangun dan renovasi sekolah yang membutuhkan fasilitas dasar (ruang kelas, toilet, dan perpustakaan);
    3. Pendidikan Digital: Meningkatkan akses internet dan perangkat teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah pedesaan untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis digital;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pelatihan dan Sertifikasi Guru: Memperkuat program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dalam bidang pedagogi maupun materi ajar, serta mendorong pemanfaatan metode pembelajaran berbasis teknologi;
5. Penghapusan Sistem Zonasi: Mewujudkan akses pendidikan yang lebih adil. Penghapusan sistem zonasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil. Langkah ini perlu diiringi dengan reformasi kebijakan yang berfokus pada pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di semua sekolah. Dengan menghapus zonasi, siswa dapat memilih sekolah berdasarkan preferensi pribadi dan kebutuhan pendidikan mereka, tanpa batasan geografis.

4.4.2.4.2 Urusan Kesehatan

- Permasalahan
  1. Akses Layanan Kesehatan yang Merata;
  2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
  3. Penyuluhan Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat.
- Rekomendasi
  1. Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Daerah Terpencil: meningkatkan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas dan Klinik, di daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya;
  2. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis: menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin untuk masyarakat kurang mampu, seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, serta cek kesehatan dasar lainnya;
  3. Program Promosi Kesehatan: mengintensifkan kampanye kesehatan mengenai pola hidup sehat, vaksinasi, sanitasi, dan pencegahan penyakit menular maupun penyakit tidak menular melalui media massa dan kegiatan masyarakat;
  4. Penyediaan Jaminan Kesehatan untuk Warga Miskin dengan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional (JKN) agar lebih banyak masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Tehitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Perlu untuk terus diupayakan sampai dengan 100% warga DIY seluruhnya ter-*cover* dengan Jaminan Kesehatan/UHC;
  5. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Wilayah Tertinggal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam menghadapi tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan di DIY, khususnya di wilayah tertinggal seperti daerah pedesaan atau pelosok, pemerintah perlu mengadopsi strategi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu langkah utama adalah dengan memperluas cakupan program layanan kesehatan berbasis komunitas, seperti Posyandu, yang tidak hanya melayani ibu dan anak tetapi juga difokuskan pada deteksi dini penyakit tidak menular dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

4.4.2.4.3 Kepemudaan dan Olahraga

- Permasalahan
  1. Pemberdayaan Pemuda sebagai Agen Perubahan;
  2. Fasilitas dan Sarana Olahraga yang Memadai;
  3. Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
  4. Perlu didorong pengembangan olahraga masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, serta dalam upaya untuk menguatkan interaksi sosial antar warga yang kondusif guna memperkukuh ketahanan nasional;
  5. Masih kurangnya fasilitas olahraga untuk kaum difabel.

- Rekomendasi
  1. Peningkatan Infrastruktur Olahraga: Meningkatkan dan meratakan fasilitas olahraga di tingkat kabupaten/kota, kelurahan/desa, dengan membangun :
     a. Gedung Olahraga;
     b. Lapangan Olahraga;
     c. Taman olahraga;
     d. Penyediaan/pembeliaan peralatan dan perlengkapan olahraga;
     e. Memperbaiki dan menyediakan fasilitas olahraga di sekolah dan komunitas pemuda.;
     f. Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk kaum difabel.
  2. Program Pelatihan dan Pembinaan Pemuda: Mengadakan program pelatihan kepemudaan yang meliputi keterampilan hidup (*life skills*), kepemimpinan, kewirausahaan, serta kesadaran sosial. Memberikan wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya;
  3. Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi: Fokus pada pembinaan atlet muda di berbagai cabang olahraga, terutama yang potensial mengharumkan nama daerah di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tingkat nasional dan internasional. Menyediakan program beasiswa olahraga bagi pemuda berbakat;

4. Fasilitas Olahraga Rekreasi: Menyediakan lebih banyak fasilitas olahraga rekreasi untuk masyarakat umum, seperti jalur sepeda, jogging *track*, dan lapangan futsal yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda di kawasan perkotaan maupun pedesaan;
5. Program pemberian bantuan hibah bagi kelompok-kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Peningkatan Program Pembinaan dan Pelatihan Atlet untuk Mempertahankan Prestasi PON DIY. DIY sebagai salah satu provinsi dengan tradisi olahraga yang kuat telah menunjukkan prestasi gemilang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII SUMUT-ACEH Tahun 2024. Untuk mempertahankan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan program pembinaan dan pelatihan atlet. Pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan klub olahraga, akademi, dan lembaga pendidikan untuk membentuk sistem pembinaan yang berkelanjutan.

4.4.2.4.4 Kebudayaan

- Permasalahan
  1. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal;
  2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kebudayaan;
  3. Inklusivitas dalam Kebudayaan.
- Rekomendasi
  1. Pelestarian Warisan Budaya: menyusun program untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi lokal melalui pendidikan kebudayaan dan festival budaya yang melibatkan masyarakat, terutama generasi muda.;
  2. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan: mendorong pengembangan industri kreatif yang berbasis pada kebudayaan lokal, seperti kerajinan tangan, seni tradisional, dan kuliner khas daerah. Menyediakan akses pelatihan dan pemasaran untuk pengrajin lokal;
  3. Festival Budaya dan *Event* Kebudayaan: mengadakan festival kebudayaan tahunan yang melibatkan masyarakat lokal, serta meningkatkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk mengenalkan kebudayaan DIY ke dunia luar;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Program Literasi Budaya: meningkatkan program literasi budaya melalui pendidikan formal dan non-formal, dengan menghadirkan materi tentang sejarah dan kebudayaan lokal sebagai bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah;
5. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai-nilai Budaya, sebagai Ruh dan basis Undang-Undang Keistimewaan dan sekaligus Ikon Daerah istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.

4.4.2.4.5 Urusan Perpustakaan

- Permasalahan
  1. Masih Belum Idealnya Ketersediaan Tenaga Perpustakaan ;
  2. Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan masih belum optimal ;
- Rekomendasi
  1. Mendorong pembukaan formasi Pustakawan secara bertahap di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah.
  2. Membangun program magang pustakawan dan relawan literasi.
  3. Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk profesi pustakawan secara berkala.
  4. Pembiayaan untuk Perpustakaan Kampung: mendekatkan warga dengan fasilitas dan koleksi buku sehingga minat membaca warga kembali meningkat;
  5. Peningkatan Infrastruktur Perpustakaan: meningkatkan kualitas dan jumlah perpustakaan di tingkat kabupaten/kota dan desa. Membangun lebih banyak perpustakaan umum yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk ruang baca yang nyaman dan fasilitas akses internet;
  6. Transformasi Digital Perpustakaan: mengembangkan platform digital perpustakaan yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi buku dan informasi secara online, serta menyediakan layanan e-book dan audiobook untuk meningkatkan minat baca;
  7. Program Literasi dan Pemberdayaan Masyarakat: menyelenggarakan program literasi di perpustakaan yang mencakup pembelajaran membaca, menulis, dan keterampilan digital. Perpustakaan juga harus menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan keterampilan teknis melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara rutin;
  8. Kolaborasi dengan Sekolah dan Komunitas: mendorong perpustakaan untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif dan budaya, seperti diskusi buku, workshop literasi, dan pertunjukan seni yang melibatkan pemuda;

9. Penyuluhan Kearsipan: Melakukan pendidikan dan penyuluhan kearsipan kepada masyarakat, terutama di kalangan pemuda, agar lebih memahami pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan budaya lokal.

4.4.2.4.6 Sosial

- Permasalahan
  1. Berkembangnya permasalahan sosial dan terbatasnya jangkauan yang bisa dilakukan oleh Pemda DIY;
  2. Permasalahan kekerasan anak di jalan yang belum mampu dituntaskan sampai dengan saat sekarang ini;
  3. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang berkualitas;
  4. Perubahan iklim bisa jadi mempengaruhi produksi dan ketersediaan bahan pangan, sehingga beresiko terhadap kerentanan sosial.
- Rekomendasi
  1. Dalam peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya mendekatkan pelayanan sosial, maka perlu untuk menguatkan jalinan kerjasama lintas sektor baik di Pemda DIY itu sendiri maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. Penguatan Kerjasama dan sinergi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan, DP3AP2 maupun instansi lainnya guna menekan angka pelaku kekerasan anak yang telah menjurus pada tindakan kriminal;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Dll;
  4. Optimalisasi bantuan sosial yang tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.2.4.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

- Permasalahan
  1. Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak, baik jumlah dan ragamnya. Dataku Bapperida mencatat tahun 2023 terdapat 2.374 kasus kekerasan di DIY;
  2. Angka perkawinan usia anak masih cukup tinggi. Diikuti dengan masa perkawinan yang umumnya pendek;
  3. Partisiapsi Perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan/kebijakan masih perlu untuk ditingkatkan.
- Rekomendasi
  1. Kampanye terus menerus untuk menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlu inovasi dalam bentuk dan metode kampanye tersebut;
  2. Optimalisasi perlindungan perempuan dan anak melalui Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TESAGA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan SAPA 129;
  3. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di demua Kabupaten dan Kota guna percepatan program-program perlindungan sampai ke masyarakat;
  4. Peningkatan lama masa sekolah sebagai upaya mengurangi perkawinan usia anak. Penguatan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga lintas sektor
  5. Peningkatan terus menerus Pendidikan politik Perempuan melalui semua jejaring yang ada: Parpol, LSM, Kaukus/Organisasi pemberdayaan politik Perempuan, Dll.
  6. Perlunya kebijakan ramah lansia di DIY, mengingat jumlah lansia yang terus meningkat. Pada Tahun 2024 jumlah lansi di DIY sebesar 16,8% dan mendasarkan pada proyeksi kependudukan DIY, jumlah lansia akan terus meningkat pada tahun 2026;
  7. Penguatan program dukungan kaum rentan khususnya perlindungan/pemberdayaan perempuan, pendampingan perempuan dan anak korban KDRT.

4.4.2.4.8 Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- Permasalahan
  1. Meningkatnya beban rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dari penduduk usia produktif pada penduduk belum dan sudah tidak produktif. Hal ini membawa pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

konsekuensi bahwa pendapatan penduduk produktif sebagiannya harus dialokasikan untuk menopang yang belum atau sudah tidak produktif;

2. Rasio beban ketergantungan yang tinggi memiliki resiko pada kegagalan penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya, sehingga dapat berdampak pada penurunan angka harapan hidup penduduk DIY;
3. Ketahanan keluarga yang belum terwujud sebagaimana diharapkan, beresiko terhadap tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berdampak buruk pada konsisi psikologis anggota keluarga.

- Rekomendasi
  1. Meskipun angka fertilitas atau total *ferlility rate* di DIY dapat dikatakan aman, namun tetap harus dijalankan kampanye kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjalankan Program Keluarga Berencana (KB) untuk menjaga angka kelahiran stabil jangan sampai tumbuh secara besar-besaran.
  2. Penguatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga Pasal 37 Ayat (1), khususnya pembentukan konselor keluarga yang bertugas memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga di desa/kelurahan;
  3. Pengembangan secara terus menerus program-program khusus untuk kaum lansia seperti: pengembangan Posyandu Lansia, pembentukan sekolah lansia di kampung-kampung, pengembangan program jaminan sosial bagi lansia yang sudah tidak produktif dan tidak ditanggung keluarga;
  4. Peningkatan kerjasama dengan BKKBN Perwakilan DIY untuk kampanye/penyuluhan secara terus menerus kepada generasi muda melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan generasi berencana.

4.4.2.4.9 Urusan Tenaga Kerja

- Permasalahan
  1. Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi daerah dan daya saing tenaga kerja, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  2. Ketersediaan lapangan kerja belum memadai/sebanding dengan pertumbuhan Angkatan kerja khususnya untuk Pendidikan menengah dan tinggi;
  3. Kesenjangan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri di DIY masih cukup besar;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Penduduk bekerja sebesar 2.139.710 atau sebesar 96,31% pada tahun 2023, dari jumlah angkatan kerja yang ada belum mampu mencapai angka 100%.

- Rekomendasi
  1. Sektor-sektor strategis seperti pariwisata, manufaktur, dan ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus sebagai sektor penyedia lapangan kerja yang besar;
  2. Penguatan pada tiga sektor lapangan pekerjaan utama penduduk DIY yaitu perdagangan menyerap 20,82%; pertanian sebesar 19,65% dan sektor industri pengolahan sebesar 13,74%
  3. Penguatan dan peningkatan pelatihan kerja, pemagangan, standarisasi kompetensi dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
  4. Peningkatan layanan sarana hubungan industrial, layanan perlidungan norma kerja dan penerapan norma K3 secara baik di lingkungan kerja;
  5. Memperbanyak pelatihan bagi calon pekerja dan pekerja terkait dengan hak-hak pekerja mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hubungan industrial;
  6. Melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap implementasi struktur upah dan skala upah;
  7. Pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kelompok rentan di sektor informal seperti penderes dan nelayan;
  8. Program penanganan PHK oleh pabrik-pabrik untuk advokasi, pendampingan terhadap karyawan yang terkena PHK, yang saat ini jumlahnya cukup besar.

4.4.2.4.10 Urusan Transmigrasi

- Permasalahan
  1. Kuota peserta transmigrasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlahnya relatif sedikit dan fluktuatif, padahal animo warma masyarakat DIY untuk mengikuti program transmigrasi sangat tinggi;
  2. Kebijakan program transmigrasi di Pemerintah Pusat juga mengalami pasang surut seiring dengan alih fungsi lahan di daerah tujuan transmigrasi;
  3. Fasilitas pada lahan transmigran seringkali tidak sesuai dengan gambaran awal yang disosialisasikan.
- Rekomendasi
  1. Koordinasi dan konsolidasi program transmigrasi dengan Pemerintah Pusat untuk terus mengupayakan: pertama, penambahan kuota peserta transmigrasi bagi warga DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kedua, mengupayakan kuota daerah tujuan di Sumatera dan Kalimantan sebagai daerah tujuan favorit transmigran asal DIY;

2. Melakukan pembinaan dan komunikasi secara mendalam dengan warga transmigrasi asal DIY di daerah tujuan, termasuk didalamnya pendampingan ekonomi dan sosial bagi transmigran.
3. Jaminan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, jaringan irigasi, bebas banjir, dan ketersediaan air bersih harus diupayakan sebagai fasilitas utama di kawasan transmigrasi;
4. Pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada calon peserta transmigran khususnya karakteristik sosio kultural masyarakat tujuan maupun karakteristik dari lahan garapan.

4.4.2.5 Rekomendasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.4.2.5.1 Pengelolaan Belanja Daerah

- Rekomendasi
  1. Perlu melakukan analisa menurunnya kemampuan APBD DIY tahun 2026;
  2. Perlu dilakukan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek sasaran, program, kegiatan yang lebih baik;
  3. Perlu dilakukan koordinasi dalam antar Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi angka kemiskinan, indeks gini/ratio, IPM, gap pembangunan antar wilayah;
  4. Meningkatan perencanaan yang lebih cermat, manajemen pelaksanan kegiatan dan peningkatan pengawasan internal yang lebih baik, untuk meningkatkan opini BPK RI yang sudah 14 kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
  5. Pengawasan Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan Kabupaten dan Kota yang lebih intensif, jangan sampai terbaca langganan penerima Dana Keistimewaan Dinas tertentu;
  6. Porsi belanja untuk masyarakat lebih ditingkatkan dibandingkan belanja aparatur.

4.4.2.5.2 Pembiayaan Daerah

- Rekomendasi, Kebijakan yang Tepat Terkait Sumber Pembiayaan, meliputi:
  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
  2. Pencairan Dana Cadangan;
  3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
  6. Penerimaan Piutang Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.2.5.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Rekomendasi
  1. Penyusunan perencanaan yang lebih efektif dan efisien;
  2. Pemanfaatan lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah agar bisa optimal bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
  3. Bekerjasama dengan masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan;
  4. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Dalam hal dasar dan tujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah harus jelas dasar hukumnya;
  6. Penghapusan aset tidak bergerak, aset bergerak, pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui lelang harap diberikan informasi kepada DPRD.

4.4.2.5.4 Kekayaan daerah yang dipisahkan

- Rekomendasi PT Bank BPD DIY
  1. Pemenuhan Modal Pemda DIY yang harus dipenuhi sampai tahun 2026 harus diberikan kajian kemampuan keuangan Daerah dan Analisa keuntungan untuk Pemda DIY berdasarkan Kajian yang tepat;
  2. Kinerja PT. Bank BPD DIY dalam periode 2026-2027 mohon disampaikan target kinerja untuk DPRD DIY;
  3. Tugas Bank BPD DIY dalam ikut mengatasi problem DIY: angka kemiskinan, rasio gini, ketimpangan wilayah perlu diterjemahkan dalam program dan target yang jelas;
  4. Perbanyak Program Kredit Usaha Rakyat yang bisa meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DIY;
  5. Bank BPD harus ikut mengatasi masih banyaknya rentenir di pasar-pasar tradisional yang beroperasi pagi hari jam 05.00-07.30 WIB;
  6. Bank BPD DIY harus ikut melaksanakan Penumbuhan Ekonomi dengan pioritas Kawasan selatan DIY (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo);
  7. PT. Bank BPD DIY melakukan studi untuk membuka cabang di luar wilayah DIY.
- PT AMI
  1. Laporan dari unit usaha yang menghasilkan laba harus dijelaskan sehingga bisa dilihat unit penghasil laba yang efisien;
  2. Kekurangan penyertaan modal Pemda DIY perlu disampaikan analisis keuntungan kemampuan keuangan DIY;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kinerja PT AMI dalam menghasilkan laba harus ditingkatkan;
4. Perbaikan Manajemen Perusahaan dan pengawasan dari Pemda DIY yang tepat dan teliti;
5. Biaya Belanja Subsidi Pemda Yang diterima PT AMI perlu dijelaskan laporan PT AMI dalam laporan LKPJ AMJ dan setiap tahun laporan LKPJ;
6. Perlu melakukan inovasi dengan melakukan pendataan pelangan PT Trans Jogya melalui aplikasi online untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada pelanggan seperti KAI *acces* yang tersambung dengan layanan Trans Jogja.

- PT Taru Martani
  1. Pengawasan Manajemen PT Taru Martani oleh Pemda DIY yang lebih teliti dan tepat;
  2. Perbaikan manajemen Sistem Pengedaian Internal (SPI) harus ditingkatkan;
  3. Perbaikan sistem bisnis Perusahaan;
  4. PT. Taru Martani ikut membangun kesejahteraan masyarakat DIY melalui program CSR di daerah kalurahan miskin di DIY.
- Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
  1. Status badan hukum diperjelas;
  2. Peningkatan Laba BUKP harus ditingkatkan pada tahun 2025;
  3. Peran strategis BUKP dalam membantu mengatasi masalah rentenier di pasar tradisional yang beroperasi pagi hari mulai jam 05.00-07.30 WIB;
  4. Dari 75 BUKP dimohon disampaikan data dan aset masing masing BUKP dan data BUKP yang paling sehat dan tidak sehat;
  5. Pengawasan Satuan Pengawas Internal harus ditingkatkan agar tidak ada penyelewengan.
- Perumda Air Bersih Tirtatama DIY
  1. Mohon ditinjau ulang kajian dalam naskah akademik terkait tujuna perusahaan;
  2. Mohon ditinjau ulang rencana laba perusahaan dalam naskah akademik dan rencana bisnis perusahaan dan visi, misi direksi;
  3. Tahun 2026 ditargetkan mendapatkan laba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-DIY

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata dan perdagangan. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 5- 1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06 – 6,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,41 – 5,71
Tingkat Kemiskinan (%)	5,55 – 6,25
Indeks Gini	0,381 – 0,446
Indeks Pembangunan Manusia	89,12 – 89,5

Sumber: BA Desk Indikator Makro Rakortekrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi kisaran 5,06 – 6,03% di tahun 2026. TPT ditargetkan mengalami penurunan hingga 5,41 – 5,71% di tahun 2026. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 5,55 – 6,25% di tahun 2026. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,381 – 0,446 di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat menjadi 89,12 – 89,5 di tahun 2026.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 5- 2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28 – 5,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,04 – 4,57
Tingkat Kemiskinan (%)	9,39 – 9,67
Indeks Gini	0,385 – 0,409
Indeks Pembangunan Manusia	82,26 – 82,89

Sumber: BA Desk Indikator Makro Rakortekrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi kisaran 5,28 – 5,51% di tahun 2026. TPT ditargetkan menurun menjadi kisaran 3,04 – 4,57% di tahun 2026. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun seiring dengan penurunan TPT dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu dari 10,75-11,02% di tahun 2025 menjadi 9,39 – 9,67% di tahun 2026. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan yang diharapkan turun menjadi 0,385 – 0,409 di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat menjadi 82,26 – 82,89 di tahun 2026.

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5- 3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8 – 5,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,90 – 2,50
Tingkat Kemiskinan (%)	13,69 – 14,69
Indeks Gini	0,371 – 0,401
Indeks Pembangunan Manusia	76,40 – 76,69

Sumber: BA Desk Indikator Makro Rakortekrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo di tahun 2026 diharapkan dapat meningkat menjadi 4,8 – 5,4% dari target pertumbuhan tahun 2025 sebesar 4,78 – 5,38%. TPT ditargetkan turun menjadi 1,90 – 2,50% di tahun 2026. Penurunan tersebut dapat dicapai apabila tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 13,69 – 14,69% ditahun 2026. Target ketimpangan pendapatan juga turun menjadi 0,371 – 0,401di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 76,00-76,23 di tahun 2025 menjadi 76,40 – 76,69 di tahun 2026.

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Tabel 5- 4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,91 – 5,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,93 – 2,16
Tingkat Kemiskinan (%)	14,21 – 15,17
Indeks Gini	0,332 – 0,354
Indeks Pembangunan Manusia	73,14 – 74,13

Sumber: BA Desk Indikator Makro Rakortekrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat meningkat menjadi kisaran 4,91 – 5,2% di tahun 2026 dibandingkan target pertumbuhan tahun 2025 sebesar 4,95-5,57%. TPT ditargetkan mengalami penurunan menjadi 1,93 – 2,16% di tahun 2026. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 1,93 – 2,16% di tahun 2026. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,332 – 0,354 di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 72,54-73,53 di tahun 2025 menjadi 73,14 – 74,13 di tahun 2026.

5.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

Tabel 5- 5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37 – 5,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11 – 5,05
Tingkat Kemiskinan (%)	6,29 – 6,99
Indeks Gini	0,423 – 0,429
Indeks Pembangunan Manusia	85,74 – 86,02

Sumber: BA Desk Indikator Makro Rakortekrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dari kisaran 5,24 – 5,74% di tahun 2025 menjadi 5,37 – 5,99% di tahun 2026. TPT ditargetkan mengalami penurunan dari target tahun 2025 sebesar 4,13 – 5,08% menjadi 4,11 – 5,05% di tahun 2026. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun yaitu menjadi 6,29 – 6,99% di tahun 2026. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,423 – 0,429 di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat menjadi 85,74 – 86,02 di tahun 2026.

5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berikut kebijakan pembangunan keistimewaan berdasarkan urusan keistimewaan di DIY.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5.2.1 Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Keistimewaan DIY ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

1.) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2.) Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
3.) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Ruang Garuda Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, pada Rabu 10 Oktober 2012. Dasar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keppres Nomor 87/P/Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017.

Penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-undang Keistimewaan terkait Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tahun 2014. Penetapannya pada tahun 2015 dengan Perdais Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur dikarenakan KGPAA Paku Alam IX wafat pada tanggal 21 November 2015. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 55/P Tahun 2016 tentang Penetapan Wakil Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan 2012-2017. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2017 dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Istana Presiden Jakarta berdasarkan Keppres 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

5.2.2 Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam Urusan kelembagaan DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) Undang-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, bahwa Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungan kerja dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Selanjutnya implementasi bentuk kelembagaan yang mencirikan keistimewaan DIY dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang pada tahun 2024 dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diantaranya dengan adanya lembaga yang menangani kewenangan keistimewaan sebagai berikut:

a. Paniradya Kaistimewan;
b. Parampara Praja,
c. Kundha Kabudayan,
d. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Ciri lain penyelenggaraan urusan keistimewaan dari unsur lembaga Pemerintah Daerah DIY, adalah melaksanakan dan mengisi serta makin memperkuat keistimewaan DIY di bawah koordinator urusan keistimewaan di masing-masing lembaga di atas. Dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang–undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penugasan Urusan Keistimewaan. Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut:

a. Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY;
b. Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY;
c. Substansi keistimewaan DIY tidak hanya pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan;
d. Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan;

Dengan latar belakang tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya diselenggarakan oleh Pemda DIY, tetapi merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

5.2.3 Kebudayaan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu "Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan. Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
c. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik eropa maupun asia. Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

5.2.4 Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY dilakukan dengan berbagai cara meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; penerbitan sertifikat Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa; penerbitan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta penerbitan izin pengelolaan tanah kas desa. Hingga tahun 2023, telah dilakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.958 bidang. Jumlah pendaftaran Tanah Desa sampai dengan tahun 2023 mencapai 12.035 bidang. Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD sebesar 40,41% dari perhitungan jumlah pendaftaran sebesar 25.993 bidang terhadap 64.323 bidang yang terdiri dari :

a. PendaftaranTanah SG/PAG sejumlah 13.958 bidang
b. Pendaftaran penyesuaian sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 bidang
c. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang

Pada tahun 2024 telah diterbitkan regulasi sebagai regulasi operasional dari pemanfaatan tanah Desa/kalurahan yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu juga telah terbit 392 Peraturan Desa serta total sudah diterbitkan rekom izin pemanfaatan tanah sejumlah 2.172 rekomendasi (pada tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi tanah SG/PAG dan 24 rekomendasi Tanah desa). Program pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan juga diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi ini tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY yang lebih baik.

Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di DIY terjadi permasalahan pertanahan baik dalam bentuk tukar menukar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

maupun non-tukar menukar. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terjadi.

5.2.5 Tata Ruang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa.

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS merupakan salah satu solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungkit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY. Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS. Selain itu aksesibilitas juga dibangun untuk menghubungkan antar satuan ruang strategis saat ini diantaranya dibangun untuk menghubungkan Satuan Ruang Strategis Prambanan -candi ijo dengan Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu yang dibangun dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat diantaranya menangkap koneksi dengan aksesibilitas Tol Jogja – Solo serta alternatif akses jogja Gunungkidul.

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan symbol simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan:

Tabel 5- 6 Capaian Kinerja Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
	IKU KEISTIMEWAAN											
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04	12,67
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44	55,29
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30	96,3
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877	22.661

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5- 7 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

RPJMD						*BASELINE*		TARGET						KONDISI AKHIR
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Target 2023 (RPD)**	**Capaian 2023 (RPD)**	**Sasaran**	**indikator sasaran**	**2022**	**Target 2023**	**Capaian 2023**	**Target 2024**	**Capaian 2024***	**Target 2025**	**Target 2026**	**Target 2027**	**Target 2027**
1.1) Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,31	6,01	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,16	10,66	11,04	10,16	10,40	9,66	9,16	8,66	8,66
	Indeks Kebahagiaan			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	4,7-5,2	4,9-5,4	5,07	5,1-5,6	5,03	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
					Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28	29,07	31,75	30,23	33,14	31,51	35,42	34,41	34,41
					TPT	4,06	4,06-3,76	3,69	3,81-3,51	3,43	3,56-3,26	3,31-3,01	3,06-2,76	3,06-2,76
					Inflasi	6,67*	2-4	3,17	2-4	1,28	2-4	2-4	2-4	2-4
				1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,63	81,01	81,09	81,36	81,62	81,68	81,97	82,23	82,23
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	74,38	74,58	67,9	74,78	67,90	74,98	75,18	75,38	75,38
2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,444	0,4805	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,06	40,07	40,19	40,09	41,10	40,13	40,18	40,24	40,24

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

RPJMD						*BASELINE*		TARGET						KONDISI AKHIR
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Target 2023 (RPD)**	**Capaian 2023 (RPD)**	**Sasaran**	**indikator sasaran**	**2022**	**Target 2023**	**Capaian 2023**	**Target 2024**	**Capaian 2024***	**Target 2025**	**Target 2026**	**Target 2027**	**Target 2027**
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	3.1.1) Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
					Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	85,62	Tinggi	83,88	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,96	66,29	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	81,5	84,87	82,62	82,83	83,74	84,86	85,98	85,98
				4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	108,15	113,11	102,83	108,7	104,29	99,88	99,88

Capaian 2024 angka sementara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5- 8 Capaian Kinerja Program Pemda Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2023 berdasarkan RPD

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	IKU KEISTIMEWAAN				
1	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	Buah	343	368
2	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	81,5	84,87
3	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	-	-	-
		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Persen	100	100
4	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persen	20,94	21,89

Sumber : LKPJ DIY, 2023

Tabel 5- 9 Capaian Kinerja Program Pemda Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2023-2024 berdasarkan RPJMD 2022-2027

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
	IKU KEISTIMEWAAN						
1	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	Buah	323	368	349	399

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,75	86,67	87,76	87,03
		b. Indeks Kematangan SPBE	Indeks	3,07	4,22	3,12	4,53
3	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	a. Perwujudan pola ruang	Persen	91,96	n/a	93,22	93,26
		b. Capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Persen	20,94	21,89	24,23	29,60
4	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	81,50	84,87	82,62	82,83
5	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah*	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Persen	100	100	100	100

**angka sementara*

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM RKPD TAHUN 2026

Usaha perwujudan tema pembangunan RKPD DIY 2026 yaitu **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"** dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Prioritas pembangunan di atas didukung ketercapaiannya melalui program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dukungan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-1 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Daerah DIY Tahun 2026

Prioritas Daerah	Program
PD1 Penurunan tingkat kemiskinan	Program Kawasan Permukiman
	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Daerah	Program
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Penanganan Bencana
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
PD2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Program Hubungan Industrial
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Daerah	Program
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
PD3 Peningkatan kualitas SDM	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Daerah	Program
	Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
PD4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
PD5 Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Daerah	Program
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Penghubung
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Daerah	Program
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Rehabilitasi Sosial
PD6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 6-2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Bidang Urusan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	15	81	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	18	59	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
		1	2	2	Dinas Kesehatan
		1	1	1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1	1	2	Dinas Pariwisata
		9	18	54	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		1	1	9	Dinas Perhubungan
		1	1	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	10	25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		1	1	4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1	3	3	Sekretariat Daerah
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	4	4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	11	26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2	8	23	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	19	104	Dinas Sosial
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6	18	50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	23	53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	5	11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	4	5	11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		1	1	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	2	3	Sekretariat Daerah
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9	16	38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	11	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	13	37	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	9	27	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	14	34	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	12	26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	3	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	3	3	Badan Penghubung Daerah
		2	13	48	Dinas Kebudayaan
		1	2	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
		1	1	1	Dinas Kesehatan
		1	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	3	3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1	3	4	Dinas Pariwisata
		1	2	2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		1	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	1	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		1	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	2	3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1	1	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1	1	1	Dinas Sosial
		1	1	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	2	3	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	3	4	Sekretariat Daerah
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	14	41	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1	3	6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6	23	55	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5	15	45	Dinas Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	19	46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	3	9	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	4	9	14	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	6	7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	10	33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Sekretariat Daerah	1	1	1	Badan Kepegawaian Daerah
		1	2	2	Badan Pendidikan dan Pelatihan
		2	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	1	1	Dinas Sosial
		1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	13	32	Paniradya Kaistimewan
		8	29	75	Sekretariat Daerah
34	Sekretariat DPRD	2	17	57	Sekretariat Dprd
35	Perencanaan	3	13	37	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
36	Keuangan	4	15	66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
37	Kepegawaian	2	10	40	Badan Kepegawaian Daerah
38	Pendidikan dan Pelatihan	2	10	30	Badan Pendidikan dan Pelatihan
39	Penelitian dan Pengembangan	1	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
40	Pengelolaan Penghubung	2	8	22	Badan Penghubung Daerah
41	Inspektorat Daerah	3	12	40	Inspektorat
42	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		**215**	**574**	**1583**	

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6-3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						**1.349.335.900.790,00**							**1.565.701.807.838,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.303.433.433.790,00**							**1.515.129.983.038,90**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.303.433.433.790,00**							**1.515.129.983.038,90**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**968.316.802.302,00**						**-**	**1.130.636.502.488,90**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 %	141.125.000,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	157.437.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	31.909.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		35.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	79.216.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		87.137.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		35.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	964.170.449.702,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	1.125.145.726.527,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8167 Orang/ Bulan	964.044.279.702,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.124.901.610.127,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	42.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		145.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		31.387.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	33.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		67.529.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	101.130.000,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	144.903.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	101.130.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		144.903.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	55.030.000,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	113.261.115,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	41.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		65.192.380,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.530.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		48.068.735,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	221.261.000,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	438.495.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.225.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		5.676.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.293.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		27.623.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		12.133.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.195.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		19.415.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.118.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		19.415.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	188.890.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		354.233.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	587.132.000,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	841.065.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	312.393.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		729.635.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	274.739.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		111.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	2.631.292.400,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	3.145.890.176,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		2.978.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.252.792.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.424.979.776,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.378.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.717.931.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	409.382.200,00			-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	-	649.722.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	232.987.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		301.224.220,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		9.724.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	126.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		285.331.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	41.555.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		53.443.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*** ***Angka Putus Sekolah SMA/SMK*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat***	**-**			**81 %** **0,17 %** **86.20 %** **100 %** **77.57 %**	**335.058.120.488,00**						**-**	**384.404.224.130,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim keamanan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran*	-			84,88 Indeks 42 medali 83,43 Angka 97,16 Indeks 34.10 % 61,64 % 74,61 % 450 siswa	114.799.521.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	131.440.657.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				23177 Peserta didik	7.487.011.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		10.438.380.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1915 Peserta Didik	1.863.731.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		3.931.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				272 Orang	1.665.772.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		2.181.591.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	181.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		21.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				69 Satuan Pendidikan	480.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		1.103.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				172 Satuan Pendidikan	101.490.790.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		111.639.869.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				1198 Orang	178.830.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		196.771.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	927.085.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		1.044.873.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	17.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		18.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	12.850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		14.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				90 Orang	95.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		104.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				118 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		745.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Iklim kebinekaan SMK* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Iklim keamanan SMK*	-			77,80 Angka 66,20 Angka 60 % 44 sekolah 93,17 Angka 34.10 % 23 medali 55,16 Angka 81,73 Angka	171.140.670.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	192.562.062.110,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				28308 Peserta didik	12.300.874.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		17.326.078.165,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				900 Peserta Didik	3.564.286.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		4.030.598.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				450 Orang	3.394.071.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		4.093.462.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				270 Orang	5.260.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		42.151.780,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				44 Satuan Pendidikan	228.416.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		251.257.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				205 Satuan Pendidikan	151.054.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		166.159.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.776 Orang	251.448.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		276.636.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	250.614.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		281.507.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	19.280.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		21.572.045,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	7.499.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		8.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	64.680.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		71.148.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim kebinekaan SMALB* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Iklim inklusivitas SMALB* *Persentase SLB yang melaksanakan UKS* *Iklim keamanan SMALB* *Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional*	-			80,87 Angka 15 medali 5000 siswa 59,46 Angka 84,93 Angka 28.10 % 83,20 Angka 59,37 Angka	49.117.928.838,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	-	60.401.504.130,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	770.529.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		663.552.450,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5035 Peserta Didik	7.503.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		8.506.045.240,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				720 Peserta Didik	2.400.517.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		2.641.668.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				350 Orang	2.912.554.291,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		3.620.612.820,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				24 Orang	243.361.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		271.877.925,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				35 Satuan Pendidikan	1.866.144.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		2.055.702.990,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	23.096.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		25.326.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	17.369.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		19.105.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	98.622.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		108.485.025,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	14.314.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		15.745.620,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	10.149.108.847,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		17.122.690.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				252 Orang	45.256.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		49.782.150,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten***	**-**			**96.33 %**	**33.001.000,00**						**-**	**53.033.420,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus*	-			1 tahun	33.001.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	53.033.420,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Dokumen	31.876.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		49.544.880,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Laporan	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.488.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan***	**-**			**10 dokumen Jumlah**	**25.510.000,00**						**-**	**36.223.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY*	-			10 dokumen	22.540.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan Menengah	-	32.956.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	22.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan Menengah		32.956.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan khusus di DIY*	-			1 dokumen	2.970.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan Khusus	-	3.267.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan Khusus		3.267.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.792.568.000,00**							**50.371.824.800,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**45.792.568.000,00**							**50.371.824.800,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya***	**-**			**58,83 %**	**45.792.568.000,00**						**-**	**50.371.824.800,00**	
	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	*Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya*	-			53,67 %	45.792.568.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO	-	50.371.824.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				15 Laporan	39.965.408.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		43.961.948.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan				8 Unit	1.960.152.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		2.156.167.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta														
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta				100 Orang	3.867.008.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		4.253.708.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**109.899.000,00**							**200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**109.899.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik***	**-**			**75 %**	**109.899.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	109.899.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	109.899.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK						**5.197.237.600,00**							**5.716.952.147,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.197.237.600,00**							**5.716.952.147,50**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.197.237.600,00**							**5.716.952.147,50**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**5.098.173.800,00**						**-**	**5.607.981.967,50**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	8.970.000,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	9.867.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.970.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		9.867.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	15.900.000,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	17.490.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.900.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		17.490.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	105.281.800,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	115.809.980,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.916.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		4.308.480,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.921.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		7.613.650,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.755.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		5.231.050,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.942.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		4.336.200,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.746.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		94.320.600,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	32.564.000,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	35.820.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	32.564.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		35.820.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	1.552.318.600,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	1.707.550.460,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	312.958.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		344.254.460,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.239.360.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		1.363.296.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	791.439.400,00			-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	870.574.127,50	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	26.972.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		29.669.640,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	16.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		17.943.200,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	730.125.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		803.128.287,50	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	18.030.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Latihan Pendidikan Teknik		19.833.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	2.591.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Latihan Pendidikan Teknik	-	2.850.870.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.591.700.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Latihan Pendidikan Teknik		2.850.870.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik***	**-**			**45 Orang**	**99.063.800,00**						**-**	**108.970.180,00**	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP*	-			25,34 %	99.063.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	108.970.180,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	37.563.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		41.320.180,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	61.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		67.650.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
		BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA						**45.624.347.750,00**							**53.824.167.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.624.347.750,00**							**53.824.167.100,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**45.624.347.750,00**							**53.824.167.100,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**15.737.254.300,00**						**-**	**12.314.634.640,00**	
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	13.680.000,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	15.064.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	13.680.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		15.064.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	17.175.000,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	18.892.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	17.175.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		18.892.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	135.862.200,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	240.017.030,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.477.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		60.758.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.132.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		14.723.280,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	33.030.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		38.271.200,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.830.900,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		13.790.150,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.838.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		5.299.800,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	40.554.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		107.174.100,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	1.724.512.000,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	261.111.400,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	11.212.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		93.431.800,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5075 Unit	1.713.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		167.679.600,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	8.203.505.800,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	10.203.167.480,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	709.065.800,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		779.972.380,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	7.494.440.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		9.423.195.100,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	5.642.519.300,00			-	-	Balai Pemuda dan Olahraga	-	1.576.381.730,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	96.254.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		139.713.530,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	5.510.220.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		1.378.993.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	36.045.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pemuda dan Olahraga		57.675.200,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha***	**-**			**9.23% %**	**2.937.916.100,00**						**-**	**7.420.990.060,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan*	-			25 kelompok	2.937.916.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pemuda	-	7.420.990.060,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				865 Orang	2.198.741.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pemuda		4.034.892.730,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	130.489.250,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pemuda		213.392.960,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				45 Orang	608.685.750,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pemuda		3.172.704.370,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS***	**-**			**264 Atlet**	**25.449.177.350,00**						**-**	**32.438.542.400,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase fasilitasi prasarana olahraga di tingkat provinsi*	-			100 %	1.540.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat	-	1.694.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				154 Unit	1.540.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat		1.694.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti*	-			2 Event	4.594.386.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pelajar	-	5.799.349.600,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				131 Orang	2.127.448.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pelajar		3.068.406.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	264.162.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pelajar		290.578.200,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				1 Kegiatan	2.202.776.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	pelajar		2.440.365.400,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga*	-			370 Atlet	2.064.791.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Atlet	-	2.340.192.800,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				800 Orang	238.882.850,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Atlet		331.693.450,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				275 Orang	1.825.908.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Atlet		2.008.499.350,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional*	-			3 Lembaga	17.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga	-	22.605.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	17.250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga		22.605.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan***	**-**			**100% Persentase**	**1.500.000.000,00**						**-**	**1.650.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan*	-			1 lembaga	1.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Organisasi kepramukaan	-	1.650.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Organisasi kepramukaan		1.650.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
		BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**10.849.890.000,00**							**17.096.664.640,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.849.890.000,00**							**17.096.664.640,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**10.849.890.000,00**							**17.096.664.640,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**7.980.590.000,00**						**-**	**12.447.710.440,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	6.210.000,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	6.831.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.210.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		6.831.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	9.870.000,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	11.022.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		11.022.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	74.622.600,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	322.006.300,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.653.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		40.004.250,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.141.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		87.692.550,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	6.094.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		36.163.050,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.756.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		22.619.850,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.034.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		5.841.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	38.944.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		129.685.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	27.647.000,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	396.360.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	16.120.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		123.938.100,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9.878.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		16.298.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.649.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		256.124.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	7.703.365.000,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	10.851.663.900,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7.131.565.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		10.141.633.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	571.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		710.030.200,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	158.875.400,00			-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	-	859.826.440,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	56.836.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		128.386.940,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18.851.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		87.558.900,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.008.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		530.640.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	61.180.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		113.240.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar***	**-**			**60 %**	**2.869.300.000,00**						**-**	**4.648.954.200,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional*	-			61,64 % 74,61 %	2.509.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	3.964.230.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				80 Unit	2.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2.200.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3 Peserta Didik	675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		10.890.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				741 Orang	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		181.804.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				422 Konten Digital	398.925.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.339.501.900,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	9.520.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		232.034.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional*	-			66,20 Angka 55,16 Angka	253.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	439.039.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		110.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				741 Orang	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		181.804.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	53.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		147.235.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional*	-			59,37 Angka 59,46 Angka	106.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	245.683.900,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				741 Orang	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		181.804.700,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		63.879.200,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA						**18.744.087.701,00**							**22.111.145.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.744.087.701,00**							**22.111.145.100,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**18.744.087.701,00**							**22.111.145.100,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.173.465.550,00**						**-**	**1.779.045.345,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	6.192.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	6.756.090,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.192.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		6.756.090,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	91.059.500,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	115.183.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	91.059.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		115.183.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	108.435.650,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	150.090.105,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.376.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		10.568.470,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	32.092.200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		53.751.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4.166.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		12.383.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.801.750,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		11.044.935,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.674.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		2.941.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.325.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		59.400.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	155.390.500,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	372.923.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	17.449.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		148.386.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	106.725.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		156.181.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	31.216.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		68.355.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	743.215.900,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	1.002.489.950,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	127.015.900,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		235.907.650,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	616.200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		766.582.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	69.172.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	-	131.602.900,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	26.301.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		28.931.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.538.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		1.691.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.600.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		92.473.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	7.733.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		8.506.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta***	**-**			**58.63 %**	**17.570.622.151,00**						**-**	**20.332.099.755,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim keamanan SMA* *Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim kebinekaan SMA*	-			84,88 Indeks 83,43 Angka 97,16 Indeks	14.075.345.901,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	16.385.873.955,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	201.524.350,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		428.572.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				42 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		5.294.740,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	29.550.300,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		85.548.375,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		157.999.160,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	16.085.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		12.999.580,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	13.778.685.751,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		15.695.460.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim kebinekaan SMK* *Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK*	-			93,17 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka	3.495.276.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	3.946.225.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	148.017.650,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		153.365.520,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				28 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		4.030.620,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	11.390.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		12.529.660,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	3.331.368.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.773.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL						**37.464.967.750,00**							**45.810.161.375,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37.464.967.750,00**							**45.810.161.375,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**37.464.967.750,00**							**45.810.161.375,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.314.377.000,00**						**-**	**2.443.304.050,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	7.230.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	132.450.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	145.695.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	132.450.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		145.695.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	79.365.500,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	144.659.020,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.543.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		8.871.720,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	17.160.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		26.659.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	6.133.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		7.634.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.886.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		16.967.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		2.026.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	34.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		82.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	104.098.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	727.426.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	15.036.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		427.362.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	68.776.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		211.555.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.286.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		88.509.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	927.140.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	1.165.166.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	82.940.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		124.234.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	844.200.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		1.040.932.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	64.093.500,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	-	252.404.130,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19.948.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		27.034.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.600.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		209.903.430,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	10.545.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		15.466.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul***	**-**			**49.47 %**	**36.150.590.750,00**						**-**	**43.366.857.325,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Iklim keamanan SMA*	-			83,43 Angka 97,16 Indeks 84,88 Indeks	19.760.563.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	23.033.812.890,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				425 Peserta Didik	142.560.450,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		494.134.410,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		25.191.650,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	68.010.300,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		107.811.330,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				19 Kegiatan	10.775.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		25.305.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				19 Satuan Pendidikan	19.537.717.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		22.381.370.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim keamanan SMK* *Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim kebinekaan SMK*	-			81,73 Angka 77,80 Angka 93,17 Angka	16.390.027.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	20.333.044.435,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				130 Peserta Didik	93.297.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		1.750.980.110,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		27.717.525,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	11.924.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		23.746.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	16.280.306.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		18.527.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO						**16.355.134.900,00**							**20.581.567.380,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.355.134.900,00**							**20.581.567.380,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**16.355.134.900,00**							**20.581.567.380,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.103.546.000,00**						**-**	**2.483.846.420,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	6.210.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	6.831.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		6.831.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	120.150.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	133.353.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	120.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		133.353.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	96.211.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	179.516.370,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.858.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		7.294.870,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	35.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		65.471.450,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.103.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		15.054.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.983.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		23.669.250,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		2.026.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	36.365.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		66.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	53.408.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	251.533.150,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	53.408.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		251.533.150,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	760.330.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	921.296.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	78.930.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		102.366.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	681.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		818.930.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	67.237.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	-	991.316.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	31.897.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		35.086.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		945.340.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		10.890.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo***	**-**			**47.00 %**	**15.251.588.900,00**						**-**	**18.097.720.960,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA*	-			83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	7.878.145.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	9.614.594.110,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				130 Peserta Didik	144.119.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		369.694.710,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		45.210.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	11.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		41.350.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		167.299.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	6.510.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		8.110.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	7.654.076.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		8.982.930.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK*	-			77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	7.373.443.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	8.483.126.850,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	114.297.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		117.546.550,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		61.710.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	6.510.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		8.110.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				6 Satuan Pendidikan	7.248.136.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		8.292.460.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL						**23.418.426.900,00**							**63.422.210.225,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.418.426.900,00**							**63.422.210.225,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**23.418.426.900,00**							**63.422.210.225,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.187.623.700,00**						**-**	**1.912.798.910,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	7.230.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	123.990.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	136.389.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	123.990.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		136.389.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	80.934.200,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	123.265.890,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.956.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		8.751.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19.964.550,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		21.961.005,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.976.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		9.873.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.475.650,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		8.603.485,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		2.026.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	34.720.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		72.050.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	74.785.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	236.324.550,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	74.785.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		236.324.550,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	767.309.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	933.569.670,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	136.550.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		159.421.570,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	630.759.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		774.148.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	133.375.500,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	-	475.296.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.767.500,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		43.958.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	63.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		385.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	33.008.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		46.338.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul***	**-**			**41.49 %**	**22.230.803.200,00**						**-**	**61.509.411.315,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Iklim keamanan SMA*	-			83,43 Angka 97,16 Indeks 84,88 Indeks	11.304.800.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	49.024.484.025,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	559.403.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		615.343.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	143.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		157.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				315 Peserta Didik	187.643.600,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		36.245.863.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				24 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		9.230.485,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	56.393.300,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		62.032.630,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		144.481.920,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	6.310.900,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		6.941.990,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	379.482.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		417.430.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	9.887.068.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		11.365.860.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim kebinekaan SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim Inklusivitas SMK*	-			93,17 Angka 81,73 Angka 77,80 Angka	10.926.002.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	12.484.927.290,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	514.420.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		565.862.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	144.807.500,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		132.261.250,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				45 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		12.898.050,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	14.350.900,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		15.785.990,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	10.247.924.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		11.754.820.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN						**19.958.378.700,00**							**23.250.618.490,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.958.378.700,00**							**23.250.618.490,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**19.958.378.700,00**							**23.250.618.490,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.049.954.900,00**						**-**	**1.263.073.020,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	7.230.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	114.270.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	127.677.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	114.270.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		127.677.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	121.105.800,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	145.241.030,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.274.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		4.701.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	47.134.900,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		50.350.190,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	17.931.400,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		15.498.340,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.923.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		31.414.900,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		2.026.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	23.000.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		41.250.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			50 %	95.755.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	86.313.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	19.842.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		4.824.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75.913.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		81.489.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	-			100 %	623.294.100,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	824.817.290,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		660.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	67.894.100,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		139.367.690,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	554.200.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		684.789.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	-			100 %	88.300.000,00			-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	-	71.071.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	37.536.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		41.190.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.380.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		9.218.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.600.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		11.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8.784.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		9.662.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman***	**-**			**46.85 %**	**18.908.423.800,00**						**-**	**21.987.545.470,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA*	-			83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	14.806.236.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	-	17.303.234.685,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	151.459.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		448.431.775,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				56 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		39.470.530,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	71.284.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		89.209.450,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	5.004.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		30.762.930,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				17 Satuan Pendidikan	14.576.988.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		16.695.360.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Iklim keamanan SMK*	-			77,80 Angka 93,17 Angka 81,73 Angka	4.102.187.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	-	4.684.310.785,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	132.129.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		114.571.050,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				58 Satuan Pendidikan	1.500.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		40.395.960,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	5.517.800,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		31.443.775,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	3.960.040.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		4.494.600.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA						**4.113.490.000,00**							**4.560.228.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.113.490.000,00**							**4.560.228.200,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.113.490.000,00**							**4.560.228.200,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**1.221.662.000,00**						**-**	**1.343.828.200,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	1.221.662.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	-	1.343.828.200,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.221.662.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		1.343.828.200,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.891.828.000,00**						**-**	**3.216.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.891.828.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta	-	3.216.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.891.828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta		3.216.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI						**2.743.962.000,00**							**3.048.749.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.743.962.000,00**							**3.048.749.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.743.962.000,00**							**3.048.749.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**387.590.000,00**						**-**	**426.349.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	387.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat	-	426.349.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	387.590.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat		426.349.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.356.372.000,00**						**-**	**2.622.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.356.372.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari	-	2.622.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.356.372.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari		2.622.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON						**5.151.619.000,00**							**5.805.756.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.151.619.000,00**							**5.805.756.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.151.619.000,00**							**5.805.756.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**741.960.000,00**						**-**	**816.156.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	741.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat	-	816.156.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	741.960.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat		816.156.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**4.409.659.000,00**						**-**	**4.989.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	4.409.659.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon	-	4.989.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.409.659.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon		4.989.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA						**2.815.956.500,00**							**3.130.657.750,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.815.956.500,00**							**3.130.657.750,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.815.956.500,00**							**3.130.657.750,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**86.052.500,00**						**-**	**94.657.750,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	86.052.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	-	94.657.750,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	86.052.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		94.657.750,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.729.904.000,00**						**-**	**3.036.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD*	-			44 sekolah 7 sekolah	2.729.904.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta	-	3.036.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.729.904.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta		3.036.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH						**3.691.601.300,00**							**4.124.139.030,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.691.601.300,00**							**4.124.139.030,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.691.601.300,00**							**4.124.139.030,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**111.217.300,00**						**-**	**122.339.030,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	111.217.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Pengasih, siswa dan masyarakat	-	122.339.030,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	111.217.300,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Pengasih, siswa dan masyarakat		122.339.030,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**3.580.384.000,00**						**-**	**4.001.800.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD*	-			44 sekolah 7 sekolah	3.580.384.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih	-	4.001.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.580.384.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih		4.001.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI						**3.294.121.500,00**							**3.648.085.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.294.121.500,00**							**3.648.085.650,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.294.121.500,00**							**3.648.085.650,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**134.441.500,00**						**-**	**147.885.650,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	134.441.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Wonosari, siswa dan masyarakat	-	147.885.650,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	134.441.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Wonosari, siswa dan masyarakat		147.885.650,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**3.159.680.000,00**						**-**	**3.500.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	3.159.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari	-	3.500.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.159.680.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari		3.500.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK						**5.096.558.000,00**							**5.651.569.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.096.558.000,00**							**5.651.569.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.096.558.000,00**							**5.651.569.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**139.790.000,00**						**-**	**153.769.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	139.790.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Depok, siswa dan masyarakat	-	153.769.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	139.790.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Depok, siswa dan masyarakat		153.769.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**4.956.768.000,00**						**-**	**5.497.800.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD*	-			44 sekolah 7 sekolah	4.956.768.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok	-	5.497.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.956.768.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok		5.497.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI						**2.342.861.000,00**							**2.607.361.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.342.861.000,00**							**2.607.361.900,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.342.861.000,00**							**2.607.361.900,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**78.329.000,00**						**-**	**86.161.900,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	78.329.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Saptosari, siswa dan masyarakat	-	86.161.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	78.329.000,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Saptosari, siswa dan masyarakat		86.161.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.264.532.000,00**						**-**	**2.521.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.264.532.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari	-	2.521.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.264.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari		2.521.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA						**5.061.220.000,00**							**5.631.758.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.061.220.000,00**							**5.631.758.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.061.220.000,00**							**5.631.758.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**113.780.000,00**						**-**	**125.158.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	113.780.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	-	125.158.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	113.780.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		125.158.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**4.947.440.000,00**						**-**	**5.506.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD*	-			44 sekolah 7 sekolah	4.947.440.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta	-	5.506.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.947.440.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta		5.506.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN						**2.430.669.000,00**							**2.745.486.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.430.669.000,00**							**2.745.486.700,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.430.669.000,00**							**2.745.486.700,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**71.897.000,00**						**-**	**79.086.700,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	71.897.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Kalasan, siswa dan masyarakat	-	79.086.700,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	71.897.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Kalasan, siswa dan masyarakat		79.086.700,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.358.772.000,00**						**-**	**2.666.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.358.772.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan	-	2.666.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.358.772.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan		2.666.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN						**2.168.602.500,00**							**2.431.345.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.168.602.500,00**							**2.431.345.950,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.168.602.500,00**							**2.431.345.950,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**124.314.500,00**						**-**	**136.745.950,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	124.314.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat	-	136.745.950,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	124.314.500,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat		136.745.950,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.044.288.000,00**						**-**	**2.294.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.044.288.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan	-	2.294.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.044.288.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan		2.294.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA						**4.063.791.500,00**							**4.516.159.450,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.063.791.500,00**							**4.516.159.450,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.063.791.500,00**							**4.516.159.450,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**181.599.500,00**						**-**	**199.759.450,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	181.599.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 4 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	-	199.759.450,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	181.599.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 4 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		199.759.450,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**3.882.192.000,00**						**-**	**4.316.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD*	-			44 sekolah 7 sekolah	3.882.192.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta	-	4.316.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.882.192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta		4.316.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA						**4.020.879.000,00**							**4.476.294.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.020.879.000,00**							**4.476.294.900,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.020.879.000,00**							**4.476.294.900,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**92.759.000,00**						**-**	**102.034.900,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	92.759.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	-	102.034.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	92.759.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		102.034.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**3.928.120.000,00**						**-**	**4.374.260.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	3.928.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta	-	4.374.260.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.928.120.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta		4.374.260.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK						**2.210.324.000,00**							**2.547.523.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.210.324.000,00**							**2.547.523.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.210.324.000,00**							**2.547.523.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**313.930.000,00**						**-**	**345.323.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	313.930.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pandak, siswa dan masyarakat	-	345.323.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	313.930.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pandak, siswa dan masyarakat		345.323.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**1.896.394.000,00**						**-**	**2.202.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	1.896.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pandak	-	2.202.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.896.394.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pandak		2.202.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG						**1.695.149.000,00**							**1.946.698.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.695.149.000,00**							**1.946.698.600,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.695.149.000,00**							**1.946.698.600,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**73.726.000,00**						**-**	**81.098.600,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	73.726.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pundong, siswa dan masyarakat	-	81.098.600,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	73.726.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Pundong, siswa dan masyarakat		81.098.600,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**1.621.423.000,00**						**-**	**1.865.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	1.621.423.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pundong	-	1.865.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.621.423.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pundong		1.865.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN						**1.001.215.750,00**							**1.120.900.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.001.215.750,00**							**1.120.900.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.001.215.750,00**							**1.120.900.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**79.000.000,00**						**-**	**86.900.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	79.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Kasihan, siswa dan masyarakat	-	86.900.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	79.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Kasihan, siswa dan masyarakat		86.900.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**922.215.750,00**						**-**	**1.034.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	922.215.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Kasihan	-	1.034.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	922.215.750,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Kasihan		1.034.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN						**3.363.244.000,00**							**3.745.346.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.363.244.000,00**							**3.745.346.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.363.244.000,00**							**3.745.346.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**72.860.000,00**						**-**	**80.146.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	72.860.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Seyegan, siswa dan masyarakat	-	80.146.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	72.860.000,00	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Seyegan, siswa dan masyarakat		80.146.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**3.290.384.000,00**						**-**	**3.665.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	3.290.384.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Seyegan	-	3.665.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.290.384.000,00	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Seyegan		3.665.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN						**1.774.272.000,00**							**1.982.926.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.774.272.000,00**							**1.982.926.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.774.272.000,00**							**1.982.926.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**98.660.000,00**						**-**	**108.526.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	98.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Nanggulan, siswa dan masyarakat	-	108.526.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	98.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Nanggulan, siswa dan masyarakat		108.526.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**1.675.612.000,00**						**-**	**1.874.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	1.675.612.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Nanggulan	-	1.874.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.675.612.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Nanggulan		1.874.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI						**1.016.760.000,00**							**1.133.660.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.016.760.000,00**							**1.133.660.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.016.760.000,00**							**1.133.660.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**24.600.000,00**						**-**	**27.060.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	24.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Gedangsari, siswa dan masyarakat	-	27.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	24.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Gedangsari, siswa dan masyarakat		27.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**992.160.000,00**						**-**	**1.106.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	992.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Gedangsari	-	1.106.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	992.160.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Gedangsari		1.106.600.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN						**1.779.539.500,00**							**1.985.081.450,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.779.539.500,00**							**1.985.081.450,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.779.539.500,00**							**1.985.081.450,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**110.619.500,00**						**-**	**121.681.450,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	110.619.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Godean, siswa dan masyarakat	-	121.681.450,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	110.619.500,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 2 Godean, siswa dan masyarakat		121.681.450,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**1.668.920.000,00**						**-**	**1.863.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	1.668.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Godean	-	1.863.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.668.920.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Godean		1.863.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI						**2.781.343.000,00**							**3.099.367.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.781.343.000,00**							**3.099.367.700,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.781.343.000,00**							**3.099.367.700,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**45.607.000,00**						**-**	**50.167.700,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	45.607.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Wonosari, siswa dan masyarakat	-	50.167.700,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	45.607.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Wonosari, siswa dan masyarakat		50.167.700,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.735.736.000,00**						**-**	**3.049.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.735.736.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Wonosari	-	3.049.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.735.736.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Wonosari		3.049.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN						**2.230.156.000,00**							**2.483.822.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.230.156.000,00**							**2.483.822.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.230.156.000,00**							**2.483.822.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86,76 Nilai**	**134.020.000,00**						**-**	**147.422.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-			5.850 siswa	134.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Godean, siswa dan masyarakat	-	147.422.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	134.020.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	SMKN 1 Godean, siswa dan masyarakat		147.422.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**-**			**81 %**	**2.096.136.000,00**						**-**	**2.336.400.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory*	-			7 sekolah 44 sekolah	2.096.136.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Godean	-	2.336.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.096.136.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Godean		2.336.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
		DINAS KESEHATAN						**42.727.347.721,00**							**113.541.697.136,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.267.718.721,00**							**112.791.697.136,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**42.267.718.721,00**							**112.791.697.136,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,36 Nilai**	**36.757.492.441,00**						**-**	**103.330.563.236,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY*	-			100 %	10.881.300,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	17.745.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.099.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		9.548.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.052.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		2.257.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	33.435.314.221,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	37.840.094.236,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				247 Orang/ Bulan	33.416.381.621,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		37.819.269.236,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.305.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		12.435.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.887.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		2.076.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	5.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		6.314.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			100 %	24.332.000,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	26.765.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		2.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	22.132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		24.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru*	-			30 Orang	3.131.800,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	3.444.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	3.131.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		3.444.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	283.446.900,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	363.077.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.655.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		7.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		48.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.506.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		22.159.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.154.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		16.152.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	201.181.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		264.701.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		385.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan*	-			100 %	306.444.500,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	62.117.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	45.944.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		50.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		62.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	60.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	2.128.867.200,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	2.529.242.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	910.923.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		1.002.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.217.944.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		1.527.227.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	565.074.520,00			-	-	Dinas Kesehatan DIY	-	433.046.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	63.257.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		36.473.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	325.613.920,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		215.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	96.203.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		92.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan DIY		88.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar*** ***Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas*** ***Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC*** ***Persentase fasyankes terakreditasi*** ***Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara*** ***Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria*** ***Persentase Remaja Putri Anemia*** ***Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)*** ***Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)***	**-**			**74 %** **40 %** **87 %** **62.22 %** **17 %** **100 %** **20.1 %** **6.2 %** **79 %** **64 %**	**5.093.700.530,00**						**-**	**8.706.030.900,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	-			100 %	216.750.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	390.267.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Dokumen	207.540.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		380.136.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	9.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		10.131.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa* *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan* *Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan*	-			80 % 100 % 100 % 100 % 97,71 % 71 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.799.159.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	8.132.324.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan *Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ* *Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)* *Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART* *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan* *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT* *Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella* *Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah* *Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)* *Persentase Pelayanan Kesehatan Balita* *Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus* *Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam* *Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta* *Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM* *Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria* *Persentase KN Lengkap* *Persentase RS memenuhi standar kredentialing* *Persentase lansia mendapat layanan kesehatan* *Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan* *Persentase K6*				93 % 16 Angka 79 % 87 % 90 % 90 % 98 % 252 Angka 100 % 100 % 87.36 % 58 % 100 % 80 % 50 % 100 %				prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya													
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1200 Orang	845.430.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		1.238.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66422 Orang	815.696.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		631.040.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				3 Dokumen	182.781.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		255.058.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	81.101.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		135.417.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	22.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		39.985.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	128.438.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		203.887.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	90.808.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		166.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	113.592.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		1.613.711.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	260.635.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		431.753.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	1.245.738.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		2.249.192.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	78.793.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		124.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	38.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		37.148.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	38.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		55.827.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				4 Dokumen	453.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		378.206.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				6 Unit	395.969.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		544.445.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				832000 Keluarga	8.031.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		26.577.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan*	-			100 %	28.790.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	79.761.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	28.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		79.761.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan*	-			100 %	49.000.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	103.678.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				32 Unit	16.263.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		32.156.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				310 Unit	32.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		71.522.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*** ***Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan***	**-**			**63.35 %** **89 %**	**365.860.750,00**						**-**	**629.497.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	-			88.19 %	104.958.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK	-	211.882.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28428 Orang	89.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		178.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				8 Orang	14.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		33.814.000,00	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya*	-			99.66 % 89 %	260.902.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK	-	417.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1353 Orang	193.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		313.863.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3 Dokumen	67.297.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		103.752.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi*** ***Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi***	**-**			**87,7 %** **95 %**	**16.041.000,00**						**-**	**43.049.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan*	-			100 %	11.666.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	30.994.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				46 Sarana	11.666.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		30.994.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan*	-			100 %	4.374.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	12.055.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				10 Sarana	4.374.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		12.055.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan***	**-**			**100 %**	**34.624.000,00**						**-**	**82.557.000,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi*	-			100 %	34.624.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	82.557.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	34.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		82.557.000,00	DINAS KESEHATAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**459.629.000,00**							**750.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**459.629.000,00**							**750.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase pembinaan kesehatan tradisional***	**-**			**100 %**	**459.629.000,00**						**-**	**750.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah pelayanan kesehatan tradisional*	-			1 Unit	459.629.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Dinkes Kab/Kota	-	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				1 Unit	459.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Dinkes Kab/Kota		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI						**10.242.507.000,00**							**14.626.330.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.242.507.000,00**							**14.626.330.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**10.242.507.000,00**							**14.626.330.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,36 Nilai**	**10.185.447.000,00**						**-**	**10.136.330.000,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	10.650.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	12.120.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	10.650.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		12.120.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			100 %	14.670.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	14.750.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	14.670.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		14.750.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	1.860.127.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	2.009.460.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	798.127.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		859.460.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.062.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		1.150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD*	-			100 %	8.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	8.100.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	8.300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		8.100.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase fasyankes terakreditasi***	**-**			**62,22 %**	**57.060.000,00**						**-**	**4.490.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	-			100 %	57.060.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	4.490.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	53.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		1.500.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		650.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.710.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		2.340.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
		BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL						**51.081.232.500,00**							**54.515.708.888,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51.081.232.500,00**							**54.515.708.888,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**51.081.232.500,00**							**54.515.708.888,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,36 Nilai**	**1.162.101.300,00**						**-**	**1.150.673.195,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	7.464.000,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	7.405.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	7.464.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		7.405.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			100 %	11.656.000,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	11.725.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11.656.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		11.725.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	120.940.900,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	159.636.770,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.424.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		12.965.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.935.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		73.516.170,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.932.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		19.848.150,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.448.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		8.787.450,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		44.520.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan*	-			100 %	55.993.000,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	48.500.350,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	39.253.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		48.500.350,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	16.740.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	654.828.000,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	721.772.900,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	85.164.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		112.640.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	569.664.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		609.132.900,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	311.219.400,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY	-	201.633.175,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	61.400.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		62.939.100,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	38.484.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		44.608.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	195.002.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		73.917.150,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	16.332.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinkes DIY		20.168.925,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta***	**-**			**100 Persen**	**49.919.131.200,00**						**-**	**53.365.035.693,00**	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus* *Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan* *Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan* *Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta*	-			90 Persen 100 Persen 100 Persen 98 Persen	49.919.131.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DI Yogyakarta	-	53.365.035.693,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	49.919.131.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DI Yogyakarta		53.365.035.693,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
		BALAI PELATIHAN KESEHATAN						**6.127.463.800,00**							**7.042.299.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.127.463.800,00**							**7.042.299.742,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.127.463.800,00**							**7.042.299.742,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,36 Nilai**	**5.906.577.000,00**						**-**	**6.538.964.742,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	11.556.000,00			-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	11.556.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			100 %	12.876.000,00			-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.876.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	1.479.425.000,00			-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	1.884.044.742,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	329.225.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		460.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.150.200.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		1.424.044.742,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	-			100 %	10.420.000,00			-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	120.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10.420.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		120.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	4.392.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	4.500.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.392.300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		4.500.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)***	**-**			**89 % 63,35 %**	**220.886.800,00**						**-**	**503.335.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya*	-			99,66 % 89 %	220.886.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	503.335.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1080 Orang	220.886.800,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		503.335.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA						**253.710.479.923,00**							**270.544.972.171,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**253.710.479.923,00**							**270.544.972.171,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**67.330.367.923,00**							**76.859.011.261,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89.36 %**	**67.330.367.923,00**						**-**	**76.859.011.261,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	-			370 Orang/Bulan	44.452.496.123,00			-	-	RS Jiwa Grhasia	-	53.294.811.261,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				370 Orang/ Bulan	44.452.496.123,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RS Jiwa Grhasia		53.294.811.261,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*BLUD yang meningkat pelayanannya*	-			4 Unit	22.877.871.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Jiwa Grhasia	-	23.564.200.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	22.877.871.800,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Jiwa Grhasia		23.564.200.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**186.380.112.000,00**							**193.685.960.910,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang***	**-**			**2.11 %**	**186.380.112.000,00**						**-**	**193.685.960.910,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia*	-			4 Dokumen	154.752.530.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia	-	64.890.418.700,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				3 Dokumen	154.752.530.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		64.890.418.700,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia*	-			1 Unit	31.627.582.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia	-	128.795.542.210,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	31.627.582.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		128.795.542.210,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
		RUMAH SAKIT PARU RESPIRA						**36.231.614.081,00**							**645.597.453.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.231.614.081,00**							**645.597.453.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**36.231.614.081,00**							**645.597.453.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,36 Nilai**	**35.344.729.081,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	22.012.884.081,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY	-	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	21.999.744.081,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.140.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			100 %	25.200.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY	-	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	RS Paru Respira DIY		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Presentase Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			100 %	13.306.645.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira	-	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	13.306.645.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase keberhasilan pengobatan TBC***	**-**			**87 %**	**886.885.000,00**						**-**	**645.597.453.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	-			100 %	886.885.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira DIY	-	645.597.453.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	873.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira DIY		287.381.720.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira DIY		350.063.733.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.010.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira DIY		8.152.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						**415.188.245.411,00**							**699.664.395.216,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**392.708.769.511,00**							**645.732.946.648,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**320.068.769.511,00**							**552.652.946.648,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90 Nilai**	**49.164.351.360,00**						**-**	**63.598.284.307,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	300.737.100,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	348.948.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	28.595.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		34.560.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	37.073.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		55.679.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	235.068.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		258.708.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	42.826.955.560,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	45.751.096.957,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				413 Orang/ Bulan	42.704.624.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		45.628.765.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	22.376.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		22.376.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	21.304.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		21.304.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	78.650.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		78.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah*	-			100 %	91.937.000,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	92.368.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		931.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	91.437.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		91.437.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	357.850.000,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	1.551.547.099,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		141.720.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		228.514.998,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	17.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		73.881.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		142.196.054,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		30.140.894,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	193.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		935.092.719,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	10.140.000,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	4.090.595.100,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	13.716.263.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		13.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	973.001.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		7.830.727.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	3.113.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		5.872.225.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.486.136.600,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY	-	1.858.492.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				87 Unit	1.228.109.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				147 Unit	258.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas PUPESDM DIY		458.492.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY***	**-**			**25399,58 Liter/Detik 49.10 %**	**21.426.832.600,00**						**-**	**19.369.184.700,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)*	-			25399,58 liter/detik	4.101.940.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	4.115.184.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	27.461.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	239.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				25 Titik	117.074.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	1.088.078.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.124.558.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara				25 Unit	2.629.886.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		2.700.626.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY*	-			49,1 %	17.324.891.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	15.254.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1.84 KM	4.594.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,2 KM	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				511.77 KM	8.697.215.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				41 Bendung	1.517.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.524.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	193.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air														
			Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi				1 Dokumen	22.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional***	**-**			**23.37 %**	**7.118.418.360,00**						**-**	**11.489.752.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional*	-			23.37 %	7.118.418.360,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	-	11.489.752.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	6.646.098.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		6.339.752.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				2 Unit	22.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		4.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				2 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Pengurangan Luasan Genangan***	**-**			**6,58 Ha**	**235.600.000,00**						**-**	**235.600.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani*	-			6,58 Ha	235.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	-	235.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		235.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara***	**-**			**100 %**	**25.937.798.000,00**						**-**	**31.855.066.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi"*	-			4 dokumen	25.937.798.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Dinas PUPESDM DIY	-	31.855.066.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				5 Kabupaten/ Kota	127.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Dinas PUPESDM DIY		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				2 Dokumen	25.809.914.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Dinas PUPESDM DIY		31.755.066.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase kemantapan jalan***	**-**			**62.30 %**	**32.230.728.191,00**						**-**	**32.366.868.191,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan*	-			62.30 %	32.230.728.191,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	32.366.868.191,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				50 Dokumen	21.680.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				674.585 KM	793.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				674.585 KM	26.961.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		26.985.035.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				6116.61 Meter	4.454.793.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		4.461.833.191,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi*** ***Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah*** ***Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi*** ***Meningkatnya ketersediaan air baku*** ***Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS*** ***Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan***	**-**			**100 %** **1 Dokumen** **65,84 %** **32,01 Liter/Detik** **71,90 %** **1 Unit**	**183.955.041.000,00**						**-**	**393.738.191.450,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	-			19 dokumen	183.855.041.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	393.538.191.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				8 Dokumen	23.463.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		44.131.804.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				1 Dokumen	18.176.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				7 Dokumen	41.955.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		127.775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	723.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		725.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				2 Dokumen	692.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		24.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo				2 Dokumen	98.842.715.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		177.206.386.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**72.640.000.000,00**							**93.080.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah***	**-**			**100 persen 100 persen**	**44.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	-			100 %	44.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat terdampak bencana atau relokasi program pemerintah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Cakupan penanganan kawasan kumuh Persentase Penanganan RTLH***	**-**			**10 Hektar 6,66 %**	**2.676.000.000,00**						**-**	**23.130.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan*	-			1 laporan 1 dokumen	76.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	-			1 Dokumen 1000 unit	2.600.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				97 Unit Rumah	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Penanganan PSU layak di permukiman***	**-**			**178 lokasi**	**69.920.000.000,00**						**-**	**69.920.000.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Penyediaan PSU layak di permukiman*	-			178 lokasi	69.920.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	69.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				449 Lokasi	69.920.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		69.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.885.322.000,00**							**49.287.163.300,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**21.885.322.000,00**							**49.287.163.300,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP***	**-**			**300 Unit**	**21.885.322.000,00**						**-**	**49.287.163.300,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun*	-			300 unit	8.999.384.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	36.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				404 Unit	8.999.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		36.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	12.885.938.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	-	12.887.163.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				1 Laporan	12.885.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		12.887.163.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**594.153.900,00**							**4.644.285.268,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**594.153.900,00**							**4.644.285.268,00**	
1.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Pengendalian Pengusahaan Air Tanah***	**-**			**Kurang Dari atau Sama dengan 10%**	**44.400.000,00**						**-**	**2.239.789.286,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*	-			3 dokumen 4 laporan	30.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	-	380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	30.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*	-			1 laporan 1 laporan	14.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Pemanfaatan Air Tanah di DIY	-	1.859.789.286,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	3.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Pemanfaatan Air Tanah di DIY		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	10.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Pemanfaatan Air Tanah di DIY		1.209.789.286,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan***	**-**			**4009.5 Ha**	**255.106.400,00**						**-**	**2.144.880.982,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	*Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	-			1 laporan	13.240.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	-	802.818.684,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	13.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		802.818.684,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut*	-			100 %	100.086.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	-	922.254.798,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	22.206.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	77.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		822.254.798,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	-			3 dokumen	39.340.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	-	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	39.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	-			1 laporan	102.440.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	-	209.807.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	2.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		109.807.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	***Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan***	**-**			**57030 TOE**	**145.468.000,00**						**-**	**219.615.000,00**	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	*Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi* *Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan*	-			1 laporan 5 unit	145.468.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	-	219.615.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	7.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		219.615.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	138.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan***	**-**			**135 Izin 15823 Rumah Tangga**	**149.179.500,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan*	-			135 izin 1 dokumen	52.579.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				2 Dokumen	46.539.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	6.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan*	-			600 unit	96.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				42 Unit	96.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**20.296.000.326,00**							**22.940.705.631,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.296.000.326,00**							**22.940.705.631,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**20.296.000.326,00**							**22.940.705.631,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90 Nilai**	**5.595.268.300,00**						**-**	**6.412.742.000,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	10.500.000,00			-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-	10.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		10.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah*	-			100 %	18.696.000,00			-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-	18.696.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	18.696.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		18.696.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	172.640.250,00			-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-	277.681.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.168.400,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		41.985.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	44.996.900,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		49.496.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	14.690.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		16.159.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	34.999.950,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		38.499.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22 Dokumen	3.528.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		3.880.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	36.257.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		127.662.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	4.949.452.200,00			-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-	5.616.352.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.998.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		5.497.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.050.974.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		3.371.875.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.893.480.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		2.238.980.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	443.979.850,00			-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-	489.513.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	369.455.850,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		407.537.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	74.524.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		81.976.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional***	**-**			**37.38 %**	**14.082.241.326,00**						**-**	**14.902.963.631,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi*	-			28035 Rumah Tangga 100 % n/a % 37.38 % 2 unit	14.082.241.326,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	14.902.963.631,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi				1 Unit	267.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		718.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	13.814.941.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		14.184.963.631,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
3.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi***	**-**			**92,30 % 94,17 %**	**618.490.700,00**						**-**	**1.625.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*"1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi*	-			1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU	590.815.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	450.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				800 Lembaga	521.375.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		0,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	69.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		450.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.*	-			1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	27.675.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	1.175.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	27.675.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		1.175.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG						**34.136.483.804,00**							**82.426.636.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.684.941.004,00**							**22.806.948.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**14.684.941.004,00**							**22.806.948.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**96,39 Nilai**	**11.260.575.004,00**						**-**	**12.006.210.500,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen n/a Dokumen	16.180.250,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	55.025.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.256.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		29.209.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	3.324.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		4.324.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6.599.750,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		21.492.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD*	-			n/a Laporan 21 Dokumen	10.198.397.754,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	10.198.316.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	10.169.798.754,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		10.112.416.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	18.629.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		66.978.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.024.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		4.044.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.946.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		14.878.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	-			2 Laporan	10.321.000,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	29.867.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.321.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		29.867.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi penatausahaan kepagawaian daerah*	-			1 Laporan	2.868.000,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	8.078.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.868.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		8.078.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* *Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	-			20 Laporan n/a Laporan	105.465.400,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	272.723.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.179.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		23.094.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	9.765.350,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		62.756.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.354.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		13.226.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	11.054.850,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		50.321.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.764.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		13.772.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	65.348.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		109.554.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	-			3 Laporan	669.687.000,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	898.612.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.006.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		17.861.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	205.881.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		315.260.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	460.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		565.491.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya*	-			3 Laporan	257.655.600,00			-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	543.589.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	200.325.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		388.092.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	57.330.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		155.497.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan*** ***Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan***	**-**			**81,25 %** **95 %**	**30.682.000,00**						**-**	**35.682.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi* *Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi*	-			4 Dokumen n/a Dokumen	30.682.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kabupaten/ Kota	-	35.682.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	30.682.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kabupaten/ Kota		35.682.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten*** ***Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten***	**-**			**87,41 %** **84,81 %**	**3.393.684.000,00**						**-**	**10.765.055.500,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten* *Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten* *Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota*	-			n/a Dokumen 9 Dokumen 5 Dokumen	2.479.793.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	9.515.055.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2 Dokumen	234.016.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		2.615.850.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				9 Dokumen	1.183.538.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		5.649.205.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang				6 Laporan	1.062.239.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		1.250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	*Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang* *Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang*	-			13 Dokumen n/a Dokumen	913.891.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	1.250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				8 Dokumen	913.891.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		1.250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.451.542.800,00**							**59.619.688.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**19.451.542.800,00**							**59.619.688.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	***Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan***	**-**			**n/a Dokumen 100 %**	**26.085.250,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi*	-			1 Dokumen	26.085.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	26.085.250,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Jumlah dokumen kinerja reforma agraria Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti***	**-**			**n/a Dokumen 2 Angka**	**37.735.250,00**						**-**	**300.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti*	-			1 Dokumen	37.735.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	37.735.250,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa***	**-**			**16,44 % 59,35 %**	**11.550.902.000,00**						**-**	**55.268.347.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota* *Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan* *Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten* *Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan*	-			5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen 4 Kabupaten 23 Dokumen	11.550.902.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	55.268.347.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				9 Dokumen	960.720.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		2.049.740.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan				1 Dokumen	938.483.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		1.197.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah *Kadipaten, dan Tanah Desa*				3 Dokumen	884.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		16.285.719.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4 Dokumen	115.632.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		25.730.988.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4 Laporan	206.358.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		354.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan				4 Dokumen	8.445.128.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		9.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
4.	**-**	**-**	***Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan*** ***Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa***	**-**			**16,44 %** **59,35 %**	**7.836.820.300,00**						**-**	**3.851.341.000,00**	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten* *Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi* *Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi*	-			4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	2.009.470.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota	-	2.858.341.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				4 Dokumen	1.562.428.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		1.780.231.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	447.041.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, OPD DIY, OPD Kabupaten/ Kota		1.078.110.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan*	-			1 Angka	5.827.350.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-	993.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan														
			Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)				1 Unit	5.827.350.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY		993.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**32.650.920.742,00**							**48.609.898.092,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.988.969.742,00**							**26.469.898.092,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**16.988.969.742,00**							**26.469.898.092,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**87,47 Nilai**	**15.928.946.842,00**						**-**	**16.566.928.092,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	10.700.000,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	219.615.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		79.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		106.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.700.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		33.275.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	12.529.218.942,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	14.168.226.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	12.500.378.942,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		14.082.055.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.340.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		45.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		17.970.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		22.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	13.535.000,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	13.535.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	104.668.100,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	395.307.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		35.937.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.496.100,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		19.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	87.172.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		339.405.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	2.636.460.000,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	678.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	156.060.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		206.305.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.480.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		472.505.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	634.364.800,00			-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY	-	1.091.770.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47.374.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		66.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	379.559.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		798.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	37.431.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		26.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	170.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satpol PP DIY dan Pemda DIY		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase gangguan trantibum yang tertangani***	**-**			**100 %**	**1.060.022.900,00**						**-**	**9.902.970.000,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			100 %	529.646.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	9.037.820.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				4 laporan	269.423.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		7.062.445.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah				5 Laporan	19.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		166.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				350 Orang	236.303.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		1.798.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur*	-			100 %	530.376.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	865.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	492.656.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		332.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				4 Laporan	37.719.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		532.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.661.951.000,00**							**22.140.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**621.000.000,00**							**140.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani***	**-**			**100 %**	**621.000.000,00**						**-**	**140.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	-			100 %	621.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah *Kadipaten, dan Tanah Desa*				1 Dokumen	621.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**15.040.951.000,00**							**22.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Omah Jaga Warga yang aktif*** ***Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa***	**-**			**90 %** **100 %**	**15.040.951.000,00**						**-**	**22.000.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	1.509.133.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	5.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				8 Unit	1.509.133.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		5.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			100 %	13.531.818.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	16.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga														
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				7800 Orang	4.141.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		6.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				12 Dokumen	9.390.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		10.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**25.700.885.787,00**							**30.669.743.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.358.055.787,00**							**22.616.463.476,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**18.358.055.787,00**							**22.616.463.476,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**87,12 Angka**	**15.767.048.287,00**						**-**	**19.031.717.226,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			100% %	16.290.900,00			-	-	BPBD DIY	-	26.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.499.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		7.111.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		8.796.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.691.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		10.993.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY*	-			12 Bulan	13.536.268.087,00			-	-	BPBD DIY	-	16.348.678.086,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	13.511.825.737,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		16.321.787.486,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.574.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		9.435.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.049.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		4.455.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	11.817.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		12.999.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY*	-			1 Tahun	17.399.800,00			-	-	BPBD DIY	-	19.140.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	17.399.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		19.140.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY*	-			1 Tahun	131.958.900,00			-	-	BPBD DIY	-	230.184.020,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.490.050,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		3.839.220,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.392.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		21.859.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.867.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		19.658.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.208.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		184.827.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY*	-			1 Tahun	1.745.920.500,00			-	-	BPBD DIY	-	1.980.070.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	752.920.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		828.846.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	993.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		1.151.224.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY*	-			1 Tahun	319.210.100,00			-	-	BPBD DIY	-	426.744.170,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.497.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		30.246.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	184.542.450,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		203.008.790,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	85.556.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		149.039.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	21.614.350,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD DIY		44.448.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY***	**-**			**0,75 Skor 0,80 Skor 0,83 Skor**	**2.562.864.500,00**						**-**	**3.197.278.950,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi*	-			100 %	137.171.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	-	492.765.770,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				3 Dokumen	137.171.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		492.765.770,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*	-			100 %	1.847.959.550,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana	-	1.702.900.040,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				31 Orang	215.636.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		194.980.220,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				205 Keluarga	1.401.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		880.148.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	231.319.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		627.771.320,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			100 %	515.250.550,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	-	886.857.890,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				400 Orang	446.690.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		675.173.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	68.560.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		211.684.490,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			100 %	62.482.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	-	114.755.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	62.482.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		114.755.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota***	**-**			**98,9 %**	**28.143.000,00**						**-**	**387.467.300,00**	
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	-			100 %	28.143.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	387.467.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	28.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Daerah Istimewa Yogyakarta		387.467.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.342.830.000,00**							**8.053.280.400,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7.342.830.000,00**							**8.053.280.400,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY***	**-**			**0,86 Skor**	**7.342.830.000,00**						**-**	**8.053.280.400,00**	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Terlaksana nya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY*	-			100 %	700.845.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat	-	764.652.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				7 Objek	700.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat		764.652.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	3.014.008.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat	-	3.315.408.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				525 Unit	3.014.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat		3.315.408.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY*	-			100 %	3.627.977.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di DIY	-	3.973.218.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				5 Dokumen	3.627.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di DIY		3.973.218.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**94.981.073.270,00**							**107.888.319.194,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**88.422.760.270,00**							**101.611.112.494,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**88.422.760.270,00**							**101.611.112.494,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**47.288.416.870,00**						**-**	**54.793.542.837,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	45.489.850,00			-	-	Aparatur	-	74.559.485,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.696.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.796.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	16.863.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		25.118.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	14.929.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		18.644.945,00	DINAS SOSIAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	42.151.820.270,00			-	-	Aparatur	-	46.292.626.452,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/ Bulan	42.091.897.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		46.173.374.282,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	14.551.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		52.681.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2.495.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.017.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		12.870.770,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	34.858.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		49.700.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	26.390.400,00			-	-	Aparatur	-	35.288.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	26.390.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		35.288.600,00	DINAS SOSIAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	7.174.000,00			-	-	Aparatur	-	160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	7.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	340.488.900,00			-	-	Aparatur	-	614.598.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		51.243.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.303.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		82.129.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	23.414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		47.788.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		39.264.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	8.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.781.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	174.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		323.391.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	42.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	265.516.000,00			-	-	Aparatur	-	522.668.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	41.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	220.706.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		405.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	3.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		17.098.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	3.115.679.900,00			-	-	Aparatur	-	4.264.336.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.457.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	466.799.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		753.479.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.648.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		3.505.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.335.857.550,00			-	-	Aparatur	-	2.829.465.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.570.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		44.746.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	404.384.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		768.531.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	101.106.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		259.425.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	725.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.621.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	65.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		135.762.000,00	DINAS SOSIAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang***	**-**			**22,02% %**	**3.474.639.850,00**						**-**	**3.902.500.000,00**	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	-			4.768 Orang	3.474.639.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	PSKS Perseorangan, PSKS Kelembagaan, Keluarga Pahlawan dan Masyarakat	-	3.902.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				7 Lembaga	298.763.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	PSKS Perseorangan, PSKS Kelembagaan, Keluarga Pahlawan dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				4048 Orang	3.050.876.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	PSKS Perseorangan, PSKS Kelembagaan, Keluarga Pahlawan dan Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				9 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	PSKS Perseorangan, PSKS Kelembagaan, Keluarga Pahlawan dan Masyarakat		302.500.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial***	**-**			**1,19% %**	**13.720.000,00**						**-**	**15.750.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial*	-			5 Orang	13.720.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	15.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	13.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		15.750.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**35.458.702.250,00**						**-**	**39.038.920.230,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB*	-			90 Orang	1.083.113.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS	-	1.428.430.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				90 Orang	633.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		713.028.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				90 Orang	165.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		156.948.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	71.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		107.296.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	48.817.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		72.693.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				90 Orang	84.800.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		124.960.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		35.024.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				90 Orang	15.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		31.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5 Dokumen	63.319.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		187.349.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial*	-			213 Orang	646.782.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar	-	1.145.204.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				213 Orang	122.184.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		205.235.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	18.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		24.197.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				213 Orang	62.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		137.695.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				213 Orang	88.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		190.256.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13 Orang	440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		15.086.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				213 Orang	52.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		113.074.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	1.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		2.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	36.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		39.776.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				213 Orang	232.789.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		307.556.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5 Dokumen	32.580.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Terlantar		109.685.400,00	DINAS SOSIAL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial*	-			8000 Orang	30.979.811.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar	-	33.253.502.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				8000 Orang	30.978.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		31.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		39.930.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				10 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		505.780.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	571.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		1.707.792.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.*	-			125 Orang	2.748.994.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis	-	3.211.782.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				125 Orang	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		1.830.599.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		315.747.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				125 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		182.113.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	231.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		289.238.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				125 Orang	274.907.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		272.453.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				125 Orang	84.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		94.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyandang Masalah *Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal*				125 Orang	124.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		179.740.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	43.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		47.070.540,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial***	**-**			**3,68 %**	**431.365.000,00**						**-**	**538.839.000,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.*	-			21 Orang	121.392.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar	-	183.839.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	112.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				1 Orang	9.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar		33.839.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.*	-			1600 KPM	309.973.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Fakir Miskin, Buruh Pabrik Rokok	-	355.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				5 Kab/Kota	309.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Fakir Miskin, Buruh Pabrik Rokok		355.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar***	**-**			**61,36% %**	**1.705.916.300,00**						**-**	**2.436.478.427,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.*	-			100% Orang	1.705.916.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	-	2.436.478.427,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				10250 Orang	125.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		785.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				290 Orang	163.921.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		215.622.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				150 Orang	512.716.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		605.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				125 Orang	114.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		212.355.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				60 Orang	68.020.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		261.933.177,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				55 Orang	40.172.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		70.971.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				550 Orang	132.715.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		168.795.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana														
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan				2090 Orang	486.534.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		44.770.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)				31 Dokumen	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		7.502.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam														
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas				36 Orang	57.513.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		64.240.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat***	**-**			**34,84 %**	**50.000.000,00**						**-**	**885.082.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat*	-			34,84 %	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	-	885.082.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				24 Makam	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		885.082.000,00	DINAS SOSIAL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.422.336.000,00**							**4.485.001.700,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.422.336.000,00**							**4.485.001.700,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya***	**-**			**8,18 %**	**5.422.336.000,00**						**-**	**4.485.001.700,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan*	-			8,18 %	5.422.336.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	-	4.485.001.700,00	DINAS SOSIAL
	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial														
			Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				13 Dokumen	5.422.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		4.485.001.700,00	DINAS SOSIAL
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.135.977.000,00**							**1.792.205.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.135.977.000,00**							**1.792.205.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik***	**-**			**100 %**	**1.135.977.000,00**						**-**	**1.792.205.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	1.135.977.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Difagana	-	1.792.205.000,00	DINAS SOSIAL
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				8 Dokumen	1.135.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Difagana		1.792.205.000,00	DINAS SOSIAL
		BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS						**6.047.127.975,00**							**6.871.413.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.047.127.975,00**							**6.871.413.500,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.047.127.975,00**							**6.871.413.500,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**3.832.397.350,00**						**-**	**4.494.968.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	7.433.500,00			-	-	Aparatur	-	8.695.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.433.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		8.695.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	16.529.000,00			-	-	Aparatur	-	15.546.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	16.529.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		15.546.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	51.230.550,00			-	-	Aparatur	-	142.307.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.543.050,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		54.723.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.934.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		26.977.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.502.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		45.526.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.193.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		3.032.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	708.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.148.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1.350.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		9.900.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 bulan Bulan	126.179.000,00			-	-	Aparatur	-	225.210.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	24.921.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		71.650.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	101.258.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		153.560.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	1.680.922.400,00			-	-	Aparatur	-	1.926.174.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		2.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	153.922.400,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		177.186.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.524.600.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.746.988.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	1.950.102.900,00			-	-	Aparatur	-	2.177.035.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	71.051.900,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		122.567.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	86.298.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		233.864.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.783.410.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.723.044.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	9.343.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		97.560.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**2.214.730.625,00**						**-**	**2.376.445.500,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)*	-			115 orang Orang	2.214.730.625,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD	-	2.376.445.500,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				115 Orang	1.361.269.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		1.323.130.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				115 Orang	184.502.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		166.450.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				115 Orang	17.889.025,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		12.580.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				15 Orang	5.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		11.150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				115 Orang	287.232.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		378.936.500,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				115 Orang	246.348.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		288.580.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	99.359.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		172.049.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				14 Orang	4.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		10.800.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	460.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	640.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				1 Orang	300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2 Dokumen	6.280.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas di Balai RTPD		12.320.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA						**3.437.441.350,00**							**5.982.977.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.437.441.350,00**							**5.982.977.880,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.437.441.350,00**							**5.982.977.880,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**1.702.263.000,00**						**-**	**2.625.439.520,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	4.734.000,00			-	-	Aparatur	-	5.207.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.734.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.207.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	10.134.000,00			-	-	Aparatur	-	12.097.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.134.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		12.097.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	20.884.000,00			-	-	Aparatur	-	139.410.920,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.595.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		29.662.600,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.155.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		33.963.820,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.002.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		31.137.700,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.890.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		8.987.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.975.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.684.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	22.838.000,00			-	-	Aparatur	-	275.412.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	22.838.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		275.412.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	722.550.000,00			-	-	Aparatur	-	889.979.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	300.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		330.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.250.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		104.775.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	627.000.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		784.874.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	921.123.000,00			-	-	Aparatur	-	1.303.331.700,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	66.472.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		84.540.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2.095.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		8.419.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12.011.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		53.650.300,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	834.975.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.138.369.100,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	5.570.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		18.352.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**1.735.178.350,00**						**-**	**3.357.538.360,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)*	-			60 Orang	1.735.178.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial	-	3.357.538.360,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	698.844.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		765.666.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	236.969.500,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		326.778.100,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	31.329.700,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		132.632.280,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	34.850.300,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		48.529.140,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	332.087.150,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		833.441.950,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	97.889.200,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		300.855.060,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	288.749.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		921.316.550,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	5.418.700,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		9.839.280,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah *Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal*				30 Orang	1.633.600,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		7.920.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				12 Dokumen	5.773.600,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		5.280.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				10 Orang	1.633.600,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Wanita Bermasalah Sosial		5.280.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS						**6.940.871.650,00**							**7.613.080.906,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.940.871.650,00**							**7.613.080.906,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.940.871.650,00**							**7.613.080.906,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**2.425.925.200,00**						**-**	**3.100.819.100,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	12.034.000,00			-	-	-	-	34.595.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	12.034.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.595.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	14.252.000,00			-	-	-	-	21.082.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14.252.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.082.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	35.001.000,00			-	-	-	-	62.177.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	13.340.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.029.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.755.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.203.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3.605.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.815.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.918.900,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.516.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.764.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6.540.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.850.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	26.046.000,00			-	-	-	-	214.157.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	26.046.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		214.157.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	2.114.926.800,00			-	-	-	-	2.406.446.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	492.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	196.834.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.000.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.917.600.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.233.246.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	223.665.400,00			-	-	-	-	362.361.400,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	139.170.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.588.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	11.394.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.706.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.266.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.866.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	55.835.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**4.514.946.450,00**						**-**	**4.512.261.806,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)*	-			200 Orang	3.477.349.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL	-	3.317.226.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	2.424.780.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		2.192.728.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	347.673.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		429.702.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				200 Orang	68.495.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		8.878.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				4 Orang	3.822.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		2.290.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				200 Orang	32.845.700,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		32.561.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				200 Orang	81.230.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		90.816.400,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				200 Orang	492.024.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		522.250.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				200 Orang	5.700.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		7.800.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	1.600.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		7.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	800.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		3.600.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.				6 Kabupaten/ Kota	18.180.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		18.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				2 Orang	200.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di BRSBKL		1.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)*	-			40 Orang	1.037.596.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL	-	1.195.035.706,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	533.129.900,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		466.291.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	119.068.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		139.106.220,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang	67.236.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		68.841.080,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	18.485.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		14.987.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	129.928.250,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		256.737.155,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	35.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		41.023.950,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	113.393.900,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		172.290.201,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		6.900.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				6 Orang	2.160.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		9.504.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				3 Dokumen	12.375.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		16.582.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				2 Orang	600.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di BRSBKL		2.772.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA						**3.287.358.806,00**							**5.236.568.660,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.287.358.806,00**							**5.236.568.660,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.287.358.806,00**							**5.236.568.660,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**1.360.253.156,00**						**-**	**2.596.996.550,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	4.734.000,00			-	-	Aparatur	-	4.734.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.734.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.734.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	10.434.000,00			-	-	Aparatur	-	10.434.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.434.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.434.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	71.401.750,00			-	-	Aparatur	-	164.887.650,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.650.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		21.442.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.635.750,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		33.533.650,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	32.344.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		74.440.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.772.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.872.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.600.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.017.720.000,00			-	-	Aparatur	-	1.273.238.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	120.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.200.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59.400.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		72.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	958.200.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.200.038.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	255.963.406,00			-	-	Aparatur	-	1.143.702.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	74.464.500,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		74.464.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	31.052.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		35.488.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.446.906,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.033.750.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**1.927.105.650,00**						**-**	**2.639.572.110,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)*	-			80 orang Orang	1.927.105.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)	-	2.639.572.110,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	779.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		1.082.376.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	170.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		307.722.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	41.597.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		58.388.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	43.764.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		53.805.290,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	552.569.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		733.018.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	107.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		56.760.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	192.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		237.164.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	7.346.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		64.682.420,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				12 Dokumen	31.003.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		45.656.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK						**6.138.956.850,00**							**9.783.468.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.138.956.850,00**							**9.783.468.500,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.138.956.850,00**							**9.783.468.500,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**3.701.775.400,00**						**-**	**7.081.700.200,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	7.262.400,00			-	-	-	-	9.185.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	7.262.400,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.185.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	12.022.400,00			-	-	-	-	16.643.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12.022.400,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.643.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	71.676.800,00			-	-	Aparatur	-	137.198.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.485.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		27.463.700,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.654.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		44.754.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8.683.750,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		39.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.153.450,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.295.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5.700.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.485.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	285.108.000,00			-	-	Aparatur	-	316.932.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	285.108.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		316.932.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	932.955.000,00			-	-	Aparatur	-	1.151.510.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	89.955.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		97.510.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	843.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.054.000.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	2.392.750.800,00			-	-	Aparatur	-	5.450.232.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	213.156.800,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		266.800.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	53.059.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.650.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	2.114.907.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		5.142.537.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	11.628.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.245.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**2.437.181.450,00**						**-**	**2.701.768.300,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)*	-			125 anak Orang	2.437.181.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA	-	2.701.768.300,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	2.250.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		48.243.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	324.698.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		406.935.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	250.887.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		92.207.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	79.192.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		82.280.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	86.095.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		94.754.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	100.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		50.776.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	453.765.550,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		604.388.400,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	1.043.200,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		3.339.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				4 Orang	843.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		5.362.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	1.197.812.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.281.838.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	39.408.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		28.660.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				5 Orang	643.200,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.799.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				2 Orang	443.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.182.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
		BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA						**5.826.388.305,00**							**7.109.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.826.388.305,00**							**7.109.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.826.388.305,00**							**7.109.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,38 Angka**	**2.296.576.305,00**						**-**	**2.693.000.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	11.696.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	11.696.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	12.415.000,00			-	-	-	-	18.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.415.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 bulan Bulan	84.101.000,00			-	-	-	-	183.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.259.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.099.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	28.432.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.390.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	921.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 bulan Bulan	223.144.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	27.400.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	181.232.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	14.512.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	1.401.110.000,00			-	-	-	-	1.603.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.070.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	128.840.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.270.200.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.450.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	564.110.305,00			-	-	-	-	517.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	104.910.800,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	416.913.505,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.286.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**-**			**22,70% Orang**	**3.529.812.000,00**						**-**	**4.416.000.000,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)*	-			228 orang2 Orang	3.529.812.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia	-	4.416.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	2.540.023.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		2.700.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	363.770.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		700.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				200 Orang	56.374.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Lanjut Usia		80.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				200 Orang	97.245.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		170.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				200 Orang	157.295.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		240.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				200 Orang	270.426.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		400.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	13.325.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		18.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	6.354.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		8.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				10 Orang	25.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia		100.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**42.851.646.508,00**							**66.144.166.827,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.639.646.508,00**							**65.649.166.827,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**36.415.251.508,00**							**37.201.166.827,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,00 Angka**	**32.809.782.908,00**						**-**	**34.934.263.747,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	-			5 dokumen Dokumen	42.155.000,00			-	-	Pemda DIY, Pemda Kabupaten/Kota, Stakeholder	-	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.260.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemda Kabupaten/Kota, Stakeholder		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	8.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemda Kabupaten/Kota, Stakeholder		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8.405.000,00	Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemda Kabupaten/Kota, Stakeholder		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	28.925.689.008,00			-	-	ASN	-	28.897.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/ Bulan	28.866.532.008,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		28.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	27.959.800,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	13.198.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	17.998.500,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		37.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	31.717.300,00			-	-	OPD	-	37.569.140,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	21.717.300,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		22.569.140,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai*	-			1 Dokumen	9.898.950,00			-	-	ASN	-	24.801.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	9.898.950,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		24.801.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	-			1 tahun Tahun	322.750.550,00			-	-	ASN, OPD	-	975.594.942,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.263.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		92.301.002,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	42.232.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		160.480.540,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	36.596.500,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		44.301.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.339.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		38.071.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.658.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		5.874.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	129.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		534.567.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, OPD		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 bulan Bulan	53.374.000,00			-	-	OPD	-	608.794.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	16.311.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	37.063.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		588.794.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	2.189.447.750,00			-	-	OPD	-	2.635.408.765,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.992.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		8.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	492.795.750,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		542.075.325,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.691.660.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		2.085.083.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	1.234.750.350,00			-	-	OPD	-	1.674.594.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.374.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		41.124.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	654.037.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	11.493.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		26.897.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	43.269.500,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		104.522.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	459.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		864.622.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	29.576.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		37.428.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK***	**-**			**5 kab/kota Kabupaten/Kota**	**96.480.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	-			1 Dokumen	96.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pekerja dan Perusahaan	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	96.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pekerja dan Perusahaan		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten***	**-**			**96% %** **100% %** **90% %** **60% %** **80% %**	**1.828.160.000,00**						**-**	**396.913.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3*	-			122 Orang 200 Orang 555 Orang 180 Orang	1.759.960.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	-	370.649.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				500 Orang	1.759.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		370.649.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n*	-			127 Lembaga	68.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja	-	26.263.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				8 LPK	68.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja		26.263.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi*** ***Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik***	**-**			**90 %** **55 %**	**477.540.000,00**						**-**	**530.964.500,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n*	-			7500 Orang	208.688.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, penganggur, setengah penganggur	-	285.046.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				25 Orang	23.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, penganggur, setengah penganggur		37.488.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	27.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, penganggur, setengah penganggur		34.614.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				100 Orang	35.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, penganggur, setengah penganggur		75.443.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				13592 Orang	122.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, penganggur, setengah penganggur		137.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*	-			1 Dokumen	188.292.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	-	187.013.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	30.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		35.873.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				270 Orang	10.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		13.420.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				75 Orang	147.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		137.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*	-			25 Orang	80.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	masyarakat, calon PMI, purna PMI	-	58.905.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				240 Orang	80.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	masyarakat, calon PMI, purna PMI		58.905.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase jumlah layanan yang terselesaikan***	**-**			**98 %**	**391.288.600,00**						**-**	**699.762.580,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n*	-			250 Perkara	167.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan	-	403.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				120 Perkara	43.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	27.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan		104.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	64.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				80 Perusahaan	13.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	perusahaan		24.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah Penetapan UMP*	-			1 SK Angka	223.448.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	-	296.062.580,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	103.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan		164.229.120,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				500 Orang	119.848.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan		131.833.460,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan***	**-**			**89,00% % 95% % 75% %**	**812.000.000,00**						**-**	**439.263.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n*	-			85 Perusahaan 915 Perusahaan 145 Perusahaan	812.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Pekerja dan Perusahaan	-	439.263.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				654 Perusahaan	812.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Pekerja dan Perusahaan		439.263.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**6.224.395.000,00**							**28.448.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan*** ***Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja*** ***Persentase penumbuhan calon wirausaha baru***	**-**			**70 %** **100 %** **80 %** **33 %** **100 %** **75 %**	**6.224.395.000,00**						**-**	**28.448.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	-			9 dokumen Dokumen	6.224.395.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD, masyarakat	-	28.448.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				7 Dokumen	3.477.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD, masyarakat		8.448.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				2 Laporan	2.746.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	OPD, masyarakat		20.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**212.000.000,00**							**495.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**212.000.000,00**							**495.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan***	**-**			**79% %**	**212.000.000,00**						**-**	**495.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah transmigran yang ditempatkan*	-			25 KK	212.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	-	495.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	57.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				25 Kepala Keluarga	154.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS						**9.935.492.850,00**							**23.035.514.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.578.689.850,00**							**23.015.514.350,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8.606.053.850,00**							**21.405.514.350,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,00 Angka**	**2.356.793.850,00**						**-**	**3.789.368.350,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	12.780.000,00			-	-	OPD	-	22.542.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.780.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		22.542.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	16.800.000,00			-	-	OPD	-	24.440.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	16.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		24.440.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	-			1 tahun Tahun	97.828.550,00			-	-	OPD	-	264.528.030,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.945.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		80.079.350,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.592.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		18.009.030,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	19.985.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		45.183.970,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.999.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		35.801.480,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.812.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		10.498.800,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		74.955.400,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 bulan Bulan	72.229.000,00			-	-	OPD	-	40.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	45.415.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		20.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	26.814.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		20.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	1.861.056.700,00			-	-	OPD	-	2.421.531.840,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		6.058.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	248.669.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		323.271.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.609.386.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		2.092.202.840,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	296.099.600,00			-	-	OPD	-	1.016.326.480,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	170.138.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		221.180.180,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	16.613.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		46.800.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		187.812.300,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		442.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	19.348.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		118.534.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan*** ***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar***	**-**			**80% %** **60% %** **96% %** **100% %** **90% %**	**6.249.260.000,00**						**-**	**17.616.146.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi* *Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3*	-			70 Orang 1200 Orang 200 Orang 210 Orang	6.186.540.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja	-	17.250.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				500 Orang	6.156.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja		15.750.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				14 Unit	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja		1.500.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah*	-			10 dokumen Dokumen	62.720.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja	-	366.146.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	62.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja		366.146.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**972.636.000,00**							**1.610.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja*** ***Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten***	**-**			**100 %** **33 %** **80 %**	**972.636.000,00**						**-**	**1.610.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	-			9 Dokumen	972.636.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	-	1.610.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				2 Laporan	972.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		1.610.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**356.803.000,00**							**20.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**356.803.000,00**							**20.000.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik***	**-**			**90 %**	**356.803.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	356.803.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha	-	20.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	356.803.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		20.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
		BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						**2.752.284.232,00**							**4.103.362.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.752.284.232,00**							**4.103.362.400,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.752.284.232,00**							**4.103.362.400,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,00 Angka**	**1.348.093.700,00**						**-**	**2.489.616.400,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	8.400.000,00			-	-	-	-	12.600.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.600.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 dokumen Dokumen	9.600.000,00			-	-	-	-	14.400.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.400.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	-			1 tahun Tahun	53.845.700,00			-	-	OPD	-	162.925.350,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.805.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		13.207.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.845.700,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		26.692.350,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.324.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		16.765.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.890.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		15.412.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.482.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		6.948.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		83.899.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 bulan Bulan	74.122.500,00			-	-	OPD	-	399.129.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	38.064.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		318.384.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	36.058.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		80.745.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	678.964.500,00			-	-	OPD	-	1.119.428.550,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.135.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		3.202.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	144.709.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		217.064.250,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	532.120.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		899.161.800,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan Bulan	523.161.000,00			-	-	OPD	-	781.133.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	240.687.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		361.030.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	62.170.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		93.255.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		250.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	20.304.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD		76.848.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan***	**-**			**90 %** **100 %** **96 %** **80 %** **60 %**	**374.900.000,00**						**-**	**585.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi*	-			210 Orang 1200 Orang 70 Orang 200 Orang	374.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja	-	585.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				180 Orang	374.900.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja		585.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
3.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan*** ***Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan*** ***Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja***	**-**			**75% %** **95% %** **89,00% %**	**1.029.290.532,00**						**-**	**1.028.746.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n* *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3* *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n*	-			915 Perusahaan 85 Perusahaan 145 Perusahaan	1.029.290.532,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha	-	1.028.746.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				41 Perusahaan	1.029.290.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		1.028.746.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK						**19.523.477.107,00**							**19.523.542.257,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.523.477.107,00**							**19.523.542.257,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**15.284.377.107,00**							**15.284.442.257,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**87,82-90,01 Nilai**	**12.388.351.607,00**						**-**	**12.388.416.757,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			8 Dokumen	43.641.147,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	43.641.147,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	18.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		18.065.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.583.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		9.583.147,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	15.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		15.993.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun*	-			20 Laporan	8.894.736.257,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	8.894.736.257,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.820.118.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		8.820.118.207,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	26.519.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		26.519.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		6.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	41.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		41.629.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	-			1 Laporan	20.050.000,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	20.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		20.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			1 Dokumen	997.500,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	997.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	997.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		997.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah*	-			5 Laporan	200.150.750,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	200.191.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	59.792.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		59.795.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.711.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		30.711.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		2.606.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.267.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		44.267.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		6.396.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	55.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		55.415.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		999.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor*	-			1 Laporan	46.069.000,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	46.069.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		42.569.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor*	-			3 Laporan	1.981.765.200,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.981.775.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		1.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	447.625.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		447.625.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.532.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		1.532.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor*	-			4 Laporan	1.200.941.753,00			-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.200.955.753,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		36.296.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	293.275.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		293.275.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				212 Unit	193.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		193.218.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	607.530.903,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		607.530.903,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				113 Unit	70.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		70.635.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik***	**-**			**38,95 %**	**966.680.000,00**						**-**	**966.680.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender*	-			37 OPD	90.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	90.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				6 laporan	90.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		90.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				42 Lembaga	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi*	-			16 %	825.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	825.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				250 Orang	825.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		825.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA*	-			3 Organisasi	50.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	50.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				60 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				3 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik***	**-**			**100 %**	**959.571.100,00**						**-**	**959.571.100,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kebijakan yang tersusun*	-			1 Dokumen	45.961.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	45.961.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	45.461.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		45.461.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				5 Kegiatan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penerima manfaat*	-			131 Orang	97.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	97.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 orang	96.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		96.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi*	-			3 Organisasi	815.970.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	815.970.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				30 Orang	815.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		815.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				4 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik***	**-**			**2 Dokumen**	**3.805.500,00**						**-**	**3.805.500,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak*	-			97,8 %	1.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				25 Lembaga	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga*	-			4 Lembaga	1.520.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.520.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi				6 Lembaga	770.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		770.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				25 Lembaga	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi*	-			1 Lembaga	785.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	785.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		785.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik***	**-**			**100 %**	**725.000,00**						**-**	**725.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak*	-			2 Dokumen	725.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar***	**-**			**100 %**	**283.789.000,00**						**-**	**283.789.000,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan*	-			5 Kab/Kota	2.175.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	2.175.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				45 Orang	1.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		1.237.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				25 Lembaga	937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		937.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak*	-			42 Lembaga	281.614.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	281.614.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	34.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		34.294.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	246.382.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		246.382.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		937.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak korban kekerasan yang dilayani***	**-**			**100 %**	**681.454.900,00**						**-**	**681.454.900,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	66.538.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	66.538.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				30 Lembaga	66.538.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		66.538.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah penerima manfaat*	-			48 Orang	584.606.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	584.606.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				54 Orang	583.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		583.856.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				41 Orang	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	30.310.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	30.310.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				30 Orang	29.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		29.810.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**564.100.000,00**							**564.100.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)***	**-**			**77 %**	**51.460.000,00**						**-**	**51.460.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Forum yang terfasilitasi*	-			1 Forum	51.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	51.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	50.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		50.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)***	**-**			**56,4 %**	**2.810.000,00**						**-**	**2.810.000,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun*	-			4 Paket	2.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	2.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				4 Daerah	2.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		2.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB*	-			4 Kali	730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif***	**-**			**0,48 %**	**509.830.000,00**						**-**	**509.830.000,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan*	-			5 Jenis	509.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	509.830.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				1 Dokumen	730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				5 Kelompok	507.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		507.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				1 Daerah	730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				5 Kelompok	730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.675.000.000,00**							**3.675.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan***	**-**			**"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka**	**3.675.000.000,00**						**-**	**3.675.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima*	-			40 kelompok	3.675.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	3.675.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya				250 Orang	2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		2.750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2 Dokumen	925.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		925.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						**68.587.560.627,00**							**77.835.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.900.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.900.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis***	**-**			**15 Ha**	**2.900.000.000,00**						**-**	**3.000.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	-			1 Dokumen	2.900.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				1 Dokumen	2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63.687.637.577,00**							**71.982.800.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**61.961.637.577,00**							**69.382.800.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**95,79 Angka**	**49.314.984.869,00**						**-**	**54.937.800.000,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	55.781.250,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	79.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.406.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	9.833.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	36.541.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	45.199.272.819,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	50.079.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/ Bulan	45.133.113.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		50.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	29.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	31.159.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	82.800.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	82.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	354.953.500,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	492.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.977.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.956.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	51.800.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	58.572.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	129.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100% %	2.513.454.300,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.751.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	598.062.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.914.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.108.723.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49.196.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	629.138.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				182 Unit	195.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	235.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup***	**-**			**100 %**	**139.642.500,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi*	-			1 Dokumen	139.642.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	139.642.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan***	**-**			**3,9 % 20830 Parameter**	**1.183.969.500,00**						**-**	**1.575.000.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim*	-			8 Dokumen	1.101.558.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laboraturium Lingkungan, Masyarakat	-	1.425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	175.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laboraturium Lingkungan, Masyarakat		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laboraturium Lingkungan, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				17800 Dokumen	825.638.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laboraturium Lingkungan, Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau*	-			50 titik titik	82.411.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	82.411.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi***	**-**			**100% %**	**7.400.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3*	-			4 dokumen Dokumen	7.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha														
			Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				1 Dokumen	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi***	**-**			**82,16% %**	**150.377.900,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	-			152 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan	150.377.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Usaha/ Kegiatan yag izinnya dikeluarkan oleh Gubernur	-	230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	82.177.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Usaha/ Kegiatan yag izinnya dikeluarkan oleh Gubernur		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				152 Usaha/Kegiatan	68.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Usaha/ Kegiatan yag izinnya dikeluarkan oleh Gubernur		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya***	**-**			**76% %**	**209.580.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat*	-			190 entitas Entitias	209.580.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				50 Lembaga	209.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional***	**-**			**76,67% %**	**105.799.500,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	-			94 Entitas	105.799.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Sekolah, Lembaga, Masyarakat	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				25 Entitas	105.799.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Sekolah, Lembaga, Masyarakat		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**7.120.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	7.120.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				8 Pengaduan	7.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional***	**-**			**100 %**	**10.842.763.308,00**						**-**	**12.300.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional*	-			100 %	10.842.763.308,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	12.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				600 Ton	6.135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		7.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				13 Unit	3.840.854.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				2 Unit	281.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				600 Ton	585.860.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.726.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta* *Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan***	**-**			**24,92% % n/a Entitias**	**1.726.000.000,00**						**-**	**2.600.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	-			100 %	1.385.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram														
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan				2 Objek	1.385.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah kalurahan/ keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau*	-			8 Kalurahan	341.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	341.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.999.923.050,00**							**2.852.500.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.999.923.050,00**							**2.852.500.000,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan*** ***Persentase lahan kritis yang direhabilitasi*** ***Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha*** ***Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan***	**-**			**5 %** **70,6 %** **94,74 %** **81,925** **Angka**	**1.352.843.800,00**						**-**	**2.072.500.000,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	-			326 Ha	865.849.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	915.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				3 Dokumen	18.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	379.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	115.769.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				1 Ha	254.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				7 Unit	97.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi*	-			96,95 %	217.726.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	9.711.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15581 Ha	208.014.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	-			28 Unit Manajemen	69.908.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat, Usaha Kehutanan	-	275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	40.274.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat, Usaha Kehutanan		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				23 Unit Managemen	29.633.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat, Usaha Kehutanan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit*	-			100 %	199.360.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	372.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	6.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	5.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				1 Sertifikat	5.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	4.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas sumber benih yang dikelola				5 Ha	177.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	***Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi***	**-**			**68 Indeks**	**408.425.550,00**						**-**	**555.000.000,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	*Luas hutan konservasi yang dikelola*	-			634,10 Ha	144.823.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5 Desa	14.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi														
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				634,10 Ha	100.141.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				634.10 Ha	29.957.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola*	-			3 Kawasan	263.602.550,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				10 Ha	206.022.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				1 Dokumen	57.579.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)***	**-**			**21,69 %**	**238.653.700,00**						**-**	**225.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat*	-			20 Kelompok	238.653.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				8 Kelompok	180.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				57 Orang	32.109.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	25.633.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA						**5.424.748.481,00**							**7.567.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.515.844.500,00**							**1.867.500.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.515.844.500,00**							**1.867.500.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**95,79 Angka**	**1.515.844.500,00**						**-**	**1.867.500.000,00**	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	17.479.500,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	20.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	17.479.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		20.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	15.000.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	17.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		17.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	106.263.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	134.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		10.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.115.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		22.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	32.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		35.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.977.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		15.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		2.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	30.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		50.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100% %	11.700.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	120.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	11.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		120.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100% %	643.569.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	701.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	178.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		200.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	464.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		500.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	721.833.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	874.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	499.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		550.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		4.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		20.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		300.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.908.903.981,00**							**5.700.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**3.908.903.981,00**							**5.700.000.000,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan*** ***Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan*** ***Persentase lahan kritis yang direhabilitasi*** ***Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha***	**-**			**81,925 Angka 5 % 70,6 % 94,74 %**	**3.908.903.981,00**						**-**	**5.700.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH*	-			5 Dokumen	175.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	300.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	175.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		300.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan*	-			15,581 Ha	3.291.041.981,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	4.150.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				3 Dokumen	307.908.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		450.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.983.133.481,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		3.700.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi*	-			96,95 %	442.662.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat	-	1.250.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15581 Ha	442.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kelompok Tani, Masyarakat		1.250.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**19.196.536.262,00**							**37.150.549.031,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.415.763.062,00**							**9.096.850.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.368.443.062,00**							**9.030.850.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 %**	**8.981.912.062,00**						**-**	**7.950.000.000,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	30.714.000,00			-	-	-	-	345.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	12.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	8.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	7.479.662.862,00			-	-	-	-	2.082.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	7.455.636.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.022.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.561.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah undefined*	-			100 % undefined undefined	15.253.500,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	15.253.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	282.510.500,00			-	-	-	-	2.021.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.398.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	31.084.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		293.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	232.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	10.877.000,00			-	-	-	-	2.130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	878.828.000,00			-	-	-	-	337.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	313.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	565.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	284.066.200,00			-	-	-	-	945.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	165.165.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	54.586.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	2.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY***	**-**			**88,85 %**	**186.191.000,00**						**-**	**438.300.000,00**	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan*	-			100 %	186.191.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat	-	438.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	186.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		438.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY***	**-**			**99,23 %**	**74.720.000,00**						**-**	**242.550.000,00**	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi*	-			100 %	74.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat	-	242.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	74.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		242.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.***	**-**			**92 %**	**81.460.000,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	-			100 %	81.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat	-	145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				2 Laporan	81.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**44.160.000,00**						**-**	**255.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan*	-			100 %	44.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat	-	255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	44.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**47.320.000,00**							**66.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren***	**-**			**100 %**	**47.320.000,00**						**-**	**66.000.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	-			100 %	47.320.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat	-	66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	47.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.780.773.200,00**							**28.053.699.031,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**9.780.773.200,00**							**28.053.699.031,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan***	**-**			**4 Lembaga**	**3.620.634.200,00**						**-**	**24.743.495.031,00**	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*	-			100 %	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	1.257.169.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		1.257.169.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*	-			100 %	3.570.634.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	-	23.486.326.031,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				6 Dokumen	3.570.634.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		23.486.326.031,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik***	**-**			**10,20 %**	**6.160.139.000,00**						**-**	**3.310.204.000,00**	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan*	-			100 %	6.160.139.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat DIY	-	3.310.204.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina				14 Dokumen	6.160.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat DIY		3.310.204.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						**146.019.653.533,00**							**181.340.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.704.938.000,00**							**62.250.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**21.704.938.000,00**							**62.250.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis***	**-**			**43.52 % 100 % 92.50 % 71.68 % 51.50 %**	**21.704.938.000,00**						**-**	**62.250.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	-			100 %	21.704.938.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	62.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				12 Dokumen	18.109.577.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		47.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	463.996.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	306.722.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Giripurwo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				1 Dokumen	369.726.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	521.492.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	306.722.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				1 Dokumen	258.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul				1 Dokumen	614.614.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Pucung Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Ngestirejo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro				2 Dokumen	753.339.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Sleman, Depok, Condongcatur	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**124.314.715.533,00**							**119.090.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**124.314.715.533,00**							**119.090.500.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**94,59 angka**	**17.551.057.282,00**						**-**	**19.135.500.000,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	37.471.400,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17.848.200,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	9.623.750,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	9.999.450,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	15.049.786.054,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	16.068.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ Bulan	14.985.586.254,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		16.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	37.689.800,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	9.010.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17.500.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	2.954.600,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	2.954.600,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran*	-			100 %	270.377.300,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	283.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	42.000.900,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.330.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.999.400,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	193.205.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	6.875.000,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.875.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran*	-			100 %	1.257.963.800,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	1.406.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.504.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	489.859.800,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	765.600.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	925.629.128,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	-	1.305.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	558.968.300,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	179.807.828,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	154.832.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	32.021.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 7. Persentase Ketertiban LLAJ 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan***	**-**			**87.72 % 64.49 % 82.43 % 80.50 % 85.62 % 45.93 % 56.64 % 50.00 %**	**106.763.658.251,00**						**-**	**99.955.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	*Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY*	-			100 %	460.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta	-	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				2 Dokumen	460.500.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia*	-			100 %	13.328.916.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta	-	4.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				249 Unit	11.277.065.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				113 Unit	555.467.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				568 Unit	1.496.383.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY Provinsi DI Yogyakarta		1.950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY*	-			100 %	4.159.940.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	-	2.990.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				5 Laporan	280.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	23.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				52 Unit	3.822.616.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		2.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	*Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi*	-			100 %	7.760.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	7.760.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek*	-			100 %	88.806.541.401,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	-	91.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				5 Laporan	1.386.211.931,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				130 Unit	87.420.329.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		90.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN						**3.869.710.200,00**							**4.850.900.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.869.710.200,00**							**4.850.900.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**3.869.710.200,00**							**4.850.900.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**94,59 angka**	**3.450.810.200,00**						**-**	**4.030.900.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	29.942.500,00			-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	-	34.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	24.362.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		27.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		2.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.480.500,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		5.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.966.000,00			-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	-	2.300.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	1.966.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		2.300.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran*	-			100 %	90.231.300,00			-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	-	110.100.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.751.400,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		17.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	38.506.400,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		47.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.006.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		17.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.873.500,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		4.100.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	21.094.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		25.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran*	-			100 %	2.933.817.000,00			-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	-	3.361.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		6.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		300.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	11.017.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		55.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.721.600.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		3.000.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	394.853.400,00			-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	-	523.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	97.592.400,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		150.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	44.641.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		63.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	252.620.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		310.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 7. Persentase Ketertiban LLAJ 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan***	**-**			**64.49 % 80.50 % 85.62 % 82.43 % 87.72 % 56.64 % 45.93 % 50.00 %**	**418.900.000,00**						**-**	**820.000.000,00**	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B*	-			100 %	418.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	-	820.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				6 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		170.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				6 Unit	348.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		650.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**57.409.569.471,00**							**44.019.476.679,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**57.409.569.471,00**							**44.019.476.679,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**24.370.007.871,00**							**40.059.476.679,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**84 angka**	**13.123.046.071,00**						**-**	**22.194.476.679,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 %	17.248.000,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	93.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.548.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	-			100 %	10.944.978.571,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	18.263.476.679,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	10.923.738.621,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		18.183.909.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.840.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		18.515.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.699.950,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		36.052.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"*	-			100 %	11.400.000,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	-			100 %	339.706.600,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.948.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.764.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	14.786.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.972.400,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.235.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya*	-			100 %	217.449.000,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	165.109.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		290.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	52.340.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor "*	-			100 %	967.400.000,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	1.265.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	289.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	678.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		895.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "*	-			100 %	624.863.900,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	1.480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.984.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	242.014.900,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	287.440.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		920.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.425.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu***	**-**			**87 %**	**3.530.358.000,00**						**-**	**2.395.000.000,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi*	-			100% %	3.530.358.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	-	2.395.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				71 Persentase	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		920.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				3 Laporan	910.033.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	43.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1.796.798.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri***	**-**			**1.37 Indeks 1.95 Indeks**	**7.716.603.800,00**						**-**	**15.470.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*	-			100 %	7.716.603.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	-	15.470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	246.103.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				38 perangkat daerah	7.470.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		15.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**781.625.600,00**							**1.420.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY***	**-**			**632 skor**	**781.625.600,00**						**-**	**1.420.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	-			100 %	781.625.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	-	1.420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	167.174.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				38 Perangkat Daerah	614.451.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		1.220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**32.257.936.000,00**							**2.540.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi***	**-**			**2.54 skor**	**32.257.936.000,00**						**-**	**2.540.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	31.354.053.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY, Pemda DI Yogyakarta dan Masyarakat	-	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital														
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	31.354.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY, Pemda DI Yogyakarta dan Masyarakat		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Pelayanan Kehumasan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan*	-			100 %	903.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY, Pemda DI Yogyakarta dan Masyarakat	-	2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				4 Dokumen	903.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY, Pemda DI Yogyakarta dan Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						**65.052.896.301,00**							**71.695.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**388.128.000,00**							**425.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**388.128.000,00**							**425.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis*** ***Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis***	**-**			**1 sentra** **1 sentra**	**388.128.000,00**						**-**	**425.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis*	-			1 Dokumen	388.128.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM	-	425.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	388.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		425.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**64.664.768.301,00**							**71.270.700.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**15.949.989.301,00**							**12.270.700.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**85 angka**	**10.870.140.801,00**						**-**	**10.782.900.000,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	21.637.800,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	22.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.249.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		7.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.908.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		8.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		6.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	8.712.933.801,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	8.283.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	8.680.393.801,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		8.250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.540.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		19.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		9.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	56.900.000,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	56.900.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	168.257.800,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	245.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22.560.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		12.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.977.200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		8.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		180.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	21.734.000,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	37.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5.424.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	16.310.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		31.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.451.756.000,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	1.550.900.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	800.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		900.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	542.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	908.956.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	436.921.400,00			-	-	Dinas Koperasi dan UKM	-	569.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.960.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		51.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	150.740.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		230.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				13 Unit	5.265.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	67.995.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		68.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	154.526.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	29.435.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Koperasi dan UKM		25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi***	**-**			**22 Unit**	**10.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			22 Unit	10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				3 Unit Usaha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)***	**-**			**30 koperasi**	**8.000.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi*	-			13 koperasi	8.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				13 Unit Usaha	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya***	**-**			**42 koperasi**	**4.500.000,00**						**-**	**3.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi*	-			35 Unit Usaha	4.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				55 Unit Usaha	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM***	**-**			**98 %**	**115.000.000,00**						**-**	**44.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	-			150 Orang	115.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	44.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		44.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi***	**-**			**92 koperasi**	**2.076.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	-			60 koperasi	2.076.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				80 Unit Usaha	2.076.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi*** ***Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)***	**-**			**24877 umkm 550 Orang**	**1.088.893.500,00**						**-**	**1.037.800.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi*	-			835 Orang	1.088.893.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	UMKM	-	1.037.800.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan															
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				935 Unit Usaha	1.052.373.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	UMKM		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	36.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	UMKM		37.800.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing***	**-**			**0.46 %**	**1.777.455.000,00**						**-**	**270.000.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)*	-			1095 Unit Usaha	1.777.455.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	-	270.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				750 Unit Usaha	1.695.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				350 Orang	81.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**48.714.779.000,00**							**59.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**-**			**86.74 indek**	**48.714.779.000,00**						**-**	**59.000.000.000,00**	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya*	-			100 angka	16.847.664.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM	-	17.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	16.847.664.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		17.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)*	-			100 angka	20.100.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM	-	20.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3500 Unit	20.100.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		20.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya*	-			30 desa	11.766.615.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Desa preneur	-	21.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				16 Laporan	11.766.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Desa preneur		21.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**13.586.094.569,00**							**14.545.081.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.586.094.569,00**							**14.545.081.900,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**12.193.748.569,00**							**13.045.081.900,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**88,50 skor**	**11.380.670.819,00**						**-**	**12.180.081.900,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*	-			9 Dokumen	16.467.300,00			-	-	Internal OPD, Instansi Mitra	-	16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8.499.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3.993.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.973.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan*	-			3 Dokumen	9.785.192.569,00			-	-	Internal OPD, Instansi Mitra	-	10.018.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	9.767.338.669,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		10.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10.345.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.508.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Instansi Mitra		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			1 Laporan	10.512.000,00			-	-	Internal OPD	-	15.515.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.512.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		15.515.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah*	-			507 pkaet/dokumen/lapora	346.686.050,00			-	-	Internal OPD	-	410.387.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.398.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		25.337.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		50.321.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27.284.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		43.143.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.095.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		11.032.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37.501.550,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	142.548.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		143.554.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	64.017.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang*	-			20 Unit	119.769.500,00			-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat	-	323.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	7.310.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	92.139.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		295.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.320.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		21.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			3 Laporan	743.076.900,00			-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat, Instansi Mitra	-	794.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.550.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat, Instansi Mitra		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	133.526.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat, Instansi Mitra		159.320.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	606.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat, Instansi Mitra		630.560.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara*	-			174 Unit	358.966.500,00			-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat	-	600.949.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.116.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	175.515.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		233.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				23 Unit	13.105.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		17.949.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	92.859.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				67 Unit	25.371.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)***	**-**			**2 lokus**	**91.902.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Dokumen Peta Potensi*	-			1 dokumen	91.902.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	91.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Kepeminatan Investasi***	**-**			**15 Kepeminatan**	**33.755.500,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal*	-			2 Dokumen	33.755.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	-	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	33.755.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**-**			**88,75 skor**	**315.180.850,00**						**-**	**290.000.000,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani*	-			2255 Pelaku Usaha	315.180.850,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	-	290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1540 Pelaku Usaha	118.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				700 Pelaku Usaha	192.772.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				15 Kegiatan Usaha	4.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM***	**-**			**1109 Kegiatan Usaha**	**257.479.900,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal*	-			38 kali	257.479.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	26.398.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan usaha	23.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				420 Pelaku Usaha	207.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan***	**-**			**95 persen**	**114.759.500,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	-			5 jenis	114.759.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat	-	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	114.759.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Internal OPD, Pelaku Usaha, Masyarakat		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.392.346.000,00**							**1.500.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif***	**-**			**3 Mitra**	**1.392.346.000,00**						**-**	**1.500.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah kerja sama Jumlah kerja sama*	-			1 Kerjasama	1.392.346.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Usaha, Mitra Luar Negeri, dan Lintas OPD Provinsi DI Yogyakarta	-	1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				5 Laporan	1.392.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Usaha, Mitra Luar Negeri, dan Lintas OPD Provinsi DI Yogyakarta		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN						**307.082.429.956,00**							**746.783.126.825,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**307.082.429.956,00**							**746.783.126.825,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**307.082.429.956,00**							**746.783.126.825,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90 angka**	**29.168.493.956,00**						**-**	**36.812.927.865,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 dokumen	2.777.000,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	40.861.363,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	937.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		5.878.901,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.051.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		19.440.905,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	789.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		15.541.557,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	27.061.318.406,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	34.345.182.197,00	DINAS KEBUDAYAAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2964 Orang/ Bulan	26.936.932.656,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		34.204.133.872,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	79.002.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		86.902.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18.685.650,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		23.370.215,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	26.698.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		30.775.910,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	36.140.800,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	39.754.880,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	36.140.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		39.754.880,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	150.000,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.702.569.200,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.984.887.020,00	DINAS KEBUDAYAAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	567.969.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		573.731.120,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.134.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		1.411.155.900,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	365.538.550,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	402.092.405,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		46.675.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	323.106.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		355.417.205,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni***	**-**			**20 %** **100 %** **18 Kegiatan** **10 %** **90,99 Indeks** **45 Desa** **88 Indeks** **8,5 %**	**277.913.936.000,00**						**-**	**709.970.198.960,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum*	-			13 laporan	10.059.141.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	23.292.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				5 Dokumen	2.591.284.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		7.320.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra				5 Laporan	2.531.459.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		9.317.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				3 Unit	4.936.398.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		6.655.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*	-			27 Objek	20.010.061.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	40.647.444.138,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				15 Objek	10.593.135.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		21.202.830.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				11 Objek	6.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		9.317.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	2.916.926.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		10.127.614.138,00	DINAS KEBUDAYAAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya*	-			85 unit	13.882.830.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat	-	17.559.084.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	4.968.076.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		1.600.394.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				84 Unit	8.914.754.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		15.958.690.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	*Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan*	-			13 Dokumen	2.511.522.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY	-	280.129.330.642,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan				4 Dokumen	405.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY		270.945.430.642,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														
			*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)*				4 Laporan	288.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY		532.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				5 Dokumen	1.817.582.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	masyarakat DIY		8.651.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			13 kegiatan	231.450.382.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	348.341.839.780,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				100 Desa	18.494.792.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		45.985.224.780,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				8 Lembaga	4.929.784.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		9.317.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				2 Laporan	4.200.546.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		5.324.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				44 Orang	2.300.810.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		3.327.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				5 Laporan	4.548.346.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		6.655.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	6.127.440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		11.979.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				7 Dokumen	4.202.598.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		7.806.315.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				272 Orang	820.105.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		3.726.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				4 Laporan	1.457.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		13.310.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera														
			Jumlah Laporan Selendang Sutera				1 Laporan	693.961.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		2.662.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	7.705.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		9.982.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya														
			Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya				2 Laporan	174.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		224.273.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				5 Laporan	1.970.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		3.993.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO						**7.001.490.500,00**							**37.089.588.839,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.001.490.500,00**							**37.089.588.839,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7.001.490.500,00**							**37.089.588.839,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90 angka**	**2.779.534.500,00**						**-**	**3.278.580.160,00**	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	12.302.100,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	13.532.310,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.302.100,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		13.532.310,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	20.483.100,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	22.531.410,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.483.100,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		22.531.410,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	83.579.400,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	91.216.440,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	35.560.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		39.116.440,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.005.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		11.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.610.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		6.100.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32.404.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		35.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	2.589.124.900,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	3.071.300.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		1.300.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	343.940.900,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		370.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.243.984.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		2.700.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	74.045.000,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	80.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	29.045.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		31.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	45.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		49.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta***	**-**			**10 %** **45 Desa** **20 %** **8,5 %** **18 Kegiatan** **90,99 Indeks** **100 %** **88 Indeks**	**4.221.956.000,00**						**-**	**33.811.008.679,00**	
	2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	*Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo*	-			2 laporan	3.619.458.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	33.148.260.879,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	228.981.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		8.148.260.879,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo														
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	3.390.477.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		25.000.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya*	-			16 unit	602.498.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat	-	662.747.800,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				16 Unit	602.498.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		662.747.800,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
		TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA						**14.650.883.000,00**							**38.773.576.757,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.650.883.000,00**							**38.773.576.757,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**14.650.883.000,00**							**38.773.576.757,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90 angka**	**1.794.624.000,00**						**-**	**2.149.600.000,00**	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	9.843.600,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	10.700.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	9.843.600,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		10.700.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	20.403.600,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	22.400.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.403.600,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		22.400.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	50.516.300,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	55.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.348.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		10.200.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.724.100,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		10.600.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.748.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		4.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.698.200,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		6.200.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		2.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	20.156.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		22.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.631.009.000,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.972.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		2.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	294.209.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		320.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.335.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		1.650.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	82.851.500,00			-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	89.500.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	56.923.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		62.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	5.958.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		6.500.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	19.970.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		21.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*** ***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo***	**-**			**88 Indeks** **100 %** **10 %** **18 Kegiatan** **20 %** **8,5 %** **45 Desa** **90,99 Indeks**	**12.856.259.000,00**						**-**	**36.623.976.757,00**	
	2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun*	-			1 event	7.087.963.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	30.373.976.757,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	7.087.963.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		30.373.976.757,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya*	-			318 unit	4.018.186.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat	-	4.400.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				318 Unit	4.018.186.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		4.400.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			6 dokumen	1.750.110.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	1.850.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				6 Dokumen	1.750.110.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	Kelompok seni budaya, organiasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		1.850.000.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						**46.461.015.024,00**							**45.316.320.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**46.461.015.024,00**							**45.316.320.900,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**18.094.424.000,00**							**22.349.577.100,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi***	**-**			**3000 dokumen**	**18.094.424.000,00**						**-**	**22.349.577.100,00**	
	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	*Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi*	-			2 jenis	14.000.094.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	18.254.497.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten				56600 Dokumen	10.100.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		13.153.872.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya														
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya				46000 Unit	3.900.094.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.100.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 19:42:28

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan*	-			20 unit	4.094.330.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	4.095.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				20 Unit	4.094.330.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		4.095.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**27.865.036.974,00**							**22.406.094.300,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**91,5 angka**	**18.462.941.424,00**						**-**	**21.032.168.000,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	-			N/A Dokumen 10 Dokumen	2.780.000,00			-	-	DPAD DIY	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	640.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	605.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.535.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi keuangan*	-			14 laporan	15.317.910.924,00			-	-	DPAD DIY	-	16.025.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	15.298.728.024,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		16.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.940.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.360.700,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.882.200,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku*	-			4 laporan	22.500.000,00			-	-	DPAD DIY	-	27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional*	-			4 Dokumen	900.000,00			-	-	DPAD DIY	-	13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah*	-			5 jenis	79.165.500,00			-	-	DPAD DIY	-	145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.128.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.592.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1.332.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.824.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	44.288.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			2 unit	1.707.000,00			-	-	DPAD DIY	-	123.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.707.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		123.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			3 jenis	2.743.154.000,00			-	-	DPAD DIY	-	3.501.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.278.554.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.464.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			33 unit	294.824.000,00			-	-	DPAD DIY	-	1.183.068.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	131.799.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		283.710.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	18.724.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		282.608.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	138.109.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.192.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		416.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)***	**-**			**15,50 % N/A perpustakaan 54 perpustakaan**	**9.390.460.850,00**						**-**	**1.333.926.300,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah perpustakaan ber-SNP* *Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	-			570 perpustakaan N/A perpustakaan	1.546.703.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	-	495.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	525.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	1.160.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				50 Orang	13.175.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1.225.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	1.530.098.350,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				5 Perpustakaan	520.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat* *jumlah sosialisasi budaya baca*	-			200 kali N/A kali	7.843.757.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	838.926.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				269 Lokus	7.807.820.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				3 Orang	1.437.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		433.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	34.500.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		105.376.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan*** ***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan***	**-**			**N/A eksemplar** **2530 eksemplar**	**11.634.700,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Jumlah KCKR daerah yang dihimpun* *jumlah karya cetak dan karya rekam baru*	-			500 eksemplar N/A eksemplar	1.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				500 Eksemplar	1.160.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah jumlah judul yang tercantum dalam KID*	-			N/A terbitan 500 entri	9.144.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				500 Entry	6.891.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	2.253.700,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar*	-			4 eksemplar	1.330.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				4 Eksemplar	1.330.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**501.554.050,00**							**560.649.500,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip*** ***Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi*** ***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip***	**-**			**nilai : 97,5 angka n/a Arsip N/A arsip**	**501.554.050,00**						**-**	**560.649.500,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip*	-			42,50 %	136.644.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	-	389.253.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				2000 Arsip	11.492.550,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		42.030.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				300 Arsip	7.351.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		13.000.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				38 Lembaga	117.800.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		334.223.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip*	-			43,50 %	39.320.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	-	65.219.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis														
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi				12000 Arsip	39.320.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		65.219.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN*	-			20,50 %	325.589.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	-	106.175.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				750 Pengguna	31.914.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		31.016.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				3 Laporan	293.675.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		75.159.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN						**2.439.982.250,00**							**10.107.583.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.439.982.250,00**							**10.107.583.250,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.439.982.250,00**							**10.107.583.250,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**91,5 angka**	**1.789.228.450,00**						**-**	**7.257.129.800,00**	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi keuangan*	-			14 laporan	9.021.000,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	-	12.800.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.021.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		12.800.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku*	-			4 laporan	15.091.000,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	-	15.442.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15.091.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		15.442.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah*	-			5 jenis	21.903.500,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	-	131.731.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.177.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		77.889.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.370.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		9.686.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.798.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		16.500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	808.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		8.310.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.750.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		19.346.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			3 jenis	1.102.102.400,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	-	1.474.515.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		1.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.087.202.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		1.444.715.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		28.800.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			114 unit	641.110.550,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	-	5.622.641.800,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	75.071.550,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		250.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	4.541.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		30.100.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	60.660.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		250.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	421.480.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		4.342.541.800,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				71 Unit	79.358.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		750.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)***	**-**			**15,50 % N/A perpustakaan 54 perpustakaan**	**640.825.800,00**						**-**	**2.786.453.450,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah perpustakaan ber-SNP* *Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	-			570 perpustakaan N/A perpustakaan	640.825.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan	-	2.786.453.450,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	540.009.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		2.643.121.800,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1 Dokumen	5.816.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		10.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	95.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		133.331.650,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan*** ***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan***	**-**			**N/A eksemplar 2530 eksemplar**	**9.928.000,00**						**-**	**64.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan* *jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan*	-			N/A eksemplar 225 lembar	9.928.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Layanan Perpustakaan	-	64.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				3 Eksemplar	4.520.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Layanan Perpustakaan		5.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				50 Orang	5.408.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Layanan Perpustakaan		59.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**64.292.953.681,00**							**61.277.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**449.033.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**449.033.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen) Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)***	**-**			**N/A % 87,5 %**	**449.033.000,00**					**-**		**500.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)*	-			100 %	449.033.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY	-	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				3 Dokumen	449.033.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.890.654.000,00**							**23.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**21.890.654.000,00**							**23.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya Persentase desa maritim dalam tahap mandiri***	**-**			**43 % 100 % 60 % 35 %**	**21.890.654.000,00**						**-**	**23.000.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)*	-			100 %	15.992.566.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	-	16.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				6 Unit	15.992.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		16.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)* *Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	-			1 Tahun 1 tahun	5.898.088.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	-	7.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				4 Objek	5.898.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		7.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**41.953.266.681,00**							**37.777.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**41.953.266.681,00**							**37.777.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**-**			**89,10 skor**	**21.742.994.881,00**						**-**	**22.627.000.000,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	56.672.700,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	33.576.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.575.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.576.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.304.300,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.639.900,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 % 100 %	18.122.777.181,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	18.539.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ Bulan	18.082.915.381,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		18.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.854.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	19.607.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	17.700.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		14.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)*	-			100 %	4.605.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	4.605.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	-			100 %	367.065.850,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	436.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	37.868.500,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				83 Paket	63.094.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				41 Paket	52.918.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7.511.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26 Paket	51.810.350,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.956.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	145.908.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*	-			100 %	51.709.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	41.314.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	10.395.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	-			100 %	2.085.752.550,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	2.307.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.979.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	792.773.550,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	1.287.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	-			100 %	1.036.712.600,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	1.090.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	78.984.300,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	710.200.300,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	54.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	115.475.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	77.473.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)***	**-**			**96 % N/A %**	**417.780.000,00**						**-**	**225.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)*	-			3 lokasi	346.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY	-	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5822.92 Ha	346.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*"Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi) "*	-			1 rekomendasi	26.640.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	26.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil*	-			100 %	44.240.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	44.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)*** ***Produksi perikanan tangkap (ton)***	**-**			**82,50 skor 7584 ton**	**651.781.800,00**						**-**	**850.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)*	-			3 angka	378.080.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY	-	450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	19.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Unit	358.520.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)*	-			10 angka	191.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY	-	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	191.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)*	-			3 angka	41.261.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				7 Layanan	41.261.000,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*"Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "*	-			2 angka	40.640.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	40.640.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)*** ***Produksi perikanan budidaya (ton)***	**-**			**35,22 %** **9 ton** **98136 ton**	**6.111.320.000,00**						**-**	**7.025.000.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	-			5 angka	504.780.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY	-	625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	29.463.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	475.316.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	-			5 angka	5.606.540.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY	-	6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				98 Unit	5.606.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY		6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)***	**-**			**79 %**	**123.860.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil*	-			1 tahun	96.320.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	88.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				3 Kelompok Masyarakat	8.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "*	-			1 tahun	27.540.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	13.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	14.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "***	**-**			**34,93 Kg/KAP/TH**	**12.905.530.000,00**						**-**	**6.750.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			1 tahun	25.080.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	10.222.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				2 Rekomendasi	14.857.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "*	-			3 dokumen	12.786.020.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY	-	6.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing															
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	7.989.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		3.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				3 Kegiatan	4.796.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		3.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*"Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "*	-			1 tahun	94.430.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				5 Unit Usaha	77.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir				1 Sistem Informasi	17.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Poklahsar DIY, Masyarakat DIY		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA						**5.062.465.000,00**							**5.495.720.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.062.465.000,00**							**5.495.720.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5.062.465.000,00**							**5.495.720.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**-**			**89,10 skor**	**1.915.985.000,00**						**-**	**2.245.720.000,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	16.820.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	17.320.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.820.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		8.820.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		2.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		6.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	13.530.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	15.400.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		400.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	-			100 %	63.486.600,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	81.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8.294.600,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		10.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	9.771.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		10.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	6.383.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		10.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	800.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		1.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	14.900.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.838.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		30.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	-			100 %	1.601.960.900,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	1.752.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		2.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	604.960.900,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		650.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	996.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		1.100.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	-			100 %	220.187.500,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	380.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	160.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		200.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	20.013.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		30.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		100.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	10.174.500,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		50.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Produksi perikanan budidaya (ton)***	**-**			**35,22 % 9 ton 98136 ton**	**3.146.480.000,00**						**-**	**3.250.000.000,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	-			5 angka	46.160.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY	-	100.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				1 Unit	46.160.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY		100.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	-			5 angka	3.100.320.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY	-	3.150.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	3.100.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY		3.150.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI						**2.095.006.250,00**							**2.594.760.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.095.006.250,00**							**2.594.760.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.095.006.250,00**							**2.594.760.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**-**			**89,10 skor**	**2.030.047.500,00**						**-**	**2.444.760.000,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	13.255.500,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	17.260.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.260.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		7.260.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.000.500,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.995.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	-			100 %	15.000.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	20.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		20.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	-			100 %	54.613.500,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	107.500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	11.559.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	12.778.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	8.639.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		10.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	431.500,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		500.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	6.914.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		15.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		2.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12.450.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		50.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "* *Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 % 100 %	1.787.324.700,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	2.105.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	874.700,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		5.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	536.050.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		550.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1.250.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		1.550.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	159.853.800,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	195.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	83.469.800,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		100.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	24.486.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		35.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.950.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		50.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	17.948.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		10.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)*** ***Produksi perikanan tangkap (ton)***	**-**			**82,50 skor 7584 ton**	**64.958.750,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)*	-			3 angka	64.958.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY	-	150.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	15.678.750,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		50.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				11 Layanan	49.280.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		100.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
		DINAS PARIWISATA						**34.454.614.300,00**							**50.504.886.850,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.000.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan***	**-**			**7 kawasan**	**1.000.000.000,00**						**-**	**1.400.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata*	-			2 kawasan	1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	1.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Banjaroyo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.346.500.000,00**							**28.550.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**15.346.500.000,00**							**28.550.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina*** ***Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah*** ***Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)***	**-**			**n/a lembaga** **n/a orang** **10.556.672 orang**	**15.346.500.000,00**						**-**	**28.550.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*	-			1 objek 1 Unit	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				3 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual* *Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY*	-			597 Angka 1.000.000 Orang	12.628.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	25.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				299 Objek	12.378.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		25.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				110 Unit	250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri*	-			7 Lokasi	2.518.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya														
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				12 Lembaga	2.518.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.108.114.300,00**							**20.554.886.850,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**18.108.114.300,00**							**20.554.886.850,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**92,86 skor**	**13.039.094.300,00**						**-**	**15.309.686.850,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	29.519.900,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	52.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.440.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	9.999.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8.079.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	10.680.244.557,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	12.044.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	10.645.125.057,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		12.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.999.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	42.144.943,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	42.999.450,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.544.943,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		9.399.450,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	33.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		33.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	155.882.400,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	278.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.098.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.992.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		22.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		13.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.794.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	71.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	9.988.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	143.243.000,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	351.020.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10.230.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	77.649.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	55.364.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		231.020.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.572.929.100,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	1.805.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.401.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	507.528.100,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.062.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		1.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	415.130.400,00			-	-	Dinas Pariwisata	-	736.667.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.993.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	249.983.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	19.810.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	26.254.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		26.667.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.960.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				103 Unit	64.130.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)*** ***Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)***	**-**			**23,459,000 Orang 345 UJP**	**789.020.000,00**						**-**	**710.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Daya Tarik yang meningkat kapasitas pengelolaannya*	-			36 lokasi	504.720.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				1280 Orang	504.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi*	-			1 Dokumen	28.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional														
			Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional				1 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha* *Jumlah UJP yang dipantau dan dibina*	-			4 Usaha 343 Usaha	256.300.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	310.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				22 Unit Usaha	44.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				333 Pelaku Usaha	195.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n***	**-**			**8.750.000 Orang 150.000 Orang**	**1.415.240.000,00**						**-**	**850.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah pengunjung TIC* *Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar*	-			8000 Orang 500 Orang	1.415.240.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	850.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Dokumen	1.295.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)***	**-**			**90 Orang**	**149.360.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Penyediaan sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif*	-			1 lokasi	19.360.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	19.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI*	-			89,94 Nilai	130.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)***	**-**			**5.256 Orang**	**2.715.400.000,00**						**-**	**3.385.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata* *Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata*	-			90 Orang 450 Orang	1.123.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	2.210.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				90 Orang	248.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		1.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)														
			Jumlah produk kreatif				8 Produk	560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				450 Orang	235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi*	-			1556 orang	1.592.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	1.175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				1380 Orang	712.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				176 Orang	880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		375.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						**74.343.398.654,00**							**105.305.441.168,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.581.753.000,00**							**4.816.965.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.581.753.000,00**							**4.816.965.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten***	**-**			**484,5 Ha**	**1.581.753.000,00**						**-**	**4.816.965.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian*	-			4 Satuan Ruang Strategis	1.581.753.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan	-	4.816.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	905.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		1.153.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				4 Dokumen	502.153.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		2.011.065.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	174.100.000,00	Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Turi, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Pakem, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		1.652.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.563.425.500,00**							**15.147.055.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.250.803.500,00**							**1.941.860.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)*** ***Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)***	**-**			**2.139 Kkal/Kapita/Hari 3.734 Kkal/Kapita/Hari**	**1.055.508.300,00**						**-**	**1.615.100.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya*	-			1 Tahun	308.915.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kios Pangan, LAPM, LDPM, PUPM, pengelola cadangan pangan, responden data, enumerator, tim penyusun NBM	-	393.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				3 Laporan	209.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kios Pangan, LAPM, LDPM, PUPM, pengelola cadangan pangan, responden data, enumerator, tim penyusun NBM		236.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				2 Laporan	89.607.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kios Pangan, LAPM, LDPM, PUPM, pengelola cadangan pangan, responden data, enumerator, tim penyusun NBM		128.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	9.988.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kios Pangan, LAPM, LDPM, PUPM, pengelola cadangan pangan, responden data, enumerator, tim penyusun NBM		29.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian*	-			10,6 kg/kapita/tahun	746.593.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	KWT, ibu-ibu PKK/Dasawisma, pelajar, Analis Ketahanan Pangan	-	1.221.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Dokumen	728.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	KWT, ibu-ibu PKK/Dasawisma, pelajar, Analis Ketahanan Pangan		1.188.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	18.593.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	KWT, ibu-ibu PKK/Dasawisma, pelajar, Analis Ketahanan Pangan		33.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)***	**-**			**96,59 %**	**94.439.200,00**						**-**	**136.500.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*	-			5 Dokumen	27.256.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Tim penyusun SKPG dan FSVA	-	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	27.256.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Tim penyusun SKPG dan FSVA		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Penanganan Kerawanan Pangan*	-			5 Kabupaten/ Kota	67.182.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Desa Mandiri Pangan, LAPM, para pihak terkait	-	84.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				4 Laporan	67.182.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Desa Mandiri Pangan, LAPM, para pihak terkait		84.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)***	**-**			**80,88 %**	**100.856.000,00**						**-**	**190.260.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar*	-			5 Kabupaten/ Kota	100.856.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), distributor, retail, kelompok tani, KWT, gapoktan, OKKPD DIY, PMHP	-	190.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	22.041.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), distributor, retail, kelompok tani, KWT, gapoktan, OKKPD DIY, PMHP		63.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				3 Dokumen	40.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), distributor, retail, kelompok tani, KWT, gapoktan, OKKPD DIY, PMHP		64.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	28.094.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), distributor, retail, kelompok tani, KWT, gapoktan, OKKPD DIY, PMHP		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), distributor, retail, kelompok tani, KWT, gapoktan, OKKPD DIY, PMHP		10.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7.082.622.000,00**							**12.890.195.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)***	**-**			**32,05 %**	**7.082.622.000,00**						**-**	**12.890.195.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan*	-			5 Jenis	7.082.622.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat	-	12.890.195.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				18 Laporan	7.082.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat		12.890.195.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**64.198.220.154,00**							**85.341.421.168,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**64.198.220.154,00**							**85.341.421.168,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,85 Angka**	**48.142.483.954,00**						**-**	**55.737.512.168,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	-			100 %	45.380.800,00			-	-	DPKP DIY	-	61.280.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14.679.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		20.305.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	16.246.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		17.870.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	14.455.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		23.105.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	42.154.012.004,00			-	-	DPKP DIY	-	47.483.313.168,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				321 Orang/ Bulan	42.123.494.004,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		47.352.428.168,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		112.445.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	17.558.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		18.440.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	63.600.000,00			-	-	DPKP DIY	-	73.458.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	63.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		73.458.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	11.779.750,00			-	-	DPKP DIY	-	12.999.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	11.779.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		12.999.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	224.488.500,00			-	-	DPKP DIY	-	192.060.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.713.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		57.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.211.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		41.173.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.843.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		23.985.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.266.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		11.234.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	47.454.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		58.218.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	-			100 %	281.294.000,00			-	-	DPKP DIY	-	552.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	220.029.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		184.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	61.265.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		367.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	4.494.051.000,00			-	-	DPKP DIY	-	4.767.276.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	720.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		756.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	968.631.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		1.221.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.524.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		3.545.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	-			100 %	867.877.900,00			-	-	DPKP DIY	-	2.594.826.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		75.686.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				136 Unit	618.353.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		749.485.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	91.908.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		86.910.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		1.575.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				122 Unit	97.866.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		107.745.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik***	**-**			**98,5 %**	**9.882.724.450,00**						**-**	**23.343.459.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian*	-			4 Kabupaten	2.977.554.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan	-	15.338.484.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	562.844.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		630.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				9 Dokumen	2.414.710.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		14.708.484.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan*	-			119 Kelompok	6.905.169.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok ternak, kelompok tani, KWT, gapoktan	-	8.004.975.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	6.905.169.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok ternak, kelompok tani, KWT, gapoktan		8.004.975.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan***	**-**			**10 %**	**504.999.800,00**						**-**	**530.250.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya penataan prasarana pertanian*	-			4 Kabupaten	504.999.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan	-	530.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	199.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				4 Unit	305.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kelompok tani, KWT, gapoktan		320.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)***	**-**			**7,46 %**	**718.626.400,00**						**-**	**934.500.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular*	-			5 Kabupaten/ Kota	60.721.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok ternak, Poskeswan	-	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	60.721.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok ternak, Poskeswan		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah*	-			5 Kabupaten/ Kota	650.705.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), juru sembelih halal, pengawas penyembelihan hewan qurban	-	798.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	621.490.000,00	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Temon, Sindutan Kab. Kulon Progo, Temon, Jangkaran Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Ngemplak, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), juru sembelih halal, pengawas penyembelihan hewan qurban		735.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	29.215.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), juru sembelih halal, pengawas penyembelihan hewan qurban		63.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan*	-			5 Kabupaten/ Kota	7.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit usaha Produk Asal Hewan (PAH)	-	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit usaha Produk Asal Hewan (PAH)		31.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)***	**-**			**58,60 %**	**1.371.640.000,00**						**-**	**206.800.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan*	-			3 Sub sektor	1.371.640.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP), Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP), kelompoktani, KWT, gapoktan, Regu Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman (RPT)	-	206.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				725 Ha	1.371.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP), Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP), kelompoktani, KWT, gapoktan, Regu Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman (RPT)		206.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)***	**-**			**66 %**	**3.577.745.550,00**						**-**	**4.588.900.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*	-			5 Kabupaten/ Kota	561.822.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian swadaya	-	367.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				270 Orang	561.822.300,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian swadaya		367.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian*	-			5 Kabupaten/ Kota	3.015.923.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Jogja Agro Park (JAP), kelompok tani, KWT, gapoktan	-	4.221.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1.503.029.800,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Jogja Agro Park (JAP), kelompok tani, KWT, gapoktan		3.727.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				49 Kelompok	1.512.893.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Jogja Agro Park (JAP), kelompok tani, KWT, gapoktan		493.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.563.425.500,00**							**15.147.055.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**230.000.000,00**							**315.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**230.000.000,00**						**-**	**315.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk budidaya pertanian*	-			40 Kalurahan	230.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kalurahan	-	315.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kalurahan		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN						**4.162.017.950,00**							**5.222.514.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**274.700.000,00**							**289.275.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**274.700.000,00**							**289.275.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten***	**-**			**484,5 Ha**	**274.700.000,00**						**-**	**289.275.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian*	-			4 Satuan Ruang Strategis	274.700.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Keraton Kasultanan Yogyakarta, UPTD BP3MBTP	-	289.275.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	274.700.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Keraton Kasultanan Yogyakarta, UPTD BP3MBTP		289.275.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.887.317.950,00**							**4.933.239.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.887.317.950,00**							**4.933.239.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,85 Angka**	**1.452.804.200,00**						**-**	**1.751.189.000,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	8.400.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	9.702.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		9.702.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.320.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	11.918.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		11.918.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	108.558.800,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	114.924.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.479.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		9.324.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.971.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		26.095.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		7.660.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.830.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		23.545.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	33.078.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		48.300.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	-			100 %	102.058.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	110.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	102.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		110.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	870.016.800,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	1.137.810.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		1.050.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	203.056.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		296.710.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	666.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		840.050.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	-			100 %	353.450.600,00			-	-	UPTD BP3MBTP	-	366.585.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	262.387.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		315.150.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	81.674.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		38.600.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	9.389.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		12.835.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi***	**-**			**2,37 %**	**2.050.913.750,00**						**-**	**2.782.050.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*	-			5 Kabupaten/ Kota	2.050.913.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/ pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP	-	2.782.050.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				141 Sertifikat	85.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/ pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		194.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				43800 Batang	680.961.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		1.075.800.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				7340 Batang	129.999.850,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		136.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				67.5 Ton	1.111.882.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Kab. Sleman, Berbah, Tegaltirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		1.312.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	30.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		41.265.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		17.220.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	1.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penangkar/produsen/pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, gapoktan, UPTD BP3MBTP		4.515.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan***	**-**			**10 %**	**383.600.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian*	-			4 Kabupaten	383.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	400.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Unit	383.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN						**6.093.017.000,00**							**5.774.375.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.093.017.000,00**							**5.774.375.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.093.017.000,00**							**5.774.375.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,85 Angka**	**1.089.047.000,00**						**-**	**1.212.125.000,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	8.400.000,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	9.260.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		9.260.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	13.200.000,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	15.245.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		15.245.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	95.784.750,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	93.720.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.222.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		5.495.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.188.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		17.325.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.801.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		3.595.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.136.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		30.715.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		2.465.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29.594.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		34.125.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	-			100 %	286.150.000,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	400.890.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	286.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		400.890.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	314.901.750,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	361.525.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		1.260.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	174.501.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		183.225.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	139.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		177.040.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	-			100 %	370.610.500,00			-	-	UPTD BPPTDK	-	331.485.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	275.101.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		288.850.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	88.095.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		34.680.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	7.414.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		7.955.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi***	**-**			**93,5 %**	**3.911.610.000,00**						**-**	**3.701.250.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat*	-			70 Ekor	3.911.610.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, kelompok ternak, pelaku usaha peternakan	-	3.701.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	3.911.610.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, kelompok ternak, pelaku usaha peternakan		3.701.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan***	**-**			**10 %**	**281.760.000,00**						**-**	**220.500.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya penataan prasarana pertanian*	-			4 Kabupaten	281.760.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	220.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	281.760.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		220.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)***	**-**			**7,46 %**	**810.600.000,00**						**-**	**640.500.000,00**	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	-			24268 Sampel	810.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, kelompok ternak, pelaku usaha peternakan, pelaku usaha pangan asal hewan	-	640.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2 Dokumen	810.600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UPTD BPPTDK, kelompok ternak, pelaku usaha peternakan, pelaku usaha pangan asal hewan		640.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**45.073.528.538,00**							**61.673.490.070,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.509.139.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.509.139.000,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina***	**-**			**2 Sentra**	**1.509.139.000,00**						**-**	**4.000.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis*	-			3 Dokumen	1.509.139.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1.309.734.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		2.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	199.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.210.615.000,00**							**20.860.615.500,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**19.210.615.000,00**							**20.860.615.500,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan***	**-**			**14,27 Triliun Rp**	**19.210.615.000,00**						**-**	**20.860.615.500,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	1.550.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				12 Unit	1.550.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan*	-			6400 IKM	17.660.615.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	-	18.860.615.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				31545 Unit	17.660.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan		18.860.615.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.353.774.538,00**							**36.812.874.570,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.735.185.840,00**							**4.685.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Jumlah Perusahaan Ekspor***	**-**			**605 Perusahaan**	**14.621.450,00**						**-**	**40.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu*	-			98 %	14.621.450,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				28500 Dokumen	14.621.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	**-**			**90 %**	**1.986.880.000,00**						**-**	**3.020.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah jenis barang yang dipantau*	-			25 Jenis	1.986.880.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	3.020.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	4.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1.982.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		3.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru***	**-**			**20 %**	**272.338.680,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina*	-			90 IKM	272.338.680,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				4 Produk	272.338.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen***	**-**			**97 % 98 %**	**527.865.710,00**						**-**	**530.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani*	-			45 Pengaduan	513.665.710,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				45 Pengaduan	513.665.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis barang yang dipantau*	-			25 Jenis	14.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	14.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina***	**-**			**2,68 Mily ar**	**933.480.000,00**						**-**	**945.000.000,00**	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN*	-			58 UMKM	933.480.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	945.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				58 UMKM	933.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		945.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**20.618.588.698,00**							**32.127.874.570,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**85 Skor**	**18.157.892.698,00**						**-**	**25.716.874.570,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.*	-			100 %	21.560.000,00			-	-	Disperindag DIY	-	46.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	16.010.847.208,00			-	-	Disperindag DIY	-	18.080.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/ Bulan	15.935.847.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		18.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	63.858.190,00			-	-	Disperindag DIY	-	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	63.858.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	141.991.400,00			-	-	Disperindag DIY	-	5.194.940.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		5.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.940.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		1.940.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	46.243.000,00			-	-	Disperindag DIY	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.467.324.000,00			-	-	Disperindag DIY	-	1.628.893.740,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	372.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		379.559.340,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.094.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		1.249.334.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	406.068.900,00			-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	447.040.430,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.405.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36.405.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	252.497.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		266.634.830,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	2.983.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	14.182.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah tenaga kerja di sektor Industri***	**-**			**414500 Orang**	**2.408.376.200,00**						**-**	**6.250.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*	-			3 Dokumen	2.408.376.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	6.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	692.319.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1.011.816.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		2.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	704.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin***	**-**			**17543 Perusaha an**	**3.599.800,00**						**-**	**11.000.000,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau*	-			10 Perusahaan	3.599.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	3.599.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS***	**-**			**800 Perusahaan**	**48.720.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS*	-			200 Orang	48.720.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	48.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						**2.472.994.630,00**							**4.936.020.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.382.994.630,00**							**4.786.020.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.382.994.630,00**							**4.786.020.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**85 %**	**1.963.894.630,00**						**-**	**4.286.020.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	9.240.000,00			-	-	Disperindag DIY	-	11.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	9.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		11.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.320.000,00			-	-	Disperindag DIY	-	10.320.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		10.320.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	28.477.980,00			-	-	Disperindag DIY	-	2.046.700.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.954.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		11.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.996.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		9.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.106.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		2.000.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.246.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		11.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.932.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		4.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		2.200.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		9.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.636.381.350,00			-	-	Disperindag DIY	-	1.880.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	687.781.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		730.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	948.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		1.150.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	279.475.300,00			-	-	Disperindag DIY	-	338.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	38.185.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		42.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	10.687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		11.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	221.492.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		250.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	9.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		35.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah tenaga kerja di sektor Industri***	**-**			**414. 500 Orang**	**419.100.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*	-			3 Dokumen	419.100.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	-	500.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	419.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		500.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**90.000.000,00**							**150.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**90.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik***	**-**			**85 %**	**90.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	-	150.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		150.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
		SEKRETARIAT DAERAH						**61.082.381.422,00**							**7.171.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.082.381.422,00**							**7.171.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**61.082.381.422,00**							**7.171.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**88,75 Nilai**	**61.082.381.422,00**						**-**	**7.171.500.000,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	-			100 %	56.328.526.733,00			-	-	Sekretariat Daerah DIY	-	16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				435 Orang/ Bulan	56.309.393.533,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	19.133.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah DIY		16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	686.543.000,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	686.543.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			100 %	3.152.931.439,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	4.230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	241.723.439,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	157.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2.693.708.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		3.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	-			100 %	914.380.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	1.175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	709.530.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	142.309.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	62.541.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO TATA PEMERINTAHAN						**1.373.206.650,00**							**2.897.847.139,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**495.877.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**495.877.000,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi***	**-**			**86 %**	**495.877.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan*	-			2 Dokumen	495.877.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, Masyarakat di DIY khususnya yang berada di garis batas daerah	-	400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	495.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, Masyarakat di DIY khususnya yang berada di garis batas daerah		400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**877.329.650,00**							**2.497.847.139,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**877.329.650,00**							**2.497.847.139,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**-**			**87,85 %**	**350.526.750,00**						**-**	**1.088.130.889,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.455.500,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	68.303.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.006.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		41.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1.707.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		10.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	742.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		17.303.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	9.171.000,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	64.017.187,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4.620.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		46.206.996,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.025.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		6.799.866,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.525.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		11.010.325,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.020.000,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	16.690.740,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.020.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		16.690.740,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	161.432.750,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	641.169.962,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.350.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		25.668.016,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	16.587.150,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		47.148.998,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.078.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		10.226.592,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.740.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		35.937.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.842.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		16.339.356,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	125.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		465.850.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		40.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	37.291.000,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	40.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	37.291.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		40.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	1.020.000,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	3.300.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		3.300.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	125.136.500,00			-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	254.650.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.721.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		26.620.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	72.631.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		173.030.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	27.784.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		55.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	***Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah***	**-**			**100 %**	**526.802.900,00**						**-**	**1.409.716.250,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Terlaksananya tugas pemerintahan*	-			100 %	45.372.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	627.700.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	23.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		227.700.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	22.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah*	-			100 %	202.882.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait	-	382.016.250,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	202.882.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD terkait		382.016.250,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah*	-			100 %	278.548.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Provinsi se-Indonesia dan OPD terkait	-	400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	278.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Provinsi se-Indonesia dan OPD terkait		400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		BIRO HUKUM						**3.067.130.040,00**							**4.737.599.274,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.869.853.840,00**							**4.374.599.274,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.869.853.840,00**							**4.374.599.274,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**88.7 %**	**492.200.700,00**						**-**	**1.065.075.430,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			88.7 %	4.663.000,00			-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.792.400,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.311.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.485.900,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.485.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.902.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.821.500,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			100 %	6.499.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	8.895.980,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.620.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.770.380,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	979.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.040.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.085.600,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD*	-			100 %	10.320.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	11.882.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11.882.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-			100 %	2.700.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3.235.100,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.235.100,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	211.421.400,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	396.810.040,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.649.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.453.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.989.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		29.182.340,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1.381.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.238.100,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		47.978.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.118.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.573.600,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	162.343.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		304.384.300,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	91.791.000,00			-	-	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	211.684.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	4.386.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		13.970.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	80.530.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		164.494.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.875.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		33.220.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Nasa Komunimasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			100100 %%	4.858.500,00			-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.603.400,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.234.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.313.400,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.624.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.290.000,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	159.947.800,00			-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	419.172.310,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.404.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.815.800,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	85.911.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105.510.680,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	25.712.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		44.084.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.920.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		242.761.130,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	***Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum***	**-**			**100 %**	**1.975.449.140,00**						**-**	**2.679.216.144,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota*	-			100 %	264.321.850,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	589.866.750,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				29 Dokumen	81.870.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		196.680.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				50 Dokumen	20.850.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		37.400.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				78 Dokumen	66.718.350,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		208.183.470,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				72 Dokumen	94.883.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		147.603.280,00	BIRO HUKUM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM*	-			100 %	1.711.127.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	-	2.089.349.394,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	349.684.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		530.653.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				100 Kasus	1.361.443.290,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		1.558.696.194,00	BIRO HUKUM
3.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan***	**-**			**95 %**	**402.204.000,00**						**-**	**630.307.700,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota tindaklanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah tindaklanjut pelaksanaan keistimewaan*	-			95 %	402.204.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	-	630.307.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi				35 Dokumen	176.768.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		338.807.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun				15 Dokumen	225.436.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		291.500.000,00	BIRO HUKUM
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**197.276.200,00**							**363.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**197.276.200,00**							**363.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	***Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggar aan keistimewaan urusan pertanahan***	**-**			**100 %**	**197.276.200,00**						**-**	**363.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	-			100 %	197.276.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	363.000.000,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	33.012.200,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		66.000.000,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	164.264.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		297.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						**29.062.878.300,00**							**47.685.055.340,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.269.500.000,00**							**7.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.269.500.000,00**							**7.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**5.269.500.000,00**						**-**	**7.000.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	5.269.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	7.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				14 Laporan	5.269.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	-		7.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.793.378.300,00**							**40.685.055.340,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**23.793.378.300,00**							**40.685.055.340,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**362.180.900,00**						**-**	**618.764.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.128.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.543.200,00			-	-	-	-	17.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.528.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	11.220.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	165.368.100,00			-	-	-	-	298.264.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.199.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.764.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	129.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.900.000,00			-	-	-	-	17.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.021.600,00			-	-	-	-	261.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	32.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	76.968.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	2.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	32.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	14.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**23.431.197.400,00**						**-**	**40.066.291.340,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	23.139.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	-	38.926.291.340,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				796 Unit	20.022.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		33.861.088.120,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				10 Lembaga	3.117.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		5.065.203.220,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	178.277.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	73.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		225.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				3 Dokumen	90.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	13.877.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	112.994.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	415.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				2 Dokumen	22.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				3 Dokumen	90.514.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**1.455.336.350,00**							**2.759.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**798.227.000,00**							**950.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**798.227.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya***	**-**			**100 %**	**798.227.000,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya*	-			100 %	798.227.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat, OPD Terkait, Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Provinsi DI Yogyakarta	-	950.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				45 Desa	798.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat, OPD Terkait, Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Provinsi DI Yogyakarta		950.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**657.109.350,00**							**1.809.600.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**657.109.350,00**							**1.809.600.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90.8 Nilai**	**305.112.250,00**						**-**	**444.600.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	12.337.200,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	15.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.910.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		6.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		3.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.897.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		5.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			100 %	9.475.000,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		32.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.853.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		3.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3.422.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		4.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	9.600.000,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	11.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		11.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	68.777.350,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	158.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.214.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		5.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	15.108.450,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		16.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	6.828.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		19.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.852.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		13.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.976.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		3.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.798.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	66.998.000,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	55.456.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		60.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11.542.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	4.140.000,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	5.100.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	840.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		900.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		4.200.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	133.784.700,00			-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait	-	139.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.059.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		32.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	78.479.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		80.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	19.216.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		20.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	7.030.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan OPD Terkait		7.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)***	**-**			**100 %**	**351.997.100,00**						**-**	**1.365.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro*	-			100 %	250.745.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD Terkait	-	545.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				5 Dokumen	200.801.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD Terkait		450.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	49.943.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD Terkait		95.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	-			100 %	101.251.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD Terkait	-	820.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				3 Dokumen	101.251.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan OPD Terkait		820.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN						**1.694.467.900,00**							**6.292.421.596,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**608.268.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**608.268.000,00**							**2.200.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda***	**-**			**75 %**	**608.268.000,00**						**-**	**2.200.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda Urusan Tata Ruang*	-			100 %	508.504.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	2.000.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				4 Dokumen	508.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		2.000.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	*Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda Urusan Tata Ruang*	-			100 %	99.764.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	200.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				1 Dokumen	99.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		200.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.086.199.900,00**							**4.092.421.596,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.086.199.900,00**							**4.092.421.596,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**95,9 Nilai**	**314.608.900,00**						**-**	**700.838.500,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	10.700.100,00			-	-	-	-	15.311.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.119.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.080.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.877.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.942.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.702.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.289.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	7.941.200,00			-	-	-	-	27.746.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.799.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.542.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.990.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.256.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.951.000,00			-	-	-	-	11.507.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.951.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.507.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	109.770.950,00			-	-	-	-	460.958.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.384.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.198.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.508.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.472.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.545.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.586.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.482.550,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.201.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	87.851.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		412.500.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	12.006.000,00			-	-	-	-	44.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	12.006.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	46.473.150,00			-	-	-	-	28.822.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	873.150,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.290.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.532.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	116.766.500,00			-	-	-	-	112.493.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.627.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.924.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	62.308.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.452.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6.388.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.282.500,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	6.443.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.834.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda***	**-**			**83,33 %**	**771.591.000,00**						**-**	**3.391.583.096,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi*	-			78,95 %	114.671.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	1.819.083.096,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				4 Laporan	114.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.819.083.096,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*	-			81,82 %	656.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	1.572.500.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				2 Dokumen	656.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.572.500.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		BIRO ORGANISASI						**1.328.036.550,00**							**4.323.248.700,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.328.036.550,00**							**4.323.248.700,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.328.036.550,00**							**4.323.248.700,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi***	**-**			**88,98 nilai**	**381.133.550,00**						**-**	**823.248.700,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.934.150,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	11.712.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.506.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		5.715.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.727.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		2.468.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.699.450,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		3.529.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	13.722.000,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	40.805.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.489.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		34.020.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.232.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		3.887.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		2.898.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	11.348.500,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	11.347.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11.348.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		11.347.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah*	-			100 %	88.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	88.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	104.614.600,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	261.765.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.965.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		666.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.486.350,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		6.479.300,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8.916.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		3.865.900,00	BIRO ORGANISASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.657.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		5.376.600,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	79.990.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		243.878.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		1.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	9.900.000,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	13.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		13.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	146.614.300,00			-	-	Pemerintah Daerah DIY	-	134.118.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.570.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		31.600.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	88.199.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		84.100.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	24.845.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah DIY		18.417.600,00	BIRO ORGANISASI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Kematangan Perangkat Daerah***	**-**			**43,5 angka**	**946.903.000,00**						**-**	**3.500.000.000,00**	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan*	-			100 %	420.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Daerah DIY	-	2.300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan				12 Dokumen	183.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Daerah DIY		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	25.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Daerah DIY		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				6 Dokumen	111.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Daerah DIY		400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				5 Dokumen	100.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Daerah DIY		850.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	526.318.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Daerah DIY	-	1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				11 Dokumen	526.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Daerah DIY		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM DAN PROTOKOL						**19.906.457.900,00**							**20.366.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**200.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP	-	0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.115.417.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.115.417.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**3.115.417.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	-			100 %	535.417.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				1 Dokumen	535.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*	-			100 %	2.580.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				2 Unit	2.580.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.591.040.900,00**							**20.366.700.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.591.040.900,00**							**20.366.700.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**88,75 Nilai**	**16.591.040.900,00**						**-**	**20.366.700.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	11.509.750,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	13.800.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		5.750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	6.049.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		6.250.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.060.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		1.800.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	-			100 %	8.209.300,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	12.750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	6.060.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		10.250.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	649.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.499.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		1.750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	67.081.500,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	78.750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		11.750.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	53.581.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		67.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	-			100 %	1.444.202.600,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	2.232.500.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	141.984.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		135.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	198.022.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		255.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	146.203.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		235.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	227.174.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		255.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	45.246.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		52.500.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	516.654.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	168.917.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		200.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	139.602.000,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				74 Unit	103.508.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	36.094.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		0,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	6.537.330.000,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	7.758.900.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		8.900.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3.204.450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		3.650.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.325.680.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		4.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	2.721.092.090,00			-	-	Biro UP, Pemda DIY	-	3.210.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	551.810.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		650.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	1.300.128.090,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		1.600.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	395.356.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		450.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	349.414.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		350.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	124.384.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro UP, Pemda DIY		160.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan*	-			100 %	107.706.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	160.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	107.706.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		160.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan*	-			100 %	5.554.306.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY	-	6.900.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				24 Laporan	3.349.208.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		3.600.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	1.450.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		2.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	755.098.360,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UP, Pemda DIY		1.200.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA						**992.539.400,00**							**2.924.108.598,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**350.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**350.000.000,00**							**800.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**-**			**80,75 %**	**350.000.000,00**						**-**	**800.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang Jasa dengan kategori baik*	-			Baik Kategori	350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**642.539.400,00**							**2.124.108.598,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**642.539.400,00**							**2.124.108.598,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**85,87 Angka**	**288.667.400,00**						**-**	**471.528.350,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.249.000,00			-	-	-	-	12.891.340,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.741.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.870.380,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.165.360,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.258.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.855.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	7.274.000,00			-	-	-	-	10.670.990,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.584.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.517.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.383.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.040.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.769.690,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.338.000,00			-	-	-	-	10.798.040,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.338.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.798.040,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	132.952.400,00			-	-	-	-	234.069.084,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.132.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.847.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.070.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.073.134,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.128.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.098.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.052.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.076.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	83.569.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.973.950,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	576.000,00			-	-	-	-	1.650.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	576.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.650.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	131.278.000,00			-	-	-	-	201.448.896,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	76.490.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		101.547.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	37.187.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.732.896,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.812.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.090.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	9.789.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.078.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa***	**-**			**73,49 %**	**353.872.000,00**						**-**	**1.652.580.248,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas*	-			90,00 %	223.609.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	1.244.618.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	223.609.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.244.618.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Presentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Secara Elektronik*	-			67,44 %	92.294.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	161.051.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	92.294.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		161.051.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pemenuhan Unsur Kematangan UKPBJ Level Strategis*	-			50,00 %	37.969.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	246.911.148,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	37.969.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		246.911.148,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		PANIRADYA KAISTIMEWAN						**27.165.885.213,00**							**36.801.273.514,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.165.885.213,00**							**36.801.273.514,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**27.165.885.213,00**							**36.801.273.514,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,69 %**	**9.249.226.213,00**						**-**	**8.775.884.714,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	12.253.000,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	19.416.100,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.348.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		8.470.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	3.295.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		6.986.100,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	3.610.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		3.960.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			100 %	8.469.116.063,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	7.815.792.614,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	8.453.643.613,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		7.769.515.614,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.673.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		40.062.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.011.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		1.595.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.788.450,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		4.620.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	-			100 %	13.343.000,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	12.540.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.343.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		12.540.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			100 %	85.357.500,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	264.341.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.725.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		3.971.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11.639.050,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		16.280.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.480.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		13.420.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.055.450,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		21.340.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.678.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		13.860.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.780.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		195.470.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	328.810.000,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	388.630.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.260.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		25.520.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	302.550.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		363.110.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny*	-			100 %	340.346.650,00			-	-	Paniradya Kaistimewan	-	275.165.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	31.982.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		35.310.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	273.183.650,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		230.010.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	35.181.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Paniradya Kaistimewan		9.845.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
2.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi***	**-**			**90 %**	**17.916.659.000,00**						**-**	**28.025.388.800,00**	
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara*	-			100 %	926.249.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY	-	1.578.300.800,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun				5 Dokumen	495.951.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY		992.660.800,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				6 Laporan	430.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY		585.640.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	1.157.676.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	-	1.989.405.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				10 Dokumen	704.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		1.098.075.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				4 Laporan	453.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		891.330.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	*Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang*	-			100 %	4.152.284.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	-	3.001.405.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				12 Dokumen	1.193.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		878.460.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				9 Laporan	814.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		585.640.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				13 Dokumen	1.338.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		951.665.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				9 Laporan	805.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		585.640.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY*	-			100 %	2.153.049.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan	-	6.584.085.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				19 Dokumen	1.104.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan		3.143.450.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				20 Laporan	1.048.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan		3.440.635.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan*	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	-	3.819.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		3.819.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	*Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan*	-			100 %	796.594.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat	-	1.565.125.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan														
			Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	796.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat		1.565.125.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	*Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan*	-			100 %	8.530.807.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	-	9.487.368.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				4 Dokumen	8.530.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		9.487.368.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		SEKRETARIAT DPRD						**294.197.135.656,00**							**173.171.018.480,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**294.197.135.656,00**							**173.171.018.480,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**294.197.135.656,00**							**173.171.018.480,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**89,5 angka**	**225.681.117.550,00**						**-**	**80.787.517.200,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	68.280.350,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY	-	148.291.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	23.164.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		67.557.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	21.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		37.646.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	23.648.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		43.087.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	-			100 %	10.025.014.256,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY	-	12.670.868.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	9.962.187.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		12.516.883.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		68.927.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.169.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		15.090.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	36.157.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		69.967.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	20.890.000,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY	-	31.802.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	20.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		31.802.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-			100 %	386.013.900,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY	-	433.379.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	10.173.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		20.953.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	375.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY		412.425.520,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"*	-			100 %	1.256.771.800,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	1.722.517.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		39.388.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	136.131.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		245.176.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	324.362.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		11.488.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	106.432.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		166.155.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	656.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		1.260.307.360,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel*	-			100 %	158.303.392.874,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	1.183.245.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	121.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				67 Unit	713.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		1.183.245.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	157.468.130.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	4.463.551.364,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	3.721.414.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	1.180.257.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		1.350.015.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	3.283.293.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		2.371.398.640,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	1.328.314.942,00			-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	2.336.303.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		473.544.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	793.159.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		725.589.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				55 Unit	22.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		2.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				274 Unit	322.085.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		295.856.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	145.773.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		839.234.240,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	-			100 %	46.136.056.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	53.411.612.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	45.285.399.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		52.520.367.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				330 Paket	562.438.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		569.019.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	288.218.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		322.226.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	-			100 %	3.692.831.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD	-	5.128.081.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				266 Laporan	2.767.666.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		3.029.634.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	925.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD		2.098.447.520,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY***	**-**			**96 %**	**68.516.018.106,00**						**-**	**92.383.501.280,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD*	-			96 %	8.316.356.906,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	12.003.963.878,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				9 Dokumen	2.035.105.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		3.361.356.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	963.743.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		1.169.850.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			0				128 0	1.511.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		3.566.099.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				22000 Orang	3.805.967.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		3.906.656.998,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"*	-			96 %	920.225.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	2.713.732.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	449.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		564.292.560,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	82.928.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		135.342.480,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	140.614.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		730.413.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	100.766.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		544.820.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	37.423.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		56.229.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	108.706.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		682.633.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	-			96 %	4.531.014.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	1.412.253.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	1.309.981.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		486.873.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	1.073.677.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		308.459.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	1.073.677.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		308.459.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	1.073.677.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		308.459.840,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	-			96 %	13.258.804.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	24.963.903.162,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	4.704.045.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		4.177.660.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				36 Orang	2.554.315.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		1.869.813.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	781.058.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		925.546.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				36 Dokumen	4.973.046.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		6.711.986.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2 Dokumen	246.338.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		11.278.895.722,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses*	-			96 %	8.273.694.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	12.202.736.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	349.579.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		254.023.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	7.924.114.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		11.948.712.880,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%*	-			96 %	134.212.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	492.875.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	134.212.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		492.875.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	-			96 %	33.081.709.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat	-	38.594.036.720,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				35 Dokumen	11.664.386.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		25.222.164.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	21.253.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		35.460.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	652.443.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		2.191.069.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				13 Dokumen	9.848.979.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		5.745.341.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				16 Dokumen	10.894.646.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Masyarakat		5.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**20.197.157.508,00**							**29.221.287.667,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**198.304.000,00**							**294.285.000,00**	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**198.304.000,00**							**294.285.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah***	**-**			**80 %**	**198.304.000,00**						**-**	**294.285.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Tersusunnya laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	-			4 Laporan	198.304.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal	-	294.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				4 Laporan	198.304.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal		294.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**19.998.853.508,00**							**28.927.002.667,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**19.824.124.908,00**							**28.579.362.667,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**95,72 angka**	**17.266.218.188,00**						**-**	**24.330.811.667,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			29 Dokumen	38.364.400,00			-	-	Bapperida DIY	-	112.511.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	12.891.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		37.748.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	9.701.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		28.822.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	15.772.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		45.941.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			117 Dokumen/lap/orang/bulan	15.486.017.638,00			-	-	Bapperida DIY	-	19.635.275.667,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/ Bulan	15.444.299.938,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		19.473.358.667,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	11.914.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		113.747.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8.431.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		13.142.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	21.372.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		35.028.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			6 laporan	12.537.500,00			-	-	Bapperida DIY	-	29.341.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	12.537.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		29.341.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			13 dokumen	43.065.800,00			-	-	Bapperida DIY	-	223.511.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	43.065.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		223.511.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	-			13 paket/dokumen/laporan	576.020.300,00			-	-	Bapperida DIY	-	1.649.601.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.674.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		26.341.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	52.575.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		113.995.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	48.078.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		73.916.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.813.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		77.529.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	13.212.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		21.783.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	342.449.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		1.136.387.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	52.217.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		199.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			9 unit	105.441.000,00			-	-	Bapperida DIY	-	914.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		178.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	75.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		619.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	29.681.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		117.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*	-			6 laporan	538.764.000,00			-	-	Bapperida DIY	-	752.149.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.424.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		16.876.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.020.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		99.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	34.920.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		78.369.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	446.400.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		557.819.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*	-			189 unit	466.007.550,00			-	-	Bapperida DIY	-	1.013.743.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.868.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		50.388.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	173.365.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		388.887.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	10.150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		14.861.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				21 Unit	9.127.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		18.969.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit	64.906.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		94.617.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	135.823.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				71 Unit	33.766.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida DIY		46.021.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan***	**-**			**100 %**	**1.706.153.170,00**						**-**	**3.221.018.000,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	-			4 dokumen	708.915.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY	-	1.709.543.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	70.940.150,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		104.258.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	637.975.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		1.605.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi*	-			21 Laporan	997.238.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY	-	1.511.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				21 Laporan	997.238.020,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		1.511.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)*** ***Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan*** ***Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)*** ***Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan***	**-**			**93 %** **100 %** **94 %** **28,97 %**	**851.753.550,00**						**-**	**1.027.533.000,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"*	-			7 dokumen	585.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	-	677.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	61.624.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		146.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	524.251.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		531.417.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	-			4 dokumen	154.255.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	-	146.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	154.255.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		146.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	-			3 dokumen	111.623.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	-	203.296.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	111.623.550,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		203.296.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**174.728.600,00**							**347.640.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional***	**-**			**80 % 65 %**	**174.728.600,00**						**-**	**347.640.000,00**	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*	-			2 dokumen	45.320.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal	-	62.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	45.320.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal		62.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	-			6 laporan	129.408.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal	-	284.813.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				6 Dokumen	129.408.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal		284.813.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET						**1.178.054.755.191,00**							**1.134.461.750.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.178.054.755.191,00**							**1.134.461.750.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.178.054.755.191,00**							**1.134.461.750.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**65.417.459.389,00**						**-**	**78.072.250.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	9.507.200,00			-	-	Aparatur BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	15.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3.871.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.941.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.694.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		4.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*	-			100 %	63.083.395.639,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	75.043.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ Bulan	63.057.388.139,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		75.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	19.208.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.259.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.539.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*	-			100 %	34.084.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	34.084.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD*	-			100 %	6.369.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	10.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	6.369.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		10.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.*	-			100 %	677.657.050,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	736.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.172.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		12.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	127.264.050,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		155.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.190.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		18.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	39.967.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10.866.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	308.215.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		355.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12000 Dokumen	167.982.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	150.309.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	153.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	150.309.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		153.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	1.074.095.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	1.644.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16.996.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		18.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	314.972.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		925.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	84.527.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		86.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	657.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		615.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.*	-			100 %	382.041.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	414.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.976.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		20.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	209.867.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		235.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	65.198.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		59.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan***	**-**			**100 %**	**1.102.553.828.585,00**						**-**	**1.049.982.500.000,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	-			100 %	1.440.759.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	2.521.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	37.677.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	41.084.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	346.317.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		745.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	897.079.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		1.525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	102.461.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		129.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	16.141.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		12.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabuaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*	-			100 %	19.954.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	32.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		9.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		9.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		9.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				3 Dokumen	4.954.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		5.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait*	-			100 %	72.009.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	89.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	10.539.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		19.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8000 Dokumen	61.470.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		70.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan*	-			100 %	226.226.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	239.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	9.772.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		10.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	18.225.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		21.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	43.169.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		60.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	5.302.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		6.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	4.953.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				130 Orang	12.630.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		13.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				27 Lembaga	132.172.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		120.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi*	-			100 %	1.100.794.879.335,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	1.047.100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				8 Laporan	1.198.823.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	610.007.207.069,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		500.250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	15.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		45.250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	474.588.849.266,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		500.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur***	**-**			**100 %**	**5.547.527.717,00**						**-**	**3.045.000.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD*	-			100 %	5.547.527.717,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	3.045.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	331.960.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		360.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	89.999.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	241.155.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		275.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	28.240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	4.156.996.817,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		1.525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	203.243.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		240.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	495.932.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %**	**4.535.939.500,00**						**-**	**3.362.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	-			100 %	4.535.939.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	3.362.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	3.830.582.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		2.825.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	128.424.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		47.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	227.661.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		360.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	45.670.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	303.602.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA						**2.208.671.700,00**							**2.516.250.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.208.671.700,00**							**2.516.250.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.208.671.700,00**							**2.516.250.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**1.980.280.350,00**						**-**	**2.181.250.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	11.999.750,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	12.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.999.750,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		12.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	13.000.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	13.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		13.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*	-			100 %	68.838.700,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	72.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.998.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		8.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.998.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		6.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		7.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.999.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		28.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		2.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		3.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	98.399.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	61.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	38.498.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		0,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	59.901.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		61.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	1.264.317.300,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	1.476.750.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.580.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		1.750.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	404.959.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		465.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.977.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		45.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	817.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		965.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta*	-			100 %	523.725.600,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	545.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	109.999.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		115.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	175.040.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		180.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	69.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		60.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				116 Unit	168.986.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		190.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Peningkatan Pendapatan Daerah*** ***Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %** **52,88** **undefined**	**228.391.350,00**						**-**	**335.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	-			100 %	228.391.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	335.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	44.159.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		65.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	184.231.450,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		270.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL						**4.227.504.700,00**							**4.738.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.227.504.700,00**							**4.738.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.227.504.700,00**							**4.738.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**3.845.495.700,00**						**-**	**3.948.000.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	9.785.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.785.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	10.865.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.865.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*	-			100 %	357.957.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	158.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.891.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	240.974.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		47.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.428.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		33.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	16.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		24.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.530.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		18.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.684.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		8.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		13.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	140.000.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	53.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		53.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		0,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	2.482.353.900,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	2.832.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.578.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		7.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	763.518.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		790.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119.057.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		135.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.594.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		1.900.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya s*	-			100 %	844.534.800,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	875.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	175.904.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		180.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				204 Unit	330.510.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		345.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		175.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	188.120.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		175.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Peningkatan Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %**	**382.009.000,00**						**-**	**790.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	-			100 %	382.009.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	790.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	156.322.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		90.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	225.687.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		700.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL						**2.212.233.700,00**							**2.513.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.212.233.700,00**							**2.513.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.212.233.700,00**							**2.513.500.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**1.952.413.700,00**						**-**	**2.053.500.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	11.945.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.945.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	13.145.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.145.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*	-			100 %	64.600.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	73.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.913.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		9.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.051.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.993.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		8.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	13.997.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		16.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		9.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.526.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		6.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.120.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		10.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.*	-			100 %	114.207.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	80.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	29.016.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		0,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	85.191.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		80.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	1.107.260.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	1.215.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		5.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	460.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		470.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.660.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		50.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	601.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		690.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	641.255.200,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	655.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	220.448.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		260.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				93 Unit	243.948.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		245.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	127.251.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		95.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				127 Unit	49.608.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		55.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Peningkatan Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %**	**259.820.000,00**						**-**	**460.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	-			100 %	259.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	460.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	23.481.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		75.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	236.339.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		385.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO						**2.447.377.250,00**							**2.985.426.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.447.377.250,00**							**2.985.426.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	**KEUANGAN**						**2.447.377.250,00**							**2.985.426.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**2.127.716.750,00**						**-**	**2.535.426.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	11.279.400,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.279.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	12.229.400,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.229.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*	-			100 %	89.408.350,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	88.426.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.238.750,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		19.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14.189.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	16.865.100,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.208.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		9.426.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.999.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.908.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		5.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		9.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	70.101.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	-	55.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	70.101.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		55.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	1.424.654.700,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	1.799.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.992.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		4.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	626.951.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		770.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	60.111.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		75.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	735.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		950.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	520.043.900,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	565.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	133.103.300,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		180.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	159.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		175.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	107.261.600,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		65.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	119.919.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		145.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Peningkatan Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %**	**319.660.500,00**						**-**	**450.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	-			100 %	319.660.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	-	450.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	82.199.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		85.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	237.461.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		365.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN						**4.278.336.800,00**							**5.148.200.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.278.336.800,00**							**5.148.200.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.278.336.800,00**							**5.148.200.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**3.530.995.450,00**						**-**	**4.143.200.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	11.999.800,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	-	14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.999.800,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	12.999.400,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	-	14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.999.400,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	104.451.350,00			-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	-	109.700.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.993.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		40.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	34.998.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		40.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.717.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		4.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		9.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6.999.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		8.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.842.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		3.200.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		5.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	46.427.000,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	-	28.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	46.427.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		28.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	2.576.863.500,00			-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	-	3.037.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		2.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.066.562.500,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.100.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.001.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		85.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.438.800.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.850.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	778.254.400,00			-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	-	940.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	120.673.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		155.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				141 Unit	411.429.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		450.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		95.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	146.152.400,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		240.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Peningkatan Pendapatan Daerah***	**-**			**52,88 %**	**747.341.350,00**						**-**	**1.005.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	-			100 %	747.341.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur, Masyarakat, Wajib Pajak dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	-	1.005.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	35.807.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur, Masyarakat, Wajib Pajak dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		55.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	711.534.350,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur, Masyarakat, Wajib Pajak dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		950.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**22.344.849.456,00**							**40.434.348.484,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**438.424.000,00**							**793.785.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**438.424.000,00**							**793.785.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY***	**-**			**83 %**	**438.424.000,00**						**-**	**793.785.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	438.424.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	793.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				630 Orang	438.424.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		793.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.906.425.456,00**							**39.640.563.484,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**21.906.425.456,00**							**39.640.563.484,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**87 Angka**	**17.901.362.121,00**						**-**	**20.367.000.000,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.468.050,00			-	-	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	192.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.385.150,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.383.850,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.699.050,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		41.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	15.161.941.271,00			-	-	ASN BKD DIY	-	15.885.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	15.136.100.411,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		15.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.913.260,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.474.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.452.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	20.329.000,00			-	-	ASN BKD DIY	-	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.329.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	229.413.000,00			-	-	ASN BKD DIY	-	1.679.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	52.785.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.071.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.162.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.767.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2.011.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	105.615.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		1.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.891.990.800,00			-	-	ASN BKD DIY	-	1.778.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	19.837.250,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.653.550,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.171.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKD DIY		1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	591.220.000,00			-	-	ASN Pemda DIY	-	806.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.326.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	159.750.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				282 Unit	308.144.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemda DIY		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Keterisian Jabatan Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan***	**-**			**93 % 60 % 88 % 86,96 % 64,90 % 86,59 Angka 95,94 % 29,21 %**	**4.005.063.335,00**						**-**	**19.273.563.484,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			100 %	318.490.835,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	5.661.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	9.168.710,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		146.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	49.663.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		3.950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				515 Dokumen	116.322.700,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	116.108.125,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		625.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				3 Dokumen	27.228.300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN*	-			100 %	396.411.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	1.565.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				200 Dokumen	38.145.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		265.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	56.519.050,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	301.747.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*	-			100 %	3.178.152.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	10.761.261.484,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	876.615.300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	58.355.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	913.534.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		5.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.305.536.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		3.483.610.484,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				10 Orang	5.513.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				120 Orang	18.598.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		132.651.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			100 %	112.008.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY	-	1.286.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	16.048.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				5 Orang	18.290.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		990.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				350 Orang	22.513.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				600 Orang	44.484.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	10.670.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY dan ASN Pemda DIY		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**23.105.560.674,00**							**29.156.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.727.449.000,00**							**2.300.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.727.449.000,00**							**2.300.000.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi***	**-**			**88 %**	**1.727.449.000,00**						**-**	**2.300.000.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	-			100 %	975.049.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY	-	1.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				180 Orang	975.049.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		1.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur lembaga pelaksana keistimewaan*	-			100 %	752.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY	-	800.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan				1 Unit	752.400.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		800.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.378.111.674,00**							**26.856.000.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**21.378.111.674,00**							**26.856.000.000,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,5 Angka**	**14.787.907.624,00**						**-**	**16.491.000.000,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	72.624.000,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	83.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	29.824.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		35.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		20.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	24.800.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		28.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	11.266.462.134,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	12.036.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	11.232.427.334,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		12.000.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.330.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		15.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.705.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		5.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14.999.800,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		16.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	13.730.000,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	14.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	13.730.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		14.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			100 %	18.730.000,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	23.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	16.030.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	2.700.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		5.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	135.166.850,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	213.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.980.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		14.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.580.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		15.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	16.750.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.167.850,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		16.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.689.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		150.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	154.732.500,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	150.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	154.732.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		150.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	2.566.115.440,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	3.255.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		5.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	488.215.440,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		550.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.075.400.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		2.700.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel*	-			100 %	560.346.700,00			-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	-	717.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.358.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		27.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	197.260.700,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		225.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	11.500.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		15.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111.064.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		200.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				300 Unit	216.164.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY		250.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan***	**-**			**100 %**	**6.590.204.050,00**						**-**	**10.365.000.000,00**	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis*	-			100 %	221.481.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY	-	755.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				4 Dokumen	47.955.950,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		55.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				60 Orang	173.525.100,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		700.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	-			100 %	6.368.723.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY	-	9.610.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				4 Dokumen	209.238.900,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY		300.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	115.937.700,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY		110.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				12 Dokumen	1.025.547.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY		1.200.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				301 Orang	5.017.999.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY		8.000.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						**15.427.386.601,00**							**16.572.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.213.653.000,00**							**5.900.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.213.653.000,00**							**5.900.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah***	**-**			**100 %**	**5.213.653.000,00**						**-**	**5.900.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	-			100 %	428.390.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan DIY	-	250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				8 Unit	428.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan DIY		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif*	-			100 %	950.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anjungan DIY	-	1.250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				2 Unit	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Anjungan DIY		1.250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya dukungan penyelenggaran Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			100 %	3.835.263.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Anjungan DIY	-	4.400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah														
			0				3 0	3.835.263.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Anjungan DIY		4.400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.213.733.601,00**							**10.672.000.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**10.213.733.601,00**							**10.672.000.000,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**90,9 Angka**	**10.028.425.001,00**						**-**	**10.052.000.000,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	12.150.000,00			-	-	Banhubda DIY	-	65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		45.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		4.250.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		4.250.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		11.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			100 %	6.030.120.555,00			-	-	Banhubda DIY	-	7.117.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	6.016.179.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		7.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.596.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	13.200.000,00			-	-	Banhubda DIY	-	25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	89.243.988,00			-	-	Banhubda DIY	-	255.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.190.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.166.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Banhubda DIY		85.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.623.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	44.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler*	-			100 %	1.988.419.142,00			-	-	-	-	50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1.971.099.142,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	17.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler*	-			100 %	1.538.831.316,00			-	-	Banhubda DIY	-	1.890.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	308.531.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.218.699.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		1.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	356.460.000,00			-	-	Banhubda DIY	-	650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	350.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Banhubda DIY		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	***Persentase layanan yan diberikan Banhubda DIY***	**-**			**100 %**	**185.308.600,00**						**-**	**620.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya*	-			100 %	185.308.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pimpinan (Eksekutif dan Legislatif), Aparatur Pemerintah DIY, Kementerian/lembaga Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, Diaspora DIY dan Masyarakat Umum di Jabodetabek	-	620.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5 Laporan	113.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pimpinan (Eksekutif dan Legislatif), Aparatur Pemerintah DIY, Kementerian/lembaga Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, Diaspora DIY dan Masyarakat Umum di Jabodetabek		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	71.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pimpinan (Eksekutif dan Legislatif), Aparatur Pemerintah DIY, Kementerian/lembaga Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, Diaspora DIY dan Masyarakat Umum di Jabodetabek		320.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT						**29.000.824.957,00**							**30.456.026.674,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**29.000.824.957,00**							**30.456.026.674,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**29.000.824.957,00**							**30.456.026.674,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**87,2 Angka**	**22.070.475.007,00**						**-**	**21.140.492.424,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	6.949.400,00			-	-	Inspektorat DIY	-	7.399.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.697.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		3.697.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		2.410.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.292.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.292.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	-			100 %	18.766.300.777,00			-	-	Inspektorat DIY	-	17.639.095.594,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	18.753.967.377,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		17.588.787.594,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.316.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		42.975.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.017.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		7.333.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	-			100 %	14.299.400,00			-	-	Inspektorat DIY	-	14.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	14.299.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		14.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-			100 %	394.533.200,00			-	-	ASN Inspektorat DIY	-	432.179.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat DIY		4.970.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				299 Orang	393.883.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat DIY		427.209.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	-			100 %	366.703.000,00			-	-	Inspektorat DIY	-	376.487.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.260.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.604.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	13.676.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		13.676.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	38.241.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		38.241.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.548.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		16.988.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	215.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		215.978.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			100 %	14.800.000,00			-	-	Inspektorat DIY	-	14.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		14.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			100 %	1.590.002.600,00			-	-	Inspektorat DIY	-	1.647.621.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		6.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	344.339.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		344.339.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	29.160.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		29.160.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.213.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.267.872.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	916.886.630,00			-	-	Inspektorat DIY	-	1.008.239.630,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.376.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		37.376.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	308.291.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		355.779.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	254.534.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		286.399.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	142.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		142.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	186.334.180,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		186.334.180,00	INSPEKTORAT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur***	**-**			**100 %**	**6.870.141.050,00**						**-**	**8.752.064.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP*	-			100 %	6.014.184.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	-	7.601.880.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	482.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		563.788.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				244 Laporan	3.733.153.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		4.695.144.150,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				115 Laporan	988.318.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		1.407.445.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				39 Laporan	243.186.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		285.960.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				21 Laporan	544.690.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		615.447.150,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	14.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		19.140.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	8.375.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		14.954.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	-			100 %	855.956.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	-	1.150.183.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	16.818.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		33.109.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				90 Laporan	839.138.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		1.117.074.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan***	**-**			**100 %**	**60.208.900,00**						**-**	**563.470.250,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	-			100 %	27.125.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	-	75.104.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		48.157.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	26.800.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		26.947.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	-			100 %	33.083.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	-	488.366.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 Perangkat Daerah	1.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		8.404.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 Perangkat Daerah	4.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	24.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		292.182.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				38 Perangkat Daerah	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		176.780.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**41.993.000.480,00**							**43.753.245.617,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.596.575.000,00**							**4.392.300.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.596.575.000,00**							**4.392.300.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan***	**-**			**3 Lembaga**	**2.596.575.000,00**						**-**	**4.392.300.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	-			5 Dokumen	2.596.575.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Ormas, Orpol, Ormas Kepemudaan	-	4.392.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				5 Dokumen	2.596.575.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Ormas, Orpol, Ormas Kepemudaan		4.392.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**39.396.425.480,00**							**39.360.945.617,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**39.396.425.480,00**							**39.360.945.617,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**96,97 Angka**	**9.006.926.080,00**						**-**	**14.435.460.617,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	15.200.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	122.219.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		35.115.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		48.568.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		38.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			100 %	6.868.862.280,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	10.814.489.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	6.844.767.280,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		10.675.193.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.095.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		58.770.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		29.282.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		51.244.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	12.049.800,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12.049.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 %	376.754.400,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	872.666.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.467.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		37.334.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	43.664.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		77.579.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.243.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		66.882.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.384.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		50.770.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	285.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		640.101.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	50.000.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			100 %	1.193.440.600,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	1.553.151.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	241.740.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		348.692.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	67.440.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		57.582.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	884.260.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		1.146.877.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			100 %	490.619.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	862.535.617,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46.561.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		43.644.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	183.665.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		372.504.617,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				38 Unit	14.711.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		86.761.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	95.682.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		160.626.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI***	**-**			**30,04 Skor**	**2.255.970.550,00**						**-**	**3.768.095.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			100 %	2.255.970.550,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja	-	3.768.095.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	64.326.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja		98.095.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				38 Orang	47.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja		145.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				3 Dokumen	87.654.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	296.145.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja		475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				38 Orang	1.760.034.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pelajar, Mitra Kerja		2.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI***	**-**			**70,43 Skor**	**11.333.366.500,00**						**-**	**13.023.869.000,00**	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	-			100 %	11.333.366.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol, Mita Kerja	-	13.023.869.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1350 Orang	11.214.926.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol, Mita Kerja		12.396.973.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	118.440.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol, Mita Kerja		626.896.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI***	**-**			**100 Skor**	**76.325.700,00**						**-**	**598.266.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			100 %	76.325.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan	-	598.266.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	12.014.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan		138.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	21.947.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan		274.665.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	42.363.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan		185.251.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI***	**-**			**88,37 Skor**	**682.644.250,00**						**-**	**1.688.325.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			100 %	682.644.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Mitra Kerja	-	1.688.325.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	96.958.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Mitra Kerja		105.282.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				555 Orang	235.546.350,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Mitra Kerja		1.020.393.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	350.139.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mahasiswa, Mitra Kerja		562.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI***	**-**			**79,04 Skor**	**16.041.192.400,00**						**-**	**5.846.930.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			100 %	16.041.192.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mitra Kerja	-	5.846.930.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	2.762.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mitra Kerja		59.810.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				11 Laporan	14.592.053.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mitra Kerja		3.282.098.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				2 Dokumen	1.446.376.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Mitra Kerja		2.505.022.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah DIY Tahun 2026 merupakan tahun ketiga dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes)* atau kompositnya *(impact).* Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target		
	2024	2025	2026 (RPJMD)	RKPD 2026
IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,71	6,52	6,62	6,62
Indeks Kebahagiaan	71,7	73,98	74,55	74,55
Angka Kemiskinan	10,83	10,00-10,50	9,16	9,13-9,90*
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,05	5,3-5,8	5,5-6,0	5,45-6,05*
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	31,74	31,51	32,89	35,42
TPT	3,48	3,12-3,51	3,01-3,31	3,11-3,67*
Inflasi	1.57	3,1-3,8	2-4	2-4
IPM	81,62	81,68	81,97	81,97
Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,9	74,98	75,18	75,18
Indeks Williamson	0,483	0,438	0,435	0,435

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target		
	2024	2025	2026 (RPJMD)	RKPD 2026
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	41,47	40,13	40,18	40,18
Indeks Reformasi Birokrasi	A- (88,15)	A (83,78)	A (84,38)	A (84,38)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA (92,65)	AA (92,80)	AA (93,15)	AA (93,15)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (83,88)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (81,96)	Tinggi (81,96)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (68,44)	Sedang (64,19)	Sedang (64,60)	Sedang (64,60)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84,97*	83,74	84,86	84,86
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,15	108,7	104,29	104,29

** Target tahun 2026 merupakan hasil Kesepakatan Rakortekrenbang*

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5.05	5,3-5,8	5,5-6,0
2	Inflasi (%)	1,28	3,1-3,8	2-4
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	48,36	31,51	35,42
4	Indeks Williamson	0,483	0,438	0,435
5	Angka Kemiskinan	10,40	10,00 – 10,50	9,16
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	41.47	40,13	40,18
7	Indeks Gini	0,435*	0,443 - 0,447	0,420 - 0,430
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	4,7	3,4	3,6

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,25*	5,76	5,95
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,48	3,12-3,51	3,01- 3,31
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,62	81,68	81,97
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,71	6,52	6,62
5	Indeks Kebahagiaan	71,7	73,98	74,55
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,9	74,98	75,18
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A- (88,15)	A (83,78)	A (84,38)
8	SAKIP	AA (92,65)	AA (92,80)	AA (93,15)
9	Harapan Lama Sekolah	15,7	15,76	15,77
10	Angka Harapan Hidup	75,36	75,21	75,24
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,03	88,77	89,78
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,46*	77,67	77,97
13	Indeks Kebebasan	77,76*	74,91	75,06
14	Indeks Kesetaraan	89,21*	87,89	88,04
15	*Total Fertility Rate*	1,81*	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,94	77,38	78,37
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	62,66	60,52	61,51
18	Prevalensi *Stunting*	9,17	12,9	11,8
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,62)	Tinggi (87,31 - 90,57)	Tinggi (81,96)
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang (68,44)	Sedang (64,19)	Sedang (64,60)
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,83	83,74	84,86
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	102,83	108,7	104,29
5	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	115,52	120,50	116,30
6	Indeks Kematangan SPBE	4,53	4,3	3,22
7	Persentase Desa Mandiri	90,56*	69,90	77,55
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,49*	3,8	3,9
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,75	0,8
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	96,81	98,802	99,401

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	399	355	361
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	73,48	76,7	86,3
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	3.268,537	2.641	2.643
14	Perwujudan pola ruang (%)	93,26	94,48	95,74
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	29,6	27,51	30,79
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Urusan Pendidikan			
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,92	9,68	9,7
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	93,22	50,73%	50,74%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	88,06	30,86%	30,87%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	80,28	51,96%	51,97%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	73,14	30,39%	30,40%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	90,36	90,00%	90,01%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	71,77	21,96%	21,97%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	75,66	18,98%	18,99%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	38,81	14,07%	14,08%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	51,14	11,09%	11,10%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,11	36,57%	36,62%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	90,36	51,35%	51,36%
	Urusan Kesehatan			
1	Indeks Keluarga Sehat	0,396	0,39	0,42
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	10,76	11,5	11,3
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96,34	96,32%	96,52%
2	Persentase Warga Negara yang menempati	98,13	97,41%	97,73%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	hunian dengan akses sanitasi layak			
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	99,22	90,63%	95,31%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	99,29	98,77%	98,99%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	95,74	90,72%	95,36%
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY		100%	100 %
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang		81,92%	88,28%
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,97	95,98%	96,14%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	85,15	75%	80%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	70	80%	90%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,4	101,3	101,3
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,71	0,76	0,81
	Urusan Sosial			
1	Prosentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD		100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	38,96%	28,32%	28,44%
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	36,87%	21,51%	28,32%
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	26,33%	26,26%	26,43%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	61,03%	61,03%	61,36%
	Urusan Tenaga Kerja			
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	68%	75%	75%
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	87%	70%	72,50%
3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2630 Perusahaan	2.639 Perusahaan	2.649 Perusahaan
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2750 Perusahaan	2.768 Perusahaan	2.788 Perusahaan
5	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	68%	70%	75%
6	Tingkat produktivitas DIY	57,08 juta/ tenaga kerja	Rp 56,37 juta/ tenaga kerja	Rp 58,78 juta/ tenaga kerja
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	0,54	0,63	0,63
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	19	19%	19%
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	100	95.50%	96.00%
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	23,5	23 tahun	23 tahun
	Urusan Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	95,66	96,4	96,5
2	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	0	3,85%	3,85%
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	84,15	82.41	82.74
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	10,08	9,06	12,68
	Urusan Pertanahan			
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	67,29	68,33%	72,36%
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan		54,74%	56,45%
	Urusan Lingkungan Hidup			
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	27,14%	25,34%	25,66%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	Provinsi			
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	5,49	6,03	5,94
	Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil			
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	96,89	94,00%	94,04%
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%	100%
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	0,66	1,14	1,14
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	4	5 lembaga	6 lembaga
	Urusan Perhubungan			
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY		60,24%	70,50%
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	48,36	59,19%	69,17%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	47,05	61,29%	71,84%
	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	40,54	35.14%	43.24%
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	4,82	1,97	2,02
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Memuaskan	Baik	Baik
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Jumlah koperasi modern	8	9	11
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	1.610	1.550	1.600
3	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	6.118	8.365	10.615
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	275	130	130
5	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	18,887	18,175	18,326
6	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)		4,15	4,35

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	Urusan Penanaman Modal			
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	3,7 Triliun	Rp 3,22 Triliun	Rp 3,42 Triliun
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima		A	A
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*	38	24 medali	26 medali
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	66,15	65,63	65,65
3	Persentase pemuda bekerja	72,17	64,84%	66,34%
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	Peringkat 4 besar (Pra-POPNAS)	peringkat8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	Peringkat 9 besar	Peringkat 6 besar	Peringkat 6 besar
	Urusan Statistik			
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	76,2	75%	80%
	Urusan Persandian			
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	643	631	632
	Urusan Kebudayaan			
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	428	434	436
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	262	282	284
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	240	250	252
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,27	6,09%	7,19%
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	15 event	16 *event*	17 event
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	385 lembaga	395 lembaga	405 lembaga
	Urusan Perpustakaan			
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	44,14	23%	24%
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	59,23	51%	52%
	Urusan Kearsipan			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	70,01	51,25%	51,50%
	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	368.122 juta rupiah	371350 juta rupiah	374914 juta rupia

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2745013 juta rupiah	2305813 juta rupiah	2318756 juta rupiah
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	36 juta rupiah / tahun	36 juta rupiah/tahun	36 juta rupiah /tahun
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	198 juta rupiah / tahun	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah /tahun
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	58,76	46,39	50,45
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	5670.87	5822,92	5822,92
	Urusan Pariwisata			
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2,18	2.52 hari	2.57 hari
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan	1,50	1.57 hari	1.66 hari
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara ($)	558,96	($) 600	($) 650
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	2.372.334	Rp2.500.000	Rp2.700.000
7	*Total Yield* (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	19,03	20 T	25 T
	Urusan Pertanian			
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	100,5	0,21%	0,21%
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.191.963	8.242.042 juta rupiah	8.303.8 58 juta rupiah
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	2,416	3,99%	5,96%
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	2,386	1,98%	1,98%
	Urusan Kehutanan			
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	3,5%	4,61%	4,82%
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	12,29%	5%	5%
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	100%	92,76%	94,33 %
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99	99,99%	99,99 %
2	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,23	9,28%	9,33%
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka	<20	< 20%	< 20%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	Tanah			
	Urusan Perdagangan			
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,05	8,44%	8,49 %
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	10,1	5,38%	5,43 %
	Urusan Perindustrian			
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	11,87	12,20%	12,25%
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	10,62	3,00%	3,50%
	Urusan Transmigrasi			
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi		90%	90%
	Sekretariat Dewan			
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	116,66	96%	96,50%
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	92,81	84%	85%
	Sekretariat Daerah			
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%	100%
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%	100%
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	42,85	60%	80%
4	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	160	80%	90%
5	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	208,19	100%	100%
6	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100%	100%
7	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100	100%	100%
8	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100	100%	100%
9	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	100	94,6%	94,6%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
10	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	100	86,67%	93,33 %
11	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	90,95	89,20	89,30
12	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	99,53	90,2	90,3
13	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	50	60%	80%
14	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	55,36	62,37%	78,55%
15	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	72,34	69,49%	74,22%
16	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,64	86,88	87,19
17	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,64	86.88	87.19
	Perencanaan Pembangunan			
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	98,11	87,50%	89,29%
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	99,21	88,89%	89,68%
	Keuangan			
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	9.378.609.475	Rp9.703.109.475	Rp10.003.409.475
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100	100%	100%
	Kepegawaian			
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	85,13	63.09	67.09
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	80,56	70.73%	74.00%
	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	93,45	91,5%	92%
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	82,53	16%	17%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2024	2025	2026
	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	81,37	75%	80%
	Penghubung Daerah			
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	92,68	88%	88,5%
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	92,83	88 angkaindeks	88,5 angka indeks
	Inspektorat Daerah			
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	91,69	92%	92,5%
2	Indeks Penilaian integritas	77,3	73	73,5
3	Nilai Kapabilitas APIP	3	level 3	level 3
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	77,76	74,34	74,35
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	79,55	73,57	73,58

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027 dan pelaksanaan tahun kedua dari tahapan periode lima tahunan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini telah melalui berbagai tahapan penyempurnaan dari berbagai masukan yang telah diberikan oleh Masyarakat, Akademisi, Pimpinan Daerah, dan juga Pemerintah Pusat baik melalui forum Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah, forum Musrenbang, dan Forum Fasilitasi RKPD Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD DIY Tahun Anggaran 2026, serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Yogyakarta, 9 Juli 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hary Setiawan, S.H., M.H.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAPPERIDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset,
dan Inovasi Daerah

ꦥꦫꦶꦫꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦥꦩꦧꦁꦤꦤ꧀ꦫꦶꦱꦼꦠꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦄꦶꦤꦺꦴꦥꦱꦶꦢꦂꦂꦃ

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telepon (0274)589583 Faxsimile (0274) 586712
Website:www.bapperida.jogjaprov.go.id
e-mail : bapperida@.jogjaprov.go.id